



**PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH**

(RPJMD)

**PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2016-2021**



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT





PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2018

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016 – 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Bappenas Nomor 050/4936/SJ dan Nomor 0430/M.PPN/12/2016 tentang Penyelarasan RPJMD dengan RPJMN 2015 – 2019, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta untuk menempatkan peran strategis BUMD dengan target yang jelas dalam RPJMD Tahun 2016-2021, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;
- f

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

dan

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016-2021.

Pasal I

Ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 126), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Dokumen RPJMD Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
 - c. BAB III : Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah
 - d. BAB IV : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis
 - e. BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
 - f. BAB VI : Strategi dan Arah Kebijakan
 - g. BAB VII : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah.
 - h. BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
 - i. BAB IX : Penutup

- (2) Mengubah substansi/materi BAB I, BAB II, BAB III, BAB IV, BAB V, BAB VI, BAB VII, BAB VIII pada Lampiran Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

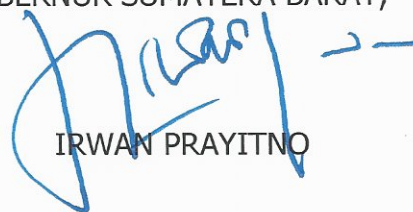
Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan pengaturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 5 Februari 2018

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
Pada tanggal 5 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT



ALI ASMAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2018 NOMOR
144.....

P E N J E L A S A N
A T A S
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016 - 2021

I. UMUM

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang hirarki perencanaan, proses perencanaan, mekanisme perencanaan, isi rencana, waktu pelaksanaan serta stakeholder perencanaan pembangunan pada setiap tingkatan yakni nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Selanjutnya, undang-undang tersebut juga mengamanatkan tentang perlunya dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan yang telah atau sedang dijalankan untuk dapat mengetahui tingkat capaian pelaksanaan pembangunan berikut masukan kebijakan dan program yang perlu dilakukan untuk menjamin suksesnya pelaksanaan rencana pada periode yang tersisa.

Perencanaan pembangunan lima tahunan Provinsi Sumatera Barat yang sedang dilaksanakan adalah *Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)* Tahap III dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Periode 2005-2025. RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 tersebut berisikan sepuluh prioritas untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada. Kesepuluh prioritas tersebut adalah sebagai berikut: prioritas Pembangunan Mental Pengamalan Agama dan ABS-SBK Dalam Kehidupan Masyarakat, prioritas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan, prioritas Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan, prioritas Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat, prioritas Peningkatan Produksi Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional dan Pengembangan Agribisnis, prioritas Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Peningkatan Investasi, prioritas Peningkatan Pemanfaatan Potensi Kemaritiman dan Kelautan, prioritas Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran serta Penanganan Daerah Tertinggal, prioritas Pengembangan Sumber Energi Baru dan Terbarukan serta Pembangunan Infrastruktur, prioritas Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana.

Pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 tersebut memasuki tahun kedua, namun dengan adanya perubahan kebijakan nasional maka kebijakan daerah yang telah direncanakan harus disesuaikan kembali dengan perubahan kebijakan dimaksud. Perubahan kebijakan nasional meliputi antara lain perubahan kebijakan nasional di bidang pengalihan kewenangan dari kabupaten/kota ke provinsi di bidang pendidikan, kehutanan, perikanan dan kelautan, pertambangan dan energi, serta adanya perubahan struktur organisasi. f

Perubahan kebijakan tersebut membawa dampak terhadap indikator capaian pembangunan, yang selanjutnya untuk sisa tahun rencana perlu dilakukan penyesuaian kembali capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang ditetapkan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta visi, misi, tujuan, sasaran dan program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Berdasarkan evaluasi tersebut di atas, serta dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 144

f

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
 NOMOR : 1 TAHUN 2018
 TANGGAL : 5 FEBRUARI 2018
 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 PERATURAN DAERAH NOMOR 6
 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA
 PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
 DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
 TAHUN 2016-2021

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR GRAFIK	x
DAFTAR DIAGRAM	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. LATAR BELAKANG	I-1
1.2. DASAR HUKUM	I-2
1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN	I-4
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	I-5
1.5. MAKSUD DAN TUJUAN	I-6
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	
2.1. ASPEK GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFI	II-1
2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	II-23
2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM	II-40
2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH	II-74
BAB III. GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
3.1 KINERJA KEUANGAN DAERAH 2010-2015	III-1
3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD	III-1
3.1.2 Neraca Daerah	III-4
3.2 KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 2010-2015	III-6
3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran	III-6
3.2.2 Analisis Pembiayaan	III-8
3.3 KERANGKA PENDANAAN	III-10
3.3.1 Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	III-10
3.3.2 Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Tahun 2016-2021	III-11
3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan	III-16
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH	IV-1
4.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	IV-1
4.2 ISU STRATEGIS	IV-7
4.3 KETERKAITAN DENGAN DOKUMEN LAINNYA	IV-12
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	
5.1. VISI RPJMD 2016-2021	V-1
5.2. MISI	V-2

5.3.	TUJUAN DAN SASARAN	V-2
5.3.1	Tujuan Umum	V-2
5.3.2.	Tujuan Pembangunan Menurut Misi	V-6
5.3.3.	Sasaran Pembangunan Menurut Misi	V-7
BAB VI	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	VI-1
6.1.	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN MENURUT TUJUAN DAN SASARAN	VI-1
6.2.	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	VI-21
6.3.	HUBUNGAN ANTARA SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	VI-23
6.4.	PELAKSANAAN ARAH KEBIJAKAN TAHUNAN	VI-39
6.3.1	Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2016	VI-39
6.3.2.	Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2017	VI-39
6.3.3.	Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2018	VI-39
6.3.4.	Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2019	VI-39
6.3.5.	Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2020	VI-39
6.3.6	Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2021	VI-40
BAB VII	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	VII-1
7.1	KERANGKA PENDANAAN	VII-1
7.2.	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	VII-2
7.3.	PENYELARASAN RPJMN 2015-2019 DENGAN RPJMD PROVINSI SUMATERA BARAT 2016-2021	VII-4
7.4.	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BERDIMENSI KEWILAYAHAN	VII-5
7.5.	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN LINTAS PEMERINTAH DAERAH	VII-19
BAB VIII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	VIII-1
8.1.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	VIII-1
8.2.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	VIII-2
BAB IX	PENUTUP	IX-1
10.1.	PEDOMAN TRANSISI	IX-1
10.2.	KAIDAH PELAKSANAAN	IX-1
10.3.	PENGENDALIAN DAN EVALUASI	IX-2

DAFTAR TABEL

	Halaman	
Tabel 2.1	Karakteristik Kabupaten/Kotan se-Sumatera Barat	II – 2
Tabel 2.2	: Luas Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat	II –7
Tabel 2.3	: Produksi dan Produktivitas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura di Sumatera Barat Tahun 2010 – 2015	II – 11
Tabel 2.4	: Luas Tanam dan Produksi Beberapa Komoditi Perkebunan di Sumatera Barat Tahun 2010 – 2015	II – 11
Tabel 2.5	: Perkembangan Produksi Perikanan di Sumatera Barat Tahun 2010 – 2015 (Ton)	II – 12
Tabel 2.6	: Jenis Industri Pengolahan Sumatera Barat	II – 14
Tabel 2.7	: Sebaran Terumbu Karang di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015	II – 15
Tabel 2.8	: Sebaran Hutan Bakau di Sumatera Barat Tahun 2015	II – 15
Tabel 2.9	: Perkembangan IKM Sumatera Barat Tahun 2010 – 2015	II– 17
Tabel 2.10	: Nilai Ekspor Non Migas Sumatera Barat Tahun 2011 – 2015	II – 18
Tabel 2.11	: Pengawasan Barang Bertanda SNI, Label, MKG dan Lain – lain Tahun 2011 – 2015	II – 19
Tabel 2.12	: Wilayah Daerah Rawan Bencana di Provinsi Sumatera Barat	II –20
Tabel 2.13	: Jumlah Penduduk Sumatera Barat Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2010 – 2015	II – 21
Tabel 2.14	: Struktur Penduduk Provinsi Sumatewra Barat Menurut Jenis Kelamin (Jiwa)	II – 21
Tabel 2.15	: Jumlah Penduduk se Sumatera Tahun 2011 – 2015 (Orang)	II – 22
Tabel 2.16	: Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 – 2015	II – 24
Tabel 2.17	Laju Perumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010 – 2015 (Persen)	II – 24
Tabel 2.18	: Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi se Sumatera Tahun 2011 – 2015	II– 25
Tabel 2.19	: PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku di Provinsi se Sumatera Tahun 2011 – 2015 (Rp Juta)	II– 25
Tabel 2.20	: Struktur Ekonomi Sumatera Barat Tahun 2010 – 2015 (Persen)	II – 25
Tabel 2.21	: Pertumbuhan Ekonomi dan Struktur Ekonomi Menurut Penggunaan di Sumatera Barat, Tahun 2013 – 2015	II – 26
Tabel 2.22	: Laju Inflasi Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2010 – 2015 (%)	II – 27
Tabel 2.23	: Perkembangan Kesejahteraan Sosial di Bidang Kesehatan di Sumatera Barat Tahun 2010 – 2015 (%)	II – 28
Tabel 2.24	: Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Barat Maret 2010 – September 2015	II –29
Tabel 2.25	: Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah di Provinsi Sumatera Barat Kondisi Maret 2012 – September 2015	II – 31
Tabel 2.26	: Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	II – 32

Tabel 2.27	: Status Kesejahteraan di Sumatera Barat Menurut Jumlah Rumah Tangga dan Individu	II – 32
Tabel 2.28	: Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Sumatera Barat Tahun 2015	II – 34
Tabel 2.29	: Perkembangan Group Kesenian, Gedung Kesenian, Klub Olahraga dan Gedung Olahraga Tahun 2012 – 2015	II – 36
Tabel 2.30	: Gambaran Umum Pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Provinsi Sumatera Barat	II – 37
Tabel 2.31	: Perkembangan Pendidikan Dasar di Sumatera Barat Tahun 2010 – 2015	II – 41
Tabel 2.32	: Perkembangan Pendidikan Menengah di Sumatera Barat Tahun 2010 – 2015	II – 41
Tabel 2.33	: Perkembangan Angka Putus Sekolah di Sumatera Barat Tahun 2010 – 2015	II – 43
Tabel 2.34	: Angka Kelulusan dan Angka Melanjutkan Per Jenjang Pendidikan di Sumatera Barat Tahun 2010 – 2015	II – 43
Tabel 2.35	: Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015	II – 44
Tabel 2.36	: Perkembangan Indikator Rasio Kesehatan di Sumatera Barat Tahun 2010 – 2015	II – 45
Tabel 2.37	: Perkembangan Indikator Rasio Dokter Per Satuan Penduduk di Sumatera Barat Tahun 2010 – 2015	II – 47
Tabel 2.38	: Perkembangan Indikator Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk di Sumatera Barat Tahun 2010 – 2015	II – 47
Tabel 2.39	: Perkembangan Indikator Cakupan Kesehatan di Sumatera Barat Tahun 2010 – 2015	II – 48
Tabel 2.40	: Perkembangan Indikator Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 – 2015	II – 52
Tabel 2.41	: Perkembangan Indikator Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 – 2015	II – 53
Tabel 2.42	: Perkembangan Indikator Urusan Wajib Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 – 2015	II – 53
Tabel 2.43	: Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan	II – 54
Tabel 2.44	: Perkembangan Indikator Urusan Wajib Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 – 2015	II – 54
Tabel 2.45	: Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Kondisi Agustus 2011 – 2015 di Provinsi Sumatera Barat (Ribu Orang)	II – 56
Tabel 2.46	: Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama Di Provinsi Sumatera Barat Kondisi Agustus 2011 – Agustus 2015 (Ribu Orang)	II – 57
Tabel 2.47	: Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja Per Minggu di Sumatera Barat Kondisi Agustus 2011 – 2015 (Persen)	II – 57
Tabel 2.48	: Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan di Sumatera Barat Kondisi Agustus 2011 – 2015 (persen)	II – 58

Tabel 2.49	: Tingkat Pengangguran Terbuka Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan di Sumatera Barat Kondisi Agustus 2011-Agustus 2015 (Persen)	II-58
Tabel 2.50	: Perkembangan Indikator Urusan Wajib Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015	II-59
Tabel 2.51	: Perkembangan Indikator Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015	II-60
Tabel 2.52	: Perkembangan Indikator Urusan Wajib Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015	II-60
Tabel 2.53	: Perkembangan Indikator Urusan Wajib Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015	II-61
Tabel 2.54	: Perkembangan Indikator Urusan Wajib Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015	II-61
Tabel 2.55	: Perkembangan Indikator Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015	II-62
Tabel 2.56	: Perkembangan Indikator Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015	II-62
Tabel 2.57	: Perkembangan Indikator Urusan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015	II-63
Tabel 2.58	: Perkembangan Indikator Urusan Wajib Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2015	II-64
Tabel 2.59	: Perkembangan Sistem Komunikasi dan Informasi Tahun 2010-2015	II-65
Tabel 2.60	: Hasil Peningkatan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi	II-66
Tabel 2.61	: Perkembangan Indikator Urusan Wajib Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah Provinsi Sumatera Barat	II-67
Tabel 2.62	: Perkembangan Indikator Urusan Wajib Penanaman Modal Tahun 2010-2015	II-67
Tabel 2.63	: Perkembangan Indikator Urusan Wajib Kepemudaan Olah Raga Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015	II-68
Tabel 2.64	: Perkembangan Indikator Urusan Wajib Statistik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015	II-69
Tabel 2.65	: Perkembangan Indikator Urusan Wajib Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015	II-69
Tabel 2.66	: Perkembangan Indikator Urusan Wajib Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015	II-69
Tabel 2.67	: Perkembangan Indikator Urusan Wajib Kearsipan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015	II-70
Tabel 2.68	: Perkembangan Indikator Urusan Wajib Pilihan Kelautan Dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015	II-70
Tabel 2.69	: Perkembangan Indikator Urusan Pilihan Pariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015	II-71
Tabel 2.70	: Wisman Yang Berkunjung Ke Sumatera Barat Menurut Kebangsaan Tahun 2014-2015 (Orang)	II-71
Tabel 2.71	: Perkembangan Indikator Urusan Pilihan Pertanian Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015	II-72

Tabel 2.72	: Perkembangan Indikator Urusan Pilihan Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015	II-73
Tabel 2.73	: Perkembangan Indikator Urusan Pilihan Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015	II-73
Tabel 2.74	: Perkembangan Indikator Urusan Pilihan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015	II-73
Tabel 2.75	: Perkembangan Indikator Urusan Pilihan Perindustrian Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015	II-74
Tabel 2.76	: Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan menurut Kelompok Komoditas di Sumatera Barat Tahun 2010-2015	II-74
Tabel 2.77	: Produktifitas Total Daerah Per Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat	II-75
Tabel 2.78	: Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015	II-76
Tabel 2.79	: Nilai Tukar Petani (NTP) dan Sub Sektor Pendukungnya di Sumatera Barat Tahun 2011-2015	II-76
Tabel 2.80	: Panjang Jalan dan Kemantapan Jalan di Sumatera Barat menurut statusnya Tahun 2010-2015	II-77
Tabel 2.81	: Jumlah Peristiwa Kejahatan yang Dilaporkan menurut jenis kesejahteraan di Sumatera Barat, 2010-2015	II-78
Tabel 2.82	: Lamanya Proses Perizinan pada BKPM dan PPT Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2015	II-79
Tabel 2.83	: Rasio Lulusan Sarjana Tenaga Kerja di Sumatera Barat Tahun 2010-2015	II-80
Tabel 2.84	: Rasio Ketergantungan Penduduk Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015	II-80
Tabel 3.1	: Rata-rata Pertumbuhan Trealisasi Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015	III – 2
Tabel 3.2	: Proporsi Realisasi Belanja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015	III – 4
Tabel 3.3	: Rata-rata Pertumbuhan Neraca Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015	III – 5
Tabel 3.4	: Analisis Rasio Keuangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015	III – 6
Tabel 3.5	: Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015	III – 7
Tabel 3.6	: Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015	III – 7
Tabel 3.7	: Penutupan Defisit Rill Anggaran Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015	III – 8
Tabel 3.8	: Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Provinsi Sumatera Barat	III – 9
Tabel 3.9	: Rfealisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015	III – 9
Tabel 3.10	: Sisa Lebih (riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015	III – 9
Tabel 3.11	: Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015	III – 10
Tabel 3.12	: Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021	III – 13

Tabel 3.13	: Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021	III – 15
Tabel 3.14	: Proyeksi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2016-2021	III – 16
Tabel 3.15	: Proyeksi Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021	III – 16
Tabel 3.16	: Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021	III – 17
Tabel 3.17	: Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2016-2021	III – 17
Tabel 3.18	: Kerangka Pendanaan Alokasi Kapasitas Riil Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat	III – 18
Tabel 5.1	: Proyeksi Perkembangan Ekonomi Sumatera Barat	V–3
Tabel 5.2	: Proyeksi Perkembangan Kesejahteraan Sosial Sumatera Barat Tahun 2016-2021	V–3
Tabel 5.3	: Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota se Sumatera Barat (%)	V–4
Tabel 5.4	: Proyeksi PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun 2016-2021 (Rp. Juta)	V–4
Tabel 5.5	: Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun 2016-2021 (%)	V–5
Tabel 5.6	: Proyeksi Pengangguran Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun 2016-2021 (%)	V–5
Tabel 5.7	: Hubungan Antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran	V–9
Tabel 5.8	: Target dan Indikator Kinerja RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021	V–12
Tabel 6.1	: Hubungan Antara Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	VI–24
Tabel 6.2	: Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021	VI–63
Tabel 7.1	: Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 (Dalam Rp.)	VII–1
Tabel 7.2	: Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat	VII–5
Tabel 7.3	: Sistem Perkotaan Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan RTRW 2012-2032	VII–6
Tabel 7.4	: Luas dan Perubahan Luas Hutan Lindung Provinsi Sumatera Barat Menurut RTRW 2012-2032 per Kabupaten/Kota	VII–6
Tabel 7.5	: Sebaran Kawasan Perlindungan Setempat Provinsi Sumatera Barat Dirinci Menurut Kabupaten/Kota	VII–7
Tabel 7.6	: Koridor Pengembangan Ekonomi Sumatera Barat	VII–11
Tabel 7.7	: Kawasan Pengembangan Sentra Produksi Tanaman Pangan dan Holtikultura	VII–13
Tabel 7.8	: Kawasan Pengembangan Komoditi Unggulan Perkebunan	VII–13
Tabel 7.9	: Kawasan Pengembangan Komoditi Peternakan	VII–14
Tabel 7.10	: Kawasan Pengembangan dan Komoditi Perikanan Budidaya	VII–15
Tabel 7.11	: Kawasan Pengembangan Agribisnis	VII–15
Tabel 7.12	: Pengembangan Kawasan dan Sentra Industri di Provinsi Sumatera Barat	VII–16

Tabel 7.13	: Wilayah Pengembangan Pariwisata	VII-17
Tabel 7.14	: Kabupaten/Kota dan Jumlah Yang berbatasan dengan Provinsi Tetangga	VII-19
Tabel 7.15	: Gerakan Terpadu Prioritas Pembangunan Sumatera Barat Tahun 2016-2021	VII-20
Tabel 7.16	: Program Satuan Kerja Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Gerakan Terpadu	VII-20
Tabel 7.17	: Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Provinsi Sumatera Barat	VII-25
Tabel 8.1	: Indikator Kinerja Utama Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021	VIII - 1
Tabel 8.2	: Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat	VIII - 4

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 : Hubungan RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Lainnya	I-5
Gambar 2.1. : Peta Administrasi Provinsi Sumatera Barat	II-1
Gambar 2.2 : Peta Geologi Provinsi Sumatera Barat	II – 5
Gambar 2.3 : Pengembangan Wilayah Koridor Ekonomi di Sumatera Barat	II – 10
Gambar 2.4 : Produksi Tiga Jenis Komoditi Bernilai ekonomis Utama Perikanan Tangkap di Perairan Laut Sumatera Barat Tahun 2015	II – 13
Gambar 2.5 : Komposisi Sumatera Barat Menurut kelompok Umur Tahun 2015	II-22
Gambar 2.6 : Proyeksi Penduduk Sumatera Barat Menurut Kelompok Umur Tahun 2015-2035	II-23

DAFTAR GRAFIK

		Halaman
Grafik 2.1.	Pertumbuhan Industri Pengolahan Sumatera Barat Dibandingkan Industri Pengolahan Nasional (%)	II – 17
Grafik 2.2	Pertumbuhan Sektor Perdagangan Sumatera Barat Dibandingkan Sektor Perdagangan Nasional (%) Tahun 2011 – 2015	II – 18
Grafik 2.3	Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Barat Menurut Daerah Kondisi Maret dan September 2011 – 2015	II – 30

DAFTAR DIAGRAM

	Halaman
Diagram 2.1. : Gini Ratio Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2010-2015	II – 27
Diagram 2.2. : Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Barat Kondisi Maret dan September 2011-2015	II – 29
Diagram 2.3. : Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Menurut Daerah Kondisi Maret dan September 2011-2015	II – 30
Diagram 2.4 : Perbandingan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Barat Dengan Nasional Kondisi September 2010-2015	II – 30
Diagram 2.5 : Perkembangan Persentase Tingkat Pengangguran di Provinsi Sumatera Barat Kondisi Februari dan Agustus 2010-2015	II – 55
Diagram 2.6 : Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Kondisi Agustus 2015 di Sumatera Barat	II – 56
Diagram 2.7 : Perbandingan Persentase Tingkat Pengangguran di Provinsi Sumatera Barat Dengan Nasional Kondisi Agustus 2010-2015	II - 58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 merujuk kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Seluruh aturan tersebut mengamanatkan bahwa perencanaan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

Pasal 264 (ayat 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa paling lambat 6 (enam) bulan setelah pelantikan Gubernur/Wakil Gubernur terpilih harus menetapkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Prof. DR. Irwan Prayitno, MSc sebagai Gubernur Sumatera Barat dan Drs. Nasrul Abit sebagai Wakil Gubernur Sumatera Barat telah dilantik pada tanggal 12 Februari 2016 untuk masa jabatan Tahun 2016-2021. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 264 tersebut, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyusun RPJMD Tahun 2016-2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Proses penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 telah memperhatikan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi Sumatera Barat, serta masukan dari beberapa kali konsultasi publik dan *Focus Group Discussion (FGD)*. Untuk implementasinya RPJMD ini selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang menjadi pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya. Oleh sebab itu, dokumen ini menjadi pedoman bagi SKPD di Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, serta pedoman bagi seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah.

RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 disusun berdasarkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur serta memuat tujuan, sasaran, strategi pembangunan dan arah kebijakan umum, prioritas pembangunan dan program Perangkat Daerah serta lintas Perangkat Daerah.

Selain itu, dalam rangka memenuhi amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 65 ayat (1) huruf c menyatakan bahwa kepala daerah mempunyai tugas menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD.

Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat setelah dilantik telah menyusun, menyampaikan, melaksanakan pembahasan dan menyepakati dengan DPRD dalam bentuk Peraturan Daerah No.6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tersebut

merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah, keuangan daerah serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat pagu indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. RPJMD disusun mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 dan Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yang merupakan kelanjutan dan kesinambungan dari periode Tahun 2010-2015.

Dasar hukum penyusunan RPJMD tersebut di atas mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019. Seain itu, sambil menunggu ditetapkannya berbagai peraturan perundang-undangan sebagai petunjuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dimaksud, maka Menteri Dalam Negeri menerbitkan Surat Edaran Nomor 050/795/SJ tanggal 4 Maret 2016 tentang Penyusunan RPJMD dan RKPD Tahun 2017, yang menyatakan bahwa daerah yang telah melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015, diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) perodesasi 2016-2021 dengan mempedomani Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam proses pembahasan dan penetapan dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 pada bulan Agustus 2016 tersebut, belum sepenuhnya mempertimbangkan pengalihan kewenangan dari kabupaten/kota ke provinsi dan provinsi ke kab/kota, terjadinya perubahan alokasi pendanaan dan belanja serta terjadinya perubahan OPD, tugas dan fungsi OPD, sebagai akibat terlambatnya penetapan dan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Sedangkan penetapan struktur organisasi perangkat daerah Provinsi Sumatera Barat dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat baru ditetapkan pada bulan Oktober Tahun 2016.

Oleh karena terjadinya perubahan kebijakan nasional tersebut dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 61 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Kepala Daerah mengajukan perubahan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan indikasi rencana program prioritas yang disertai dengan kebutuhan pendanaan kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan.

1.2. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
14. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Bappenas No.050/4936/SJ dan No.0430/M.PPN/12/2016 ttg Penyelarasan RPJMD dengan RPJMN 2015 – 2019.

15. Inmendagri No.061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
16. Rekomendasi BPK-RI terhadap efektivitas tata kelola Pemerintah Daerah dalam pembinaan BUMD, menyarankan agar peran strategis BUMD dimasukkan dalam Perubahan RPJMD 2016-2021.
17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat

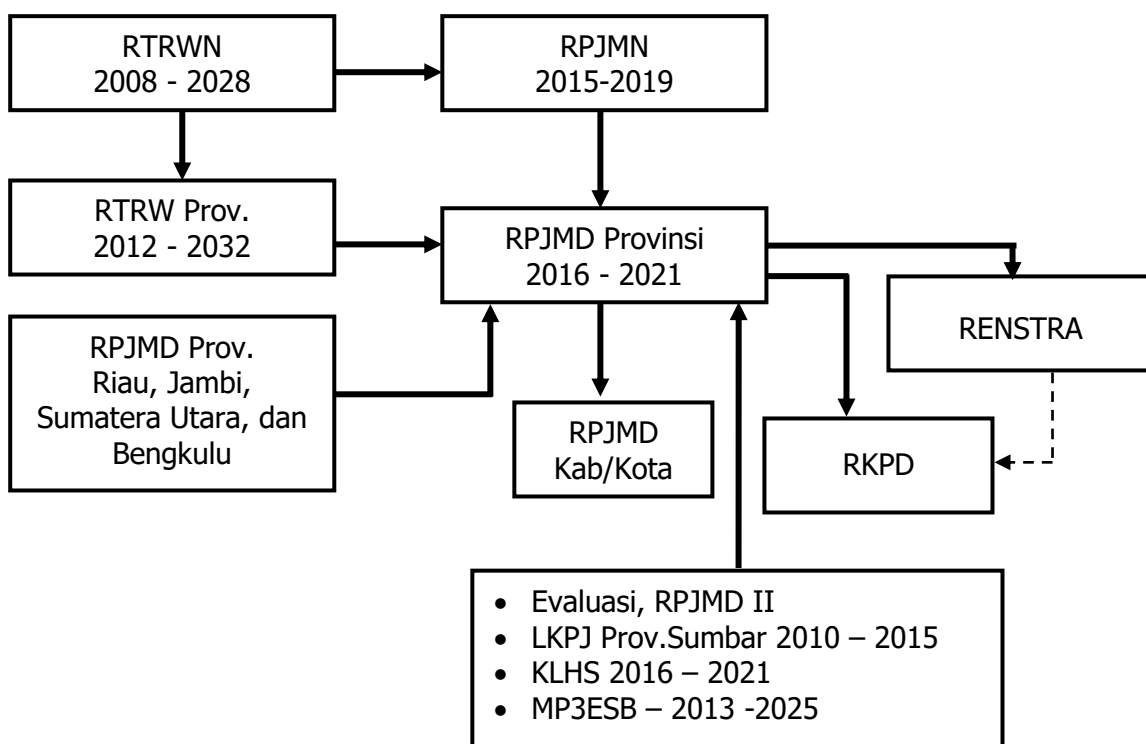
1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

RPJMD merupakan satu kesatuan yang utuh dari manajemen pembangunan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, khususnya dalam menjalankan program pembangunan yang telah tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan. Hubungan antara RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016–2021 dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1. Hubungan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
2. RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 berpedoman pada RPJPD 2005–2025 dan RPJMN Tahun 2015–2019, serta mempertimbangkan azas keberlanjutan dengan program-program pembangunan sebagaimana dimuat dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 – 2015, serta memperhatikan RPJMD Provinsi Riau, dan Provinsi Sumatera Utara, serta rancangan RPJMD Provinsi Jambi dan Provinsi Bengkulu.
3. RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 telah mengintegrasikan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat (Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012) dan mempedomani Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional).
4. RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra OPD). Renstra OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran teknis operasional dari RPJMD ke dalam arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan, bidang dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh OPD di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

5. RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dalam rangka penyalarsan pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
6. Pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, pada setiap tahunnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah, yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja OPD.
7. Beberapa dokumen perencanaan lainnya, antara lain:
 - a. Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021.
 - b. Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Sumatera Barat Tahun 2013 – 2025.

Gambar 1.1.
Hubungan RPJMD Dengan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah Lainnya



1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 terdiri dari 9 (sembilan) Bab sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
- BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU SRATEGIS DAERAH

BAB V	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
BAB VI	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VII	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
BAB VIII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAB IX	PENUTUP

1.5. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 adalah untuk dapat memberikan arah dan pedoman bagi pelaku pembangunan dalam pelaksanaan proses dan tahapan pembangunan untuk mencapai tujuan, dan sasaran pembangunan yang telah dirumuskan dan ditetapkan.

Tujuan penyusunan perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021, antara lain :

1. Menjabarkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur dengan memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan program pembangunan daerah jangka menengah;
2. Sebagai pedoman untuk penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Perubahan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah;
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan dan Perubahan RPJMD dan RKPD serta perencanaan penganggaran Kabupaten/Kota se Sumatera Barat;
4. Menindaklanjuti Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Bappenas No.050/4936/SJ dan Nomor 0430/M.PPN/12/2016 tentang Penyelarasan RPJMD dengan RPJMN 2015 – 2019.
5. Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
6. Rekomendasi BPK-RI terhadap efektivitas tata kelola Pemerintah Daerah dalam pembinaan BUMD, menyarankan agar peran strategis BUMD dimasukkan dalam Perubahan RPJMD 2016-2021.

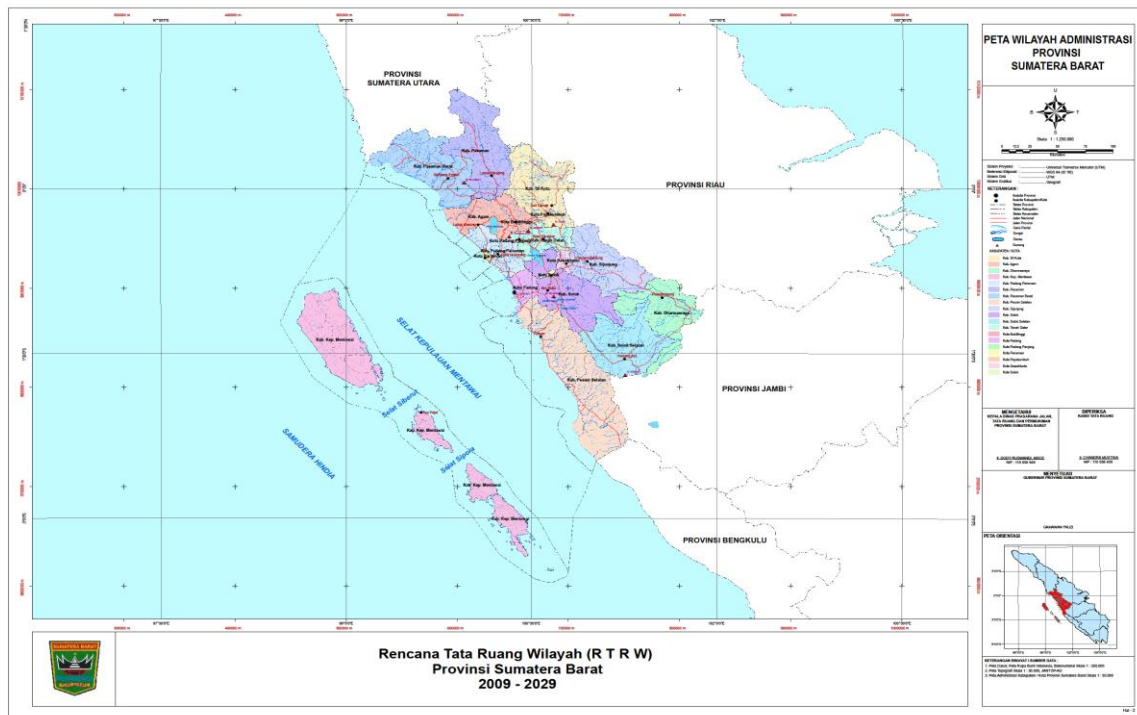
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. ASPEK GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFI

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Secara **geografis**, Provinsi Sumatera Barat terletak antara $98^{\circ} 36' - 101^{\circ} 53'$ Bujur Timur dan $0^{\circ} 54'$ Lintang Utara sampai dengan $3^{\circ} 30'$ Lintang Selatan, dengan luas daratan $\pm 42.297,30 \text{ Km}^2$ dan luas perairan (laut) $\pm 51.060,23 \text{ km}^2$ dengan panjang garis pantai wilayah daratan $\pm 375 \text{ Km}$ ditambah panjang garis pantai Kepulauan Mentawai ± 1.003 sehingga total garis pantai keseluruhan $\pm 1.378 \text{ Km}$. Perairan laut ini memiliki 185 pulau-pulau besar dan kecil. Secara administratif, Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 19 Kabupaten/Kota (12 Kabupaten dan 7 Kota) yang mempunyai 179 Kecamatan dengan 259 Kelurahan dan 760 Nagari, dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah Utara dengan Provinsi Sumatera Utara, sebelah Timur dengan Provinsi Riau dan Jambi, sebelah Selatan dengan Provinsi Bengkulu, dan sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia. Peta administrasi Provinsi Sumatera Barat seperti Gambar 2.1.

Gambar 2.1
Peta Administrasi Provinsi Sumatera Barat



Sumber : RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009-2029

Sumatera Barat berdasarkan letak geografisnya tepat dilalui garis khatulistiwa (garis lintang nol derajat) tepatnya di Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman. Karena itu Sumatera Barat mempunyai iklim tropis dengan rata-rata suhu udara $25,78^{\circ}\text{C}$ dan rata-rata kelembaban yang tinggi yaitu $86,67\%$ dengan tekanan udara rata-rata berkisar $994,69 \text{ mb}$. Pengaruh letak ini, maka menurut ketinggiannya, wilayah di Provinsi Sumatera Barat sangat bervariasi mulai dari dataran rendah di pantai dengan ketinggian 0 m hingga dataran tinggi (pegunungan) dengan ketinggian $> 3000 \text{ m}$ di atas permukaan laut (dpl). Luas areal yang mempunyai ketinggian 0 sampai 100 m dpl meliputi $1.286.793 \text{ ha}$ ($30,41\%$), daerah dengan ketinggian $100 - 500 \text{ m dpl}$ mencapai 643.552 ha

(15,21%), antara 500 – 1.000 m dpl seluas 1.357.045 ha (32,07%), antara 1.000 – 1.500 m dpl terdapat 767.117 ha (18,13%), daerah dengan ketinggian 1.500 – 2.000 m dpl tercatat 113.116,6 Ha (2,67%), dan sisanya daerah dengan ketinggian di atas 2.500 m dpl.

Gambaran karakteristik daerah Kabupaten/Kota se Sumatera Barat dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Karakteristik Kabupaten/Kota se Sumatera Barat

NO	NAMA KAB/ KOTA	LUAS (KM ²)	KONDISI/KAWASAN	JUMLAH KECAMATAN	NAGARI/ DESA/ KELURAHAN	GEOGRAFIS	JUMLAH PENDUDUK 2015
1	Kep. Mentawai	6.011,35	Kabupaten Kep. Mentawai adalah daerah tertinggal yang terletak 82 mil laut di sebelah Barat Provinsi Sumatera Barat yang merupakan gugusan pulau-pulau besar dan kecil dengan jumlah pulau 98, 4 buah pulau besar (Sibeurt, Sipora, Pagai Utara & Pagai Selatan) dan 2 buah pulau terluar (sibaru-baru dan sinyauyau)	10	43	00°55' – 03°21' LS 98°35' – 100°32' BT	85.300
2	Pesisir Selatan	5.794,95	Kabupaten Pesisir selatan terletak di Selatan Barat Prov. Sumatera Barat yang dilalui oleh jalur Padang Prov. Sumbar dengan Kota Bengkulu, topografi memiliki kemiringan lereng antara 0% - >40% dengan pergunungan setinggi 2.000 meter, juga memiliki Garis Pantai sepanjang sekitar 234 Km yang memiliki 74 pulau-pulau kecil	12	76	0° 59' – 2° 28' LS 109° 19' – 101° 18' BT	450.200
3	Solok	7.084,02	Kabupaten Solok dibagian dengan Prov. Sumatera Barat yang dilalui oleh jalur utama Padang Prov. Sumbar dengan Provinsi Jambi (lintas tengah Sumatera) yang mempunyai topografi yang bervariasi berlembah2 dan berbukit2 dengan ketinggian antara 329 mtr dpl sampai dengan 1.458 m dpl, Kabupaten Solok juga memiliki 1 buah Gunung Berapi yaitu Gunung talang , serta memiliki beberapa danau (D. Singkarak, D. Diatas, D. Dibawah, D. Talang)	14	74	01° 20' 27" – 01° 21' 39" LS 100° 25' 00" – 100° 33' 43" BT	363.700
4	Sijunjung	3.130,80	Kabupaten Sijunjung terletak di bagian timur provinsi sumatera barat dilalui oleh jalur utama antara Prov. Riau dengan Prov. Jambi, topografi Kabupaten sijunjung daerah yang berbukit-bukit pada ketinggian antara 100 - 1.250 m dpl	8	54	0° 18' 43" LS – 1° 41' 46" LS 100° 46' 50" – 101° 53' 50" BT	222.500
5	Tanah Datar	1.336,00	Kabupaten Tanah Datar terletak Bagian tengah arah ke timur Prov. Sumbar yang dilalui oleh jalur Padang Prov. Sumbar dengan Pekanbaru Prov. Riau serta jalur2 yang menghubungkan beberapa kabupaten, dengan topografi yang datar, bergelombang, berbukit, dengan ketinggian antara 200 m dpl sampai dengan 1.000 mtr dpl, memiliki 3 buah gunung yaitu g. Merapi, G. Singalang, G. Sago, Tanah Datar memiliki Danau yaitu Danau Singkarak.	14		00° 17" – 00° 39" LS 100° 19" – 100° 51" BT	344.800
6	Padang Pariaman	1.328,79	Kabupaten Padang Pariaman Yang terletak di Bagian Barat tengah Provinsi Sumatera Barat yang dilalui oleh 2 jalur utama yaitu Jalur yang menghubungkan antara Pekanbaru Provinsi Riau dengan Padang Provinsi Sumbar dan jalur yang menghubungkan Madina Prov. Sumatera Utara dengan Padang Sumatera Barat, Padang Pariaman memiliki 2 buah gunung (gunung tandikek dan Gunung Sago) dengan panjang garis pantai 60,0 km dan memiliki 2 buah Pulau (Pulau Pieh dan Pulau Bando)	17	46	0° 11' 5" – 3° 30' LS 98° 36' – 100° 40' BT	406.100

NO	NAMA KAB/ KOTA	LUAS (KM ²)	KONDISI/KAWASAN	JUMLAH KECAMATAN	NAGARI/ DESA/ KELURAHAN	GEOGRAFIS	JUMLAH PENDUDUK 2015
7	Agam	2.232,30	Kabupaten Agam pada bagian tengah Sumatera Barat dilalui jalur lintas tengah Sumatera dan jalur lintas barat, Agam juga memiliki dua buah gugung (gunung merapi=2.891 mtr) dan (gunung singgalang=2.877 mtr), panjang garis pantai 43 mtr dan 2 buah pulau	16	82,00	00° 01' 34" - 00° 28' 43" LS 99° 46' 39" - 100° 32' 50" BT	476.900
8	Lima Puluh Kota	3.354,30	Kabupaten Lima Puluh Kota terletak di timur bagian utara Provinsi Sumatera Barat yang dilalui jalur yang menghubungkan antara Provinsi Riau dengan Provinsi Sumatera Barat dengan kelerengn antara 0% /1 m - 40% >300 m dan memiliki 3 buah gunung (Gunung Sago = 2.261, Gunung Bungsu=1.253, Gunung Sanggul = 1.495,)	13	79	00° 25' 28,71" LU - 00° 22' 14,52" LS 100° 15' 44,10" - 100° 50' 47,80" BT	369.000
9	Pasaman	3.947,63	Kabupaten Pasaman terletak Paling Utara Sumatera Barat yang dilalui oleh jalur lintas Medan- Prov. Sumut dengan Padang Prov. Sumbar dengan topografi ketinggian antara 50 m sampai dengan 2.240 meter yang memiliki 5 buah pegunungan (G. Ambun, G. Sigapuak, G. Kalabu, G. Malenggang, G. Tambian)	12	32	0° 55' LU - 0006' LS 09° 45' BT - 100° 21' BT	269.900
10	Solok Selatan	3.346,20	Kabupaten Solok Selatan di bagian tengah paling selatan provinsi Sumatera Barat yang dilalui oleh jalur Padang Prov. Sumbar dengan Kerinci Prov. Jambi, Kabupaten ini termasuk daerah tertinggal provinsi Sumatera Barat, yang memiliki topografi dengan ketinggian 350 - 430 meter d pl, dengan yang 60 % dari wilayah Solok Selatan berada pada kemiringan di atas 40 % yang tergolong sangat curam dan rawan terhadap bahaya longsor. Kabupaten Solok Selatan masih merupakan daerah tertinggal.	7	34	01° 17' 13" - 01° 46' 45" LS 100° 53' 24" - 101° 26' 27" BT	159.800
11	Dharmasraya	2.961,13	Kabupaten Dharmasraya terletak di timur Sumatera Barat yang berjarak sekitar 196 km dari Ibukota Provinsi dan dilalui oleh jalur lintas Sumatera yang menghubungkan langsung Prov. Jambi- Prov. Sumbar Dharmasraya mempunyai topografi yang sebagian besar landai antara 0%-40%.	11	52	00° 47' 07" - 00° 41' 56" LS 101° 09' 21" - 101° 54' 27" BT	223.100
12	Pasaman Barat	3.877,77	Kabupaten Pasaman Barat terletak di Utara Prov. Sumatera Barat yang berbatasan langsung dengan Madina Prov. Sumut yang dilalui oleh Jalur yang menghubungkan Antara Madina Prov. Sumut dengan Padang prov. Sumbar, topografi Pasaman dengan ketinggian antara 0-2.912 m (G. Malintang, G. Talamau). Kabupaten Pasaman Barat masih merupakan daerah tertinggal.	11	19	0° 33' LU - 0° 11' LS 99° 10' - 100° 04' BT	410.300
13	Kota Padang	694,96	Kota Padang adalah Ibukota Provinsi Sumatera Barat yang terletak di Bagian Barat Prov. Sumatera Barat yang memiki 3 jalur utama arah Selatan ke Bengkulu, Arah Utara Medan dan Pekanbaru, Arah timur menuju Lintas Sumatera bagian tengah, topografi Kota Padang dengan kelerengn 0-40% dengan ketinggian 0 m dpl sampai dengan >1000 m dpl, dengan garis pantai ± 84 Km dan mempunyai 19 pulau-pulau kecil.	11	193	00° 44' 00" - 01° 08' 35" LS 100° 05' 05" - 100° 34' 09" BT	902.400
14	Kota Solok	57,64	Kota Solok mempunyai posisi yang strategis karena terletak pada lintasan regional antara Kota Padang dan Provinsi Jambi, serta dari Jakarta menuju Bukittinggi. Ketinggian Kota Solok berada pada 390 m dpl dengan kelerengn 0 - >	2	7	0° 74' - 0° 81' LS 100° 54' - 100° 68' BT	66.100

NO	NAMA KAB/ KOTA	LUAS (KM ²)	KONDISI/KAWASAN	JUMLAH KECAMATAN	NAGARI/ DESA/ KELURAHAN	GEOGRAFIS	JUMLAH PENDUDUK 2015
			45%.				
15	Kota Sawahlunto	273,45	Kota Sawahlunto yang merupakan Kota Tambang dengan cadangan batubara sebanyak 73 juta ton dan terletak di tengah Provinsi Sumatera Barat yang dilalui jalur antar kabupaten – kota di Sumatera Barat. Ketinggian Kota Sawahlunto berada pada 250 – 650 M dpl, kemiringan 0 - > 40%.	4	37	0° 34' – 0° 46' LS 100° 41' – 100° 49' BT	60.200
16	Kota Padang Panjang	23,00	Kota Padang Panjang terletak di tengah-tengah Provinsi Sumatera Barat yang dilalui oleh jalur utama menuju Padang – Pekanbaru dan jalur lainnya yang menghubungkan antar kabupaten/kota di Sumatera Barat. Topografi Kota Padang Panjang memiliki kemiringan lereng 0 – 40% dengan ketinggian berkisar antara 550 m dpl – 900 m dpl.	2	8	0° 27' – 0° 30' LS 100° 20' – 100° 27' BT	50.900
17	Kota Bukittinggi	25,239	Kota Bukittinggi terletak dibagian tengah Prov. Sumatera Barat yang dilalui oleh beberapa jalur strategis diantaranya Padang ke Medan, Padang Pekanbaru, serta persimpangan antar kabupaten, Kota Bukittinggi mempunyai kemiringan lereng antara 0% sampai dengan 8% dengan ketinggian 756 - 960 m dpl.	3	24	00° 16' – 00° 20' LS 100° 20' – 100° 25' BT	122.600
18	Kota Payakumbuh	80,43	Kota Payakumbuh berada pada bagian timur Provinsi Sumatera Barat yang merupakan daerah strategis jalur utama Padang (Provinsi Sumbar) – Pekanbaru (Prov. Riau). Letak Kota Payakumbuh berada di utara gunung api podam (G. Malintang) pada ketinggian 500m dpl, dengan kemiringan 0 - > 40%.			00° 10' – 0° 17' LS 100° 35' – 100° 48' BT	127.800
19	Kota Pariaman	73,54	Kota Pariaman terletak di bagian barat Provinsi Sumatera Barat yang dilalui oleh beberapa jalur strategis antara Padang – Madina Sumut, dengan kemiringan antar 0 – 40% dan ketinggian 2 – 35 m dpl. Kota Pariaman memiliki 6 buah pulau-pulau kecil dengan panjang garis pantai 12,7 Km.	4	71	0° 33' 00" – 0° 40' 43" LS 100° 10' 33" – 100° 10' 55" BT	84.700

Dengan kondisi **topografi** tersebut di atas, potensi sumberdaya alam yang terdapat di Sumatera Barat memiliki berbagai variasi intensitas dan penggunaannya. Pada dataran rendah intensitas penggunaan lahan dapat lebih maksimal, sementara itu pada dataran tinggi intensitas penggunaannya akan dihadapkan pada faktor pembatas lahan. Untuk pemanfaatan lahan secara optimal, harus terlebih dahulu secara seksama memperhatikan kondisi lahan dan lingkungan. Sehingga tidak terjadi kerusakan berdampak negatif untuk masa kini dan yang akan datang. Dataran tinggi di wilayah Sumatera Barat sebagian besar merupakan jajaran perbukitan dan pegunungan termasuk rantai Pegunungan Bukit Barisan yang membentang dari Utara hingga Selatan Pulau Sumatera. Lahan yang ada pada kawasan perbukitan dan pegunungan tersebut dengan kelerengan di atas 40% tercatat 1.017.000 Ha.

Provinsi Sumatera Barat menjadi gerbang masuk wilayah barat Indonesia yang didukung oleh prasarana transportasi darat, laut dan udara yang memadai, seperti jalan nasional Trans Sumatera, Bandara Internasional Minangkabau, dan pelabuhan laut internasional Teluk Bayur. Selain itu secara geologis Provinsi Sumatera Barat merupakan daerah rawan gempa bumi, terutama di jalur gunung berapi. Hal ini terkait dengan kondisi fisik Pulau Sumatera sebagai *Great Sumatra Fault* di sepanjang pesisir barat Sumatera dan *Mentawai Fault* di kepulauan Mentawai yang saling mendesak sehingga terjadi gerakan di lempeng besar dan *micro plate*. Kondisi tersebut menjadikan Provinsi

Sumatera Barat rentan terhadap bencana alam seperti tanah longsor, letusan gunung berapi, dan gempa bumi yang berpotensi terjadinya gelombang tinggi dan/atau tsunami.

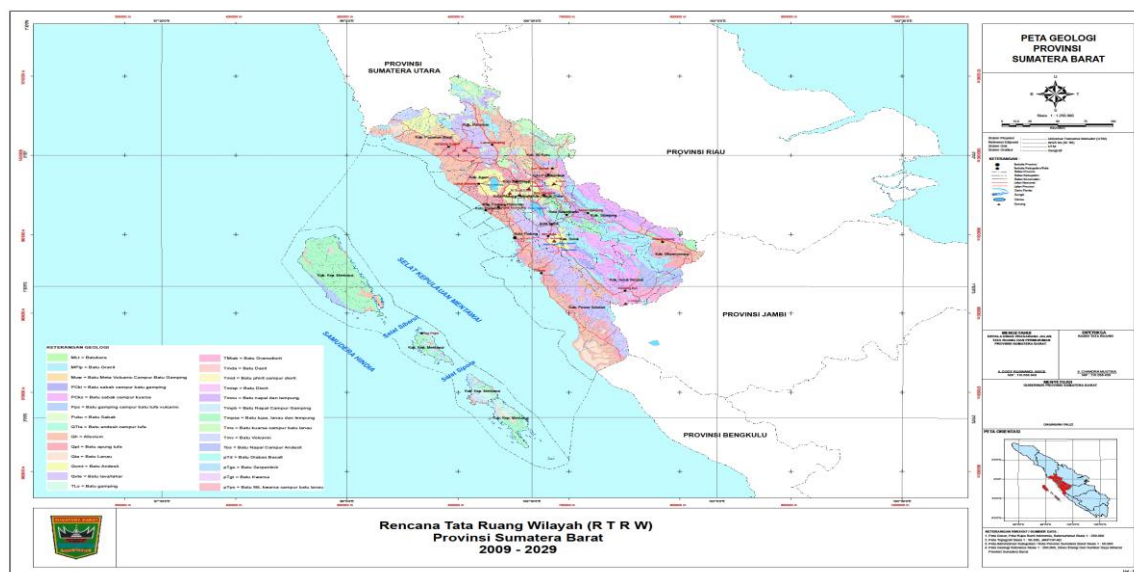
Lahan daratan Provinsi Sumatera Barat yang luas termasuk pulau-pulau kecil menjadi modal pembangunan yang sangat potensial dimanfaatkan, tidak saja untuk kegiatan pertanian dan kehutanan, tetapi juga pada beberapa bagian wilayahnya dapat dikembangkan untuk permukiman maupun industri. Secara umum pemanfaatan lahan di provinsi ini cukup intensif untuk pengembangan perekonomian, sementara daratan kepulauan seperti Kepulauan Mentawai pemanfaatannya masih terbatas.

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki tatanan **geologi** kompleks. Kondisi ini disebabkan letaknya yang berbeda pada daerah tumbukan dua lempeng tektonik besar yaitu lempeng *Indo-Australia* di bagian selatan dan lempeng *Euroasia* di bagian utara yang ditandai dengan terdapatnya pusat-pusat gerakan tektonik di Kepulauan Mentawai dan sekitarnya. Akibat tumbukan kedua lempeng besar ini selanjutnya muncul gejala tektonik lainnya yaitu busur magmatik yang ditandai dengan munculnya rangkaian pegunungan Bukit Barisan beserta gunung apinya dan sesar/patahan besar Sumatera yang memanjang searah dengan zona tumbukan kedua lempeng yaitu utara-selatan.

Pada sisi lain, tatanan geologi ini berdampak positif bagi Provinsi Sumatera Barat. Dampak positif tersebut berupa munculnya mineral-mineral berharga seperti emas, perak, bijih besi, mangan, timah hitam, obsidian dan lain-lain; tanah yang subur dan banyak sumber air bersih maupun air panas yang berasal dari kawasan geomorfologi struktural namun dekat dengan sumber panas bumi yang berasal dari magma dangkal. Dengan demikian Sumatera Barat merupakan provinsi yang mempunyai potensi sumber daya alam yang memadai untuk dieksploitasi bagi pembangunan.

Struktur geologi yang berkembang adalah struktur perlipatan (*antiklinorium*) dan struktur sesar dengan arah umum barat laut – tenggara, yang mengikuti struktur regional Pulau Sumatera. Struktur yang terdapat berupa *Great Sumatera Fault* di sepanjang pesisir barat Pulau Sumatera dan *Mentawai Fault* di Kepulauan Mentawai yang saling mendesak sehingga terjadi gerakan di lempeng besar dan *micro plate*. Selain geologi dasar laut, di daratan terdapat patahan semangka yang membujur dari Solok Selatan sampai Pasaman. Kondisi ini menjadikan Provinsi Sumatera Barat memiliki kerawanan bencana gempa bumi yang tinggi. Gambar 2.2 memperlihatkan peta geologi Provinsi Sumatera Barat.

Gambar 2.2
Peta Geologi Provinsi Sumatera Barat



Sumber: RTRW Provinsi Sumatera Barat 2009-2029

Kondisi hidrologi Provinsi Sumatera Barat memiliki sumberdaya air yang cukup besar jika dilihat dari jumlah sungai dan danau. Jumlah sungai di Provinsi Sumatera Barat mencapai 606 sungai yang sebahagian bermuara ke Samudera Hindia di Pantai Barat dan sebahagian lagi ke arah Pantai Timur Pulau Sumatera. Wilayah Sumatera Barat yang dialiri sungai ini dapat dibagi atas 9 Satuan Wilayah Sungai (SWS) yaitu SWS Akuaman, Pulau Siberut, Natal-Batahan, Kampar, Batang Hari, Silaut, Rokan, Indragiri dan Masang. Sumber air sungai tersebut berasal dari pegunungan dan danau (Danau Diatas, Danau Dibawah, Danau Maninjau dan Danau Singkarak). Danau Singkarak yang terletak di Kabupaten Solok dan Tanah Datar mempunyai luas 13.011 km², Danau Maninjau terdapat di Kabupaten Agam mempunyai luas 9.950 km², sedangkan Danau Diatas (3.150 km²), Danau Dibawah (1.400 km²), dan Danau Talang (1,02 km²) terdapat di Kabupaten Solok.

Kondisi iklim Sumatera Barat secara umum dapat digambarkan dari curah hujan dan suhu wilayahnya. Curah hujan tahunan berkisar antara 1.980 sampai lebih dari 5.000 mm/tahun dengan kecenderungan daerah bagian barat lebih basah bila dibandingkan dengan bagian timur. Keadaan yang lebih basah dibagian barat ini berkaitan dengan dibawanya uap air oleh tiupan angin laut yang membentur bukit dan gunung sehingga hujan lebih banyak dan sering turun di belahan barat Bukit Barisan. Tingginya curah hujan tersebut menyediakan air yang cukup banyak di bagian barat provinsi ini sehingga sangat menunjang untuk budidaya pertanian antara lain untuk tanaman pangan dan hortikultura.

Karakteristik iklim Provinsi Sumatera Barat termasuk iklim tropika basah. Klasifikasi iklim berdasarkan sistem *Schmidt-Fergusson* daerah ini dapat dibagi menjadi 3 tipe iklim yaitu tipe A, B dan C. Daerah sepanjang pantai barat tergolong kepada tipe A dengan luas wilayah cakupannya mencapai 2.672.000 Ha. Daerah lereng timur Bukit Barisan yang merupakan daerah bayangan hujan menerima curah hujan lebih kecil tergolong kepada tipe B dengan 265.700 Ha dan tipe C dengan luas wilayah cakupannya 100.800 Ha terdapat di lereng Timur Gunung Merapi yaitu sekitar Danau Singkarak di Kabupaten Tanah Datar dan di selatan Gunung Talang meliputi di Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.

Suhu di Sumatera Barat tercatat antara 18⁰ – 34⁰ C dengan suhu rata-rata lebih kurang 25,5⁰ C. Perbedaan antara temperatur siang dan malam antara 5⁰ – 7⁰ C. Suhu terendah biasanya terjadi antara bulan Oktober sampai dengan Desember dan suhu tertinggi terjadi antara bulan Juli dan Agustus. Pada umumnya daerah dataran tinggi mempunyai suhu 4⁰ – 6⁰ C lebih rendah bila dibandingkan dengan daerah pesisir barat. Lebih rendahnya suhu di daerah pegunungan menjadikan kawasan ini sebagai kawasan sentra hortikultura dan dapat dikembangkan sebagai daerah agrowisata potensial terutama dipegunungan yang terdapat di wilayah Agam, Tanah Datar, Bukittinggi dan Padang Panjang serta pada kawasan Kayu Aro sampai ke Pantai Cermin di Kabupaten Solok. Kelembaban udara antara 79 % – 87 % dengan kecepatan angin antara 1,25 – 7,72 knot. Daerah dengan kelembaban yang tinggi terjadi di daerah pesisir dan Kepulauan Mentawai.

Penggunaan lahan merupakan manifestasi dari kegiatan sosial-budaya dan sosial-ekonomi dalam upaya pemanfaatan potensi sumberdaya alam yang ada. Penggunaan lahan di Provinsi Sumatera Barat secara umum meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung dibedakan menjadi kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, dan kawasan perlindungan setempat, sedang kawasan budidaya diantaranya berupa kawasan permukiman, kawasan pertanian

tanaman pangan, kawasan perkebunan, kawasan peternakan, kawasan industri, kawasan pertambangan, kawasan perikanan dan kelautan, dan kawasan hutan.

Kawasan permukiman merupakan kawasan di luar kawasan lindung yang digunakan sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian masyarakat yang berada di wilayah perkotaan dan perdesaan Provinsi Sumatera Barat, dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan diupayakan tidak melakukan peralihan fungsi terhadap lahan pertanian teknis. Secara keseluruhan luas lahan terbangun di Provinsi Sumatera Barat direncanakan seluas 70.328 Ha, sebagian besar kawasan terbangun berupa permukiman, yang dapat dibedakan dalam dua kelompok yakni permukiman perkotaan, dan permukiman perdesaan (termasuk pesisir).

Sedangkan untuk **kawasan hutan** berdasarkan SK Menteri Kehutanan RI Nomor 35/Kpts-II/2013, luas kawasan hutan Provinsi Sumatera Barat 2.342.893,24 Ha dengan rincian: Hutan Suaka Alam (termasuk TNKS) seluas ± 769.774,66 Ha, Hutan Lindung (HL) ± 791.671,00 Ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas ± 233.210,58 Ha, Hutan Produksi (HP) seluas ± 360.608,00 Ha, Hutan Produksi Konversi (HPK) seluas 187,629.00 Ha, seperti pada Tabel 2.2.

Selanjutnya untuk **kawasan pertanian**, potensi sumberdaya lahan tanaman pangan dan hortikultura meliputi lahan sawah dan lahan bukan sawah yang terdiri dari pekarangan, ladang, dan tegalan/kebun. Potensi luas lahan pertanian bukan sawah pada tahun 2015 seluas 2.830.235 Ha. Dari potensi tersebut 70,34% dimanfaatkan dan sisanya 29,66% belum dimanfaatkan. Hal ini menunjukkan bahwa masih tersedia lahan yang cukup luas untuk pengembangan usaha pertanian tanaman pangan dan hortikultura yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Barat.

Kawasan perkebunan di Provinsi Sumatera Barat dikembangkan berdasarkan fungsi kawasan dan potensi yang ada pada daerah masing-masing dan memiliki prospek ekonomi cepat tumbuh. Pengembangan kawasan perkebunan diarahkan dengan pemanfaatan potensi lahan yang memiliki kesesuaian untuk perkebunan, berada pada kawasan budidaya, dan menghindarkan timbulnya konflik pemanfaatan lahan dengan kawasan lindung, kawasan hutan produksi tetap dan produksi terbatas, kawasan industri, dan kawasan permukiman.

Tabel 2.2
Luas Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat

No	KABUPATEN/ KOTA	Fungsi Hutan						JUMLAH
		KPA/KSA	HL	HPT	HP	HPK	APL	
	Kabupaten							
1	Kep. Mentawai	183.396,94	7.712,06	0.00	247.186,38	54.956,37	107.883,25	601.135,00
2	Pesisir Selatan	285.420,14	23.905,73	46.274,19	4.563,14	30.974,06	188.357,73	579.495,00
3	Solok	48.245,45	117.542,85	12.799,27	5.645,18	9.808,67	179.758,58	373.800,00
4	Sijunjung	40.048,87	78.663,69	29.923,48	21.916,46	15.601,80	126.925,70	313.080,00
5	Tanah Datar	20.125,40	19.682,90	0.00	9.317,98	96,53	84.337,19	133.600,00
6	Padang Pariaman	16.118,20	15.624,54	0.00	0.00	0.00	101.136,25	132.879,00
7	Agam	26.513,66	22.679,11	7.696,34	3.133,52	8.449,83	154.757,54	223.230,00
8	Lima Puluh Kota	20.598,48	124.040,96	19.504,94	5.287,18	11.371,04	154.627,39	335.430,00
9	Pasaman	32.732,17	200.539,68	26.801,27	0.00	8.614,86	176.075,02	444.763,00
10	Solok Selatan	65.836,33	83.794,72	53.684,20	13.049,50	19.753,96	98.501,28	334.620,00
11	Dharmasraya	5.967,08	11.935,30	31.100,58	26.591,73	16.795,40	203.722,91	296.113,00
12	Pasaman Barat	59,46	72.070,74	5.041,84	18.838,68	6.986,93	235.779,35	338.777,00
	Kota							
13	Padang	23.938,32	12.066,08	245,36	0.00	0.00	33.246,24	69.496,00
14	Solok	770,01	342,99	0.00	0.00	0.00	4.651,00	5.764,00
15	Padang Panjang	4,14	601,77	0.00	0.00	0.00	1.694,09	2.300,00
16	Sawahlunto	0.00	120,60	139,11	5.078,25	4.219,54	17.787,51	27.345,00
17	Bukittinggi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.524,00	2.524,00

No	KABUPATEN/ KOTA	Fungsi Hutan						JUMLAH
		KPA/KSA	HL	HPT	HP	HPK	APL	
18	Payakumbuh	0.00	347,28	0.00	0.00	0.00	7.695,72	8.043,00
19	Pariaman	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.336,00	7.336,00
	JUMLAH	769.774,66	791.671,00	233.210,58	360.608,00	187.629,00	1.886.836,76	4.229.730,00

Sumber: Dinas Kehutanan, Tahun 2015

- KPA/KSA : Kawasan Pelestarian Alam/Kawasan Suaka Alam/Nature Conservation Area/Nature Sanctuary Area
HL : Hutan Lindung
HPT : Hutan Produksi Terbatas
HP : Hutan Produksi Tetap
HPK : Hutan Produksi yang dapat dikonversi
APL : Areal Penggunaan Lain

Sedangkan untuk pembangunan **peternakan** di Provinsi Sumatera Barat merupakan usaha untuk meningkatkan populasi dan produksi ternak dalam upaya menyediakan protein hewani baik untuk konsumsi sendiri, pemasokan ke wilayah provinsi lain maupun ekspor. Usaha pengembangan peternakan di provinsi ini ditunjang dengan ketersediaan pakan ternak dan prasarana penunjang peternakan. Pakan ternak untuk ternak besar dan kecil tersedia cukup banyak, yang terdiri dari rumput alam maupun rumput unggul, sisa pertanian (daun jagung dan jerami), dan limbah industri. Prasarana penunjang yang lain meliputi Rumah Potong Hewan sebanyak 7 unit, pasar ternak 29 unit, TPH 32 unit, poskeswan 41 unit, pos Inseminasi Buatan (IB) 110 unit, dan Balai Inseminasi Buatan (BIB) 1 unit.

Pengembangan usaha peternakan dilakukan dengan pendekatan agribisnis melalui pengembangan kawasan sentra komoditi unggulan ternak. Kawasan peternakan di Sumatera Barat antara lain Kawasan Sentra Produksi Sapi, Kerbau dan Unggas dan Kawasan Terintegrasi Ternak Sapi dan Tanaman Perkebunan yang tersebar di Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Sijunjung.

Selanjutnya untuk **kawasan industri** membutuhkan areal cukup luas, dan berpengaruh terhadap perubahan lingkungan, baik bentang alam, maupun kondisi sosial ekonomi dan lingkungannya. Kawasan industri diharapkan mampu menjadi stimulus percepatan perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sekitar dan wilayah lebih luas, dengan tetap memperhatikan upaya mencegah pencemaran fungsi lingkungan. Disamping itu ditetapkan juga untuk pengembangan industri dengan pendekatan sentra yang tersebar pada hampir semua kabupaten kota. Seperti sentra industri makanan di Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh dan industri kerajinan di Kabupaten Tanah datar, Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Sawahlunto.

Provinsi Sumatera Barat merupakan wilayah yang juga kaya akan hasil pertambangan, terutama batubara dan berbagai pertambangan mineral lainnya. Dalam mengelola usaha pertambangan, pemerintah menetapkan Wilayah Pertambangan (WP), yang terdiri dari Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN).

Wilayah usaha pertambangan (WUP), adalah bagian dari wilayah pertambangan (WP) yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi. WUP ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui koordinasi dengan pemerintah provinsi. Wilayah yang telah mendapat Izin Usaha Pertambangan (IUP), yang selanjutnya disebut WIUP di Provinsi Sumatera Barat terdapat di seluruh kabupaten kecuali

Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan 2 (dua) kota, yaitu Kota Padang dan Kota Sawahlunto, yang meliputi usaha pertambangan batubara dan pertambangan mineral.

Wilayah pertambangan rakyat (WPR), adalah bagian dari wilayah pertambangan (WP) tempat dilakukannya usaha pertambangan rakyat. WPR ditetapkan oleh bupati/walikota, sesuai pasal 21, Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan. Kegiatan pertambangan tanpa izin yang dilakukan rakyat di Provinsi Sumatera Barat cukup banyak dan tersebar hampir di seluruh kabupaten/kota. Lokasi ini belum ditetapkan sebagai wilayah pertambangan rakyat (WPR). Selanjutnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pengelolaan pertambangan beralih menjadi kewenangan provinsi. Oleh sebab itu penetapan prioritas WPR akan menjadi kewenangan provinsi.

Wilayah pencadangan negara (WPN), adalah bagian dari wilayah pertambangan (WP) yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional. Penetapan wilayah pencadangan negara (WPN) dilakukan oleh pemerintah pusat dengan tetap memperhatikan aspirasi daerah sebagai daerah yang dicadangkan untuk komoditas tertentu dan daerah konservasi dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan. WPN yang ditetapkan untuk komoditas tertentu dapat diusahakan sebagian luasnya, sedangkan WPN yang ditetapkan untuk konservasi ditentukan batasan waktunya. WPN yang diusahakan sebagaimana luasnya statusnya berubah menjadi wilayah usaha pertambangan khusus (WUPK).

Hampir semua wilayah administrasi merupakan rencana usaha pertambangan, karena 17 dari 19 wilayah administrasi kabupaten/kota mempunyai bahan pertambangan yang berpotensi untuk dieksploitasi. Untuk pengembangan potensi minyak, gas bumi dan geothermal pengembangan menjadi : (1) Blok North Kuantan; (2) Blok Bukit Barisan Barat Daya; (3) Wilayah kerja geothermal Solok, dan (4) Wilayah kerja geothermal Solok Selatan

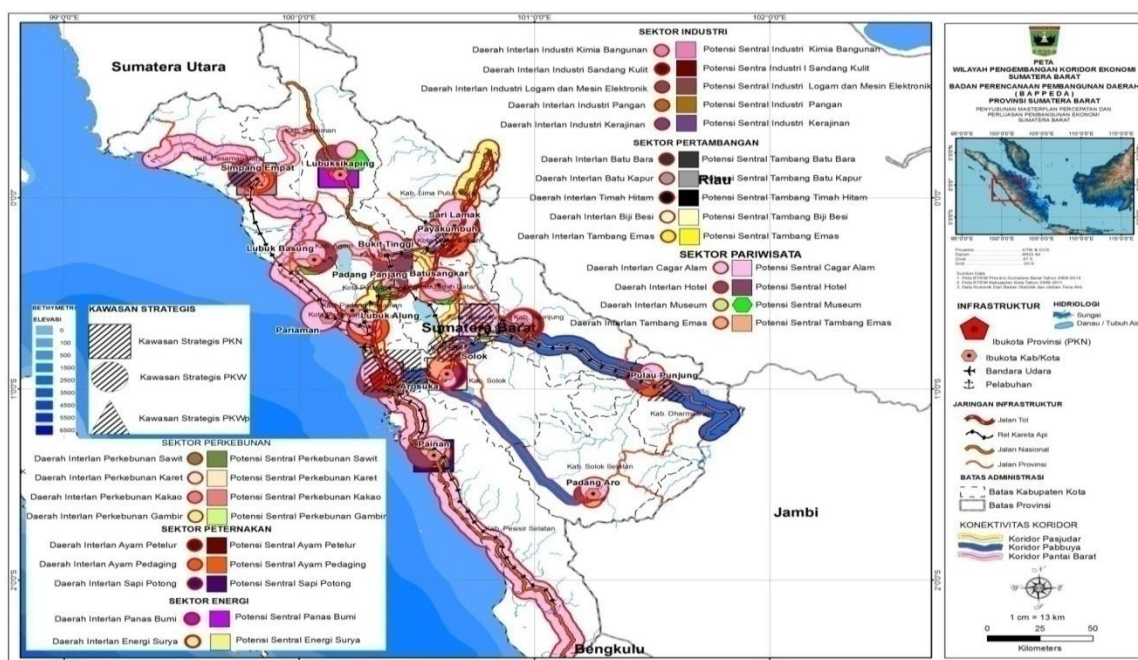
Sementara untuk pengembangan **kawasan perikanan** di Sumatera Barat terdiri dari perikanan tangkap, perikanan budidaya dan perikanan perairan umum. Untuk kawasan perikanan tangkap dikembangkan di 2 kota dan 5 Kabupaten yang mempunyai wilayah pesisir dan laut. Masing-masing daerah tersebut adalah Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kabupaten Pesisir Selatan. Zona perikanan tangkap komersil (pelagis) terdapat di perairan Siberut Kabupaten Kepulauan Mentawai yang mengarah ke lautan Hindia dan perairan Kabupaten Pesisir Selatan.

Seluruh kawasan pesisir kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat disamping dimanfaatkan untuk budidaya ikan laut juga untuk pertambakan, keramba dan budidaya rumput laut, serta kerang-kerangan. Selain itu, juga dialokasikan untuk membangun konstruksi infrastruktur di lahan pantai guna kepentingan penyimpanan (gudang), pengolahan hasil dan transportasi sarana/input produksi budidaya laut.

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah di Provinsi Sumatera Barat dapat ditinjau dalam berbagai aspek antara lain potensi kehutanan, pertanian, perkebunan, perikanan, industri, pariwisata dan panas bumi, potensi pengembangan ekonomi wilayah, seperti terlihat pada Gambar 2.3.

Gambar 2.3
Pengembangan Wilayah Koridor Ekonomi di Sumatera Barat



Sumber: RTRW Provinsi Sumatera Barat 2009-2029

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2013 tentang Master Plan Pengembangan Ekonomi Sumatera Barat Tahun 2013-2025 yang menetapkan wilayah pengembangan ekonomi menjadi tiga koridor, yaitu:

1. Koridor Gerbang Timur: Padang, Padang Panjang, Bukittinggi, Tanah Datar, Payakumbuh dan Lima Puluh Kota merupakan pusat produksi industri, perdagangan, pariwisata alam dan peternakan.
2. Koridor Lintas Sumatera: Padang, Solok, Kota Solok, Sawahlunto, Sijunjung, Dharmasraya dan Solok Selatan merupakan pusat produksi pertanian, perkebunan, pariwisata, pertambangan dan industri agro
3. Koridor Pantai Barat: Pasaman Barat, Agam, Pasaman, Padang Pariaman, Kota Pariaman, Padang, Pesisir Selatan dan Kepulauan Mentawai merupakan pusat produksi pertanian, perkebunan, industri perikanan tangkap dan budidaya, industri agro dan pariwisata bahari

Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Sektor pertanian masih menjadi sektor strategis bagi perekonomian Sumatera Barat meskipun kontribusi sektor pertanian ini dari tahun ke tahun memperlihatkan penurunan yang diiringi dengan peningkatan sektor lainnya, hal ini sejalan dengan pergeseran perekonomian yang semakin mengarah ke sektor sekunder dan tersier. Secara umum, tidak berarti bahwa kontribusi sektor pertanian secara keseluruhan terus mengecil, karena yang dicatat dalam sektor pertanian adalah aspek produknya saja, sedangkan pengolahan/industri hasil pertanian yang terus meningkat nilainya tercatat dalam sektor industri.

Luas lahan sawah di Sumatera Barat tahun 2015 tercatat seluas 230.665 hektar, yang terdiri dari lahan sawah irigasi 185.147 hektar dan sawah tadah hujan 43.895 hektar, yang tersebar pada 19 (sembilan belas) kabupaten/kota. Rencana penggunaan lahan untuk pertanian lahan basah berupa Sawah beririgasi teknis dengan luas sekurang-kurangnya 957.239 Ha atau 20,03% dari luas Sumatera Barat dengan peningkatan

jaringan irigasi semi teknis dan sederhana menjadi irigasi teknis yang tersebar di masing-masing wilayah sungai. Jumlah produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura di Sumatera Barat terlihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Produksi dan Produktivitas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Di Sumatera Barat Tahun 2010-2015

KOMODITI	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Poduksi						
Padi (Ton)	2.211.248	2.279.602	2.368.390	2.430.384	2.519.020	2.550.609
Palawija (Ton)	663.883	776.869	845.802	911.278	992.059	978.593
Sayur-sayuran (Ton)	389.147	419.438	498.286	574.019	531.133	608.579
Buah-Buahan (Ton)	377.032	443.539	481.897	468.061	492.577	523.207
Tanaman Hias (Tangkai/Kg)	1.000.856	965.574	694.838	582.305	779.165	719.742
Tanaman Biofarmaka (Kg)	8.498.400	6.973.417	7.414.098	9.508.247	10.160.753	11.670.135
Produktifitas						
Padi (Kw/Ha)	48,02	49,37	49,71	49,82	50,06	50,25
Palawija (Kw/Ha)	83,97	85,20	89,91	92,14	89,53	95,02
Sayur-sayuran (Kw/Ha)	98,33	94,72	130,08	125,98	115,36	133,19
Buah-Buahan (Kw/Ha)	24,20	25,67	26,78	26,53	28,01	28,99
Tanaman Hias (Tangkai/Kg/M2)	7,21	7,59	8,60	4,16	6,59	12,03
Tanaman Biofarmaka (Kg/M2)	2,83	3,19	3,27	3,65	3,31	3,21

Sumber : Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016

Berdasarkan Tabel 2.3 terlihat bahwa produksi utama tanaman pangan dan hortikultura setiap tahun mengalami peningkatan seperti padi, pada tahun 2010 sebesar 2.211.248 ton menjadi 2.550.609 ton pada tahun 2015, palawija pada tahun 2010 sebesar 663.883 ton menjadi 978.593 ton pada tahun 2015, sayur-sayuran dari 389.147 ton pada tahun 2010 menjadi 608.579 ton pada tahun 2015.

Peningkatan produksi komoditi tanaman pangan dan hortikultura di Sumatera Barat tahun 2010 – 2015 diiringi dengan peningkatan produktifitas komoditi seperti padi pada tahun 2010 produktifitasnya sebesar 48,02 kuintal per hektar menjadi 50,25 kuintal per hektar pada tahun 2015, palawija dari 83,97 kuintal per hektar menjadi 95,02 kuintal per hektar pada tahun 2015.

Perkebunan

Menurut jenis komoditasnya, pengembangan perkebunan meliputi kelapa sawit, karet, kakao, kopi, kelapa dalam, pinang, casiavera, gambir dan lain-lain. Luas tanam dan produksi perkebunan di Sumatera Barat sejak tahun 2010 sampai tahun 2015 berdasarkan komoditi terlihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Luas Tanam dan Produksi Beberapa Komoditi Perkebunan di Sumatera Barat
Tahun 2010-2015

No	Komoditi Perkebunan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Luas Tanam (Ha)							
1	Kelapa Sawit	353.411	356.140	357.079	367.094	390.380	392.315
2	Karet	167.417	172.013	173.949	174.890	178.997	180.769
3	Kelapa Dalam	91.855	91.885	91.965	91.438	89.717	89.900
4	Kakao	101.014	117.014	137.355	150.319	157.578	159.413
5	Kopi Arabica	39.937	20.742	20.754	20.994	21.027	21.053

No	Komoditi Perkebunan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
6	Kopi Robusta		19.483	19.886	21.853	21.867	21.873
7	Gambir	21.400	21.404	21.412	23.537	32.307	32.308
8	Cassia vera	38.774	38.763	38.840	43.606	49.685	49.702
Produksi (Ton)							
1	Kelapa Sawit	910.530	922.780	941.579	999.074	1.152.187	1.161.039
2	Karet	137.377	139.687	144.983	149.002	151.145	152.526
3	Kelapa Dalam	85.869	85.968	86.383	86.815	82.904	83.661
4	Kakao	49.638	59.836	69.281	80.001	81.044	85.095
5	Kopi Arabica	15.590	15.651	15.670	15.862	15.656	15.607
6	Kopi Robusta		15.203	15.259	16.697	17.966	18.452
7	Gambir	13.845	14.025	14.220	14.220	17.160	17.391
8	Cassia vera	27.481	26.919	23.557	23.542	23.511	27.737

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016

Luas tanam komoditi perkebunan juga memperlihatkan perkembangan setiap tahunnya, seperti kelapa sawit dari 353.411 Ha dengan produksi 910.530 ton pada tahun 2010 menjadi 392.315 Ha luas tanam pada tahun 2015 dengan produksi sebesar 1.161.039 ton, karet dengan luas tanam sebesar 167.417 Ha dengan produksi 137.377 ton pada tahun 2010 menjadi 180.769 Ha luas tanam dengan produksi sebesar 152.526 ton.

Kelautan dan Perikanan

Potensi perikanan dan kelautan Sumatera Barat (perairan laut dan perairan umum) menyimpan potensi yang cukup besar untuk kepentingan ekonomi produktif maupun konservasi dan dapat dijadikan andalan pembangunan masa depan.

Perairan laut Sumatera Barat mempunyai luas total wilayah sebesar 179.760,23 km² (luas zona territorial sebesar 57,880 km² dan luas zona eksklusif sebesar 128,700 km²) sementara itu luas perairan umum pada tahun 2015 tercatat mempunyai luas lahan sebesar 124.202,82 Ha.

Perkembangan produksi perikanan dari tahun 2010 – sampai tahun 2015 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 10,08 % per tahun seperti terlihat pada Tabel 2.5. Selanjutnya produksi perikanan budidaya mengalami peningkatan rata-rata 21,65% per tahun, perikanan tangkap 1,29 % per tahun dan perairan umum sebesar 1,8 % per tahun. Produksi perikanan laut mengalami penurunan sebesar 4,64 %, hal ini disebabkan antara lain menurunnya jumlah nelayan perikanan tangkap pada tahun 2015 dan diduga pengaruh fenomena cuaca ekstrim.

Jumlah nelayan perikanan laut di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2015 tercatat sebanyak 42.061 orang yang terdiri nelayan penuh 28.133 orang dan nelayan sambilan 13.928 orang, dengan sarana tangkap yang digunakan adalah perahu tanpa motor sebanyak 1.160 unit, motor tempel 6.512 unit dan kapal motor sebanyak 2.197 unit.

Tabel 2.5
Perkembangan Produksi Perikanan di Sumatera Barat
Tahun 2010-2015 (Ton)

No	Realisasi	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Produksi Perikanan Laut (ton)	192.658,40	196.511,50	197.460,20	211.003,40	214.734,00	204.771,00
2	Perairan Umum	9.941,10	8.945,20	10.406,60	10.372,40	10.464,90	10.688,90
3	Produksi Perikanan Budidaya (ton)	109.371	131.555	180.664	206.869,49	262.863	286.711,58
	Total	311.970,50	337.011,68	388.531,11	428.245,29	488.062,11	502.171,48

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016

Komoditi perikanan yang bernilai ekonomi sangat penting dari hasil tangkapan adalah ikan tuna, cakalang, dan udang. Produksi komoditi ini yang diperoleh pada fishing ground utama perairan laut Sumatera Barat dapat dilihat pada Gambar 2.4.

Gambar 2.4
Produksi Tiga Jenis Komoditi Bernilai Ekonomis Utama Perikanan Tangkap di Perairan Laut Sumatera Barat Tahun 2015



Selain tiga jenis hasil tangkapan utama yakni tuna, cakalang, dan udang yang bernilai ekspor tinggi terdapat juga jenis ikan dan komoditi perikanan lainnya yang juga bernilai ekonomis baik untuk memenuhi permintaan pasar domestik dan luar negeri. Misalnya ikan tongkol, tenggiri, cumi-cumi, sotong, gurita, rumput laut, dan sebagainya.

Kegiatan perikanan budidaya air tawar dilakukan di lingkungan perairan. Daerah potensial untuk menjadi sentra produksi ikan perikanan budidaya ini tersebar di berbagai kabupaten dan kota yaitu: Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Dharmasraya. Bentuk kegiatan budidaya air tawar yang dilakukan umumnya adalah sistem kolam, kolam air deras, karamba, jaring apung, dan budidaya ikan pada lahan sawah yang dikenal dengan istilah minapadi.

Budidaya air payau biasa dilakukan pada kolam di daerah pesisir dengan salinitas air berkategori sedang hingga mendekati salinitas air laut. Kolam air payau (*brackish water pond*) yang disebut tambak. Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Padang Pariaman secara geografi menjadi wilayah untuk pengembangan budidaya air payau di Sumatera Barat.

Berdasarkan tingkat produksi masing-masing daerah, Kabupaten Pasaman Barat merupakan wilayah pemasok ikan terbesar dan menjadi sentra produksi perikanan laut terpenting di Sumatera Barat. Diikuti oleh enam sentra produksi perikanan laut lainnya seperti Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kota Padang, Kota Pariaman, dan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sebagai produsen perikanan laut terbesar, Kabupaten Pasaman Barat menghasilkan sekitar 40 % produksi perikanan Sumatera Barat.

Berbagai jenis ikan dihasilkan dari tujuh sentra produksi perikanan laut di atas. Setidaknya terdapat tujuh jenis ikan laut dengan tingkat produksi yang besar seperti tatengkek, kwee, tongkol, selar, teri dan udang. Melihat dari jenis dan jumlah ikan yang

dihasilkan, sekitar 20 sampai 30 persen atau sekitar 41,1 ribu ton diantaranya merupakan jenis ikan yang memungkinkan dikalengkan. Jumlah ini relatif sangat memadai dalam sebuah industri pengalengan ikan. Namun demikian, sejauh ini industri pengolahan hasil perikanan laut di Sumatera Barat masih didominasi oleh pengolahan bercorak tradisional seperti pada Tabel 2.6

Tabel 2.6
Jenis Industri Pengolahan Sumatera Barat

NO	KABUPATEN / KOTA	INDUSTRI PENGOLAHAN
	Kabupaten :	
1.	Kepulauan Mentawai	Penggaraman pengeringan
2.	Pesisir Selatan	Penggaraman pengeringan
3.	Solok	Pengasapan, pengolahan lain
4.	Sawahlunto	Pengasapan, segar, pengolahan lain
5.	Tanah Datar	Pengolahan lain
6.	Padang Pariaman	Penggaraman, pemindangan, surimi, segar
7.	Agam	Penggaraman pengeringan, pengasapan
8.	Lima Puluh Kota	Penggaraman pengeringan, pengasapan
9.	Pasaman	Pengeringan, pengasapan
10.	Solok Selatan	Pengeringan, pengolahan lain
11.	Dharmasraya	Pengasapan, pengolahan lain
12.	Pasaman Barat	Penggaraman pengeringan, segar
	Kota :	
13.	Padang	Penggaraman, pemindangan, surimi, abon, segar
14.	Solok	Pengasapan, pereduksian
15.	Sawah Lunto	Pengolahan lain
16.	Padang Panjang	Pengasapan, surimi
17.	Bukittinggi	Pengasapan, pengolahan lain
18.	Payakumbuh	Pengasapan, pengolahan lain
19.	Pariaman	Penggaraman pengeringan, pereduksian

Sumberdaya Ekosistem Pesisir dan Maritim: Hutan Bakau Terumbu Karang, Padang Lamun dan Rumput Laut

Keanekaragaman hayati laut Sumatera Barat yang terdapat di ekosistem pesisir (ekosistem *mangrove*, terumbu karang dan rumput laut) memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan baik bagi kepentingan konservasi maupun ekonomi produktif. Ekosistem pesisir berupa hutan bakau (*mangrove*), terumbu karang (*coral reef*), lamun dan rumput laut memiliki fungsi ekologis yang vital bagi kelestarian sumberdaya hayati di wilayah pesisir dan laut, karena berfungsi sebagai habitat bagi berbagai populasi organisme bahari selama hidupnya juga merupakan daerah pemijahan (*spawning ground*) dan ekosistem pesisir berupa hutan bakau (*mangrove*), terumbu karang (*coral reef*), lamun dan rumput laut memiliki fungsi ekologis yang vital bagi kelestarian sumberdaya hayati di wilayah pesisir dan laut. Karena, ekosistem-ekosistem tersebut selain sebagai habitat bagi berbagai populasi organisme bahari selama hidupnya juga merupakan daerah pemijahan (*spawning ground*) dan pembesaran (*nursery ground*) dari populasi lain yang membentuk struktur komunitas sumberdaya perikanan laut sebelum populasi tersebut baik secara individual maupun komunal bermigrasi ke perairan samudera. Di samping fungsi bioekologi, keberadaan ekosistem bakau dan terumbu karang sangat penting pula perannya dalam melindungi pantai dari pengikisan oleh gelombang laut.

Luas terumbu karang di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 diperkirakan 36.693,27 Ha dengan rata-rata tingkat kerusakan mencapai 82%. Kerusakan terjadi akibat proses yang berlangsung secara alami di samping dampak aktifitas manusia seperti tergerus oleh jangkar kapal, membom ikan, pengambilan karang, dsb. Usaha-usaha

untuk menanggulangi keadaan ini telah dilakukan melalui berbagai proyek pelestarian terumbu karang mencakup kegiatan pengembangan mata pencarian alternative bagi masyarakat pesisir dan kegiatan melibatkan masyarakat dalam penanaman terumbu karang (*coral farming*).

Sebaran terumbu karang di Sumatera Barat disajikan pada Tabel 2.7. Terumbu karang yang terdapat di perairan laut Sumatera Barat pada umumnya adalah jenis terumbu karang tepi (*fringing reef*). Terumbu karang ini menyebar sepanjang garis pantai walaupun terdapat juga beberapa koloni terumbu karang yang tersebar secara mengelompok (*patch reef*).

Tabel 2.7
Sebaran Terumbu Karang di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015

No.	Kabupaten/Kota	Areal (Ha)
1.	Kabupaten Pasaman Barat	244,5
2.	Kabupaten Pesisir Selatan	1.065,37
3.	Kabupaten Padang Pariaman	54,60
4.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	35.218
5.	Kabupaten Agam	16,2
6.	Kota Padang	83,65
7.	Kota Pariaman	10,95
Jumlah		36.693,27

Sumber data: DKP Provinsi, 2015

Hutan bakau di Sumatera Barat tahun 2015 seluas 43.186,71 Ha dengan kondisi 77,33% dalam keadaan baik, 7,67% dalam keadaan sedang dan 15% dalam keadaan rusak. Sumber utama kerusakan hutan bakau adalah akibat dampak pemanfaatan hutan bakau secara langsung dan secara tidak langsung. Diantaranya adalah pemanfaatan hutan bakau yang dikonversi menjadi areal pemukiman, perkebunan, lokasi pertambangan dan lain-lain. Upaya pelestarian hutan bakau dilakukan dengan cara memberi kesadaran kepada masyarakat arti penting hutan bakau secara ekologi dan dengan melakukan penanaman bakau sekaligus juga dengan memanfaatkan bakau untuk kegiatan budidaya ikan dan kepiting bakau. Sebaran hutan bakau di Sumatera Barat disajikan pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8
Sebaran Hutan Bakau di Sumatera Barat Tahun 2015

No.	Kabupaten/Kota	Luas (Ha)
1.	Kabupaten Pasaman Barat	6.273,50
2.	Kabupaten Pesisir Selatan	2.549,55
3.	Kabupaten Padang Pariaman	190,00
4.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	32.600,00
5.	Kabupaten Agam	313,50
6.	Kota Padang	1.250,16
7.	Kota Pariaman	10,00
Total		43.186,71

Sumber: DKP Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2015

Ekosistem padang lamun dan rumput laut antara lain tersebar di Kabupaten Pasaman yakni di Pulau Panjang, Pulau Tamiang, Teluk Tapang. Spesies yang ditemui mayoritas 5 jenis antara lain: *Cymodocea semulata*, *Enhalus acoroides*, *Halodule universis*, *Halophila ovalis*, dan *Thalassia hemphrichii*. Di Kabupaten Pesisir Selatan banyak ditemukan di Desa Mandeh, Sungai Nyalo, Pulau Setan, Pulau Sironjong Besar dan Pulau Cubadak dengan spesies mayoritas *Enhaulus acoroides* dan *Thalassia hemphrichii*. Penyebaran di Kabupaten Kepulauan Mentawai terutama ditemukan di Pagai Utara Selatan dan Siberut dengan spesies yang dominan adalah *Thalassia hemphricii* di Kota Padang banyak terdapat di sungai pisang dan Pulau Pisang dengan mayoritas jenis

Enhalus acoroides dan *Thalassia hemphricii*. Budidaya rumput laut di Provinsi Sumatera Barat diusahakan masih dalam taraf skala rumah tangga, sehingga besaran tingkat pemanfaatan rumput laut masih sulit terdata. Jenis rumput laut yang diambil adalah jenis *Grasillaria sp* dan *Gellidum sp*.

Kawasan Konservasi Perairan

Provinsi Sumatera Barat saat ini sudah menetapkan tujuh lokasi sebagai Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) yang tersebar di beberapa kabupaten. KKLD tersebut berada di Pulau Kerabak Ketek dan Pulau Penyu (Kabupaten Pesisir Selatan), P. Kasiak dan P. Talua (Kabupaten Pasaman Barat), P. Saibi dan Saliguma (Kabupaten Kepulauan Mentawai) dan daerah Gasan Kabupaten Padang Pariaman.

Organisma laut yang menjadi salah satu tujuan utama konservasi dan sangat menjadi perhatian internasional adalah penyu. Sumatera Barat memiliki potensi penyu yang cukup besar terutama di Kabupaten Pesisir Selatan. Penyu biasa mendarat di pulau-pulau kecil dengan kondisi yang landai dan bersih. Eksploitasi penyu di Sumatera Barat terutama untuk diambil telurnya telah menyebabkan hewan ini berkurang populasinya. Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat melalui dana APBN lima tahun terakhir telah melakukan berbagai kegiatan, terkait dengan pelestarian penyu seperti bantuan MPA (Mata Pencaharian Alternatif), memberikan sarana pendukung penangkaran seperti (Bak pemeliharaan dan rumah jaga). Telah dilaksanakan fasilitas kelembagaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah. Pada tahun 2011 dilaksanakan *restocking* perairan umum lubuk larangan di 11 kabupaten/kota sebanyak 648.200 ekor bibit ikan yang terdiri dari 453.200 ekor bibit ikan nila berukuran 5-8 cm dan bibit ikan mas sebanyak 195.000 ekor.

Pulau-Pulau Kecil dan Pariwisata Bahari

Pulau-pulau kecil di Sumatera Barat memiliki potensi yang bisa dikembangkan untuk keperluan usaha perikanan, pengembangan hutan *mangrove*, terumbu karang dan wisata bahari. Pada saat ini pemerintah menetapkan kawasan Mandeh sebagai ikon wisata bahari Sumatera Barat. Perairan laut Sumatera Barat memiliki aset pulau-pulau kecil. Sebagian dari pulau-pulau tersebut dikelola untuk keperluan wisata seperti Pulau Cubadak, Pulau Sikuai, sementara itu ada yang dikelola untuk keperluan konservasi laut seperti Pulau Sikuai, Pulau Penyu, Pulau Pieh dan Pulau Karabak Ketek. Jumlah pulau-pulau kecil di Sumatera Barat sebanyak 185 buah pulau.

Dalam wilayah Kabupaten Pesisir Selatan terdapat 25 pulau-pulau kecil. Di sebelah utara terdapat Pulau Semangki Besar, Pulau Semangki Kecil, Pulau Marak, Pulau Cubadak, Pulau Setan Terusan, Pulau Karao, dan beberapa pulau lainnya. Pada umumnya pulau-pulau ini memiliki potensi menjadi kawasan wisata bahari, dan salah satunya Kawasan Mandeh yang sudah menjadi kawasan pengembangan wisata bahari secara nasional.

Selanjutnya potensi wisata bahari yang sangat besar dan bersifat mendunia terdapat di Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu wisata bahari untuk tujuan berselancar. Setiap tahun Seri Kejuaraan Dunia (*World Champions Surfing Series*) dilaksanakan di Mentawai karena potensi surfing area dengan gulungan, ketebalan, tinggi, dan panjang gelombangnya yang terbaik di dunia. Tiap tahun \pm 3.000 wisatawan asing datang ke Kepulauan Mentawai. Rata-rata wisatawan mancanegara tersebut menghabiskan US\$ 2.500 per orang selama kunjungan.

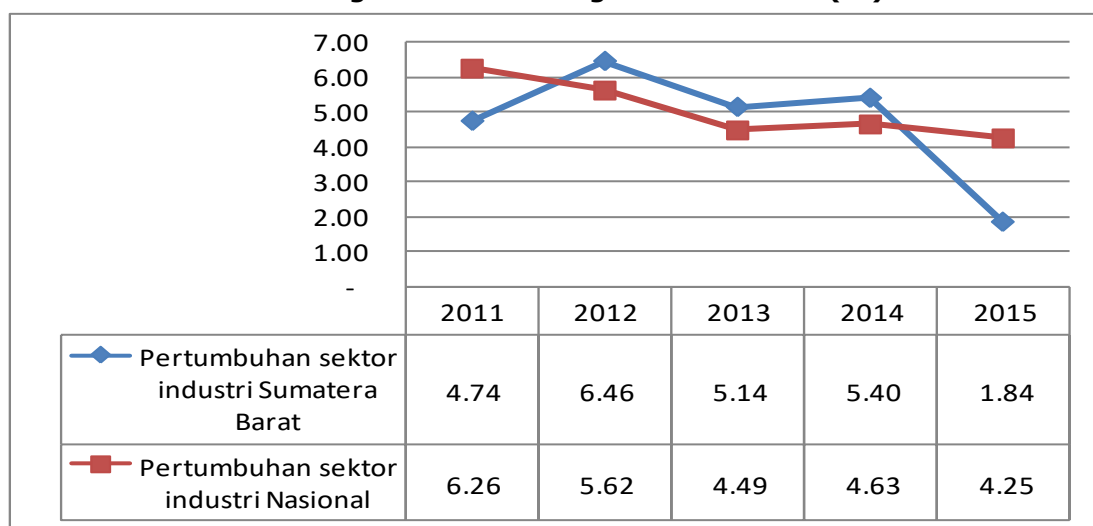
Industri

Sektor industri pengolahan merupakan sektor strategis, karena disamping diharapkan mampu menyerap tenaga kerja sangat besar juga memiliki keterkaitan kedepan dan keterkaitan kebelakang. Total nilai PDRB sektor industri pengolahan atas

dasar harga berlaku pada tahun 2015 sebesar Rp. 18.321.465,53 juta, atau setara dengan 10,97% dari total nilai PDRB Sumatera Barat.

Pertumbuhan sektor ini pada tahun 2015 sebesar 1,84 %, melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,40 %. Kondisi ini memberikan indikasi bahwa sektor industri belum mampu tumbuh seperti yang di harapkan. Grafik 2.1 memperlihatkan pertumbuhan industri pengolahan di Sumatera Barat selama periode 2011-2015.

Grafik 2.1
Pertumbuhan Industri Pengolahan Sumatera Barat
Dibandingkan Industri Pengolahan Nasional (%)



Sumber : BPS Pusdatin, data diolah

Selanjutnya nilai produksi industri kecil menengah selama 5 tahun mengalami kenaikan dari Rp. 3.500,9 juta tahun 2010 menjadi Rp. 5.812,1 juta tahun 2015 dengan nilai investasi ± Rp. 754,8 juta dan jumlah tenaga kerja 103.912 orang seperti diperlihatkan pada Tabel 2.9. Dengan demikian industri kecil dan menengah cukup berperan dalam menyerap tenaga kerja.

Tabel 2.9
Perkembangan IKM Sumatera Barat Tahun 2010-2015

Tahun	Unit Usaha	Tenaga Kerja (orang)	Nilai Investasi (Rp. Juta)	Nilai Produksi (Rp. Juta)
2010	35.860	131.243	1.157,8	3.500,9
2011	34.397	125.891	1.872,4	9.998,2
2012	31.637	120.138	904,3	4.265,3
2013	32.218	128.820	990,8	5.644,3
2014	24.841	103.912	754,8	5.812,1
2015	24.841*	103.912*	754,8*	5.812,1*

Sumber: Dinas Perindag Provinsi Sumatera Barat, Mei 2016.

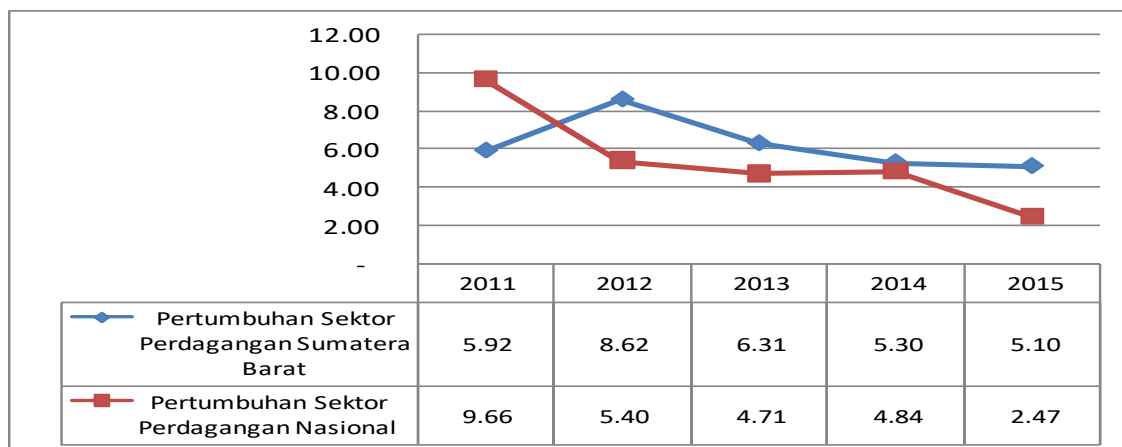
*) data masih tahun 2014

Untuk masa mendatang usaha industri kecil menengah di Sumatera Barat diharapkan dapat meningkatkan produktifitas dan nilai tambah produk-produk unggulan daerah secara terpadu, komprehensif, intensif, dan berkelanjutan. Dengan demikian peranan sektor industri akan semakin besar dalam pembentukan ekonomi Sumatera Barat.

Perdagangan

Pertumbuhan lapangan usaha perdagangan di Sumatera Barat pada periode 2011-2015 berfluktuatif dan cenderung menurun dalam 3 tahun terakhir, yaitu dari 6,31% pada tahun 2013 menjadi 5,10% pada tahun 2015. Namun pertumbuhan ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan lapangan usaha perdagangan nasional yang hanya 2,47% pada tahun 2015, sebagaimana ditunjukkan pada Grafik 2.2.

Grafik : 2.2
Pertumbuhan Sektor Perdagangan Sumatera Barat
Dibandingkan Sektor Perdagangan Nasional (%) Tahun 2011-2015



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

Selanjutnya nilai ekspor non migas mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir. Turunnya nilai ekspor non migas daerah Sumatera Barat selama lima tahun terakhir yang diperlihatkan pada Tabel 2.9. Penurunan nilai ekspor non migas ini disebabkan turunnya harga komoditas internasional terutama komoditi CPO dan karet yang mendominasi total ekspor Sumatera Barat. Selain turunnya harga komoditas, permintaan dari negara tujuan utama ekspor Sumatera Barat, seperti India dan Amerika Serikat juga mengalami penurunan seiring dengan belum pulihnya kondisi ekonomi global.

Tabel 2.10
Nilai Ekspor Non Migas Sumatera Barat Tahun 2011-2015
(Nilai FOB Juta US\$)

No	Golongan Barang	2011	2012	2013	2014	2015
1	Lemak & Minyak/Nabati	1.638,3	1.422,9	1.324,9	1.488,4	1.114,5
2	Karet dan Barang dari Karet	1.052,6	739,0	611,2	421,5	336,7
3	Bahan Bakar Mineral	135,3	44,0	81,3	55,0	12,9
4	Ampas/Sisa Industri Makan	34,5	31,8	5,0	0,6	24,0
5	Bijih, Kerak, Abu Logam	52,1	12,9	19,5	-	-
6	Biji-bijian Berminyak	16,1	10,2	9,3	18,7	-
7	Minyak Atsiri, Kosmetik wangi-wangian	15,1	17,4	11,3	11,7	8,2
8	Kakao/Coklat	56,0	31,8	35,0	10,4	-
9	Kopi, Teh, Rempah-rempah	17,7	13,6	20,0	27,9	26,0
10	Buah-buahan	10,9	13,2	10,7	16,2	13,8
	Total 10 Golongan Barang	3.028,7	2.336,8	2.168,2	2.110,4	1.536,1
	Lainnya	19,5	26,8	40,8	67,0	211,9
	Total Ekspor	3.031,8	2.363,7	2.209,0	2.105,8	1.748,0
	% Perubahan	36,89	(22,04)	(6,4)31,8	(4,68)	(16,98)

Sumber : BPS Provinsi Sumbar, data diolah

Di bidang usaha perdagangan aspek lainnya yang cukup penting adalah perlindungan terhadap konsumen sejalan dengan pemberlakuan masyarakat ekonomi ASEAN pada tahun 2015. Perlindungan tersebut dalam bentuk pengawasan terhadap barang beredar. Saat ini barang beredar yang wajib untuk diawasi (SNI wajib) berjumlah 120 produk. Sampai saat ini telah dilakukan pengawasan terhadap barang beredar seperti diperlihatkan pada Tabel 2.11.

Tabel 2.11
Pengawasan Barang Bertanda SNI, Label, MKG dan Lain-lain Tahun 2011-2015

Tahun	Komoditi					
	SNI	Label	MKG	Distribusi	Lain-lain	Jumlah
2011	-	-	-	-	-	-
2012	16	-	-	1	2	19
2013	12	-	-	1	2	15
2014	10	8	8	3	2	31
2015	7	11	11	3	2	34

Sumber : Disperindag Provinsi Sumbar

Panas Bumi

Potensi panas bumi Sumatera Barat sebesar 1.890 MWe terdiri dari potensi sumberdaya spekulatif sebesar 750 MWe, sumberdaya hipotesis 140 MWe, dan potensi cadangan terduga sebesar 1.000 MWe, berlokasi di Simisoh, Talu, Panti, Lubuk Sikaping, Situjuh, Kota Baru Merapi, Maninjau, Sumani, Priangan, Surian, Pincurak (dengan potensi sumberdaya spekulatif), Bonjol, Kecamatan Bonjol dengan cadangan terduga sebesar 165 MWe (3 x 55 MWe).

Penetapan Wilayah Kuasa Pertambangan (WKP) Panas Bumi Bonjol melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 1150.K/30/MEM/2011 dengan luas 10.100 Ha, telah dilaksanakan pelelangan pada tahun 2012 dan pada saat itu belum ada pemenang karena penawaran melebihi harga patokan tertinggi. Sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 02 Tahun 2012, dan akan dilelang kembali pada tahun berikutnya. Kawasan Cubadak, Kabupaten Pasaman dengan potensi cadangan terduga 100 MWe (berdasarkan survei Badan Geologi tahun 2011). Bukit Kili, Kabupaten Solok dengan potensi cadangan sebesar 58 MWe. Gunung Talang, Kabupaten Solok dengan potensi cadangan sebesar 36 MWe. Muaralabuh, Kabupaten Solok Selatan dengan potensi cadangan sebesar 194 MWe. Liki-Pinangawan, Kabupaten Solok Selatan dengan potensi cadangan sebesar 412 MWe.

Pariwisata

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 dan Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2025 telah menetapkan lima Kawasan Utama Pariwisata Provinsi (KUPP) yaitu **Wilayah I** (Padang dan sekitarnya) meliputi Kota Padang (KUPP); Kabupaten Pesisir Selatan (Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi/KSPP); Kabupaten Padang Pariaman (KSPP); Kota Pariaman (Kawasan Potensial Pariwisata Provinsi/KPPP); **Wilayah II** (Bukittinggi dan sekitarnya) meliputi Kota Bukittinggi (KUPP); Kabupaten Agam (KSPP); Kabupaten Lima Puluh Kota (KSPP), Kabupaten Pasaman (KPPP); Kabupaten Pasaman Barat (KPPP); Kota Payakumbuh (KPPP); **Wilayah III** (Tanah Datar dan sekitarnya) meliputi Kabupaten Tanah Datar (KUPP); Kota Padang Panjang (KSPP); Kabupaten Solok (KSPP); Kota Solok (KPPP); Kabupaten Solok Selatan (KPPP); **Wilayah IV** (Sawahlunto dan sekitarnya) meliputi Kota Sawahlunto (KUPP); Kabupaten Sijunjung (KSPP); Kabupaten Dharmasraya (KPPP); **Wilayah V** (Kepulauan Mentawai) meliputi Tua Pejat (KUPP); Sipora (KSPP); Siberut (KSPP); Pagai Utara dan sekitarnya (KPPP). Dengan demikian pengembangan pariwisata ke depan merujuk kepada wilayah pengembangan yang telah ditetapkan.

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Posisi Sumatera Barat yang terletak dekat dengan pertemuan lempeng *Indo-Australia* dan *Euro Asia* di Samudera Hindia sebelah barat Mentawai serta dilalui jalur patahan Semangka dari Solok Selatan sampai Pasaman sangat rentan terhadap bencana gempa bumi dan tsunami. Selain itu wilayah Sumatera Barat mempunyai jenis tanah yang mudah longsor. Tabel 2.12 memperlihatkan wilayah daerah rawan bencana.

Tabel 2.12
Wilayah Daerah Rawan Bencana di Provinsi Sumatera Barat

No	Kabupaten / Kota	Daerah Rawan Bencana / Potensi Bencana			
		Potensi Gerakan Tanah/ Longsor	Potensi Banjir Bandang / Banjir	Potensi Tsunami	Potensi Gempa Darat / Laut
	Kabupaten :				
1	Kepulauan Mentawai	Menengah	Menengah - Tinggi	Tinggi	Gempa Laut
2	Pesisir Selatan	Menengah - Tinggi	Menengah - Tinggi	Menengah-Tinggi	Gempa Laut
3	Solok	Menengah - Tinggi	-	-	Gempa Darat
4	Sijunjung	Menengah	-	-	-
5	Tanah Datar	Menengah - Tinggi	Menengah - Tinggi	-	Gempa Darat
6	Padang Pariaman	Menengah - Tinggi	Menengah - Tinggi	Tinggi	Gempa Darat
7	Agam	Menengah - Tinggi	Menengah - Tinggi	Tinggi	Gempa Darat
8	Lima Puluh Kota	Menengah - Tinggi	Menengah - Tinggi	-	
9	Pasaman	Menengah - Tinggi	Menengah - Tinggi	-	Gempa Darat
10	Solok Selatan	Menengah – Tinggi	-	-	
11	Dharmasraya	Menengah - Tinggi	-	-	Gempa Darat
12	Pasaman Barat	Menengah - Tinggi	Menengah - Tinggi	-	Gempa Darat
	Kota :				
13	Padang	Menengah - Tinggi	Menengah - Tinggi	Tinggi	Gempa Laut
14	Solok	Menengah - Tinggi	-	-	Gempa Darat
15	Sawahlunto	Menengah – Tinggi	-	-	-
16	Padang Panjang	Menengah - Tinggi	-	-	Gempa Darat
17	Bukittinggi	Menengah	Menengah	-	Gempa Darat
18	Payakumbuh	-	Menengah - Tinggi	-	-
19	Pariaman	-	-	Menengah-Tinggi	Gempa Laut

Keterangan :

1. Menengah – Tinggi :
Daerah yang mempunyai potensi menengah hingga tinggi untuk terjadi gerakan tanah, banjir, dan longsor. Pada zona ini dapat terjadi gerakan tanah, banjir dan longsor jika curah hujan diatas normal, terutama pada daerah yang berbatasan dengan lembah sungai, gawir, tebing jalan atau jika lereng mengalami gangguan, maka pergerakan tanah yang lama dapat aktif kembali.
2. Menengah :
Daerah yang mempunyai potensi menengah untuk terjadi gerakan tanah, banjir, dan longsor. Pada zona ini dapat terjadi gerakan tanah, banjir dan longsor jika curah hujan diatas normal, terutama pada daerah yang berbatasan dengan lembah sungai, gawir, tebing jalan atau jika lereng mengalami gangguan.
3. Tinggi :
Daerah yang mempunyai potensi Tinggi untuk terjadi Bencana Tsunami ,Gerakan Tanah, Banjir, dan longsor. Pada zona ini dapat terjadi bencana yang sangat tinggi akibat yang akan ditimbulkan jika terjadi bencana, terutama pada daerah kabupaten/ Kota yang berada di Pesisir Pantai yang berpotensi akan terjadinya Tsunami.

Berdasarkan Tabel 2.11, semua Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat mempunyai wilayah yang berpotensi untuk mengalami bencana. Oleh sebab itu kegiatan pencegahan dan program penyiapan menghadapi bencana perlu mendapat perhatian oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

2.1.4. Demografi

Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010 (Badan Pusat Statistik, BPS), dihitung dari jumlah penduduk yang mendiami suatu wilayah lebih dari 6 bulan, total penduduk Provinsi Sumatera Barat tahun 2010 berjumlah 4.865.333 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki 2.409,2 ribu jiwa dan perempuan 2.456,1 ribu jiwa. Hasil proyeksi penduduk Sumatera Barat tahun 2015 berjumlah 5.196,30 ribu jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki 2.584,2 ribu jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 2.612,1 ribu jiwa. Sebaran penduduk Sumatera Barat menurut Kabupaten/Kota dapat dilihat pada Tabel 2.13.

Aspek kependudukan merupakan hal paling mendasar dalam pembangunan, yang secara universal, penduduk merupakan subjek dan objek pembangunan. Untuk itu perlu dilakukan pengendalian penduduk yang meliputi kuantitas dan kualitas.

Tabel 2.13
Jumlah Penduduk Sumatera Barat Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2010 – 2015

No	Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Kabupaten :						
1	Kep.Mentawai	76.476	78.215	79.976	81.840	83.603	85.295
2	Pesisir Selatan	430.905	434.884	438.891	442.681	446.479	450.186
3	Solok	349.916	352.814	355.628	358.383	361.095	363.684
4	Sijunjung	202.601	206.584	210.675	214.560	218.588	222.512
5	Tanah Datar	339.792	340.906	341.911	342.864	343.875	344.828
6	Padang Pariaman	392.503	395.420	398.223	400.890	403.530	406.076
7	Agam	456.607	460.818	465.018	468.970	472.995	476.881
8	Lima Puluh Kota	349.906	353.915	357.772	361.645	365.389	368.985
9	Pasaman	254.312	257.511	260.674	263.838	266.888	269.883
10	Solok Selatan	144.797	147.884	150.885	153.943	156.901	159.796
11	Dharmasraya	192.100	198.273	204.510	210.686	216.928	223.112
12	Pasaman Barat	366.474	375.314	384.206	392.907	401.624	410.307
	Kota :						
13	Padang	836.671	850.306	863.401	876.670	889.561	902.413
14	Solok	59.631	60.904	62.198	63.541	64.819	66.106
15	Sawahlunto	57.086	57.681	58.419	58.972	59.608	60.186
16	Padang Panjang	47.198	47.982	48.719	49.536	50.208	50.883
17	Bukittinggi	111.725	113.903	116.075	118.260	120.491	122.621
18	Payakumbuh	117.320	119.372	121.502	123.654	125.690	127.826
19	Pariaman	79.311	80.426	81.501	82.636	83.610	84.709
	SUMBAR	4.865.331	4.933.112	5.000.184	5.066.476	5.131.882	5.196.289

Sumber Data : BPS, Publikasi Proyeksi Penduduk Indonesia 2010- 2016, SP 2010

Pertumbuhan jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat terus mengalami penurunan setiap tahun, dengan laju pertumbuhan penduduk tahun 2011 sebesar 1,40% menjadi 1,26 pada tahun 2015 seperti terlihat pada Tabel 2.14.

Tabel 2.14
Struktur Penduduk Provinsi Sumatera Barat Menurut Jenis Kelamin (jiwa)

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah penduduk :	4.933.112	5.000.184	5.066.476	5.131.882	5.196.289
	Laki-laki	2.445.312	2.480.901	2.515.942	2.550.392	2.584.192
	Perempuan	2.487.800	2.519.283	2.550.534	2.581.490	2.612.097
2	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	1,40	1,36	1,33	1,30	1,26

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

Selain itu, perbandingan jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010 dengan provinsi lainnya di Pulau Sumatera, terlihat bahwa provinsi Sumatera Barat berada pada urutan ke lima, seperti terlihat pada Tabel 2.15.

Tabel 2.15
Jumlah Penduduk se Sumatera Tahun 2011-2015 (orang)

PROVINSI	2011	2012	2013	2014	2015
1. Aceh	4.597.308	4.693.934	4.791.924	4.906.835	5.001.953
2. Sumatera Utara	13.220.936	13.408.202	13.590.250	13.766.851	13.937.797
3. Sumatera Barat	4.933.112	5.000.184	5.066.476	5.131.882	5.196.300
4. Riau	5.726.200	5.879.100	6.033.300	6.188.442	6.344.402
5. Jambi	3.169.814	3.227.096	3.286.070	3.344.421	3.402.052
6. Sumatera Selatan	7.593.425	7.701.528	7.941.495	7.941.495	8.052.315
7. Bengkulu	1.752.956	1.783.725	1.814.357	1.844.788	1.874.944
8. Lampung	7.735.914	7.835.308	7.932.132	8.026.191	8.117.268
9. Kep.Bangka Belitung	1.258.234	1.286.551	1.315.123	1.343.881	1.372.813
10. Kep.Riau	1.748.810	1.805.089	1.861.373	1.917.415	1.973.043

Sumber : Indikator Sosial Ekonomi se Sumaera Tahun 2016

Gambar : 2.5
Komposisi Penduduk Sumatera Barat Menurut Kelompok Umur Tahun 2015

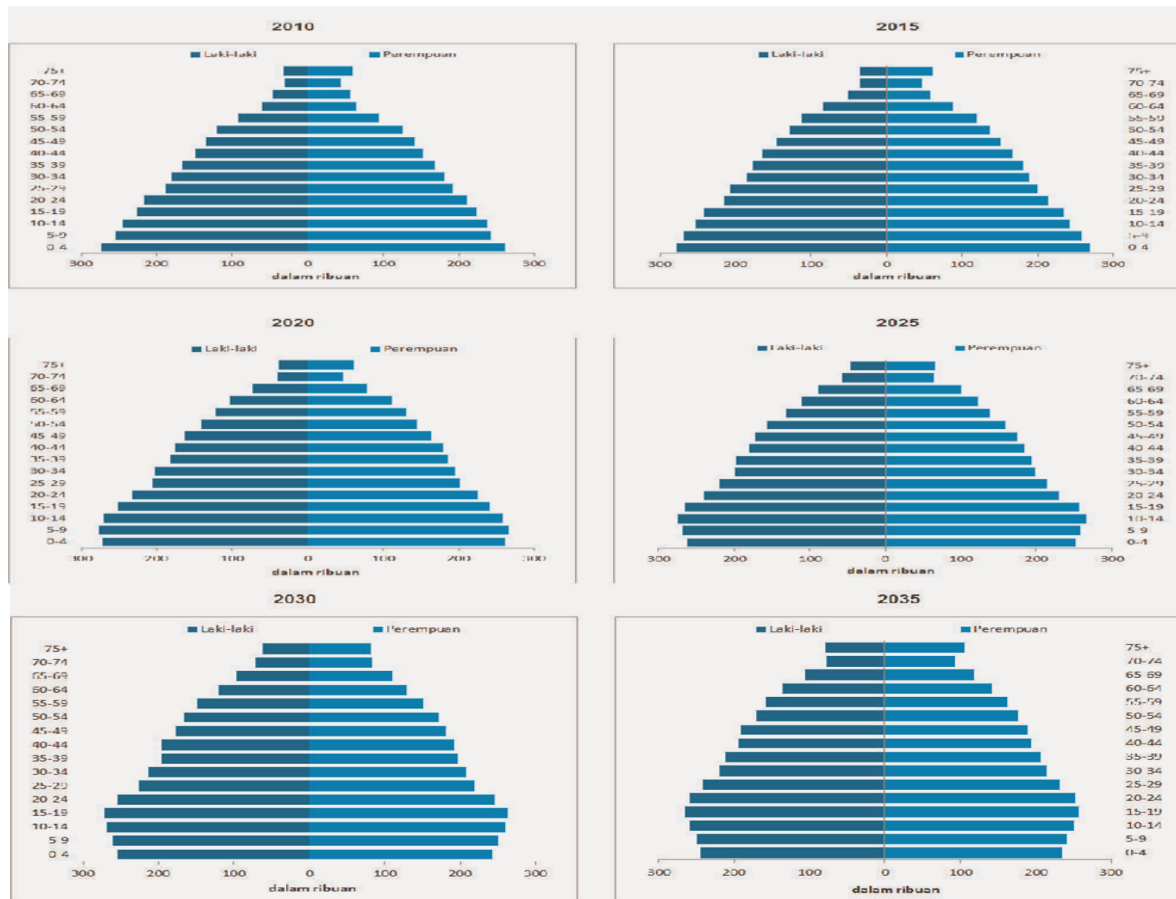


Komposisi penduduk Sumatera Barat didominasi oleh penduduk berusia 15-64 tahun sebesar 64,28 %, usia 0-14 tahun sebesar 30,25 % sedangkan penduduk usia 65 tahun ke atas sebesar 5,47 %. Angka persentase *dependency ratio* (rasio ketergantungan) Sumatera Barat sebesar 55,58 %, yang menunjukkan beban yang ditanggung penduduk produktif sebanyak 100 orang, membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi sebanyak 56 orang.

Pertumbuhan penduduk Sumatera Barat mengalami peningkatan setiap tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Jumlah penduduk Sumatera Barat tahun 2010 sebanyak 4.865.331 jiwa, pada tahun 2011 sebanyak 4.933.112 jiwa dan terus bertambah hingga tahun 2015 menjadi 5.196.300 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk tahun 2011 sebesar 1,19 % menjadi 1,09 % tahun 2012 dan naik menjadi 1,33 % tahun 2013. Pada tahun 2015 laju pertumbuhan penduduk dapat diturunkan menjadi 1,26 %. Salah satu penyebab masih tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk di Sumatera Barat karena masih tingginya angka kelahiran per perempuan usia reproduktif 15-49 tahun (*Total Fertility Rate/ TFR*) (data BKKBN Provinsi Sumatera Barat) untuk kondisi tahun 2015, menunjukkan angka kelahiran total yaitu sebesar 2,7 kelahiran.

Peningkatan jumlah penduduk akan berdampak terhadap penyediaan sarana prasarana pelayanan dasar antara lain pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur serta kebutuhan pangan yang perlu mendapat perhatian didalam menyusun program dan kegiatan pembangunan.

Gambar : 2.6
Proyeksi Penduduk Sumatera Barat Menurut Kelompok Umur
Tahun 2015-2035



Berdasarkan proyeksi penduduk Sumatera Barat Tahun 2015-2035, maka Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu Provinsi yang tidak mendapatkan bonus demografi karena pada umur angkatan kerja 14 - 65 tahun, penduduk Sumatera Barat mulai umur 17 atau 18 tahun cenderung keluar dari Provinsi Sumatera Barat karena budaya merantau untuk pendidikan dan mencari pekerjaan di luar Sumatera Barat, namun demikian ada beberapa kabupaten/kota yang akan mencapai bonus demografi karena masuknya umur angkatan kerja.

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Kesejahteraan masyarakat tergambar dari tingkat pendapatan, pendidikan dan derajat kesehatan. Indikator yang sering digunakan dalam melihat perkembangan kesejahteraan masyarakat adalah Indek Pembangunan Manusia (IPM). Sejak lima tahun terakhir terus terjadi peningkatan IPM, dari 67,25 pada tahun 2010 menjadi 69,98 pada tahun 2015, hal ini memberikan indikasi bahwa terjadi perbaikan kesejahteraan masyarakat dalam kurun waktu tersebut. Perkembangan indeks pembangunan manusia dan komponennya dapat dilihat pada Tabel 2.16.

Tabel 2.16
Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2010-2015

NO	KOMPONEN IPM	SATUAN	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Angka Harapan Hidup Saat Lahir	Tahun	67,59	67,79	68,00	68,21	68,32	68,66
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,22	12,52	12,81	13,16	13,48	13,60
3	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,13	8,20	8,27	8,28	8,29	8,42
4	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan	Ribu Rp/ Org/Th	9.339	9.409	9.479	9.570	9.621	9.804
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PROV.SUMATERA BARAT			67,25	67,81	68,36	68,91	69,36	69,98

Sumber : Badan Pusat Statistik Sumatera Barat Tahun 2015

2.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu wilayah dalam suatu periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumatera Barat tahun 2015 atas dasar harga berlaku mencapai Rp 178,81 triliun, dan harga konstan sebesar Rp. 140,53 triliun dengan PDRB perkapita sebesar Rp 34,41 juta atau US\$ 2 572,41. Ekonomi Sumatera Barat tahun 2015 tumbuh 5,41 % melambat dibanding tahun 2014 sebesar 5,86 %. Dari sisi produksi, kinerja lapangan usaha pertanian yang merupakan kontributor terbesar dalam perekonomian mengalami perlambatan dari 5,84 % tahun 2014 menjadi 4,33 % di tahun 2015. Dari sisi pengeluaran, perlambatan disebabkan oleh melemahnya komponen pembentukan modal tetap bruto dari 5,23 % di tahun 2014 menjadi 4,34 % di Tahun 2015, seperti terlihat pada Tabel 2.17.

Tabel 2.17
Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2010-2015 (Persen)

LAPANGAN USAHA	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1. Pertanian, Kehutanan & Perikanan	1.72	4.61	2.63	3.42	5.86	4.33
2. Pertambangan dan Penggalian	6.56	5.15	5.82	7.61	4.34	3.58
3. Industri Pengolahan	2.18	4.74	6.46	5.14	5.40	1.84
4. Pengadaan Listrik & Gas	-1.11	4.90	8.14	3.56	8.68	0.84
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	5.47	4.22	3.69	4.92	3.89	5.99
6. Konstruksi	8.58	7.80	9.96	10.30	6.58	6.85
7. Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.92	5.92	8.62	6.31	5.30	5.10
8. Transportasi dan Pergudangan	9.02	8.53	7.77	8.47	7.51	8.07
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.62	4.76	5.29	5.90	6.44	6.85
10. Informasi dan Komunikasi	14.18	9.24	11.75	9.11	8.37	9.86
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	5.28	9.30	9.79	6.27	5.14	3.63
12. Real Estate	4.84	4.05	4.60	5.50	5.56	5.30
13. Jasa Perusahaan	6.47	4.93	5.96	7.30	6.97	6.15
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	10.29	8.85	0.16	1.75	1.95	4.71
15. Jasa Pendidikan	12.70	8.45	10.13	8.39	6.18	8.92
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9.08	8.11	10.55	7.76	7.97	7.27
17. Jasa Lainnya	6.96	5.98	6.79	5.30	6.52	7.46
PDRB SUMATERA BARAT	5.60	6.34	6.31	6.02	5.85	5.41

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Sumatera Barat Tahun 2014-2015

Kalau dibandingkan antara pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat dengan provinsi se Sumatera dan nasional pada tahun 2015, terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat berada di posisi ke dua setelah Provinsi Kepulauan Riau dan berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional, seperti terlihat pada Tabel 2.18.

Tabel 2.18
Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi se Sumatera Tahun 2011-2015 (%)

PROVINSI/NASIONAL	2011	2012	2013	2014	2015
1. Aceh	3,28	3,85	2,61	1,55	-0,72
2. Sumatera Utara	6,66	6,45	6,07	5,23	5,10
3. Sumatera Barat	6,34	6,31	6,08	5,86	5,41
4. Riau	5,57	3,76	2,48	2,70	0,22
5. Jambi	7,86	7,03	6,84	7,35	4,21
6. Sumatera Selatan	6,36	6,83	5,31	4,70	4,50
7. Bengkulu	6,85	6,83	6,07	5,48	5,14
8. Lampung	6,56	6,44	5,78	5,08	5,13
9. Kep.Bangka Belitung	6,90	5,40	5,20	4,67	4,08
10.Kep.Riau	6,96	7,63	7,11	7,32	6,02
Nasional	6,49	6,26	5,56	5,02	4,79

Sumber : Indikator Sosial Ekonomi se Sumatera Tahun 2016

Sementara untuk PDRB per kapita atas dasar harga berlaku secara regional dari sepuluh provinsi di Pulau Sumatera, Provinsi Sumatera Barat berada pada posisi ke tujuh di atas Lampung, Bengkulu dan Aceh. Provinsi yang memiliki sumber minyak, gas, mineral dan pertambangan memiliki PDRB yang tinggi yang secara langsung berpengaruh terhadap PDRB per kapita seperti Kepulauan Riau, Provinsi Riau, Sumatera Selatan dan Provinsi Jambi, yang terlihat pada Tabel 2.19.

Tabel 2.19
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku di Provinsi se Sumatera Tahun 2011-2015 (Rp. Juta)

PROVINSI	2011	2012	2013	2014	2015
1. Aceh	23,43	24,29	25,22	26,09	25,83
2. Sumatera Utara	28,52	31,11	34,54	37,91	41,02
3. Sumatera Barat	24,06	26,29	28,99	32,13	34,41
4. Riau	84,81	95,00	100,69	109,78	102,83
5. Jambi	32,68	35,66	39,55	43,30	45,59
6. Sumatera Selatan	29,83	32,83	36,02	38,83	41,32
7. Bengkulu	18,37	20,30	22,36	24,61	26,85
8. Lampung	21,98	23,91	25,77	28,78	31,19
9. Kep.Bangka Belitung	32,47	35,29	38,31	41,95	44,43
10.Kep.Riau	72,57	80,24	87,71	94,73	103,03

Sumber : Indikator Sosial Ekonomi se Sumatera Tahun 2016

Struktur perekonomian Sumatera Barat menurut lapangan usaha tahun 2015 didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan 24,84 %, perdagangan besar-eceran dan reparasi mobil-sepeda motor 14,68 % serta transportasi dan pergudangan 12,05 %, seperti terlihat pada Tabel 2.20.

Tabel 2.20
Struktur Ekonomi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 (%)

LAPANGAN USAHA	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1. Pertanian, Kehutanan & Perikanan	25.97	25.74	25.02	24.68	25.00	24,84
2. Pertambangan dan Penggalian	4.55	4.46	4.44	4.60	4.88	4,94
3. Industri Pengolahan	11.69	11.71	11.53	11.02	10.57	10,97
4. Pengadaan Listrik & Gas	0.10	0.08	0.07	0.06	0.07	0,09

LAPANGAN USAHA	2010	2011	2012	2013	2014	2015
5. Pengadaan Air	0.11	0.10	0.10	0.09	0.09	0,09
6. Konstruksi	7.88	8.04	8.37	8.77	9,11	9,45
7. Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15.14	15.05	15.11	14.77	14.40	14,68
8. Transportasi dan Pergudangan	10.42	10.62	10.58	11.23	11.78	12,05
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.02	1.03	1.05	1.07	1.12	1,22
10. Informasi dan Komunikasi	5.49	5.40	5.56	5.26	5.12	4,79
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	2.89	2.94	3.16	3.15	3.10	3,12
12. Real Estate	2.05	1.98	1.92	1.93	1.97	2,01
13. Jasa Perusahaan	0.44	0.42	0.42	0.43	0.42	0,43
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6.32	6.37	6.39	6.29	5,88	5,43
15. Jasa Pendidikan	3.21	3.32	3.46	3.69	3.60	3,71
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.20	1.23	1.32	1.34	1.28	1,26
17. Jasa Lainnya	1.53	1.51	1.51	1.62	1.62	1,64
PDRB SUMATERA BARAT	100	100	100	100	100	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Sumatera Barat Tahun 2016

Dari sisi pengeluaran, stimulus fiskal pemerintah baik berupa konsumsi maupun investasi pemerintah menjadi penopang bagi pertumbuhan ekonomi. Dibandingkan tahun 2014, komponen konsumsi rumah tangga dan pengeluaran konsumsi pemerintah mengalami kenaikan yaitu 4,30 persen dan 4,68 persen pada tahun 2015, sedangkan pengeluaran konsumsi lembaga non profit turun dari 13,42% tahun 2014 menjadi 3,39% tahun 2015 diikuti penurunan ekspor luar negeri dari 14,15% menjadi 12,74 % pada tahun 2015.

Dilihat dari pola distribusi penggunaan tahun 2015, pengeluaran konsumsi rumah tangga masih merupakan penyumbang terbesar dalam PDRB Provinsi Sumatera Barat sebesar 54,01 %, mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun 2014 yaitu sebesar 53,53 %.

Penyumbang kedua adalah pembentukan modal tetap bruto sebesar 31,22 persen dan pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 13,72 % yang juga mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2014 sebesar 30,18 % dan 13,21 %. Laju pertumbuhan dan struktur ekonomi menurut penggunaan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.21.

Tabel 2.21.
Pertumbuhan Ekonomi dan Struktur Ekonomi
Menurut Penggunaan di Sumatera Barat, Tahun 2013-2015

KOMPONEN PENGGUNAAN	PERTUMBUHAN EKONOMI			STRUKTUR EKONOMI		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4.48	4.21	4.30	54.64	53.53	54.01
Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit	12.05	13.42	3.39	1.08	1.12	1.12
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4.83	3.31	4.68	13.40	13.21	13.72
Pembentukan Modal Tetap Bruto	4.62	5.23	4.34	29.75	30.18	31.22
Perubahan Inventori	-59.36	-83.36	17.37	0.52	0.04	0.09
Ekspor Luar Negeri	9.83	3.32	5.84	14.30	14.15	12.74
Impor Luar Negeri	-14.44	4.76	-1.73	8.35	8.40	5.51
Net Ekspor Antar Daerah	11.35	-26.50	-6.04	-5.35	-3.83	-7.39
PDRB SUMATERA BARAT	6.08	5.86	5.41	100,0	100,0	100,0

Sumber : Badan Pusat Statistik Sumatera Barat Tahun 2016.

Laju Inflasi

Perekonomian sangat dipengaruhi oleh tingkat inflasi, dimana barometer inflasi di Sumatera Barat adalah Kota Padang dan Kota Bukittinggi. Laju inflasi tahun kalender Kota Padang sampai Desember 2015 adalah sebesar 0,85 %. Sedangkan di Kota Bukittinggi laju inflasi tahun kalender sampai Desember 2015 adalah 2,79 %. Dari inflasi kedua kota tersebut maka inflasi Sumatera Barat Tahun 2015 sebesar 1,08%.

Inflasi di Sumatera Barat sangat dipengaruhi antara lain oleh: kelompok bahan makanan, kelompok makanan jadi, minum, rokok dan tembakau, kelompok perumahan, air ,listrik, gas dan bahan bakar, kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga, kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan.

Secara umum inflasi di Sumatera Barat cenderung berada di atas nasional, kecuali pada tahun 2015 yang jauh berada di bawah inflasi nasional, seperti terlihat pada Tabel 2.22.

Tabel 2.22
Laju Inflasi Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2010 – 2015 (%)

URAIAN	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Sumatera Barat	7,84	5,37	4,16	10,87	11,90	1,08*)
Nasional	6,96	3,79	4,30	8,38	8,36	8,36

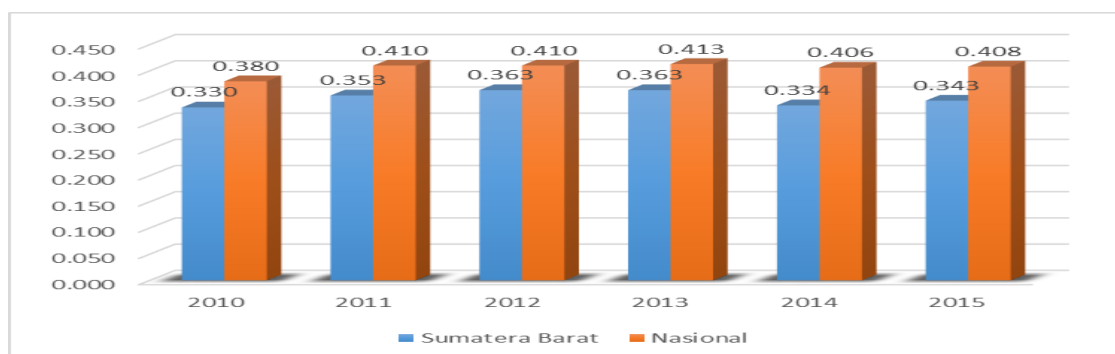
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016

*) Data Bank Indonesia

Ketimpangan Pendapatan dan Ketimpangan Wilayah

Indikator yang menggambarkan tingkat ketimpangan pendapatan adalah Indeks Gini Ratio atau Koefisien Gini. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Koefisien Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Koefisien Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk. Indeks Gini Ratio di Sumatera Barat selama lima tahun terakhir menunjukkan distribusi pendapatan yang relatif merata, seperti terlihat pada Diagram 2.1.

Diagram : 2.1
Gini Ratio Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2010-2015



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016

Ketimpangan wilayah diukur berdasarkan Indeks Williamson yang dikelompokkan ke dalam kategori wilayah dengan tingkat ketimpangan rendah dengan nilai indeks williamson $<0,3$, tingkat ketimpangan sedang dengan nilai indeks williamson antara $0,3 - 0,7$, dan tingkat ketimpangan tinggi dengan indeks williamson $>0,7$. Sumatera Barat berada pada tingkat ketimpangan sedang dengan indeks selama lima tahun terakhir berada pada kisaran $0,45 - 0,35$ yang cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya

atau ketimpangannya semakin berkurang. Sampai dengan tahun 2015 Sumatera Barat masih memiliki tiga daerah kabupaten tertinggal yakni Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat yang perlu mendapat prioritas penanganannya untuk bisa lepas dari ketertinggalan.

2.2.2. Kesejahteraan Sosial

Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman dan berkualitas tinggi merupakan prasyarat mutlak untuk dapat mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015, yang antara lain diarahkan kepada peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang lebih merata.

Indikator kinerja kesejahteraan sosial dari aspek kesehatan dilihat dari penurunan angka kematian bayi, peningkatan angka usia harapan hidup, persentase balita gizi buruk. Untuk lebih jelasnya perkembangan kesejahteraan sosial di bidang kesehatan dapat dilihat pada Tabel 2.23.

Tabel 2.23
Perkembangan Kesejahteraan Sosial di Bidang Kesehatan
di Sumatera Barat Tahun 2010-2015 (%)

Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Angka kematian bayi (per 1.000 kelahiran hidup)	28	28	27	27	27	27
Usia harapan hidup	67.59	67.79	68	68.21	68.32	68,66
Persentase balita gizi buruk	8.2	8.2	6.5	4.3	5.9	4.8

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat

Angka Kematian Bayi

Perkembangan angka kematian bayi di Provinsi Sumatera Barat selama periode 2010-2015 mengalami penurunan dari 28 per 1.000 Kelahiran Hidup (KH) pada tahun 2010 menjadi 27 per 1.000 KH pada tahun 2015 namun penurunannya belum signifikan. Kinerja ini perlu terus dilanjutkan dan ke depan pelaksanaan program pembangunan dibidang kesehatan perlu lebih ditingkatkan untuk menekan kematian bayi yang lebih rendah.

Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan indikator makro yang cukup penting dalam pembangunan sosial budaya dan sumber daya manusia. Secara rata-rata angka harapan hidup Provinsi Sumatera Barat selama periode 2010-2015 memang masih berada dibawah angka harapan hidup rerata Indonesia tahun 2015 sebesar 70,59 tahun dan Sumatera Barat sebesar 68,66 tahun. Usia harapan hidup Provinsi Sumatera Barat selama lima tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan, hal ini menggambarkan bahwa derajat kesehatan masyarakat terus mengalami perbaikan.

Persentase Balita Gizi Buruk

Gizi buruk masih merupakan permasalahan kesehatan masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian, seperti kekurangan pada balita. Berdasarkan data yang ada perkembangan angka prevalensi balita gizi buruk di Provinsi Sumatera Barat selama periode 2010 – 2015 sudah mencapai prevalensi dibawah 5 %.

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan ini disebabkan semakin tingginya kesadaran masyarakat terutama ibu-ibu yang mempunyai anak balita untuk membawa ke posyandu untuk penimbangan serta gencarnya penyuluhan gizi ditengah

masyarakat serta adanya peran serta PKK yang semakin tinggi. Selain itu, setiap anak balita keluarga miskin diberikan makan pendamping (MP) ASI yaitu bubur susu bagi anak berumur 6 – 11 bulan dan biskuit untuk anak berumur 12 - 24 bulan selama 90 Hari Makan Anak (HMA).

Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS, BPS), untuk mengukur kemiskinan digunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan, maka jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Barat pada kondisi September 2015 adalah 349.529 jiwa, mengalami penurunan 0,6 persen dibandingkan kondisi Maret 2015. Lebih dari dua per tiga penduduk miskin atau tepatnya 66,10 persen penduduk miskin tinggal di perdesaan, sedangkan sekitar 33,89 persen penduduk miskin tinggal di perkotaan, seperti terlihat dalam Tabel 2.24.

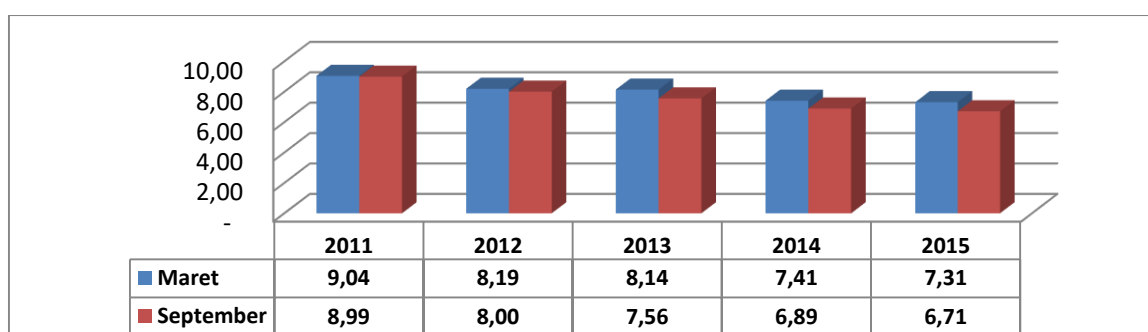
Tabel 2.24
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Barat
Maret 2010 – September 2015

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)			Persentase Penduduk Miskin		
	Perkotaan	Perdesaan	Jumlah	Perkotaan	Perdesaan	Jumlah
Maret 2010	106.181	323.843	430.024	6,84	10,88	9,50
Maret 2011	141.240	303.198	444.438	7,42	10,07	9,04
Sept 2011	145.988	298.782	444.770	7,61	9,85	8,99
Maret 2012	128.817	279.138	407.955	6,67	9,14	8,19
Sept 2012	125.388	276.133	410.521	6,45	8,99	8,00
Maret 2013	120.604	290.518	411.121	6,16	9,39	8,14
Sept 2013	126.024	258.061	384.085	6,38	8,30	7,56
Maret 2014	108.076	271.120	379.196	5,43	8,68	7,41
Sept 2014	108.532	246.206	354.738	5,41	7,84	6,89
Maret 2015	118.034	261.575	379.609	5,73	8,35	7,31
Sept 2015	118.481	231.048	349.529	5,73	7,35	6,71

Sumber Data : Susenas, BPS

Perkembangan penurunan persentase penduduk miskin di Provinsi Sumatera Barat jika dibandingkan pada kondisi Maret yaitu dari 9,04 persen pada Maret 2011 menjadi 7,31 persen pada Maret 2015, sedangkan jika dibandingkan pada kondisi September yaitu dari 8,99 persen pada September 2011 turun menjadi 6,71 pada September 2015, sebagaimana pada Diagram 2.2.

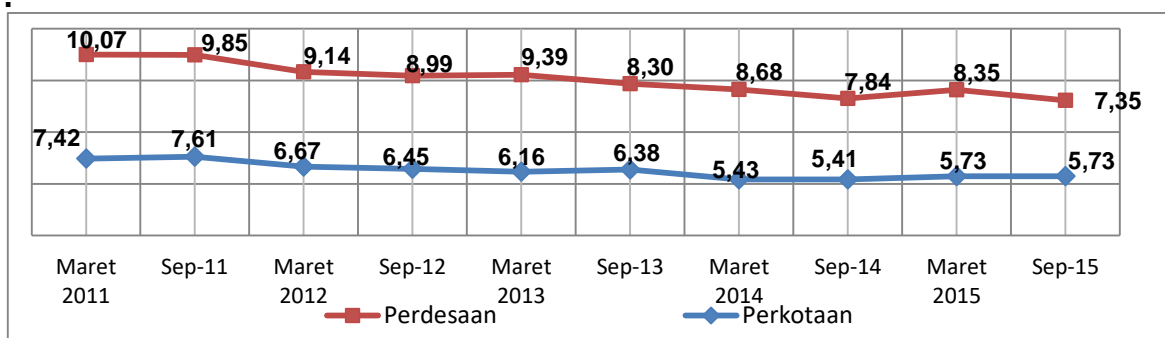
Diagram 2.2.
Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Barat
Kondisi Maret dan September 2011-2015



Sumber : Badan Pusat Statistik Sumatera Barat

Jika dilihat dari perkembangan menurut perdesaan dan perkotaan persentase penduduk miskin di daerah perdesaan mengalami perubahan relative lebih tinggi dari daerah perkotaan. Penduduk miskin daerah perkotaan sama dengan kondisi Maret 2015, yaitu 5,73 persen sedangkan di daerah perdesaan, persentase penduduk miskinnya mengalami penurunan dari 8,35 persen menjadi 7,35 persen. Perkembangan persentase penduduk miskin di Provinsi Sumatera Barat menurut daerah lima tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik 2.3.

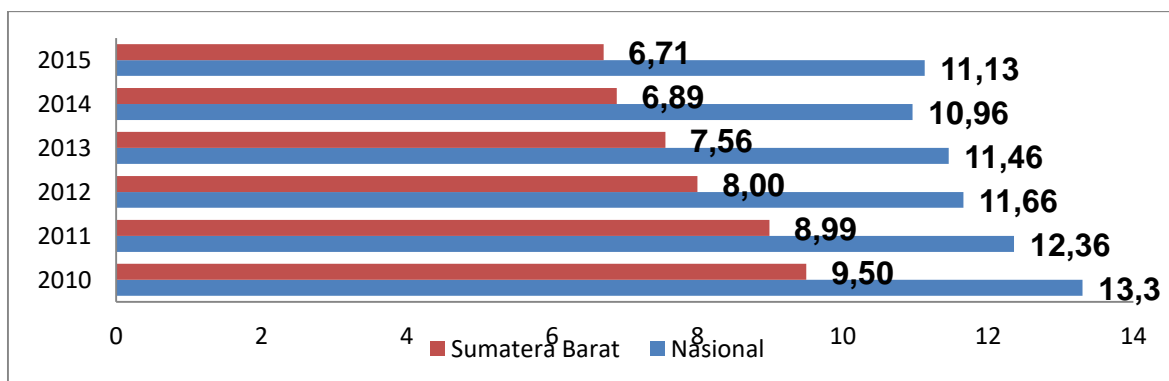
Diagram 2.3.
Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Barat Menurut Daerah Kondisi Maret dan September 2011-2015



Sumber Data : Badan Pusat Statistik Sumatera Barat

Jika dibandingkan tingkat kemiskinan di Sumatera Barat dengan Nasional sejak tahun 2010 sampai 2015, terlihat tingkat kemiskinan Sumatera Barat lebih rendah dari pada nasional, seperti Diagram 2.4.

Diagram 2.4.
Perbandingan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Barat Dengan Nasional Kondisi September 2010-2015



Sumber : Badan Pusat Statistik Sumatera Barat

Perubahan jumlah dan persentase penduduk miskin tidak akan terlepas dari perubahan nilai garis kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) merupakan rata-rata pengeluaran per kapita perbulan yang digunakan untuk mengklasifikasikan penduduk ke dalam golongan miskin atau tidak miskin. Garis kemiskinan yang digunakan untuk menghitung penduduk miskin September 2015 adalah Rp.403.947 (kapita/bulan).

Peran komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan komoditi non makanan. Pada bulan September 2015, sumbangan garis kemiskinan makanan terhadap garis kemiskinan sebesar 76,38 persen. Jika dibedakan menurut daerah perkotaan dan perdesaan maka sumbangan garis kemiskinan makanan terhadap garis kemiskinan di perdesaan sebesar 80,09 persen lebih besar dibandingkan daerah perkotaan yang hanya 71,18 persen. Komposisi tersebut tidak jauh berbeda dengan kondisi Maret 2015, seperti Tabel 2.25.

Tabel 2.25
Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah
Di Provinsi Sumatera Barat Kondisi Maret 2012-September 2015

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)			Jumlah Penduduk Miskin (000 jiwa)	Persentase Penduduk Miskin
	Makanan	Non Makanan	Total		
Perkotaan					
Maret 2012	223.796	85.317	309.113	127,81	6,67
Sept 2012	232.153	88.975	321.128	124,25	6,45
Maret 2013	235.317	97.520	332.837	119,53	6,17
Sept 2013	261.644	99.124	360.768	124,89	6,38
Maret 2014	269.473	105.495	374.968	108.076	5.43
Sept 2014	282.276	108.587	390.862	108.532	5,41
Maret 2015	288.410	117.925	406.335	118.034	5,73
Sept 2015	301.356	121.984	423.339	118.480	5,73
Pedesaan					
Maret 2012	207.242	50.733	257.975	276,93	9,14
Sept 2012	219.987	53.668	273.655	273,60	8,99
Maret 2013	231.942	56.272	288.215	287,94	9,39
Sept 2013	257.459	63.792	321.252	255,74	8,30
Maret 2014	268.291	65.220	333.511	271.120	8,68
Sept 2014	279.289	70.535	349.824	246.206	7,84
Maret 2015	293.768	75.985	369.753	261.575	8,33
Sept 2015	313.294	77.884	391.178	231.050	7,35
Kota + Desa					
Maret 2012	213.655	64.129	277.784	404,74	8,18
Sept 2012	224.702	67.350	292.052	397,86	8,00
Maret 2013	233.250	72.252	305.502	407,47	8,14
Sept 2013	259.085	77.521	336.606	380,63	7,56
Maret 2014	268.751	80.904	349.656	379,19	7,41
Sept 2014	280.453	85.374	365.827	354.74	6,89
Maret 2015	291.641	92.637	384.277	379.609	7,31
Sept 2015	308.554	95.393	403.947	349.530	6,71

Sumber Data : Berita Resmi Statistik

Pada Tabel 2.25, jika dibandingkan kondisi Maret 2015 dan September 2015, maka garis kemiskinan daerah perkotaan meningkat sebesar 4,18 %. Sedangkan di daerah pedesaan meningkat 5,79 %. Jika dilihat menurut komponennya, maka terjadi perbedaan antara perkotaan dan pedesaan. Di daerah pedesaan garis kemiskinan non makanan mengalami perubahan yang lebih besar daripada garis kemiskinan non makanan, kondisi yang berlawanan terjadi di daerah perkotaan.

Dimensi lain yang perlu juga mendapatkan perhatian selain jumlah dan persentase penduduk miskin adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Upaya pengentasan kemiskinan bukan hanya ditujukan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, namun juga mengurangi keparahan dan kedalaman kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) memberikan gambaran seberapa jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin relatif terhadap garis kemiskinan. Penurunan pada P1 mengindikasikan adanya perbaikan secara rata-rata pada kesenjangan antara standar hidup penduduk miskin dibandingkan dengan garis kemiskinan. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan (P2) mengilustrasikan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin. Indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan di Sumatera Barat dapat terlihat pada Tabel 2.26.

Tabel 2.26
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

TAHUN	KOTA	DESA	KOTA+DESA
P1			
Maret 2012	0,942	1,248	1,129
September 2012	1,132	1,300	1,235
Maret 2013	0,999	1,019	1,011
September 2013	1,117	1,363	1,267
Maret 2014	0,654	1,122	0,940
September 2014	0,536	0,888	0,751
Maret 2015	0,785	1,104	0,977
September 2015	1,056	1,392	1,259
P2			
Maret 2012	0,213	0,343	0,293
September 2012	0,296	0,322	0,312
Maret 2013	0,238	0,191	0,209
September 2013	0,292	0,313	0,305
Maret 2014	0,125	0,278	0,219
September 2014	0,096	0,181	0,148
Maret 2015	0,161	0,224	0,211
September 2015	0,245	0,320	0,290

Sumber Data :Berita Resmi Statistik

Dari Tabel 2.26 memperlihatkan bahwa Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk Provinsi Sumatera Barat mengalami kenaikan dari Maret 2015 ke September 2015. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin makin menjauh dari garis kemiskinan.

Kondisi tersebut perlu mendapat perhatian dalam upaya pengentasan kemiskinan. Begitu juga jika dibedakan menurut perkotaan dan perdesaan maka indeks kedalaman kemiskinan di perdesaan maupun perkotaan mengalami peningkatan. Sementara untuk Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) terlihat bahwa ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga mengalami kenaikan. Indeks untuk daerah perkotaan dan perdesaan menunjukkan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga meningkat. Hal ini perlu menjadi perhatian dalam penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan penanganan kemiskinan.

Tabel. 2.27
Status Kesejahteraan Di Sumatera Barat
Menurut Jumlah Rumah Tangga Dan Individu

No	KAB/KOTA	Jumlah Rumah Tangga					Jumlah Individu				
		Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4	TOTAL	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4	TOTAL
	Kabupaten :										
1	Kep. Mentawai	867	1.597	2.275	3.296	8.035	6.209	9.166	10.930	13.348	39.653
2	Pesisir Selatan	8.604	10.117	12.245	7.044	38.010	54.010	50.742	50.148	22.009	176.909
3	Solok	2.290	7.360	11.262	9.134	30.046	14.791	38.919	49.411	31.236	134.357
4	Sijunjung	1.082	2.378	5.170	3.385	12.015	6.469	11.956	20.796	11.100	50.321
5	Tanah Datar	737	3.234	7.864	8.147	19.982	4.550	17.140	34.613	28.034	84.337
6	Padang Pariaman	2.590	6.907	9.974	9.024	28.495	16.053	34.779	41.284	33.766	125.882
7	Agam	1.212	2.918	6.685	10.637	21.452	7.965	15.991	30.467	38.256	92.679
8	Lima Puluh Kota	2.263	6.270	13.246	10.369	32.148	12.827	29.514	46.995	31.650	120.986
9	Pasaman	2.348	4.342	9.969	8.845	25.504	14.684	22.913	43.977	29.566	111.140
10	Solok Selatan	746	2.225	2.696	3.667	9.334	5.172	12.373	12.733	14.222	44.500
11	Dharmasraya	783	1.269	2.724	2.270	7.046	4.402	5.827	10.844	7.507	28.580
12	Pasaman Barat	8.280	8.019	13.176	10.563	40.038	46.786	36.152	46.443	31.816	161.197
	Kota :										
13	Padang	3.776	9.843	18.777	10.708	43.104	22.272	48.831	80.640	44.095	195.838
14	Solok	253	606	940	655	2.454	1.371	2.962	4.301	2.598	11.232
15	Sawahlunto	233	254	522	573	1.582	1.287	1.175	2.004	1.950	6.416

No	KAB/KOTA	Jumlah Rumah Tangga					Jumlah Individu				
		Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4	TOTAL	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4	TOTAL
16	Padang Panjang	352	807	543	391	2.093	1.550	3.180	2.121	1.524	8.375
17	Bukittinggi	639	628	1.580	1.034	3.881	3.229	2.869	6.433	4.045	16.576
18	Payakumbuh	623	1.622	3.027	1.159	6.431	3.721	8.082	12.862	4.284	28.949
19	Pariaman	808	809	1.528	1.369	4.514	4.923	4.076	6.675	5.566	21.240
	SUMATERA BARAT	38.486	71.205	124.203	102.270	336.164	232.271	356.647	513.677	356.572	1.459.167

Sumber : Basis data terpadu untuk program perlindungan sosial Tahun 2015

Keterangan:

Desil 1 = Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan sampai 10% terendah di Indonesia

Desil 2 = Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan 11%-20% terendah di Indonesia

Desil 3 = Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan 21%-30% terendah di Indonesia

Desil 4 = Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan 31%-40% terendah di Indonesia

Dari Tabel 2.27 memperlihatkan status kesejahteraan di Sumatera Barat menurut jumlah rumah tangga individu berdasarkan hasil pemutakhiran basis data terpadu Tahun 2015. Selanjutnya pemutakhiran basis data terpadu Tahun 2015 akan dijadikan rujukan dalam pelaksanaan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan di Sumatera Barat.

Kesejahteraan Sosial

Mayoritas penduduk Sumatera Barat merupakan suku Minangkabau, dikenal pula sebagai penganut ajaran agama Islam serta memiliki adat dan tradisi daerah yang berfalsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Mangato, Adat Mamakai. Seiring dengan terjadinya perkembangan kemajuan teknologi dan informasi serta derasnya pengaruh globalisasi dan penetrasi budaya asing menyebabkan terjadinya perubahan dan pergeseran penerapan dan pengamalan nilai-nilai adat dan agama di tengah kehidupan masyarakat.

Upaya peningkatan pemahaman dan pengamalan agama terus dilakukan yang terlihat dari berbagai kegiatan keagamaan yang mengindikasikan terjadinya kegairahan kehidupan beragama ditengah masyarakat. Namun, masih ditemui tingkah dan perilaku sosial yang menyimpang, antara lain ditandai dengan masih adanya tindakan kriminalitas, kasus-kasus perbuatan asusila serta kasus korupsi.

Salah satu permasalahan kasus perbuatan maksiat yang terjadi dari tahun ke tahun diantaranya adalah penyalahgunaan narkoba baik sebagai pemakai maupun pengedar. Dari data akumulasi jumlah tahanan di lembaga pemasyarakatan di Sumatera Barat, pada tahun 2013 sebanyak 1.199 orang yang ditahan karena kasus narkoba dan turun sedikit di tahun 2014 sebanyak 1.101 kasus.

Pada tahun 2015, penerimaan zakat dari PNS Provinsi dan masyarakat sebesar Rp.7,4 milyar dan telah disalurkan kepada mustahik sebesar Rp.6,5 milyar. Implementasi keshalehan sosial, belum dapat terwujud secara maksimal yang ditandai dengan masih minimnya masyarakat yang memanfaatkan peranan lembaga sosial agama (Baznas, PKPU, dll) untuk pengelolaan potensi ekonomi keagamaan seperti zakat, waqaf, infak dan sadaqah. Lembaga agama yang mengelola zakat, infaq, dan wakaf sesungguhnya mempunyai peran penting dalam pemberdayaan masyarakat untuk pembangunan bila didukung oleh masyarakat yang mempunyai sifat dan pengamalan nilai kesalehan sosial.

Pada tataran kerukunan umat beragama, sampai dengan kondisi tahun 2015 Sumatera Barat termasuk daerah yang jarang terjadi konflik antar maupun intra umat beragama. Namun kondisi ini tidak boleh membuat pemerintah daerah dan masyarakat menjadi lengah dan hilang kewaspadaan. Sumatera Barat memiliki penduduk yang beragam dari sisi agama atau kepercayaan. Di samping itu, masing-masing agama juga memiliki keragaman pemahaman yang dapat melahirkan aliran, sekte, atau kelompok.

Kondisi ini bila tidak dikelola dengan baik berpotensi melahirkan ketegangan, gesekan, dan konflik apalagi jika ada faktor pemicunya. Hal ini menghendaki adanya upaya terencana dan berkesinambungan untuk menjaga harmonisasi dalam menjalankan kehidupan umat beragama.

Selanjutnya upaya peningkatan kesejahteraan sosial dilakukan dengan penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yakni seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunasosialan, keterbelakangan/keterasingan dan kondisi atau perubahan lingkungan yang kurang mendukung.

Secara umum Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Provinsi Sumatera Barat disebabkan oleh beberapa hal antara lain : 1) Kemiskinan, 2) Gelandangan, pengemis, anak jalanan, wanita rawan sosial ekonomi, 3) Kemandirian dan produktivitas penyandang cacat masih rendah, 4) Aksesibilitas fasilitas umum bagi difabel belum memadai, 5) Peran kelembagaan kesejahteraan sosial belum optimal, 6) Kualitas manajemen dan profesionalisme pelayanan kesejahteraan sosial belum memadai dan 7) Jumlah dan kualitas tenaga pelayanan sosial masih terbatas.

Dalam pembangunan kesejahteraan sosial, selama kurun waktu lima tahun terakhir telah dilakukan berbagai upaya perbaikan kesejahteraan sosial bagi para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Dalam hal pemberdayaan keluarga miskin, termasuk perempuan rawan sosial ekonomi dan Komunitas Adat Terpencil (KAT), telah mendapatkan bimbingan sosial, motivasi, dan bimbingan usaha disertai dengan pemberian modal usaha. Diantara keluarga miskin di lingkungan kumuh perkotaan telah mendapatkan bantuan bahan bangunan rumah dan peralatan guna perbaikan rumah. Penanganan anak terlantar termasuk anak jalanan juga telah diupayakan melalui upaya pemberdayaan melalui pelayanan pemberdayaan sosial. Pelayanan rehabilitasi juga telah diberikan bagi penyandang cacat, anak nakal dan korban penyalahgunaan narkotika, wanita tuna susila, gelandangan, pengemis, dan bekas narapidana serta para lanjut usia. Kondisi penyandang masalah kesejahteraan sosial di Sumatera Barat dapat dilihat pada Tabel 2.28.

Tabel 2.28
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
di Sumatera Barat Tahun 2015

No	KAB/KOTA	Anak Terlantar	Wanita Rawan Sosial	Penyandang Disabilitas	Lanjut Usia Terlantar	Keluarga Fakir Miskin	Korban Bencana Alam
	Kabupaten :						
1	Kepulauan Mentawai	59	354	280	1,184	10,303	9,351
2	Pesisir Selatan	1,357	3,531	1,276	3,118	26,367	-
3	Solok	463	1,480	654	1,885	5,576	1,033
4	Sijunjung	9,266	1,207	727	3,206	10,104	42
5	Tanah Datar	154	1,448	1,300	3,625	18,634	84
6	Padang Pariaman	373	4,923	1,176	3,643	33,944	374
7	Agam	626	1,354	2,000	3,275	839	62
8	Lima Puluh Kota	443	1,787	2,170	2,272	27,444	13
9	Pasaman	361	1,131	1,145	3,714	20,193	2,250
10	Solok Selatan	114	1,319	438	1,472	20,825	2,022
11	Dharmasraya	245	502	457	491	2,240	-
12	Pasaman Barat	478	829	871	2,438	13,966	262

No	KAB/KOTA	Anak Terlantar	Wanita Rawan Sosial	Penyandang Disabilitas	Lanjut Usia Terlantar	Keluarga Fakir Miskin	Korban Bencana Alam
	Kota :						
13	Padang	834	95	1,865	1,303	240,849	78
14	Solok	672	158	304	532	2,496	-
15	Sawahlunto	36	462	491	506	19,057	75
16	Padang Panjang	24	326	191	351	99	-
17	Bukittinggi	114	2,508	1,740	1,278	10,911	-
18	Payakumbuh	100	454	280	228	1,853	19
19	Pariaman	237	755	459	444	3,662	34
	Jumlah	15,956	24,623	17,824	34,965	469,362	15,699

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Sumbar

Seni Budaya dan Olahraga

Seiring dengan kemajuan dan perkembangan teknologi serta keterbukaan informasi terjadi pergeseran dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai seni dan budaya di tengah kehidupan masyarakat. Kenyataan ini menjadi tantangan pembangunan ke depan dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai budaya, nilai-nilai sejarah dan kearifan lokal serta penghormatan terhadap adat dan tradisi.

Salah satu indikasi belum optimalnya implemmentasi seni dan budaya daerah terlihat dari keberadaan grup seni dan budaya serta sarana dan prasarana sebagai penunjang aktifitas pagelaran bagi pelaku seni dan budaya yang cenderung tidak mengalami peningkatan secara signifikan sejak lima tahun terakhir.

Selain itu belum optimalnya promosi, advokasi dan sosialisasi karya dan inovasi budaya kepada masyarakat sehingga apresiasi terhadap hasil karya seni dan inovator karya budaya belum memadai. Minimnya promosi budaya meliputi terbatasnya regenerasi dan hasil inovasi karya budaya, pemanfaatan teknologi di dalam pengemasan karya budaya serta tidak adanya regulasi yang mendukung karya seni dan budaya. Sedangkan kurangnya apresiasi seni dan kreativitas karya budaya ditandai dengan minimnya dokumentasi dan pengarsipan karya budaya serta belum optimalnya pemberian penghargaan bagi maestro dan pelaku budaya dalam rangka peningkatan apresiasi dan karya budaya.

Dalam rangka pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan penguatan nilai-nilai budaya Minangkabau maka perlu dilakukan pembinaan lembaga adat sebagai wadah penyaluran aspirasi masyarakat yang memiliki wewenang dalam mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat. Lembaga adat juga berperan sebagai wadah fasilitator dalam membina, mengembangkan dan melestarikan kesenian tradisional dan sejarah lokal.

Pada bidang keolahragaan, apresiasi kegiatan keolahragaan di tingkat masyarakat, di tingkat pendidikan, maupun di tingkat olahraga prestasi dilakukan antara lain dengan penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang memadai dan terstandarisasi. Sarana dan prasarana yang ada saat ini masih perlu ditingkatkan, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Ketersediaan lapangan olahraga yang representative dan ditunjang dengan peralatan yang memadai sangat diperlukan. Secara umum daerah di Provinsi Sumatera Barat sudah memiliki sarana dan prasarana olahraga seperti lapangan olahraga sepakbola, bulutangkis, bola voli, tenis, kolam renang, begitu juga lapangan olahraga yang sedang digemari saat ini yakni olahraga futsal. Sarana dan prasarana olahraga yang ada perlu kriteria dan standarisasi tertentu untuk mendukung tercapainya olahraga prestasi.

Berpedoman pada angka capaian prestasi keolahragaan yang diikuti oleh Provinsi Sumatera Barat dan hasil perolehan medali yang diraih oleh para atlit dapat dijadikan salah satu alat atau indikator untuk mengukur kualitas atlit yang kita miliki. Sementara itu, dari pelaksanaan Porwil Sumatera pada bulan November 2014 yang lalu, Sumatera Barat menduduki peringkat ke 3 dari 10 Provinsi yang mengikuti Porwil Sumatera di Bangka Belitung. Pada Pelaksanaan PON ke XVIII Tahun 2012 di Riau, Sumatera Barat berada di peringkat ke 11 dari 33 Provinsi dengan jumlah perolehan medali emas 7, perak 2 dan perunggu 12. Salah satu penyebab rendahnya kualitas atlit dibandingkan dengan daerah lain adalah rendahnya peluang atlet mengikuti kompetisi dan kejuaraan baik Regional maupun Nasional. Perlunya pemetaan cabang olahraga baik cabang olahraga unggulan ataupun cabang olahraga non unggulan di masing-masing daerah. Untuk mendukung tercapainya target dan prestasi olahraga di Sumatera Barat, salah satu peluangnya adalah melalui pembinaan Atlet Usia Dini. Dengan adanya Pusat Pendidikan dan Pelatihan Olahraga Pelajar (PPLP) yang dibina oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat, dapat dijadikan sumber untuk menghasilkan atlet-atlet berprestasi dan berkualitas. Tantangan kedepan adalah bagaimana meningkatkan kualitas dan motivasi atlit untuk menghadapi PON atau event nasional maupun internasional lainnya.

Kualitas sumberdaya manusia yang menangani keolahragaan menjadi hal yang sangat penting dalam peningkatan prestasi olahraga, dalam hal ini pelatih, wasit, maupun guru olahraga. Hal ini terkait dengan peran lembaga pendidikan olahraga yang menghasilkan sumberdaya manusia di bidang olahraga. Kualitas pembina maupun pelatih olahraga yang baik diharapkan dapat menghasilkan prestasi yang membanggakan bagi dunia olahraga. Tentunya hal ini terkait, baik langsung maupun tidak dengan apresiasi yang diberikan pemerintah terhadap wasit, pelatih, maupun atlet yang berprestasi

Penghargaan bagi pelaku olahraga perlu terus mendapat perhatian, karena untuk menjadi seorang juara, seorang atlet harus berlatih puluhan tahun secara benar, dengan pelatih dan sarana prasarana yang mencukupi, semua bentuk pengorbanan yang telah dicurahkan oleh atlet dan pelatih dengan impian untuk meningkatkan harkat dan martabat daerah Sumatera Barat. Apresiasi terhadap atlit dan pelatih perlu ditingkatkan sebagai alat motivasi diri seperti pemberian bonus atlet, memberikan jaminan hidup yang layak dan memberikan peluang untuk mendapatkan pekerjaan.

Perkembangan kesenian dan keolahragaan di Sumatera Barat Tahun 2012-2015, sebagaimana terlihat pada Tabel 2.29.

Tabel 2.29
Perkembangan Group kesenian, Gedung Kesenian,
Klub Olahraga dan Gedung Olahraga Tahun 2012-2015

NO	CAPAIAN PEMBANGUNAN	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah group kesenian per 10.000 penduduk	1.013	930	1.080	1.080
2.	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk	14	14	14	14
3.	Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk	10	10	10	10
4.	Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk	4	9	9	9

Sumber : Data Aspek Fokus Sumatera Barat

Gambaran Kondisi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Sumatera Barat

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga negara secara minimal. Sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kewenangan dan urusannya dalam melayani masyarakat. Pelayanan publik ini mendapat

perhatian khusus dari pemerintah daerah karena menjadi dasar terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Wujud perhatian tersebut dituangkan melalui strategi dalam bentuk gerakan terpadu reformasi birokrasi yang dilaksanakan tahun 2010-2015 dengan berbagai arah kebijakan yang mendukung pencapaian strategi tersebut.

Berikut disajikan gambaran umum target rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal Provinsi Sumatera Barat dan realisasi pencapaian target sampai dengan kondisi Tahun 2015 antara lain sebagaimana disajikan pada Tabel 2.30.

Tabel 2.30
Gambaran Umum Pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM)
Provinsi Sumatera Barat

No	Bidang/Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi Pencapaian Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Sosial									
	Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial:									
	a. Pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial skala Provinsi	Persentase (%) PMKS skala provinsi yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	80%	2008-2015	0.95	1.46	2.83	30.00	30	17.1
	b. Penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi dalam panti sosial skala Provinsi	Persentase (%) Panti Sosial skala Provinsi yang melaksanakan standar operasional pelayanan kesejahteraan sosial.	60%	2008-2015	38.17	39.69	41.98	18.02	100	100.00
	Penyediaan sarana dan prasarana sosial:									
	a. Penyediaan sarana prasarana panti sosial skala provinsi	Persentase (%) panti sosial skala provinsi yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	80	2008-2015	43.51	45.04	48.09	20.00	11.91%	100.00
	b. Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala provinsi	Persentase (%) Organisasi Sosial/ Yayasan/LSM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial luar panti.	60	2008-2015	14.40	20.16	20.99	20.00	19.10	100.00
	Penanggulangan korban bencana:									
	a. Bantuan sosial bagi korban bencana skala provinsi	Persentase (%) kabupaten/kota yang memberikan bantuan sosial bagi korban bencana skala provinsi.	80	2008-2015	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	b. Evaluasi korban bencana skala provinsi	Persentase (%) kabupaten/kota yang menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap untuk evakuasi korban bencana skala provinsi	80	2008-2015	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	-
	Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial:									
	- Penyelenggaraan jaminan sosial skala provinsi	Persentase (%) kabupaten/kota yang menyelenggarakan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial	40	2008-2015	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapainya target SPM

No	Bidang/Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi Pencapaian Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
2	Lingkungan Hidup									
	Jenis pelayanan Informasi status mutu air	Persentase jumlah sumber air yang dipantau kualitasnya, ditetapkan status mutu airnya dan di informasikan status mutu airnya	100		20.00	60.00	80.00	-	100.00	Tercapainya target SPM
	Pelayanan Informasi Status Mutu Udara Ambien	Persentase Jumlah Kabupaten/Kota yang dipantau kualitas udara ambiennya dan di informasikan mutu udara ambiennya	100		26.32	47.37	78.95	-	100.00	Tercapainya target SPM
	Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup	Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100		40.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapainya target SPM
3	Perumahan Rakyat									
	a. Rumah layak huni dan terjangkau	Cakupan ketersediaan rumah layak huni untuk pemenuhan kebutuhan dasar	100%	2009-2025	0.738	0.738	0.739	0.740	0.741	0.741
		Cakupan ketersediaan rumah layak huni yang terjangkau untuk pemenuhan kebutuhan dasar	70%	2009-2025	0.030588	0.040587	0.051175	0.061175	0.071175	0.080998
4	Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban kekerasan									
	a. Penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	100%	2014	-	-	-	-	-	100
	b. Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas maupun tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di RS	100%	2014	-	-	-	-	-	100
	c. Rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	75%	2014	-	-	-	-	-	51
	d. Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	80%	2014	-	-	-	-	-	100
		cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	50%	2014	-	-	-	-	-	100
5	Ketenagakerjaan									
	Pelayanan Pelatihan Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	75%	2016	-	-	-	-	76.98	Tercapainya target SPM
		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	60%	2016	-	-	-	-	76.95	Tercapainya target SPM
		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	60%	2016	-	-	-	-	76.92	Tercapainya target SPM
	Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	70%	2016	-	-	-	-	10.75	Tercapainya target SPM

No	Bidang/Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi Pencapaian Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	50%	2016	-	-	-	-	13.33	Tercapainya target SPM
	Pelayanan Kepesertaan Jamsostek	Besaran Pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek	50%	2016	-	-	-	-	113.61	Tercapainya target SPM
	Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan	Besaran pemeriksaan perusahaan	45%	2016	-	-	-	-	6.99	Tercapainya target SPM
		Besaran pengujian peralatan di perusahaan	50%	2016	-	-	-	-	-	-
6.	Ketahanan Pangan									
	a. Ketersediaan dan Cadangan Pangan	Penguatan Cadangan Pangan	60	2015	15	42	52,4	67,4	126,4	151,4
	b. Distribusi dan Akses Pangan	Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah	100	2015	-	100	100	100	100	Tercapainya target SPM
	c. Penganekaragaman dan Keamanan Pangan	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	80	2015	-	86,25	81,82	80,67	72,50	73,81
	d. Penanganan Kerawanan Pangan	Penanganan Daerah Rawan Pangan	60	2015	-	71.43	50	33.33	100	Tercapainya target SPM 100
7	Kesenian									
	Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Bidang Kesenian	1. Cakupan Kajian Seni (50%)	100	2014	-	-	-	-	100	Tercapainya target SPM
		2. Cakupan Fasilitas Seni (30%)	100	2014	-	-	-	-	100	Tercapainya target SPM
		3. Cakupan Gelar Seni (75%)	100	2014	-	-	-	-	100	Tercapainya target SPM
		4. Misi Kesenian	100	2014	-	-	-	-	100	Tercapainya target SPM
	Sarana dan Prasarana	5. Cakupan Sumberdaya Manusia Kesenian (25%)	100	2014	-	-	-	-	100	Tercapainya target SPM
		6. Cakupan Tempat (100%)	100	2014	-	-	-	-	100	Tercapainya target SPM
		7. Cakupan Organisasi (34%)	100	2014	-	-	-	-	100	Tercapainya target SPM
8	Perhubungan									
	Angkutan Jalan									
	a. Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Provinsi	100%	2014	-	-	-	-	61.61	Tercapainya target SPM
	b. Jaringan Prasarana Angkutan Jalan	Tersedianya terminal angkutan penumpang tipe A pada setiap Provinsi untuk melayani angkutan umum dalam trayek.	100%	2014	-	-	-	-	85	Tercapainya target SPM
	c. Fasilitas Perlengkapan Jalan	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Provinsi	60%	2014	-	-	-	-	62.31	Tercapainya target SPM
	d. Sumber Daya Manusia (SDM)	Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada perusahaan angkutan umum, pengelola terminal, dan pengelola perlengkapan jalan.	100%	2014	-	-	-	-	100	Tercapainya target SPM
	Angkutan Penyeberangan									
	a. Jaringan Pelayanan Angkutan Penyeberangan	Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang menghubungkan jalan Provinsi yang terputus oleh perairan	75%	2014	-	-	-	-	100	Tercapainya target SPM

No	Bidang/Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi Pencapaian Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
	b. Jaringan Prasarana Angkutan Penyeberangan	Tersedianya pelabuhan pada setiap ibukota Provinsi dan ibukota Kabupaten/Kota yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi dan tidak ada alternatif jalan	75%	2014	-	-	-	-	66.67	-
9 Penanaman Modal										
	a. Kebijakan Penanaman Modal	Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan	1 (satu) sektor/bidang usaha/tahun	2014	-	-	-	-	2 sektor/bidang usaha	-
	b. Promosi Penanaman Modal	Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal provinsi	1 (satu) kali/tahun	2014	6 kali	4 kali, 2 MoU	4 kali, 2 MoU	8 kali promosi, 5 MoU	-	-
	c. Pelayanan Penanaman Modal	Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal	100%	2014	0%	100%	100%	100%	-	-
	e. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	1 (satu) kali/tahun	2014	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	-	-
	f. Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Terimplementasikannya sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE)	100%	2014	0	100%	100%	100%	-	-
	g. Penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	1 (satu) kali/tahun	2014	0	0	1 kali	0	-	-

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, layanan urusan wajib pemerintahan daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar ada enam urusan, sedangkan urusan wajib pemerintahan daerah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari delapan belas urusan, disamping itu untuk layanan urusan pilihan terdapat delapan urusan.

2.3.1 Layanan Urusan Wajib

Hasil pelaksanaan pembangunan berdasarkan fokus layanan urusan wajib, baik yang berkaitan dengan pelayanan dasar maupun yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan dasar, selama kurun waktu 2010-2015 memperlihatkan perkembangan, kemajuan dan peningkatan yang cukup baik.

2.3.1.1. Urusan Pendidikan

Pendidikan Dasar

Perkembangan indikator pendidikan dasar dari tahun 2010-2015 di Sumatera Barat antara lain dapat diukur berdasarkan indikator angka partisipasi sekolah, rasio ketersediaan sekolah dengan penduduk usia sekolah, rasio guru dengan murid serta rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata.

Angka partisipasi sekolah dasar merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah dasar. Angka tersebut memperhitungkan adanya

perubahan penduduk terutama usia muda. Angka partisipasi sekolah dasar adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar (7-12 tahun dan 13-15 tahun) yang masih menempuh pendidikan dasar per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Sedangkan rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar, Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar. Perkembangan pendidikan dasar di Sumatera Barat tahun 2010-2015 dapat dilihat pada Tabel 2.31.

Tabel 2.31
Perkembangan Pendidikan Dasar di Sumatera Barat Tahun 2010-2015

NO	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Angka Partisipasi Sekolah	98,24	98,10	98,38	98,81	98,99	99,18
2	Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah	1 : 0,83	1 : 0,74	1 : 0,66	1 : 0,68	1 : 0,67	1 : 0,67
3	Rasio Guru Terhadap Murid	1 : 6,84	1 : 8,82	1 : 8,87	1 : 7,84	1 : 7,83	1 : 6,91
4	Rasio Guru Terhadap Murid Per Kelas Rata-rata	1 : 1,86	1 : 1,77	1 : 2,23	1 : 2,17	1 : 3,78	1 : 4,55

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat

Dari Tabel 2.31 terlihat bahwa angka partisipasi sekolah pendidikan dasar mengalami peningkatan setiap tahun dari 98,24 per 1.000 jumlah penduduk pada tahun 2010 menjadi 99,18 per 1.000 jumlah penduduk pada tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa setiap tahun jumlah murid sekolah dasar mengalami peningkatan per 1.000 jumlah penduduk Sumatera Barat, sesuai dengan program wajib belajar pemerintah 9 tahun. Sementara dari perbandingan guru terhadap murid dan murid per kelas rata-rata dari tahun 2010 sampai tahun 2015 tidak ada permasalahan, namun yang perlu diperhatikan dari sisi pendistribusian guru antar sekolah, antar daerah dan antar wilayah.

Pendidikan Menengah

Pendidikan menengah merupakan jenjang pendidikan di usia anak 16 – 19 tahun, yang diukur dengan indikator yang sama dengan pendidikan dasar yaitu angka partisipasi sekolah, rasio ketersediaan sekolah dengan penduduk usia sekolah, rasio guru dengan murid serta rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata, seperti di lihat pada Tabel 2.32.

Tabel 2.32
Perkembangan Pendidikan Menengah di Sumatera Barat Tahun 2010-2015

NO	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Angka Partisipasi Sekolah	89,51	89,64	90,79	92,22	99,27	99,28
2	Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah	1 : 0,37	1 : 0,29	1 : 0,25	1 : 0,39	1 : 0,25	1 : 0,27
3	Rasio Guru Terhadap Murid	1 : 8,10	1 : 6,28	1 : 6,58	1 : 8,75	1 : 11,85	1 : 8,30
4	Rasio Guru Terhadap Murid Per Kelas Rata-rata	1 : 13,92	1 : 13,98	1 : 11,32	1 : 11,38	1 : 11,56	1 : 11,84

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat

Angka partisipasi sekolah pendidikan menengah juga mengalami peningkatan setiap tahun dari 89,51 per 1.000 jumlah penduduk pada tahun 2010 menjadi 99,28 per 1.000 jumlah penduduk pada tahun 2015, Hal ini menunjukkan bahwa setiap tahun jumlah murid menempuh pendidikan menengah mengalami peningkatan per 1.000 jumlah penduduk.

Indikator lainnya yakni Rasio Guru Terhadap Murid Per Kelas Rata-Rata, juga memperlihatkan perkembangan yang cukup baik, pada tahun 2015, menunjukkan gambaran bahwa 1 guru tingkat pendidikan menengah melayani sebanyak 11,84 murid atau dibulatkan 12 murid, artinya bahwa guru yang mengajar di kelas tidak kekurangan

malahan berlebih, namun kondisi yang terjadi pada pendistribusian guru di pendidikan menengah juga belum merata.

Penduduk yang berusia 15-64 tahun melek huruf mengalami peningkatan. Indikator ini dapat menggambarkan mutu sumber daya manusia dan jumlah tahun yang dihabiskan dalam menempuh semua jenis pendidikan formal. Berdasarkan data tahun 2010 angka melek huruf di Sumatera Barat sebesar 98,13%, dan tahun 2014 sebesar 98,44%, artinya angka melek huruf meningkat sebesar 0,31% pada kurun waktu lima tahun terakhir.

Fasilitas Pendidikan

Selanjutnya pada indikator fasilitas pendidikan terdiri dari sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik pada tahun 2010 sebesar 55,70 %, dan tahun 2014 meningkat menjadi 69,78% atau meningkat sebesar 14,08%. Berbeda halnya dengan pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik, mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir. Data memperlihatkan bahwa kondisi bangunan baik tahun 2010 sebesar 90,58% dan tahun 2014 sebesar 85,38%, atau menurun 5,02%. Data ini mengisyaratkan untuk kondisi bangunan sekolah pada tingkat pendidikan menengah memerlukan perhatian untuk dilakukan perbaikan/rehabilitasi, karena sudah banyak gedung-gedung sekolah yang rusak.

Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun. Pendidikan usia dini dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan ke arah pertumbuhan dan lima perkembangan, yaitu : kecerdasan/kognitif (daya pikir, daya cipta), sosio emosional (sikap dan emosi) bahasa dan perkembangan moral dan agama, perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan sesuai kelompok usia yang dilalui oleh anak usia dini.

Angka Partisipasi Kasar PAUD dan TK di Sumatera Barat pada tahun 2010 -2015 memperlihatkan kecenderungan meningkat, pada tahun 2011 sebesar 34,56% menjadi 67,27% pada tahun 2015. Kabupaten/kota di Sumatera Barat dengan APK PAUD dan TK tertinggi adalah Kota Sawahlunto sebesar 96,53%, diikuti oleh Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Bukittinggi sebesar 95,41% dan 92,97%.

Satuan pendidikan anak usia dini pada tahun 2015 di Sumatera Barat dengan jumlah lembaga PAUD sebanyak 3.332 unit, dengan murid sebanyak 73.927 orang murid dan guru sebanyak 14.752 orang. Sedangkan jumlah taman kanak-kanak sebanyak 2.292 sekolah dengan 4.803 jumlah lokal, 133.694 orang murid dan guru sebanyak 20.647 orang.

Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah (APS), pada tingkat SD/MI, mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir yaitu tahun 2010 sebesar 0,18% dan tahun 2015 sebesar 0,22%, berbeda halnya dengan APS tingkat pendidikan SMP/MTs, mengalami penurunan dari 0,79% tahun 2010 menjadi 0,46% tahun 2015, dan APS tingkat pendidikan SMA/SMK/MA, juga menurun dari angka 1,97% tahun 2010 menjadi 0,95% tahun 2015. Seperti terlihat pada Tabel 2.33

Tabel 2.33
Perkembangan Angka Putus Sekolah di Sumatera Barat Tahun 2010-2015

No	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,18	0,17	0,15	0,21	0,21	0,22
2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,79	0,49	0,45	0,37	0,44	0,46
3	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	%	1,97	0,87	0,88	0,89	0,92	0,88

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat

Angka Kelulusan

Pada tahun 2010-2015, angka kelulusan siswa di Sumatera Barat dari tahun ke tahun memperlihatkan kondisi yang berfluktuasi. Angka kelulusan siswa SD/MI pada tahun 2010 sebesar 99,80 % turun menjadi 96,07% tahun 2015, sedangkan SMP/MTs sebesar 94,20% pada tahun 2010 naik menjadi 99,84% pada tahun 2015. Selanjutnya angka kelulusan SMA/SMK/MA sebesar 98,77% pada tahun 2010 juga mengalami kenaikan pada tahun 2015 menjadi sebesar 99,95%. Jika dibandingkan antara kelulusan SD melanjutkan ke SMP dan kelulusan SMP melanjutkan ke SMA yang paling besar adalah angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs sebesar 99,56% sedangkan angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA adalah sebesar 95,56%, seperti terlihat pada Tabel 2.34.

Tabel 2.34
Angka Kelulusan dan Angka Melanjutkan Per Jenjang Pendidikan di Sumatera Barat Tahun 2010-2015

No	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	99,80	99,53	96,72	97,99	97,99	96,07
2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	94,20	95,16	97,56	99,02	99,95	99,84
3	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	%	98,77	95,25	99,40	85,39	99,60	99,95
4	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	99,79	97,30	95,28	94,53	99,28	99,56
5	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	94,99	88,90	90,81	99,13	98,49	95,56

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat

Kontribusi lulusan Sekolah Menengah terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Sumatera Barat cukup signifikan dibandingkan dengan kualifikasi pendidikan lainnya. Pada tahun 2015, untuk lulusan pendidikan SMA memberikan kontribusi sebesar 12,30%, sedangkan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan memberikan kontribusi sebesar 13,32%.

Selain itu, dalam rangka meningkatkan integritas peserta didik yang ditandai dengan capaian Integritas Peserta Didik di Sumatera Barat dengan capaian di tahun 2015 sebesar 58%. Untuk itu perlu dilakukan peningkatan integritas peserta didik melalui penyelenggaraan pendidikan karakter

Sedangkan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat perlu dilakukan upaya peningkatan minat baca melalui peningkatan keberagaman dan kelengkapan koleksi bahan bacaan dan peningkatan layanan perpustakaan. Salah satu ukuran peningkatan minat baca ditandai dengan peningkatan jumlah kunjungan masyarakat ke Perpustakaan Daerah dengan rata-rata peningkatan kunjungan pertahun sebanyak 1.000 kunjungan.

Angka Partisipasi Kasar Dan Angka Partisipasi Murni

Masalah pemerataan pendidikan ditinjau dari Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) untuk kondisi Sumatera Barat cukup bervariasi. Untuk APK SD/MI/Paket A hingga tahun 2015 sudah cukup tinggi yaitu 116,48 %, Untuk tingkat APK SMP/MTs/Paket B Tahun 2015 mencapai 105,01 %, APK tingkat SMA/SMK/MA/Paket

C telah mencapai 96,65 % Tahun 2015, pencapaian APK di Sumatera Barat untuk semua jenjang pendidikan telah melampaui target nasional.

Untuk APM hingga tahun 2015 umumnya juga lebih tinggi capaiannya dibandingkan dengan capaian tingkat nasional, untuk capaian APM SD/MI sebesar 99,57 % tahun 2015, APM SMP/MTs/Paket B sebesar 81,15 % tahun 2015, APM SMA/SMK/MA/Paket C Tahun 2015 sebesar 73,10 %. Kondisi ini juga lebih tinggi dari pada capaian APM tingkat Nasional.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berkembang dengan cepat, hal ini berdampak pada meningkatnya APK SD/MI/SDLB, pada tahun 2015 telah mencapai 116,48 %. Tingginya angka APK ini ada beberapa kemungkinan faktor penyebabnya, seperti adanya sebagian anak (dilihat dari segi usia) mestinya belum waktunya masuk SD, tetapi kenyataannya mereka sudah duduk di bangku sekolah SD. Hal ini terjadi karena anak sudah merasa bosan mengikuti pendidikan di PAUD dan kemampuannya sudah mendukung untuk masuk SD. Secara riil APM yang dicapai SD/MI/SDLB/Paket A Tahun 2015 sebesar 99,57 % Tahun 2015. Angka APM lebih rendah karena APM ini adalah anak-anak yang berada di sekolah itu sesuai dengan usianya pada jenjang pendidikan tertentu. Untuk APK dan APM capaiannya memang sudah di atas capaian nasional, tetapi untuk Sumatera Barat masih sangat diperlukan upaya untuk meningkatkannya sampai batas optimal. Perkembangan angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) terlihat pada Tabel 2.35

Tabel 2.35
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)
di Provinsi Sumbar Tahun 2010-2015

NO	Jenjang Pendidikan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK)							
1	SD sederajat						
1.1.	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI	680.491	678.504	666.695	647.413	676.739	654.789
1.2.	APK SD/MI	109,17	111,91	111,94	111,95	116,42	116,48
2	SMP sederajat						
2.1.	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs	201.138	206.957	202.789	200.589	208.876	20.126
2.2.	APK SMP/MTs	87,16	92,96	93,51	93,68	104,76	105,01
3	SLTA sederajat						
3.1.	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK	183.700	164.099	195.581	193.240	208.193	212.174
3.2.	APK SMA/MA/SMK	68,10	67,42	86,75	86,94	96,64	96,65
ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM)							
1	SD/MI						
1.1.	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI	680.491	678.504	666.695	647.413	679.739	654.789
1.2.	APM SD/MI	93,85	94,46	94,49	94,48	99,56	99,57
2.	SMP/MTs						
2.1.	Jumlah siswa kelompok 13-15 Tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs	201.138	206.957	202.789	200.589	208.876	20.126
2.2.	APM SMP/MTs	66,85	75,43	80,90	80,95	81,12	81,15
3.	SMA/MA/SMK						
3.1.	Jumlah siswa kelompok usia 16-18 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK	183.700	164.099	195.581	193.240	208.193	212.174
3.2.	APM SMA/MA/SMK	51,55	50,34	69,67	69,88	73,08	73,10

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat

2.3.1.2. Urusan Kesehatan

Pelayanan kesehatan sangat diperlukan untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang sehat dan cerdas. Semua masyarakat berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang tepat dan cepat, agar sebagian besar permasalahan kesehatan masyarakat dapat diatasi. Sejalan dengan upaya pemerintah Sumatera Barat melakukan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, maka hal tersebut telah diikuti dengan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan baik dari sisi sumber daya manusia, teknologi, kelembagaan pelayanan kesehatan dan kebijakan. Beberapa pelayanan kesehatan dasar yang sudah diselenggarakan adalah adanya posyandu, penyediaan tenaga dokter dan tenaga medis.

Urusan kesehatan memperlihatkan perkembangannya sejak tahun 2010-2015 dengan indikator antara lain rasio pos pelayanan terpadu (posyandu) per satuan balita, rasio puskesmas, poliklinik dan puskesmas pembantu per satuan penduduk, rasio rumah sakit per satuan penduduk, rasio dokter per satuan penduduk, rasio tenaga medis per satuan penduduk, serta beberapa indikator cakupan layanan kesehatan seperti terlihat pada Tabel 2.36.

Tabel 2.36
Perkembangan Indikator Rasio Kesehatan di Sumatera Barat Tahun 2010-2015

NO	Indikator	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Rasio posyandu per satuan balita	1 : 71	1 : 71	1 : 71	1 : 72	1 : 73	1 : 74
2	Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	1:19.467	1:19.421	1:19.231	1:19.411	1:19.587	1:19.628
3	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	1:124.752	1:120.320	1:117.852	1:73.313	1:72.280	1:73.187
4	Rasio dokter per satuan penduduk	1:6.592	1:4.928	1:4.821	1:4.119	1:4.582	1:4.348
5	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	1:2.818	1:2.838	1:2.510	1:2.118	1:2.790	1:2.759

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat

Posyandu

Posyandu terus mengalami peningkatan dari sebanyak 6.999 unit tahun 2010 menjadi 7.414 unit pada tahun 2015. Hal ini memperlihatkan bahwa strategi untuk pelayanan kesehatan dasar masyarakat dengan fokus pada ibu dan anak dapat berjalan dengan baik. Namun rasio posyandu per satuan balita sedikit mengalami penurunan dari sebesar 1 : 71 pada tahun 2010 menjadi 1 : 74 pada tahun 2015, artinya pada tahun 2015 terdapat 1 unit posyandu melayani 75 orang balita.

Keberadaan dan penyelenggaraan posyandu ditujukan untuk menurunkan angka kematian bayi, angka kematian ibu serta meningkatkan peranserta dan kemampuan masyarakat untuk megembangkan kegiatan kesehatan dan keluarga berencana.

Puskesmas, Poliklinik, Puskesmas Pembantu.

Puskesmas merupakan pusat pelayanan tingkat pertama di wilayah kerjanya yang dilengkapi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan masyarakat yang lebih mengutamakan pelayanan promotif dan preventif, melalui upaya rawat jalan dan rujukan. Peran Puskesmas sangat penting dalam meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang terjangkau dan merata yang meliputi pelayanan kesehatan perorangan (*private goods*) dan pelayanan kesehatan masyarakat umum (*public goods*). Puskesmas juga merupakan

organisasi kesehatan yang secara fungsional merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat untuk membina peran serta masyarakat dan memberikan pelayanan secara menyeluruh kepada masyarakat.

Rasio pelayanan Puskesmas di Provinsi Sumatera Barat sudah mencukupi standart pelayanan Puskesmas dengan rasio 1:30.000. Puskesmas yang ditunjang oleh puskesmas pembantu merupakan lembaga layanan masyarakat yang sangat dekat dengan masyarakat, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Hal ini dikarenakan masyarakat merasakan lembaga layanan ini cukup mudah dijangkau. Oleh karena itu keberadaan lembaga layanan kesehatan Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu menjadi sangat penting artinya dalam upaya meningkatkan layanan kesehatan kepada masyarakat.

Rumah Sakit

Terkait dengan diberlakukannya Undang-Undang tentang BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial), maka terjadi peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat khususnya kelas bawah oleh pemerintah, khususnya pada rumah sakit.

Pelayanan kesehatan tingkat tersier di Provinsi Sumatera Barat terus terjadi peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari rasio jumlah penduduk yang dapat dilayani oleh satu Rumah sakit. Pada tahun 2010 rasio rumah sakit di Sumatera Barat per satuan penduduk sebesar 1 : 124.752 yang artinya satu rumah sakit melayani 124.752 orang, kemudian pada tahun 2015 rasio menunjukkan meningkat menjadi 1 : 73.187. Hal ini menunjukkan dalam lima tahun terakhir telah terjadi penambahan rumah sakit baik swasta maupun pemerintah, sehingga akses pelayanan pada masyarakat juga semakin meningkat. Rasio tersebut telah memenuhi indikator WHO, satu tempat tidur di rumah sakit untuk 100 ribu penduduk.

Sumber Daya Manusia Kesehatan

Sumber daya manusia kesehatan yang digambarkan dari rasio tenaga kesehatan per 100.000 ribu penduduk belum memenuhi target. Sampai dengan tahun 2015 Sumatera Barat masih kekurangan tenaga seperti; dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, apoteker, perawat, bidan dan sanitarian, terutama untuk pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan pada daerah terpencil dan sangat terpencil.

Dalam pembangunan kesehatan, sumberdaya manusia merupakan salah faktor penting yang perlu mendapat perhatian terutama terkait dengan jumlah, jenis dan distribusi, selain itu juga terkait dengan pembagian kewenangan dalam pengaturan sumberdaya manusia kesehatan. Oleh karena itu diperlukan penanganan lebih seksama yang didukung dengan regulasi yang memadai dan pengaturan insentif, reward-punishment, dan sistem pengembangan karier. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan mutu sumberdaya kesehatan dilakukan melalui pelatihan-pelatihan, pendidikan dan peningkatan uji kompetensi.

Dokter umum terus mengalami peningkatan seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, berdasarkan rasio dokter per satuan penduduk tahun 2010 didapatkan angka 1:6.592 bila dikonversikan dengan rasio dokter adalah 15 per 100.000 penduduk, sedangkan target indikator Indonesia sehat adalah rasio dokter 40 per 100.000 penduduk, maka Provinsi Sumatera Barat belum mampu memenuhi mencapai target tersebut.

Untuk lebih lengkapnya konversi rasio dokter per 100.000 penduduk dapat dilihat pada Tabel 2.37.

Tabel 2.37
Perkembangan Indikator Rasio dokter per satuan penduduk
di Sumatera Barat Tahun 2010-2015

No	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Rasio dokter per satuan penduduk	1:6.592	1:4.928	1:4.821	1:4.119	1:4.582	1:4.348
2.	Rasio dokter per 100.000 penduduk	15	20	21	24	22	23
3.	Dokter Umum	738	1.001	1.037	1.230	1.120	1.195
4.	Jumlah penduduk	4.865.331	4.933.112	5.000.184	5.066.476	5.131.882	5.196.300

Sumber: Data diolah, Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar; BPS Provinsi Sumbar

Pada kondisi tersebut, artinya Provinsi Sumatera Barat membutuhkan dokter hampir dua kali lipat dari jumlah dokter saat ini, karena jumlah dokter yang ada baru sebanyak 1.195 dokter umum, sedangkan jumlah penduduk pada Tahun 2015 sebanyak 5.196.300 penduduk, maka kebutuhan dokter seharusnya adalah 2.079 orang.

Dengan diberlakukannya sistem jaminan sosial nasional, maka Provinsi Sumatera Barat masih kekurangan sekitar 1.338 orang dokter umum, untuk itu perlu dilakukan pengangkatan tenaga dokter secara bertahap untuk peningkatan pelayanan kesehatan pada lima tahun ke depan.

Selanjutnya sumberdaya manusia bidang kesehatan yang lain, selain dokter adalah tenaga medik seperti perawat dan bidan. Keberadaan perawat dan bidan menjadi sangat penting untuk kondisi penduduk Provinsi Sumatera Barat, khususnya untuk perawatan ibu dan balita. Berdasarkan Indikator Indonesia bahwa rasio perawat adalah 117 per 100.000 penduduk dan rasio bidan adalah 100 per 100.000 penduduk. Untuk lebih lengkapnya konversi rasio tenaga medis per 100.000 penduduk di Sumatera Barat Tahun 2010-2015 dapat dilihat pada Tabel 2.38.

Tabel 2.38
Perkembangan Indikator Rasio tenaga medis per satuan penduduk
di Sumatera Barat Tahun 2010-2015

No	Indikator	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	1:2.818	1:2.838	1:2.510	1:2.118	1:2.790	1:2.759
2.	Rasio tenaga medis per 100.000 penduduk	35	35	40	47	36	36
3.	Rasio perawat per 100.000 penduduk	4.806	4.030	4.030	4.395	4.545	4.967
4.	Rasio bidan per 100.000 penduduk	3.706	3.556	3.556	3.556	3.838	4.980

Sumber: data diolah, Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar 2015

Dalam lima tahun terakhir dari rasio yang diperlihatkan pada Tabel 2.36 menunjukkan bahwa tidak terdapat peningkatan yang berarti dari rasio tenaga medis persatuan penduduk.

Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah penduduk belum disertai dengan peningkatan jumlah tenaga medis. Jumlah tenaga medis tidak mengalami peningkatan seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, sehingga tidak mencukupi sesuai standar yang ditetapkan. Pada kondisi tersebut, artinya Provinsi Sumatera Barat membutuhkan tenaga medis hampir tiga kali lipat dari jumlah tenaga medis saat ini. Jumlah tenaga medis saat ini adalah sebanyak 9.947 tenaga medis. Dengan jumlah

penduduk Sumatera Barat pada tahun 2015 sebanyak 5.196.300 penduduk, maka dibutuhkan tenaga medis sebanyak 5.389 orang.

Rasio bidan dan perawat berimplikasi terhadap ketersediaan dan kualitas layanan kesehatan, sehingga hal ini juga dapat berpengaruh terhadap pemanfaatan pelayanan kesehatan terutama kesehatan ibu dan anak. Disamping itu, dengan diberlakukannya sistem jaminan sosial nasional, maka perlu ditingkatkan rasio bidan dan perawat per 100.000 penduduk untuk lima tahun ke depan.

Cakupan Kesehatan Sumatera Barat

Selanjutnya, pelayanan urusan kesehatan lainnya seperti halnya indikator : cakupan komplikasi kebidanan yang, ditangani, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit tuberkulosis, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit demam berdarah, cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin, dapat dilihat pada Tabel 2.39.

Tabel 2.39
Perkembangan Indikator Cakupan Kesehatan di Sumatera Barat
Tahun 2010-2015

NO	Indikator	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani (%)	68,10	70,00	82,00	71,50	74,74	75,73
2	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan (%)	90,80	85,80	88,25	89,00	90,02	90,00
3	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) %	97,00	86,60	91,00	71,20	77,40	85,00
4	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan (%)	100	100	100	100	100	100
5	Cakupan penemuan kasus baru TB BTA positif (CDR) (%)	55,23	59,55	58,94	60,97	63,97	65,45
6	Cakupan penemuan kasus baru TB (CNR) (%)	125,15	135,65	137,41	135,48	144,27	144,74
7	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	100	100	100	100
8	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100	100	100	100	100	100
9	Cakupan kunjungan bayi	95,33	83,60	88,41	88,15	93,43	93,45
10	Cakupan puskesmas visitrate	142,05	144,32	147,73	145,81	146,37	147,49
11	Cakupan pembantu puskesmas	635,7	692,0	725,6	719,8	734,9	734,9

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat

Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Selama periode 2010-2015 terlihat cakupan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan terlihat fluktuatif dari tahun 2010 sebesar 90,80%, kemudian turun di tahun 2011 sebesar 85,80% dan akhirnya meningkat kembali secara bertahap sampai di tahun 2015 sebesar 90,00%.

Berbagai capaian indikator kinerja tersebut di atas, telah memperlihatkan semakin baiknya kualitas persalinan terhadap bayi dan pelayanan ibu melahirkan oleh tenaga-tenaga kesehatan yang ada di masyarakat, sehingga mampu meningkatkan kualitas

kesehatan bayi dan ibu melahirkan secara berkelanjutan setiap tahunnya. Harapan ke depan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan bisa mencapai 100% dalam rangka penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi.

Bidan merupakan tenaga kesehatan yang mempunyai tugas utama memberikan pelayanan kebidanan dan kesehatan reproduksi kepada individu, keluarga dan masyarakat. Dalam memberikan pelayanan tersebut bidan perlu mendapatkan perlindungan hukum. Untuk itu tenaga bidan dalam menjalankan tugas dan fungsinya bidan harus memiliki kompetensi minimal sesuai dengan standar praktek kebidanan. Pada saat ini kendala yang dihadapi adalah kompetensi bidan belum sesuai standar karena berkembangnya lembaga pendidikan baik pemerintah maupun swasta yang menghasilkan tenaga bidan yang berkualitas beragam serta belum terlaksananya sistem akreditasi pendidikan kesehatan sebagaimana mestinya.

Dalam rangka memastikan penguasaan kompetensi minimal sesuai standar maka pada setiap tenaga perlu dilakukan uji kompetensi terhadap tenaga bidan secara berkala, sebagai diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan No.900/Menkes/SK/VII/ 2002 tentang Registrasi dan Praktek Bidan. Uji Kompetensi Bidan ini dilaksanakan oleh Tim penguji kompetensi yaitu kologium kebidanan pusat/daerah, organisasi profesi, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, lembaga pendidikan.

Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani

Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani dalam periode 2010-2015 telah juga memperlihatkan gambaran peningkatan pada tahun ketiga sampai 82%, dan kemudian menurun menjadi 71.50% tahun 2013 dan meningkat kembali pada tahun 2015 mencapai 75%.

Hal ini disebabkan antara lain, karena belum optimalnya proses penyediaan, penempatan, pendistribusian, mutu dan kinerja sumber daya kesehatan. Meskipun secara kuantitas terjadi peningkatan jumlah tenaga kesehatan di Sumatera Barat, namun ketersediaan jumlah tenaga kesehatan tersebut belum dapat memenuhi dan memadai dalam memberikan pelayanan secara maksimal.

Berbagai capaian indikator kinerja tersebut di atas, diharapkan dapat dijadikan evaluasi dalam upaya memperbaiki kualitas persalinan terhadap bayi dan ibu melahirkan oleh tenaga-tenaga kesehatan yang ada di masyarakat, sehingga mampu meningkatkan kualitas kesehatan bayi dan ibu melahirkan secara berkelanjutan setiap tahunnya.

Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

UCI (Universal Child immunization) adalah kondisi tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0.11 bulan), ibu hamil, WUS, dan anak sekolah tingkat dasar. Imunisasi dasar lengkap pada bayi meliputi: 1 dosis BCG, 3 dosis DPT, 4 Dosis Polio, 4 dosis Hepatitis B, 1 dosis Campak. Ibu hamil dan WUS meliputi 2 dosis IT. Anak sekolah tingkat dasar meliputi 1 dosis DT, 1 dosis campak dan 2 dosis IT. Kualitas kesehatan masyarakat dapat dilihat melalui indikator seperti Jumlah Desa/Jorong/Kelurahan Cakupan Imunisasi (Desa Universal Child Immunization).

Provinsi Sumatera Barat menghadapi tantangan dengan adanya stigma Imunisasi Haram yang beredar dalam media sosial dan meluas sampai ke masyarakat. Hal ini berdampak pada penurunan angka cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI). Pada tahun 2010 sudah sangat baik dengan cakupan sebesar 97,00% dan selanjutnya mengalami penurunan tahun 2011 menjadi 86,60%, naik kembali tahun 2012 menjadi 91,00% dan tahun 2013 menurun tajam menjadi 71,20%, pada tahun 2014

sudah diupayakan tindakan penyuluhan dapat meningkat menjadi 77,40% dan pada tahun 2015 dapat menjadi 85,00%.

Dampak dari penurunan cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) ini mengakibatkan beberapa daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat mengalami wabah Difteri dan Campak. Upaya pemerintah Sumatera Barat sudah berusaha membatasi perluasan wabah ini. Diharapkan cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization akan semakin meningkat pada periode tahun 2016-2021

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan mencapai angka 100%, hal ini berarti bahwa semua balita gizi buruk sudah mendapatkan perawatan medis di sarana pelayanan kesehatan dan telah mendapatkan perawatan seluruhnya. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan sudah baik. Upaya Pemerintah Sumatera Barat dalam penanganan balita gizi buruk diantaranya dengan pemberian makanan tambahan, penyediaan rumah pemulihan gizi dan peran kader gizi di posyandu dalam deteksi dini balita gizi buruk.

Cakupan penelusuran kasus baru TB BTA positif (CDR) dan penemuan kasus baru TB (CNR)

Penanggulangan Tuberkulosis sudah mengalami peningkatan, cakupan penelusuran kasus baru TB BTA positif (CDR) pada tahun 2010 sebesar 55,23% dan meningkat secara bertahap pada tahun 2015 menjadi 65,45%. Begitu juga untuk penemuan kasus baru TB (CNR) telah mengalami peningkatan selama periode 2010-2015 dari 125,15 pada tahun 2010 meningkat secara bertahap menjadi 144,74 pada tahun 2015. Namun upaya ini masih perlu mendapat perhatian dalam meningkatkan pengendaliannya untuk masa yang akan datang.

Terkait dengan penyakit menular Provinsi Sumatera Barat memiliki kendala yaitu rendahnya penemuan cakupan penderita tuberkulosis (TBC) target MDGs tahun 2015 sebesar 90 %. Dan penemuan kasus baru TB diharapkan diatas 200 orang per 100.000 penduduk. Kondisi ini, disebabkan karena kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan dahak (Sputum). Upaya menghilangkan stigma menjadi prioritas dalam penanggulangan TB. Disamping itu perlu perhatian lebih pada upaya deteksi tuberkulosis dan juga keberhasilan pengobatannya. Ketersediaan reagen, pemberdayaan masyarakat dan ketersediaan obat antituberculosis (OAT) ditingkat pelayanan primer harus diperhatikan.

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit demam berdarah

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD setiap tahunnya seluruhnya sudah 100%. Namun demikian angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) masih tinggi dilihat dari Incident Rate 59,48%, walaupun demikian angka kematian akibat DBD relatif kecil.

Menurunnya angka kematian akibat DBD ini, menunjukkan bahwa penanganan penderita DBD sudah relatif baik. Namun demikian, pembinaan terhadap masyarakat agar dapat terhindar dari penyakit DBD penting untuk ditingkatkan, selain peningkatan pelayanan kesehatan kepada penderitanya.

Untuk itu perlu perhatian pada upaya perubahan perilaku masyarakat dalam Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) melalui penyuluhan dan promosi kesehatan serta penyelenggaraan *system surveilans* dan kewaspadaan dini.

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin di Provinsi Sumatera Barat dimana selama periode 2010-2015 sudah dicakup sebesar 100%.

Dalam rangka pencapaian target cakupan layanan kesehatan menyeluruh pada tahun 2019 maka Pemerintah Sumatera Barat perlu melakukan upaya penjaminan terhadap peningkatan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat terutama masyarakat miskin. Kartu Indonesia Sehat menjadi bentuk pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Kesehatan yang menjamin setiap orang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhannya dan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan daerah.

Persentase Jaminan Pemeliharaan Kesehatan di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2015 adalah sebesar 66,20%. Selanjutnya jumlah masyarakat miskin yang memiliki kartu Askeskin/Jamkesmas adalah sebesar 1.533.170. Namun demikian jumlah masyarakat miskin yang memiliki kartu Jamkesmas masih terbatas dan dianggap belum tepat sasaran. Peningkatan jumlah kepesertaan perlu menjadi prioritas dengan pengembangan peserta penerima bantuan iuran (PBI), peserta penerima upah, dan bukan penerima upah, serta integrasi jaminan kesehatan daerah ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional

Cakupan kunjungan bayi

Cakupan kunjungan bayi di Sumatera Barat dari tahun 2010 hingga tahun 2015 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2010 tercatat sangat baik yaitu 95,33%, tahun 2011 menurun menjadi 83,60%, selanjutnya meningkat secara bertahap dan pada tahun 2015 menjadi 93,45%. Harapannya ke depan Cakupan kunjungan bayi bisa mencapai 100% dalam rangka penurunan angka kematian bayi.

Cakupan Puskesmas *Visit Rate*

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan individu dan keluarga juga dapat ditunjukkan dengan peningkatan cakupan jumlah kunjungan masyarakat ke Puskesmas (*Visite Rate*). Upaya kesehatan masyarakat mengalami peningkatan capaian, selama 5 tahun terakhir dimana angka cakupan mencapai 142,05 pada tahun 2010 dan meningkat secara bertahap mencapai 147,49 pada tahun 2015.

Cakupan puskesmas pembantu

Cakupan puskesmas pembantu (pustu) diperlukan karena bermanfaat untuk mengetahui cakupan pelayanan fasilitas kesehatan dimasyarakat. Pustu cakupannya adalah desa dan atau kelurahan tergantung jumlah penduduknya. Cakupan puskesmas pembantu dihitung dengan cara menjumlahkan puskesmas pembantu yang terdapat di setiap kecamatan dibagi dengan jumlah kecamatan di kabupaten setiap tahunnya. Cakupan puskesmas pembantu di daerah Sumatera Barat selama periode 2010-2015 mengalami trend yang meningkat.

2.3.1.3. Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Berdasarkan data pada Tabel 2.40, memperlihatkan bahwa capaian kinerja dari pelaksanaan pembangunan daerah dalam lingkup urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun selama periode 2010-2015, hal ini tergambar dari data indikator proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, rasio jaringan irigasi, rasio tempat ibadah per satuan penduduk, persentase rumah tinggal bersanitasi, rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk, rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk, rasio permukiman layak huni, dan

drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat. Sebagian besar indikator pekerjaan umum rata-rata mengalami peningkatan, kecuali persentase panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainasi/saluran pembuangan air, persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar dan luas lingkungan permukiman yang nilainya tetap tidak berubah. Bagi indikator persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar, nilai yang ada ini perlu tetap dipertahankan, sedangkan bagi indikator persentase panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air, rasio permukiman layak huni, dan drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat, perlu terus ditingkatkan.

Tabel 2.40
Perkembangan Indikator Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015

No	Indikator	Satuan	Tahun					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	80	89	89	92	96	80,5
2	Rasio Jaringan Irigasi (Panjang jaringan (km) / luas sawah (ha))	%	1 : 36	1 : 36	1 : 36	1 : 36	1 : 45	1 : 105
3	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	%	3,39	3,45	3,51	3,57	3,66	3,77
4	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	56,73	58,15	60,94	63,63	65,37	66,84
5	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	%	32,5	32,7	33,05	33,05	34,02	34,02*)
6	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	%	73,65	73,85	73,85	74,50	75,70	75,70*)
7	Rasio rumah layak huni	Rasio	0,39	0,39	0,40	0,42	0,43	0,45
8	Rasio Permukiman layak huni	Rasio	25,940	27,600	28,510	30,390	31,110	31,150
9	Panjang Jalan dilalui roda 4	Km	1.029,44	1.029,44	1.029,44	1.230,53	1.024,040	1.024,040
10	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5)	%	5	5	5	5	5	5
11	Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	%	2	2	2	2	2	2
12	Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	%	0	0	0	0	0	0
13	Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	5.193,96	5.347,09	5.499,80	6.348,12	6.859,38	6.859,39
14	Lingkungan Pemukiman	Ha	1,532	1,532	1,532	1,532	1,532	1,532

Sumber : Dinas Prasjal Tarkim Provinsi Sumatera Barat

2.3.1.4. Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

Dengan memperhatikan data perkembangan layanan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, berdasarkan indikator-indikator yang ada, seperti halnya Rumah tangga pengguna air bersih, Rumah tangga pengguna listrik (PLN + non PLN), Rumah tangga bersanitasi, Rumah layak huni, dalam waktu lima tahun terus mengalami peningkatan, dan bagi Pemerintah yang perlu diperhatikan adalah indikator Lingkungan permukiman kumuh yang nilai persentasenya terus mengalami kenaikan dari 13,72% tahun 2010 menjadi 15,04% pada tahun 2015, seperti ditunjukkan pada Tabel 2.41.

Tabel 2.41
Perkembangan Indikator Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015

No	Indikator	Satuan	Tahun					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Rasio rumah layak huni	Rasio	0,39	0,39	0,40	0,42	0,43	0,45
2	Rumah tangga pengguna listrik (PLN + non PLN)	%	90,77	91,40	93,70	93,70	94,00	95,00
3	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	56,73	58,15	60,94	63,63	65,37	66,84
4	Lingkungan permukiman	Ha	1.532	1.532	1.532	1.532	1.532	1.532
5	Lingkungan permukiman kumuh	Ha	13,72	14,04	13,25	14,57	15,03	15,04
6	Luas kawasan permukiman	Ha	484.978,09	484.978,09	484.978,09	484.978,09	484.978,09	484.978,09
7	Jumlah kawasan pemukiman penduduk	Kawasa n	1.145	1.145	1.145	1.145	1.145	1.145
8	Rumah layak huni	%	67,47	70,01	73,57	74,30	75,00	76,00
9	Rasio permukiman layak huni	Rasio	25,940	27,600	28,510	30,390	31,110	31,150
10	Rumah Khusus Nelayan	Rumah	NA	NA	NA	NA	NA	NA
11	Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Rumah	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Sumber : Dinas Prasjal Tarkim Provinsi Sumatera Barat

2.3.1.5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat

Pelaksanaan dari pembangunan daerah dalam layanan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, selama periode waktu 2010-2015, berdasarkan data yang ada pada Tabel 2.42 sesuai dengan indikator yang tersedia, menunjukkan terjadi peningkatan. Hal ini, sejalan dengan upaya pemerintah daerah melakukan kegiatan seperti pembinaan terhadap lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat dan organisasi kepemudaan, pembinaan politik daerah, serta upaya lainnya dalam penegakan Perda, cakupan patroli petugas Satuan Polisi Pamong Praja, tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (keamanan, ketertiban, keindahan).

Tabel 2.42
Perkembangan Indikator Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan
Masyarakat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015

No,	Indikator	Satuan	Tahun					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Kegiatan	1	1	1	1	1	1
2	Kegiatan pembinaan politik daerah	Kegiatan	2	2	2	3	3	3
3	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10,000 penduduk	%	4,12	4,07	3,98	3,58	3,59	4,84
	Jumlah Polisi Pamong Praja	personil	2.001	2.004	1.990	1.995	1.995	2.509
4	Rasio Jumlah Linmas per Jumlah 10,000 Penduduk	%	*	*	*	51,72	30,02	30,08
5	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	%	*	*	*	*	0,7	0,8
6	Jumlah Pos Siskamling di Sumatera Barat	Unit	*	*	*	*	1,139	1.139
7	Penegakan PERDA	%	90,00	90,20	90,20	90,30	92,00	95,00
8	Cakupan patroli petugas Satpol PP	%	75,00	77,00	77,00	81,00	100	100
9	Tingkat penyelesaian pelanggaran ketertiban dan ketentraman di Provinsi Sumatera Barat	%	86,00	89,00	89,00	90,00	89,00	96,00

Sumber : Badan Kesbanlinmas dan Satpol PP Provinsi Sumatera Barat

2.3.1.6. Urusan Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan merupakan proses secara kontinyu dalam merumuskan kebijakan pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran, dengan mempertimbangkan segala potensi serta keterbatasannya. Dengan kata lain, proses perencanaan pembangunan akan menghasilkan beberapa alternatif kemungkinan kebijakan yang harus dipersiapkan di masa mendatang, sehingga pada gilirannya dapat dicapai sasaran dengan melihat segala aspek potensi dan kendala yang mungkin dihadapi.

Pada tahun 2010-2015, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan dokumen jangka menengah dan jangka pendek dengan Perda/Perkada, mempedomani rencana pembangunan jangka panjang yang sudah ditetapkan sebelumnya, dan selanjutnya dijabarkan menjadi program-program dalam dokumen rencana kerja pemerintah daerah. Dokumen yang telah ditetapkan terlihat pada Tabel 2.43.

Tabel 2.43.
Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan

NO	INDIKATOR	SATUAN	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

2.3.1.7. Urusan Sosial

Perkembangan indikator urusan sosial berdasarkan data series 2010-2015 menunjukkan bahwa terhadap sarana dan prasarana seperti Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi, mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir pada tahun 2010 jumlahnya sebanyak 135 unit, sedangkan tahun 2014 berkurang menjadi 123 unit saja, hal ini menandakan perlunya perhatian pemerintah daerah kedepan dalam meningkatkan layanan pada pembangunan sarana dan prasarana panti ini, sedangkan untuk indikator PMKS yang memperoleh bantuan dan Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial/Penanganan PMKS, secara persentasi menunjukkan perbaikan dari tahun ke tahun, hal ini dapat dilihat dari jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) jumlahnya terus mengalami penurunan yakni 525.078 orang pada tahun 2010, menjadi 289.753 orang tahun 2015. Perkembangan pembangunan penanganan masalah sosial dapat terlihat pada Tabel 2.43.

Tabel 2.44
Perkembangan Indikator Urusan Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015

No	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	unit	135	135	112	109	110	123
2	PMKS yang memperoleh bantuan	%	100	100	100	100	100	99,99
		orang	5.667	5.222	4.792	4.824	5.634	6.947
3	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial/ Penanganan PMKS	%	1,33	1,19	1,73	1,87	1,88	2,40
		orang	6.991	5.979	5.638	5.349	5.450	6.947
4	Jumlah PMKS	orang	525.078	501.683	326.581	285.942	289.753	289.753

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat

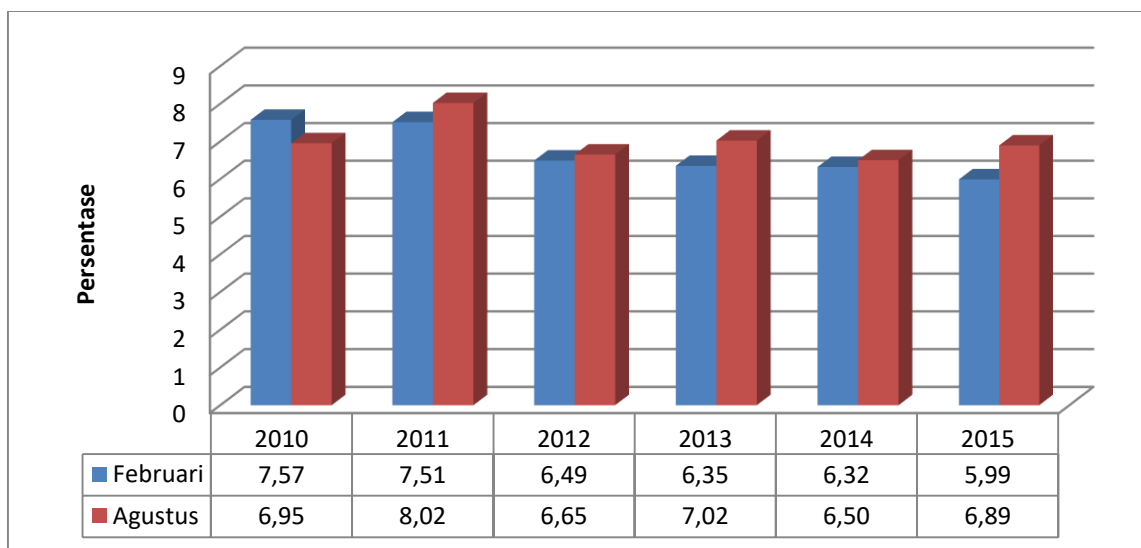
2.3.1.8. Urusan Tenaga Kerja

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Sumatera Barat bahwa kondisi ketenagakerjaan di Sumatera Barat pada Agustus 2015 menunjukkan proses dinamis di pasar tenaga kerja Sumatera Barat, yang digambarkan dengan terjadinya fluktuasi jumlah angkatan kerja maupun jumlah penduduk bekerja dan tingkat pengangguran (dihitung dua kali setahun yaitu bulan Februari dan Agustus). Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2015 sebanyak 2,35 juta orang berkurang sebanyak 134,67 ribu orang dibanding keadaan Februari 2015, namun jika dibandingkan dengan keadaan Agustus 2014 bertambah sebanyak 14,17 ribu. Penduduk yang bekerja pada Agustus 2015 sebanyak 2,18 juta orang berkurang sebesar 6,33 persen dibanding keadaan Februari 2015, namun jika dibandingkan dengan Agustus 2014, mengalami peningkatan 0,20 persen.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sumatera Barat pada Agustus 2015 mencapai 6,89 persen, mengalami peningkatan dibanding TPT Februari 2015 sebesar 5,99 persen dan TPT Agustus sebesar 6,50 persen. Sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) selama kurun waktu setahun ini relative stabil dengan sedikit penurunan dari 68,73 persen di Februari 2015 menjadi 64,56 persen di Agustus 2015.

Persentase tingkat pengangguran di Provinsi Sumatera Barat mengalami penurunan dari 7,57 persen pada Februari 2010 menjadi 5,99 persen pada Februari 2015, sedangkan kondisi Agustus 2010 sebesar 6,95 persen turun menjadi 6,89 persen di September 2015, seperti terlihat pada Diagram 2.5.

Diagram 2.5.
Perkembangan Persentase Tingkat Pengangguran di Provinsi Sumatera Barat
Kondisi Februari dan Agustus 2010-2015



Sumber : Badan Pusat Statistik Sumatera Barat Tahun 2016

Struktur lapangan pekerjaan hingga Agustus 2015 tidak mengalami perubahan, dimana sektor pertanian, perdagangan, sektor industri, konstruksi, transportasi, pergudangan dan komunikasi jasa masyarakat, serta keuangan masih menjadi penyumbang terbesar penyerapan tenaga kerja di Sumatera Barat. Selama setahun terakhir (Agustus 2014 - Agustus 2015) jumlah penduduk yang bekerja mengalami penurunan pada sebagian besar sektor lapangan pekerjaan utamanya, terutama di sektor jasa masyarakat sebanyak 42,97 ribu orang (10,26%), sektor lainnya (pertambangan, listrik, gas dan air) sebanyak 8,80 ribu orang (18,56%), dan sektor industri sebanyak 3,41 ribu orang (2,28%). Sedangkan sektor yang mengalami kenaikan yaitu sektor pertanian dan sektor perdagangan yang mengalami kenaikan jumlah penduduk bekerja pada lapangan pekerjaan tersebut masing-masing sebesar 4,61 persen

dan 4,95 persen. Komposisi penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dapat dilihat pada Tabel 2.45.

Tabel 2.45
Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama
Kondisi Agustus 2011 – 2015 di Provinsi Sumatera Barat (ribu orang)

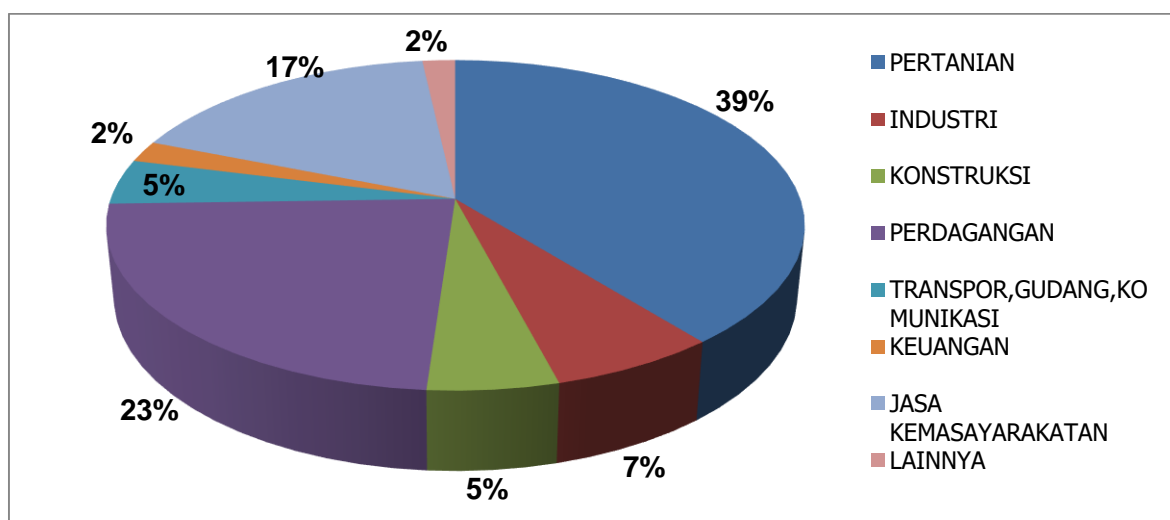
No	LAPANGAN PEKERJAAN UTAMA	AGUSTUS				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Pertanian	813,7	827,3	817,9	818,7	856,4
2	Industri	153,1	159,0	132,3	149,5	146,0
3	Perdagangan	441,8	431,8	472,8	487,1	511,1
4	Jasa Kemasyarakatan	347,7	325,9	354,4	419,0	376,0
5	Lainnya*)	314,4	293,6	283,7	306,1	295,1
TOTAL		2.070,7	2.037,6	2.061,1	2.180,3	2.184,6

Sumber Data : BPS Provinsi Sumatera Barat

Ket : *) Pertambangan dan Penggalian, Listrik, Gas dan Air, Konstruksi, Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi, Keuangan.

Selanjutnya persentase penduduk menurut lapangan pekerjaan dapat dilihat pada diagram 2.6.

Diagram.2.6
Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan
Utama Kondisi Agustus 2015 di Sumatera Barat



Sumber Data : BPS Provinsi Sumatera Barat

Dari 2.184,6 ribu orang yang bekerja pada Agustus 2015, status pekerjaan utama terbanyak adalah sebagai buruh/karyawan sebesar 697,14 ribu orang (31,91 persen), diikuti berusaha sendiri dan berusaha dibantu buruh tetap masing-masing sebesar 464,55 ribu orang (21,26 persen) dan 382,43 ribu orang (17,51 persen), sedangkan yang terkecil adalah pekerja berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar sebesar 80,28 ribu orang (3,67 persen).

Dari enam status pekerjaan sesuai Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), secara sederhana dapat diidentifikasi 2 kelompok utama terkait kegiatan ekonomi formal dan informal. Kegiatan formal terdiri dari mereka yang berstatus berusaha dibantu buruh tetap dan buruh/karyawan, sementara sisanya termasuk kegiatan informal. Pada Agustus 2015 terdapat 777,41 ribu orang atau 35,59 persen pekerja bergerak pada kegiatan ekonomi formal dan sisanya sebesar 1,41 juta orang atau 64,51 persen termasuk kegiatan informal, seperti terlihat pada Tabel 2.46.

Tabel 2.46
Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja
Menurut Status Pekerjaan Utama di Provinsi Sumatera Barat
Kondisi Agustus 2011-Agustus 2015 (ribu orang)

NO	STATUS PEKERJAAN UTAMA	AGUSTUS				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Berusaha Sendiri	459,3 (22,18%)	442,4 (21,71%)	475,4 (23,07%)	524,6 (24,06%)	464,5 (21,26%)
2	Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap	352,1 (17,00%)	345,1 (16,94%)	364,7 (17,69%)	383,1 (17,57%)	382,4 (17,5%)
3	Berusaha Dibantu Buruh Tetap	114,7 (5,54%)	97,8 (4,80%)	96,1 (4,66%)	95,5 (4,38%)	80,2 (3,67%)
4	Buruh/Karyawan	622,6 (30,07%)	629,3 (30,88%)	636,3 (30,87%)	678,4 (31,11%)	697,1 (31,91%)
5	Pekerja Bebas	220,8 (10,66%)	230,5 (11,31%)	198,7 (9,64%)	216,5 (9,93%)	260,2 (11,91%)
6	Pekerja Tak Dibayar	301,2 (14,55%)	292,5 (14,36%)	289,9 (14,07%)	282,1 (12,94%)	299,9 (13,73%)
TOTAL		2.070,7 (100%)	2.037,6 (100%)	2.061,1 (100%)	2.180,3 (100%)	2.184,6 (100%)

Sumber Data : Berita Resmi Statistik No.66/11/13/Th.XVIII, Tanggal 05 November 2015

Untuk komposisi penduduk yang bekerja menurut jam kerja per minggu berfluktuasi dari Agustus 2011 ke Agustus 2015. Penduduk yang dianggap sebagai pekerja penuh waktu yaitu penduduk yang bekerja pada kelompok 35 jam ke atas perminggu, pada Agustus 2015 mencapai 66,11 persen, naik dari 63,09 persen pada Agustus 2014. Sementara itu dalam setahun terakhir pekerja tidak penuh (jumlah jam kerja kurang dari 35 jam perminggu) turun dari 36,91 persen pada tahun 2014 menjadi 33,89 persen tahun 2015, seperti terlihat pada Tabel 47.

Tabel 2.47
Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja
Perminggu di Sumatera Barat Kondisi Agustus 2011- 2015 (Persen)

NO	JUMLAH JAM KERJA	AGUSTUS				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	1-7	2,04	2,00	3,02	1,88	1,80
2	8-14	5,84	5,94	8,11	5,69	4,97
3	15-24	13,94	14,75	17,96	14,35	12,59
4	25-34	14,64	16,86	14,36	14,99	14,53
5	1-34	36,46	39,55	43,45	36,91	33,89
6	35+*)	63,54	60,45	56,55	63,09	66,11

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

Ket : *) Termasuk Sementara Tidak bekerja

Penyerapan tenaga kerja hingga Agustus 2015 masih didominasi oleh penduduk bekerja berpendidikan rendah yaitu Sekolah Dasar ke bawah sebanyak 859,46 ribu orang (39,34%) dan Sekolah Menengah Atas sebanyak 426,35 ribu (19,52%), Diploma sebanyak 67,21 ribu orang (3,08%) serta sebanyak 206,98 ribu orang (9,47 %) berpendidikan sarjana.

Perbaikan kualitas penduduk yang bekerja ditunjukkan oleh kecenderungan menurunnya penduduk bekerja berpendidikan rendah (SMP ke bawah) dan meningkatnya penduduk bekerja berpendidikan tinggi (Diploma dan Universitas), seperti terlihat pada Tabel 2.48.

Tabel 2.48
Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan di Sumatera Barat Kondisi Agustus 2011-Agustus 2015 (Persen)

NO	PENDIDIKAN TERTINGGI	AGUSTUS				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	SD ke Bawah	42,24	42,59	42,26	41,34	39,34
2	Sekolah Menengah Pertama	20,64	19,36	19,40	19,40	19,12
3	Sekolah Menengah Atas	18,37	17,97	17,29	18,01	19,52
4	Sekolah Menengah Kejuruan	8,52	9,22	9,32	9,43	9,47
5	Diploma I/II/III	4,23	3,50	3,52	3,47	3,08
6	Sarjana (S1, S2, S3)	6,01	7,35	8,22	8,35	9,47
JUMLAH		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber Data : Berita Resmi Statistik No.66/11/13/Th.XVIII, Tanggal 05 November 2015

Tingkat pengangguran terbuka menurut pendidikan pada Agustus 2015 yang tertinggi adalah tamatan Sekolah Menengah Kejuruan sebesar 13,32 persen, Sekolah Menengah Atas 12,30 persen, dan tamatan Diploma sebesar 11,25 persen, secara lengkap terlihat datanya pada Tabel 2.49.

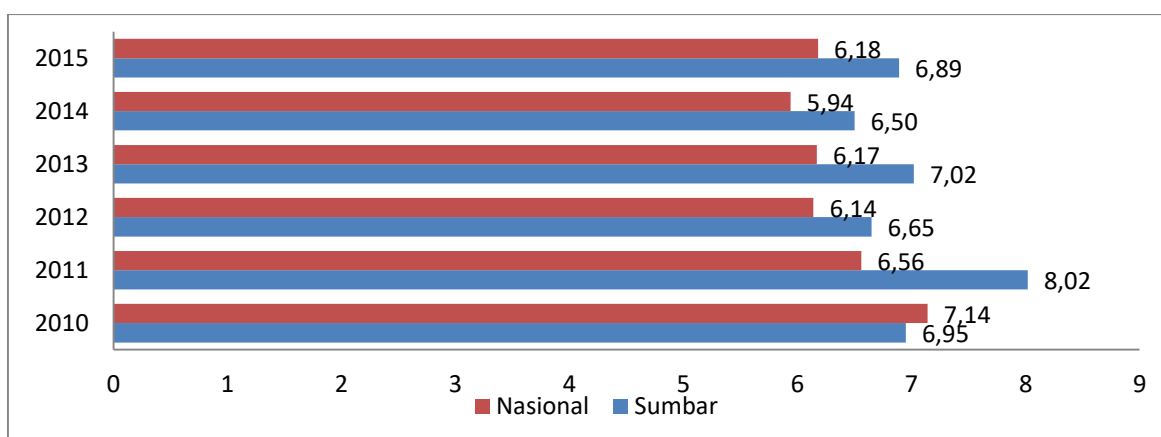
Tabel 2.49
Tingkat Pengangguran Terbuka Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan di Sumatera Barat Kondisi Agustus 2011-Agustus 2015 (Persen)

NO	PENDIDIKAN TERTINGGI	AGUSTUS				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	SD ke Bawah	3,34	3,87	3,85	3,90	2,98
2	Sekolah Menengah Pertama	7,12	6,42	6,13	6,19	3,80
3	Sekolah Menengah Atas	10,98	10,58	11,23	9,22	12,30
4	Sekolah Menengah Kejuruan	9,59	9,54	13,00	11,15	13,32
5	Diploma I/II/III	4,09	5,15	6,98	5,79	11,25
6	Sarjana (S1, S2, S3)	7,75	8,07	8,30	8,46	8,23
JUMLAH		6,45	6,52	7,02	6,50	6,89

Sumber Data : Berita Resmi Statistik No.66/11/13/Th.XVIII, Tanggal 05 November 2015

Jika dibandingkan tingkat pengangguran di Sumatera Barat dengan Nasional sejak tahun 2010 sampai 2015, terlihat tingkat pengangguran Sumatera Barat lebih tinggi sedikit daripada nasional, seperti diagram dibawah ini

Diagram 2.7
Perbandingan Persentase Tingkat Pengangguran di Provinsi Sumatera Barat Dengan Nasional Kondisi Agustus 2010-2015



Sumber : Badan Pusat Statistik Sumatera Barat Tahun 2016

Angka partisipasi angkatan kerja dan Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), merupakan indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survey, secara umum memperlihatkan pesentase yang menurun dari tahun 2010 sampai tahun 2015, sedangkan indikator Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun semakin meningkat dari 0,29% menjadi 1,49%.

Pencari kerja yang ditempatkan memperlihatkan fluktuasi yang cukup signifikan, namun pada tahun 2015 menunjukkan persentase yang meningkat dari 13,88% pada tahun 2010 menjadi menjadi 19,12%. Tingkat pengangguran terbuka, juga memperlihatkan trend yang semakin menurun. Sedangkan Keselamatan dan perlindungan kerja secara umum meningkat dari tahun 2010 sebesar 11,03% menjadi 14.46 % pada tahun 2015. Sedangkan perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah di Sumatera Barat sejak tahun 2010-2015 tidak pernah terjadi, seperti terlihat pada Tabel 2.50.

Tabel 2.50
Perkembangan Indikator Urusan Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2010-2015

No,	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Angka partisipasi angkatan kerja	%	66,36	66,19	64,47	62,92	65,19	64,56
2	Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun	%	0,29	0,25	0,31	0,36	0,47	1,49
3	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	66,36	66,19	64,47	62,92	65,19	64,56
4	Pencari kerja yang ditempatkan	%	13,88	6,58	10,97	7,90	14,28	19,12
5	Tingkat pengangguran terbuka	%	6,95	6,45	6,52	7,02	6,50	6,89
6	Keselamatan dan perlindungan kerja	%	11,03	11,74	14,40	14,75	13,75	14,46
7	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	%	0	0	0	0	0	0
		Unit	0	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat

2.3.1.8. Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Memperhatikan perkembangan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak berdasarkan data dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Provinsi Sumatera Barat menunjukkan bahwa Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur semakin berkurang dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015.

Sedangkan indikator partisipasi angkatan kerja perempuan pada periode tahun yang sama menunjukkan pesentase yang semakin bertambah, hal ini dapat menggambarkan bahwa pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sudah cukup memadai, namun yang perlu ditingkatkan adalah Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah untuk memenuhi kuota 30%, seperti data series lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.51.

Tabel 2.51
Perkembangan Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015

No	Indikator Pembangunan	Sat	Tahun					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	Eselon II 6,8 Eselon III 25 Eselon IV 35	Eselon II 6,8 Eselon III 25 Eselon IV 35	Eselon II 8,81 Eselon III 27,27 Eselon IV 41,41	Eselon II 4,9 Eselon III 27,9 Eselon IV 39,18	Eselon II 5,0 Eselon III 27,9 Eselon IV 39,18	Eselon II 5,0 Eselon III 27,9 Eselon IV 39,18
2	Rasio KDRT	%	78	65	60	100	0	0
3	Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur	%	1,11	8,9	1,69	1,69	0,001	0,001
4	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	26,40	25,49	56,01	56,01	50,65	50,65
5	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	Kasus	1	3	14	14	0	0

Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Provinsi Sumatera Barat

2.3.1.9. Urusan Pangan

Pada urusan pangan berbagai indikator yang terlihat pada Tabel 2.50 menggambarkan perkembangan yang cukup baik, hal ini didukung oleh adanya regulasi ketahanan pangan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam mengatur ketersediaan dan distribusi bahan pangan di daerah sejak tahun 2010 yaitu Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 31 Tahun 2010 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) Berbasis Sumberdaya Lokal di Sumatera Barat, Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Cadangan pangan Pemerintah Daerah yang kemudian direvisi pada tahun 2013 menjadi Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2013 dan pada tahun 2015 ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kemandirian Pangan. Perkembangan ketahanan pangan selama lima tahun terakhir, seperti pada Tabel 2.52.

Tabel 2.52
Perkembangan Indikator Urusan Pangan
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
KETERSEDIAAN PANGAN UTAMA BERAS								
1	Menurut Produksi	Ton	1,146,787	1,170,732	1,389,956	1,395,819	1,384,570	1,433,975
2	Ketersediaan Beras	Kg/kap/th	234	239	280	275	270	276
3	Konsumsi Beras	Kg/kap/th	109,56	112,65	108,08	105,16	107,70	105,07
4	Kebutuhan Beras	Ton	531,027	552,487	535,813	532,775	552,706	549,248
5	Surplus Beras	Ton	615,760	618,245	854,143	863,044	831,864	884,727
6	Ketersediaan Energi Beras	Kkal/kap/hr	2,331	2,374	2,773	2,734	2,677	2,738
7	Total Energi Ideal kelompok bahan makanan sesuai PPH Ketersediaan	%	2,200	2,200	2,200	2,400	2,400	2,400

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
8	Persentase Angka Kecukupan Energi beras pada tingkat ketersediaan	%	202,20	194,00	221,60	241,60	147,20	158,30

Sumber : Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat

Ketersediaan pangan terutama beras di Sumatera Barat, sudah melebihi dari kebutuhan dan setiap tahun terjadi surplus beras yang selama ini dimanfaatkan kebutuhan provinsi tetangga.

2.3.1.10. Urusan Pertanahan

Berdasarkan data yang tersedia pada indikator urusan pertanahan bahwa Penyelesaian kasus tanah Negara selama kurun waktu lima tahun, menunjukkan angka yang terus berkurang, dari 415 kasus tahun 2010 menjadi 165 kasus pada 2015, hal ini mengindikasikan bahwa telah berkurangnya sengketa terhadap tanah-tanah Negara di daerah, seperti Tabel 2.53.

Tabel 2.53
Perkembangan Indikator Urusan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2010-2015

No,	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Penyelesaian kasus tanah Negara	Kasus	415	379	165	165	165	165
2	Penyelesaian izin lokasi	Buah	2	4	0	0	0	0

Sumber : Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat

2.3.1.11. Urusan Lingkungan Hidup

Perkembangan penyelenggaraan urusan lingkungan hidup selama tahun 2010-2015 ditunjukkan pada Tabel 2.48. Data menunjukkan bahwa pesentase penanganan sampah dengan indikator perkiraan timbunan sampah per hari pada tahun 2012 sebanyak 856.575,60 m³ menjadi 546.277,19 m³ pada tahun 2015. Indeks Pencemaran Air menurun dari 61,90 pada tahun 2011 menjadi 53,71 pada tahun 2015, Indeks Pencemaran Udara menurun dari 91,05 pada tahun 2011 menjadi 89,16 pada tahun 2015 dan Indeks Tutupan Hutan menurun dari 67,24 pada tahun 2011 menjadi 65,13 tahun 2015 seperti terlihat pada Tabel 2.54.

Tabel 2.54.
Perkembangan Indikator Urusan Lingkungan Hidup
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015

No	Indikator	Satuan	Tahun					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Perkiraan timbunan sampah per hari	M3	n/a	n/a	856.575,60	809.408,53	680.605,69	546.277,19
2	Indeks Pencemaran Air (IPA)	indeks	n/a	61,90	59,29	52,71	53,71	53,71*)
3	Indeks Pencemaran Udara (IPU)	Indeks	n/a	91,05	86,02	86,41	89,16	88,16*)
4	Indeks Tutupan Hutan (ITH)	Indeks	n/a	67,24	65,51	65,13	65,13	63,55

Sumber : Dinas Prasjal Tarkim dan Bappedalda Provinsi Sumatera Barat

2.3.1.12. Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan angka yang terlihat pada Tabel 2.55 menunjukkan berbagai indikator dalam urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, selalu mengalami kenaikan selama kurun waktu 2010-2015. Hal ini dapat dilihat dari rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk mencapai 59,99% pada tahun 2015 dari sebelumnya 26,05% pada tahun 2011, dan pemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) mencapai 3.334.692 orang pada tahun 2015 dari sebelumnya 1.172.146 orang pada tahun 2010, demikian juga halnya ketersediaan database kependudukan skala provinsi, dan Penerapan KTP nasional berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) sudah tersedia, ini menunjukkan bahwa tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil di daerah keadaannya semakin membaik.

Tabel 2.55
Perkembangan Indikator Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015

No	Indikator	Satuan	Tahun					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015*)
1	Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk	%	0	26,05	57,02	57,18	59,99	59,99
2	Pasangan berakte nikah	Pasangan	134,172	23,123	26,432	138,441	138,441	138.441
3	Kepemilikan KTP	Orang	1.172,146	1,373,813	2,999,213	3,127,188	3,334,692	3.334.692
4	Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk	Penduduk	156	77	122	31	38	38
5	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada/Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ada	Ada	Ada
6	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/ Belum	Belum	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah

Sumber : Biro Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat

2.3.1.13. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Dalam urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, sesuai dengan data pada Tabel 2.56, memperlihatkan indikator-indikator pelaksanaan pembangunan selama tahun 2010-2015 dapat dikatakan cukup berhasil, hal ini ditandai oleh meningkatnya jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dari 912 tahun 2010 menjadi 1.139 pada tahun 2015. Pada indikator Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) aktif juga memperlihatkan peningkatan, serta Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat terus meningkat dari 570 kelompok tahun 2010 menjadi 3.796 kelompok pada tahun 2015, namun pada indikator lainnya seperti Posyandu aktif dan Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK, menunjukkan angka yang berfluktuasi setiap tahunnya, seperti terlihat pada Tabel 2.56.

Tabel 2.56
Perkembangan Indikator Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015

No	Indikator	Satuan	Tahun					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah lembaga pemberdayaan masyarakat	LPM	912	912	912	1.139	1.139	1.139
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	%	40,29	38,81	35,58	35,37	35,50	35,50
3	Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Kelompok	251	312	341	341	341	341
4	LPM Berprestasi	lembaga	0	0	0	0	3	3

No	Indikator	Satuan	Tahun					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
5	PKK aktif	Kelompok	1.179	1.224	1.335	1.343	1.338	1.338
6	Posyandu aktif	%	94,06	93,78	95,63	86,5	93,79	95,59
7	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	Rp.Jt	17.678	17.668	106.578	110.685	113.980	115.275
8	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	Kelompok	570	570	912	3.503	3.796	3.796

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat

2.3.1.14. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Perkembangan urusan keluarga berencana dapat dikatakan, bahwa sudah mengalami kemajuan yang cukup berarti, seperti terlihat dari Tabel 2.56. Rata-rata jumlah anak per keluarga mengalami penurunan dari 4,12 pada tahun 2010 menjadi 2,8 pada tahun 2015, artinya pengendalian jumlah anak per keluarga sudah dapat ditekan. Rasio akseptor KB, cakupan peserta KB aktif juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berikutnya untuk Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I, memperlihatkan angka yang menurun persentasenya dari 32,90% pada tahun 2010 menjadi 27,30% pada tahun 2014, seperti terlihat pada Tabel 2.57.

Tabel 2.57
Perkembangan Indikator Urusan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2010-2015

No	Indikator	Satuan	Tahun					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Rata-rata jumlah anak per keluarga	anak	4,12	3,95	3,95	2,8	2,8	2,8
2	Rasio akseptor KB	%	74,35	75,30	74,90	73,41	74,90	74,95
3	Cakupan peserta KB aktif	%	67,19	73,79	74,90	75,60	75,67	76,50
		Orang	593,885	611,415	626,414	629,348	624,473	642,263
4	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	%	32,90	30,90	30,40	27,80	27,30	27,30*
		Keluarga	390,546	370,951	369,287	342,836	338,902	338,902*
	a. Pra Sejahtera	Keluarga	108,238	97,642	98,004	86,592	81,853	81,853*
	b. Keluarga Sejahtera I	Keluarga	282,308	273,309	271,282	256,244	257,069	257,069*

Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan KB Provinsi Sumatera Barat

2.3.1.15. Urusan Perhubungan

Jumlah penumpang Angkutan Umum merupakan salah satu indikator keberhasilan di dalam Penyelenggaraan/Pengelolaan Angkutan Umum. Hal ini ditandai dengan peningkatan jumlah penumpang yang terangkut dengan menggunakan Angkutan Umum. Peningkatan Jumlah penumpang Angkutan umum sangat tergantung kemudahan akses layanan (jangkauan perjalanan) dan kehandalan (frekuensi perjalanan) dari angkutan umum itu tersendiri.

Perkembangan jumlah penumpang angkutan umum di Sumatera Barat sangat berfluktuasi, terutama pada Angkutan Darat, Laut dan Sungai Danau dan Penyeberangan (SDP). Dengan memperhatikan Tabel 2.58 menunjukkan bahwa penumpang angkutan umum Darat menunjukkan kecenderungan kenaikannya dari tahun 2011 sampai tahun 2013. Kenaikan jumlah penumpang angkutan darat dari tahun 2011 - 2013 rata-rata

sebesar 4,92% atau rata-rata 404,748 orang/tahun. Namun jumlah penumpang pada tahun 2014, terjadi penurunan sebesar 2.388.163 atau 27%. Penurunan tersebut disebabkan karena masyarakat beralih dari menggunakan angkutan umum ke kendaraan pribadi. Berkurangnya jumlah penumpang angkutan darat juga berpengaruh terhadap penurunan pengoperasian atau rit perjalanan angkutan umum. Pada tahun 2015, jumlah penumpang angkutan darat mulai mengalami peningkatan, dari 6.456.885 orang tahun 2014 menjadi 7.136.115 orang tahun 2015.

Selanjutnya tahun 2015 terjadi kenaikan jumlah penumpang yang cukup signifikan pada Angkutan Laut dan penurunan jumlah penumpang pada Angkutan SDP. Pada tabel tersebut, jumlah penumpang angkutan laut meningkat dari 13.831 orang untuk tahun 2014 menjadi 59.874 orang untuk tahun 2015 dan dan Angkutan SDP memiliki jumlah penumpang 102.235 orang untuk tahun 2014 menjadi 66.781 orang untuk tahun 2015. Gambaran tersebut dapat dijelaskan bahwa semenjak beroperasi Kapal Cepat Angkutan Laut ke Padang - Mentawai menyebabkan berkurangnya jumlah penumpang kapal SDP. Dan peningkatan frekuensi layanan pengoperasian Kapal Cepat menjadi salah satu faktor beralihnya penumpang dari menggunakan kapal SDP ke Kapal Cepat Angkutan Laut.

Penumpang Angkutan Udara dan Kereta Api terus mengalami peningkatan setiap tahun. Untuk Angkutan Udara, rata-rata peningkatan setiap tahun adalah sebesar 8.36%, sedangkan untuk Angkutan Kereta Api adalah sebesar 17,16%. Peningkatan tersebut di sebabkan karena peningkatan frekuensi layanan masing-masing angkutan. Penambahan frekuensi layanan disebabkan adanya kecenderungan dan keinginan masyarakat untuk menggunakan angkutan tersebut, karena angkutan tersebut memiliki waktu tempuh yang lebih cepat dan kenyamanan dibandingkan angkutan lain. Data jumlah penumpang, lebih rinci dapat dilihat Tabel 2.58

Tabel 2.58
Perkembangan Indikator Urusan Perhubungan
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2015

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Penumpang Angkutan Umum							
1	Angkutan darat	orang	8.035.552	8.435.800	8.845.048	6.456.885	7.136.115
2	Angkutan Laut	orang	17.722	16.055	17.358	13.831	59.874
3	Angkutan Udara	orang	2.211.884	2.585.768	2.659.797	2.745.438	3.032.561
4	Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan	orang	46.423	60.425	96.801	102.235	66.781
5	Angkutan Kereta Api	orang	560.762	582.785	628.711	611.319	975.737
Jumlah Pelabuhan/Bandara/Terminal							
1	Pelabuhan Penyeberangan Padang – Mentawai	Pel, Penyeb	4	4	4	4	4
2	Bandara	Bandara	3	3	3	3	4
3	Terminal Bis	Terminal	11	11	11	11	11

Sumber : Dinas Perhubungan dan Kominfo Provinsi Sumatera Barat

Kemudian ketersediaan fasilitas Jumlah Pelabuhan/Bandara/Terminal belum mengalami peningkatan. Penambahan fasilitas hanya terdapat pada fasilitas bandara yakni terbangunnya 1 (satu) fasilitas bandar udara di Pasaman Barat. Sedangkan untuk fasilitas pelabuhan dan terminal belum mengalami penambahan.

2.3.1.16. Urusan Komunikasi Dan Informatika

Penyelenggaraan pemerintahan di Sumatera Barat telah didukung oleh sistem teknologi informasi. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sudah mempunyai website untuk publikasi dan komunikasi proses dan hasil-hasil pembangunan. Untuk mendukung pengelolaan website telah menggunakan jaringan komunikasi ASTINet (Access Service To Internet) dan Jaringan Komunikasi Pusat dan Daerah (Jarkompusda). Perkembangan sistem komunikasi dan informasi di Sumatera Barat dapat dilihat pada Tabel 2.59.

Tabel 2.59
Perkembangan Sistem Komunikasi dan Informasi Tahun 2010-2015

No	Indikator	Satuan	Tahun					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah jaringan komunikasi	Unit	2 (Astinet dan jarkompusda)	3 (Astinet dan jarkompusda telepresence)	3 (Astinet dan jarkompusda telepresence)	3 (Astinet dan jarkompusda telepresence)	3 (Astinet dan jarkompusda telepresence)	3 (Astinet dan jarkompusda telepresence)
2	Website milik Pemerintah Daerah	Web	1 Provinsi dan 19 Kab/Kota	1 Provinsi dan 19 Kab/Kota	1 Provinsi dan 19 Kab/Kota	1 Provinsi dan 19 Kab/Kota	1 Provinsi dan 19 Kab/Kota	1 Provinsi dan 19 Kab/Kota
3	Sistem Informasi Manajemen Pemda	Sistim	70	72	75	77	80	83

Sumber : KPID Provinsi Sumatera Barat

2.3.1.17. Urusan Otonomi Daerah

Aparatur Pemerintah Yang Profesional dan Bebas KKN

Keberhasilan penyelenggaraan fungsi pemerintahan sangat bergantung kepada profesionalitas aparatur pemerintah. Dalam realitanya, ukuran profesionalitas aparatur pemerintah memang belum dapat dilaksanakan dengan baik, mengingat alat ukur yang standard masih baru dipersiapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tahun 2015 jumlah PNS di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mencapai 8.225 orang. Jika dihitung rasio PNS pemerintah provinsi Sumbar dengan jumlah penduduk yang berjumlah 5.196.300 orang, maka perbandingannya adalah 1:632. Tentu dengan jumlah tersebut perlu diupayakan peningkatan kapasitas dan kompetensinya secara berkesinambungan agar tujuan penyelenggaraan pemerintahan dapat diwujudkan. Selain itu, masalah integritas dan manajemen aparatur perlu ditingkatkan agar kinerja yang dicapai dapat terus ditingkatkan. Apalagi pemerintah juga mendorong agar aparatur pemerintah di daerah kreatif dan inovatif dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah.

Penyelenggaraan Pemerintahan Yang baik, Bersih, Transparan dan Akuntabel

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel menjadi dasar pelaksanaan reformasi birokrasi di Provinsi Sumatera Barat. Sejak diterbitkannya Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 24 tahun 2011 tentang pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah Provinsi Sumatera Barat, terlihat adanya perubahan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan. Ini dapat dilihat dari capaian Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2014 terkait penilaian Kementerian PAN dan reformasi Birokrasi tentang akuntabilitas kinerja K/L dan provinsi yang mendapatkan nilai 70,52 dengan peringkat BB atau peringkat ke-8 dari 34 provinsi yang dinilai. Pencapaian ini tentu prestasi bagi pemerintah provinsi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel. Walaupun begitu, pencapaian ini harus ditingkatkan mengingat masih adanya masalah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Provinsi Sumatera Barat.

Misalnya, dengan melihat capaian lain hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) 2014 yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Provinsi Sumatera Barat berada di urutan 16 dari 33 Provinsi. Peringkat hasil EKPPD Sumatera Barat memang masih sangat fluktuatif. Misalnya, pada tahun 2010, Sumatera Barat berada pada peringkat 9, sedangkan tahun 2011 turun ke peringkat 25, selanjutnya tahun 2012 naik ke peringkat 10, sementara di tahun 2013 kembali turun ke peringkat 20. Dengan melihat kondisi ini, masih perlu upaya besar yang harus dilakukan pemerintah daerah provinsi agar wujud pemerintah yang baik, bersih, transparan dan akuntabel dapat direalisasikan. Hasil pemeringkatan nilai akuntabilitas kinerja pemerintah provinsi dapat dilihat pada Tabel. 2.60

Tabel 2.60
Hasil Pemeringkatan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi

NO	INSTANSI PEMERINTAH	NILAI	PREDIKAT
		2015	
1	Pemerintah Provinsi Di Yogyakarta	80.68	A
2	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	80.04	A
3	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	76.30	BB
4	Pemerintah Provinsi Bali	75.39	BB
5	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	75.15	BB
6	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	75.11	BB
7	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	72.09	BB
8	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	70.52	BB
9	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	70.06	BB
10	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	68.62	B

Sumber: Kementerian PAN & RB, 2015

Peningkatan Pelayanan Publik yang Prima, Aspiratif dan Partisipatif

Sesuai dengan UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, terdapat lima jenis pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu (a) Pelayanan pemerintahan, merupakan pelayanan masyarakat yang erat kaitannya dengan tugas-tugas umum pemerintahan seperti pelayanan Kartu Keluarga/KTP, IMB, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Imigrasi; (b) Pelayanan Pembangunan yaitu pelayanan masyarakat yang terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat, seperti penyediaan jalan, jembatan, pelabuhan dan lainnya; (c) Pelayanan Utilitas merupakan penyediaan utilitas seperti listrik, air, telepon, dan transportasi; (d) Pelayanan Kebutuhan Pokok, merupakan pelayanan yang menyediakan bahan-bahan kebutuhan pokok masyarakat dan kebutuhan perumahan seperti penyediaan beras, gula, minyak, gas, tekstil dan perumahan murah dan; (e) Pelayanan Kemasyarakatan (sosial) yaitu pelayanan yang berhubungan dengan sifat dan kepentingan yang lebih ditekankan kepada kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, penjara, rumah yatim piatu dan lainnya. Oleh karena itu, pemerintah daerah secara bertahap terus mengupayakan meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik.

2.3.1.18. Urusan Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

Perkembangan indikator urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, untuk persentase koperasi aktif meningkat dari 64,51% tahun 2010 menjadi 69,96% tahun 2015, hal tersebut mengindikasikan adanya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap gerakan koperasi dalam bentuk bertambahnya jumlah anggota, modal serta Sisa Hasil Usaha (SHU) sehingga dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat, seperti terlihat pada Tabel 2.61.

Tabel 2.61

**Perkembangan Indikator Urusan Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015**

No	Indikator	Satuan	Tahun					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Persentase koperasi aktif	%	64,51	66,31	69,36	70,48	69,03	69,96
	Jumlah Koperasi Aktif	Unit	2.319	2.482	2.628	2.641	2.628	2.723
	Jumlah Koperasi	Unit	3.595	3.743	3.789	3.747	3.807	3.892
2	Usaha Mikro dan Kecil	%	99,52	99,69	99,78	99,83	99,82	99,62
	Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Besar	%	99,26	99,26	99,26	99,26	99,26	99,26
	Usaha Mikro	Unit	N/A	58.364	96.629	82.186	76.652	76.652*
	Usaha Kecil	Unit	N/A	38.910	64.420	54.791	51.101	51.101*
	Usaha Menengah dan Besar	Unit	N/A	293	355	220	230	230*

*) : angka sementara

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat

2.3.1.19. Urusan Penanaman Modal

Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) pada indikator urusan penanaman modal dari tahun 2010-2015, terus meningkat setiap tahunnya, berdasar data pada Tabel 2.62 dibawah ini, untuk investor PMDN/PMA yang mendapat persetujuan sebanyak 280 untuk PMDN dan 299 untuk PMA pada tahun 2015, hal ini meningkat dibandingkan tahun 2010 hanya sebanyak 158 untuk PMDN dan 179 untuk PMA, dengan realisasi pada periode tahun 2015 sebanyak 165 untuk PMDN dan 163 untuk PMA, meningkat dibandingkan dengan tahun 2010 hanya sebanyak 127 untuk PMDN dan 90 bagi investor PMA.

Jumlah Realisasi investasi berskala nasional (PMDN/PMA), menunjukkan nilai yang terus meningkat dari tahun 2010 untuk PMDN hanya sebesar 398,2 miliar rupiah sedang tahun 2014 bertambah menjadi 1,2 triliun, demikian juga untuk PMA tahun 2010 nilai investasi sekitar US\$ 17,8 Juta, sedangkan tahun 2014 meningkat menjadi US\$ sekitar 29,5 juta.

Indikator Rasio daya serap tenaga kerja dan Rasio penyerapan tenaga kerja, selama kurun waktu 2010-2014, terus menerus mengalami penurunan pada PMDN maupun PMA, hal ini mengindikasikan bahwa penyerapan tenaga kerja untuk PMDN maupun PMA semakin bertambah, seperti terlihat pada Tabel 2.62.

Tabel 2.62

**Perkembangan Indikator Urusan Penanaman Modal Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2010-2015**

No	Indikator	Satuan	Tahun					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)							
	a, Persetujuan							
	- PMDN	Investor	158	165	171	189	225	280
	- PMA	Investor	179	207	237	246	264	299
	b, Realisasi							
	- PMDN	Investor	127	109	114	121	140	165
	- PMA	Investor	90	87	115	119	139	163
2	a. Rasio daya serap tenaga kerja							
	- PMDN	Orang/Proyek	1 : 760	1 : 731	1 : 719	1 : 946	1 : 833	1 : 735
	- PMA	Orang/Proyek	1 : 611	1 : 540	1 : 471	1 : 464	1 : 453	1 : 420
	b. Rasio							

No	Indikator	Satuan	Tahun					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
3	Penyerapan Tenaga Kerja							
	- PMDN	Orang/Pryek	1 : 410	1 : 452	1 : 476	1 : 463	1 : 455	1 : 388
	- PMA	Orang/Pryek	1 : 248	1 : 240	1 : 218	1 : 203	1 : 204	1 : 200
	a. Nilai Realisasi Investasi							
	- PMDN	Rp. Juta	398.269,06	1.678.383,80	749.934,63	873.761,90	1.233.021,83	3.185.075,82
	- PMA	US\$ Ribu	17.807,96	65.456,99	86.194,93	136.121,43	29.568,14	39.754,32
	b. Rasio Penyerapan Tenaga Kerja							
	- PMDN	Orang	1.316	880	111	1.392	1.473	2.039
	- PMA	Orang	398	382	416	656	15	4.375
	Kenaikan/penurunan nilai realisasi							
- PMDN	Rp, Juta	-363.348,84	1.280.114,74	-928.449,17	123.827,27	359.259,93	1.952.053,99	
- (%)	%	-47,71	321,42	-55,32	16,51	41,12	158,31	
- PMA	US \$ Ribu	-3.186,10	47.649,03	20.737,94	49.926,50	-106.553,29	10.186,18	
- (%)	%	-15,18	267,57	31,68	57,92	-78,28	34,44	
- Ratio Penyerapan Tenaga Kerja Tahunan								
- PMDN	Orang/Proyek	1 : 77	1 : 52	1 : 6	1 : 82	1 : 87	1 : 82	
- PMA	Orang/Proyek	1 : 31	1 : 31	1 : 17	1 : 23	18 : 15	1 : 183	

Sumber : BKPM & PPT Provinsi Sumatera Barat

2.3.1.20. Urusan Kepemudaan Dan Olah Raga

Untuk urusan kepemudaan dan olahraga dari data pada Tabel 2.63, secara umum dapat memberikan gambaran bahwa indikator menunjukkan keberhasilan yang cukup baik dan terus meningkat selama periode 2010-2015. Hal ini terlihat dari jumlah organisasi pemuda pada tahun 2010 sebanyak 123 organisasi menjadi 151 organisasi pada tahun 2015, dengan 58 diantaranya merupakan organisasi olahraga.

Tabel 2.63
Perkembangan Indikator Urusan Kepemudaan Dan Olah Raga
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015

No	Indikator	Satuan	Tahun					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah organisasi pemuda	Organisasi	123	128	133	134	134	151
2	Jumlah organisasi olahraga	Organisasi	1	1	48	48	55	58
3	Jumlah kegiatan kepemudaan	Kegiatan	17	9	17	13	12	14
4	Jumlah kegiatan olahraga	Kegiatan	15	15	20	21	27	23
5	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	Unit	3	3	3	3	3	3
6	Lapangan olahraga	Unit	8	8	8	8	34	34

Sumber : Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sumatera Barat

2.3.1.21. Urusan Statistik

Urusan statistik berkenaan dengan penyediaan data yang diperlukan untuk memperlihatkan perkembangan pembangunan dan kemajuan daerah setiap tahunnya. Selama periode 2010-2015 telah diterbitkan buku Provinsi Dalam Angka dan PDRB Provinsi seperti dilihat pada Tabel 2.64. Selain dari menerbitkan juga telah dilakukan pendistribusian buku-buku yang diterbitkan kepada instansi terkait dan relevan. Dengan

demikian statistik perkembangan pembangunan dan kemajuan Sumatera Barat telah dapat di perbaharui dan disempurnakan serta didistribusikan setiap tahun.

Tabel 2.64
Perkembangan Indikator Urusan Statistik Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2010-2015,

No	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014
1	Buku Provinsi dalam angka"	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Buku "PDRB Provinsi"	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

2.3.1.22. Urusan Kebudayaan

Dengan melihat dari perkembangan periode waktu 2010-2015, penyelenggaraan festival seni dan budaya, benda situs budaya yang dilestarikan selalu mengalami kenaikan dari 3 (tiga) kali festival dengan 8 (delapan) unit sarana penyelenggaraan pada tahun 2010 menjadi 72 kali festival pada tahun 2015. Sedangkan benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan pada tahun 2010 sebanyak 536 buah menjadi 466 buah pada tahun 2015, seperti terlihat pada Tabel 2.65.

Tabel 2.65
Perkembangan Indikator Urusan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2010-2015

No	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	3	14	14	32	37	72
2	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Unit	8	8	8	8	8	8
3	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	82,59	85,82	90,45	90,45	90,45	99,54
		Buah	536	557	587	587	587	646

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat

2.3.1.23. Urusan Perpustakaan

Kinerja urusan perpustakaan selama periode 2010-2015 diperlihatkan pada Tabel 2.66 memberi indikasi perkembangan yang semakin baik. Jumlah pengelola perpustakaan yang dibina di Sumatera Barat meningkat dari 138 orang pada tahun 2010 meningkat menjadi 243 orang pada tahun 2015. Selanjutnya jumlah pengunjung mengalami peningkatan yang luar biasa yaitu dari 6.575 orang tahun 2010 menjadi 64.220 orang pada tahun 2015. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah juga meningkat dari 143.004 eksemplar tahun 2010 menjadi 212.037 eksemplar pada tahun 2015. Perkembangan indikator jumlah pengunjung memberi bukti bahwa minat masyarakat untuk memanfaatkan pustaka daerah semakin besar.

Tabel 2.66
Perkembangan Indikator Urusan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2010-2015

No	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Pengelola perpustakaan yang dibina	Orang	138	145	127	183	213	243
2	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	6.575	31.543	63.186	54.309	54.819	64.220
3	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Eksemplar	143.004	168.146	181.146	191.391	201.791	212.037

Sumber : Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat

2.3.1.24. Urusan Kearsipan

Kinerja urusan kearsipan dapat diukur dari pembinaan tata kelola arsip secara baku, jumlah sumberdaya manusia yang dibina dan jumlah khasanah arsip statis yang bisa diselamatkan. Namun dari tiga indikator tersebut yang paling penting adalah jumlah Perangkat Daerah yang tertib arsip seperti yang diperlihatkan pada Tabel 2.65.

Dari Tabel 2.67 dapat disimpulkan bahwa kinerja urusan kearsipan tidak mengalami peningkatan dan perkembangan yang menggembirakan selama periode 2010-2015, hanya dua Perangkat Daerah (Badan Perpustakaan dan Inspektorat) yang telah tertib arsip. Oleh sebab itu Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kearsipan perlu melakukan berbagai upaya secara intensif agar semua Perangkat Daerah menjadi tertib arsip.

Tabel 2.67
Perkembangan Indikator Urusan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2010-2015

No.	Tahun	Jumlah Perangkat Daerah Tertib Arsip	Nama Perangkat Daerah
1	2010	2	Badan Perpustakaan dan Kearsipan Inspektorat
2	2011	2	Badan Perpustakaan dan Kearsipan Inspektorat
3	2012	2	Badan Perpustakaan dan Kearsipan Inspektorat
4	2013	2	Badan Perpustakaan dan Kearsipan Inspektorat
5	2014	2	Badan Perpustakaan dan Kearsipan Inspektorat
6	2015	2	Badan Perpustakaan dan Kearsipan Inspektorat

Sumber : Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Barat

2.3.2 FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN

2.3.2.1. Urusan Kelautan Dan Perikanan

Tabel 2.68 memperlihatkan perkembangan urusan kelautan dan perikanan dari beberapa indikator selama periode 2010-2015. Persentase produksi perikanan, konsumsi ikan dan cakupan bina kelompok nelayan menunjukkan perkembangan yang meningkat, namun produksi perikanan kelompok nelayan persentasenya mengalami penurunan dari 64,94% tahun 2010 menjadi berkurang 42,82 % tahun 2015. Perkembangan ini memberi indikasi bahwa pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan semakin baik.

Tabel 2.68
Perkembangan Indikator Urusan Kelautan Dan Perikanan
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015

No.	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Capaian Produksi Perikanan	%	106,11	97,12	97,13	92,02	104,74	99,0
2	Produksi Perikanan	Ton	311.971,30	337.012,00	388.511,00	416.911,49	488.062,11	503.739,48
3	Cakupan bina kelompok nelayan	%	0,32	1,52	6,58	5,29	6,16	0,81
4	Cakupan bina perikanan (pembudidayaan, nelayan, pengolah dan pemasaran)	%	0,17	2,33	2,87	4,33	3,49	0,55
5	Produksi perikanan kelompok nelayan	%	64,94	60,90	53,51	51,69	51,24	42,82

No.	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
6	Produksi tuna	Ton	22,00	586,60	1.225,75	1.151,35	1.494,56	936,83
7	Produksi kerapu	Ton	15,00	56,77	96,24	310,04	186,20	218,30

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat

2.3.2.2. Urusan Pariwisata

Perkembangan urusan pariwisata memperlihatkan kinerja semakin baik selama periode 2010-2015. Jumlah kunjungan wisata mancanegara dan kunjungan wisata nusantara mengalami kenaikan dalam kurun waktu 2010-2015 seperti terlihat pada Tabel 2.69.

Tabel 2.69
Perkembangan Indikator Urusan Pariwisata Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2010-2015

No	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Kunjungan wisata mancanegara	Orang	43.830	47.962	50.393	62.023	69.541	78.274
2.	Kunjungan wisata nusantara	Orang	4.575.601	5.106.321	5.850.033	6.261.364	6.605.738	6.973.678

Sumber : Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat

Kunjungan wisatawan mancanegara ke Sumatera Barat melalui jalur Bandar Udara Minangkabau, Pelabuhan Teluk Bayur dan jalur antar provinsi. Jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Sumatera Barat melalui Bandara Internasional Minangkabau (BIM) dan Pelabuhan Teluk Bayur pada bulan Desember 2015 mencapai 5.302 orang, mengalami peningkatan 10,21 persen dibandingkan pada bulan November 2015 yang tercatat sebanyak 4.811 orang. Bila dibandingkan dengan bulan Desember 2014, wisman bulan Desember 2015 mengalami peningkatan sebesar 24,20 persen. Sementara itu jumlah wisman bulan Januari – Desember 2015 mengalami penurunan sebesar 13,11 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dari 56.111 orang tahun 2014 menjadi 48.755 orang tahun 2015, seperti terlihat pada Tabel 2.70.

Wisatawan mancanegara sebagian besar (85,23%) berasal dari Malaysia, kemudian diikuti oleh Australia, Thailand. Berdasarkan data ini kunjungan wisatawan mancanegara belum memperlihatkan cakupan pasar yang luas. Oleh sebab itu potensi untuk memperluas pasar wisatawan mancanegara sangat terbuka.

Tabel 2.70
Wisman Yang Berkunjung ke Sumatera Barat Menurut Kebangsaan
Tahun 2014-2015 (Orang)

NO	KEBANGSAAN	2013	2014	2015	PERUBAHAN (%)
1	Malaysia	43.588	43.588	36.262	-16,81
2	Australia	2.344	2344	1.734	-26,02
3	Tionggok	285	285	346	21,40
4	Inggris	248	248	334	34,68
5	Amerika	338	338	264	-21,89
6	Thailand	144	144	243	68,75
7	Jepang	283	283	214	-24,38
8	Singapura	405	405	203	-49,88
9	Jerman	334	334	167	-50,00
10	Rusia	195	195	43	-77,95
11	Lainnya	7.947	7947	8945	12,56
TOTAL WISMAN		56.111	56.111	48.755	-13,11

Sumber : Berita Resmi Statistik No.08/02/13/Th.XIX, 1 Februari 2016

Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang di Sumatera Barat bulan Desember 2015 mencapai rata-rata 59,73 persen atau sebesar 57,10 persen. Kota Bukittinggi menempati TPK tertinggi sebesar 61,37 persen dan disusul Kota Padang 59,53 persen. TPK terendah terjadi di Kab. Tanah Datar sebesar 12,51 persen. Rata-rata lama menginap tamu asing dan Indonesia pada hotel berbintang bulan Desember 2015 tercatat selama 1,33 hari, turun 0,18 hari bila dibandingkan dengan November 2015 yang tercatat 1,51 hari. Rata-rata lama menginap tamu asing dan Indonesia pada akomodasi lainnya bulan Desember 2015 tercatat selama 2,02 hari, naik 0,37 hari dibandingkan dengan November 2015.

Untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah berupaya membenahi destinasi wisata, kesiapan masyarakat, sarana dan prasarana pendukung dan promosi. Selain itu pemerintah daerah juga mendukung even tahunan pariwisata berskala internasional seperti Tour de Singkarak, Dragon Boat dan memperkenalkan kuliner serta budaya Minagkabau di pentas internasional. Upaya yang dilakukan ini masih tahap awal dan belum maksimal. Oleh sebab itu upaya-upaya yang telah dilakukan perlu lebih diintensifkan untuk masa yang akan datang dalam rangka meningkatkan jumlah kunjungan wisata ke Sumatera Barat.

2.3.2.3. Urusan Pertanian

Kinerja urusan pertanian mengalami peningkatan dan perkembangan kearah yang lebih baik selama periode 2010-2015. Tabel 2.71, memperlihatkan bahwa produktivitas padi sawah mengalami peningkatan dari 48,60 kwt/ha tahun 2010 menjadi 50,58 kwt/ha pada tahun 2015. Selanjutnya produktivitas padi ladang mengalami peningkatan dari 22,25 kwt/ha tahun 2010 menjadi 30,80 kwt/ha pada tahun 2015. Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB dan Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB terus meningkat dalam kurun waktu lima tahun, hal ini mengindikasikan bahwa pelayanan dalam urusan pertanian semakin meningkat.

Tabel 2.71
Perkembangan Indikator Urusan Pilihan Pertanian Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2010-2015

No	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	%	-	-	-	-	-	
	- Padi Sawah	Kwt/Ha	48,60	49,84	50,04	50,17	50,58	50,58
	- Padi Ladang	Kwt/Ha	22,25	26,87	32,28	30,69	28,19	30,80
2	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	%	11,70	11,44	10,99	10,67	11,09	11,09
3	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	%	7,33	7,20	7,33	7,22	7,57	7,57
4	Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB	%	7,22	7,23	7,03	7,22	7,57	7,57

Sumber : Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Barat dan BPS Provinsi Sumatera Barat

2.3.2.4. Urusan Kehutanan

Indikator Rehabilitasi hutan dan lahan kritis, dalam skala luas dari tahun 2010-2015, mengalami fluktuasi setiap tahunnya pada setiap indikator, seperti terlihat pada Tabel 2.72.

Tabel 2.72
Perkembangan Indikator Urusan Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2010-2015

No.	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	%/tahun	2,00	2,97	5,12	4,96	5,81	2,58
		%	2,00	4,97	10,09	15,04	20,86	23,44
2	Luas lahan hutan dan lahan kritis yang rehabilitasi	Ha	7.449	11.050	19.058	18.456	21.641	9.616
3	Kerusakan Kawasan Hutan	%	15,70	11,26	0,45	0,41	0,40	0,40
4	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	%	1,54	1,48	1,44	1,41	1,41	1,56

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

2.3.2.5 Urusan Energi Dan Sumber Daya Mineral

Dalam urusan pilihan energi dan sumberdaya mineral seperti terlihat dari dua indikator pada Tabel 2.73, bahwa Pertambangan tanpa izin persentasenya semakin berkurang dari tahun yakni 5,00% tahun 2015 menurun dibandingkan tahun 2010 sebesar 7,15%, dan Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB semakin meningkat, hal ini menindikasikan bahwa, usaha pertambangan yang ilegal dapat ditekan, berikut kontribusi sektor pertambangan semakin meningkat dalam pendapatan daerah.

Tabel 2.73
Perkembangan Indikator Urusan Pilihan Energi Dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015

No.	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Pertambangan tanpa ijin	%	7,15	7,15	7,09	6,98	5,47	5,00
		Ha	-	1.650	1.533	1.426	1.348	1.281
2	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	%	4,55	4,46	4,44	4,60	4,88	4,96

Sumber : Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat

2.3.2.6. Urusan Perdagangan

Perkembangan urusan pilihan perdagangan memperlihatkan angka yang menurun dari tahun 2010-2015, seperti terlihat dari indikator Tabel 2.74, kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB persentasenya tahun 2010 sebesar 15,14% menurun menjadi 14,68% tahun 2015, dan indikator Ekspor bersih perdagangan dari US\$ 1.463 juta tahun 2010 berkurang menjadi US\$ 1.142 juta tahun 2014, hal ini mengindikasikan penurunan pendapatan daerah dan berkurangnya ekspor sektor perdagangan selama kurun waktu lima tahun terakhir.

Tabel 2.74
Perkembangan Indikator Urusan Pilihan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2010-2015.

No.	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	15,14	15,05	15,11	14,77	14,40	14,68
2	Ekspor Bersih Perdagangan	US\$ Juta	1.463,40	1.955,08	1.120,70	1.174,00	1.071,00	1.117,00

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat

2.3.2.7. Urusan Perindustrian

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB menunjukkan peranan yang berkurang pada pendapatan daerah selama periode 2010-2015 yakni 11,69% pada tahun 2010 menjadi berkurang 10,25% tahun 2015, sebaliknya indikator Laju pertumbuhan industri dalam kurun waktu yang sama semakin meningkat dari 2,18% tahun 2010 meningkat

menjadi 5,40% tahun 2014, hal ini mengindikasikan bahwa laju pertumbuhan industri masih kurang dibandingkan laju pertumbuhan sektor pendapatan daerah lainnya, seperti terlihat pada Tabel 2.75.

Tabel 2.75
Perkembangan Indikator Urusan Pilihan Perindustrian Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015

No.	Indikator	Satuan	Tahun					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Kontribusi kategori Industri terhadap PDRB	%	11,69	11,71	11,53	11,02	10,57	10,25
2	Laju Pertumbuhan Industri	%	2,18	4,74	6,46	5,1	5,22	1,84

Sumber : Aspek Fokus Sumatera Barat

2.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH

Daya Saing Daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dan tetap terbuka pada persaingan dengan Provinsi dan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, nasional dan internasional, sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah, Aspek daya saing daerah ini dilihat dari segi kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik bagi pelaku ekonomi yang telah berada dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan *multiplier effect* bagi peningkatan daya saing daerah, Kapasitas ekonomi daerah dapat dilihat dari pengeluaran per kapita atau konsumsi rata-rata perkapita (pangan dan non pangan), dan produktivitas total daerah.

Pada tahun 2015, rata-rata pengeluaran per kapita Sumatera Barat sebesar Rp. 894.703,00 mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan tahun 2010 yang sebesar Rp. 531.873,59. Kenaikan tersebut karena terjadi kenaikan baik dari pengeluaran komoditas makanan maupun non makanan. Rata-rata pengeluaran per kapita Sumatera Barat sebahagian besar masih didominasi oleh kelompok komoditas makanan, yaitu sebesar 52,80%. Rata-rata pengeluaran per kapita menurut kelompok komoditas di Sumatera Barat Tahun 2010-2015 seperti pada Tabel 2.76.

Tabel 2.76.
Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan menurut Kelompok Komoditas di Sumatera Barat Tahun 2010-2015

Kelompok Komoditas	Tahun											
	2010		2011		2012		2013		2014		2015	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Makanan	302.475,37	56,87	348.234,14	56,77	455.098,09	56,85	434.291,57	56,52	455.098,09	56,85	472.428,00	52,80
Bukan Makanan	229.398,22	43,13	265.200,41	43,23	345.417,72	43,15	334.154,48	43,48	345.417,72	43,15	422.275,00	47,20
Jumlah	531.873,59	100,00	613.434,55	100,00	800.515,81	100,00	768.446,05	100,00	800.515,81	100,00	894.703,00	100,00

Dari Tabel 2.75 terlihat bahwa selama kurun waktu 2010 – 2015 persentase pengeluaran yang dialokasikan untuk makanan makin menurun menjadi sekitar 52% dan non makanan meningkat menjadi sekitar 47%. Hal ini menunjukkan kecenderungan peningkatan untuk pengeluaran non makanan yang mengindikasikan terjadinya peningkatan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat. Kalau dilihat menurut daerah

kota dan desa maka terlihat bahwa persentase pengeluaran untuk makanan masih tinggi komposisinya di daerah pedesaan yakni masih sekitar 58,40%.

Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan menurut kelompok bukan makanan selama tahun 2010-2015 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kelompok perumahan dan fasilitas rumah tangga mendominasi pengeluaran kelompok bukan makanan yaitu sebesar 21,78%, diikuti oleh kelompok barang dan jasa sebesar 11,83%, sedangkan pengeluaran kelompok non makanan terendah terdapat terletak pada kelompok keperluan pesta dan upacara kenduri sebesar 1,77%, diikuti kelompok pajak, pungutan dan asuransi sebesar 1,80%.

Bila digolongkan berdasarkan golongan pengeluaran per kapita, maka sebagian besar penduduk Sumatera Barat mempunyai pengeluaran 300.000 – 499.999 rupiah, yaitu sebanyak 27,68%, disusul kemudian persentase penduduk dengan golongan pengeluaran dalam rentang Rp. 500.000 – 699.999 yakni sebanyak 27,17%, Selanjutnya ada sebanyak 21,27% penduduk Sumatera Barat yang memiliki pengeluaran perkapita > Rp. 1.000.000, Golongan pengeluaran perkapita sebesar Rp. 700.000 – Rp. 999.999,- sebanyak 20,54% dan golongan pengeluaran Rp. 200.000 – Rp. 299.999,- dan Rp. 150.000 – Rp. 199.999 masing-masing sebanyak 3,15% dan 0,17%, Sementara itu, persentase penduduk dengan golongan pengeluaran perkapita per bulan kurang dari Rp. 150.000,- tercatat sebanyak 0,02 %.

Di samping pengeluaran per kapita, ukuran lain yang dapat digunakan adalah Produktivitas total daerah, yang dihitung untuk mengetahui tingkat produktivitas tiap sektor per angkatan kerja yang menunjukkan seberapa produktif tiap angkatan kerja dalam mendorong ekonomi daerah per sektor, dengan menghitung produktivitas daerah per sektor yang merupakan jumlah PDRB dari setiap sektor dibagi dengan jumlah angkatan kerja dalam sektor yang bersangkutan. Produktifitas total daerah per kabupaten/kota se Sumatera Barat terlihat pada Tabel 2.77.

Tabel 2.77.
Produktifitas Total Daerah Per Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat

No	Kab/Kota	2010	2011	2012	2013*	2014**	2015***)
	Kabupaten :						
1	Kep. Mentawai	52,29	58,72	63,38	67,01	76,10	76,10
2	Pesisir Selatan	36,53	40,47	44,37	52,25	53,67	53,67
3	Solok	37,92	46,78	52,02	59,68	61,29	61,29
4	Sijunjung	48,84	54,26	57,46	64,52	67,99	67,99
5	Tanah Datar	38,76	42,41	45,39	47,54	55,66	55,66
6	Padang Pariaman	50,87	58,77	64,37	75,22	83,92	83,92
7	Agam	44,03	45,18	50,84	63,19	65,66	65,66
8	Lima Puluh Kota	39,53	44,83	48,13	53,67	61,52	61,52
9	Pasaman	36,22	37,85	38,45	41,91	44,74	44,74
10	Solok Selatan	38,30	46,82	51,74	55,60	58,24	58,24
11	Dharmasraya	51,63	55,70	58,76	65,32	68,95	68,95
12	Pasaman Barat	43,17	53,06	58,87	66,91	71,60	71,60
	Kota :						
13	Padang	80,77	90,42	103,23	109,82	115,58	115,58
14	Solok	69,81	75,43	82,64	91,83	100,79	100,79
15	Sawahlunto	61,67	68,38	72,29	84,71	95,62	95,62
16	Padang Panjang	70,65	85,78	89,67	95,95	111,54	111,54
17	Bukittinggi	74,22	76,98	83,71	96,87	101,48	101,48
18	Payakumbuh	46,98	52,76	60,13	67,09	70,33	70,33
19	Pariaman	66,50	84,68	88,69	89,45	99,54	99,54
	SUMATERA BARAT	50,33	56,63	61,81	69,35	74,84	74,84

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Nilai Tukar Petani (NTP)

Kinerja sektor pertanian tercermin pada capaian indikator pertanian diantaranya adalah Nilai Tukar Petani (NTP) dan produktivitas tanaman pertanian. NTP merupakan perbandingan antara nilai yang diterima dengan nilai yang dibayarkan oleh petani dalam melaksanakan usaha taninya. Mencermati komponen perhitungan NTP yaitu indeks yang diterima (IT) dan indeks yang harus dibayar (IB), tampak bahwa terdapat faktor-faktor harga maupun biaya yang berada di luar jangkauan petani untuk mengendalikannya, NTP mencerminkan efisiensi usaha tani dan daya beli petani, seperti terlihat pada Tabel 2.78.

Tabel 2.78
Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 – 2015

	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Indeks yang diterima petani (It)	132,98	141,05	144,54	150,29	112,54	117,66
2.	Indeks yang dibayar petani (Ib)	126,07	132,75	137,63	144,23	111,87	120,36
3.	NTP	105,48	106,25	105,03	104,21	100,61	97,75

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Data perkembangan NTP selama tahun 2010 – 2015 cukup fluktuatif, dan cenderung turun hingga menjadi 97,75 pada tahun 2015, dengan Indeks yang diterima petani sebesar 117,66 dan indeks yang dibayar petani sebesar 120,36. Sub sektor perikanan merupakan subsektor yang memiliki NTP tertinggi (105,73) disusul NTP sub sektor peternakan (101,87). Fluktuatifnya NTP ini menggambarkan bahwa derajat kesejahteraan petani yang belum baik yang terlihat dari masih rendahnya daya beli petani dipicu oleh faktor produktivitas yang belum stabil atau cenderung menurun, serta permintaan yang masih rendah.

Hal ini menunjukkan secara umum, bahwa besar mata pencaharian penduduk masih berada sektor pertanian, namun belum merupakan pilihan mata pencarian yang menguntungkan bagi masyarakat Sumatera Barat, sehingga perlu penajaman peran subsistem agribisnis hilir (pasca panen, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian) yang mampu memberikan nilai tambah sangat signifikan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani.

Pada Tabel 2.79, terlihat bahwa pada tahun 2015, indeks yang diterima petani lebih besar dari indeks yang dibayar petani hanya pada sub sektor perikanan dan peternakan, sementara untuk sub sektor lainnya lebih tinggi yang dibayarkan daripada yang diterima.

Tabel 2.79
Nilai Tukar Petani dan sub sektor pendukungnya di Sumatera Barat Tahun 2011-2015

NTP Sektor/Sub Sektor	2011	2012	2013	2014	2015
Nilai Tukar Petani (NTP)	106,25	105,03	104,21	100,61	97,75
NTP Tanaman Pangan	97,82	95,29	93,07	100,11	98,30
NTP Hortikultura	105,84	104,87	102,47	96,24	93,66
NTP Tanaman Perkebunan Rakyat	129,02	130,06	132,63	102,87	96,07
NTP Peternakan	100,39	100,29	97,94	101,00	101,87
NTP Perikanan	110,75	110,38	113,32	104,49	105,73

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Kondisi panjang jalan berdasarkan status pembinaannya (jalan nasional dan provinsi) tahun 2015 di Provinsi Sumatera Barat mencapai 2.679,34 km, yang terdiri dari jalan Nasional sepanjang 1.448,81 km, jalan Provinsi sepanjang 1.230,53 km. Untuk kondisi kualitas jalan menurut kriteria IRI (*International Roughness Index*), Kementerian PU), Jalan Status Nasional kualitas mantap pada tahun 2015 mencapai 1.166,29 km atau 80,5 persen, tidak mantap 282,52 km atau 19,5 persen. Kondisi kemantapan jalan pada jalan Nasional terjadi penurunan dari 96,00% untuk tahun 2014 menjadi 80,50 untuk tahun 2015. Penurunan tersebut disebabkan karena adanya penambahan jalan baru dan peralihan status kewenangan jalan. Kemudian untuk jalan provinsi, kualitas mantap mencapai 1.121,38 Km atau 91,13 %, tidak mantap sepanjang 109,15 km atau 8.87%. Kondisi kemantapan jalan terjadi peningkatan 2,9% dari tahun 2014 ke tahun 2015, dimana kondisi kemantapan jalan sebesar 88,20 untuk tahun 2014 dan tahun 2015, kondisi kemantapan jalan menjadi 91,13%.

Jika dilihat Tabel 2.80 menunjukkan bahwa kondisi kemantapan jalan secara umum di Sumatera Barat dalam kondisi baik, namun untuk lebih meningkatkan daya saing daerah perlu melakukan percepatan perbaikan kondisi kemantapan jalan di Sumatera Barat, sehingga biaya perjalanan menjadi lebih efisien.

Tabel 2.80
Panjang Jalan dan Kemantapan Jalan di Sumatera Barat
menurut statusnya Tahun 2010-2015

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Panjang Jalan (Km)						
1	Negara	1.212,89	1.212,89	1.212,89	1.212,89	1.212,89	1.448,81
2	Provinsi	1.230,53	1.230,53	1.230,53	1.230,53	1.230,53	1.230,53
	Kemantapan Jalan (%)						
1	Jalan Nasional	80,00	89,00	89,00	92,00	96,00	80,50
2	Jalan Provinsi	80,00	83,00	88,09	87,87	88,20	91,13

Sumber : Dinas Prasjaltarkim Provinsi Sumatera Barat

Rasio Elektrifikasi

Rasio elektrifikasi adalah jumlah total rumah tangga yang berlistrik dibagi dengan total rumah tangga yang ada di Sumatera Barat. Trend Rasio Elektrifikasi di Provinsi Sumatera Barat tahun 2010 – 2015 menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, dengan rentang peningkatan hingga 6%. Rasio elektrifikasi Sumatera Barat Tahun 2015 adalah 83,38% masih di bawah target Nasional yaitu sebesar 85,15%. Rasio elektrifikasi dari tahun ke tahun di Sumatera Barat adalah 69,50% pada tahun 2010, 71,60% pada tahun 2011, 73,48% pada tahun 2012, dan 77,69%, 83,16%, 83,38% pada tahun 2013, 2014 dan 2015.

2.4.3. IKLIM BERINVESTASI

Angka kriminalitas

Penurunan angka kriminalitas terus diupayakan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban. Jumlah peristiwa kejahatan yang dilaporkan menurut jenis kejahatan di Sumatera Barat selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.81.

Tabel 2.81
Jumlah Peristiwa Kejahatan yang Dilaporkan Menurut Jenis Kejahatan di Sumatera Barat, 2010-2015

No	Kasus	2010	2011	2012	2013	2014	2015*)
1	Kejahatan terhadap Ketertiban Umum	145	223	232	331	362	298
2	Kebakaran/Pembakaran	131	176	206	184	184	146
3	Perkosaan/melanggar kesopanan	303	353	346	329	356	59
4	Perjudian	283	253	208	208	195	216
5	Merusak	692	762	741	673	747	668
6	Pembunuhan	29	22	16	27	11	18
7	Penganiayaan	3,308	3,478	1,736	3,140	3,117	3.024
8	Penculikan	3	8	0	4	4	3
9	Pemerasan	307	344	268	299	389	401
10	Penggelapan	837	853	1,035	1,061	1,127	1.174
11	Penipuan	843	1,000	1,078	1,140	1,208	1.324
12	Penadahan	0	0	5	12	2	7
	Jumlah	6,881	7,472	5,871	7,408	7,702	7.338

Sumber: SBDA, BPS Provinsi Sumatera Barat

Jumlah tindak kejahatan menurut jenis kejahatan meningkat cukup fluktuatif, dari tahun 2010 meningkat 6,881 pada tahun 2011, turun menjadi 5,871 pada tahun 2012, dan meningkat lagi pada tahun 2013 dan 2014, yang masing-masing menjadi 7,408 dan 7,702 kasus dan pada tahun 2015 menjadi 7.338 kasus. Jenis kejahatan yang terbanyak terjadi di Sumatera Barat setiap tahunnya adalah kasus penganiayaan lebih dari 29 persen pada tahun 2012, dan lebih dari 40 persen pada tahun 2010, 2011, 2013 dan tahun 2014. Kasus penipuan merupakan kasus kedua terbanyak di Sumatera Barat, selanjutnya diikuti oleh kasus penggelapan. Sementara kasus yang paling sedikit terjadinya di Provinsi Sumatera Barat adalah kasus penadahan dan kasus penculikan, selanjutnya diikuti oleh kasus pembunuhan

Untuk menurunkan angka kriminalitas, selain upaya kerja keras aparat keamanan juga dibutuhkan peran serta dari masyarakat. Jumlah kasus yang terus mengalami kenaikan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah kasus kejahatan terhadap ketertiban umum, kasus penggelapan dan penipuan. Dalam rangka penurunan jumlah kasus tersebut membutuhkan peran serta aktif dari masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan.

Jumlah Demonstrasi

Demonstrasi atau unjuk rasa merupakan suatu peristiwa biasa yang merupakan sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau menentang kebijakan yang dilaksanakan oleh pihak lain. Aksi demonstrasi yang terjadi umumnya dilakukan oleh mahasiswa yang menentang kebijakan pemerintah atau oleh buruh yang tidak puas dengan perlakuan majikannya. Demonstrasi baru akan merugikan banyak pihak apabila dilakukan secara anarkis dan berlebihan bahkan kerugian yang ditimbulkan dapat merugikan masyarakat secara luas.

Berbagai aksi unjuk rasa yang selama ini terjadi di Sumatera Barat relatif dapat berjalan dengan tertib sehingga tidak sampai menimbulkan berbagai kerugian sebagaimana terjadi pada berbagai peristiwa demonstrasi yang terjadi di kota-kota besar di Indonesia. Jumlah unjuk rasa yang terjadi di Sumatera Barat dari kurun waktu 2010–2015 cukup fluktuatif, dimana pada tahun 2010 sebanyak 80 kali demonstrasi, naik pada

tahun 2012 sebesar 109 kali demonstrasi, dan menjadi 200 kali demonstrasi pada tahun 2014, namun pada tahun 2015 hanya terjadi 7 kali di Sumatera Barat.

Lama Perijinan

Prosedur perijinan yang kompleks, lama, dan relatif mahal menjadi salah satu kendala bagi tumbuhnya iklim investasi. Menyadari kondisi yang demikian berbagai upaya telah dilakukan supaya proses perijinan dapat ditempuh dengan prosedur yang lebih sederhana, dengan waktu yang terukur dan murah. Lamanya proses perizinan dapat terlihat pada Tabel 2.80. Sejak tahun 2014 sudah terdapat Perda yang mendukung iklim usaha pada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yaitu : Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014, melalui perubahan nomenklatur dan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi menjadi Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi. Selain prosedur perijinan yang mudah, ketersediaan informasi yang memadai mengenai peluang investasi juga dibutuhkan calon investor dalam merencanakan investasi sesuai dengan peluang yang ada sudah dipermudah dengan adanya Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Administrasi Pemerintah.

Tabel 2.82
Lamanya Proses Perizinan Pada BKPM dan PPT Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2012 – 2015

No	Uraian	Satuan	2012	2013	2014	2015
1	Izin Pendaftaran Penanaman Modal	Hari	3	3	3	3
2	Izin Prinsip Penanaman Modal	Hari	3	3	3	3
3	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal	Hari	3	3	3	3
4	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal	Hari	7	7	7	7
5	Izin Penggabungan Penanaman Modal	Hari	7	7	7	7
6	Izin Usaha Penanaman Modal	Hari	7	7	7	7
7	Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal	Hari	7	7	7	7
8	Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal	Hari	7	7	7	7
9	Izin Usaha Penggabungan (Merger) Penanaman Modal	Hari	7	7	7	7

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Prov.Sumbar

Iklim berinvestasi juga dapat diukur dari jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah. Selama lima tahun terakhir, Pajak Daerah yang menjadi kontributor Pendapatan Asli Daerah Sumatera Barat adalah : Pajak Kendaraan Bermotor; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Pajak Air Permukaan; dan Pajak Rokok. Pajak Daerah dari tahun 2010 – 2015 selalu menunjukkan trend positif, yaitu meningkat dari Rp. 768,72 milyar menjadi Rp, 1,45 triliun pada tahun 2015. Jika diperhatikan nilai pajak yang turun pada tahun 2015 adalah pajak bea balik kendaraan bermotor yang turun sekitar Rp. 35,17 milyar.

Obyek retribusi terdiri atas: Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan, Retribusi Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Tera Ulang, Pemakaian Kekayaan Daerah. Retribusi Tempat Penginapan, sejak tahun 2015 tidak dilakukan pemungutan lagi, digantikan oleh Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dan Retribusi Izin Trayek. Pendapatan yang diperoleh dari retribusi cukup fluktuatif, pada tahun 2010 naik dari Rp, 28,36 milyar menjadi Rp, 41,70 milyar pada tahun 2011, namun pada tahun 2012 turun menjadi Rp, 38,05 milyar pada tahun 2012, dan menjadi Rp, 15,53 milyar pada tahun 2014, meningkat menjadi Rp, 19,51 milyar pada tahun 2015.

Kontribusi retribusi pelayanan kesehatan pada tahun 2010 yang mencapai 85 persen, menjadi 55,17 persen pada tahun 2015, menyebabkan penurunan penerimaan nominal retribusi pendapatan Provinsi Sumatera Barat secara umum. Kontribusi retribusi yang mengalami peningkatan antara lain adalah retribusi pemakaian kekayaan daerah

dari 6,66 persen pada tahun 2010 menjadi 22,09 persen pada tahun 2015. Retribusi penjualan produksi usaha daerah kontribusinya juga mengalami peningkatan pada tahun 2014 menjadi 15,22 persen, namun turun menjadi 6,65 persen pada tahun 2015. Demikian halnya dengan penggantian retribusi penginapan menjadi retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, menaikkan kontribusinya dari sekitar 0,80 persen menjadi 6,59 persen.

Kualitas Tenaga Kerja

Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan pendidikan sarjana (S1, S2, dan S3).

Rasio lulusan sarjana yang bekerja selama periode 2010 – 2013 mengalami peningkatan, namun pada tahun 2014 terjadi penurunan dari 8,47 pada tahun 2013 menjadi 8,40 pada tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa ada peningkatan kualitas tenaga kerja di Sumatera Barat dilihat dari lulusan sarjana yang bekerja mengalami peningkatan, seperti terlihat pada Tabel 2.82.

Tabel 2.83
Rasio Lulusan Sarjana Tenaga Kerja di Sumatera Barat Tahun 2010-2015

No,	Uraian	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015*)
1	Lulusan Sarjana	Jiwa	109.667	117.064	151.331	169.326	182.110	182.110
2	Jumlah Penduduk	Jiwa	4.865.331	4.933.112	5.009.184	5.066.476	5.131.882	5.196.300
3	Rasio Lulusan Sarjana		225	237	302	334	355	355

Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. Sumbar

Tingkat Ketergantungan/Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan (*Dependency Ratio*) merupakan rasio yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk yang belum dan tidak produktif (umur di bawah 15 tahun dan 65 tahun keatas) dengan banyaknya penduduk yang termasuk produktif secara ekonomi (15 - 64 tahun). Rasio ketergantungan penduduk Sumatera Barat tahun 2015 sebesar 56,31 yang berarti setiap 100 penduduk produktif menanggung sekitar 56 orang yang tidak produktif. Angka tersebut lebih rendah apabila dibandingkan dengan rasio tahun 2010 yang sebesar 57,74, Semakin tinggi rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif (15 - 64 tahun) untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif (0 - 14 tahun) dan yang sudah tidak produktif (65 tahun lebih). Rasio ketergantungan penduduk terlihat pada Tabel 2.84.

Tabel 2.84
Rasio Ketergantungan Penduduk Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 – 2015

No	Uraian	satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015*)
1	Penduduk Usia < 15 th + usia > 64 th	Orang	1.780.922	1.796.801	1.811.105	1.825.213	1.840.318	1.871.950
2	Penduduk usia 15 – 64 th	Orang	3.084.409	3.136.311	3.189.079	3.241.263	3.291.564	3.324.339
3	Rasio ketergantungan		57,74	57,29	56,79	56,31	55,91	56,31

Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. Sumbar

Angka Rasio Ketergantungan di Provinsi Sumatera Barat selama periode 2010 – 2015 mengalami penurunan, hal ini menunjukkan bahwa jumlah usia produktif setiap tahunnya mengalami penurunan, yang disebabkan oleh banyaknya usia produktif di Provinsi Sumatera Barat yang kuliah dan langsung bekerja di luar Provinsi Sumatera Barat, sehingga angka ketergantungan menjadi semakin kecil.

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

3.1. KINERJA KEUANGAN DAERAH TAHUN 2010-2015

Keuangan Daerah merupakan komponen penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyatu dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pada dasarnya APBD terdiri dari komponen pendapatan dan komponen belanja, serta pembiayaan. Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang sah. Belanja Daerah terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Pembiayaan meliputi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Selanjutnya kinerja keuangan daerah dapat ditunjukkan dari pelaksanaan APBD setiap tahunnya dan neraca keuangan daerah. Komponen APBD yang perlu mendapat perhatian untuk menentukan kinerja keuangan daerah adalah pendapatan daerah, belanja dan pembiayaan daerah. Sedangkan neraca daerah memperlihatkan perkembangan kondisi aset pemerintah daerah, kondisi kewajiban pemerintah daerah dan kondisi ekuitas dana tersedia. Kinerja pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2010-2015, dijelaskan sebagai berikut.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

A. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat selama periode Tahun 2010-2015 mengalami pertumbuhan rata-rata yang cukup baik yaitu sebesar 16,43% per tahun seperti yang diperlihatkan pada Tabel 3.1. Pertumbuhan pendapatan daerah lebih banyak bersumber dari pendapatan asli daerah yang mengalami peningkatan dari Rp 1.006.821 juta pada tahun 2010 menjadi Rp 1.876.733 juta pada tahun 2015. Hal ini disebabkan karena terhitung tahun 2014 terdapat penambahan sumber pendapatan yang berasal dari pajak rokok. Dengan demikian Pendapatan Asli Daerah mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 13,65 % selama periode 2010-2015.

Selanjutnya sumber utama pendapatan asli daerah lebih banyak berasal dari pajak daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Penerimaan pajak ini sangat tergantung dari pertumbuhan ekonomi yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Akibatnya, pendapatan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berfluktuasi selama periode 2010-2015 sesuai dengan perkembangan ekonomi.

Sumber pajak lainnya adalah pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok. Walaupun pendapatan dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun belum berkontribusi besar terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Ketiga jenis pajak ini, realisasi penerimaannya cenderung tidak stabil dan sangat fluktuatif, karena ditentukan dari banyaknya konsumsi dan harga yang selalu berubah mengikuti harga pasar. Misalnya untuk pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pembagiannya yaitu berdasarkan dari harga bahan bakar dan banyaknya konsumsi bahan bakar dari suatu wilayah.

Sumber Pendapatan Asli Daerah lainnya adalah retribusi daerah. Pendapatan dari retribusi daerah mengalami pertumbuhan yang berfluktuatif, namun masih mengalami pertumbuhan rata-rata pertahunnya sebesar 1,15 % selama periode 2010-2015.

Rendahnya pertumbuhan retribusi ini disebabkan karena komponen retribusi pelayanan kesehatan khususnya yang berasal dari penerimaan retribusi rumah sakit daerah yang dialihkan dari pos penerimaan retribusi daerah menjadi pos penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah, karena 3 (tiga) rumah sakit daerah secara bertahap telah ditetapkan statusnya menjadi BLUD terhitung sejak tahun 2011 – 2014 yaitu : RSJ HB Saanin, RSUD Pariaman dan RSUD Solok menyusul RSUD Achmad Moechtar Bukittinggi yang telah lebih dahulu ditetapkan menjadi Rumah Sakit BLUD pada tahun 2009.

Tabel 3.1
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010- 2015
(Dalam Rp juta)

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-Rata (%)
A	Pendapatan Asli Daerah	1.006.821	1.224.414	1.225.466	1.366.178	1.729.222	1.876.733	13,65
1	Pajak daerah	768.724	983.602	994.570	1.085.164	1.354.541	1.445.611	13,94
2	Retribusi daerah	28.265	41.698	38.054	34.596	15.531	20.373	1,15
3	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	46.814	80.453	80.348	93.871	94.207	85.124	15,85
4	Lain-Lain PAD yang sah	163.018	118.660	112.492	152.546	264.942	325.623	19,95
B	Dana Perimbangan	785.575	931.882	1.143.895	1.240.880	1.333.059	1.390.876	12,32
1	Dana bagi hasil pajak	106.166	117.528	183.066	131.405	132.679	94.446	2,08
2	Dana bagi hasil sumber daya alam	2.590	8.940	9.768	5.611	16.386	12.571	76,12
3	Dana alokasi umum	662.403	764.681	918.560	1.039.922	1.129.886	1.221.129	13,10
4	Dana alokasi khusus	14.415	40.733	32.500	63.942	54.108	62.731	51,93
C	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	128.575	27.661	553.220	540.782	573.556	784.640	372,42
1	Hibah	80.464	9.011	552.485	8.928	11.609	31.046	1.209,3
2	Dana darurat	0	0	0	0	0	0	0
3	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	48.111	18.650	735.000	531.855	561.947	753.037	14,43
	PENDAPATAN	1.920.971	2.183.958	2.922.582	3.147.840	3.635.838	4.052.249	16,43

Sumber : DPKD Provinsi Sumatera Barat

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari kontribusi BUMD Provinsi Sumatera Barat masih relatif kecil seperti yang diperlihatkan penerimaan yang berasal dari Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan. Pendapatan kategori ini hanya mengalami kenaikan dari Rp. 46,8 milyar pada tahun 2010 menjadi Rp. 85,1 milyar pada tahun 2015. Meskipun mengalami kenaikan hampir 2 kali lipat selama periode Tahun 2010-2015, kontribusi pendapatan hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan masih kurang dari 5% dari total PAD setiap tahunnya. Kontribusi PAD yang berasal dari BUMD ini masih didominasi oleh Bank Nagari dan PT. Askrida, sementara BUMD lain belum memberi kontribusi yang berarti. Oleh sebab itu BUMD lainnya harus meningkatkan kinerjanya agar memberi kontribusi terhadap peningkatan PAD Provinsi Sumatera Barat.

Selanjutnya pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan mengalami pertumbuhan sebesar 12,32% pertahun selama periode Tahun 2010–2015. Kontribusi terbesar dari Dana Perimbangan adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang setiap tahunnya mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya transfer dana kedaerah melalui APBN dalam rangka memperkuat otonomi daerah. Pertumbuhan rata-rata DAU adalah sebesar 13,10% per tahun selama periode Tahun 2010-2015. Sedangkan komponen lainnya dari Dana Perimbangan yang terdiri dari dana bagi hasil pajak/bukan pajak kontribusinya masih kecil terhadap pendapatan daerah.

Sumber pendapatan daerah yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) ditentukan dari formula dan bidang atau urusan pusat yang dilaksanakan oleh daerah. Akibatnya, penerimaan DAK juga berfluktuasi selama periode 2010-2015 dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 51,93 % per tahun. Pertumbuhan terbesar DAK terjadi pada tahun 2015, karena sebagian belanja dekonsentrasi dialihkan dalam bentuk penerimaan DAK dan belanjanya dianggarkan dalam APBD sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga terkait.

Struktur pendapatan daerah mengalami perubahan selama periode 2010-2015. Peranan Pendapatan Asli Daerah turun dari 52,41 % pada tahun 2010 menjadi 46,31 % pada tahun 2015. Kontribusi Dana Perimbangan juga mengalami penurunan dari 40,89 % menjadi 34,32 % pada tahun 2015. Sebaliknya peranan Lain-lain Pendapatan yang Sah mengalami kenaikan dari 6,69 % pada tahun 2010 menjadi 19,36 % pada tahun 2015. Komponen terbesar dari kelompok pendapatan ini adalah dana penyesuaian dan otonomi khusus yang mengalami peningkatan dari Rp 48.111 juta pada tahun 2010 menjadi Rp 753.037 juta pada tahun 2015 dan komponen dana penyesuaian dan otonomi khusus diterima daerah terhitung tahun 2012.

Meskipun terjadi kenaikan pendapatan daerah dari berbagai sumber selama periode Tahun 2010-2015 diperkirakan tidak akan mencukupi untuk menutup kebutuhan belanja dengan adanya tambahan kewenangan pemerintah Provinsi Sumatera Barat seperti urusan pendidikan, kehutanan, perikanan, pertambangan dan lainnya. Pembiayaan penambahan kewenangan pemerintah provinsi tidak dapat diandalkan dari pendapatan asli daerah. Oleh sebab itu alokasi pembiayaan DAU, DAK atau dalam bentuk lainnya perlu ditingkatkan untuk membiayai pelimpahan urusan dimaksud.

B. Belanja Daerah

Menurut Pasal 31 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sementara belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Perkembangan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat selama periode Tahun 2010-2015 seperti yang diperlihatkan pada Tabel 3.2. Belanja Daerah mengalami peningkatan dari Rp 2.239.753 juta pada tahun 2010 menjadi Rp 4.022.264 juta pada tahun 2015 atau mengalami pertumbuhan sebesar 13,31 % pertahun. Kenaikan belanja ini lebih rendah dari kenaikan pendapatan daerah pada periode yang samasebesar 16,43 %. Keadaan ini mencerminkan terjadinya SILPA setiap tahunnya.

Struktur Belanja Daerah selama periode 2010-2015 masih didominasi oleh Belanja Tidak Langsung. Peranan Belanja Tidak Langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja hibah dan belanja bantuan sosial mengalami peningkatan dari 46,06 % pada tahun 2010 menjadi 58,66 % pada tahun 2015. Komponen yang terbesar dari Belanja Tidak Langsung yang mengalami peningkatan yang besar adalah Belanja Hibah, yaitu dari Rp 56.700 juta pada tahun 2010 menjadi Rp 894.816 juta pada tahun 2015. Penggunaan Dana Hibah ini tidak dapat dijelaskan lebih jauh karena sudah menjadi kewenangan kabupaten/kota.

Sebaliknya peranan Belanja Langsung mengalami penurunan dari 53,93 % pada tahun 2010 menjadi 41,34 % pada tahun 2015. Komponen terbesar untuk Belanja Langsung ini adalah untuk Belanja Modal yang mengalami peningkatan dari Rp 583.067 juta pada tahun 2010 menjadi Rp 788.150 juta pada tahun 2015. Belanja Modal secara nominal memperlihatkan peningkatan, tetapi peranannya dari total belanja mengalami penurunan dari 26,03 % pada tahun 2010 menjadi 19,59 % pada tahun 2015.

Tabel 3.2
Proporsi Realisasi Belanja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015
(Dalam Rp juta)

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-Rata (%)
A	Belanja Tidak Langsung	1.031.744	1.087.714	1.594.694	1.668.155	1.831.873	2.359.421	19,05
1	Belanja Pegawai	452.838	490.300	524.517	562.989	598.043	672.707	8,26
2	Belanja Bunga	0	0	0	0	0	0	0
3	Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0
4	Belanja Hibah	56.700	40.562	647.568	572.705	591.642	894.816	302,20
5	Belanja Bantuan Sosial	56.568	86.403	13.934	28.909	0	0	0
6	Belanja Bagi Hasil	290.666	402.995	390.898	416.913	546.614	669.370	19,17
7	Belanja Bantuan Keuangan	172.924	64.765	15.483	85.739	94.969	122.483	70,97
8	Belanja Tidak Terduga	3.046	2.686	2.290	900	603	43	(42,62)
B	Belanja Langsung	1.208.009	1.045.242	1.369.888	1.445.156	1.651.799	1.662.835	7,61
1	Belanja Pegawai	79.094	79.900	117.389	117.827	116.677	100.029	6,61
2	Belanja Barang dan Jasa	545.847	440.338	606.885	635.840	749.234	774.656	8,90
3	Belanja Modal	583.067	525.003	645.613	691.489	785.887	788.150	6,81
	Total Belanja	2.239.753	2.132.956	2.964.582	3.113.313	3.483.672	4.022.264	13,31

Sumber : DPKD Provinsi Sumatera Barat

3.1.2. Neraca Daerah

Neraca merupakan laporan yang menyajikan posisi keuangan pemerintah pada tanggal tertentu. Yang dimaksud dengan posisi keuangan adalah posisi tentang aset, kewajiban, dan ekuitas. Aset mencakup seluruh sumber daya yang memberikan manfaat ekonomi dan atau sosial yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah. Kewajiban merupakan utang yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Daerah di masa yang akan datang.

Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Aset daerah merupakan aset yang memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang. Kinerja Neraca Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat selama kurun waktu Tahun 2010-2015 seperti yang diperlihatkan pada Tabel 3.3.

Selama periode Tahun 2010-2015, perkembangan jumlah aset Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengalami peningkatan yaitu dari Rp.6.483.496 juta pada tahun 2010 menjadi Rp. 7.168.024 juta pada tahun 2015, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 3,25 % per tahun. Aset tersebut terdiri atas aset lancar (kas, piutang dan persediaan), investasi jangka panjang (investasi non permanen dan investasi permanen), aset tetap (tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan), aset lainnya (tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tagihan tuntutan ganti kerugian daerah, kemitraan dengan pihak kedua,

aset tak berwujud, aset lainnya), dan semuanya dipergunakan untuk menunjang kelancaran tugas pemerintahan.

Investasi jangka panjang dan aset tetap selama periode Tahun 2010-2015 mengalami peningkatan, dalam rangka memperbesar peranan belanja modal. Dana cadangan sampai saat ini belum bisa dialokasikan karena Peraturan Daerah yang mengatur dana cadangan tersebut belum tersedia. Dana cadangan tersebut bisa berupa dana cadangan untuk Pilkada sekali lima tahun agar saat penyelenggaraan Pilkada tidak terlalu memberatkan pemerintah daerah.

Tabel 3.3
Rata-rata Pertumbuhan Neraca Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 – 2015
(Dalam Rp juta)

URAIAN	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-Rata (Persen)
ASET							
Aset Lancar	434.344	502.212	368.240	355.403	424.817	430.854	1,28
Investasi Jangka Panjang	478.311	603.923	779.132	842.296	889.259	970.138	15,61
Aset Tetap	5.526.970	6.194.104	5.871.608	6.815.857	7.995.230	5.676.979	2,25
Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0	0
Aset Lainnya	43.870	25.590	1.057.986	766.599	374.708	90.053	767,61
JUMLAH ASET	6.483.496	7.325.829	8.076.967	8.780.155	9.684.015	7.168.026	3,25
KEWAJIBAN dan EKUITAS							
KEWAJIBAN							
Kewajiban Jangka Pendek	54.718	5.069	9.970	28.149	95.112	103.619	87,02
Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0	64.418	70.034	8,71
JUMLAH KEWAJIBAN	54.718	5.069	9.970	28.149	159.530	173.653	132,77
EKUITAS DANA							
Ekuitas Dana Lancar	379.626	497.143	358.269	327.254	329.704	0	(20,97)
Ekuitas Dana Investasi	6.049.151	6.823.616	7.708.727	8.424.752	9.194.780	0	(11,16)
Ekuitas Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH EKUITAS DANA	6.428.777	7.320.760	8.066.996	8.752.006	9.524.484	6.994.371	2,96
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	6.483.496	7.325.829	8.076.967	8.780.155	9.684.015	7.168.026	3,25

Sumber : DPKD Provinsi Sumatera Barat

Kewajiban, baik jangka pendek maupun jangka panjang, memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak dimasa lalu yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi dimasa yang akan datang. Kewajiban Pemerintah Provinsi Sumatera Barat selama periode 2010-2015 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 132,77% pertahun. Tingginya rata-rata pertumbuhan kewajiban selama periode Tahun 2010-2015 disebabkan karena terjadinya lonjakan kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang pada tahun 2014 dan 2015.

Selanjutnya, untuk mengetahui tingkat kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat diketahui berdasarkan analisis rasio atau perbandingan antara kelompok/elemen laporan keuangan yang satu dengan kelompok yang lain. Beberapa rasio yang dapat diterapkan di sektor publik adalah rasio lancar (*current ratio*), rasio kas (*cash ratio*) dan rasio cepat (*quick ratio*), rasio total hutang terhadap aset, rasio hutang terhadap modal.

Rasio lancar (*current ratio*) merupakan rasio standar untuk menilai kesehatan organisasi. Rasio ini menunjukkan apakah pemerintah daerah memiliki aset yang cukup untuk melunasi kewajiban yang jatuh tempo. Tetapi rasio lebih menunjukkan kemampuan riil berdasarkan kas yang dimiliki. Kualitas pengelolaan keuangan daerah dikategorikan baik apabila nilai rasio lebih dari satu. Sedangkan rasio total hutang terhadap total aset dan rasio total hutang terhadap ekuitas dana, sama-sama menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi seluruh kewajibannya seandainya seluruh aset atau aset bersih digunakan.

Beberapa rasio yang memperlihatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah diperlihatkan pada Tabel 3.4. Rasio likuiditas yang terdiri dari Rasio Lancar dan Rasio cepat memperlihatkan kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio Lancar tahun 2015 sebesar 4.16 memberi petunjuk bahwa kemampuan membayar hutang Pemerintah Provinsi Sumatera Barat lebih 4 (empat) kali. Selanjutnya Rasio cepat (quick ratio) sebesar 3.33 menunjukkan bahwa kemampuan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid sangat baik.

Tabel 3.4
Analisis Rasio Keuangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 – 2015
(Dalam Rp juta)

NO	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Rasio Likuiditas						
1	Rasio Lancar (<i>Current Ratio</i>)	7,94	99,08	36,93	12,63	4,47	4,16
2	Rasio quick (<i>Quick Ratio</i>)	6,90	76,79	31,51	10,57	3,72	3,33
	Solvabilitas						
3	Rasio total hutang terhadap total asset	0,01	0,01	0,00	0,00	0,02	0,02
4	Rasio hutang terhadap modal	0,85	0,07	0,12	0,32	1,67	2,48

Sumber : DPKD Provinsi Sumatera Barat

Rasio solvabilitas yang diukur dengan rasio hutang terhadap total aset dan rasio hutang terhadap modal memperlihatkan kemampuan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk memenuhi kewajiban jangka panjang. Rasio Hutang Terhadap Modal memperlihatkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva. Semakin besar nilainya berarti semakin besar pengaruh hutang terhadap aktiva. Tabel 3.4 memperlihatkan bahwa Rasio Hutang terhadap Total Aset selama periode Tahun 2011-2015 sangat rendah dan paling tinggi hanya 0,02. Berdasarkan hasil ini, maka pengaruh hutang terhadap aktiva sangat kecil.

Rasio hutang terhadap modal mengukur seberapa perlu hutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki. Jika nilai rasionya semakin kecil, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tidak perlu tergantung pembiayaan dari pihak lain. Hasil perhitungan yang diperlihatkan pada Tabel 3.4 menunjukkan bahwa rasio hutang terhadap modal juga rendah. Dengan demikian Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tidak perlu tergantung modal dari pihak luar.

3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAHTAHUN 2010-2015.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelolaan Keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Selama periode tahun 2010-2015, terjadi peningkatan belanja aparatur Rp 531.932 juta pada tahun 2010 menjadi Rp. 772,736 juta lebih pada tahun 2015 dengan kenaikan rata-rata sebesar 7,78 % per tahun seperti yang diperlihatkan pada Tabel 3.5. Peningkatan belanja aparatur ini tentu juga untuk meningkatkan kinerja aparatur dalam menjalankan pelaksanaan tugas sehari-hari untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Jika ditelusuri lebih jauh, peningkatan yang cukup tinggi terdapat pada belanja pegawai rumah sakit daerah (BLUD) untuk keperluan insentif pada jasa tindak medik yang terus mengalami kenaikan sejalan dengan terjadinya peningkatan pendapatan pada rumah

sakit yang telah BLUD. Selain itu juga terdapat peningkatan belanja penerimaan anggota dan Pimpinan DPRD serta operasional KDH/WKDH serta peningkatan belanja tambahan penghasilan yang merupakan peningkatan tunjangan kinerja sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja aparatur.

Tabel 3.5
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2010- 2015
(Dalam Rp juta)

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-Rata (%)
I	Belanja Tidak Langsung							
	Belanja Pegawai	452.838	490.300	524.517	562.988	598.043	672.707	8,2
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	327.188	360.834	387.655	400.912	427.380	465.146	7,31
2	Belanja Tambahan Penghasilan	91.901	90.109	100.003	119.580	126.289	162.418	12,56
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	5.227	8.113	8.319	8.448	9.069	9.492	14,26
4	Insentif Pemungutan	28.521	30.498	27.814	33.498	34.648	35.193	4,71
5	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0	96	129	113	195	200	
6	Penghasilan Lain	730	650	596	437	460	458	(8,22)
II	Belanja Langsung							
	Belanja Pegawai	79.094	79.900	117.389	117.827	116.677	100.029	6,61
1	Belanja Honorarium PNS	46.948	32.548	38.604	36.184	17.960		(33,74)
2	Honorarium Non PNS	14.697	10.292	12.116	13.959	5.712		(31,22)
3	Belanja Uang Lembur	15.557	17.269	20.032	22.557	18.525	621	(14,98)
4	Honorarium Pengelolaan Dana BOS					32.		
5	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat			19.478	4.394			
6	Belanja Pembahasan/ Verifikasi	1.892	1.206	1.394	1.836	2.222	0	(13,58)
7	Belanja Pegawai (BLUD)		18.584	25.614	38.894	72.223	99.407	155,01
	TOTAL	531.932	570.200	641.906	680.816	714.710	772.736	7,78

Sumber : DPKD Provinsi Sumatera Barat

Selanjutnya untuk mengetahui apakah kebijakan penggunaan anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat semakin baik atau tidak, maka perlu diketahui proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dengan total belanja daerah. Tabel 3.6 memperlihatkan bahwa proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur mengalami penurunan dari 23,54 % pada tahun 2010 menjadi 18,96 % pada tahun 2015. Data ini memberi penjelasan bahwa kebijakan penggunaan anggaran Daerah Provinsi Sumatera Barat semakin baik dengan semakin meningkatnya belanja untuk keperluan publik.

Tabel 3.6
Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 – 2015
(Dalam Rp juta)

No	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase
		(a)	(b)	(a)/(b) x 100%
1	Tahun anggaran 2010	531.932	2.259.637	23,54
2	Tahun anggaran 2011	570.200	2.157.956	26,42
3	Tahun anggaran 2012	641.906	3.007.082	21,34
4	Tahun anggaran 2013	680.816	3.184.313	21,38
5	Tahun anggaran 2014	714.710	3.537.634	20,20
6	Tahun anggaran 2015	772.736	4.074.856	18,96

Sumber : DPKD Provinsi Sumatera Barat

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan dapat dibedakan atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya; mencakup: sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah. Sebaliknya pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Sementara penerimaan pembiayaan dibutuhkan untuk menutupi defisit yang terjadi, sedangkan jika terjadi surplus maka kelebihan tersebut dapat digunakan untuk pembiayaan kebutuhan dana pada masa datang.

Penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit dengan diberlakukan anggaran berbasis kinerja. Tabel 3.7 memperlihatkan bahwa pengeluaran pembiayaan daerah ada yang mengalami surplus dan defisit selama periode Tahun 2010-2015. Namun defisit anggaran yang terjadi dalam beberapa tahun dapat ditutupi dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya.

Dari perjalanan lima tahun terakhir, sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya menunjukkan penurunan yang cukup baik dan hal ini menandakan terdapat peningkatan serapan Tabel 3.7 dan 3.9 memperlihatkan perkembangan surplus (Defisit) Riil dan realisasi SILPA selama periode Tahun 2010-2015.

Tabel 3.7
Penutup Defisit Riil Anggaran Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 – 2015
(Dalam Rp juta)

NO	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1.920.971	2.183.958	2.922.582	3.147.840	3.635.838	4.052.249
	Dikurangi realisasi:						
2	Belanja Daerah	2.239.753	2.132.956	2.964.582	3.113.313	3.483.715	4.022.264
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	19.884	25.000	42.500	71.000	53.919	52.600
A	Surplus (Defisit) riil	(338.666)	26.002	(84.500)	(36.473)	98.248	22.104
	Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan:						
4	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran sebelumnya	673.887	335.221	361.250	276.750	240.276	218.357
5	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0
6	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	0	0	0	0	0	0
7	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0	0
8	Penerimaan Kembali Pengembalian Dana Bergulir Daerah	0	26	0	0	0	0
9	Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0	0
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	673.887	335.247	361.250	276.750	240.276	274.104
A-B	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	335.221	361.250	276.750	240.276	338.522	251.496

Sumber : DPKD Provinsi Sumatera Barat

Selama periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 terdapat sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) yang cenderung menurun, hal ini menandakan bahwa penyerapan pelaksanaan anggaran setiap tahunnya terdapat peningkatan. Selanjutnya pada tahun 2011 terdapat penerimaan kembali dari pengembalian dana bergulir yang merupakan

tagihan terhadap program-program bantuan untuk masyarakat yang sifatnya bergulir yang diberikan tahun sebelumnya, seperti yang tergambar pada tabel 3.8

Tabel 3.8
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Provinsi Sumatera Barat
(Dalam Rp juta)

NO	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	673.887	335.221	361.250	276.750	240.276	218.357
2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	0	0	0	0	0	0
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0	0
5	Penerimaan Kembali Pengembalian Dana Bergulir Daerah	0	26	0	0	0	0
6	Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0	0

Sumber : DPKD Provinsi Sumatera Barat

Tabel 3.9
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 - 2015
(Dalam Rp juta)

No	URAIAN PENDAPATAN	2010		2011		2012		2013		2014		2015	
		Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA
1	Jumlah SILPA	335.221		361.250		276.750		240.276		338.522		229.465	
2	Pelampauan Penerimaan PAD	60.256	17,97	77.110	21,35	(6.673)	(2,41)	32.292	13,44	141.217	5,61	100.173	2,45
3	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbang	12.526	3,74	34.241	9,48	36.505	9,59	(36.084)	(15,02)	(30.433)	(0,17)	(2.793)	(1,22)
4	Pelampauan Penerimaan Lain-lain pendapatan daerah yang sah	(1.340)	(0,40)	1.445	0,40	(25.504)	(0,04)	(30.660)	(1,92)	2.724	0,28	(81.285)	35,42
5	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kegiatan lanjutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : DPKD Provinsi Sumatera Barat

Tabel 3.10 menyajikan hasil analisis sisa lebih Pembiayaan Anggaran Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2010-2015, yang bertujuan untuk memperoleh gambaran secara riil sisa lebih pembiayaan anggaran. Selanjutnya tidak terdapat kewajiban yang belum terselesaikan dan kegiatan lanjut dari tahun 2010 s/d 2015, sehingga saldo kas daerah pada Provinsi Sumatera Barat sama dengan sisa lebih (riil) pembiayaan anggaran tahun berkenaan. Sisa lebih (riil) pembiayaan anggaran berfluktuasi namun cenderung menurun.

Tabel 3.10
Sisa Lebih (riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 – 2015
(Dalam Rp juta)

NO	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Saldo kas neraca daerah	335.221	361.250	276.750	240.276	338.522	251.496
	Dikurangi						
2	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-	-	-	-	-	-
3	Kegiatan Lanjutan	-	-	-	-	-	-
	Sisa Lebih (riil) pembiayaan anggaran	335.221	361.250	276.750	240.276	338.522	251.496

Sumber : DPKD Provinsi Sumatera Barat

3.3. KERANGKA PENDANAAN

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya.

3.3.1. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama

Pengeluaran periodik wajib dan mengikat merupakan belanja yang wajib dibayarkan dan tidak dapat ditunda pembayarannya dan harus dibayarkan dalam satu tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak boleh menjadi hutang untuk tahun berikutnya. Hal ini berarti bahwa belanja yang menjadi prioritas utama dalam sebuah anggaran atau APBD seperti gaji, belanja bagi hasil pada kabupaten/kota yang merupakan kewajiban setiap penerimaan pendapatan provinsi yang harus dibagi kepada kabupaten/kota berdasarkan peraturan atau belanja sejenis lainnya. Sedangkan belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh Pemerintah Daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas Pemerintah Daerah yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti honorarium guru dan tenaga medis serta belanja sejenis lainnya.

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama dimaksudkan untuk mengetahui atau memastikan jumlah kebutuhan dana yang tidak bisa tidak dikeluarkan karena kewajiban pemerintah baik karena peraturan maupun karena adanya perjanjian. Semakin tinggi jumlah pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama berarti semakin terbatas dana yang dapat digunakan untuk tujuan lainnya yang tidak terikat.

Oleh karena selama ini Provinsi Sumatera Barat tidak memiliki pinjaman, tidak ada dana cadangan, dan tidak memiliki kontrak sewa menyewa jangka panjang, maka pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama hanya terbatas pada belanja tidak langsung; gaji dan tunjangan, belanja bagi hasil, belanja tak terduga, serta belanja langsung; yaitu belanja pada khusus tenaga kesehatan seperti jasa tenaga medik dalam rumah sakit yang telah BLUD (untuk tenaga medis).

Hasil perhitungan pengeluaran periodik wajib dan tahun mengikat serta prioritas utama menunjukkan peningkatan setiap tahunnya selama periode 2010-2015. Pengeluaran periode tersebut mengalami peningkatan dari Rp. 766.434 juta pada tahun 2010 menjadi Rp. 1.494.127 juta pada tahun 2015 dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 14,45 % setiap tahunnya seperti yang diperlihatkan pada Tabel 3.11. Meskipun terjadi kenaikan pengeluaran periodik wajib dan mengikat selama periode 2010-2015, pengeluaran untuk keperluan lainnya juga mengalami peningkatan. Dengan demikian peningkatan pengeluaran periodik wajib selama ini masih dalam batas yang dapat dikendalikan.

Tabel 3.11
Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 – 2015
(Dalam Rp juta)

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan rata-rata (%)
A	Belanja Tidak Langsung	746.550	895.981	917.705	980.802	1.145.260	1.342.120	12,65
1	Belanja Pegawai	452.838	490.300	524.517	562.989	598.043	672.707	8,26
2	Belanja bagi hasil pada kab/kota	290.666	402.995	390.898	416.913	546.614	669.370	19,17
3	Belanja Tak terduga	3.046	2.686	2.290	900	603	43	-42,62

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan rata-rata (%)
B	Belanja Langsung		18.584	25.614	38.984	72.223	99.407	
1	Belanja Pegawai BLUD		18.584	25.614	38.894	72.223	99.407	
C	Pembiayaan Pengeluaran	19.884	25.000	42.500	71.000	53.919	52.600	27,26
1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0	0
2	Penyertaan modal	19.884	25.000	42.500	71.000	53.919	52.600	27,26
	TOTAL (A+B+C)	766.434	939.565	985.819	1.090.786	1.271.402	1.494.127	14,45

Sumber : DPKD Provinsi Sumatera Barat

3.3.2. Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Tahun 2016-2021

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi yang telah ditetapkan, maka untuk lima tahun ke depan diperlukan peningkatan pendapatan daerah yang lebih besar. Peningkatan ini sangat dimungkinkan karena kinerja keuangan daerah selama periode tahun 2010-2015 memperlihatkan kecenderungan yang semakin baik dan terkendali. Oleh sebab itu berdasarkan potensi yang dimiliki dan untuk memastikan kemampuan keuangan daerah, perlu dibuat proyeksi pendapatan daerah dan proyeksi belanja wajib mengikat serta belanja prioritas.

Terkait dengan proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) periode tahun 2016-2021 dirumuskan beberapa kebijakan dan langkah-langkah sebagai berikut:

- Mempertahankan tingkat inflasi yang rendah
- Meningkatkan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat/wajib pajak
- Meningkatkan kontribusi BUMD dalam pembentukan PAD
- Meningkatkan atau membangun sistem dan prosedur administrasi pelayanan perpajakan dan retribusi berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
- Melaksanakan intensifikasi dan diversifikasi pajak dan retribusi.
- Menyempurnakan dan mengevaluasi dasar hukum penetapan pajak dan retribusi.

Berdasarkan arah kebijakan PAD yang telah dikemukakan di atas, maka proyeksi pendapatan daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 menggunakan asumsi sebagai berikut:

- Proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan kenaikan rata-rata penerimaan PAD selama periode tahun 2010-2015 sebesar 8 %. Hal ini berdasarkan fakta bahwa sumber utama dari PAD adalah dari pajak kendaraan dan bea balik nama kendaraan yang sudah maksimal.
- Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Bagi Hasil Pajak dihitung berdasarkan kenaikan rata-rata periode tahun 2010-2015.
- Proyek Alokasi Umum dan Dana Penyesuaian berdasarkan pengalaman periode tahun 2010-2015

Khusus untuk Proyeksi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Barat selama periode tahun 2016 – 2021, digunakan asumsi sebagai berikut :

- Pajak Daerah.
 - Nilai Jual Kendaraan Bermotor usia 1 – 5 tahun pada prinsipnya tetap, sedangkan usia diatas 5 (lima) tahun kecendrungannya menurun.
 - Daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor pada prinsipnya diasumsikan tetap dan suatu saat terjadi penurunan seiring dengan melemahnya nilai tukar rupiah dan tingkat inflasi yang tinggi serta naiknya harga jual minyak.

- c. Harga bahan bakar minyak berasal dari pemakaian bahan bakar minyak dan peralihan konsumsi bahan bakar kendaraan bermotor dari subsidi ke non subsidi karena pengurangan subsidi pemerintah terhadap bahan bakar minyak secara bertahap.
- d. PT. PLN masih menggunakan/memanfaatkan genangan air pada 4 (empat) lokasi sumber air (Danau Singkarak, Danau Maninjau, Batang Agam dan Koto Panjang) sebagai pembangkit tenaga listrik secara normal, dan PDAM masih menggunakan air permukaan secara normal sebagai bahan baku usahanya.
- e. Rencana pemerintah menaikkan cukai rokok sampai dengan 10% setiap tahun sehingga menyamai Negara tetangga.

2. Retribusi Daerah.

- a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat 2 (dua) jenis penerimaan Provinsi yang dialihkan pemungutannya dan menjadi sumber penerimaan Kabupaten/Kota yaitu Retribusi Pengujian Berkala Pertama Kendaraan Bermotor dan Retribusi Tera/Tera Ulang dan sebaliknya 2 (dua) jenis penerimaan Kabupaten/Kota dialihkan pemungutannya dan menjadi sumber penerimaan Provinsi yaitu Retribusi Terminal Type B dan Retribusi Kepelabuhan, sehingga untuk Retribusi Jasa Umum pada tahun anggaran 2017 terjadi penurunan dan peningkatan penerimaan secara normative tidak dapat menutupi penurunan yang terjadi karena pengalihan pemungutan.

Sedangkan untuk Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu akan terjadi peningkatan setiap tahunnya, karena telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menegaskan bahwa tarif retribusi dapat ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun, untuk itu setiap tahun akan dievaluasi pola tarif yang berlaku, jenis pelayanan yang diberikan serta penambahan sarana dan prasarana seiring dengan telah dioperasikan Gedung Rohana Kudus untuk kegiatan rapat-rapat dan pesta perkawinan.

- b. Bantuan sosial dalam bentuk bantuan bibit/benih kepada masyarakat masih dianggarkan dalam APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, tetap dianggarkan dan disalurkan, kecuali tidak ada lagi bantuan sosial dan akan berpengaruh terhadap penjualan produksi usaha daerah atas penjualan bibit ternak, bibit ikan, bibit pertanian dan hortikultura serta bibit perkebunan.
- c. Penyelenggaraan kegiatan rapat-rapat, sosialisasi, bimbingan teknis dan pelatihan, workshop dan lain-lain sejenisnya masih tetap didorong agar penyelenggaraannya menggunakan gedung-gedung milik Pemerintah Daerah.
- d. Pola pelayanan kesehatan dengan sistem paket yang diberlakukan dan ditetapkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tidak mengalami perubahan.
- e. Rumah Potong Hewan di Payakumbuh beroperasi sejak Juli 2016.

3. Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

- a. 2 (dua) perusahaan BUMD yaitu PT. Balairung dan PT. Grafika tetap beroperasi, meskipun dalam bentuk merger atau dalam bentuk kerjasama dengan pihak ketiga.
- b. Tetap melakukan penambahan penyertaan modal sesuai dengan porsi saham yang dimiliki Pemerintah Provinsi.
- c. Peningkatan kinerja semua BUMD untuk peningkatan PAD Provinsi Sumatera Barat diupayakan lebih optimal

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
 - a. Tingkat suku bunga untuk jasa giro sebesar 2 - 4 % dengan saldo rata-rata dana yang ada di Kas Daerah dan pemegang kas sebesar Rp.250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh milyar) per bulan.
 - b. Tingkat suku bunga deposito sebesar 7,5 % perbulan yang didepositokan minimal sebesar Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah).
 - c. Pola pelayanan kesehatan dengan system paket yang diberlakukan dan ditetapkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tidak mengalami perubahan.
 - d. Tingkat kepatuhan wajib dalam membayar pajak stabil.
5. Dana Perimbangan.
 - a. Tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat.
 - b. Persentase bagian daerah tidak berubah.
 - c. Ekspor hasil bahan pertambangan stabil.
 - d. Persentase dan formula Dana Alokasi Umum.
6. Lain-lain Pendapatan yang sah.
 - a. PT. Semen Padang bersedia merubah jumlah sumbangannya.
 - b. Daya beli masyarakat untuk membeli kendaraan stabil.
 - c. Produksi hasil hutan meningkat setiap tahun.

Tabel 3.12 memperlihatkan bahwa proyeksi pendapatan daerah selama selama periode 2016-2021 akan meningkat dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 9.1 % pertahun. Pertumbuhan tersebut, terutama pada PAD sebesar 8,0% yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan.

Tabel 3.12
Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016– 2021
(Dalam Rp juta)

No	URAIAN	2016*)	2017	2018	2019	2020	2021
A	Pendapatan Asli Daerah	1.894.690	2.044.504	2.240.320	2.454.393	2.686.212	2.941.248
1	Pajak daerah	1.427.515	1.533.304	1.642.164	1.794.885	1.956.425	2.132.503
2	Retribusi daerah	16.734	19.946	21.991	24.510	27.331	30.491
3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yg dipisahkan	87.920	98.872	122.004	134.204	147.625	162.387
4	Lain-lain PAD yang sah	362.520	392.383	454.161	500.794	554.831	615.867
B	Dana Perimbangan	2.649.114	3.990.886	4.295.596	4.705.597	5.156.537	5.652.493
1	Bagi Hasil Pajak	164.008	151.342	198.450	199.419	200.427	201.456
2	Bagi Hasil Bukan Pajak	10.700	6.880	6.885	6.890	6.894	6.899
3	Dana Alokasi Umum	1.261.916	1.953.594	2.148.953	2.363.849	2.600.234	2.860.257
4	DAU kurang salur	0	114.244	0	0	0	0
5	Dana Alokasi Khusus	1.212.490	1.764.826	1.941.308	2.135.439	2.348.982	2.583.881
C	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	51.896	75.586	16.472	16.473	16.475	16.477
1	Hibah	10.043	25.237	16.472	16.473	16.475	16.477
2	Dana darurat	0	0	0	0	0	0
3	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	41.853	50.349	0	0	0	0
	PENDAPATAN	4.595.697	6.110.977	6.552.388	7.176.463	7.859.224	8.610.218

Ket : *) Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021

Sumber : Bakeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

Namun demikian, dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah, pemerintah daerah akan tetap secara rutin dan berkala melakukan upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi seperti sebagai berikut :

1. Menggali potensi/jenis penerimaan baru.
2. Merubah pola tarif.
3. Meningkatkan pelayanan dan sumber daya manusia
4. Meningkatkan sarana dan prasarana khususnya berbasis Informasi Teknologi (IT).
5. Mengoptimalkan aset-aset yang idle.
6. Melakukan manajemen kas.

Selain itu, juga melakukan program dan kegiatan-kegiatan untuk mendorong meningkatkan penerimaan daerah melalui upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan mengendalikan laju inflasi daerah, dengan membuat program dan kegiatan yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan mengurangi pengangguran, antara lain:

1. Rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur yang diprioritaskan pada sentral-sentral ekonomi.
2. Menciptakan iklim investasi daerah.
3. Mempersiapkan dan meningkatkan tenaga kerja terampil.
4. Memberikan kemudahan perizinan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di Provinsi Sumatera Barat.
5. Mengupayakan *viability gap fund* yang disediakan oleh Pemerintah Pusat untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur.

Selanjutnya dana perimbangan diproyeksikan akan dapat tumbuh rata-rata sebesar 9,3% setiap tahunnya yang terdiri dari penerimaan dana bagi hasil pajak/bukan pajak, DAU, DAK dan DAK non fisik. Sedang lain-lain pendapatan daerah yang sah yang terdiri dari dana hibah dan dana penyesuaian dan otonomi khusus diasumsikan akan dapat tumbuh sebesar 8,0% setiap tahunnya.

Tabel 3.13 memperlihatkan proyeksi belanja daerah selama periode tahun 2016-2021. Sesuai dengan asumsi proyeksi pendapatan, maka proyeksi belanja tentu akan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan untuk membiayai belanja tersebut. Pertumbuhan rata-rata pertahun sekitar 7% sampai dengan 8%. Asumsi selanjutnya dan berdasarkan pengalaman selama periode tahun 2010-2015, terdapat keseimbangan pertumbuhan belanja tidak langsung dengan belanja langsung, sehingga belanja modal terutama untuk membangun infrastruktur pelayanan dasar yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat akan tetap bisa meningkatkan.

Secara nominal, Belanja Tidak Langsung memang lebih besar dari Belanja Langsung. Meskipun demikian, alokasi belanja tidak langsung tersebut bukanlah semata-mata untuk pemenuhan kebutuhan aparatur, tetapi justru sebaliknya lebih besar diperuntukkan kepada kepentingan publik, seperti :

1. Belanja Hibah yang didalamnya termasuk Hibah dana BOS dan Hibah kepada KONI, Pramuka, PMI dan Rumah Ibadah (Mesjid) yang kesemuanya itu manfaat/hasilnya dinikmati langsung oleh publik (masyarakat).
2. Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota, alokasi belanja tersebut juga diarahkan untuk mendanai program/kegiatan di kabupaten/kota yang lebih berorientasi kepada masyarakat, antara lain seperti pembangunan infrastruktur jalan, pendidikan dan kesehatan.
3. Belanja Bantuan Keuangan yang di dalamnya terdapat alokasi bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa/nagari. Kedua objek belanja bantuan keuangan tersebut diperuntukkan untuk

mendanai kegiatan-kegiatan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota dan kewenangan pemerintah desa/nagari yang manfaatnya lebih besar dan secara langsung dinikmati oleh masyarakat.

4. Belanja Tidak Terduga, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan diperuntukkan untuk pendanaan tanggap darurat dan pengeluaran mendesak yang pada gilirannya juga akan dinikmati langsung oleh masyarakat.

Sedangkan komponen belanja tidak langsung yang diperuntukkan kepada pemenuhan kebutuhan aparatur hanyalah Belanja Pegawai yang di dalamnya terdiri dari Gaji pokok dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan PNSD, Insentif Pajak dan Retribusi Daerah serta Tunjangan Sertifikasi/tambahan penghasilan Guru. Proporsi belanja aparatur (belanja pegawai) jauh lebih kecil dari proporsi belanja publik dalam kelompok Belanja Tidak Langsung. Berdasarkan Tabel 3.13 terlihat bahwa alokasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 2,661 Triliun yang terdiri dari alokasi Belanja Pegawai sebesar Rp 741,678 Miliar atau 27,87 % dari total Belanja Tidak Langsung. Sedangkan alokasi belanja di luar Belanja Pegawai yang peruntukannya lebih berorientasi kepada publik seperti dikemukakan di atas adalah sebesar Rp 1,920 Triliun atau sekitar 72,13 % dari Total Belanja Tidak Langsung. Dengan demikian, sudah dapat dipastikan bahwa Belanja Tidak Langsung yang besar lebih banyak diperuntukkan untuk keperluan publik.

Tabel 3.13
Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 - 2021
(Dalam Rp juta)

No	URAIAN	2016*)	2017	2018	2019	2020	2021
A	Belanja Tidak Langsung	2.661.076	3.917.201	3.982.901	4.264.051	4.672.955	4.834.595
1	Belanja Pegawai	741.678	2.273.447	2.196.166	2.290.928	2.391.964	2.499.943
2	Belanja Bunga	0	0	0	0	0	0
3	Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0
4	Belanja Hibah	1.087.323	819.009	899.816	1.007.006	1.231.694	1.194.372
5	Belanja Bantuan Sosial	0	0	5.955	6.312	6.691	7.093
6	Belanja Bagi Hasil	664.893	710.894	767.113	845.955	928.756	1.019.337
7	Belanja Bantuan Keuangan	150.732	108.850	108.850	108.850	108.850	108.850
8	Belanja Tidak Terduga	16.450	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
B	Belanja Langsung	2.113.127	2.308.776	2.793.927	3.154.087	3.452.351	4.068.435
1	Belanja Pegawai	14.954	23.473				
2	Belanja Barang dan Jasa	934.074	1.334.867				
3	Belanja Modal	1.164.099	950.436				
	Total Belanja	4.774.203	6.225.977	6.776.828	7.418.138	8.125.306	8.903.030

Ket : *) Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021

Sumber : Bakeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

Tabel 3.14 menggambarkan proyeksi surplus/defisit, penerimaan pengeluaran dan pengeluaran pembiayaan. Dari perhitungan tersebut terlihat bahwa setiap tahun diproyeksikan mengalami defisit karena belanja lebih besar dari pendapatan, namun dapat ditutup melalui penerimaan pembiayaan yang merupakan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA).

Selanjutnya sebagai salah satu kewajiban pemerintah daerah adalah penyertaan modal kepada perusahaan daerah seperti Bank Nagari, Jamkrida dan Askrida. Penyertaan modal ini merupakan kewajiban pemerintah daerah yang harus dipenuhi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan merupakan komponen pengeluaran pembiayaan. Diproyeksikan terdapat kenaikan mulai tahun 2017 setiap tahun direncanakan penyertaan modal perusahaan daerah naik sebesar Rp. 50.000 juta dan sampai tahun 2021 sebesar Rp 90.000 juta.

Tabel 3. 14
Proyeksi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2016-2021
(Dalam Rp juta)

URAIAN	2016*)	2017	2018	2019	2020	2021
PENDAPATAN	4.595.704	6.110.977	6.552.388	7.176.463	7.859.224	8.610.218
1. Pendapatan Asli Daerah	1.894.690	2.044.504	2.240.320	2.454.393	2.686.212	2.941.248
2. Dana Perimbangan	2.649.114	3.990.886	4.295.596	4.705.597	5.156.537	5.652.493
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	51.899	75.586	16.472	16.473	16.475	16.477
BELANJA	4.774.203	6.225.977	6.776.828	7.418.138	8.125.306	8.903.030
1. Belanja Tidak Langsung	2.661.076	3.917.201	3.982.901	4.264.051	4.672.955	4.834.595
2. Belanja Langsung	2.113.127	2.308.776	2.793.927	3.154.087	3.452.351	4.068.435
SURPLUS/(DEFISIT)	-178.500	-115.000	-224.440	-241.675	-266.082	-292.812
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	228.500	135.000	244.440	261.675	286.082	312.812
- Silpa	228.500	135.000	244.440	261.675	286.082	312.812
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Penyertaan Modal	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Ket : *) Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021

Sumber : Bakeuda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

Dengan demikian SILPA diproyeksikan setiap tahun mengalami penurunan terlihat pada tahun 2021 menjadi Rp. 133.080 juta dan memang diharapkan terdapat penurunan sebagai implementasi serapan anggaran semakin tinggi. SILPA ini akan diharapkan menutup defisit dari akibat belanja lebih besar dari pendapatan serta pengeluaran pembiayaan yang merupakan penyertaan modal pada perusahaan daerah.

Tabel. 3.15
Proyeksi Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Provinsi Sumatera Barat, tahun 2016 – 2021
(Dalam Rp juta)

No	Uraian	2016*)	2017	2018	2019	2020	2021
A	Belanja Tidak Langsung	1.423.021	2.989.341	2.968.279	3.141.883	3.325.720	3.524.280
1	Belanja Pegawai	741.678	2.273.447	2.196.166	2.290.928	2.391.964	2.499.943
2	Belanja Bagi Hasil	664.893	710.894	767.113	845.955	928.756	1.019.337
3	Belanja Tidak Terduga	16.450	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
B	Belanja Langsung	362.520	392.383	454.161	500.794	554.831	615.867
1	Belanja Pegawai BLUD	362.520	392.383	454.161	500.794	554.831	615.867
C	Pembiayaan Pengeluaran	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0
2	Penyertaan Modal	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	TOTAL (A+B+C)	1.835.541	3.401.724	3.442.440	3.662.677	3.900.551	4.160.147

Ket : *) Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021

Sumber : Bakeuda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Analisis penghitungan kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Perhitungan kerangka pendanaan dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat pertumbuhan pendapatan, belanja, dan sisa lebih riil penghitungan anggaran yang dicapai Provinsi

Sumatera Barat dalam periode tahun 2016 – 2021 serta perkiraan kondisi perekonomian yang mungkin dihadapi pada masa datang.

Langkah pertama yang perlu diketahui adalah kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pengeluaran prioritas daerah. Kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. Perhitungan untuk memperoleh kapasitas riil kemampuan keuangan daerah diperlihatkan pada Tabel 3.16.

Tabel 3.16
Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai
Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016– 2021
(Dalam Rp juta)

No	Uraian	2016*)	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pendapatan	4.595.697	6.110.977	6.552.388	7.176.463	7.859.224	8.610.218
2	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	0	0	0	0	0	0
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	228.500	135.000	244.440	261.675	286.082	312.812
	Total penerimaan	4.824.197	6.245.977	6.796.828	7.438.138	8.145.306	8.923.030
	Dikurangi:						
4	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	1.835.541	3.401.724	3.442.440	3.662.677	3.900.551	4.160.147
5	Kapasitas riil kemampuan keuangan	2.988.656	2.844.253	3.354.388	3.775.461	4.244.755	4.762.883

Ket : *) Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021

Sumber : Bakeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

Hasil perhitungan yang diperlihatkan pada Tabel 3.16 menunjukkan bahwa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah pada tahun 2016 sampai tahun 2021 cukup besar, dan meningkat setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan pendapatan yang cukup tinggi dan sisa riil penghitungan anggaran terdapat penurunan setiap tahunnya sedangkan belanja wajib dan mengikat serta prioritas utama juga meningkat namun pendapatan masih lebih tinggi peningkatannya sehingga kapasitas riil kemampuan keuangan daerah juga terjadi peningkatan yang cukup signifikan untuk membiayai program pembangunan.

Berdasarkan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang diperlihatkan pada Tabel 3.16 selanjutnya dapat ditentukan kerangka pendanaan seperti yang diperlihatkan pada Tabel 3.17. Kerangka pendanaan ini akan menjadi acuan dalam menyusun RAPBD Provinsi Sumatera Barat setiap tahunnya selama periode tahun 2016-2021.

Tabel 3.17
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2016– 2021
(Dalam Rp juta)

No	Uraian	2016*)	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kapasitas Keuangan Daerah	4.824.197	6.245.977	6.796.828	7.438.138	8.145.306	8.923.030
	Prioritas I (wajib dan mengikat)	1.835.541	3.401.724	3.442.440	3.662.677	3.900.551	4.160.147
1.1	Belanja Tidak Langsung	1.423.021	2.989.341	2.968.279	3.141.883	3.325.720	3.524.280
1.2	Belanja Langsung	362.520	392.383	454.161	500.794	554.831	615.867
1.3	Pengeluaran Pembiayaan	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	2.988.656	2.844.253	3.354.388	3.775.461	4.244.755	4.762.883

No	Uraian	2016*)	2017	2018	2019	2020	2021
2	Rencana Alokasi Prioritas II	2.021.874	2.173.676	2.322.131	2.506.966	2.707.476	2.925.074
2.1	Belanja Program Prioritas dalam rangka pencapaian visi misi KDH	1.372.596	1.533.316	1.637.828	1.767.435	1.907.951	2.060.760
2.2	Belanja Program Prioritas Pembangunan Daerah	649.278	640.360	684.303	739.531	799.525	864.314
3	Rencana Alokasi Prioritas III	185.422	118.770	124.725	143.282	270.461	125.863
3.1	Belanja Hibah	34.690	9.920	9.920	28.120	154.920	9.920
3.2	Belanja Bantuan Sosial	0	0	5.955	6.312	6.691	7.093
3.4	Belanja Bantuan Keuangan	150.732	108.850	108.850	108.850	108.850	108.850

Ket : *) Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021

Sumber : Bakeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

Berdasarkan kapasitas kemampuan keuangan daerah maka disusun rencana penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah kedalam dua prioritas yaitu prioritas I dan prioritas II yaitu :

Prioritas I : merupakan program daerah yang diprioritaskan untuk belanja wajib, mengikat serta prioritas utama, yang merupakan belanja dasar bagi terlaksananya pemerintah daerah.

Prioritas II : direncanakan alokasi untuk pencapaian target dalam visi dan misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat, alokasi anggaran untuk program prioritas pembangunan diantaranya dibidang pendidikan, kesehatan, mendukung kedaulatan pangan, pengembangan pariwisata, perdagangan dan UMKMK, pembangunan infrstruktur pelayanan dasar yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat serta prioritas lainnya yaitu pembangunan mental dan reformasi birokrasi.

Prioritas III : dialokasikan untuk mendanai alokasi belanja tidak langsung untuk mendukung program prioritas di provinsi yang bukan kewenangan provinsi seperti untuk bantuan keuangan kepada kabupaten kota dan desa/nagari, belanja hibah dan bantuan sosial

Tabel 3.18 menyajikan Kerangka Pendanaan Alokasi Kapasitas Riil Keuangan Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2016 sampai dengan 2021. Secara nominal Prioritas I, II dan III cenderung meningkat. Secara persentase alokasi kapasitas riil keuangan daerah untuk prioritas I dan II lebih besar dari alokasi kapasitas riil keuangan daerah untuk prioritas III.

Tabel 3.18
Kerangka Pendanaan Alokasi Kapasitas Riil Keuangan Daerah Tahun 2016-2021
Provinsi Sumatera Barat (Rp juta)

No	Uraian	Alokasi											
		2016*)		2017		2018		2019		2020		2021	
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
1	Prioritas I	1.835.541	45,40	3.401.724	59,74	3.442.440	58,45	3.662.677	58,02	3.900.551	56,71	4.160.147	57,69
2	Prioritas II	2.021.874	50,01	2.173.676	38,17	2.322.131	39,43	2.506.966	39,71	2.707.476	39,36	2.925.074	40,56
3	Prioritas III	185.422	4,59	118.770	2,09	124.725	2,12	143.282	2,27	270.461	3,93	125.863	1,75
	Total	4.042.837	100,00	5.694.170	100,00	5.889.296	100,00	6.312.925	100,00	6.878.488	100,00	7.211.084	100,00

Ket : *) Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021

Sumber : Bakeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Dari pembahasan gambaran umum kondisi daerah dapat diketahui berbagai aspek pembangunan Sumatera Barat yang telah mengalami kemajuan dan keberhasilan selama lima tahun terakhir. Kemajuan dan keberhasilan yang telah dicapai tersebut dapat dijadikan modal yang kuat untuk mempercepat pembangunan Sumatera Barat di masa mendatang. Meskipun kemajuan dan keberhasilan telah banyak dicapai, Sumatera Barat masih menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan yang harus ditangani segera melalui serangkaian kebijakan, program dan kegiatan secara berkelanjutan untuk masa lima tahun ke depan. Permasalahan pembangunan yang masih dihadapi Sumatera Barat dan harus mendapat perhatian dapat dikelompokkan sebagai berikut:

4.1.1. Daerah Rawan Bencana

Letak geografis Sumatera Barat berada pada daerah tumbukan lempeng Indo-Australia dan lempeng Euroasia dengan topografi berbukit, bergunung dengan kelerengan di atas 10 % dan curah hujan yang tinggi. Kondisi ini menyebabkan sebahagian besar wilayah Sumatera Barat rawan terhadap bencana gempa, banjir, longsor, tsunami, kekeringan dan bencana lainnya. Bencana yang melanda Sumatera Barat selama ini telah menyebabkan korban jiwa, kerugian dan kerusakan infrastruktur, gagal panen, terhalangnya proses produksi dan lain-lainnya. Pada giliran berikutnya kondisi tersebut memperlambat pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan daya saing daerah. Oleh sebab itu salah satu tantangan pembangunan Sumatera Barat yang harus mendapat perhatian semua pihak adalah meminimalisasi kerugian akibat bencana dan mengurangi frekuensi bencana itu sendiri dengan berbagai intervensi dan program pembangunan.

4.1.2. Pembangunan Mental dan Pengamalan Nilai-nilai Adat dan Agama

Pembangunan telah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu menjadisemakin terbukanya informasi melalui berbagai media yang dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakatmasuknya budaya dan nilai-nilai baru di tengah-tengah masyarakat yang sulit dibendung. Akibatnya, terjadi gejala pergeseran nilai-nilai agama dan adat ditengah kehidupan masyarakat yang menjauhkan dari sikap mental yang mencerminkan kehidupan masyarakat madani yang ditandai dengan kehidupan yang aman, damai, tentram, harmonis, beriman dan bertakwa dengan mengamalkan nilai universal keagamaan dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan karakter dan pendidikan yang dilandasi oleh nilai-nilai agama dan adat belum seperti yang diharapkan. Masih rentannya karakter masyarakat terutama pemuda yang dapat dengan mudah dipengaruhi oleh budaya asing serta pergaulan yang bebas dan rentannya terhadap peredaran gelap narkoba menyebabkan pendidikan karakter perlu dilakukan sedini mungkin. Oleh sebab itu, agar gejala pergeseran nilai-nilai dan budaya ke arah yang kurang baik ini tidak berkembang lebih cepat dan merugikan generasi muda, maka perlu diantisipasi atau dicegah melalui penguatan nilai-nilai agama, adat dan budaya, penanaman sikap selektif terhadap penerimaan perubahan yang terjadi, meningkatkan kepedulian, kesalehan sosial dalam masyarakat dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan karakter yang dilandasi nilai-nilai agama dan adat.

4.1.3. Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik

Berbagai upaya telah dilakukan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik selama periode 2010-2015. Upaya-upaya tersebut telah dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kinerja pemerintah. Namun tuntutan penyelenggaraan pemerintah yang baik dari masyarakat, dunia usaha dan pihak-pihak berkepentingan lainnya juga mengalami peningkatan yang lebih cepat sejalan dengan perubahan internal dan eksternal organisasi pemerintahan. Oleh sebab itu permasalahan dan tantangan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang masih perlu mendapat perhatian adalah meningkatkan kualitas pelayanan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, optimalisasi penyelenggaraan pemerintah yang bersih, transparan dan akuntabilitas, keterbukaan informasi kepada publik dan menjaga sinergi pelaksanaan pembangunan antara pusat, provinsi dan kabupaten/ kota.

4.1.4. Kemiskinan dan Ketimpangan Pembangunan

Jumlah dan tingkat kemiskinan di Sumatera Barat telah mengalami penurunan dan lebih rendah dari tingkat kemiskinan nasional. Namun Indeks Keparahan dan Indeks Kedalaman Kemiskinan mengalami peningkatan. Sebanyak 12 daerah kabupaten dan kota mempunyai tingkat kemiskinan di atas rata-rata Provinsi Sumatera Barat. Hal ini mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan kesenjangan antar rumah tangga miskin dan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk miskin semakin menjauh dari garis kemiskinan. Indikasi ini perlu diatasi dengan melakukan intervensi yang lebih spesifik kepada keluarga miskin.

Selanjutnya ketimpangan pendapatan masyarakat Sumatera Barat berdasarkan Indeks Gini dan ketimpangan pembangunan antar wilayah yang diukur dengan Indeks Williamson selama periode 2010-2015 termasuk kategori rendah. Hal ini merupakan hasil capaian pembangunan yang mengembirakan, namun demikian sampai tahun 2015, Sumatera Barat masih mempunyai tiga daerah kabupaten (Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Solok Selatan) masuk kategori tertinggal. Ketiga daerah kabupaten ini perlu menjadi pusat perhatian semua instansi secara intensif dan sinergi untuk mengatasi ketertinggalannya dan sekaligus untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Sumatera Barat dengan lebih cepat.

4.1.5. Kualitas Sumberdaya Manusia

Kualitas sumberdaya manusia ditentukan oleh akumulasi banyak faktor seperti pendidikan, kesehatan dan faktor lainnya. Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa salah satu indikator yang dapat menunjukkan kualitas sumberdaya manusia yang lebih komprehensif adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Semakin tinggi IPM suatu daerah semakin tinggi kualitas sumberdaya manusia daerah tersebut.

Dibidang pendidikan, kinerja pendidikan dasar dan menengah telah memperlihatkan peningkatan selama periode 2011-2015. Angka partisipasi sekolah pendidikan dasar dan pendidikan menengah dan kelulusan telah hampir mencapai hampir 100 % pada tahun 2015. Kemudian rasio guru terhadap murid juga memperlihatkan bahwa tidak terdapat kekurangan guru yang mengajar di kelas, namun dari sisi fasilitas pendidikan, distribusi guru, APM pendidikan menengah dan kualitas lulusan masih mempunyai catatan untuk dibenahi dan diperhatikan untuk lima tahun ke depan.

Kondisi bangunan fasilitas pendidikan dasar, SMP/MTs dan SMA/ SMK/ MA yang masuk kategori baik pada tahun 2015 berturut-turut mencapai 70 %, 85 % dan 86 %. Kemudian Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs/ Paket B dan APM SMA/ SMK/ MA/ Paket C pada tahun 2015 berturut-turut baru mencapai 81,15 % dan 73,10 %. Angka ini memberi penjelasan bahwa cukup banyak penduduk usia sekolah yang belum mendapat

layanan pendidikan dan untuk mengatasinya juga memerlukan upaya serius dari pemerintah dan masyarakat.

Permasalahan selanjutnya yang perlu mendapat perhatian adalah ketimpangan distribusi guru dan ketimpangan kualitas pendidikan antar daerah yang terdapat di Sumatera Barat. Meskipun jumlah guru telah mencukupi, tetapi distribusinya masih belum ideal. Berapa daerah terdapat kelebihan guru, tetapi beberapa daerah lain masih kekurangan guru seperti di Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kabupaten Dharmasraya.

Kualitas lulusan SMA/ SMK/ MA daerah kota pada umumnya lebih baik dari kabupaten. Hal ini dapat dilihat hasil Ujian Nasional (UN) dan angka siswa yang melanjutkan ke perguruan tinggi SMA/ SMK/ MA di daerah kota yang cenderung lebih tinggi dari daerah kabupaten. Untuk meningkatkan kinerja pendidikan Provinsi Sumatera Barat dari hasil yang telah dicapai sekarang, maka beberapa hal yang menjadi catatan ini perlu mendapat perhatian untuk dibenahi di masa mendatang.

Selanjutnya dibidang kesehatan, permasalahan pembangunan yang perlu mendapat perhatian adalah Angka Harapan Hidup (AHH), angka kematian ibu dan angka kematian bayi yang masih tinggi dari rata-rata nasional. Kemudian status gizi masyarakat buruk dan prevalensi balita pendek masih belum dapat dikendalikan secara maksimal. Pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan dan akses pelayanan kesehatan daerah dan rujukan yang berkualitas belum merata.

Sebahagian sumberdaya kesehatan masih belum memenuhi standar yang ditetapkan dan terjadi ketimpangan ketersediaan, pendistribusian dan penempatannya. Permasalahan ini selanjutnya berdampak terhadap ketimpangan kualitas pelayanan kesehatan antar daerah di Sumatera Barat.

Dari sisi ketersediaan farmasi, alat kesehatan dan obat-obatan masih terbatas dibandingkan dengan peningkatan kebutuhan. Pembiayaan kesehatan dan jaminan kesehatan masyarakat dalam implementasinya masih terdapat persoalan dari sisi kekurangan dana dan kelembagaan. Keterbatasan dan kekurangan dalam aspek-aspek yang dikemukakan ini telah memunculkan berbagai ketidakpuasan dari pasien dan masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan.

Selanjutnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Barat telah mengalami peningkatan selama periode 2010-2015, namun salah satu komponen IPM yang perlu mendapat perhatian adalah rata-rata lama sekolah masih 8,42tahun. Artinya secara rata-rata tingkat pendidikan Sumatera Barat masih rendah. Selanjutnya tingkat pendidikan penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dengan latar pendidikan SD ke bawah pada tahun 2015 mencapai 40 %. Kondisi kualitas sumberdaya manusia seperti yang dideskripsikan ini perlu mendapat penanganan untuk meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat.

4.1.6. Struktur Ekonomi Daerah

Struktur ekonomi Sumatera Barat telah mengalami perubahan selama periode 2010-2015, namun peningkatan peranan sektor industri pengolahan dan konstruksi yang mempunyai produktivitas tinggi dan mempunyai dampak terhadap sektor lain belum seperti yang diharapkan. Untuk menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi yang dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dan mengurangi kemiskinan, maka peranan sektor industri pengolahan dan konstruksi perlu ditingkatkan, sehingga struktur ekonomi Sumatera Barat semakin mengarah ke struktur ekonomi yang lebih ideal.

Selanjutnya kegiatan ekonomi kelautan dan kemaritiman serta pariwisata belum memperlihatkan peranan yang berarti dalam perekonomian Sumatera Barat. Hal ini dapat diperlihatkan sumbangan sektor kelautan dan kemaritiman serta pariwisata yang rendah

dalam pembentukan PDRB dan penyediaan kesempatan kerja di Sumatera Barat. Struktur ekonomi Sumatera Barat akan semakin kuat dan baik, jika kegiatan ekonomi yang bergerak dalam bidang kelautan, kemaritiman dan pariwisata tumbuh dan berkembang dari yang telah dicapai sekarang. Oleh sebab itu, permasalahan dan tantangan yang harus diselesaikan adalah meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat yang bergerak dalam bidang kelautan, kemaritiman dan pariwisata untuk memperkuat struktur ekonomi Sumatera Barat.

4.1.7. Ketahanan Pangan

Sumatera Barat tidak menghadapi masalah serius dengan pangan, tetapi pemanfaatan potensi pangan perlu terus ditingkatkan untuk mendukung kedaulatan pangan nasional. Persoalan yang perlu menjadi perhatian adalah produktivitas komoditi pangan yang belum optimal serta upaya diversifikasi pangan masyarakat belum mencapai konsumsi pangan berimbang. Sampai saat ini ketergantungan pangan masyarakat Sumatera Barat terhadap beras sangat tinggi (107,70 kg/ kapita/ tahun). Oleh sebab itu tantangan yang terkait dengan pangan adalah menyeimbangkan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi dan seimbang, mengurangi ketergantungan kepada beras serta meningkatkan produksi pangan untuk memenuhi peningkatan permintaan kebutuhan pangan utama (padi, jagung, cabe, daging, telur dan ikan) akibat peningkatan jumlah penduduk dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Masalah selanjutnya yang perlu mendapat perhatian adalah distribusi pangan dan keamanan. Dari sisi distribusi pangan yang menjadi persoalan adalah kurang stabilnya harga dan belum berperannya kelembagaan pangan secara baik dalam menyangga kestabilan dan harga pangan. Sedangkan keamanan pangan yang menjadi persoalan adalah masih ditemukan pangan yang belum aman dikonsumsi terutama pangan yang aman, sehat, utuh dan halal atau asuh. Oleh sebab itu, semua pihak harus memberi perhatian dalam merumuskan kebijakan produksi, distribusi dan keamanan pangan agar ketersediaan pangan baik ditingkat rumah tangga maupun daerah dapat terdistribusi dengan baik dan konsumsi pangan masyarakat dapat memenuhi pola pangan yang beragam, bergizi, berimbang, aman, halal dan utuh.

4.1.8. Pemanfaatan Potensi Kelautan dan Kemaritiman.

Sumatera Barat mempunyai sumberdaya kelautan dan kemaritiman yang cukup besar, namun potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sampai saat ini sarana dan prasarana untuk menunjang pemanfaatan potensi kelautan dan kemaritiman masih terbatas, seperti ketersediaan armada dan alat tangkap, demikian pula halnya sarana prasarana penunjang pariwisata bahari serta masih kurangnya sarana transportasi untuk pembangunan kemaritiman. Dengan demikian tantangan pembangunan dalam bidang kelautan dan kemaritiman adalah kemampuan memanfaatkan potensi yang tersedia seoptimal mungkin untuk peningkatan pembangunan dengan peningkatan sumberdaya manusia, menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan serta mendorong investasi swasta dalam pengembangan usaha.

4.1.9. Pengangguran

Pengangguran merupakan pemborosan sumberdaya manusia dalam proses pembangunan. Secara umum pengangguran dapat dibedakan atas pengangguran terbuka dan pengangguran setengah menganggur. Tingkat pengangguran di Sumatera Barat cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya, namun pada tahun 2015 sedikit di atas tingkat pengangguran nasional. Kondisi ini perlu mendapat perhatian dalam upaya mengatasinya. Sementara untuk tingkat pengangguran setengah menganggur yang diukur dari proporsi pekerja yang kurang bekerja dari 34 jam per minggu sudah mencapai 35 %.

Pengangguran pada dasarnya memperlihatkan ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran pada pasar kerja atau kegiatan ekonomi dan usaha yang tersedia tidak mampu menyerap pertumbuhan angkatan kerja dan untuk setengah menganggur tidak tersedia pekerjaan sampingan untuk memaksimalkan jam kerja yang tersedia. Guna menghindari pemborosan sumberdaya manusia ini, maka perlu dilakukan berbagai upaya baik dari sisi permintaan maupun penawaran tenaga kerja.

4.1.10. Pengembangan Pariwisata

Peranan pariwisata dalam perekonomian Sumatera Barat masih rendah, sementara potensi pariwisata tersebut sangat luar biasa baik dari sisi keindahan alam maupun dari sisi letak geografis. Berdasarkan potensi yang dimiliki tersebut, pariwisata yang menjadi sektor unggulan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi serta perluasan kesempatan kerja. Oleh sebab itu permasalahan yang menghambat atau faktor yang menyebabkan pariwisata Sumatera Barat belum dapat berperan seperti yang diharapkan perlu dibenahi dari berbagai aspek.

Persoalan mendasar dalam pengembangan pariwisata di Sumatera Barat adalah keterbatasan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pariwisata, disamping itu belum mempunyai *branding*, kurang promosi (*advertising*) dan pemasaran (*selling*). Keempat konsep ini belum berjalan karena rendahnya kesiapan destinasi pariwisata seperti fasilitas wisata, prasarana umum dan fasilitas umum (akomodasi, rumah makan, pusat oleh-oleh/cenderamata dan belanja, biro perjalanan wisata, jaringan ICT, fasilitas air minum, sanitasi lingkungan/pengelolaan sampah, *money changer*, klinik kesehatan, *sign and posting*/informasi wisata, toilet umum, dsb) serta kesiapan masyarakat di sekitar destinasi pariwisata. Pemahaman masyarakat tentang peran serta dan manfaat yang bisa diperoleh dari usaha kepariwisataan masih perlu ditingkatkan dan dilengkapi.

Kemudahan pergerakan wisata di destinasi juga belum didukung oleh jaringan, moda transportasi dan konektivitas antar moda. Selanjutnya koordinasi terkait dengan ikon wisata dan paket perjalanan wisata yang komprehensif serta promosi yang efektif dengan jangkauan yang luas dengan Kabupaten/Kota masih belum terlaksananya dengan maksimal. Kelembagaan pariwisata yang masih bersifat parsial serta peningkatan pengetahuan dan ekonomi kreatif sebagai pendukung wisata perlu dikembangkan masih terdapat kelemahan dalam pengembangan konten, kreasi dan teknologi kreatif, perluasan dan penetrasi pasar bagi produk kreatif baik di dalam maupun luar negeri.

4.1.11. Daya Saing Daerah

Globalisasi dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menuntut peningkatan daya saing daerah. Sumatera Barat sampai saat ini masih menghadapi berbagai masalah dalam penyediaan infrastruktur, peningkatan daya saing produk dan sumberdaya manusia. Oleh sebab itu permasalahan yang masih harus mendapat perhatian untuk diatasi untuk meningkatkan daya saing daerah adalah meningkatkan keamanan dan kenyamanan berusaha, kemudahan berinvestasi, kompetensi tenaga kerja, infrastruktur dan lain-lain.

Sampai saat ini Provinsi Sumatera Barat belum dapat diwujudkan sebagai pintu gerbang pembangunan Kawasan Barat Sumatera yang bekerjasama dengan negara-negara di Kawasan Samudera India. Kemudian kualitas dan cakupan pelayanan sarana dan prasarana serta listrik masih belum sepenuhnya mendukung untuk peningkatan daya saing daerah. Dengan demikian untuk meningkatkan daya saing daerah diperlukan peningkatan kerjasama dan pembenahan infrastruktur yang masih belum mendukung daya saing daerah.

4.1.12. Peningkatan Infrastruktur

Dalam mendukung mobilitas orang dan barang diperlukan kondisi infrastruktur fisik dan non fisik yang baik, namun sampai saat ini Sumatera Barat masih menghadapi beberapa masalah yang terkait dengan infrastruktur ini. Kualitas jalan mengalami penurunan akibat kelebihan muatan, kapasitas lalu lintas jalan yang tidak memadai, pelebaran badan jalan yang masih terkendala dan bencana longsor.

Selanjutnya rata-rata Indeks Kinerja pelayanan irigasi baru mencapai 67,30 % pada tahun 2015, sementara target nasional adalah 70 % pada tahun 2019. Disamping itu, masalah penyediaan air baku juga perlu menjadi perhatian mengingat semakin meningkatnya kebutuhan air terutama untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, industri, pertanian dan perkebunan. Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah upaya meminimalisir dampak banjir maupun abrasi pantai.

Dari sisi ketersediaan dan keterjangkauan energi listrik, rasio Elektrifikasi Sumatera Barat baru mencapai 85 % pada tahun 2015 sementara target nasional sebesar 96,6 % pada tahun 2019. Selanjutnya penambahan prasarana dan sarana dasar seperti air minum dan sanitasi lebih lambat dari laju pertumbuhan penduduk. Akibat hal tersebut Sumatera Barat menghadapi kesulitan untuk mencapai target Universal Access (100 -0-100) untuk akses air minum, sanitasi layak dan permukiman kumuh. Selain itu, penataan bangunan dan lingkungan serta kawasan pemukiman juga belum maksimal.

4.1.13. Pengelolaan Lingkungan Hidup

Permasalahan lingkungan yang masih perlu mendapat perhatian adalah terjadinya degradasi fungsi lahan, kawasan pesisir serta sumberdaya air. Hal ini dapat ditandai dengan masih adanya lahan kritis, kerusakan daerah aliran sungai dan kerusakan terumbu karang. Selanjutnya kegiatan pembangunan dan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat memberikan tekanan terhadap kualitas air dan udara (sungai, danau dan kawasan pesisir) dan kawasan hutan.

Terkait dengan kehutanan masih ditemui penebangan pohon, perambahan hutan, kebakaran hutan dan alih fungsi lahan dan kondisi ini akan menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan dan ekosistem dan berkontribusi terhadap efek rumah kaca. Dari sisi pemanfaatan hutan masih terjadi konflik dan rendahnya pemanfaatan jasa lingkungan hutan. Salah satu langkah untuk mengurangi dan mencegah terjadinya degradasi dan deforesrasi hutan di Sumatera Barat maka dilakukan dengan mendorong pelibatan masyarakat secara lebih aktif dalam mengelola hutan melalui skema Perhutanan Sosial atau Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM).

Sumatera Barat mempunyai potensi energi baru terbarukan yang cukup besar, tetapi belum termanfaatkan, meskipun sebahagian potensi sudah dalam proses eksplorasi, seperti energi panas bumi dan sumber energi lainnya. Selanjutnya sumberdaya mineral sudah dimanfaatkan, tetapi pengawasan operasionalnya belum maksimal.

Selanjutnya Sumatera Barat belum mempersiapkan diri lebih maksimal untuk menghadapi perubahan iklim global yang akan berdampak terhadap peningkatan rasio debit maksimum dan minimum, ancaman banjir, longsor dan abrasi pantai. Kemudian Sumatera Barat juga perlu mempersiapkan diri lagi untuk menurunkan emisi dalam rangka mendukung program penurunan emisi nasional dan menerapkan konsep ekonomi hijau (*green economy*) dalam melaksanakan pembangunan.

4.1.14. Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi

Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) mempunyai kontribusi besar sebagai penggerak ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di Sumatera Barat. Namun berbagai permasalahan untuk peningkatan kualitas produk, akses pembiayaan, akses pasar, SDM serta promosi dan informasi, ketersediaan layanan pengembangan usaha dan jaringan bisnis masih perlu menjadi perhatian sebahagian besar UMKMK masih bergerak dalam sektor non formal dan masih belum dapat memanfaatkan kemajuan teknologi dalam memajukan usaha. Selain itu, UMKMK juga mempunyai keterbatasan dalam berinovasi dan optimalisasi manajemen pengelolaan.

Koperasi sebagai salah satu lembaga ekonomi kerakyatan memberikan dukungan terhadap pengembangan UMKM baik dalam pemberian akses permodalan, promosi dan pemasaran, sertifikasi produk, serta keamanan produk.

4.1.15. Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

Permasalahan dari aspek kebudayaan yang perlu mendapat perhatian adalah belum optimalnya fungsi nilai-nilai budaya lokal dalam mendorong modernisasi, pelestarian nilai-nilai budaya dalam penyelamatan aset budaya. Selain itu promosi budaya, apresiasi seni dan kreativitas karya budaya, pembinaan terhadap lembaga adat, dan masih minimnya kesenian tradisional dan sejarah lokal.

Permasalahan dari aspek kepemudaan yang masih perlu mendapat perhatian adalah pendidikan dan keterampilan pemuda, pembinaan karakter dan jadi diri pemuda, dan rendahnya jumlah yang memiliki kecakapan hidup. Selanjutnya jumlah organisasi kepemudaan yang aktif tidak sebanding dengan kegiatan kepemudaan.

Permasalahan yang terkait dengan olahraga adalah rendahnya prestasi atlet Sumatera Barat di pentas nasional, terbatasnya sarana dan prasarana olahraga baik dari segi kualitas, kuantitas maupun penyebarannya. Selanjutnya apresiasi terhadap pembina dan olahragawan yang berprestasi masih rendah.

4.1.16. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Laju pertumbuhan penduduk Sumatera Barat masuk tergolong tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk secara nasional, tentu hal ini terkait dengan upaya pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang belum memberi hasil terhadap penurunan jumlah penduduk.

Persoalan yang masih dihadapi sampai saat ini adalah lemahnya komitmen dan dukungan stakeholders terhadap program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan penduduk, masih tingginya jumlah anak yang diinginkan setiap keluarga, masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang isu kependudukan dan rendahnya keikutsertaan KB pria. Persoalan selanjutnya yang perlu ditangani dengan lebih serius adalah masih banyaknya perkawinan usia muda yang ditandai dengan median usia kawin pertama perempuan yang rendah dan tingginya perilaku seks pranikah di sebahagian kalangan remaja yang berakibat pada kehamilan yang tidak diinginkan.

4.2. ISU STRATEGIS

Berdasarkan permasalahan pembangunan Sumatera Barat yang masih dihadapi dan mempertimbangkan janji politik yang perlu diwujudkan, maka ditetapkan isu-isu strategis pembangunan daerah yang mempunyai pengaruh besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah dan memiliki daya ungkit untuk percepatan pembangunan daerah. Isu-isu strategis daerah tersebut adalah sebagai berikut:

4.2.1. Pembangunan Mental dan Peningkatan Pengamalan Nilai-nilai Adat dan Agama

Pembangunan fisik kalau tidak diiringi dengan pembangunan mental dan peningkatan penerapan nilai-nilai adat serta agama tidak akan memberi hasil yang maksimal untuk kemajuan Sumatera Barat. Perhatian terhadap pembangunan mental dan penerapan nilai-nilai adat dan pengamalan ajaran agama menjadi lebih penting bagi daerah untuk menangkis pengaruh negatif keterbukaan informasi melalui media sosial dan masuknya budaya-budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Pembangunan bidang ini sangat selaras dengan konsep Nawacita yang diusung oleh Presiden Jokowi dan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla dalam rangka menyiapkan generasi muda Sumatera Barat yang cerdas, berkarakter, berdaya saing dan mewujudkan masyarakat madani yang aman, damai, tentram, harmonis, beriman dan bertakwa.

Pembangunan mental dan penerapan nilai-nilai agama yang perlu mendapat penekanan adalah peningkatan implementasi kesalehan sosial dalam hidup bermasyarakat, mengoptimalkan fungsi kelembagaan agama dan adat dalam penanganan masalah sosial dan kemasyarakatan, meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya daerah ditengah kehidupan masyarakat, serta menghasilkan sumberdaya manusia yang cerdas dan berkarakter, memahami nilai-nilai agama dan adat budaya daerah.

4.2.2. Penanganan Bencana Alam

Sumatera Barat yang rawan terhadap berbagai bencana alam dapat menghambat percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengantisipasi hambatan tersebut, perhatian untuk mengurangi resiko, penanggulangan bencana dan pemulihan daerah yang terkena bencana harus menjadi lebih besar. Dengan menjadikan penanganan bencana alam sebagai salah satu isu strategis pembangunan Sumatera Barat memberi indikasi kepada publik, calon investor dan wisatawan bahwa pemerintah Sumatera Barat akan memberi perhatian lebih besar dari segala aspek untuk penanganan bencana alam. Pada giliran berikutnya keraguan pihak-pihak berkepentingan untuk menanamkan investasi, mengadakan kegiatan bisnis, kunjungan wisata, kegiatan akademik dan kegiatan lainnya di Sumatera Barat akan hilang dan aliran investasi serta jumlah kunjungan wisata akan mengalami peningkatan yang luar biasa dalam lima tahun mendatang.

4.2.3. Pengurangan Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan Pembangunan Antar Daerah

Kemiskinan dan ketimpangan pembangunan daerah masih merupakan isu penting bagi Sumatera Barat, meskipun sudah terjadi penurunan tingkat kemiskinan dan ketimpangan pembangunan antar daerah selama periode 2010-2015. Persoalan kemiskinan yang dihadapi saat ini sudah bergeser untuk menanggulangi tingkat keparahan dan tingkat kedalaman kelompok masyarakat yang miskin. Dalam mengeluarkan atau membebaskan kelompok masyarakat dari kemiskinan diperlukan upaya yang lebih besar lagi dari yang telah dilakukan sebelum ini. Jika kelompok masyarakat miskin dapat diatasi, maka tujuan Sumatera Barat bebas dari kemiskinan dalam arti yang sesungguhnya dapat diwujudkan.

Selanjutnya Sumatera Barat juga ingin mewujudkan keinginan untuk menjadi provinsi yang bebas dari daerah tertinggal. Saat ini masih terdapat tiga daerah tertinggal (Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Solok Selatan dan Pasaman Barat). Ketiga daerah kabupaten ini mempunyai karakteristik yang relatif berbeda, tetapi sama-sama menghadapi keterbatasan akses untuk keluar masuk, infrastruktur dan kualitas sumberdaya manusia yang dapat menggerakkan kegiatan ekonomi dan percepatan pembangunan. Dalam membebaskan ketiga daerah kabupaten ini dari ketertinggalannya, diperlukan dana yang besar dan usaha yang terintegrasi, fokus, terukur, dan tepat sasaran.

4.2.4. Penguatan Struktur Ekonomi Daerah

Dalam mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat diperlukan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada sektor-sektor produktivitas tinggi dan menyerap banyak lapangan kerja. Transformasi ekonomi Sumatera Barat yang terjadi selama ini kurang ideal untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan pendapatan. Peranan sektor pertanian telah mengalami penurunan selama periode 2011-2015, namun tidak diikuti dengan kenaikan peranan sektor industri pengolahan dan justru peranan sektor-sektor jasa yang mempunyai nilai tambah rendah yang mengalami perkembangan. Oleh sebab itu penguatan struktur ekonomi dijadikan isu strategis dalam rangka lebih menumbuh kembangkan industri pengolahan pertanian, industri kerajinan dan industri pariwisata untuk mendorong penguatan dan perubahan struktur ekonomi Sumatera Barat.

4.2.5. Peningkatan Infrastruktur

Sumatera Barat mempunyai daya saing daerah yang belum mencukupi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengembangan usaha. Salah satu faktor penghalang adalah rendahnya ketersediaan infrastruktur; jalan, listrik, transportasi, (darat, laut, udara, kereta api), pantai, sungai, irigasi, perumahan/permukiman, bangunan gedung serta prasarana air minum sanitasi. Oleh sebab itu peningkatan pembangunan infrastruktur perlu diarahkan untuk meningkat daya saing daerah, sehingga menarik bagi investor mengembangkan berbagai usaha di Sumatera Barat.

Kemajuan pembangunan infrastruktur yang telah dicapai selama tahun 2010-2015 masih belum mampu meningkatkan daya saing daerah dan untuk menghilangkan berbagai stigma negatif yang sering dilontarkan berbagai pihak terhadap Sumatera Barat, seperti tidak menarik untuk investasi dan untuk dikunjungi. Ketersediaan infrastruktur yang belum memadai tersebut menimbulkan beban bagi masyarakat dan dunia usaha dalam mobilisasi barang, sumber-sumber produksi dan orang.

Peningkatan pembangunan infrastruktur ini juga diperlukan untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antar daerah, peningkatan koneksitas regional dan nasional, serta untuk menguatkan posisi Sumatera Barat sebagai pusat pengembangan wilayah pantai barat Sumatera. Selain dari itu, pembenahan dan pengembangan transportasi publik juga harus menjadi perhatian untuk mengurangi beban arus distribusi barang dan memperkuat konektivitas antar wilayah

Tuntutan peningkatan infrastruktur saat ini tidak hanya pada infrastruktur fisik, tetapi juga infrastruktur non fisik dan teknologi informasi untuk mendukung dunia usaha dan mampu menjangkau daerah-daerah tertinggal. Dengan demikian komunikasi antara instansi pemerintah, masyarakat dan penyebaran informasi dapat terlaksana dengan lebih intensif.

4.2.6. Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik

Pemerintahan yang baik dan bersih merupakan persyaratan yang harus dipenuhi untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Guna mendukung terlaksananya pemerintah yang baik dan bersih diperlukan peningkatan integritas dan kinerja aparatur pemerintah dalam pelayanan publik, memantapkan sistem manajemen kepegawaian dan menyiapkan perangkat sistem kepegawaian daerah berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih juga tidak terlepas dari keterbukaan informasi kepada publik dan keterlibatan serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Oleh sebab itu perlunya pembangunan sistem informasi yang dapat diakses oleh publik dan menyiapkan sistem penyelenggaraan pemerintah yang dapat membuka ruang yang lebih besar untuk partisipasi masyarakat.

4.2.7. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia

Kualitas sumberdaya manusia adalah faktor penentu kemajuan suatu negara dan daerah. Kualitas sumberdaya manusia dapat dibedakan atas kualitas fisik dan non fisik. Kedua kualitas ini akan mempengaruhi produktivitas dan kemampuan untuk bersaing. Pentingnya isu peningkatan kualitas sumberdaya manusia adalah untuk mengatasi ketimpangan kualitas sumberdaya manusia antar daerah di Sumatera Barat dan untuk menyiapkan generasi muda yang siap bersaing di berbagai sektor.

Guna meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Sumatera Barat diperlukan pembenahan pembangunan pendidikan, kesehatan dan lingkungan seperti peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan, peningkatan derajat kesehatan dengan menekan angka kematian bayi dan ibu melahirkan.

4.2.8. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi

Pemberdayaan usaha mikro kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) menjadi isu pembangunan daerah karena bahagian terbesar yang menggerakkan ekonomi Sumatera Barat adalah usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Jika UMKMK tidak mengalami perkembangan, maka perlambatan pertumbuhan ekonomi dan penurunan kesempatan kerja akan terjadi di Sumatera Barat. Oleh sebab itu isu pemberdayaan UMKMK perlu dikaitkan dengan peningkatan daya saing dan produktivitas, pembenahan manajemen, dan kelembagaan, penguasaan teknologi, inovasi dan diversifikasi produk, peningkatan akses produk dan perluasan pasar, dukungan dan fasilitas dari pemerintah

4.2.9. Peningkatan Ketahanan Pangan

Salah satu kekhawatiran dalam hal pangan adalah rendahnya diversifikasi konsumsi pangan di Sumatera Barat dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia dan tidak terpenuhinya kebutuhan pangan yang terus meningkat akibat pertumbuhan penduduk dan peningkatan pendapatan masyarakat. Oleh sebab itu untuk menghilangkan kekhawatiran ini, peningkatan produktivitas dan pemenuhan kebutuhan pangan menjadi isu penting bagi kehidupan masyarakat.

Guna pemenuhan kebutuhan pangan, Sumatera Barat perlu berupaya untuk menjadi provinsi penghasil pangan nasional dalam mendukung kedaulatan pangan. Dalam hal ini perlu dilakukan penataan terhadap strategi produksi, distribusi dan konsumsi pangan yang sehat, beragam, bergizi, seimbang, aman, dan utuh dengan memperhatikan konsep ramah lingkungan, berbasis sumberdaya lokal dan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya surplus pangan yang diperdagangkan perlu mengutamakan prinsip keadilan yang mampu memberi penghasilan yang lebih kepada produsen pangan yang umumnya berskala kecil dan mengupayakan pengembangan pola konsumsi yang tidak hanya tergantung pada beras atau diversifikasi produk pangan dari produksi lokal

4.2.10. Pemanfaatan Potensi Kelautan dan Kemaritiman

Dalam upaya pemanfaatan potensi kelautan dan kemaritiman guna meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat adalah dengan memanfaatkan potensi kelautan dan kemaritiman secara optimal dengan peningkatan sumberdaya manusia, menyediakan sarana dan prasarana seperti penyediaan armada dan alat tangkap di bidang perikanan serta sarana prasarana untuk pariwisata bahari dan sarana transportasi untuk pembangunan kemaritiman. Dengan demikian potensi kelautan dan kemaritiman di bidang usaha perikanan, pariwisata serta transportasi dan usaha lainnya akan dapat dimanfaatkan.

4.2.11. Pengurangan Pengangguran

Pengurangan menjadi isu pembangunan daerah karena pengangguran menjadi hambatan dalam pembangunan dan menambah beban tanggungan yang berat bagi rumah tangga dan daerahserta berkaitan dengan kemiskinan. Untuk penanganan pengangguran di Sumatera Barat diperlukan pembenahan pada sisi penawaran dan permintaan tenaga kerja. Aspek yang perlu mendapat perhatian dari sisi penawaran adalah peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja sehingga cocok dengan permintaan di pasar kerja, pengembangan informasi pasar kerja, pembenahan balai latihan yang dapat menghasilkan dan mengembangkan wirausaha baru untuk sektor UMKMK dan perlindungan terhadap tenaga kerja.

Aspek yang perlu mendapat perhatian dari sisi permintaan tenaga kerja adalah meningkatkan dan membuka lapangan kerja baru dan alternatif bagi pekerja yang masuk kategori setengah pengangguran. Membuka lapangan kerja tentu memerlukan pengembangan berbagai sektor yang dapat diunggulkan Sumatera Barat seperti sektor pariwisata, kelautan dan kemaritiman dan konstruksi bangunan.

4.2.12. Globalisasi dan Peningkatan Daya Saing Daerah

Terbukanya pasar bebas di era globalisasi baik regional maupun internasional, seperti Asean Economic Community (AEC) dan Asean China Free Trade Area (ACFTA) menjadi potensi dan peluang untuk meningkatkan perekonomian nasional dan daerah. Peluang akses pasar untuk produk-produk Sumatera Barat terbuka cukup besar terutama ke negara Asean dan China. Untuk itu, upaya pemanfaatan pasar global tersebut guna percepatan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumatera Baratperlu diiringi dengan peningkatan daya saing daerah yang ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur dan sumberdaya manusia yang berkualitas serta tingkat keamanan yang tinggi. Infrastruktur yang tersedia saat ini belum dapat mengimbangi kebutuhan dan tuntutan masyarakat dan dunia usaha, sehingga masyarakat dan dunia usaha menanggung beban yang tinggi dalam penyediaan produksi dan mobilisasi sumberdaya ke dalam dan ke luar Sumatera Barat.

Selanjutnya peningkatan daya saing daerah tidak hanya menyangkut pembenahan infrastruktur, tetapi juga pembenahan pada sumberdaya manusia, kelembagaan dan perilaku masyarakat dalam merespon program dan kegiatan pembangunan. Oleh sebab itu peningkatan daya saing daerah perlu dirumuskan sedemikian rupa dengan mengintegrasikan dengan pembangunan bidang-bidang lainnya.

4.2.13. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Peningkatan kualitas lingkungan hidup dijadikan isu pembangunan agar pembangunan yang akan dilaksanakan berbasis daya dukung dan daya tampung. Fakta selama ini menunjukkan bahwa kegiatan pembangunan dan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat memberi tekanan terhadap kualitas udara, air (sungai, danau), kawasan hutan, alih fungsi lahanterutama lahan sawah menjadi peruntukan lain, berkurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan meningkatnya pencemaran akibat berbagai macam limbah.

Pembangunan dan pengembangan berbagai sektor yang akan dilaksanakan di masa mendatang harus dipastikan tidak merusak dan tidak berdampak negatif terhadap lingkungan. Guna mewujudkan hal ini, konsep pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau (*green economy*), perencanaan tata ruang perlu menjadi acuan semua pihak-pihak yang berkepentingan.

4.3. KETERKAITAN DENGAN DOKUMEN LAINNYA

Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan lainnya, maka arah kebijakan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 disusun dengan berpedoman dan memperhatikan beberapa dokumen perencanaan sebagai berikut:

1. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032

A. Struktur Ruang

a. Rencana Sistem Perkotaan

Rencana pengembangan sistem perkotaan di Provinsi Sumatera Barat dimaksudkan untuk menggambarkan peran dan fungsi setiap kota dalam pengembangan wilayah secara keseluruhan dalam lingkup Provinsi Sumatera Barat. Rencana Sistem perkotaan terdiri dari:

- 1) Rencana Pusat Kegiatan, meliputi : Rencana pengembangan pusat kegiatan di Provinsi Sumatera Barat juga mengacu pada kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang meliputi Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Untuk Pusat Kegiatan Wilayah yang dipromosikan oleh provinsi di sebut PKWp.
- 2) Rencana Pengembangan Kawasan Metropolitan Padang, meliputi : Kota Padang dan sekitarnya yang meliputi wilayah Lubuk Alung (Kabupaten Padang Pariaman), Kota Pariaman, Arosuka (Kabupaten Solok), Kota Solok dan Painan (Kabupaten Pesisir Selatan) dapat dikembangkan sebagai Kota Metropolitan dengan peran masing-masing sebagai berikut :
 - a. Kota Padang sebagai kawasan perkotaan inti,
 - b. Lubuk Alung, Kota Pariaman, Kota Solok, Aro Suka dan Painan sebagai kawasan perkotaan satelit
 - c. Kota-kota kecamatan selain yang berfungsi sebagai ibukota kabupaten berfungsi sebagai kota kecil

b. Rencana Sistem Jaringan Transportasi

Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi Provinsi Sumatera Barat dimaksudkan untuk meningkatkan keterkaitan kebutuhan dan peningkatan transportasi antar wilayah dan antar kawasan permukiman yang dikembangkan dalam ruang Provinsi Sumatera Barat, serta keterkaitannya dengan sistem jaringan transportasi nasional. Selain itu pengembangannya juga untuk mewujudkan keselarasan dan keterpaduan antar pusat permukiman provinsi ini dengan sektor kegiatan ekonomi daerah. Pengembangan sistem transportasi dilakukan secara terintegrasi yang meliputi rencana pengembangan transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara.

c. Rencana Sistem Jaringan Energi

Pengembangan jaringan prasarana energi di Provinsi Sumatera Barat terutama jaringan prasarana energi listrik yang meliputi prasarana pembangkit dan jaringan. Penyediaan energi listrik di wilayah Sumatera Barat untuk jangka pendek, jika dilihat dari pembangkit yang ada sudah melebihi kapasitas dan digunakan untuk kebutuhan energi listrik di provinsi lain yang tergabung dalam sistem jaringan interkoneksi. Sampai tahun 2032 diperkirakan kebutuhan energi listrik di Provinsi Sumatera Barat mencapai 7.300 GWh. Kebutuhan tenaga listrik di Sumatera Barat meningkat setiap tahunnya sebesar 6,3%.

Arahan pengembangan jaringan energi listrik mencakup kebijakan pengembangan sistem prasarana listrik/energi untuk meningkatkan ketersediaan energi/listrik bagi kegiatan permukiman dan kegiatan non permukiman. Prasarana energi listrik dikembangkan untuk mendukung sistem aktivitas pada sentra-sentra kegiatan dan produksi. Oleh karena itu, pengembangannya dilakukan melalui pengembangan kelistrikan yang mampu mendukung kegiatan perekonomian, pengembangan kawasan andalan, kawasan tertentu, dan kawasan tertinggal, melalui pengembangan jaringan kawat saluran udara, kabel bawah tanah, dan/atau kabel bawah laut serta pengembangan sistem interkoneksi Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel).

d. Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi

Telekomunikasi merupakan prasarana penting dalam mendukung kegiatan sosioekonomi masyarakat, kegiatan pemerintahan serta kegiatan lainnya. Penyediaan telepon sampai saat ini masih didominasi oleh PT. Telkom Tbk melalui penyediaan beberapa sentral telepon otomatis (STO) yang tersebar pada seluruh kota dan kabupaten di provinsi ini.

Prasarana telekomunikasi yang dikembangkan, meliputi sistem kabel, sistem seluler, dan sistem satelit. Prasarana telekomunikasi dikembangkan hingga ke pelosok wilayah yang belum terjangkau sarana prasarana telekomunikasi, sehingga kebutuhan telekomunikasi dapat dipenuhi.

e. Rencana Sistem Jaringan Sumberdaya Air

Provinsi Sumatera Barat memiliki 606 buah sungai yang mengalir ke pantai barat dan timur provinsi ini. Sungai-sungai yang bermuara di pantai barat tidak membentuk sistem jaringan sungai namun secara individual bermuara ke Samudera Hindia. Sedangkan sungai-sungai yang bermuara di pantai timur membentuk sistem jaringan Daerah Aliran Sungai/Wilayah Sungai (WS) yaitu : WS Rokan, WS Kampar, dan WS Indragiri yang mengalir ke wilayah Provinsi Riau, sedang WS Batang Hari mengalir ke wilayah Provinsi Jambi. Selain itu juga terdapat empat danau besar. Rencana pengembangan sumberdaya air di Provinsi Sumatera Barat hingga tahun 2032 dilakukan melalui upaya konservasi dan pengelolaan secara terpadu terutama bagi aliran sungai lintas provinsi secara sinergi dengan wilayah provinsi lain yang terkait.

f. Rencana Sistem Prasarana Lingkungan

Prasarana lingkungan ini digunakan antar wilayah melalui berbagai mekanisme kerjasama. Pengembangan sistem prasarana lingkungan ini sebagai upaya bersama dalam menghadapi dampak lingkungan, maka perlu dikembangkan lokasi yang digunakan bersama antar kabupaten/kota dengan sistem pengelolaan yang berwawasan lingkungan. Prasarana lingkungan terdiri atas :

- 1) Tempat pembuangan akhir (TPA) terpadu (regional),
- 2) Tempat pengolahan dan atau pengelolaan limbah industri B3 dan non B3,
- 3) Sistem drainase,
- 4) Sistem pengelolaan air minum (SPAM),
- 5) Sarana dan prasarana lingkungan yang sifatnya menunjang kehidupan masyarakat,

B. Pola Ruang

Rencana pola ruang meliputi:

a. Kawasan Lindung

Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan. Pengelolaan kawasan lindung secara baik dan benar, dapat mengurangi tingkat

bahaya bencana alam yang ditimbulkan seperti banjir, longsor, pendangkalan waduk, kekeringan, dan sebagainya. Selain bencana alam kerusakan kawasan lindung juga menimbulkan bencana sosial akibat hilangnya aset hidup yang seharusnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Rencana pengembangan kawasan lindung meliputi kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya; kawasan perlindungan setempat; kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; kawasan rawan bencana alam; kawasan lindung geologi; dan kawasan lindung lainnya.

b. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Penetapan kawasan budidaya dimaksudkan untuk memudahkan pengelolaan, dan pemantauan kegiatan termasuk penyediaan prasarana dan sarana maupun penanganan dampak lingkungan akibat kegiatan budidaya. Penetapan kawasan budidaya di Provinsi Sumatera Barat hingga tahun 2032 selain didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang RTRWN, juga hasil kesepakatan antar wilayah pada Ditjen Penataan Ruang yang menyangkut klasifikasi pemanfaatan ruang kabupaten dan provinsi. Luas keseluruhan kawasan budidaya di Provinsi Sumatera Barat untuk wilayah darat mencapai 2.463.358,62 Ha atau 58,24 % dari luas wilayah administrasi

Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya terdiri dari kawasan peruntukan hutan produksi, hutan rakyat, pertanian, perikanan, pertambangan, industri, pariwisata, permukiman, dan peruntukan lainnya.

C. Kawasan Strategis Provinsi

Kawasan strategis merupakan kawasan yang diprioritaskan pengembangannya. Kawasan strategis ini terdiri atas :

- a. Kawasan strategis yang didasari oleh penetapan melalui PP 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), di Sumatera Barat terdapat 4 Kawasan Strategis Nasional yang meliputi:
 - 1) Taman Nasional Kerinci Seblat dilihat dari sisi lingkungan hidup,
 - 2) Bukit Batabuh dilihat dari sisi lingkungan hidup,
 - 3) Koto Tabang dilihat dari sisi pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi,
 - 4) Sibaru-baru dan Sinyanyau dilihat dari sisi pertahanan dan keamanan.
- b. Kawasan strategis merupakan hasil perumusan dan kesepakatan Pemerintah Provinsi. Perwujudan Kawasan Strategis provinsi dilihat dari :
 - 1) Pertumbuhan Ekonomi yang terdapat 10 Kawasan Strategis Provinsi Sumatera Barat,
 - 2) Sosial Budaya yang terdapat 1 Kawasan Strategis Provinsi Sumatera Barat, yaitu Batusangkar,
 - 3) Fungsi dan daya dukung lingkungan terdapat di 4 Kawasan Strategis Provinsi Sumatera Barat.

2. Pembangunan Daerah Tahap III (2016-2021) dalam RPJPD Sumbar 2005-2025

A. Visi RPJPD 2005-2025

Visi pembangunan jangka panjang daerah pada dasarnya merupakan kondisi objektif yang diinginkan dan dapat dicapai oleh masyarakat Provinsi Sumatera Barat pada 20 tahun mendatang. Kondisi yang diinginkan tersebut ditetapkan dengan mengacu pada visi dan misi Pemerintah Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025. Disamping itu, visi tersebut juga ditetapkan dengan memperhatikan keadaan umum daerah dewasa ini, prediksi untuk 20 tahun mendatang dan keinginan, aspirasi serta cita-cita yang berkembang dalam masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, visi ini sebenarnya adalah merupakan kondisi realistis yang diharapkan akan dapat dicapai Sumatera Barat.

Memperhatikan kondisi umum daerah Provinsi Sumatera Barat, prediksi 20 tahun mendatang dan berdasarkan hasil penjarangan aspirasi masyarakat, maka visi pembangunan jangka panjang Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2025 mendatang dapat diformulasikan secara ringkas sebagai berikut:

MENJADI PROVINSI TERKEMUKA BERBASIS SUMBERDAYA MANUSIA YANG AGAMAS PADA TAHUN 2025

B. Misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Misi pada dasarnya adalah merupakan kondisi yang harus dilaksanakan agar visi yang telah ditetapkan di atas dapat diwujudkan dengan memperhatikan kondisi objektif yang terdapat di daerah dewasa ini. Dengan kata lain misi menunjukkan beberapa upaya utama pembangunan yang perlu dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan semula. Misi pembangunan daerah dalam RPJPD Provinsi Sumatera Barat sampai dengan tahun 2025 ditetapkan sebagai berikut:

1. Mewujudkan kehidupan agama dan budaya berdasarkan filosofi "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah",
2. Mewujudkan sistem hukum dan tata-pemerintahan yang baik,
3. Mewujudkan sumberdaya insani yang berkualitas, amanah dan berdaya saing tinggi,
4. Mewujudkan usaha ekonomi produktif dan mampu bersaing di dunia global,
5. Mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang baik dengan pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan.

Misi untuk mewujudkan kehidupan beragama dan berbudaya yang berdasarkan falsafah: "*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*" adalah landasan utama kehidupan masyarakat Minangkabau, yang dijadikan sebagai persyaratan utama untuk dapat mewujudkan masyarakat yang agamais dan berbudaya. Landasan filosofis ini sudah dimiliki sejak lama, sehingga kedepan perlu terus dipelihara dan diterapkan dalam tata kehidupan masyarakat. Ciri-ciri tata kehidupan yang demikian antara lain adalah taat beragama, berakhlak mulia, jujur, peduli sesama manusia, menerapkan tata kehidupan beragama dan berbudaya yang baik, rukun dengan agama lain, serta peduli terhadap masa depan dan keselamatan masyarakat dan bumi ciptaan Tuhan.

Misi untuk mewujudkan sistem hukum dan tata pemerintahan yang baik merupakan persyaratan yang tidak kalah pentingnya untuk dapat mendorong proses pembangunan daerah secara cepat dan merata. Hal ini sesuai dengan harapan seluruh masyarakat. Dalam kondisi demikian, tata pemerintahan berjalan secara demokratis, taat hukum, transparan, menerapkan sistem perencanaan, penganggaran dan pengawasan secara terpadu yang

berlandaskan pada partisipasi masyarakat serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dengan cara demikian diharapkan akan dapat diwujudkan pola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, bersih dan berwibawa serta didukung oleh partisipasi aktif masyarakat secara keseluruhan.

Misi untuk mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas, amanah dan berdaya saing merupakan prasyarat mutlak untuk dapat mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera. Sumberdaya manusia yang berkualitas tersebut akan dapat diwujudkan melalui tiga pilar utama yaitu pendidikan yang bermutu tinggi disemua strata, pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dan derajat kesehatan yang tinggi dan merata keseluruh pelosok daerah dan lapisan masyarakat. Termasuk dalam kualitas sumberdaya manusia ini adalah adanya disiplin dan etos kerja yang baik sehingga tingkat efisiensi dan produktivitas tenaga kerja menjadi cukup tinggi serta terdapatnya kesetaraan gender.

Misi untuk mewujudkan usaha ekonomi yang produktif dan efisien serta mampu bersaing di dunia global merupakan unsur penting untuk dapat mendorong kemajuan ekonomi dan kemakmuran masyarakat, terutama dalam era globalisasi dewasa ini. Kondisi tersebut diwujudkan melalui pengembangan ekonomi agribisnis (agroindustri) dan industri jasa. Usaha ekonomi yang demikian akan dapat diwujudkan dengan penciptaan persaingan yang sehat dalam dunia usaha, mencegah timbulnya monopoli dan monopsoni serta ketidakadilan dalam berusaha, mengembangkan kewirausahaan daerah, menyediakan prasarana dan sarana pembangunan yang berkualitas secara merata keseluruh pelosok daerah dan mewujudkan kepastian hukum dan iklim investasi yang kondusif bagi para investor.

Misi untuk mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang baik dengan pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan juga tidak kalah pentingnya untuk dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Kualitas lingkungan hidup yang baik dan menyenangkan akan dapat diwujudkan melalui pencegahan polusi udara, pengotoran air, mengupayakan lingkungan yang bersih dan segar, serta menerapkan rencana tata-ruang secara konsekuen. Termasuk dalam hal ini adalah pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan yang dapat diupayakan dengan memelihara kawasan hutan lindung, mencegah eksploitasi sumberdaya alam secara berlebihan, memelihara cadangan air, memelihara biota laut dan meningkatkan konservasi alam serta reboisasi hutan secara teratur dan terus menerus.

Selanjutnya penekanan dan skala prioritas pembangunan pada RPJMD Tahap 3 (2016-2021) ini secara umum ditujukan pada skala prioritas pembangunan untuk pemantapan landasan pembangunan secara menyeluruh dengan penekanan kepada peningkatan daya saing produk dan hubungan regional terutama dengan provinsi tetangga. Daya saing produk Sumatera Barat semakin kuat karena meningkatnya produktifitas, kualitas produk dan efisiensi usaha akibat dari penggunaan teknologi maju sehingga kesejahteraan petani, peternak dan nelayan semakin membaik. Dalam waktu bersamaan, sektor pariwisata dan industri kecil lainnya dapat berkembang dengan lebih baik karena kondisi sadar wisata sudah akan semakin kuat jika masyarakatnya sudah terlepas dari kemiskinan dan kebodohan.

a. Pembangunan Agama dan Budaya

1. Pendalaman dan pencerahan pemahaman keagamaan,
2. Pengembangan sekolah dengan sistem *boarding school* pada setiap Kabupaten/Kota menuju Sumatera Barat sebagai pusat pendidikan Islami,
3. Peningkatan kesalehan sosial dan pengembangan kelembagaan yang akan mengkoordinir berbagai sumber dana kederewanan akan memanfaatkan meningkatkan perekonomian kaum duafa dan pengembangan keagamaan,

4. Peningkatan kualitas dan perbaikan manajemen, kurikulum pesantren dan sekolah agama lainnya,
 5. Pemanfaatan tanah ulayat sesuai potensi ekonomi dan sistem pengelolaan yang mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi serta mampu menjaga keberadaan tanah ulayat,
- b. Pembangunan Pemerintahan dan Hukum
1. Peningkatan sinergitas antara pelaku pembangunan melalui keterpaduan program provinsi, kabupaten dan kota,
 2. Peningkatan tata pemerintahan yang partisipatif, akuntabel dan transparan,
 3. Peningkatan penegakan hukum yang berkeadilan dan demokratis,
 4. Peningkatan pelayanan publik yang prima,
 5. Pengembangan prakarsa inovatif dan kreatif dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat,
- c. Pembangunan Sumberdaya Manusia
1. Peningkatan kualitas pendidikan yang tinggi dan dilandasi moral agama,
 2. Peningkatan derajat kesehatan dan gizi yang tinggi,
 3. Peningkatan kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- d. Pembangunan Ekonomi
1. Peningkatan kegiatan pertanian modern dan agribisnis maju dengan pendekatan wilayah,
 2. Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pemanfaatan potensi perikanan laut,
 3. Peningkatan kegiatan jasa yang mampu bersaing melalui teknologi yang maju dan modern,
 4. Peningkatan Sumatera Barat sebagai daerah tujuan wisata nasional dan internasional,
 5. Peningkatan Sumatera Barat sebagai pusat pertumbuhan dan pintu gerbang pantai barat Sumatera bagian barat.
- e. Pembangunan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
1. Pelaksanaan program penataan ruang yang semakin mantap,
 2. Pengawasan kawasan konservasi alam yang telah ditetapkan,
 3. Perwujudan tata kelola lingkungan yang baik,
 4. Perwujudan masyarakat yang sadar lingkungan.

3. Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Prioritas Pembangunan Nasional yang dirumuskan ke dalam 3 Dimensi Pembangunan yaitu sebagai berikut :

1. Dimensi Pembangunan Manusia, terdiri dari :
 - a) Pendidikan,
 - b) Kesehatan,
 - c) Perumahan,
 - d) Mental / Karakter.
2. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan terdiri dari :
 - a) Kedaulatan Pangan,
 - b) Kedaulatan Energi dan Ketenagalistrikan,
 - c) Kemaritiman dan Kelautan,
 - d) Pariwisata dan Industri.

3. Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan, terdiri dari :
 - a) Antar Kelompok Pendapatan,
 - b) Antar Wilayah, Desa, pembangunan luar jawa dan kawasan timur.

4. RPJMD Provinsi Tetangga

Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan pembangunan tidak dapat berdiri sendiri dan perlu memperhatikan keselarasan pembangunan dengan Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Jambi dan Provinsi Bengkulu yang bertetangga langsung dengan wilayah Sumatera Barat. Guna menjamin keselarasan tersebut perlu memperhatikan visi dan misi keempat provinsi tetangga tersebut:

1. RPJMD Provinsi Riau

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019, dengan Visi Terwujudnya Provinsi Riau yang maju, masyarakat sejahtera, berbudaya melayu dan berdaya saing tinggi, menurunnya kemiskinan, tersedianya lapangan kerja serta pemantapan aparatur, dengan Misi 1) Meningkatkan pembangunan infrastruktur, 2) Meningkatkan pelayanan pendidikan, 3) Meningkatkan pelayanan kesehatan, 4) Menurunkan tingkat kemiskinan, 5) Mewujudkan pemerintahan yang handal dan terpercaya, serta pemantapan kehidupan politik, 6) Pembangunan masyarakat yang berbudaya melayu, beriman dan bertakwa, 7) Memperkuat pembangunan pertanian dan perkebunan, 8) Meningkatkan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup serta pariwisata, 9) Meningkatkan peran swasta dalam pembangunan.

2. RPJMD Provinsi Sumatera Utara

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018, dengan Visi Menjadi provinsi yang berdaya saing menuju Sumatera Utara sejahtera, Misi 1) Membangun sumberdaya manusia yang memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara, religius dan berkompetensi tinggi. (2) Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi melalui kerjasama antar daerah, swasta, regional dan international. (3) Meningkatkan kualitas standar hidup layak kesetaraan dan keadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah. (4) Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumberdaya alam lestari berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. (5) Reformasi birokrasi berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih (good governance dan clean governance).

3. RPJMD Provinsi Jambi

Rancangan RPJMD Provinsi Jambi tahun 2016-2021 masih dalam proses pembahasan, rumusan Visi dalam rancangan tersebut adalah Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil dan Sejahtera Jambi Tuntas 2021, dengan Misi Pembangunan 1) Meningkatkan tatakelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel, dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik, 2) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamais dan berkesetaraan gender, 3) Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat beragama dan kesadaran hukum masyarakat, 4) Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi, 5) Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum,

pengelolaan energi dan sumberdaya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan, 6) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

4. RPJMD Provinsi Bengkulu

Rancangan RPJMD Provinsi Bengkulu tahun 2016-2021 masih dalam proses pembahasan, rumusan Visi dalam rancangan tersebut adalah Terwujudnya Bengkulu Yang Maju, Sejahtera, Bermartabat, Dan Berdaya Saing Tinggi, dengan misi: 1) Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih melalui reformasi tata kelola pemerintahan. 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesejahteraan sosial dan layanan dasar dibidang pendidikan, kesehatan serta perekonomian rakyat berbasis keunggulan lokal. 3) Meningkatkan dan memantapkan kapasitas infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis. 4) Mewujudkan pola pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan. 5) Mewujudkan pembangunan kemaritiman yang integratif. 6) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 7) Meningkatkan kompetensi kepemudaan dan prestasi keolahragaan. 8) Mewujudkan masyarakat Bengkulu yang agamis, berbudaya, dan demokratis

Berdasarkan visi dan misi tersebut maka arah kebijakan pembangunan Sumatera Barat sudah sejalan dan selaras dengan tujuan dan sasaran pembangunan empat provinsi tetangga. Dalam implementasinya program pembangunan yang dilakukan terutama pada daerah perbatasan perlu saling mendukung dan melengkapi didalam pencapaian visi dan pelaksanaan misi di masing-masing provinsi yang secara umum diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Dengan demikian koordinasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup ke empat provinsi perlu ditingkatkan dimasa yang akan datang dan dilakukan penyesuaian sesuai dengan arah kebijakan pengembangan wilayah perbatasan Sumatera Barat.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. VISI RPJMD 2016-2021

Visi Gubernur Sumatera Barat merupakan gambaran kondisi masa depan yang di cita-citakan dan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu tahun 2016-2021. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka visi tersebut dapat disebut sebagai Visi Provinsi Sumatera Barat yang akan diwujudkan pada akhir tahun 2021 untuk menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah bersama pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya. Misi Gubernur Sumatera Barat pada dasarnya merupakan upaya umum yang ditetapkan bersama masyarakat untuk dapat mewujudkan visi pembangunan daerah. Visi dan Misi menjadi gambaran otentik Provinsi Sumatera Barat dalam 5 tahun (lima) tahun mendatang pada kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk periode RPJMD Tahun 2016-2021.

Sesuai dengan visi gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 adalah:

TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT YANG MADANI DAN SEJAHTERA

Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Provinsi Sumatera Barat dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Provinsi Sumatera Barat, memperhatikan RPJMN 2015-2019, dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2005-2025. Untuk memahami Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat tersebut jelaskan pengertian sebagai berikut:

Madani

Sumatera Barat *Madani* adalah suatu masyarakat yang ber peradaban tinggi dan maju yang berbasis pada nilai-nilai, norma hukum, moral yang ditopang oleh keimanan. Masyarakat madani menghormati pluralistis, bersikap terbuka dan demokratis serta selalu bergotong royong menjaga kedaulatan negara. Dengan demikian, masyarakat madani tersebut pada dasarnya adalah masyarakat yang agamais yang ditandai oleh adanya keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat, jasmani dan rohani, lahir dan batin serta material dan sipiritual

Sejahtera

Sumatera Barat Sejahtera merupakan suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik, lingkungan hidup dan sumber daya alam, berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, mempunyai akses terhadap informasi serta hiburan; terciptanya hubungan antar masyarakat yang dinamis, saling menghargai, bantu membantu, saling pengertian, serta tersedianya prasarana dan sarana publik terkait dengan infrastruktur pelayanan publik, transparansi dan teknologi yang mencukupi, nyaman dan terpelihara dengan baik.

Pemenuhan kebutuhan dasar rakyat bersifat dinamis, dari waktu ke waktu akan mengalami perubahan sesuai dengan aspirasi dan tuntutan yang berkembang di masyarakat. Untuk itu sarana dan prasarana dalam usaha memenuhi kebutuhan dasar harus terus menerus mengikuti dinamika perubahan, serta dibuka ruang yang seluas-luasnya untuk mencapai kemajuan dan perkembangan bagi kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

5.2. MISI

Misi pada dasarnya merupakan upaya umum yang ditetapkan dan dilaksanakan bersama masyarakat untuk dapat mewujudkan visi pembangunan daerah. Berdasarkan pengertian ini maka misi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah" Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah".

Misi ini diarahkan untuk perubahan sikap mental yang lebih baik sesuai nilai-nilai agama, adat, budaya dan kearifan lokal ditengah kehidupan masyarakat, peningkatan kesalehan sosial, penguatan kelembagaan agama, adat dan budaya.

2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional.

Misi ini diarahkan untuk membangun tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

3. Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, dan berkualitas tinggi

Misi ini diarahkan untuk membangun sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, berkualitas tinggi, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dan berdaya saing dengan berlandaskan kesetaraan gender.

4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah;

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang lebih tinggi dan merata dengan mengembangkan kegiatan ekonomi yang lebih produktif berbasis kerakyatan, mendorong sektor unggulan daerah dan memanfaatkan sumberdaya lokal untuk menghasilkan produk yang berdaya saing.

5. Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.

Misi ini diarahkan untuk penyediaan infrastruktur bagi peningkatan kegiatan ekonomi, pengembangan wilayah dan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan sesuai dengan tata ruang daerah.

5.3. TUJUAN DAN SASARAN

5.3.1 Tujuan Umum

Tujuan pembangunan secara umum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tergambar dari peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan derajat kesehatan, tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan merata, penurunan kesenjangan pembangunan antar wilayah dan kemiskinan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, sasaran pembangunan ekonomi secara makro dalam RPJMD Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 dapat dikemukakan melalui proyeksi sejumlah indikator ekonomi makro dan indikator kesejahteraan sosial. Untuk indikator ekonomi seperti terlihat pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1.
Proyeksi Perkembangan Ekonomi Sumatera Barat Tahun 2016-2021

NO.	Indikator	Baseline (2015)	Proyeksi					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,41	5,58	6,16	6,26	6,35	6,44	6,54
2	PDRB harga Konstan (Rp Triliun)	140,53	148,22	157,68	167,80	178,64	190,24	202,68
3	PDRB harga Berlaku (Rp Triliun)	178,81	191,57	205,24	219,89	235,58	252,40	270,41
4	PDRB/Kapita (Rp juta)	34,40	36,41	38,54	40,81	43,24	45,83	48,59
5	Tingkat Inflasi (y on y)	1,08	5-6	5-6	5-6	5-6	5-6	5-6
6	Investasi (Rp triliun)	40,20	42,55	45,62	48,92	52,45	56,24	60,30
7	Struktur Ekonomi Menurut Permintaan (%):							
	1. Konsumsi Masyarakat	54,01	54,23	54,41	54,55	54,68	54,78	54,86
	2. Konsumsi Pemerintah	13,72	13,78	13,83	13,88	13,92	13,95	13,98
	3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	31,22	31,36	31,49	31,59	31,68	31,76	31,84
	4. Ekspor	10,04	10,09	10,14	10,18	10,21	10,24	10,27
	5. Impor	2,31	1,87	1,52	1,23	0,99	0,80	0,71
	6. Perubahan inventori	-11,3	-11,33	-11,39	-11,43	-11,48	-11,53	-11,66
	Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Struktur Ekonomi Menurut Penawaran (%):							
	1. Pertanian	24,84	23,54	23,25	22,95	22,65	22,35	22,04
	2. Industri Pengolahan	10,97	11,19	11,42	11,65	11,87	12,10	12,33
	3. Perdagangan Besar & Eceran	14,68	15,53	15,60	15,67	15,73	15,79	15,84
	3. Lainnya	49,51	49,74	49,73	49,73	49,75	49,76	49,79
	Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	ICOR	3,35	3,15	3,10	3,11	3,14	3,16	3,18
10	Penduduk (ribu jiwa)	5.196	5.261	5.325	5.387	5.448	5.507	5.565

Catatan: Struktur ekonomi menurut penawaran berdasarkan harga konstan

Dari Tabel 5.1 dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 2016 sebesar 5,58% dan pada tahun 2021 sebesar 6,54%. Untuk mencapai pertumbuhan tersebut diperlukan investasi sebesar Rp 40,26 triliun pada tahun 2016 dan Rp. 57,29 triliun pada tahun 2021. Investasi tersebut diharapkan bersumber dari investasi pemerintah sebesar 25%, investasi swasta 45% dan sisanya dari investasi masyarakat. Selain itu, jumlah penduduk Sumatera Barat Tahun 2021 sebesar 5.565 ribu jiwa.

Selanjutnya untuk indikator kesejahteraan sosial dapat diperlihatkan pada Tabel 5.2. Ketiga indikator ini sudah dapat menggambarkan kesejahteraan sosial masyarakat.

Tabel 5.2.
Proyeksi Perkembangan Kesejahteraan Sosial Sumatera Barat Tahun 2016-2021

Indikator	Baseline	Proyeksi					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Indeks Pembangunan Manusia	69,98	70,41	70,84	71,27	71,70	72,13	72,56
2. Angka Harapan Hidup (th)	68,66	68,79	68,92	69,05	69,18	69,31	69,44
3. Rata-Rata Lama Sekolah (th)	8,42	8,46	8,50	8,54	8,58	8,62	8,66
4. Tingkat Pengangguran (%)	6,89	6,68	6,46	6,25	6,03	5,82	5,60
5. Penduduk Miskin (%)	6,71	6,43	6,15	5,87	5,59	5,31	5,09

Pembangunan ekonomi diarahkan kepada pembangunan inklusif yang menitikberatkan pada pertumbuhan tanpa disparitas inter-regional serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk melihat gambaran pembangunan ekonomi per kabupaten/kota dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi serta Produk Domestik Regional Bruto seperti pada Tabel 5.3.

Tabel 5.3
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota se Sumatera Barat (%)

NO.	KABUPATEN/KOTA	PROYEKSI					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Kabupaten :						
1.	Kep. Mentawai	5,25	5,31	5,43	5,73	5,81	6,01
2.	Pesisir Selatan	6,08	6,27	6,46	6,64	6,82	7,01
3.	Solok	5,00	5,20	5,50	5,70	5,90	6,20
4.	Sijunjung	5,98	6,02	6,13	6,24	6,35	6,46
5.	Tanah Datar	5,98	6,08	6,18	6,28	6,38	6,38
6.	Padang Pariaman	5,36	5,38	6,00	6,02	6,04	6,06
7.	Agam	5,82	5,64	5,81	6,02	6,32	6,68
8.	Lima Puluh Kota	6,02	6,08	6,14	6,20	6,26	6,33
9.	Pasaman	5,40	5,60	5,70	5,80	6,00	6,10
10.	Solok Selatan	5,20	5,74	5,83	5,92	6,00	6,09
11.	Dharmas Raya	6,85	6,50	6,61	6,69	6,72	6,85
12.	Pasaman Barat	5,67	5,76	5,85	5,94	6,03	6,12
	Kota :						
13.	Padang	6,80	6,98	7,02	7,16	7,20	7,26
14.	Solok	6,62	6,65	6,67	6,70	6,72	6,74
15.	Sawah Lunto	5,60	6,18	6,28	6,38	6,47	6,57
16.	Padang Panjang	6,60	6,70	6,80	6,88	6,94	6,98
17.	Bukittinggi	6,40	6,50	6,80	7,00	7,40	7,70
18.	Payakumbuh	6,90	6,95	6,98	7,03	7,09	7,12
19.	Pariaman	6,65	6,83	7,00	7,08	7,11	7,17
	SUMBAR	5,58	6,16	6,26	6,35	6,44	6,54

Selanjutnya proyeksi PDRB per kapita Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun 2016-2021 atas dasar harga berlaku dapat dilihat pada Tabel 5.4.

Tabel 5.4.
Proyeksi PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun 2016-2021 (Rp.Juta)

No.	Kabupaten/Kota	PROYEKSI (Rp. Juta)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Kabupaten :						
1	Kep. Mentawai						
2	Pesisir Selatan	24,12	26,25	28,16	31,15	33,25	35,05
3	Solok	27,67	28,31	28,97	29,65	39,36	31,08
4	Sijunjung	32,96	35,57	38,77	40,71	42,74	44,88
5	Tanah Datar	32,77	36,30	40,21	44,54	49,33	54,64
6	Padang Pariaman	15,85	17,49	19,18	24,10	23,21	25,53
7	Agam	24,00	25,00	25,50	26,00	27,00	28,00
8	Lima Puluh Kota	25,69	27,17	28,39	30,12	31,64	33,15
9	Pasaman	24,77	27,25	29,97	32,97	36,27	39,90
10	Solok Selatan	21,48	22,74	23,32	24,43	25,61	26,93
11	Dharmas Raya	38,77	41,91	45,23	48,76	52,50	56,49
12	Pasaman Barat	29,22	31,87	34,75	37,90	41,34	45,08
	Kota :						
13	Padang	44,60	47,43	49,82	52,12	54,96	57,26
14	Solok	44,53	45,82	47,16	48,53	49,94	51,39
15	Sawah Lunto	32,06	34,08	36,09	38,21	40,43	42,16
16	Padang Panjang	33,32	36,47	40,06	44,03	47,83	50,36
17	Bukittinggi	41,49	43,30	45,20	47,20	49,30	51,50

No.	Kabupaten/Kota	PROYEKSI (Rp. Juta)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
18	Payakumbuh	29,82	33,00	36,41	39,29	42,32	45,08
19	Pariaman	33,61	35,74	37,87	39,92	42,04	44,63
	SUMBAR	36,41	38,54	40,81	43,24	45,83	48,59

Pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan berkelanjutan, diharapkan akan dapat meningkatkan kegiatan pembangunan sehingga membuka peluang kesempatan kerja dan mengurangi penduduk miskin. Terkait dengan proyeksi pembangunan ekonomi yang diharapkan semakin membaik, maka tingkat kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten/Kota diharapkan akan semakin menurun. Proyeksi tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota seperti pada Tabel 5.5.

Tabel 5.5.
Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun 2016-2021 (%)

No	KAB/KOTA/SUMBAR/ NASIONAL	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Kabupaten :						
1	Kep. Mentawai	14,36	14,06	13,76	13,46	13,16	12,86
2	Pesisir Selatan	7,28	7,01	6,74	6,47	6,20	5,93
3	Solok	8,99	8,72	8,45	8,18	7,91	7,64
4	Sijunjung	7,20	6,93	6,66	6,39	6,12	5,85
5	Tanah Datar	4,75	4,48	4,21	3,94	3,67	3,40
6	Padang Pariaman	7,85	7,58	7,31	7,04	6,77	6,50
7	Agam	6,48	6,21	5,94	5,67	5,40	5,13
8	Lima Puluh Kota	6,94	6,67	6,40	6,13	5,86	5,59
9	Pasaman	7,06	6,79	6,52	6,25	5,98	5,71
10	Solok Selatan	6,79	6,52	6,25	5,98	5,71	5,44
11	Dharmas Raya	6,43	6,16	5,89	5,62	5,35	5,08
12	Pasaman Barat	6,54	6,27	6,00	5,73	5,46	5,19
	Kota :						
13	Padang	4,14	3,93	3,72	3,51	3,30	3,09
14	Solok	3,74	3,53	3,32	3,11	2,90	2,69
15	Sawah Lunto	1,91	1,74	1,57	1,40	1,23	1,06
16	Padang Panjang	5,86	5,59	5,32	5,05	4,78	4,51
17	Bukittinggi	4,42	4,15	3,88	3,61	3,34	3,07
18	Payakumbuh	6,47	6,20	5,93	5,66	5,39	5,12
19	Pariaman	4,58	4,31	4,04	3,77	3,50	3,23
	SUMATERA BARAT	6,43	6,15	5,87	5,59	5,31	5,09
	NASIONAL	9,0-10,0	8,5-9,5	7,5-8,5	7,0-8,0		

Sedangkan untuk proyeksi angka pengangguran di kabupaten/kota se Sumatera Barat dapat dilihat pada Tabek 5.6.

Tabel. 5.6.
Proyeksi Pengangguran Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun 2016-2021 (%)

No	KAB/KOTA/SUMBAR/ NASIONAL	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Kabupaten :						
1	Kep. Mentawai	1,20	1,20	1,15	1,10	1,05	1,00
2	Pesisir Selatan	11,29	11,29	10,89	10,49	10,09	9,69
3	Solok	3,82	3,82	3,67	3,52	3,37	3,22

No	KAB/KOTA/SUMBAR/ NASIONAL	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	Sijunjung	4,11	4,11	3,96	3,81	3,66	3,51
5	Tanah Datar	4,31	4,31	4,16	4,01	3,86	3,71
6	Padang Pariaman	5,65	5,65	5,50	5,35	5,20	5,05
7	Agam	5,90	5,90	5,75	5,60	5,45	5,30
8	Lima Puluh Kota	3,63	3,63	3,48	3,33	3,18	3,03
9	Pasaman	4,91	4,91	4,76	4,61	4,46	4,31
10	Solok Selatan	6,15	6,15	6,00	5,85	5,70	5,55
11	Dharmas Raya	3,36	3,36	3,21	3,06	2,91	2,76
12	Pasaman Barat	3,64	3,64	3,49	3,34	3,19	3,04
	Kota :						
13	Padang	13,60	13,60	13,20	12,80	12,40	12,00
14	Solok	4,57	4,57	4,42	4,27	4,12	3,97
15	Sawah Lunto	7,03	7,03	6,88	6,73	6,58	6,43
16	Padang Panjang	6,18	6,18	6,03	5,88	5,73	5,58
17	Bukittinggi	5,89	5,89	5,74	5,59	5,44	5,29
18	Payakumbuh	6,92	6,92	6,77	6,62	6,47	6,32
19	Pariaman	6,48	6,48	6,35	6,22	6,09	5,96
	SUMATERA BARAT	6,68	6,46	6,25	6,03	5,82	5,60
	NASIONAL	5,2-5,5	5,0-5,3	4,6-5,1	4,0-5,0		

5.3.2. Tujuan Pembangunan Menurut Misi

Tujuan dan sasaran menurut misi merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan visi pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan dan sasaran disusun dalam kerangka yang jelas untuk setiap misi, sehingga menggambarkan keberhasilan pembangunan daerah.

Memperhatikan visi dan misi jangka menengah sebagaimana yang telah dijabarkan, maka ditetapkan tujuan pembangunan Sumatera Barat dalam periode 2016-2021 untuk setiap misi sebagai berikut:

Misi 1: Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah" Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah

Tujuan:

1. Meningkatkan pelaksanaan pembangunan mental dan kehidupan masyarakat madani yang aman, damai, tentram, harmonis, beriman dan bertaqwa dengan mengamalkan nilai universal keagamaan dalam kehidupan,
2. Penguatan kelembagaan agama dan adat.

Misi 2: Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional

Tujuan:

1. Meningkatkan profesionalitas aparatur pemerintah dan bebas korupsi, kolusi serta nepotisme,
2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel,
3. Meningkatkan pelayanan publik yang prima, transparan, aspiratif, dan partisipatif.

Misi 3: Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, dan berkualitas tinggi

Tujuan:

1. Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkarakter dan cerdas serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan karakter,
2. Meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan yang dilandasi nilai-nilai agama dan adat,
3. Meningkatkan kompetensi dan daya saing peserta didik serta meningkatkan pengetahuan masyarakat,
4. Meningkatkan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju dan tepat guna,
5. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, kualitas kependudukan dan kesetaraan gender serta pemenuhan hak anak.

Misi 4: Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah

Tujuan:

1. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkualitas dan lebih merata berbasis ekonomi kerakyatan,
2. Meningkatkan produksi dan ketahanan pangan, pengembangan agribisnis dan meningkatkan kesejahteraan petani,
3. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan kemaritiman secara berkelanjutan,
4. Menjadikan Sumatera Barat sebagai destinasi utama pariwisata berbasis agama dan budaya,
5. Menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal.

Misi 5: Meningkatkan Infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

Tujuan:

1. Meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah,
2. Meningkatkan Pelaksanaan Tata Ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan,
3. Meningkatkan budaya dan perilaku masyarakat yang tanggap bencana,
4. Meningkatkan kualitas kawasan konservasi dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

5.3.3. Sasaran Pembangunan Menurut Misi

Sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan, maka ditetapkan pula sasaran yang ingin dicapai untuk setiap misi sebagai berikut:

Misi 1: Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah" Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah

Sasaran:

1. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat;
2. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama dan kerukunan antar-umat beragama;

3. Berkurangnya penyakit masyarakat (pekat);
4. Meningkatnya kesalehan sosial masyarakat dalam penanganan masalah sosial;
5. Meningkatnya peran dan penguatan lembaga agama dan adat dalam tata kehidupan masyarakat;
6. Meningkatnya pemahaman dan penerapan nilai-nilai adat dan budaya dalam masyarakat.

Misi 2: Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional

Sasaran:

1. Meningkatnya kapasitas dan manajemen aparatur;
2. Meningkatnya integritas dan kinerja aparatur;
3. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan;
4. Meningkatnya sinergitas antara pelaku pembangunan dalam pencapaian sasaran pembangunan;
5. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Misi 3: Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berakarakter, dan berkualitas tinggi

Sasaran:

1. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat;
2. Meningkatnya integritas peserta didik;
3. Meningkatnya pemerataan dan kualitas pendidikan;
4. Meningkatnya daya saing lulusan pendidikan menengah untuk masuk perguruan tinggi atau pasar kerja;
5. Meningkatnya minat baca dan budaya membaca;
6. Meningkatnya fungsi penelitian dan pengembangan serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
7. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat secara merata;
8. Meningkatnya kualitas kependudukan, pembangunan keluarga dan keluarga berencana;
9. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berolahraga;
10. Meningkatnya kapasitas pemuda dan kepemimpinan pemuda dalam pembangunan;
11. Meningkatnya pembangunan gender dan pemberdayaan gender serta pemenuhan hak anak.

Misi 4: Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah

Sasaran:

1. Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah;
2. Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan;
3. Meningkatnya usaha pertanian dengan sistem agribisnis;
4. Meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan;
5. Meningkatnya pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan dan kemaritiman;
6. Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
7. Menurunnya jumlah penduduk miskin;
8. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka;
9. Menurunnya daerah tertinggal;
10. Menurunnya tingkat penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Misi 5: Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

Sasaran:

1. Meningkatnya kualitas jalan Provinsi
2. Meningkatnya pelayanan perhubungan/transportasi;
3. Meningkatnya keselamatan lalu lintas;
4. Meningkatnya kualitas pengelolaan sumberdaya air;
5. Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana umum pada kawasan pemukiman/perumahan, lingkungan dan bangunan gedung;
6. Meningkatnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT);
7. Meningkatnya kesesuaian rencana pembangunan dengan tata ruang
8. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
9. Terpeliharanya fungsi ekosistem dan kualitas lahan
10. Berkurangnya resiko bencana
11. Meningkatnya penanganan tanggap darurat dan pemulihan wilayah/daerah pasca bencana
12. Terpeliharanya debit sungai
13. Meningkatnya kualitas ekosistem pesisir dan laut

Untuk lebih jelasnya keterkaitan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan dapat dilihat pada Tabel 5.7.

Tabel 5.7.
Hubungan Antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

VISI Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera		
MISI	TUJUAN	SASARAN
Misi 1: Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah	1. Meningkatkan pelaksanaan pembangunan mental dan kehidupan masyarakat madani yang aman, damai, tentram, harmonis, beriman dan bertaqwa dengan mengamalkan nilai universal keagamaan dalam kehidupan	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat
		Meningkatnya kualitas kehidupan beragama, dan kerukunan antar-umat beragama
		Berkurangnya penyakit masyarakat (Pekat)
	2. Penguatan kelembagaan agama dan adat.	Meningkatnya Kesalehan sosial masyarakat dalam masalah sosial
Meningkatnya lembaga agama dan adat dalam tata kehidupan masyarakat		
Meningkatnya Pemahaman dan Penerapan nilai-nilai adat dan budaya dalam masyarakat.		
Misi 2: Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional	Meningkatkan profesionalitas aparatur pemerintah dan bebas korupsi, kolusi serta nepotisme.	Meningkatnya kapasitas dan manajemen aparatur
		Meningkatnya integritas dan kinerja aparatur
	Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan

MISI	TUJUAN	SASARAN
		Meningkatnya sinergitas antara pelaku pembangunan dalam pencapaian sasaran pembangunan
	Meningkatkan pelayanan publik yang prima, transparan, aspiratif, dan partisipatif	Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
Misi 3: Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, dan berkualitas tinggi	Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas dan berkarakter serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan karakter	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat
		Meningkatnya integritas peserta didik
	Meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan yang dilandasi nilai-nilai agama dan adat	Meningkatnya pemerataan dan kualitas pendidikan
	Meningkatkan kompetensi dan daya saing peserta didik serta meningkatkan pengetahuan masyarakat	Meningkatnya daya saing lulusan pendidikan menengah untuk masuk perguruan tinggi atau pasar kerja
	Meningkatkan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju dan tepat guna	Meningkatnya minat baca dan budaya membaca
		Meningkatnya fungsi penelitian dan pengembangan serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, kualitas kependudukan dan kesetaraan gender serta pemenuhan hak anak	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat secara merata
		Meningkatnya kualitas kependudukan, pembangunan keluarga dan keluarga berencana
Misi 4: Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah	Meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkualitas dan lebih merata berbasis ekonomi kerakyatan	Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah
	Meningkatkan produksi dan ketahanan pangan, pengembangan agribisnis dan meningkatkan kesejahteraan petani	Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan
	Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan kemaritiman secara berkelanjutan	Meningkatnya usaha pertanian dengan sistem agribisnis
		Meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan
		Meningkatnya pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan dan kemaritiman

MISI	TUJUAN	SASARAN
	Menjadikan Sumatera Barat sebagai destinasi utama pariwisata berbasis agama dan budaya	Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara
	Menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal	Menurunnya jumlah penduduk miskin
		Menurunnya tingkat pengangguran terbuka
		Menuntaskan penanganan daerah tertinggal
Misi 5: Meningkatkan Infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah	Meningkatnya kualitas jalan Provinsi\
		Meningkatnya pelayanan perhubungan/ transportasi
		Meningkatnya keselamatan lalu lintas
		Meningkatnya kualitas pengelolaan sumberdaya air
		Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana umum pada kawasan pemukiman/perumahan, lingkungan dan bangunan gedung;
		Meningkatnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT)
	Meningkatkan Pelaksanaan Tata Ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Meningkatnya kesesuaian rencana pembangunan dengan tata ruang
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
		Terpeliharanya fungsi ekosistem dan kualitas lahan
	Meningkatkan budaya dan perilaku masyarakat yang tanggap bencana	Berkurangnya resiko bencana
		Meningkatnya penanganan tanggap darurat dan pemulihan wilayah/ daerah pasca bencana
	Meningkatkan kualitas kawasan konservasi dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan	Terpeliharanya debit sungai
		Meningkatnya kualitas ekosistem pesisir dan laut

Selanjutnya Indikator dan target kinerja RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 untuk setiap misi dan sasaran yang ingin dicapai dapat dilihat pada Tabel 5.8.

Tabel 5.8.
Target dan Indikator Kinerja RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2016	2021		
Misi 1 : Meningkatkan Tata Kehidupan Yang Harmonis, Agamais, Beradat, Dan Berbudaya Berdasarkan Falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah							
Meningkatkan pelaksanaan pembangunan mental dan kehidupan masyarakat madani yang aman, damai, tentram, harmonis, beriman dan bertaqwa dengan mengamalkan nilai universal keagamaan dalam kehidupan	1. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat	1. Zakat yang dikelola badan amil zakat (IKU)	% Kenaikan	2,22	2,22	- Setda (Biro Bintal dan Kesra) - Dinas Pendidikan	
		2. Peningkatan pengumpulan nilai zakat, infak dan sadaqah (IKU)	% Kenaikan	15	35		
		3. Penduduk yang mendaftar dan mendapatkan porsi keberangkatan ibadah haji (IKU)	% rata-rata kenaikan	10	10		
		4. Sekolah Menengah dengan system boarding school yang bernuansa islami	Sekolah % Lulusan Tahfiz	6	6		
		5. Sekolah Menengah yang bernuansa Islami	Sekolah % Lulusan Tahfiz	3	11		
		6. Pondok Pesantren dengan system Boarding School	Pondok Pesantren % rata-rata kenaikan siswa	7,07	8,01		
		7. Persentase Peningkatan Kapasitas Pengelola Manajemen Pondok Pesantren dan Sekolah Agama	%	5,81	6,57		
	2. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama, dan kerukunan antar umat beragama	1. Konflik dalam masyarakat bernuansa Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) (IKU)	Kasus	0	0		- Badan Kesbangpol - Dinas Pol PP dan Damkar
	2. Koordinasi antar pemuka dan tokoh umat beragama	Rakor/ pertemuan per tahun	2	2			
	3. Konflik Sosial	Kasus	23	23			
3. Berkurangnya penyakit masyarakat (Pekat)	Kasus perbuatan maksiat: 1. Narkoba a. Kasus b. Pencegahan c. Penanganan d. Rehabilitasi	a. Kasus	Kasus Pidana	8,03 %	8,03 %	- Badan Kesbangpol - Dinas Pol PP dan Damkar - RSUD Prov (HB Saanin), - Dinas Sosial	
		b. Pencegahan	% Pemuda (16-30 th) bebas narkoba	N.A	98,50		
			% Guru BK mendapat sosialisasi	4,3	16,40		
		c. Penanganan	% Kasus yang dilayani	100	100		
			IPWL (Jumlah)	22	27		
			IPWL (Kab/Kota)	17	19		
		d. Rehabilitasi	% kenaikan penjangkauan narkoba	15,59	19,49		
			% kenaikan rawat jalan	40	60		
			% kenaikan rawat inap	40	50		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2016	2021	
		2. Angka Kriminilitas(IKU) 3. Kasus Prostitusi	% % rata-rata penurunan kasus maksiat % eks Wanita Tuna Susila Mandiri	6,77% 5 70	<6,77% 5 70	
Meningkatnya kelembagaan agama dan adat	1. Meningkatnya kesalehan sosial masyarakat dalam penanganan masalah sosial	1. Persentase pendistribusian zakat, infak dan sedekah	%	100	100	Setda (Biro Bintai dan Kesra)
	2. Penguatan lembaga agama dan adat dalam tata kehidupan masyarakat	1. Kompetensi dan kualifikasi pemangku adat	Ketua KAN (Penghulu)	108	108	Setda (Biro Bintai dan Kesra)
		2. Lembaga adat dan agama yang melaksanakan peran dan fungsinya : a. MUI b. KAN	Lembaga Jumlah (Kumulatif)	N.A 90	4 299	Dinas PMD
		3. Penyelesaian kasus/sengketa adat yang diselesaikan oleh KAN	% Kenaikan	6	6	Dinas Kebudayaan
3. Meningkatnya pemahaman dan penerapan nilai-nilai adat dan budaya dalam masyarakat	4. Pemanfaatan Tanah Ulayat a. Potensi Ekonomi b. Potensi Sosial	4. Pemanfaatan Tanah Ulayat a. Potensi Ekonomi b. Potensi Sosial	% Kenaikan realisasi investasi yang memanfaatkan tanah ulayat	N.A	N.A	Dinas Perkimtan
			% realisasi pemanfaatan tanah ulayat untuk kepentingan sosial	N.A	N.A	
		1. Peningkatan Sanggar Seni dan Budaya 2. Peningkatan Event Seni dan Budaya 3. Pelestarian permainan tradisional anak nagari 4. Peraturan Nagari tentang penerapan nilai-nilai adat, seni dan budaya 5. Peningkatan partisipasi perantau dalam pengenalan nilai-nilai adat dan budaya	% kenaikan % kenaikan event % kenaikan jenis event % kenaikan % kenaikan	3 1 N.A N.A N.A	20 2 3 N.A N.A	Dinas Kebudayaan
		1. Peningkatan penerapan nilai-nilai adat dan budaya bagi perantau 2. Peningkatan pemahaman dan penerapan nilai-nilai budaya bagi peserta didik	% kenaikan % sekolah	N.A 7,57	N.A 18,84	Dinas Kebudayaan Dispora

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2016	2021	
Misi 2 : Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional						
Meningkatkan profesionalitas aparatur pemerintah dan bebas korupsi, kolusi serta nepotisme.	1. Meningkatnya kapasitas dan manajemen aparatur	1. Indeks Profesionalitas ASN 2. Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat (Standar 40 atau 80 JPL/ orang/ tahun) 3. Aparatur mengikuti diklat sesuai tupoksi dan persyaratan jabatan 4. Perangkat daerah yang sesuai dengan formasi minimal 70%	Skor JPL % %	N.A N.A 90 N.A	82 50 60 95	BKD Badan PSDM Badan PSDM BKD
	2. Meningkatnya integritas dan kinerja aparatur	1. Pegawai yang mencapai kinerja baik 2. Perangkat Daerah Provinsi menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) (IKU)	% Perangkat Daerah	N.A 2	100 10	Setda (Biro Organisasi) Inspektorat
Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel.	1. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	1. Opini BPK (Opini) (IKU) 2. Instansi Pemerintah yang Akuntabel (Skor hasil evaluasi SAKIP) 3. Tingkat kapasitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) 4. Tingkat Kematangan Implementasi SPIP (Sistem Pengawasan Intern Pemerintah) 5. Penggunaan E-Procurement terhadap Pengadaan Barang dan Jasa 6. Indeks e-Government Provinsi (IKU) 7. Keterbukaan Informasi Publik (IKU) 8. Instansi Pemerintah yang memiliki indeks Reformasi B (Kategori B keatas) 9. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) 10. Tertib Arsip	Opini Predikat Level 1-5 Level 1-5 % Skor 0-4 Indeks Skor 1-100 Skor 0-4 Jumlah perangkat daerah (Kumulatif) OPD	WTP BB 2 2 100 2,2 55 NA 2,46 10 13	WTP A 3 3 100 3 80 100 3 20 50	- Inspektorat - Setda (Biro Organisasi) - Setda (Biro Pemerintahan) - Dinas Kominfo - Bappeda, (LPSE) - Setda (Biro Umum), - Badan Penghubung - Setda (Biro Humas - Dinas PMD - Bakeuda - Disperindang - Dinas PU PR - Disnaker trans - Setda (Biro APPBMD) - Set. DPRD - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	2. Meningkatnya sinergitas antara pelaku pembangunan dalam pencapaian sasaran pembangunan	1. Keselarasan prioritas pembangunan Provinsi dengan Nasional dan Kabupaten/Kota sesuai dengan potensi daerah (IKU) 2. Pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi (IKU)	% %	80 80	90 90	Bappeda

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2016	2021	
		3. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan 4. Peningkatan partisipasi perantau dalam proses pembangunan	rata-rata Perda per tahun % rata-rata Pergub per tahun Jumlah Rekomendasi perantau	15 3	15 8	Setda (Biro Hukum) - Setda (Biro Kerjasama dan rantau) - Badan Penghubung
Meningkatkan pelayanan publik yang prima, transparans, aspiratif, dan partisipatif	1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase Kebutuhan Pelaksanaan UU Pelayanan Publik (Zona Hijau) (%) Rata-rata Indeks kepuasan masyarakat (74 Unit kerja pelayanan publik) (IKU)	% %	100 70	100 80	Setda (Biro Organisasi, - Bakeuda - Badan Penghubung - Setda (Biro Perekonomian) - Setda (Biro Umum), - Setda (Biro APPBMD)
Misi 3 : Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, dan berkualitas tinggi						
Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas dan berkarakter serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan karakter	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	Harapan lama sekolah (IKU) Rata-rata lama sekolah (IKU)	Tahun Tahun	13.94 8.46	15.09 8.66	- Setda (Biro Bintal dan Kesra) - Dinas Pendidikan
	Meningkatnya integritas peserta didik	Indeks Integritas Siswa	Skor 1-100	66	100	Dinas Pendidikan
Meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan yang dilandasi nilai-nilai agama dan adat	Meningkatnya pemerataan dan kualitas pendidikan	1. APK PAUD 2. APM SD/SDLB/MI /Paket A 3. APM SMP/SMPLB/MTs/ Paket B 4. APM SMA/SMK/SMALB/ MA/Paket C (IKU) 5. Angka tidak melanjutkan dari SMP ke Sekolah Menengah 6. Angka Putus SMA (IKU) 7. Angka Putus SMK (IKU) 8. Kompetensi Tenaga Pendidik (Guru SMA, SMK dan PLB) 9. Kompetensi Tenaga Kependidikan (Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah, Laboran, Pustakawan dan Pegawai TU Sekolah) 10. Sekolah Menengah Terakreditasi Minimal B	% % % % % % % Skor 0-100 Skor 0-100 Jumlah Sekolah	68,15 99,58 81,20 73,15 1,43 0,83 0,82 59,93 16,67 72,23	77,50 100 81,55 73,35 0,18 0,58 0,58 86,18 38,56 79,74	Dinas Pendidikan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura & Perkebunan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2016	2021	
Meningkatkan kompetensi dan daya saing peserta didik serta meningkatkan pengetahuan masyarakat	Meningkatnya daya saing lulusan pendidikan menengah untuk masuk perguruan tinggi atau pasar bekerja	1. Angka kelulusan SMA (IKU) 2. Angka kelulusan SMK (IKU) 3. Lulusan Sekolah Menengah yang diterima di Perguruan Tinggi 4. Lulusan SMK yang diterima di dunia usaha dan industri (DUDI)	% % % %	97,21 97,12 42,98 28	99,15 99,12 52,05 58	Dinas Pendidikan
	Meningkatnya minat baca dan budaya membaca	1. Fasilitas layanan perpustakaan daerah berbasis Teknologi Informasi 2. Jumlah dan keragaman koleksi perpustakaan 3. Kenaikan Kunjungan perpustakaan	% % rata-rata kenaikan	N.A 13.000 1.000	N.A 13.000 1.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Meningkatkan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju dan tepat guna	Meningkatnya fungsi penelitian dan pengembangan serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	Penerapan hasil penelitian dan pengembangan dalam kebijakan pembangunan	% %	65 NA	80 95	- Balitbang - Dinas PMD
		1. Peningkatan pemanfaatan inovasi penyelenggaraan pemerintah daerah 2. Peningkatan pemanfaatan inovasi produk dan teknologi	% %	NA NA	95 95	Balitbang
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, kualitas kependudukan dan kesetaraan gender serta pemenuhan hak anak	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat secara merata	1. Angka harapan hidup (IKU) 2. Rumah Sakit Provinsi Terakreditasi 3. Persentase kepesertaan jaminan Kesehatan Nasional/ KIS	Tahun Jumlah RS Terakreditasi %	68,79 1 69,27	69,44 5 100	- Dinas Kesehatan - Dinas Kesehatan (BKIM, RS Paru) - RSAM - RSJ HB Saanin - RSUD Solok - RSUD Pariaman
		1. Total Fertility Rate (TFR) per Wanita Usia Subur (WUS) usia 15-49 tahun 2. CPR (Prevalensi Pemakaian Alat Kontrasepsi) 3. Unmed Need (kebutuhan ber KB) 4. ASFR 15-19 tahun 5. Kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49 tahun) 6. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) (IKU)	% % % Rasio kelahiran per 1000 wanita % %	2,61 52,5 8,3 21,0 12,4 1,22	2,33 60,2 5,8 11,9 6,1 1,02	- Dinas PP KB & Duk Capil - Dinas Kesehatan
		1. Klub olah raga 2. Capaian Medali Emas dalam Kejurnas PPLP	% Peningkatan Jumlah	N.A N.A	42 N.A	Dispora

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2016	2021	
	Meningkatnya kapasitas pemuda dan kepemimpinan pemuda dalam pembangunan	Peran pemuda dalam pembangunan (organisasi kepemudaan yang aktif)	1. % Organisasi Kepemudaan yang aktif 2. Jumlah wirausaha muda (orang)	12 N.A	22 60	Dispora
	Meningkatnya pembangunan gender dan pemberdayaan gender serta pemenuhan hak anak	1. Indeks Pembangunan Gender (IPG) (IKU) 2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (IKU) 3. Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	Indeks Indeks Kab/Kota	94,68 62,02 7	95,08 62,42 12	DPP dan PA
Misi 4 : Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah						
Meningkatkan produksi dan ketahanan pangan, pengembangan agribisnis dan meningkatkan kesejahteraan petani	1. Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan	Skor Pola Pangan Harapan (IKU) Persentase peningkatan produksi : • Padi • Jagung • Cabe • Daging • Telur • Ikan	% % % % % %	84 2,2 7,87 2,0 1,2 0,69 5,9	87 2,3 11,11 2,0 1,75 12,33 6,28	- Dinas Pangan - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura & Perkebunan - Dinas Peternakan & Keswan - Dinas Kelautan dan Perikanan,
	2. Meningkatnya usaha pertanian dengan sistem agribisnis	Persentase Peningkatan Kawasan Sentra Produksi (IKU) - KSP - Kawasan Agribisnis	Kawasan Kawasan	119 6	154 15	- Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura & Perkebunan - Dinas Peternakan & Keswan - Dinas Kelautan & Perikanan
	3. Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Nelayan	Nilai Tukar Petani (IKU) Nilai Tukar Nelayan	Indeks Indeks	106,15 NA	109,65 NA	- Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura & Perkebunan - Dinas Peternakan & Keswan - Dinas Kelautan & Perikanan
Meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkualitas dan lebih merata berbasis ekonomi kerakyatan	Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah	1. Pertumbuhan ekonomi (IKU) 2. PMA 3. PMDN 4. Peningkatan Nilai Ekspor 5. PDRB per Kapita (IKU) 6. Indeks Gini (IKU)	% US\$ Rp. Juta % Rp.Juta Indeks	5,26 39.754,32 3.185.075,82 1 36,48 0,331	5,92 70.427,20 3.803.147,10 2,5 48,91 0,327	- Dinas Perindag - Dinas Koperasi dan UKM - DPM dan PTSP - Setda (Biro Perekonomian)
Menjadikan Sumatera Barat sebagai destinasi utama pariwisata berbasis agama dan budaya	Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara	Kunjungan wisatawan (IKU) 1. Nusantara 2. Mancanegara	% %	5,00 7,5	30,00 44,50	- Dinas Pariwisata - Dinas PU PR - Dinas Perindag - Dinas Koperasi & UKM

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2016	2021	
						<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Kebudayaan - Dinas Pendidikan - Dinas Kelautan dan Perikanan - Dinas Perhubungan - Dinas Kominfo - DPM dan PTSP - Dinas Perkimtan - Dinas Kesehatan - Disnaker trans
Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan kemaritiman secara berkelanjutan.	Meningkatnya pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan dan kemaritiman	1. Persentase Peningkatan produksi perikanan budidaya laut	%	0,78	1,68	- Dinas Kelautan dan Perikanan
		2. Persentase Peningkatan produksi perikanan tangkap	%	0,42	1,21	- Dinas Perhubungan
		1. Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi laut	Kawasan	7	7	Dinas Kelautan dan Perikanan
		2. Meningkatnya pemanfaatan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan	Pulau	13	25	
Menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal.	Menurunnya jumlah penduduk miskin	Tingkat Kemiskinan (IKU)	%	6,71	5,50	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas PMD - Dinas Pendidikan - Dinas Kesehatan - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura & Perkebunan - Dinas Kelautan dan Perikanan - Dinas Koperasi dan UKM - Dinas Perkimtan - Dinas ESDM
						Menurunnya tingkat pengangguran terbuka
	Menurunkan daerah tertinggal	Kabupaten Tertinggal (IKU)	%	3	1	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pendidikan - Dinas Kesehatan, - Dinas ESDM, - Dinas Perkimtan - BPBD - Dinas PMD
						Pengembangan kawasan terpadu

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2016	2021	
	Menurunnya tingkat penyandang masalah kesejahteraan sosial	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial : - Penduduk Miskin - Komunitas Adat Terpencil - Penduduk Korban Tindak Kekerasan, Eksploitasi, dan Diskriminasi Penduduk Telantar - Penduduk Korban Bencana - Penduduk Marjinal - Penduduk Penyandang Disabilitas	% Penurunan PMKS % peningkatan pelayanan PMKS	0,1 16,99	0,16 16,99	- Setda (Biro Bintal & Kesra) - Dinas Sosial
MISI 5 : Meningkatkan Infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan						
Meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah	1. Meningkatnya Kualitas Jalan Provinsi	Kamantapan jalan provinsi (%) (IKU)	%	69	75	Dinas PU PR
	2. Meningkatnya pelayanan perhubungan/ transportasi	Persentase peningkatan Penumpang terangkut a. Moda darat b. Moda Laut c. SDP d. Kereta Api	% % % %	7,11 2,50 4,10 6,66	42,71 15,50 24,80 40,00	- Dinas Perhubungan - Dinas PU PR
	3. Meningkatnya keselamatan lalu lintas	Rasio angka kecelakaan lalu lintas (kematian per 10.000 registrasi kend) (IKU)		2,71	2,67	Dinas Perhubungan
	4. Meningkatnya kualitas pengelolaan sumberdaya air	a. Rata-rata Indeks kinerja infrastruktur irigasi provinsi b. Persentase Peningkatan kapasitas tampungan sumber-sumber air c. Persentase pengurangan luas kawasan yang terdampak daya rusak-air	% % %	67,31 0,40 5,33	68,80 4,4 28,44	Dinas PSDA
	5. Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana umum pada kawasan pemukiman/ perumahan, lingkungan dan bangunan gedung	Persentase cakupan pelayanan kawasan permukiman dan bangunan lingkungan - air minum (%) - Rumah tangga bersanitasi (%) - Penurunan kawasan kumuh (%)		68 72 16,5	86 80 11,5	- Dinas PU PR - Dinas Perkimtan
	6. Meningkatnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT)	Rasio elektrifikasi (IKU)	%	85	99,75	Dinas ESDM
Meningkatkan Pelaksanaan Tata Ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan	1. Meningkatnya kesesuaian rencana pembangunan dengan tata ruang	Persentase kesesuaian rencana pembangunan dan tata ruang	%	79	86	Dinas PU PR
	2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas lingkungan hidup (IKU)	Indeks	70,56	71,66	- Dinas LH - Dinas Kehutanan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2016	2021	
	3. Terpeliharanya fungsi ekosistem dan kualitas lahan	1. Persentase penurunan pertambangan tanpa izin 2. Persentase peningkatan izin penggunaan air tanah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku 3. Persentase Penurunan luas lahan kritis (Ha/Th) 4. <i>Persentase jumlah kasus illegal logging yang tertangani</i> 5. Persentase penurunan laju kerusakan hutan 6. Persentase penurunan jumlah titik panas (hotspot) dari rerata angka periode tahun sebelumnya (2011-2015)	% % % % % %	5 15 0,18 100 4,21 5	1,86 100 2,26 100 8,15 30	Dinas ESDM Dinas Kehutanan
Meningkatkan budaya dan perilaku masyarakat yang tanggap bencana	4. Berkurangnya resiko bencana	1. Persentase lokasi rawan bencana yang siap menghadapi bencana (%) 2. Persentase kelompok masyarakat di daerah rawan bencana yang siap menghadapi bencana	% %	51 51	55 55	- BPBD - Dinas Pol PP dan Damkar - Dinas PSDA
	5. Meningkatnya penanganan tanggap darurat dan pemulihan wilayah/daerah pasca bencana	1. Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana (IKU) 2. Persentase Daerah Pasca bencana yang bisa dipulihkan sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana (%)	% %	71 71	75 75	- BPBD - Dinas PU PR - Dinas Perkimtan - Dinas Sosial - Dinas PSDA
Meningkatkan kualitas kawasan konservasi dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan	1. Terpeliharanya debit sungai	Rasio debit minimum/ maksimum air sungai (IKU)	Rasio	0,12	0,17	- Dinas Kehutanan - Dinas PU PR - Dinas PSDA
	2. Meningkatnya kualitas ekosistem pesisir dan laut	Persentase luas tutupan dalam kondisi baik - Mangrove - Terumbu karang	% %	70 30	75 35	Dinas Kelautan dan Perikanan

Keterangan :
IKU = Indikator Kinerja Utama

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

6.1. Strategi dan Arah Kebijakan Menurut Tujuan dan Sasaran

Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan rumusan perencanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang efektif dan efisien guna mewujudkan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 yang dilaksanakan melalui lima Misi. Strategi dan arah kebijakan dirumuskan terhadap aspek yang memberikan dampak besar dan mempunyai daya ungkit untuk pencapaian tujuan dan sasaran dalam kurun waktu lima tahun mendatang.

Strategi umum yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

- a. Mendayagunakan nilai-nilai gotong royong dan kerjasama yang melibatkan semua komponen masyarakat baik di daerah maupun di rantau dengan pendekatan pembangunan terpadu yang bersifat holistik dan integratif.
- b. Meningkatkan pembangunan kualitas sumberdaya manusia untuk mendukung pembangunan pada semua aspek kehidupan, baik sebagai pelaku pembangunan maupun sebagai penerima manfaat dari pembangunan yang dilakukan.
- c. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya daerah untuk pembangunan ekonomi yang semakin terbuka di bidang pertanian, pariwisata, industri kelautan dan komunikasi serta energi dan potensi lainnya yang belum dimanfaatkan secara optimal.
- d. Menekan kesenjangan pembangunan antar wilayah untuk pemerataan pembangunan dan hasilnya baik di bidang infrastruktur maupun di bidang sosial dan ekonomi.
- e. Melaksanakan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, guna menjaga keberlanjutan pemenuhan kebutuhan generasi sekarang dan yang akan datang.

Selanjutnya strategi dan arah kebijakan pada setiap tujuan dan sasaran pada masing-masing Misi adalah sebagai berikut :

Misi 1 : Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah" Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah".

Tujuan 1 : Meningkatkan pelaksanaan pembangunan mental dan kehidupan masyarakat madani yang aman, damai, tentram, harmonis, beriman dan bertaqwa dengan mengamalkan nilai universal keagamaan dalam kehidupan.

Sasaran 1 : Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat

Strategi :

1. Meningkatkan keterpaduan dalam menggerakkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama
2. Meningkatkan pemahaman ajaran agama sejak usia dini
3. Meningkatkan peran, kualitas dan pengelolaan lembaga pendidikan agama
4. Meningkatkan akses informasi keagamaan, kualitas dan kuantitas kegiatan dalam pemahaman terhadap ajaran Agama
5. Melakukan penguatan kelembagaan, transparansi, akuntabilitas dalam pengelolaan zakat
6. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan pelayanan ibadah haji

Arah Kebijakan :

1. Peningkatan manajemen lembaga pendidikan terutama pesantren dan lembaga non formal lainnya sebagai sentra pembangunan masyarakat yang religius
2. Pengembangan sekolah/ lembaga pendidikan untuk menyelenggarakan program tahfidz qur'an
3. Penyempurnaan kurikulum pendidikan agama pada setiap jenjang pendidikan
4. Peningkatkan kapasitas dan kualitas penyuluh agama, tokoh agama, lembaga sosial keagamaan, dan media massa dalam melakukan bimbingan keagamaan kepada masyarakat
5. Peningkatan kegiatan keagamaan sebagai bagian dari syi'ar agama
6. Peningkatan pengelolaan, sarana dan prasarana serta fungsi tempat ibadah
7. Peningkatan fungsi kelembagaan, optimalisasi pengumpulan infak, sedekah, zakat, wakaf dan sinergitas pendistribusiannya antar lembaga pengelola zakat
8. Peningkatan perlindungan, pembinaan jemaah haji dan dukungan pelayanan embarkasi haji

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas kehidupan beragama dan kerukunan antar-umat beragama**Strategi :**

1. Meningkatkan keterpaduan, sinergitas dan sinkronisasi kegiatan untuk mewujudkan peningkatan kualitas dan kerukunan antar umat beragama
2. Meningkatkan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan umat beragama dan antar umat beragama

Arah Kebijakan :

1. Optimalisasi pelaksanaan kegiatan kerukunan beragama dan kerukunan antar umat beragama
2. Peningkatan perlindungan kepada masyarakat dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama
3. Peningkatan koordinasi dengan tokoh agama dan lintas agama

Sasaran 3 : Berkurangnya penyakit masyarakat (Pekat)**Strategi :**

1. Meningkatkan keterpaduan, sinergitas dan sinkronisasi kegiatan dalam pencegahan penyakit masyarakat.
2. Meningkatkan kesadaran dan keikutsertaan masyarakat dalam pencegahan, penanganan dan rehabilitasi kasus maksiat
3. Melindungi generasi muda terhadap bahayapenyalah-gunaan narkotikadikalangan pemuda
4. Mengembangkan akses layanan rehabilitasi bagi pencandu narkotika yang terintegrasi dan berkelanjutan

Arah Kebijakan :

1. Peningkatan pemahaman terhadap penyakit masyarakat
2. Pencegahan terjadinya perbuatan maksiat
3. Peningkatan jam pelajaran praktek pendidikan akhlak dan praktek agama di lembaga pendidikan
4. Peningkatan fasilitasi pengawasan terhadap pelanggaran perbuatan maksiat
5. Peningkatan sosialisasi dan edukasi secara sistematis dan berkesinambungan kepada kelompok masyarakat yang rentan terhadap kasus maksiat,
6. Peningkatan fungsi pengawasan lembaga adat terhadap perbuatan maksiat
7. Peningkatan pencegahan, penanganan dan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba

8. Peningkatan ekstensifikasi dan intensifikasi informasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) kepada seluruh masyarakat

Tujuan 2 : Penguatan kelembagaan agama dan adat.

Sasaran 1 : Meningkatnya kesalehan sosial masyarakat dalam penanganan masalah sosial

Strategi :

1. Meningkatkan keterpaduan dalam membangun kesalehan sosial masyarakat dalam penanganan masalah sosial
2. Meningkatkan penghimpunan dan penyaluran serta pemanfaatan dana zakat, infak, wakaf, sedekah yang tepat sasaran

Arah Kebijakan :

1. Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap penanganan masalah sosial
2. Peningkatan penghimpunan dan penyaluran serta pemanfaatan dana zakat, infak, wakaf dan sedekah

Sasaran 2 : Penguatan lembaga agama dan adat dalam tata kehidupan masyarakat

Strategi :

1. Meningkatkan keterpaduan, untuk meningkatkan peran dan penguatan lembaga agama dan adat dalam kehidupan
2. Menyusun pedoman standarisasi, kualifikasi dan kompetensi pemangku adat, da'i dan ulama
3. Meningkatkan kapasitas lembaga dan pemangku adat serta penyuluh agama dalam tata kehidupan masyarakat
4. Meningkatkan peran pemangku adat dalam pemanfaatan tanah ulayat bagi pembangunan

Arah Kebijakan :

1. Peningkatan kompetensi pemangku adat, da'i dan ulama
2. Peningkatan kapasitas dan kualitas penyuluh agama, tokoh agama, lembaga sosial keagamaan
3. Penguatan peran dan fungsi lembaga agama dan adat
4. Peningkatan fasilitasi, koordinasi lembaga adat dan lembaga agama
5. Penyusunan standarisasi kualifikasi dan kompetensi pemangku adat, da'i dan ulama
6. Peningkatan pemanfaatan tanah ulayat sesuai potensi ekonomi dan potensi sosial

Sasaran 3: Meningkatnya pemahaman dan penerapan nilai-nilai adat dan budaya dalam masyarakat

Strategi :

1. Meningkatkan keterpaduan, sinergitas dan sinkronisasi kegiatan untuk penerapan nilai adat dan budaya dalam kehidupan masyarakat
2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan peran perantau dalam penerapan nilai adat dan budaya
3. Mengintegrasikan pelajaran praktek pendidikan adat dan budaya dalam kurikulum muatan lokal.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan perantau dalam pengelolaan dan pelestarian kekayaan seni budaya daerah

Arah Kebijakan :

1. Pengembangan dan pemanfaatan kearifan lokal untuk pemberdayaan masyarakat
2. Optimalisasi pendidikan adat dan budaya
3. Peningkatan partisipasi masyarakat dan perantau dalam pengelolaan & pelestarian kekayaan seni budaya lokal
4. Peningkatan partisipasi aktif lembaga adat dalam pelaksanaan proses pembangunan, mengembangkan kelembagaan masyarakat adat
5. Peningkatan peran ulama, ninik mamak, bundo kandung, cendikiawan dan generasi muda dalam penerapan nilai-nilai adat, seni dan budaya
6. Peningkatkan fungsi pengawasan lembaga adat dalam pergelaran seni dan budaya daerah
7. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia di bidang seni dan budaya daerah
8. Peningkatan apresiasi terhadap lembaga seni dan budaya serta meningkatkan pergelaran, festival, lomba karya seni budaya dan pameran
9. Penguatan lembaga seni dan budaya sebagai bagian pembangunan masyarakat yang berkarakter dan pelestarian nilai-nilai kearifan lokal

Misi 2 : Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional

Tujuan 1 : Meningkatkan profesionalitas aparatur pemerintah dan bebas korupsi, kolusi serta nepotisme

Sasaran 1 : Meningkatkan kapasitas dan manajemen aparatur

Strategi :

1. Meningkatkan keterpaduan dalam mengembangkan kapasitas dan manajemen aparatur
2. Meningkatkan manajemen pengelolaan kepegawaian yang efektif, efisien dan akuntabel berbasis teknologi informasi
3. Mengintensifkan penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pengembangan karir secara transparan dan berbasis kompetensi

Arah Kebijakan :

1. Peningkatan manajemen kepegawaian
2. Peningkatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur
3. Penyusunan Road Map diklat teknis dan fungsional
4. Evaluasi pelaksanaan diklat teknis dan fungsional
5. Peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur berorientasi kewirausahaan
6. Peningkatan sarana dan prasarana serta tenaga pengajar pada penyelenggaraan lembaga pendidikan dan latihan

Sasaran 2 : Meningkatkan integritas dan kinerja aparatur

Strategi :

1. Meningkatkan keterpaduan dalam membangun integritas dan perbaikan kinerja aparatur
2. Meningkatkan penerapan pemberian penghargaan dan sanksi terhadap kinerja aparatur

Arah Kebijakan :

1. Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Aparatur
2. Penerapan reward dan punishment bagi aparatur berbasis indikator kinerja
3. Penguatan penerapan tambahan penghasilan berbasis kinerja
4. Peningkatan Penerapan nilai-nilai integritas dalam birokrasi untuk membentuk karakter dan kultur birokrasi yang bersih

Tujuan 2 : Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel

Sasaran 1 : Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan

Strategi :

1. Meningkatkan pengawasan internal dan eksternal serta pengawasan masyarakat dan ketegasan tindak lanjut
2. Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah
3. Meningkatkan kompetensi dan integritas aparatur pengadaan barang dan jasa
4. Melakukan penguatan kelembagaan pengadaan barang dan jasa
5. Mengembangkan dan memanfaatkan sistem informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (e-Government)
6. Melakukan penyempurnaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan nagari/desa/kelurahan
7. Meningkatkan keterbukaan dan akses masyarakat terhadap informasi publik
8. Meningkatkan kualitas produk hukum daerah

Arah Kebijakan :

1. Penetapan indikator kinerja daerah, Perangkat Daerah dan individu aparatur.
2. Penertiban dan tindak lanjut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
3. Peningkatan kapasitas pengawasan melalui peningkatan independensi Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)
4. Peningkatan jumlah, kompetensi, dan integritas auditor intern dan ekstern
5. Pengembangan sistem pengaduan masyarakat yang efektif
6. Percepatan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis accrual
7. Pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
8. Peningkatan kualitas implementasi sistem e-procurement
9. Implementasi penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang efektif dan efisien.
10. Peningkatan transparansi melalui pengelolaan dan pelayanan informasi publik
11. Peningkatan pengamanan informasi pemerintah dan persandian
12. Peningkatan penyediaan data statistik sektoral
13. Peningkatan pendapatan daerah dari pengelolaan asset daerah
14. Peningkatan pendapatan daerah dari pajak dan retribusi
15. Penataan pemerintahan nagari desa/kelurahan
16. Percepatan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis accrual
17. Peningkatan pengamanan dan penertiban Barang Milik Daerah (BMD)
18. Modrenisasi pengelolaan barang milik daerah
19. Peningkatan kualitas proses pengadaan barang dan jasa.
20. Penyusunan Peraturan pengelolaan pendapatan daerah
21. Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.
22. Pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
23. Peningkatan kompetensi aparatur pengelola keuangan daerah
24. Pelaksanaan pembinaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
25. Penerapan tertib arsip daerah berbasis teknologi informasi
26. Penyusunan produk hukum daerah yang responsif terhadap pemerintahan yang baik

Sasaran 2 : Meningkatkan sinergitas antara pelaku pembangunan dalam pencapaian sasaran pembangunan

Strategi :

1. Meningkatkan keterpaduan, sinergitas, sinkronisasi dan kerjasama dalam pengelolaan pembangunan.
2. Meningkatkan kualitas dan sinergitas proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah

Arah Kebijakan :

1. Penyelarasan fungsi perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi serta pelaporan berbasis Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)
2. Peningkatan transparansi melalui pengelolaan dan pelayanan informasi
3. Peningkatan kualitas koordinasi dengan semua stakeholder terkait

Tujuan 3 : Meningkatkan pelayanan publik yang prima, transparan, aspiratif, dan partisipatif.

Sasaran 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Strategi :

1. Meningkatkan sistem serta sarana prasarana pelayanan publik berbasis teknologi informasi
2. Meningkatkan kualitas aparatur dalam pelaksanaan pelayanan publik
3. Membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan peningkatan pelayanan publik

Arah Kebijakan :

1. Peningkatan pelimpahan kewenangan, penyederhanaan prosedur pelayanan dan perizinan
2. Peningkatan kualitas aparatur pelayanan, peningkatan kompetensi dan perubahan mentalitas/budaya melayani
3. Pengembangan inovasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang terintegrasi
4. Penguatan integrasi berbagai jenis pelayanan publik (pelayanan satu pintu)
5. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik

Misi 3 : Mewujudkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter dan berkualitas tinggi.

Tujuan 1 : Meningkatkan Sumberdaya Manusia Yang Cerdas Dan Berkarakter serta Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Tentang Pentingnya Pendidikan Karakter.

Sasaran 1 : Meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat

Strategi :

1. Meningkatkan keterpaduan dan pemerataan penyediaan layanan pendidikan
2. Meningkatkan akses pada siswa miskin dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan

Arah Kebijakan :

1. Penyediaan bantuan untuk anak yang berasal dari keluarga kurang mampu agar dapat mengikuti pendidikan dasar dan menengah
2. Pelaksanaan Wajib Belajar 9 tahun dan rintisan 12 tahun untuk memenuhi hak seluruh penduduk mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas untuk menjamin seluruh anak dapat menyelesaikan jenjang pendidikan dasar dan menengah
3. Penyediaan pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus dan pendidikan inklusif
4. Peningkatan angka partisipasi murni pendidikan secara merata di setiap daerah.
5. Peningkatan ketersediaan SMA, SMK dan SMALB di daerah yang belum memiliki satuan pendidikan menengah, melalui pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), penambahan Ruang Kelas Baru (RKB), dan pembangunan SMP-SMA satu atap; dan meningkatkan ketersediaan SMK yang terkait dengan prioritas pembangunan daerah

Sasaran 2 : Meningkatnya integritas peserta didik**Strategi :**

1. Meningkatkan keterpaduan dalam membangun integritas peserta didik
2. Melaksanakan pendidikan karakter bagi anak-anak usia sekolah pada semua jenjang pendidikan untuk memperkuat nilai-nilai moral, akhlak yang mulia.
3. Melakukan integrasi pendidikan karakter kedalam mata pelajaran dan pengelolaan sekolah
4. Melakukan pembentukan karakter dan jati diri siswa melalui pengembangan, pembinaan dan penggunaan bahasa dan sastra dan nilai-nilai ajaran agama
5. Meningkatkan perilaku dan suri tauladan mulai dari kepala sekolah, guru dan pengawas pendidikan

Arah Kebijakan :

1. Penguatan pendidikan karakter yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran dan budaya sekolah
2. Peningkatan mutu pembelajaran yang berorientasi pada ranah afektif dalam peningkatan pendidikan karakter
3. Peningkatan kualitas pendidikan karakter pada anak-anak usia sekolah pada semua jenjang pendidikan dan jenis pendidikan untuk membina budi pekerti, akhlak, karakter, dan kepribadian peserta didik
4. Pengembangan budaya sekolah yang kondusif bagi penciptaan lingkungan belajar yang baik dan menyenangkan bagi siswa untuk mendorong terlaksananya pendidikan karakter
5. Peningkatan peran aktif siswa dan guru sebagai fasilitator untuk meningkatkan proses pembelajaran di kelas sehingga peserta didik dapat mengekspresikan dirinya dengan lebih baik dan mendorong peserta didik untuk membentuk perilaku yang berkarakter di sekolah
6. Penguatan kurikulum tentang ketahanan diri seperti perilaku hidup bersih dan sehat, kepedulian terhadap lingkungan, kesehatan reproduksi, pengetahuan gizi seimbang, pendidikan jasmani serta kewirausahaan

Tujuan 2 : Meningkatkan Pemerataan Dan Kualitas Pendidikan Yang Dilandasi Nilai-nilai Agama Dan Adat.**Sasaran 1 : Meningkatnya pemerataan dan kualitas pendidikan****Strategi :**

1. Meningkatkan keterpaduan dalam penyediaan layanan pendidikan yang lebih merata dan berkualitas pada semua jenjang pendidikan sejak pendidikan usi dini

2. Memberikan pemenuhan hak terhadap pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
3. Meningkatkan inovasi dan teknologi dalam pembangunan pendidikan
4. Meningkatkan kualitas, kuantitas dan relevansi pendidikan
5. Meningkatkan kemampuan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan

Arah Kebijakan :

1. Peningkatan angka partisipasi PAUD dalam rangka meningkatkan kesiapan anak bersekolah untuk mendukung peningkatan kualitas wajib belajar 9 tahun dan rintisan wajib belajar 12 tahun
2. Penyediaan pendidikan inklusif dan layanan khusus pada pendidikan menengah terutama untuk memberi akses bagi anak yang tidak bisa mengikuti pendidikan reguler;
3. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan untuk mendorong kemauan orang tua menyekolahkan anak ke jenjang yang lebih tinggi;
4. Peningkatan pemerataan distribusi dan kualifikasi guru
5. Peningkatan kualitas dan penerapan kurikulum pendidikan berbasis kompetensi
6. Peningkatan kualifikasi pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, laboran, pustakawan dan tata usaha
7. Peningkatan kompetensi pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, laboran, pustakawan dan tenaga tata usaha
8. Peningkatan manajemen sekolah dan proses pembelajaran yang efektif dan menyenangkan
9. Peningkatan pelayanan perpustakaan sebagai sumber belajar berbasis teknologi informasi

Tujuan 3 : Meningkatkan kompetensi dan daya saing peserta didik serta meningkatkan pengetahuan masyarakat.

Sasaran 1 : Meningkatnya daya saing lulusan pendidikan menengah untuk masuk perguruan tinggi atau pasar bekerja

Strategi :

1. Meningkatkan keterpaduan, sinergitas dan sinkronisasi kegiatan bagi peningkatan kualitas lulusan sekolah menengah
2. Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan, pelatihan keterampilan dan uji kompetensi bagi peserta pelatihan
3. Menyelaraskan bidang studi SMK dengan kegiatan ekonomi utama di kabupaten dan kota sesuai dengan potensi daerah bersangkutan
4. Meningkatkan relevansi pendidikan kejuruan dengan kebutuhan dunia kerja dan pendidikan kecakapan hidup untuk SMA

Arah Kebijakan :

1. Penguatan kompetensi keahlian di SMK untuk bidang-bidang aplikatif;
2. Penguatan kecakapan akademik siswa SMK untuk memenuhi kebutuhan industri yang mensyaratkan penguasaan keterampilan dasar;
3. Pengembangan kurikulum SMK yang diselaraskan dengan kebutuhan lapangan kerja berdasarkan masukan dari dunia usaha/dunia industri;
4. Peningkatan proporsi siswa SMK yang dapat mengikuti program pemagangan di dunia usaha dan dunia industri
5. Penguatan kecakapan akademik siswa SMK, seperti matematika, kimia, fisika dan pemecahan masalah serta bahasa Inggris untuk memenuhi kebutuhan industri yang mensyaratkan penguasaan keterampilan dasar pada era globalisasi;

6. Peningkatan kesiapan peserta didik SMA dan SMK untuk memasuki pasar kerja atau melanjutkan kejenjang perguruan tinggi dan pelaksanaan pendidikan kecakapan hidup pada SMA

Sasaran 2 : Meningkatkan minat baca dan budaya membaca

Strategi :

1. Meningkatkan keterpaduan dalam menggerakkan minat baca dan budaya membaca masyarakat
2. Meningkatkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan media cetak dan elektronik
3. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi
4. Meningkatkan profesionalitas pustakawan serta sarana prasarana perpustakaan

Arah Kebijakan :

1. Peningkatan minat dan budaya gemar membacamasyarakat
2. Peningkatan efektifitas dan kualitas layanan perpustakaan, baik kapasitas dan akses, maupun utilitas
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasana perpustakaan,
4. Peningkatan jangkauan layanan perpustakaan, dengan memanfaatkan teknologi informasi
5. Peningkatan pustakawan yang professional dan bersertifikat
6. Peningkatan kualitas dan keberagaman koleksi perpustakaan termasuk naskah kuno

Tujuan 4 : Meningkatkan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju dan tepat guna

Sasaran 1 : Meningkatkan fungsi penelitian dan pengembangan serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi

Strategi :

1. Meningkatkan keterpaduan, sinergitas dan sinkronisasi didalam pelaksanaan fungsi penelitian dan pengembangan
2. Meningkatkan pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pelaksanaan pembangunan
3. Melakukan penguatan kelembagaan penelitian dan pengembangan

Arah Kebijakan :

1. Penyediaan dan peningkatan kualitas SDM Kelitbangan
2. Pengembangan dan penguatan jaringan antar lembaga litbang dan peneliti di lingkup daerah
3. Pengembangan sistem inovasi daerah
4. Pembangunan technopark sebagai pusat inovasi teknologi bagi pengembangan usaha

Tujuan 5: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, kualitas kependudukan dan kesetaraan gender serta pemenuhan hak anak

Sasaran1: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara merata

Strategi :

1. Meningkatkan keterpaduan dalam pelayanan kesehatan masyakat yang lebih merata.
2. Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan
3. Meningkatkan akses layanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas

4. Meningkatkan jumlah dan kualitas sumber daya kesehatan serta kefarmasian dan alat kesehatan
5. Meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam peningkatan pembiayaan promotif dan preventif untuk layanan kesehatan
6. Meningkatkan jaminan kesehatan masyarakat kurang mampu

Arah Kebijakan :

1. Peningkatan layanan kesehatan dengan lebih menitikberatkan pada upaya promotif dan preventif
2. Pemberdayaan masyarakat dan peningkatan upaya promosi kesehatan
3. Penguatan gerakan masyarakat, lembaga pemerintah dan swasta dalam peningkatan upaya kesehatan masyarakat
4. Peningkatan pelayanan dasar dan rujukan yang berkualitas
5. Peningkatan akreditasi rumah sakit daerah
6. Peningkatan perbaikan gizi masyarakat
7. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak
8. Peningkatan cakupan akses, keterjangkauan dan mutu pelayanan kesehatan
9. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dan gizi dengan fokus utama pada 1000 hari kehidupan manusia
10. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular terutama HIV dan tuberculosis
11. Peningkatan pemerataan dan kualitas kesehatan lingkungan
12. Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan dan kualitas farmasi dan alat kesehatan
13. Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya kesehatan yang memiliki kompetensi dan terstandarisasi
14. Peningkatan kualitas pelayanan dan rehabilitasi gangguan kesehatan kejiwaan
15. Peningkatan efektifitas pembiayaan kesehatan
16. Peningkatan ketepatan sasaran pemberian jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin

Sasaran2: Meningkatkan kualitas kependudukan, pembangunan keluarga dan keluarga berencana

Strategi :

1. Meningkatkan keterpaduan dalam pembangunan kependudukan dan keluarga berencana
2. Menyiapkan kebijakan kependudukan yang sinergis antara aspek kuantitas, kualitas dan mobilitas penduduk;
3. Melakukan penguatan dan pemaduserasian kebijakan pelayanan keluarga berencana yang merata dan berkualitas
4. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya keluarga berencana dalam peningkatan kesejahteraan keluarga

Arah Kebijakan :

1. Peningkatan koordinasi dan supervisi peran lembaga di tingkat masyarakat untuk mendukung penggerakan dan penyuluhan keluarga berencana
2. Penyusunan kebijakan dan strategi yang komprehensif dan terpadu, antar sektor dan antara pusat - daerah, tentang Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) dan konseling kesehatan reproduksi remaja
3. Peningkatan fungsi dan peran, serta kualitas dan kuantitas kegiatan kelompok remaja tentang kependudukan dan keluarga berencana
4. Penguatan koordinasi terpadu lintas sektor terkait perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan kependudukan dan keluarga berencana;

5. Penyebarluasan informasi tentang kependudukan dan keluarga berencana
6. Peningkatan kualitas data kependudukan yang akurat dan tepat waktu

Sasaran 3 : Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berolah raga

Strategi :

1. Meningkatkan keterpaduan untuk membangun kesadaran masyarakat dalam berolah raga.
2. Meningkatkan pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga secara sistematis, berjenjang dan berkelanjutan.
3. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana olahraga
4. Meningkatkan apresiasi terhadap atlit dan pelatih yang berprestasi

Kebijakan :

1. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga serta pemanfaatannya oleh masyarakat
2. Peningkatan kualitas atlit dan pelatih
3. Peningkatan sumberdaya manusia olahraga pada sektor pendidikan
4. Peningkatan kompetisi olahraga
5. Peningkatan dan pengembangan sistem penghargaan untuk atlit dan pelatih

Sasaran 4 : Meningkatnya kapasitas pemuda dan kepemimpinan pemuda dalam pembangunan

Strategi :

1. Meningkatkan peran aktif pemuda di bidang kewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinan dalam pembangunan
2. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi pemuda

Arah Kebijakan :

1. Peningkatan pendidikan dan ketrampilan pemuda
2. Peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan
3. Peningkatan penguatan karakter dan jati diri pemuda
4. Peningkatan keikutsertaan pemuda dalam kepramukaan
5. Peningkatan aktivitas kepemudaan dalam pembangunan daerah

Sasaran 5 : Meningkatnya Pembangunan Gender dan Pemberdayaan Gender serta pemenuhan hak anak

Strategi :

1. Meningkatkan keterpaduan dalam pembangunan gender dan pemberdayaan gender serta pemenuhan hak anak
2. Memperkuat peran dan fungsi pengarusutamaan gender (PUG)
3. Meningkatkan perlindungan perempuan, anak dan pemenuhan hak anak

Arah Kebijakan :

1. Peningkatan koordinasi dan harmonisasi setiap kebijakan berperspektif gender dan pemenuhan hak anak serta perlindungan perempuan dan anak
2. Peningkatan pemahaman pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak
3. Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi kegiatan di provinsi dan kabupaten/kota serta antara pemerintah dan organisasi terkait dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak

4. Penguatan sistem data terpilah termasuk data anak untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/ kegiatan pembangunan
5. Peningkatan kualitas layanan pengaduan masyarakat terkait perempuan dan anak
6. Penguatan koordinasi, kerjasama, dan sinergi antar satuan kerja dan lembaga jejaring

Misi 4 : Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdayasaing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan Sumberdaya Pembangunan Daerah.

Tujuan 1 : Meningkatkan produksi dan ketahanan pangan, pengembangan agribisnis dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Sasaran 1 : Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan

Strategi :

1. Meningkatkan produksi dan diversifikasi produk pangan
2. Meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan
3. Menguatkan kelembagaan pangan

Arah Kebijakan :

1. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan
2. Peningkatan penguatan cadangan pangan
3. Peningkatan keamanan pangan
4. Peningkatan produksi pangan utama
5. Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman
6. Peningkatan peran kelembagaan pangan di pemerintahan dan masyarakat

Sasaran 2 : Meningkatnya usaha pertanian dengan sistem agribisnis

Strategi :

1. Mengembangkan sistem usaha tani yang mengintegrasikan kegiatan usaha hulu dan hilir
2. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi pertanian yang mempunyai keunggulan komperatif pada kawasan usaha tani
3. Meningkatkan pemanfaatan teknologi tepat guna dalam usaha tani

Arah Kebijakan :

1. Peningkatan produksi komoditi unggulan pertanian dan perikanan dengan pendekatan potensi wilayah
2. Pengembangan kawasan sentra produksi, agribisnis dan minapolitan
3. Penerapan standarisasi dan sertifikasi produk pertanian dan perikanan
4. Peningkatan usaha investasi pertanian dan perikanan
5. Peningkatan pemanfaatan inovasi dan teknologi tepat guna pertanian dan perikanan
6. Peningkatan pemanfaatan benih dan bibit unggul serta perluasan logistiknya
7. Penerapan standarisasi jaminan mutu komoditi dan produk olahan pertanian dan perikanan
8. Jangkauan jaringan pemasaran produk pertanian dan perikanan

Sasaran 3 : Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Nelayan

Strategi :

1. Meningkatkan produktifitas dan nilai tambah usaha pertanian dan perikanan

Arah Kebijakan :

1. Peningkatan produktifitas dan produksi komoditi unggulan pertanian dan perikanan.
2. Peningkatan dan penguatan kapasitas kelompok dan kelembagaan petani dan nelayan.
3. Penumbuhan dan peningkatan olahan limbah organik.
4. Peningkatan produksi dan produktifitas perikanan budidaya, perikanan tangkap dan budidaya laut.
5. Peningkatan pemanfaatan inovasi tepat guna untuk meningkatkan hasil produksi pertanian dan perikanan.
6. Peningkatan pemanfaatan dan pengawasan pupuk dan pestisida.

Strategi :

Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM serta kapasitas kelembagaan petani dan nelayan

Arah Kebijakan:

1. Peningkatan dan penguatan SDM pertanian dan perikanan
2. Peningkatan dan penguatan kapasitas kelompok dan kelembagaan petani dan nelayan
3. Peningkatan kemitraan antara kelompok pengolahan dengan perusahaan
4. Peningkatan SDM dan penguatan kapasitas kelembagaan pertanian, perikanan dan kehutanan
5. Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan penyuluhan

Srategi :

Meningkatkan dan mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan

Arah Kebijakan :

1. Peningkatan dan revitalisasi sarana prasarana UPTD pertanian dan perikanan
2. Penyebarluasan penggunaan alsintan dan prasarana pertanian dan perikanan
3. Pembangunan dan perbaikan irigasi teknis

Strategi :

Meningkatkan nilai tambah produk olahan pertanian serta jejaring pemasaran

Arah Kebijakan :

1. Penerapan standarisasi jaminan mutu komoditi dan produk olahan pertanian
2. Peningkatan dan penguatan kelompok petani, petani ikan dan usaha pengolahan hasil pertanian dan perikanan
3. Peningkatan Kemitraan antara kelompok pengolahan dengan pengusaha

Strategi :

Mengendalikan penyakit menular dan pengamanan sumber daya hewani

Arah Kebijakan :

1. Pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan
2. Peningkatan pelayanan labor keswan dan klinik hewan

Tujuan 2 : Meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkualitas dan lebih merata berbasis ekonomi kerakyatan.

Sasaran 1 : Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah

Strategi :

1. Meningkatkan pengembangan usaha-usaha ekonomi berbasis kerakyatan
2. Mengembangkan usaha hilirisasi produk (industri pengolahan)
3. Meningkatkan daya saing produk usaha-usaha ekonomi berbasis kerakyatan
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pelaku usaha-usaha ekonomi kerakyatan
5. Menjamin ketersediaan bahan baku bagi pengembangan usaha industri kecil
6. Meningkatkan akses pembiayaan usaha-usaha ekonomi kerakyatan
7. Memperluas pemasaran usaha-usaha ekonomi kerakyatan dengan menggunakan teknologi informasi
8. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung usaha-usaha ekonomi kerakyatan
9. Meningkatkan pelayanan investasi
10. Mengintensifkan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
11. Mengembangkan pasar ekspor

Arah Kebijakan :

1. Pengembangan dan peningkatan usaha industri berbasis klaster
2. Pengembangan dan penumbuhan sentra industri potensial
3. Pengembangan industri rumah tangga berbasis agro dan non agro
4. Peningkatan pemberdayaan dan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi
5. Penumbuhan koperasi sektor rill di bidang pertanian, perikanan, industri dan usaha kecil, pariwisata
6. Penguatan penyediaan bahan baku industri kecil menengah unggulan
7. Pemberdayaan usaha retail UMKM dan koperasi dengan manajemen modern dan memasyarakatkan transaksi non tunai
8. Pengembangan lembaga keuangan mikro di nagari
9. Pengembangan usaha dan diversifikasi produk UMKM
10. Peningkatan sumberdaya manusia pelaku usaha mikro, kecil dan menengah
11. Peningkatan kemitraan strategis antara UMKM dengan pengusaha besar
12. Penguatan kapabilitas UMKM di bidang manajemen usaha
13. Peningkatan akses dan kemudahan pembiayaan usaha
14. Pengawasan barang yang diperdagangkan sesuai standarisasi dan ketentuan yang berlaku
15. Pengendalian stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan bahan baku industri kecil
16. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri
17. Peningkatan promosi dan pemasaran produk
18. Pengembangan sistem informasi hasil produk UMKM Binaan Koperasi
19. Peningkatan standarisasi dan mutu produk ekspor
20. Peningkatan diversifikasi dan nilai tambah produk ekspor
21. Penguatan kelembagaan dan kerjasama perdagangan regional dan internasional
22. Pengembangan negara tujuan ekspor dan jejaring kerjasama perdagangan luar negeri
23. Pemberian kemudahan dan fasilitas investasi serta pengembangan layanan investasi berbasis teknologi informasi
24. Peningkatan daya saing produk, tenaga kerja, dan jasa
25. Penyusunan regulasi peningkatan pelayanan usaha yang lebih efisien, transparan dan akuntabel
26. Peningkatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal
27. Peningkatan upaya promosi investasi
28. Penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

29. Peningkatan pendapatan dari efektivitas pengelolaan BUMD
30. Peningkatan kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
31. Pengembangan layanan investasi yang memberikan kemudahan, kepastian dan transparansi proses perizinan bagi investor dan pengusaha.

Tujuan 3 : Menjadikan Sumatera Barat sebagai destinasi utama pariwisata berbasis agama dan budaya.

Sasaran 1 : Meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara

Strategi :

1. Mengembangkan pariwisata berbasis keunggulan alam, budaya, kuliner, kearifan lokal dan Meeting Incentive Conference Exhibition (MICE)
2. Membenahi destinasi utama dan pengelolaan pariwisata

Arah Kebijakan :

1. Peningkatan daya tarik destinasi utama dengan menyiapkan atraksi, fasilitas pendukung dan memberi kemudahan akses
2. Penyiapan destinasi untuk keperluan Meeting Incentive Conference Exhibition (MICE)
3. Pengembangan destinasi wisata pada daerah strategis.
4. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana destinasi pariwisata.
5. Penyediaan lahan pengembangan pariwisata yang siap dimanfaatkan (*clear and clean*).
6. Penyediaan konektivitas antar destinasi wisata.
7. Pengembangan pariwisata halal dan nuansa islami.

Strategi :

Meningkatkan sumber daya manusiadan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif

Arah Kebijakan :

1. Peningkatan perilaku sadar wisata dan pelaksanaan sapta pesona.
2. Peningkatan kompetensi dan sertifikasi sumber daya manusia pelaku wisata dan ekonomi kreatif.
3. Peningkatan pengaturan, penguatan kelembagaan, keamanan dan kenyamanan kepariwisataan.
4. Pengembangan kualitas pelayanan kepariwisataan.

Strategi :

Meningkatkan peran ekonomi kreatif dalam mendukung pariwisata.

Arah Kebijakan :

1. Peningkatan ekonomi kreatif berbasis seni, budaya dan kuliner.
2. Pengembangan kegiatan berbasis budaya dan atraksi.
3. Peningkatan jejaring kerjasama produk kreatif.

Strategi :

Meningkatkan efisiensi dan efektifitas promosi wisata

Arah Kebijakan :

1. Peningkatan promosi dan pemasaran pariwisata berbasis teknologi informasi
2. Peningkatan kemitraan pemasaran pariwisata
3. Peningkatan citra pariwisata melalui konsep *branding, advertising and selling*

Tujuan 4 : Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan kemaritiman secara berkelanjutan.

Sasaran 1 : Meningkatnya pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan dan kemaritiman

Strategi :

1. Mengembangkan usaha-usaha ekonomi berbasis kelautan dan kemaritiman
2. Melengkapi sarana dan prasarana pendukung pembangunan kelautan dan kemaritiman
3. Mengintensifkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan kemaritiman yang berkelanjutan

Arah Kebijakan :

1. Peningkatan produksi perikanan tangkap
2. Peningkatan produksi budidaya laut
3. Peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan tangkap
4. Pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan
5. Penataan system perizinan usaha perikanan
6. Peningkatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya kelautan dan kemaritiman secara terpadu yang berkelanjutan
7. Pengaturan dan pengelolaan ruang laut secara optimal
8. Peningkatan pemanfaatan dan pengelolaan kawasan laut provinsi dan pulau-pulau kecil
9. Peningkatan kerjasama regional lintas pesisir wilayah pantai barat sumatera
10. Pengembangan wisata bahari

Tujuan 5 : Menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal.

Sasaran 1 : Menurunnya jumlah penduduk miskin

Strategi :

1. Meningkatkan keterpaduan dalam penurunan kemiskinan
2. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin
3. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin

Arah Kebijakan :

1. Peningkatan efektifitas penanggulangan kemiskinan
2. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin
3. Peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin
4. Pengembangan dan menjaminkeberlanjutan usaha mikro dan kecil
5. Peningkatan sinergi kebijakandan program penanggulangan kemiskinan
6. Peningkatan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin
7. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat miskin

Sasaran 2 : Menurunnya tingkat pengangguran terbuka

Strategi :

1. Meningkatkan keterpaduan dalam mengatasi pengangguran
2. Meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja

Arah Kebijakan :

1. Pengembangan kesempatan kerja melalui peningkatan lapangan usaha produktif secara terpadu.
2. Peningkatan kualitas tenaga kerja.
3. Peningkatan sarana dan prasarana latihan kerja.

4. Peningkatan hubungan industrial ketenagakerjaan.
5. Peningkatan kewirausahaan.
6. Peningkatan penyebaran informasi kesempatan kerja.

Sasaran 3 : Menurunkan daerah tertinggal

Strategi :

1. Meningkatkan keterpaduan dalam penanganan daerah tertinggal
2. Memenuhi standar aksesibilitas daerah tertinggal

Arah Kebijakan :

1. Pemenuhan pembangunan pelayanan dasar pada daerah tertinggal
2. Peningkatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur daerah tertinggal

Sasaran 4 : Menurunnya tingkat penyandang masalah kesejahteraan sosial

Strategi :

1. Meningkatkan layanan dan pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial
2. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

Arah Kebijakan :

1. Peningkatan pelayanan panti sosial untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
2. Peningkatan keterampilan Fakir Miskin, KAT dan PMKS

Misi 5 : Meningkatkan Infrastruktur dan Pembangunan yang Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Tujuan 1 : Meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah.

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas jalan provinsi

Strategi :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan provinsi
2. Meningkatkan kerjasama pembangunan dalam rangka peningkatan konektivitas dan aksesibilitas wilayah

Arah Kebijakan :

1. Peningkatan pembangunan jalan dan jembatan provinsi
2. Rehabilitasi jalan dan jembatan provinsi
3. Pembangunan jalan dan jembatan untuk meningkatkan hubungan dan pengembangan wilayah
4. Penyediaan dukungan untuk pembangunan infrastruktur prioritas dan strategis nasional (dukungan pembangunan jalan tol Padang – Batas Riau dan lain-lain)

Sasaran 2 : Meningkatnya pelayanan perhubungan/transportasi

Strategi :

1. Membangun konektivitas wilayah pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, objek wisata, dan simpul transportasi
2. Mempercepat pengoperasionalan transportasi massal dalam rangka meningkatkan pelayanan publik
3. Mengintegrasikan sistem transportasi antar intermoda

Arah Kebijakan :

1. Pengembangan pelayanan angkutan umum antar kota dalam provinsi, kawasan aglomerasi perkotaan, dan pelayanan angkutan perintis pada daerah-daerah terpencil
2. Pengembangan layanan transportasi untuk mendukung pariwisata
3. Pengembangan jaringan dan prasarana pelayanan angkutan Air, Sungai, Danau dan Penyeberangan
4. Pembangunan infrastruktur simpul *transportasi* (bandara, pelabuhan, terminal, stasiun kereta api)
5. Penyediaan dukungan pembangunan fasilitas keselamatan kereta api
6. Penguatan kelembagaan dan standar pelayanan angkutan umum
7. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia perhubungan
8. Penataan sistim perijinan transportasi

Sasaran 3 : Meningkatkan keselamatan lalu lintas**Strategi :**

1. Membangun kesadaran masyarakat dan penegakan hukum tertib berlalu lintas
2. Melengkapi sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas

Arah Kebijakan :

1. Peningkatan dan pengembangan fasilitas keselamatan lalu lintas
2. Peningkatan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada daerah rawan kecelakaan
3. Peningkatan pengawasan dan penerapan sanksi terhadap pelanggaran perizinan serta standar pelayanan

Sasaran 4 : Meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya air**Strategi :**

1. Menguatkan peran kelembagaan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya air
2. Mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana sumberdaya air

Arah Kebijakan :

1. Peningkatan fungsi kelembagaan dalam pengaturan sumberdaya air
2. Peningkatan pengelolaan sumber daya air dan sistem irigasi partisipatif untuk meningkatkan produksi pangan
3. Peningkatan pembangunan, rehabilitasi, operasional dan pemeliharaan infrastruktur irigasi
4. Peningkatan pembangunan, rehabilitasi, operasional dan pemeliharaan infrastruktur konservasi sumber daya air
5. Peningkatan pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan infrastruktur pengendali daya rusak air (pantai, sungai)

Sasaran 5 : Meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana umum pada kawasan pemukiman/ perumahan, lingkungan dan bangunan gedung**Strategi :**

1. Membenahi prasarana dan sarana umum di kawasan pemukiman/perumahan dan lingkungan
2. Meningkatkan peran swasta dan masyarakat dalam penyediaan prasarana umum pada kawasan pemukiman/perumahan, lingkungan

Arah Kebijakan :

1. Pembangunan, rehabilitasi sarana dan prasarana kawasan permukiman kumuh.
2. Pengembangan sistem pengelolaan air minum regional, tempat pembuangan akhir regional, dan drainase
3. Peningkatan kualitas dan penataan bangunan dan lingkungan

Sasaran 6 : Meningkatkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT)**Strategi :**

1. Melakukan pendataan dan membangun sistem informasi potensi terukur energi baru dan terbarukan
2. Mendorong investasi untuk mengembangkan usaha pemanfaatan potensi energi baru dan terbarukan

Arah Kebijakan :

1. Peningkatan pelayanan investasi di bidang usaha energi baru dan terbarukan
2. Peningkatan pemanfaatan aneka energi baru dan terbarukan untuk pembangkit listrik
3. Peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan listrik di daerah terisolir, terpencil dan perbatasan

Tujuan 2 : Meningkatkan Pelaksanaan Tata Ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.**Sasaran 1 : Meningkatkan kesesuaian rencana pembangunan dengan tata ruang****Strategi :**

1. Meningkatkan pengawasan, pengendalian dan pembinaan dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW
2. Melakukan pengkajian dan penyempurnaan RTRW sesuai kebutuhan pembangunan dan aturan yang berlaku

Arah Kebijakan :

1. Penyusunan regulasi perencanaan, pengawasan dan pengendalian serta pembinaan mengacu pada rencana tata ruang.
2. Penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan strategis provinsi
3. Peningkatan peran pemangku kepentingan dalam perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian tata ruang
4. Peningkatan keterkaitan antar pusat kegiatan sesuai dengan hirarki pengembangan sistim perkotaan

Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup**Strategi :**

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pelestarian lingkungan
2. Mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

Arah Kebijakan :

1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup
2. Pengendalian dan penurunan beban pencemaran
3. Pemulihan media lingkungan yang rusak atau terkontaminasi
4. Penataan lingkungan, penyusunan dan pengimplementasian kebijakan wilayah dan sektor

Sasaran 3 : Terpeliharanya fungsi ekosistem dan kualitas lahan

Strategi :

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga fungsi ekosistem kawasan hutan dan lahan
2. Melakukan pemulihan dan pengamanan fungsi kawasan hutan dan lahan

Arah Kebijakan :

1. Peningkatan peran serta dalam pengamanan kawasan hutan
2. Pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya kehutanan
3. Peningkatan Pengawasan serta penertiban perizinan kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup
4. Pemulihan fungsi kawasan hutan dan lahan, penegakan hukum dibidang kehutanan serta peningkatan upaya mitigasi perubahan iklim

Tujuan 3 : Meningkatkan budaya dan perilaku masyarakat yang tanggap bencana.

Sasaran 1 : Berkurangnya resiko bencana

Strategi :

1. Meningkatkan mitigasi dan adaptasi terhadap resiko bencana
2. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap manajemen resiko bencana

Arah Kebijakan :

1. Penyediaan dan penyebarluasan informasi kebencanaan
2. Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana
3. Peningkatan sarana prasarana penanggulangan bencana

Sasaran 2 : Meningkatnya penanganan tanggap darurat dan pemulihan wilayah/daerah pasca bencana

Strategi :

1. Meningkatkan pengelolaan tanggap darurat dan pemulihan daerah pasca bencana
2. Meningkatkan kualitas aparatur dalam pengelolaan tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana

Arah Kebijakan :

1. Peningkatan efektivitas evakuasi korban bencana
2. Peningkatan kualitas koordinasi dan sinkronisasi penanganan tanggap darurat bencana
3. Rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca bencana

Tujuan 4 : Meningkatkan kualitas kawasan konservasi dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Sasaran 1 : Terpeliharanya debit sungai

Strategi :

1. Memelihara dan meningkatkan tutupan vegetasi di daerah aliran sungai
2. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap fungsi kawasan konservasi

Arah Kebijakan :

1. Penyusunan pola pendayagunaan vegetasi pada daerah tangkapan air
2. Peningkatan kerjasama antara masyarakat sekitar kawasan konservasi dengan pengguna pemanfaat air dalam perlindungan sumber daya air

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas ekosistem pesisir dan laut

Strategi :

1. Melakukan penataan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil
2. Melakukan pemeliharaan ekosistem pesisir dan laut

Arah Kebijakan :

1. Peningkatan sistem pengelolaan kawasan pesisir secara terpadu
2. Peningkatan kerjasama dengan para pihak dalam pengelolaan pesisir dan laut

6.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas pembangunan adalah kumpulan program prioritas yang bersifat lintas sektoral sebagai penjabaran operasional dari rencana pembangunan. Pembangunan Sumatera Barat tahun 2016-2021 dijabarkan ke dalam sepuluh prioritas pembangunan, sebagai berikut:

Prioritas 1: Pembangunan Mental Pengamalan Agama dan ABS-SBK Dalam Kehidupan Masyarakat.

Prioritas ini diarahkan pada pelaksanaan kebijakan nasional dibidang revolusi mental, implementasi prinsip-prinsip agama dan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Dengan pelaksanaan prinsip-prinsip revolusi mental, pengamalan ajaran agama yang baik dan penerapan adat dan budaya Minangkabau yang intensif ditengah kehidupan masyarakat diharapkan akan dicapai: 1) Masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya serta punya etos kerja tinggi dan produktif, 2) Kehidupan masyarakat yang harmonis, toleran, dan cinta damai, 3) Pengamalan nilai-nilai adat dan agama dalam kehidupan sosial ekonomi, 4) Penurunan tingkat konflik dan kekerasan dalam masyarakat, 5) Pewarisan nilai-nilai kearifan adat Minangkabau, 6) Optimalisasi peran lembaga-lembaga keagamaan dan lembaga adat, dan 7) Penurunan perbuatan maksiat.

Prioritas 2: Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan.

Prioritas ini diarahkan pada penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga profesionalitas pemerintahan dan pelayanan publik yang prima dapat dicapai. Dengan reformasi birokrasi akan dicapai : 1) Tata pemerintahan yang baik melalui pelayanan prima, 2) Pemerintahan yang bersih dan profesional, 3) Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan bebas KKN, 4) Tata pemerintahan yang aspiratif dan partisipatif, 5) Penyediaan data statistik yang handal dan berdayaguna tinggi, 6) Perencanaan yang partisipatif dan akuntabel, 7) Sinergi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, dan pembangunan lintas sektor.

Prioritas 3: Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan.

Prioritas ini diarahkan pada penuntasan wajib belajar 9 tahun, perintisan wajib belajar 12 tahun, dan peningkatan standar pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang memenuhi tuntutan persyaratan lapangan kerja dan atau dapat menciptakan lapangan kerja. Dengan prioritas tersebut diharapkan akan dicapai: 1) Penuntasan wajib belajar 9 tahun, 2) Perintisan wajib belajar 12 tahun, 3) Peningkatan angka partisipasi pendidikan, 4) Pelaksanaan pola pendidikan berkarakter dan berkualitas, 5) Lahirnya sentra pendidikan unggul di Sumatera Barat, 6) Pendidikan spesifik sesuai dengan bakat sumberdaya manusia, 7) Lembaga pendidikan penghasil sumberdaya manusia yang profesional, 8) Wirausahawan baru yang berkapasitas

nasional dan global, 9) Pengembangan penelitian dan penerapan IPTEK, 10) Peningkatan partisipasi perempuan dan kesejahteraan keluarga, 11) Peningkatan kualitas pemuda dan pembangunan olah raga, 12) Sumatera Barat sebagai daerah tujuan pendidikan.

Prioritas 4: Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat.

Prioritas ini diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan berkecukupan gizi. Dengan prioritas ini diharapkan akan dicapai: 1) Penurunan angka kesakitan dan kematian 2) Peningkatan angka harapan hidup, 3) Penurunan tingkat kematian ibu melahirkan, 4) Menurunnya tingkat kematian bayi, 5) Penurunan persentase masyarakat gizi kurang, 6) Peningkatan pola hidup bersih dan sehat, 7) Peningkatan layanan rumah sakit dengan standar pelayanan yang terakreditasi paripurna.

Prioritas 5: Peningkatan Produksi Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional dan Pengembangan Agribisnis.

Prioritas ini diarahkan pada pengembangan dan peningkatan produksi pangan untuk menunjang kebijakan nasional dibidang kedaulatan pangan serta mengembangkan sistem agribisnis dalam pembangunan pertanian dalam arti luas (tanaman pangan, peternakan dan perkebunan) yang dapat memberikan nilai tambah (*added value*) tinggi, sehingga masyarakat dapat menikmati tingkat keuntungan yang tinggi dari gabungan hasil usaha pertaniannya melalui berbagai komoditi unggulan. Dengan prioritas tersebut diharapkan dapat dicapai: 1) Peningkatan ketahanan dan keragaman konsumsi pangan, 2) Pengembangan kawasan sentra produksi pertanian, 3) Pengembangan agroindustri dan agribisnis sesuai potensi daerah, 4) Sumatera Barat sebagai salah satu provinsi penghasil pangan nasional, 5) Penerapan teknologi pertanian tepat guna, 6) Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian, 7) Pola pembangunan pertanian berbasis kawasan dan berbasis komoditi unggulan.

Prioritas 6: Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Peningkatan Investasi.

Prioritas ini diarahkan untuk mengembangkan pariwisata, industri skala kecil dan menengah dan pengembangan Koperasi dan UMKM serta peningkatan investasi. Dengan pelaksanaan prioritas ini diharapkan dicapai: 1) Pengembangan objek dan kawasan wisata yang potensial, 2) Peningkatan sarana dan prasarana serta pelayanan kepariwisataan, 3) Sumatera Barat sebagai destinasi utama pariwisata berbasis agama dan budaya, 4) Pengembangan sentra industri dan peningkatan penerapan teknologi tepat guna dalam proses produksi, 5) Peningkatan daya saing produk industri dan jasa, 6) Peningkatan jenis, volume dan nilai ekspor serta ekspor produk industri, 7) Peningkatan kesempatan kerja pada sektor industri dan jasa, 8) Peningkatan peran Koperasi dan UMKM dalam perekonomian daerah, 8) Peningkatan Investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyediaan kesempatan kerja.

Prioritas 7: Peningkatan Pemanfaatan Potensi Kemaritiman dan Kelautan.

Prioritas ini diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan untuk peningkatan pembangunan daerah. Dengan pelaksanaan prioritas ini diharapkan dicapai: 1) Peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan, 2) Peningkatan produksi perikanan laut baik tangkap maupun budidaya, 3) Pengembangan wisata bahari, 4) Optimalisasi pengelolaan ruang laut dan pulau-pulau kecil, 5) Peningkatan kerjasama regional lintas pesisir wilayah laut.

Prioritas 8: Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran serta Penanganan Daerah Tertinggal.

Prioritas ini diarahkan untuk mengurangi tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan dan ketimpangan pembangunan daerah. Dengan prioritas ini diharapkan akan dicapai: 1) Penurunan jumlah penduduk yang menganggur, 2) Penurunan jumlah penduduk miskin, 3) Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin 4) Penurunan tingkat penyandang masalah kesejahteraan sosial, 5) Peningkatan aksesibilitas daerah tertinggal untuk bisa lepas dari ketertinggalan.

Prioritas 9: Pengembangan Sumber Energi Baru dan Terbarukan serta Pembangunan Infrastruktur.

Prioritas ini diarahkan untuk memenuhi kebutuhan energi dan infrastruktur dalam rangka percepatan pembangunan dan daya saing daerah. Dengan pelaksanaan prioritas ini diharapkan akan dicapai: 1) Peningkatan pemanfaatan energi baru dan terbarukan dengan mendorong investasi dibidang energi baru dan terbarukan serta pembangunan sarana dan prasarana pemanfaatan energi baru dan terbarukan untuk pembangkit listrik, 2) Peningkatan penyediaan listrik di daerah terpencil, terisolir dan perbatasan, 3) Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas wilayah, 4) Peningkatan pelayanan transportasi dan keselamatan lalu lintas, 5) Peningkatan kuantitas dan kualitas pengelolaan sumber daya air, 6) Peningkatan prasarana umum pada kawasan pemukiman

Prioritas 10: Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana.

Prioritas ini diarahkan untuk mengurangi kerusakan lingkungan dan menekan kerugian akibat bencana. Dengan pelaksanaan prioritas ini diharapkan akan dicapai: 1) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, 2) Peningkatan kesesuaian rencana pembangunan dengan tata ruang, 3) Peningkatan kualitas lahan dan fungsi ekosistem, 4) Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana, 5) Peningkatan penanganan tanggap darurat dan pemulihan wilayah atau daerah pasca bencana, 6) Peningkatan kearifan lokal dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan.

Selanjutnya untuk melihat keterkaitan antara misi dengan prioritas pembangunan, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan dapat di lihat pada Tabel 7.

6.3. HUBUNGAN ANTARA MISI, TUJUAN DENGAN SASARAN, STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Selanjutnya hubungan antara strategi dan arah kebijakan dapat dilihat pada table 6.1

Tabel 6.1
Hubungan Antara Misi, Tujuan dengan Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan
dan Program Pembangunan Daerah

MISI 1 : MENINGKATKAN TATA KEHIDUPAN YANG HARMONIS, AGAMAI, BERADAT, DAN BERBUDAYA BERDASARKAN FALSAFAH ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH

NO	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
Prioritas 1 : Pembangunan mental dan pengamalan agama dan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi kitabullah (ABS-SBK) dalam kehidupan masyarakat.										
1	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan keterpaduan dalam menggerakkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama Meningkatkan pemahaman ajaran agama sejak usia dini Meningkatkan peran, kualitas dan pengelolaan lembaga pendidikan agama Meningkatkan akses informasi keagamaan, kualitas dan kuantitas kegiatan dalam pemahaman terhadap Ajaran Agama Melakukan penguatan kelembagaan, transparansi, akuntabilitas dalam pengelolaan zakat Meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan pelayanan ibadah haji 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan manajemen lembaga pendidikan terutama pesantren dan lembaga non formal lainnya sebagai sentra pembangunan masyarakat yang religius Pengembangan sekolah/ lembaga pendidikan untuk menyelenggarakan program tahfidz qur'an Penyempurnaan kurikulum pendidikan agama pada setiap jenjang pendidikan Peningkatkan kapasitas dan kualitas penyuluh agama, tokoh agama, lembaga sosial keagamaan, dan media massa dalam melakukan bimbingan keagamaan kepada masyarakat Peningkatan kegiatan keagamaan sebagai bagian dari syi'ar agama Peningkatan pengelolaan, sarana dan prasarana serta fungsi tempat ibadah Peningkatan fungsi kelembagaan, optimalisasi pengumpulan infak, sedekah, zakat, wakaf dan sinergitas pendistribusiannya antar lembaga pengelola zakat Peningkatan perlindungan, pembinaan jemaah haji dan dukungan pelayanan embarkasi haji 	<ol style="list-style-type: none"> Zakat yang dikelola badan amil zakat Peningkatan pengumpulan nilai zakat, infak dan sadaqah Penduduk yang mendaftar dan mendapat-kan porsi keberang-katan ibadah haji Sekolah Menengah dengan system boarding school yang bernuansa islami Sekolah Menengah yang bernuansa Islami Pondok Pesantren dengan system Boarding School Persentase Peningkatan Kapasitas Pengelola Manajemen Pondok Pesantren dan Sekolah Agama 	<ul style="list-style-type: none"> % Kenaikan % Kenaikan % Kenaikan % rata-rata kenaikan Sekolah % Lulusan Tahfiz % Lulusan Tahfiz Pondok Pesantren % rata-rata kenaikan siswa % 	<ul style="list-style-type: none"> 2,22 15 10 6 3 7,07 5,81 213 5 N.A 2,22 35 10 6 11 8,01 6,57 213 5 20,18 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai-nilai Agama Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama Pendidikan Karakter 	<ul style="list-style-type: none"> Kebudayaan Kebudayaan Pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> Setda (Biro Bintal dan Kesra) Setda (Biro Bintal dan Kesra) Dinas Pendidikan 	

NO	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
2	Meningkatnya kualitas kehidupan beragama, dan kerukunan antar umat beragama	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan keterpaduan, sinergitas dan sinkronisasi kegiatan untuk mewujudkan peningkatan kualitas dan kerukunan antar umat beragama Meningkatkan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan umat beragama dan antar umat beragama. 	<ol style="list-style-type: none"> Optimalisasi pelaksanaan kegiatan kerukunan beragama dan kerukunan antar umat beragama Peningkatan perlindungan kepada masyarakat dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama Peningkatan koordinasi dengan tokoh agama dan lintas agama 	<ol style="list-style-type: none"> Konflik dalam masyarakat bernuansa Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) Koordinasi antar pemuka dan tokoh umat beragama Konflik Sosial 	<p>Kasus</p> <p>Rakor/ pertemuan per tahun</p> <p>Kasus</p>	0	0	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Pendidikan Politik Masyarakat Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Peningkatan Perlindungan Masyarakat 	<p>Kesbang dan Politik Dalam Negeri</p> <p>Kesbang dan Politik Dalam Negeri</p> <p>Kesbang dan Politik Dalam Negeri</p> <p>Kesbang dan Politik Dalam Negeri</p> <p>Kesbang dan Politik Dalam Negeri</p>	<p>Badan Kesbangpol</p> <p>Badan Kesbangpol</p> <p>Badan Kesbangpol</p> <p>Dinas Pol PP dan Damkar</p> <p>Dinas Pol PP dan Damkar</p>
3	Berkurangnya penyakit masyarakat (Pekat)	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan keterpaduan, sinergitas dan sinkronisasi kegiatan dalam pencegahan penyakit masyarakat. Meningkatkan kesadaran dan keikutsertaan masyarakat dalam pencegahan, penanganan dan rehabilitasi kasus maksiat 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan pemahaman terhadap penyakit masyarakat Pencegahan terjadinya perbuatan maksiat Peningkatan jam pelajaran praktek pendidikan akhlak dan praktek agama di lembaga pendidikan Peningkatan fasilitasi pengawasan terhadap pelanggaran perbuatan maksiat Peningkatan sosialisasi dan edukasi secara sistematis dan berkesinambungan kepada kelompok masyarakat yang rentan terhadap kasus maksiat, 	<p>Kasus perbuatan maksiat:</p> <ol style="list-style-type: none"> Narkoba <ol style="list-style-type: none"> Kasus Pencegahan 	<p>Kasus Pidana</p> <p>% Pemuda (16-30 th) bebas narkoba</p> <p>% Guru BK mendapat sosialisasi</p>	8,03 %	8,03 %	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peberdayaan PPNS Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi Aparatur Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat 	<p>Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat</p> <p>Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat</p> <p>Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat</p> <p>Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat</p>	<p>Badan Kesbangpol</p> <p>Dinas Pol PP dan Damkar,</p> <p>Dinas Pol PP dan Damkar,</p> <p>Dinas Pol PP dan Damkar,</p>

NO	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
		<p>3. Melindungi generasi muda terhadap bahayapenyalahgunaan narkotikadikalangan pemuda</p> <p>4. Mengembangkan akses layanan rehabilitasi bagi pencandu narkotika yang terintegrasi dan berkelanjutan</p>	<p>6. Peningkatan fungsi pengawasan lembaga adat terhadap perbuatan maksiat</p> <p>7. Peningkatan pencegahan, penanganan dan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba</p> <p>8. Peningkatan ekstenfikasi dan intensifikasi informasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) kepada seluruh masyarakat</p>	<p>c. Penanganan</p> <p>d. Rehabilitasi</p> <p>2. Angka Kriminilitas</p> <p>3. Kasus Prostitusi</p>	<p>% Kasus yang dilayani</p> <p>IPWL (Jumlah)</p> <p>IPWL (Kab/Kota)</p> <p>% kenaikan penjangkauan narkoba</p> <p>% kenaikan rawat jalan</p> <p>% kenaikan rawat inap</p> <p>%</p> <p>% rata-rata penurunan kasus maksiat</p> <p>% eks Wanita Tuna Susila Mandiri</p>	100	100	<p>5. Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba</p> <p>6.Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Narapidana, Wanita Tuna Susila dan Penyakit Sosial Lainnya)</p>	<p>Kesehatan, Sosial, Kesbangpol, Ketertarikan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat</p> <p>Sosial</p>	<p>RSU Prov (HB Saanin), Dinas Sosial, Badan Kesbangpol</p> <p>Dinas Sosial</p>
4	Meningkatnya kesalehan sosial masyarakat dalam penanganan masalah sosial	<p>1. Meningkatkan keterpaduan dalam membangun kesalehan sosial masyarakat dalam penanganan masalah sosial</p> <p>2. Meningkatkan penghimpunan dan penyaluran serta pemanfaatan dana zakat, infak, wakaf, sedekah yang tepat sasaran</p>	<p>3. Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap penanganan masalah sosial</p> <p>4. Peningkatan penghimpunan dan penyaluran serta pemanfaatan dana zakat, infak, wakaf dan sedekah</p>	<p>1. Persentase pendistribusian zakat, infak dan sedekah</p>	%	100	100	<p>Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai-nilai Agama</p>	Kebudayaan	Setda (Biro Bintai dan Kesra)

NO	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
5	Penguatan lembaga agama dan adat dalam tata kehidupan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan keterpaduan, untuk meningkatkan peran dan penguatan lembaga agama dan adat dalam kehidupan Menyusun pedoman standarisasi, kualifikasi dan kompetensi pemangku adat, da'i dan ulama Meningkatkan kapasitas lembaga dan pemangku adat serta penyuluh agama dalam tata kehidupan masyarakat Meningkatkan peran pemangku adat dalam pemanfaatan tanah ulayat bagi pembangunan 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan kompetensi pemangku adat, da'i dan ulama Peningkatan kapasitas dan kualitas penyuluh agama, tokoh agama, lembaga sosial keagamaan Penguatan peran dan fungsi lembaga agama dan adat Peningkatan fasilitas, koordinasi lembaga adat dan lembaga agama Penyusunan standarisasi kualifikasi dan kompetensi pemangku adat, da'i dan ulama Peningkatan pemanfaatan tanah ulayat sesuai potensi ekonomi dan potensi sosial 	<ol style="list-style-type: none"> Kompetensi dan kualifikasi pemangku adat Lembaga adat dan agama yang melaksanakan peran dan fungsinya : <ol style="list-style-type: none"> MUI KAN Penyelesaian kasus/sengketa adat yang diselesaikan oleh KAN Pemanfaatan Tanah Ulayat <ol style="list-style-type: none"> Potensi Ekonomi Potensi Sosial 	Ketua KAN (Penghulu) Lembaga Jumlah (Kumulatif) % Kenaikan % Kenaikan realisasi investasi yang memanfaatkan tanah ulayat % realisasi pemanfaatan tanah ulayat untuk kepentingan sosial	108 N.A 90 6 N.A N.A	108 4 299 6 N.A N.A	<ol style="list-style-type: none"> Pengembangan Lembaga-lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Pemberdayaan kelembagaan Masyarakat adat Pemberdayaan dan Penguatan Eksistensi Lembaga-Lembaga Adat Seni dan Budaya Pengelolaan Pertanahan 	Kebudayaan Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kebudayaan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Setda (Biro Bintal dan Kesra) Dinas PMD Dinas Kebudayaan Dinas Perkimtan
6	6. Meningkatnya pemahaman dan penerapan nilai-nilai adat dan budaya dalam masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan keterpaduan, sinergitas dan sinkronisasi kegiatan untuk penerapan nilai adat dan budaya dalam kehidupan masyarakat Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan peran perantau dalam penerapan nilai adat dan budaya 	<ol style="list-style-type: none"> Pengembangan dan pemanfaatan kearifan lokal untuk pemberdayaan masyarakat Optimalisasi pendidikan adat dan budaya Peningkatan partisipasi masyarakat dan perantau dalam pengelolaan & pelestarian kekayaan seni budaya lokal Peningkatan partisipasi aktif lembaga adat dalam pelaksanaan proses pembangunan, mengembangkan kelembagaan masyarakat adat 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan Sanggar Seni dan Budaya Peningkatan Event Seni dan Budaya Pelestarian permainan tradisional anak nagari Peraturan Nagari tentang penerapan nilai-nilai adat, seni dan budaya Peningkatan partisipasi perantau dalam pengenalan nilai-nilai adat dan budaya 	% kenaikan % kenaikan event % kenaikan jenis event % kenaikan % kenaikan	3 1 N.A N.A N.A	20 2 3 N.A N.A	<ol style="list-style-type: none"> Pengembangan dan Penguatan Nilai Budaya Pemberdayaan dan Penguatan Eksistensi Lembaga-Lembaga Adat, Seni dan Budaya Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Budaya Pengelolaan Kekayaan Budaya 	Kebudayaan Kebudayaan Kebudayaan Kebudayaan	Dinas Kebudayaan Dinas Kebudayaan Dinas Kebudayaan Dinas Kebudayaan

NO	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir					
		<p>3. Mengintegrasikan pelajaran praktek pendidikan adat dan budaya dalam kurikulum muatan lokal.</p> <p>4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan perantau dalam pengelolaan dan pelestarian kekayaan seni budaya daerah</p>	<p>5. Peningkatan peran ulama, ninik mamak, bundo kandung, cendekiawan dan generasi muda dalam penerapan nilai-nilai adat, seni dan budaya</p> <p>6. Peningkatkan fungsi penganal lembaga adat dalam pertunjukan seni dan budaya daerah</p> <p>7. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia di bidang seni dan budaya daerah</p> <p>8. Peningkatan apresiasi terhadap lembaga seni dan budaya serta meningkatkan pertunjukan, festival, lomba karya seni budaya dan pameran</p> <p>9. Penguatan lembaga seni dan budaya sebagai bagian pembangunan masyarakat yang berkeadilan dan pelestarian nilai-nilai kearifan lokal</p>	<p>1. Peningkatan penerapan nilai-nilai adat dan budaya bagi perantau</p> <p>2. Peningkatan pemahaman dan penerapan nilai-nilai budaya bagi peserta didik</p>	<p>% kenaikan</p> <p>% sekolah</p>	N.A	7,57	N.A	18,84	<p>5. Peningkatan Diplomas Seni dan Budaya</p> <p>6. Peningkatan Wawasan dan Kreativitas Seni Budaya Pemuda</p> <p>7. Pengembangan dan perlindungan bahasa daerah</p>	<p>Kebudayaan</p> <p>Kepemudaan dan Olahraga</p> <p>Kebudayaan</p>	<p>Dinas Kebudayaan</p> <p>Dispora</p> <p>Dinas Kebudayaan</p>

MISI 2 : MENINGKATKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN PROFESSIONAL

NO	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
Prioritas 2 : Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan.										
1	Meningkatnya kapasitas dan manajemen aparatur	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan keterpaduan dalam mengembangkan kapasitas dan manajemen aparatur Meningkatkan manajemen pengelolaan kepegawaian yang efektif, efisien dan akuntabel berbasis teknologi informasi Mengintensifkan penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pengembangan karir secara transparan dan berbasis kompetensi 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan manajemen kepegawaian Peningkatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur Penyusunan Road Map diklat teknis dan fungsional Evaluasi pelaksanaan diklat teknis dan fungsional Peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur berorientasi kewirausahaan Peningkatan sarana dan prasarana serta tenaga pengajar pada penyelenggaraan lembaga pendidikan dan latihan 	<ol style="list-style-type: none"> Indeks Profesionalitas ASN Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat (Standar 40 atau 80 JPL/ orang/ tahun) Aparatur mengikuti diklat sesuai tupoksi dan persyaratan jabatan Perangkat daerah yang sesuai dengan formasi minimal 70% 	<p>Skor</p> <p>JPL</p> <p>%</p> <p>%</p>	N.A	82	<ol style="list-style-type: none"> Pembinaan dan pengembangan aparatur Peningkatan Manajemen SDM Aparatur Pendidikan kedinasan <p>Program Prioritas Lainnya :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur 	<p>Fungsi Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Kepegawaian Fungsi Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Kepegawaian Fungsi Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Kepegawaian</p>	<p>Badan PSDM</p> <p>BKD</p> <p>Badan PSDM</p> <p>Seluruh OPD Provinsi</p>
2	Meningkatnya integritas dan kinerja aparatur	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan keterpaduan dalam membangun integritas dan perbaikan kinerja aparatur Meningkatkan penerapan pemberian penghargaan dan sanksi terhadap kinerja aparatur 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Aparatur Penerapan reward dan punishment bagi aparatur berbasis indikator kinerja Penguatan penerapan tambahan penghasilan berbasis kinerja Peningkatan Penerapan nilai-nilai integritas dalam birokrasi untuk membentuk karakter dan kultur birokrasi yang bersih 	<ol style="list-style-type: none"> Pegawai yang mencapai kinerja baik Perangkat Daerah Provinsi menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) 	<p>%</p> <p>Perangkat Daerah</p>	N.A	100	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan manajemen SDM aparatur Peningkatan fungsi pengawasan dan penegakan hukum 	<p>Fungsi lainnya</p> <p>Fungsi lainnya</p>	<p>Setda (Biro Organisasi)</p> <p>Inspektorat</p>

NO	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
3	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan pengawasan internal dan eksternal serta pengawasan masyarakat dan ketegasan tindaklanjut Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah Meningkatkan kompetensi dan integritas aparatur pengadaan barang dan jasa Melakukan penguatan kelembagaan pengadaan barang dan jasa Mengembangkan dan memanfaatkan sistem informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (e-Government) Melakukan penyempurnaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan nagari/desa/ kelurahan Meningkatkan keterbukaan dan akses masyarakat terhadap informasi publik Meningkatkan kualitas produk hukum daerah 	<ol style="list-style-type: none"> Penetapan indikator kinerja daerah, perangkat daerah dan individu aparatur. Penertiban dan tindaklanjut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Peningkatan kapasitas pengawasan melalui peningkatan independensi Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Peningkatan jumlah, kompetensi, dan integritas auditor intern dan ekstern Pengembangan sistem pengaduan masyarakat yang efektif Percepatan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis accrual Pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Peningkatan kualitas implementasi sistem e-procurement Implementasi penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang efektif dan efisien. Peningkatan transparansi melalui pengelolaan dan pelayanan informasi publik Peningkatan pengamanan informasi pemerintah dan persandian Peningkatan penyediaan data statistik sektoral Peningkatan pendapatan daerah dari pengelolaan asset daerah Peningkatan pendapatan daerah dari pajak dan retribusi 	<ol style="list-style-type: none"> Opini BPK (Opini) Instansi Pemerintah yang Akuntabel (Skor hasil evaluasi SAKIP) Tingkat kapasitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) Tingkat Kematangan Implementasi SPIP (Sistem Pengawasan Intern Pemerintah) Penggunaan E-Procurement terhadap Pengadaan Barang dan Jasa Indeks e-Government Provinsi Keterbukaan Informasi Publik Instansi Pemerintah yang memiliki indeks Reformasi B (Kategori B keatas) Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) Tertib Arsip 	<p>Opini Predikat</p> <p>Level 1-5</p> <p>Level 1-5</p> <p>%</p> <p>Skor 0-4</p> <p>Indeks Skor 1-100</p> <p>Skor 0-4</p> <p>Jumlah perangkat daerah (Kumulatif) OPD</p>	<p>WTP BB</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>100</p> <p>2,2</p> <p>55 NA</p> <p>2,46</p> <p>10</p> <p>13</p>	<p>WTP A</p> <p>3</p> <p>3</p> <p>100</p> <p>3</p> <p>80 100</p> <p>3</p> <p>20</p> <p>50</p>	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Provinsi dan perangkat daerah Provinsi Sumatera Barat Manajemen Perubahan Penataan Kelembagaan Daerah Pemerintah Daerah Pengelolaan Otonomi Daerah Penataan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah Implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Pengelolaan e-Government Pemerintah Daerah Pengamanan Informasi Pemerintah dan persandian Peningkatan penyediaan data statistik sektoral Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik Peningkatan pelayanan kedinasan 	<p>Fungsi lainnya</p> <p>Fungsi lainnya</p> <p>Fungsi lainnya</p> <p>Fungsi lainnya</p> <p>Fungsi lainnya</p> <p>Fungsi lainnya</p> <p>Fungsi lainnya</p> <p>Fungsi lainnya</p> <p>Komunikasi dan Informatika</p> <p>Persandian</p> <p>Statistik</p> <p>Perencanaan Pembangunan</p> <p>Fungsi lainnya</p>	<p>Inspektorat</p> <p>Setda (Biro Organisasi)</p> <p>Setda (Biro Organisasi)</p> <p>Setda (Biro Organisasi)</p> <p>Setda (Biro Pemerintahan)</p> <p>Setda (Biro Organisasi)</p> <p>Inspektorat</p> <p>Dinas Kominfo</p> <p>Dinas Kominfo</p> <p>Dinas Kominfo</p> <p>Bappeda, (LPSE)</p> <p>Setda (Biro Umum), Badan Penghubung</p>

NO	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
			15. Penataan pemerintahan nagari desa/ kelurahan 16. Percepatan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis accrual 17. Peningkatan pengamanan dan penertiban Barang Milik Daerah (BMD) 18. Modrenisasi pengelolaan barang milik daerah 19. Peningkatan kualitas proses pengadaan barang dan jasa. 20. Penyusunan Peraturan pengelolaan pendapatan daeran 21. Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. 22. Pengembangan sistim informasi pengelolaan keuangan daerah Peningkatan kompetensi aparatur pengelola keuangan daerah 23. Pelaksanaan pembinaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku 24. Penerapan tertib arsip daerah berbasis teknologi infomasi 25. Penyusunan produk hukum daerah yang responsif terhadap pemerintahan yang baik					13. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 14. Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Nagari 15. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah 16. Peningkatan Pendapatan Daerah 17. Pebinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota 18. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 19. Peningkatan kinerja perangkat daerah dan ketatalaksanaan pemerintah daerah 20. Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 21. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 22. Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan	Fungsi lainnya Pemberdayaan masyarakat dan Desa Fungsi Keuangan Fungsi Keuangan Fungsi Keuangan Fungsi Keuangan Fungsi lainnya Perdagangan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tenaga Kerja Fungsi lainnya Fungsi lainnya Fungsi Lainnya Kearsipan	Setda (Biro Humas) Dinas PMD Bakeuda Bakeuda Bakeuda Setda (Biro Umum) Disperindang Dinas PU PR Disnakertrans Setda (Biro APPBMD) Setda (Biro APPBMD) Set. DPRD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

NO	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
								23. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengelolaan Sistem Kearsipan 24. Administrasi Kewilayahan Pemerintah Daerah 25. Penguatan kelembagaan Pemerintahan Nagari 26. Penguatan kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi masyarakat 27. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/Nagari 28. <i>Pembangunan Kawasan Perdesaan</i> Program Prioritas Lainnya : 1. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kearsipan Fungsi lainnya Pemberdayaan masyarakat Desa Pemberdayaan masyarakat Desa Pemberdayaan masyarakat Desa <i>Pemberdayaan masyarakat Desa</i>	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Setda (Biro Pemerintahan) Dinas PMD Dinas PMD Dinas PMD <i>Dinas PMD</i> Seluruh OPD Provinsi
4	Meningkatnya sinergitas antara pelaku pembangunan dalam pencapaian sasaran pembangunan	1. Meningkatkan keterpaduan, sinergitas, sinkronisasi dan kerjasama dalam pengelolaan pembangunan. 2. Meningkatkan kualitas dan sinergitas proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah	1. Penyelarasan fungsi perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi serta pelaporan berbasis Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) 2. Peningkatan transparansi melalui pengelolaan dan pelayanan informasi 3. Peningkatan kualitas koordinasi dengan semua stakeholder terkait	1. Keselarasan prioritas pembangunan Provinsi dengan Nasional dan Kabupaten/Kota sesuai dengan potensi daerah 2. Pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	% %	80 80	90 90	1. Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Pengembangan Data dan Informasi Pembangunan 3. Pengembangan Data dan Informasi	Fungsi Perencanaan Fungsi Perencanaan Fungsi lainnya	Bappeda Bappeda Setda (Biro Kerjasama dan rantau), Badan Penghubung

NO	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
				3. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan 4. Peningkatan partisipasi perantau dalam proses pembangunan	rata-rata Perda per tahun % rata-rata Pergub per tahun Jumlah Rekomendasi perantau	15	15	4. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah 5. Pembangunan Materi Hukum 6. Peningkatan Supremasi Hukum dan Perlindungan HAM 7. Peningkatan Supremasi Hukum dan Perlindungan Hukum 8. Sarana dan Informasi Hukum 9. Peningkatan Penataan Perundang-undangan 10. Peningkatan Penataan Peraturan Perundang-undangan 11. Kerjasama Pembangunan 12. Peningkatan Manajemen Pemerintah Daerah	Fungsi Perencanaan Fungsi Lainnya Fungsi Lainnya Fungsi Lainnya Fungsi Lainnya Fungsi Lainnya Fungsi Lainnya Fungsi Lainnya	Bappeda Setda (Biro Hukum) Setda (Biro Hukum) Setda (Biro Hukum) Setda (Biro Hukum) Setda (Biro Hukum) Setda (Biro Kerjasama dan rantau)
5	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1. Meningkatkan sistem serta sarana prasarana pelayanan publik berbasis teknologi informasi 2. Meningkatkan kualitas aparatur dalam pelaksanaan pelayanan publik 3. Membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan peningkatan pelayanan publik	1. Peningkatan pelimpahan kewenangan, penyederhanaan prosedur pelayanan dan perizinan 2. Peningkatan kualitas aparatur pelayanan, peningkatan kompetensi dan perubahan mentalitas/budaya melayani publik 3. Pengembangan inovasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang terintegrasi 4. Penguatan integrasi berbagai jenis pelayanan publik (pelayanan satu pintu) 5. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik	Persentase Kebutuhan Pelaksanaan UU Pelayanan Publik (Zona Hijau) (%) Rata-rata Indeks kepuasan masyarakat (74 Unit kerja pelayanan publik)	% %	100	100	1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 2. Peningkatan pelayanan publik 3. Penerapan Kepemerintahan yang baik 4. Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik	Fungsi Lainnya Fungsi Keuangan Fungsi Lainnya Fungsi Lainnya	Setda (Biro Organisasi), Bakeuda Badan Penghubung Setda (Biro Perekonomian) Setda (Biro Umum), Setda (Biro APPBMD)

NO	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
				<ul style="list-style-type: none"> 6. Peningkatan akses informasi publik yang akurat dan up to date 7. Peningkatan efektifitas pengawasan pelayanan publik 8. Penguatan sistem pengaduan masyarakat yang efektif dan terintegrasi 9. Penerapan penghargaan dan sanksi terhadap kinerja pelayanan public 						

MISI 3 : MENINGKATKAN SUMBERDAYA MANUSIA YANG CERDAS, SEHAT, BERIMAN, BERKARAKTER, DAN BERKUALITAS TINGGI

NO	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
Prioritas 3 : Meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan										
1	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan keterpaduan dan pemerataan penyediaan layanan pendidikan Meningkatkan akses pada siswa miskin dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan 	<ol style="list-style-type: none"> Penyediaan bantuan untuk anak yang berasal dari keluarga kurang mampu agar dapat mengikuti pendidikan dasar dan menengah Pelaksanaan Wajib Belajar 9 tahun dan rintisan 12 tahun untuk memenuhi hak seluruh penduduk mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas untuk menjamin seluruh anak dapat menyelesaikan jenjang pendidikan dasar dan menengah Penyediaan pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus dan pendidikan inklusif Peningkatan angka partisipasi murni pendidikan secara merata di setiap daerah. Peningkatan ketersediaan SMA, SMK dan SMALB di daerah yang belum memiliki satuan pendidikan menengah, melalui pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), penambahan Ruang Kelas Baru (RKB), dan pembangunan SMP-SMA satu atap; dan meningkatkan ketersediaan SMK yang terkait dengan prioritas pembangunan daerah. 	<p>Harapan lama sekolah</p> <p>Rata-rata lama sekolah</p>	<p>Tahun</p> <p>Tahun</p>	<p>13.94</p> <p>8.46</p>	<p>15.09</p> <p>8.66</p>	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Pendidikan Peningkatan Akses dan Pemerataan Pendidikan Menengah Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus 	<p>Pendidikan</p> <p>Pendidikan</p> <p>Pendidikan</p>	<p>Setda (Biro Birtal dan Kesra)</p> <p>Dinas Pendidikan</p> <p>Dinas Pendidikan</p>
2	Meningkatnya integritas peserta didik	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan keterpaduan dalam membangun integritas peserta didik Melaksanakan pendidikan karakter bagi anak-anak usia sekolah pada semua jenjang pendidikan untuk memperkuat nilai-nilai moral, akhlak yang mulia. 	<ol style="list-style-type: none"> Penguatan pendidikan karakter yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran dan budaya sekolah Peningkatan mutu pembelajaran yang berorientasi pada ranah afektif dalam peningkatan pendidikan karakter Peningkatan kualitas pendidikan karakter pada anak-anak usia sekolah pada semua jenjang pendidikan dan jenis pendidikan untuk membina budi pekerti, akhlak, karakter, dan kepribadian peserta didik 	Indeks Integritas Siswa	Skor 1-100	66	100	Pendidikan Berkarakter	Pendidikan	Dinas Pendidikan

NO	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
		<p>3. Melakukan integrasi pendidikan karakter kedalam mata pelajaran dan pengelolaan sekolah</p> <p>4. Melakukan pembentukan karakter dan jati diri siswa melalui pengembangan, pembinaan dan penggunaan bahasa dan sastra dan nilai-nilai ajaran agama</p> <p>5. Meningkatkan perilaku dan suri tauladan mulai dari kepala sekolah, guru dan pengawas pendidikan</p>	<p>4. Pengembangan budaya sekolah yang kondusif bagi penciptaan lingkungan belajar yang baik dan menyenangkan bagi siswa untuk mendorong terlaksananya pendidikan karakter</p> <p>5. Peningkatan peran aktif siswa dan guru sebagai fasilitator untuk meningkatkan proses pembelajaran dikelas sehingga peserta didik dapat mengekspresikan dirinya dengan lebih baik dan mendorong peserta didik untuk membentuk perilaku yang berkarakter di sekolah</p> <p>6. Penguatan kurikulum tentang ketahanan diri seperti perilaku hidup bersih dan sehat, kepedulian terhadap lingkungan, kesehatan reproduksi, pengetahuan gizi seimbang, pendidikan jasmani serta kewirausahaan</p>							
3	Meningkatnya pemerataan dan kualitas pendidikan	<p>1. Meningkatkan keterpaduan dalam penyediaan layanan pendidikan yang lebih merata dan berkualitas pada semua jenjang pendidikan sejak pendidikan usiadini</p> <p>2. Memberikan pemenuhan hak terhadap pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM)</p>	<p>1. Peningkatan angka partisipasi PAUD dalam rangka meningkatkan kesiapan anak bersekolah untuk mendukung peningkatan kualitas wajib belajar 9 tahun dan rintisan wajib belajar 12 tahun</p> <p>2. Penyediaan pendidikan inklusif dan layanan khusus pada pendidikan menengah terutama untuk memberi akses bagi anak yang tidak bisa mengikuti pendidikan reguler;</p> <p>3. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan untuk mendorong kemauan orang tua menyekolahkan anak ke jenjang yang lebih tinggi;</p>	<p>1. APK PAUD</p> <p>2. APM SD/SDLB/MI/Paket A</p> <p>3. APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B</p> <p>4. APM SMA/SMK/SMALB/MA/Paket C</p> <p>5. Angka tidak melanjutkan dari SMP ke Sekolah Menengah</p> <p>6. Angka Putus SMA</p> <p>7. Angka Putus SMK</p> <p>8. Kompetensi Tenaga Pendidik (Guru SMA, SMK dan PLB)</p>	<p>%</p> <p>%</p> <p>%</p> <p>%</p> <p>%</p> <p>%</p> <p>%</p> <p>Skor 0-100</p>	<p>68,15</p> <p>99,58</p> <p>81,20</p> <p>73,15</p> <p>1,43</p> <p>0,83</p> <p>0,82</p> <p>59,93</p>	<p>77,50</p> <p>100</p> <p>81,55</p> <p>73,35</p> <p>0,18</p> <p>0,58</p> <p>0,58</p> <p>86,18</p>	<p>1. Peningkatan Akses dan Pemerataan Pendidikan Menengah</p> <p>2. Peningkatan Akses, Pemerataan dan Mutu Sekolah Menengah Kejuruan</p> <p>3. Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan</p>	<p>Pendidikan</p> <p>Pendidikan</p> <p>Pendidikan</p>	<p>Dinas Pendidikan</p> <p>Dinas Pendidikan</p> <p>Dinas Pendidikan</p>

NO	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
		3. Meningkatkan inovasi dan teknologi dalam pembangunan pendidikan 4. Meningkatkan kualitas, kuantitas dan relevansi pendidikan 5. Meningkatkan kemampuan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	4. Peningkatan pemerataan distribusi dan kualifikasi guru 5. Peningkatan kualitas dan penerapan kurikulum pendidikan berbasis kompetensi 6. Peningkatan kualifikasi pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, laboran, pustakawan dan tata usaha 7. Peningkatan kompetensi pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, laboran, pustakawan dan tenaga tata usaha 8. Peningkatan manajemen sekolah dan proses pembelajaran yang efektif dan menyenangkan 9. Peningkatan pelayanan perpustakaan sebagai sumber belajar berbasis teknologi informasi	9. Kompetensi Tenaga Kependidikan (Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah, Laboran, Pustakawan dan Pegawai TU Sekolah) 10. Sekolah Menengah Terakreditasi Minimal B	Skor 0-100 Jumlah Sekolah	16,67	38,56	4. <i>Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Pendidikan</i> 5. Peningkatan SDM Pertanian 6. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Pertanian	Pendidikan Pendidikan	Dinas Pendidikan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura & Perkebunan
4	Meningkatnya daya saing lulusan pendidikan menengah untuk masuk perguruan tinggi atau pasar bekerja	1. Meningkatkan keterpaduan, sinergitas dan sinkronisasi kegiatan bagi peningkatan kualitas lulusan sekolah menengah 2. Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan, pelatihan keterampilan dan uji kompetensi bagi peserta pelatihan 3. Menyelaraskan bidang studi SMK dengan kegiatan ekonomi utama di kabupaten dan kota sesuai dengan potensi daerah bersangkutan	1. Penguatan kompetensi keahlian di SMK untuk bidang-bidang aplikatif; 2. Penguatan kecakapan akademik siswa SMK untuk memenuhi kebutuhan industri yang mensyaratkan penguasaan keterampilan dasar; 3. Pengembangan kurikulum SMK yang diselaraskan dengan kebutuhan lapangan kerja berdasarkan masukan dari dunia usaha/dunia industri; 4. Peningkatan proporsi siswa SMK yang dapat mengikuti program pemagangan di dunia usaha dan dunia industri	1. Angka kelulusan SMA 2. Angka kelulusan SMK 3. Lulusan Sekolah Menengah yang diterima di Perguruan Tinggi 4. Lulusan SMK yang diterima di dunia usaha dan industri (DUDI)	% % % %	97,21	99,15	1. <i>Peningkatan Akses dan Pemerataan Pendidikan Menengah</i> 2. <i>Peningkatan Mutu, relevansi dan Daya Saing Pendidikan Menengah</i>	Pendidikan Pendidikan	Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan

NO	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
		4. Meningkatkan relevansi pendidikan kejuruan dengan kebutuhan dunia kerja dan pendidikan kecakapan hidup untuk SMA	5. Penguatan kecakapan akademik siswa SMK, seperti matematika, kimia, fisika dan pemecahan masalah serta bahasa Inggris untuk memenuhi kebutuhan industri yang mensyaratkan penguasaan keterampilan dasar pada era globalisasi; 6. Peningkatan kesiapan peserta didik SMA dan SMK untuk memasuki pasar kerja atau melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi dan pelaksanaan pendidikan kecakapan hidup pada SMA							
5	Meningkatnya minat baca dan budaya membaca	1. Meningkatkan keterpaduan dalam menggerakkan minat baca dan budaya membaca masyarakat 2. Meningkatkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan media cetak dan elektronik 3. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi 4. Meningkatkan profesionalitas pustakawan serta sarana prasarana perpustakaan	1. Peningkatan minat dan budaya gemar membacamasyarakat 2. Peningkatan efektifitas dan kualitas layanan perpustakaan, baik kapasitas dan akses, maupun utilitas 3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasana perpustakaan, 4. Peningkatan jangkauan layanan perpustakaan, dengan memanfaatkan teknologi informasi 5. Peningkatan pustakawan yang profesional dan bersertifikat 6. Peningkatan kualitas dan keberagaman koleksi perpustakaan termasuk naskah kuno	1. Fasilitas layanan perpustakaan daerah berbasis Teknologi Informasi 2. Jumlah dan keragaman koleksi perpustakaan 3. Kenaikan Kunjungan perpustakaan	% % rata-rata kenaikan	N.A 13.000 1.000	N.A 13.000 1.000	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Perpustakaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
6	Meningkatnya fungsi penelitian dan pengembangan serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	1. Meningkatkan keterpaduan, sinergitas dan sinkronisasi didalam pelaksanaan fungsi penelitian dan pengembangan,	1. Penyediaan dan peningkatan kualitas SDM Kelitbang 2. Pengembangan dan penguatan jaringan antar lembaga litbang dan peneliti di lingkup daerah	Penerapan hasil penelitian dan pengembangan dalam kebijakan pembangunan	% %	65 NA	80 95	1. Penelitian dan Pengembangan IPTEK untuk Menunjang Pemerintahan dan Pembangunan 2. Pengembangan Teknologi Tepat Guna	Fungsi Litbang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Balitbang Dinas PMD

NO	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
		2. Meningkatkan pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pelaksanaan pembangunan 3. Melakukan penguatan kelembagaan penelitian dan pengembangan	3. Pengembangan sistem inovasi daerah 4. Pembangunan technopark sebagai pusat inovasi teknologi bagi pengembangan usaha	1. Peningkatan pemanfaatan inovasi penyelenggaraan pemerintah daerah 2. Peningkatan pemanfaatan inovasi produk dan teknologi	% %	NA NA	95 95	<i>Penguatan Inovasi Daerah</i>	<i>Fungsi Litbang</i>	<i>Balitbang</i>
Prioritas 4 : Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat										
7	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat secara merata	1. Meningkatkan keterpaduan dalam pelayanan kesehatan masyarakat yang lebih merata. 2. Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan 3. Meningkatkan akses layanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas 4. Meningkatkan jumlah dan kualitas sumber daya kesehatan serta kefarmasian dan alat kesehatan 5. Meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam peningkatan pembiayaan promotif dan preventif untuk layanan kesehatan 5. Meningkatkan jaminan kesehatan masyarakat kurang mampu	1. Peningkatan layanan kesehatan dengan lebih menitikberatkan pada upaya promotif dan preventif 2. Pemberdayaan masyarakat dan peningkatan upaya promosi kesehatan 3. Penguatan gerakan masyarakat, lembaga pemerintah dan swasta dalam peningkatan upaya kesehatan masyarakat 4. Peningkatan pelayanan dasar dan rujukan yang berkualitas 5. Peningkatan akreditasi rumah sakit daerah 6. Peningkatan perbaikan gizi masyarakat 7. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak 8. Peningkatan cakupan akses, keterjangkauan dan mutu pelayanan kesehatan 9. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dan gizi dengan fokus utama pada 1000 hari kehidupan manusia 10. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular terutama HIV dan tuberculosis 11. Peningkatan pemerataan dan kualitas kesehatan lingkungan	1. Angka harapan hidup 2. Rumah Sakit Provinsi Terakreditasi 3. Persentase kepesertaan jaminan Kesehatan Nasional/ KIS	Tahun Jumlah RS Terakreditasi %	68,79 1 69,27	69,44 5 100	1. Obat dan Perbekalan Kesehatan 2. Upaya Kesehatan Masyarakat 3. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 4. Perbaikan Gizi Masyarakat 5. Pengembangan Lingkungan Sehat 6. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular/Tidak Menular 7. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata 8. Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata	Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan	Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes (RS Paru), RSAM, RSJ HB Saanin, RSUD Solok, RSUD Pariaman

NO	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
			12. Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan dan kualitas farmasi dan alat kesehatan 13. Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya kesehatan yang memiliki kompetensi dan terstandarisasi 14. Peningkatan kualitas pelayanan dan rehabilitasi gangguan kesehatan kejiwaan 15. Peningkatan efektifitas pembiayaan kesehatan 16. Peningkatan ketepatan sasaran pemberian jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin					7. Peningkatan Sumber Daya Kesehatan 8. Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan 9. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 10. Peningkatan Pelayanan BLUD 11. Standarisasi pelayanan kesehatan	Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan	Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes (BKIM, RS Paru), RSAM, RSJ HB Saanin, RSUD Solok, RSUD Pariaman Dinkes (BKIM, RS Paru), RSAM, RSJ HB Saanin, RSUD Solok, RSUD Pariaman
8	Meningkatnya kualitas kependudukan, pembangunan keluarga dan Keluarga Berencana	1. Meningkatkan keterpaduan dalam pembangunan kependudukan dan keluarga berencana 2. Menyiapkan kebijakan kependudukan yang sinergis antara aspek kuantitas, kualitas dan mobilitas penduduk; 3. Melakukan penguatan dan pemaduserasian kebijakan pelayanan keluarga berencana yang merata dan berkualitas	1. Peningkatan koordinasi dan supervisi peran lembaga di tingkat masyarakat untuk mendukung pergerakan dan penyuluhan keluarga berencana 2. Penyusunan kebijakan dan strategi yang komprehensif dan terpadu, antar sektor dan antara pusat - daerah, tentang Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) dan konseling kesehatan reproduksi remaja 3. Peningkatan fungsi dan peran, serta kualitas dan kuantitas kegiatan kelompok remaja tentang kependudukan dan keluarga berencana	1. Total Fertility Rate (TFR) per Wanita Usia Subur (WUS) usia 15-49 tahun 2. CPR (Prevalensi Pemakaian Alat Kontrasepsi) 3. Unmed Need (kebutuhan ber KB) 4. ASFR 15-19 tahun 5. Kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49 tahun)	% % % Rasio kelahiran per 1000 wanita %	2,61 52,5 8,3 21,0 12,4	2,33 60,2 5,8 11,9 6,1	1. Keluarga Berencana 2. Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi Remaja 3. Penyiapan tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Pengendalian penduduk dan KB Pengendalian penduduk dan KB Pengendalian penduduk dan KB	Dinas PP KB & Duk Capil, Dinas Kesehatan Dinas PP KB & Duk Capil Dinas PP KB & Duk Capil

NO	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
		4. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya keluarga berencana dalam peningkatan kesejahteraan keluarga	4. Penguatan koordinasi terpadu lintas sektor terkait perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan kependudukan dan keluarga berencana; 5. Penyebarluasan informasi tentang kependudukan dan keluarga berencana 6. Peningkatan kualitas data kependudukan yang akurat dan tepat waktu	6. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	1,22	1,02	4. Peningkatan Pengendalian Kependudukan 5. Penataan Administrasi Kependudukan	Pengendalian penduduk dan KB Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas PP KB & Duk Capil Dinas PP KB & Duk Capil
9	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berolah raga	5. Meningkatkan keterpaduan untuk membangun kesadaran masyarakat dalam berolah raga. 6. Meningkatkan pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga secara sistematis, berjenjang dan berkelanjutan. 7. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana olahraga 8. Meningkatkan apresiasi terhadap atlet dan pelatih yang berprestasi	6. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga serta pemanfaatannya oleh masyarakat 7. Peningkatan kualitas atlit dan pelatih 8. Peningkatan sumberdaya manusia olahraga pada sektor pendidikan 9. Peningkatan kompetisi olahraga 10. Peningkatan dan pengembangan sistem penghargaan untuk atlit dan pelatih	1. Klub olah raga 2. Capaian Medali Emas dalam Kejurnas PPLP	% Peningkatan Jumlah	N.A N.A	42 N.A	1. Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 3. Pengembangan Organisasi Pemuda dan Manajemen Olahraga	Kepemudaan dan Olahraga Kepemudaan dan Olahraga Kepemudaan dan Olahraga	Dispora Dispora Dispora
10	Meningkatnya kapasitas pemuda dan kepemimpinan pemuda dalam pembangunan	1. Meningkatkan peran aktif pemuda di bidang kewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinan dalam pembangunan 2. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi pemuda	1. Peningkatan pendidikan dan ketrampilan pemuda 2. Peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan 3. Peningkatan penguatan karakter dan jati diri pemuda 4. Peningkatan keikutsertaan pemuda dalam kepramukaan 5. Peningkatan aktivitas kepemudaan dalam pembangunan daerah	Peran pemuda dalam pembangunan (organisasi kepemudaan yang aktif)	1. % Organisasi Kepemudaan yang aktif 2. Jumlah wirausaha muda (orang)	12 N.A	22 60	1. Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 2. Peningkatan Penyadaran Kepemudaan	Kepemudaan dan Olahraga Kepemudaan dan Olahraga	Dispora Dispora

NO	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
11	Meningkatnya pembangunan gender dan pemberdayaan gender serta pemenuhan hak anak	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan keterpaduan dalam pembangunan gender dan pemberdayaan gender serta pemenuhan hak anak Memperkuat peran dan fungsi pengarusutamaan gender (PUG) Meningkatkan perlindungan perempuan, anak dan pemenuhan hak anak 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan koordinasi dan harmonisasi setiap kebijakan berperspektif gender dan pemenuhan hak anak serta perlindungan perempuan dan anak Peningkatan pemahaman pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi kegiatan di provinsi dan kabupaten/kota serta antara pemerintah dan organisasi terkait dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak Penguatan sistem data terpilah termasuk data anak untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan Peningkatan kualitas layanan pengaduan masyarakat terkait perempuan dan anak Penguatan koordinasi, kerjasama, dan sinergi antar satuan kerja dan lembaga jejaring 	1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	94,68	95,08	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Peningkatan Perlindungan Perempuan Peningkatan Kualitas Keluarga Peningkatan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak Peningkatan Sistem Data Gender dan Anak Peningkatan Perlindungan Khusus Anak 	Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	DPP dan PA
				2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	62,02	62,42			
				3. Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	Kab/Kota	7	12			

MISI 4 : MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS KERAKYATAN YANG TANGGUH, PRODUKTIF, DAN BERDAYA SAING REGIONAL DAN GLOBAL, DENGAN MENGOPTIMALKAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA PEMBANGUNAN DAERAH

NO	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
Prioitas 5 : Peningkatan Produksi untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional dan Pengembangan Agribisnis										
1	Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan	4. Meningkatkan produksi dan diversifikasi produk pangan 5. Meningkatkan penganeekaragaman konsumsi pangan 6. Menguatkan kelembagaan pangan	7. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan 8. Peningkatan penguatan cadangan pangan 9. Peningkatan keamanan pangan 10. Peningkatan produksi pangan utama 11. Percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman 12. Peningkatan peran kelembagaan pangan di pemerintahan dan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan Persentase peningkatan produksi : • Padi • Jagung • Cabe • Daging • Telur • Ikan	%	84	87	1. Peningkatan Ketahanan Pangan 2. Diversifikasi Pangan 3. Peningkatan Produksi dan produktivitas 4. Peningkatan Produksi dan Produktivitas 5. Pengembangan Perikanan Ekonomi Maritim	Pangan Pangan Pertanian Pertanian Kelautan & Perikanan	Dinas Pangan Dinas Pangan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Peternakan & keswan Dinas Kelautan dan Perikanan,
2	Meningkatnya usaha pertanian dengan sistem agribisnis	1. Mengembangkan sistim usaha tani yang mengintegrasikan kegiatan usaha hulu dan hilir 2. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi pertanian yang mempunyai keunggulan komperatif pada kawasan usaha tani 3. Meningkatkan pemanfaatan teknologi tepat guna dalam usaha tani	9. Peningkatan produksi komoditi unggulan pertanian dan perikanan dengan pendekatan potensi wilayah 10. Pengembangan kawasan sentra produksi, agribisnis dan minapolitan 11. Penerapan standarisasi dan sertifikasi produk pertanian dan perikanan 12. Peningkatan usaha investasi pertanian dan perikanan 13. Peningkatan pemanfaatan inovasi dan teknologi tepat guna pertanian dan perikanan 14. Peningkatan pemanfaatan benih dan bibit unggul serta perluasan logistiknya	Persentase Peningkatan Kawasan Sentra Produksi - KSP - Kawasan Agribisnis	Kawasan Kawasan	119 6	154 15	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis	Pertanian	- Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan - Dinas Peternakan & Keswan - Dinas Kelautan & Perikanan

NO	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
			15. Penerapan standarisasi jaminan mutu komoditi dan produk olahan pertanian dan perikanan 16. Pejangkauan jaringan pemasaran produk pertanian dan perikanan							
3	Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Nelayan	1. Meningkatkan produktifitas dan nilai tambah usaha pertanian dan perikanan	1. Peningkatan produktifitas dan produksi komoditi unggulan pertanian dan perikanan. 2. Peningkatan dan penguatan kapasitas kelompok dan kelembagaan petani dan nelayan 3. Penumbuhan dan peningkatan olahan limbah organik 4. Peningkatan produksi dan produktifitas perikanan budidaya, perikanan tangkap dan budidaya laut 5. Peningkatan pemanfaatan inovasi tepat guna untuk meningkatkan hasil produksi pertanian dan perikanan 6. Peningkatan pemanfaatan dan pengawasan pupuk dan pestisida	Nilai Tukar Petani Nilai Tukar Nelayan	Indeks Indeks	106,15 NA	109,65 NA	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Peningkatan Produksi dan Produktivitas	Pertanian Kelautan dan Perikanan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura & Perkebunan Dinas Peternakan & Keswan Dinas Kelautan & Perikanan
		2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM serta kapasitas kelembagaan petani dan nelayan	6. Peningkatan dan penguatan SDM pertanian dan perikanan 7. Peningkatan dan penguatan kapasitas kelompok dan kelembagaan petani dan nelayan 8. Peningkatan kemitraan antara kelompok pengolahan dengan perusahaan 9. Peningkatan SDM dan penguatan kapasitas kelembagaan pertanian, perikanan dan kehutanan 10. Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan penyuluhan					Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Pemberdayaan Penyuluhan	Pertanian Kelautan dan Perikanan Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Peternakan & Keswan Dinas Kelautan & Perikanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura & Perkebunan

NO	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
		3. Meningkatkan dan mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan	1. Peningkatan dan revitalisasi sarana prasarana UPTD pertanian dan perikanan 2. Penyebarluasan penggunaan alsintan dan prasarana pertanian dan perikanan 3. Pembangunan dan perbaikan irigasi teknis					Peningkatan Sarana dan Prasarana	Pertanian Kelautan dan Perikanan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura & Perkebunan, Dinas Peternakan & Keswan Dinas Kelautan dan Perikanan
		4. Meningkatkan nilai tambah produk olahan pertanian serta jejaring pemasaran	1. Penerapan standarisasi jaminan mutu komoditi dan produk olahan pertanian 2. Peningkatan dan penguatan kelompok petani, petani ikan dan usaha pengolahan hasil pertanian dan perikanan 3. Peningkatan Kemitraan antara kelompok pengolahan dengan pengusaha					Pengolahan dan Pemasaran Hasil	Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura & Perkebunan Dinas Peternakan & Keswan Dinas Kelautan dan Perikanan
		5. Mengendalikan penyakit menular dan pengamanan sumber daya hewani	3. Pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan 4. Peningkatan pelayanan labor keswan dan klinik hewan					Pengamanan sumber daya hewani	Pertanian	Dinas Peternakan & Keswan
Prioritas 6 : Pengembangan pariwisata, industri, perdagangan, koperasi, UMKM dan peningkatan investasi										
4	Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah	1. Meningkatkan pengembangan usaha-usaha ekonomi berbasis kerakyatan 2. Mengembangkan usaha hilirisasi produk (industri pengolahan) 3. Meningkatkan daya saing produk usaha-usaha ekonomi berbasis kerakyatan 4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pelaku usaha-usaha ekonomi kerakyatan	15. Pengembangan dan peningkatan usaha industri berbasis klaster 16. Pengembangan dan penumbuhan sentra industri potensial 17. Pengembangan industri rumah tangga berbasis agro dan non agro 18. Peningkatan pemberdayaan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi 19. Penumbuhan koperasi sektor rill di bidang pertanian, perikanan, industri dan usaha kecil, pariwisata	1. Pertumbuhan ekonomi 2. PMA 3. PMDN 4. Peningkatan Nilai Ekspor 5. PDRB per Kapita 6. Indeks Gini	% US\$ Rp. Juta % Rp.Juta Indeks	5,26 39.754,32 3.185.075,82 1 36,48 0,331	5,92 70.427,20 3.803.147,10 2,5 48,91 0,327	1. Pengembangan kewilayahan industri 2. Pengembangan industri kecil dan menengah 3. Peningkatan Kualitas Produk Industri 4. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi 5. Peningkatan dan pengembangan daya saing koperasi 6. Peningkatan dan pengembangan daya saing UMKM	Perindustrian Perindustrian Perindustrian Koperasi dan UKM	Dinas Perindag Dinas Perindag Dinas Perindag Dinas Koperasi dan UKM

NO	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
		<p>5. Menjamin ketersediaan bahan baku bagi pengembangan usaha industri kecil</p> <p>6. Meningkatkan akses pembiayaan usaha-usaha ekonomi kerakyatan</p> <p>7. Memperluas pemasaran usaha-usaha ekonomi kerakyatan dengan menggunakan teknologi informasi</p> <p>8. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung usaha-usaha ekonomi kerakyatan</p> <p>9. Meningkatkan pelayanan investasi</p> <p>10. Mengintensifkan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan</p> <p>11. Mengembangkan pasar ekspor</p>	<p>20. Penguatan penyediaan bahan baku industri kecil menengah unggulan</p> <p>21. Pemberdayaan usaha retail UMKM dan koperasi dengan manajemen modern, memasyarakatkan transaksi non tunai</p> <p>22. Pengembangan lembaga keuangan mikro di nagari</p> <p>23. Pengembangan usaha dan diversifikasi produk UMKM</p> <p>24. Peningkatan sumberdaya manusia pelaku usaha mikro, kecil dan menengah</p> <p>25. Peningkatan kemitraan strategis antara UMKM dengan pengusaha besar</p> <p>26. Penguatan kapabilitas UMKM di bidang manajemen usaha</p> <p>27. Peningkatan akses dan kemudahan pembiayaan usaha</p> <p>28. Pengawasan barang yang diperdagangkan sesuai standarisasi dan ketentuan yang berlaku</p> <p>29. Pengendalian stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan bahan baku industri kecil</p> <p>30. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri</p> <p>31. Peningkatan promosi dan pemasaran produk</p> <p>32. Pengembangan sistem informasi hasil produk UMKM binaan koperasi</p> <p>33. Peningkatan standarisasi dan mutu produk ekspor</p> <p>34. Peningkatan diversifikasi dan nilai tambah produk ekspor</p> <p>35. Penguatan kelembagaan dan kerjasama perdagangan regional dan internasional</p> <p>36. Pengembangan negara tujuan ekspor dan jejaring kerjasama perdagangan luar negeri</p>					<p>7. Peningkatan Perlindungan konsumen</p> <p>8. Pengembangan perdagangan dalam negeri</p> <p>9. Peningkatan dan pengembangan perdagangan luar negeri</p> <p>10. Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi</p> <p>11. Peningkatan kualitas pelayanan terpadu</p> <p>12. Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik</p>	<p>Perdagangan</p> <p>Perdagangan</p> <p>Perdagangan</p> <p>Penanaman Modal</p> <p>Penanaman Modal</p> <p>Fungsi Lainnya</p>	<p>Dinas Perindag</p> <p>Dinas Perindag</p> <p>Dinas Perindag</p> <p>DPM dan PTSP</p> <p>DPM dan PTSP</p> <p>Setda (Biro Perekonomian)</p>

NO	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
			37. Pemberian kemudahan dan fasilitasi investasi serta pengembangan layanan investasi berbasis teknologi informasi 38. Peningkatan daya saing produk, tenaga kerja, dan jasa 39. Penyusunan regulasi peningkatan pelayanan usaha yang lebih efisien, transparan dan akuntabel 40. Peningkatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal 41. Peningkatan upaya promosi investasi 42. Penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 43. Peningkatan pendapatan dari efektifitas pengelolaan BUMD 44. Peningkatan kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 45. Pengembangan layanan investasi yang memberikan kemudahan, kepastian dan transparansi proses perizinan bagi investor dan pengusaha							
5	Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara	1. Mengembangkan pariwisata berbasis keunggulan alam, budaya, kuliner, kearifan lokal dan Meeting Incentive Conference Exhibition (MICE) 2. Membenahi destinasi utama dan pengelolaan pariwisata	8. Peningkatan daya tarik destinasi utama dengan menyiapkan atraksi, fasilitas pendukung dan memberi kemudahan akses 9. Penyiapan destinasi untuk keperluan Meeting Incentive Conference Exhibition (MICE) 10. Pengembangan destinasi wisata pada daerah strategis. 11. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana destinasi pariwisata 12. Penyediaan lahan pengembangan pariwisata yang siap dimanfaatkan (<i>clear and clean</i>)	Kunjungan wisatawan 1. Nusantara 2. Mancanegara	% %	5,00 7,5	30,00 44,50	1. Pengembangan destinasi dan daya tarik pariwisata 2. Pembangunan jalan dan jembatan Provinsi 3. Pengembangan industri kecil dan menengah 4. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 5. Pengembangan nilai-nilai budaya	Pariwisata Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perindustrian Koperasi dan UKM Kebudayaan	Dinas Pariwisata Dinas PU PR Dinas Perindag Dinas Koperasi & UKM Dinas Kebudayaan

NO	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
			13. Penyediaan konektivitas antar destinasi wisata 14. Pengembangan pariwisata halal dan nuansa islami					6. <i>Peningkatan akses pemerataan dan mutu pendidikan menengah</i> 7. Rehabilitasi, Konservasi, pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan 8. Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 9. Pengelolaan e-Government Pemerintah Daerah 10. Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi 11. Pengelolaan Pertanahan 29. Pengembangan Lingkungan Sehat	Pendidikan Kelautan dan Perikanan Perhubungan Komunikasi dan Infomasi Penanaman Modal Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kesehatan	Dinas Pendidikan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Perhubungan Dinas Kominfo DPM dan PTSP Dinas Perkimtan Dinas Kesehatan
		3. Meningkatkan sumber daya manusiadan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif	1. Peningkatan perilaku sadar wisata dan pelaksanaan sapta pesona 2. Peningkatan kompetensi dan sertifikasi sumber daya manusia pelaku wisata dan ekonomi kreatif 3. Peningkatan pengaturan, penguatan kelembagaan, keamanan dan kenyamanan kepariwisataan 4. Pengembangan kualitas pelayanan kepariwisataan					1. Pengembangan kelembagaan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif 2. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 3. <i>Peningkatan Mutu, relevansi dan Daya Saing Pendidikan Menengah</i>	Pariwisata Tenaga Kerja Pendidikan	Dinas Pariwisata Disnakertrans Dinas Pendidikan

NO	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
		4. Meningkatkan peran ekonomi kreatif dalam mendukung pariwisata	1. Peningkatan ekonomi kreatif berbasis seni, budaya dan kuliner 2. Pengembangan kegiatan berbasis budaya dan atraksi. 3. Peningkatan jejaring kerjasama produk kreatif					1. Pengembangan ekonomi kreatif 2. Peningkatan dan pengembangan daya saing UMKM	Pariwisata Koperasi dan UKM	Dinas Pariwisata Dinas Koperasi & UKM
		5. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas promosi wisata	4. Peningkatan promosi dan pemasaran pariwisata berbasis teknologi informasi 5. Peningkatan kemitraan pemasaran pariwisata 6. Peningkatan citra pariwisata melalui konsep <i>branding, advertising and selling</i>					1. Pengembangan pemasaran pariwisata 2. Peningkatan Diplomasi Seni dan Budaya	Pariwisata Kebudayaan	Dinas Pariwisata Dinas Kebudayaan
Prioritas 7 :Peningkatan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan.										
6	Meningkatnya pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan dan kemaritiman	1. Mengembangkan usaha-usaha ekonomi berbasis kelautan dan kemaritiman 2. Melengkapi sarana dan prasarana pendukung pembangunan kelautan dan kemaritiman	1. Peningkatan produksi perikanan tangkap 2. Peningkatan produksi budidaya laut 3. Peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan tangkap 4. Pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan 5. Penataan sistem perizinan usaha perikanan	1. Persentase Peningkatan produksi perikanan budidaya laut 2. Persentase Peningkatan produksi perikanan tangkap	% %	0,78 0,42	1,68 1,21	1. Pengembangan Perikanan Ekonomi Maritim 2. Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis 3. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi laut	Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan Perhubungan	Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Perhubungan
		3. Mengintensifkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan kemaritiman yang berkelanjutan	1. Peningkatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya kelautan dan kemaritiman secara terpadu yang berkelanjutan 2. Pengaturan dan pengelolaan ruang laut secara optimal 3. Peningkatan pemanfaatan dan pengelolaan kawasan laut provinsi dan pulau-pulau kecil 4. Peningkatan kerjasama regional lintas pesisir wilayah pantai barat sumatera 5. Pengembangan wisata bahari	1. Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi laut 2. Meningkatnya pemanfaatan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan	Kawasan Pulau	7 13	7 25	Rehabilitasi, Konservasi, pangawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan

NO	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
Prioritas 8 Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran serta Penanganan Daerah Tertinggal										
7	Menurunnya jumlah penduduk miskin	<p>4. Meningkatkan keterpaduan dalam penurunan kemiskinan</p> <p>5. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin</p> <p>6. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin</p>	<p>8. Peningkatan efektifitas penanggulangan kemiskinan</p> <p>9. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin</p> <p>10. Peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin</p> <p>11. Pengembangan dan menjaminkeberlanjutan usaha mikro dan kecil</p> <p>12. Peningkatan sinergi kebijakandan program penanggulangan kemiskinan</p> <p>13. Peningkatan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin</p> <p>14. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat miskin</p>	1. Tingkat Kemiskinan	%	6,71	5,50	<p>1. Penanggulangan Kemiskinan</p> <p>2. <i>Peningkatan Akses dan Pemerataan Pendidikan Menengah</i></p> <p>3. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin</p> <p>4. Peningkatan Produksi dan produktifitas</p> <p>5. Peningkatan dan pengembangan daya saing UMKM</p> <p>6. Pengembangan perumahan</p> <p>7. Pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan</p> <p>8. Peningkatan Kesempatan Kerja dan Diversifikasi Usaha</p>	<p>Pemberdayaan Masyarakat</p> <p><i>Pendidikan</i></p> <p>Kesehatan</p> <p>Pertanian</p> <p>Kelautan dan Perikanan</p> <p>Koperasi dan UKM</p> <p>Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</p> <p>Energi dan Sumberdaya Mineral</p> <p>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</p>	<p>Dinas PMD</p> <p><i>Dinas Pendidikan</i></p> <p>Dinkes</p> <p>Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura & Perkebunan</p> <p>Dinas Kelautan dan Perikanan</p> <p>Dinas Koperasi dan UKM</p> <p>Dinas Perkimtan</p> <p>Dinas ESDM</p> <p>Dinas PMD</p>

NO	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
8	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	3. Meningkatkan keterpaduan dalam mengatasi pengangguran 4. Meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	7. Pengembangan kesempatan kerja melalui peningkatan lapangan usaha produktif secara terpadu. 8. Peningkatan kualitas tenaga kerja. 9. Peningkatan sarana dan prasarana latihan kerja. 10. Peningkatan hubungan industrial ketenagakerjaan. 11. Peningkatan kewirausahaan 12. Peningkatan penyebaran informasi kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,68	5,60	1. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tenaga Kerja	Disnakertrans
								2. Peningkatan Kesempatan Kerja dan Diversifikasi Usaha	Tenaga Kerja	Disnakertrans
								3. Pengadaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Laboratorium	Tenaga Kerja	Disnakertrans
								4. Perlindungan Tenaga Kerja dan Sistem Pengawasan Tenaga Kerja	Tenaga Kerja	Disnakertrans
								5. Perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	Tenaga Kerja	Disnakertrans
9	Menurunkandaerah tertinggal	3. Meningkatkan keterpaduan dalam penanganan daerah tertinggal 4. Memenuhi standar aksesibilitas daerah tertinggal	1. Pemenuhan pembangunan pelayanan dasar pada daerah tertinggal 2. Peningkatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur daerah tertinggal	Kabupaten Tertinggal	%	3	1	<i>Peningkatan Akses dan Pemerataan Pendidikan Menengah</i>	<i>Pendidikan</i>	<i>Dinas Pendidikan</i>
								Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Kesehatan	Dinas Kesehatan,
								Pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Dinas ESDM,
								Pengembangan perumahan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Perkimtan
								Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	BPBD

NO	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
				Pengembangan kawasan terpadu	Tahapan	awal	pengembangan	Pemulihan Daerah Pasca Bencana Penanggulangan Kemiskinan Percepatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur pada Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat Tramsigrasi	BPBD Dinas PMD Disnakertrans
10	Menurunnya tingkat penyandang masalah kesejahteraan sosial	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan layanan dan pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial Meningkatkan koordinasi dan kerjasama penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan pelayanan panti sosial untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Peningkatan keterampilan Fakir Miskin, KAT dan PMKS 	<p>Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penduduk Miskin - Komunitas Adat Terpencil - Penduduk Korban Tindak Kekerasan, Eksploitasi, dan Diskriminasi <p>Penduduk Telantar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penduduk Korban Bencana - Penduduk Marjinal - Penduduk Penyandang Disabilitas 	<p>% Penurunan PMKS</p> <p>% peningkatan pelayanan PMKS</p>	0,1	0,16	<ol style="list-style-type: none"> Koordinasi Bidang Kesejahteraan Sosial Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pembinaan Anak Terlantar Pembinaan Para Penyandang Dissabilitas dan Eks Trauma <i>Pembinaan Panti Lanjut Usia Terlantar</i> Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 	<p>Sosial</p> <p>Sosial</p> <p>Sosial</p> <p>Sosial</p> <p>Sosial</p> <p>Sosial</p> <p>Sosial</p>	<p>Setda (Biro Bintal & Kesra)</p> <p>Dinas Sosial</p> <p>Dinas Sosial</p> <p>Dinas Sosial</p> <p><i>Dinas Sosial</i></p> <p>Dinas Sosial</p> <p>Dinas Sosial</p>

NO	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
								8. Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 9. <i>Pemberdayaan Fakir Miskin</i>	Sosial <i>Sosial</i>	Dinas Sosial <i>Dinas Sosial</i>

MISI 5 : MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

NO	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
Prioritas 9 : Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta pembangunan infrastruktur										
1	Meningkatnya Kualitas Jalan Provinsi	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan provinsi Meningkatkan kerjasama pembangunan dalam rangka peningkatan konektivitas dan aksesibilitas wilayah 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan pembangunan jalan dan jembatan provinsi Rehabilitasi jalan dan jembatan provinsi Pembangunan jalan dan jembatan untuk meningkatkan hubungan dan pengembangan wilayah Penyediaan dukungan untuk pembangunan infrastruktur prioritas dan strategis nasional (dukungan pembangunan jalan tol Padang – Batas Riau dan lain-lain) 	Kamantapan jalan provinsi (%)	%	69	75	<ol style="list-style-type: none"> Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi Peningkatan sarana prasarana kebinamargaan Peningkatan dan pengembangan jasa kontruksi 	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas PU PR
2	Meningkatnya pelayanan perhubungan/transportasi	<ol style="list-style-type: none"> Membangun konektivitas wilayah pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, objek wisata, dan simpul transportasi Mempercepat pengoperasionalan transportasi masal dalam rangka meningkatkan pelayanan publik Mengintegrasikan sistem transportasi antar inter moda 	<ol style="list-style-type: none"> Pengembangan pelayanan angkutan umum antar kota dalam provinsi, kawasan aglomerasi perkotaan, dan pelayanan angkutan perintis pada daerah-daerah terpencil Pengembangan layanan transportasi untuk mendukung pariwisata Pengembangan jaringan dan prasarana pelayanan angkutan Air, Sungai, Danau dan Penyeberangan Pembangunan infrastruktur simpul <i>transportasi</i> (bandara, pelabuhan, terminal, stasiun kereta api) Penyediaan dukungan pembangunan fasilitas keselamatan kereta api Penguatan kelembagaan dan standar pelayanan angkutan umum Peningkatan kompetensi sumber daya manusia perhubungan Penataan sistem perijinan transportasi 	Persentase peningkatan Penumpang terangkut a. Moda darat b. Moda Laut c. SDP d. Kereta Api	% % % %	7,11 2,50 4,10 6,66	42,71 15,50 24,80 40,00	<ol style="list-style-type: none"> Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Peningkatan dan pengamanan lalu lintas Pengembangan sarana dan prasarana transportasi laut Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ Peningkatan pelayanan angkutan Pembangunan sarana dan prasarana perkeretaapian Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi 	Perhubungan	Dinas Perhubungan
									Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas PU PR

NO	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
3	Meningkatnya keselamatan lalu lintas	<ol style="list-style-type: none"> Membangun kesadaran masyarakat dan penegakan hukum tertib berlalu lintas Melengkapi sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan dan pengembangan fasilitas keselamatan lalu lintas Peningkatan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada daerah rawan kecelakaan Peningkatan pengawasan dan penerapan sanksi terhadap pelanggaran perizinan serta standar pelayanan 	Rasio angka kecelakaan lalu lintas (kematian per 10.000 registrasi kend)		2,71	2,67	<ol style="list-style-type: none"> Pembangunan sarana dan prasarana fasilitas perhubungan Peningkatan dan pengamanan lalu lintas Pengembangan sarana dan prasarana transportasi laut Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ Peningkatan Pelayanan Angkutan Pembangunan sarana dan prasarana perkeretaapian 	Perhubungan	Dinas Perhubungan
4	Meningkatnya kualitas pengelolaan sumberdaya air	<ol style="list-style-type: none"> Menguatkan peran kelembagaan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya air Mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana sumberdaya air 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan fungsi kelembagaan dalam pengaturan sumberdaya air Peningkatan pengelolaan sumber daya air dan sistem irigasi partisipatif untuk meningkatkan produksi pangan Peningkatan pembangunan, rehabilitasi, operasional dan pemeliharaan infrastruktur irigasi Peningkatan pembangunan, rehabilitasi, operasional dan pemeliharaan infrastruktur konservasi sumber daya air Peningkatan pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan infrastruktur pengendali daya rusak air (pantai, sungai,) 	<ol style="list-style-type: none"> Rata-rata Indeks kinerja infrastruktur irigasi provinsi Persentase Peningkatan kapasitas tampungan sumber-sumber air Persentase pengurangan luas kawasan yang terdampak daya rusak air 	<p>%</p> <p>%</p> <p>%</p> <p>%</p>	67,31	68,80	<ol style="list-style-type: none"> Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Kewenangan Provinsi Lainnya Pengendalian banjir dan pengamanan pantai Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber air lainnya Peningkatan dan Pengembangan Jasa Konstruksi Penyediaan dan pengolahan air baku 	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas PSDA

NO	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
5	Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana umum pada kawasan pemukiman/perumahan, lingkungan dan bangunan gedung	<p>3. Membenahi prasarana dan sarana umum di kawasan pemukiman/perumahan dan lingkungan</p> <p>4. Meningkatkan peran swasta dan masyarakat dalam penyediaan prasarana umum pada kawasan pemukiman/perumahan, lingkungan</p>	<p>1. Pembangunan, rehabilitasi sarana dan prasarana kawasan permukiman kumuh.</p> <p>2. Pengembangan sistem pengelolaan air minum regional, tempat pembuangan akhir regional, dan drainase</p> <p>3. Peningkatan kualitas dan penataan bangunan dan lingkungan</p>	<p>Persentase cakupan pelayanan kawasan permukiman dan bangunan lingkungan</p> <p>-air minum</p> <p>- Rumah tangga bersanitasi</p> <p>- Penurunan kawasan kumuh</p>	<p>%</p> <p>%</p> <p>%</p>	68	86	<p>1. Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota</p> <p>2. Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional</p> <p>3. Pengelolaan sistem drainase kewenangan provinsi</p> <p>4. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah</p> <p>5. Pengembangan perumahan</p> <p>6. Pemberdayaan komunitas perumahan</p> <p>7. Pengelolaan Pertanahan</p> <p>8. Pengelolaan dan Pengembangan SPAM lintas daerah kab/kota</p>	<p>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p> <p>Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</p> <p>Pekerjaan Umum dan</p> <p>Penataan Ruang</p> <p>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p> <p>Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</p> <p>Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</p> <p>Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</p> <p>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p>	<p>Dinas PU PR</p> <p>Dinas Perkimtan</p> <p>Dinas PUPR</p> <p>Dinas PUPR</p> <p>Dinas Perkimtan</p> <p>Dinas Perkimtan</p> <p>Dinas Perkimtan</p> <p>Dinas PU PR</p>

NO	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
6	Meningkatnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT)	3. Melakukan pendataan dan membangun sistem informasi potensi terukur energi baru dan terbarukan 4. Mendorong investasi untuk mengembangkan usaha pemanfaatan potensi energi baru dan terbarukan	4. Peningkatan pelayanan investasi di bidang usaha energi baru dan terbarukan 5. Peningkatan pemanfaatan aneka energi baru dan terbarukan untuk pembangkit listrik 6. Peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan listrik di daerah terisolir, terpencil dan perbatasan	Rasio elektrifikasi	%	85	99,75	1. Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan 2. Perencanaan dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Energi dan Sumberdaya Mineral	Dinas ESDM
Prioritas 10. Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana alam.										
1	Meningkatnya kesesuaian rencana pembangunan dengan tata ruang	3. Meningkatkan pengawasan, pengendalian dan pembinaan dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW 4. Melakukan pengkajian dan penyempurnaan RTRW sesuai kebutuhan pembangunan dan aturan yang berlaku	5. Penyusunan regulasi perencanaan, pengawasan dan pengendalian serta pembinaan mengacu pada rencana tata ruang. 6. Penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan strategis provinsi 7. Peningkatan peran pemangku kepentingan dalam perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian tata ruang 8. Peningkatan keterkaitan antar pusat kegiatan sesuai dengan hirarki pengembangan sistim perkotaan	Persentase kesesuaian rencana pembangunan dan tata ruang	%	79	86	1. Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang 2. Perencanaan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas PU PR
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	3. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pelestarian lingkungan 4. Mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	5. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup 6. Pengendalian dan penurunan beban pencemaran 7. Pemulihan media lingkungan yang rusak atau terkontaminasi 8. Penataan lingkungan, penyusunan dan pengimplementasian kebijakan wilayah dan sektor	Indeks Kualitas lingkungan hidup	Indeks	70,56	71,66	1. Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. 2. <i>Tata Lingkungan, Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam</i> 3. Peningkatan kualitas dan akses Informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	Lingkungan Hidup <i>Lingkungan Hidup</i> Lingkungan Hidup	Dinas LH <i>Dinas LH</i> Dinas LH

NO	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
								4. Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan. 5. <i>Pengembangan Kinerja Pengolahan Persampahan</i> 6. Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam	Lingkungan Hidup <i>Lingkungan Hidup</i> Kehutanan	Dinas LH <i>Dinas LH</i> Dinas Kehutanan
3.	Terpeliharanya fungsi ekosistem dan kualitas lahan	3. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga fungsi ekosistem kawasan hutan dan lahan 4. Melakukan pemulihan dan pengamanan fungsi kawasan hutan dan lahan	1. Peningkatan peran serta dalam pengamanan kawasan hutan 2. Pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya kehutanan 3. Peningkatan Pengawasan serta penertiban perizinan kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup 4. Pemulihan fungsi kawasan hutan dan lahan, penegakan hukum dibidang kehutanan serta peningkatan upaya mitigasi perubahan iklim	1. Persentase penurunan pertambangan tanpa izin 2. Persentase peningkatan izin penggunaan air tanah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku 3. Persentase Penurunan luas lahan kritis (Ha/Th) 4. <i>Persentase jumlah kasus illegal logging yang tertangani</i> 5. Persentase penurunan laju kerusakan hutan 6. Persentase penurunan jumlah titik panas (hotspot) dari rerata angka periode tahun sebelumnya (2011-2015)	% % % % % %	5 15 0,18 100 4,21 5	1,86 100 2,26 100 8,15 30	1. Pengelolaan mineral dan batubara 2. Perencanaan Makro dan Pemantapan Kawasan Hutan 3. <i>Pemantapan Kawasan Hutan</i> 4. Rehabilitasi & Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 5. Perlindungan dan konservasi sumber daya alam 6. Perencanaan dan Pengembangan Hutan 7. <i>Perhutanan Sosial dan Kemitraan</i> 8. Pemanfaatan potensi sumberdaya hutan 9. Pengelolaan, pengembangan konservasi air tanah 10. Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Energi	Energi dan Sumberdaya Mineral Kehutanan <i>Kehutanan</i> Kehutanan Kehutanan Kehutanan Kehutanan Kehutanan Energi dan Sumber-daya Mineral Energi dan Sumber-daya Mineral	Dinas ESDM Dinas Kehutanan <i>Dinas Kehutanan</i> Dinas Kehutanan Dinas Kehutanan Dinas Kehutanan Dinas ESDM Dinas ESDM

NO	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
								11. Peningkatan Kualitas dan Akses informasi sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, 12. Pengendalian Kebakaran Hutan	Kehutanan Kehutanan	Kehutanan Kehutanan
	4. Berkurangnya resiko bencana	3. Meningkatkan mitigasi dan adaptasi terhadap resiko bencana 4. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap manajemen resiko bencana	4. Penyediaan dan penyebarluasan informasi kebencanaan 5. Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana 6. Peningkatan sarana prasarana penanggulangan bencana	1. Persentase lokasi rawan bencana yang siap menghadapi bencana (%) 2. Persentase kelompok masyarakat di daerah rawan bencana yang siap menghadapi bencana	% %	51 51	55 55	1. Peningkatan mitigasi bencana. 2. Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana 3. <i>Pemetaan daerah rawan kebakaran</i> 4. Pengendalian banjir dan pengamanan pantai 5. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Kewenangan Provinsi lainnya	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat <i>Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</i> Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum	BPBD <i>Dinas Pol PP dan Damkar</i> Dinas PSDA Dinas PSDA
	5. Meningkatnya penanganan tanggap darurat dan pemulihan wilayah/daerah pasca bencana	1. Meningkatkan pengelolaan tanggap darurat dan pemulihan daerah pasca bencana	4. Peningkatan efektivitas evakuasi korban bencana 5. Peningkatan kualitas koordinasi dan sinkronisasi penanganan tanggap darurat bencana	1. Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana(%)	%	71	75	1. Penanganan Tanggap Darurat Bencana 2. Pemulihan daerah pasca bencana	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	BPBD

NO	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
		2. Meningkatkan kualitas aparatur dalam pengelolaan tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana	6. Rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca bencana	2. Persentase Daerah Pasca bencana yang bisa dipulihkan sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana (%)	%	71	75	3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebencanaan 4. Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan Provinsi 5. Pengembangan perumahan 6. Penanganan korban bencana alam dan bencana sosial 7. Pengendalian banjir dan pengamanan pantai 8. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Kewenangan Provinsi lainnya	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan rakyat dan kawasan permukiman Sosial	Dinas PU PR Dinas Perkimtan Dinas Sosial Dinas PSDA Dinas PSDA
6.	Terpeliharanya debit sungai	1. Memelihara dan meningkatkan tutupan vegetasi di daerah aliran sungai 2. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap fungsi kawasan konservasi	3. Penyusunan pola pendayagunaan vegetasi pada daerah tangkapan air 4. Peningkatan kerjasama antara masyarakat sekitar kawasan konservasi dengan pengguna pemanfaat air dalam perlindungan sumber daya air	Rasio debit minimum/ maksimum air sungai	Rasio	0,12	0,17	1. Perlindungan dan konservasi sumberdaya alam 2. Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 3. Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang 4. Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber air lainnya	Kehutanan Kehutanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Kehutanan Dinas Kehutanan Dinas PU PR Dinas PSDA

NO	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
	7. Meningkatnya kualitas ekosistem pesisir dan laut	3. Melakukan penataan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil 4. Melakukan pemeliharaan ekosistem pesisir dan laut	3. Peningkatan sistem pengelolaan kawasan pesisir secara terpadu 4. Peningkatan kerjasama dengan para pihak dalam pengelolaan pesisir dan laut	Persentase luas tutupan dalam kondisi baik - Mangrove - Terumbu karang	% %	70 30	75 35	1. Rehabilitasi, konservasi pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan 2. Rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumberdaya alam. 3. Perhutanan Sosial dan Kemitraan	Keluatan dan Perikanan Kehutanan Kehutanan	Dinas Kelautan dan Perikanan Kehutanan Kehutanan

6.4. PELAKSANAAN ARAH KEBIJAKAN TAHUNAN

6.4.1. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2016

Pelaksanaan arah kebijakan pembangunan pada tahun 2016 merupakan kelanjutan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya dan difokuskan pada penyelesaian permasalahan dan target capaian pembangunan yang belum tercapai dan terselesaikan pada periode pelaksanaan RPJMD Tahun 2010-2015. Pada tahun ini dilakukan penyusunan dan penetapan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis satuan kerja pemerintah daerah, termasuk perencanaan pembangunan sektor unggulan seperti pariwisata dan infrastruktur pendukungnya. Disamping itu dilakukan penyempurnaan struktur organisasi tata kerja perangkat daerah sesuai dengan kewenangan urusan pemerintahan di provinsi menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

6.4.2. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2017

Pelaksanaan arah kebijakan pembangunan tahun 2017 merupakan pelaksanaan dari prioritas pembangunan yang sudah dirumuskan dalam RPJMD Tahun 2016-2021 yaitu peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama, adat dan budaya ditengah kehidupan masyarakat, peningkatan pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan, pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan, dan lebih difokuskan pada pembangunan infrastruktur dan upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran serta pengembangan sektor unggulan seperti pariwisata dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan yang lainnya secara proporsional.

6.4.3. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2018

Pelaksanaan arah kebijakan pembangunan tahun 2018 merupakan lanjutan dari pelaksanaan tahun sebelumnya dan lebih difokuskan pada peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan terutama sekolah kejuruan. Pelaksanaan pembangunan yang berkaitan dengan pengamalan nilai-nilai agama, adat dan budaya sebagai upaya pembangunan mental dan reformasi birokrasi pemerintahan dalam rangka peningkatan pelayanan publik tetap dilanjutkan. Pengembangan sektor ekonomi kerakyatan dan peningkatan infrastruktur akan tetap menjadi perhatian untuk meningkatkan daya saing daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

6.4.4. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2019

Pelaksanaan program pembangunan tahun-tahun sebelumnya, terutama bidang infrastruktur diharapkan sudah menampakkan hasil. Oleh karena itu arah kebijakan pembangunan tahun 2019 difokuskan kepada peningkatan kualitas pelayanan dan mempercepat pengembangan investasi dengan tetap meningkatkan pelayanan di bidang pendidikan dan kesehatan.

Pada tahun 2019 merupakan waktu evaluasi pertengahan jalan RPJMD tahun 2016-2021 guna mengetahui perkembangan pelaksanaan dan target capaian RPJMD serta permasalahan. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk menetapkan langkah-langkah percepatan pencapaian target yang belum dapat direalisasikan dan melakukan penyesuaian kebijakan pembangunan daerah bila diperlukan.

6.4.5. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2020

Pelaksanaan arah kebijakan pembangunan tahun 2020 disamping tetap melanjutkan program/kegiatan prioritas pembangunan sebelumnya merupakan tahap pemantapan untuk memastikan tercapainya sasaran pembangunan jangka menengah daerah sesuai target yang telah ditetapkan. Arah kebijakan pembangunan tahun ini difokuskan pada prioritas

pengembangan yang perlu ditingkatkan kinerjanya, berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian program pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya.

6.4.6. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2021

Pelaksanaan arah kebijakan pembangunan tahun 2021 untuk menyelesaikan target program yang belum dicapai. Pada tahun ini merupakan masa transisi kepemimpinan daerah karena kepala daerah sekarang akan berakhir masa jabatannya pada bulan Februari tahun 2021. Dengan demikian arah pelaksanaan pembangunan yang sudah dipersiapkan dalam periode terakhir RPJMD 2016-2021 akan dilaksanakan oleh kepala daerah berikutnya.

Tabel 6.2
Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2016-2021

TAHUN	ARAH KEBIJAKAN
2016	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Merupakan kelanjutan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya dan difokuskan pada penyelesaian permasalahan dan target capaian pembangunan yang belum tercapai dan terselesaikan pada periode pelaksanaan RPJMD Tahun 2010-2015. ▪ Pada tahun ini dilakukan penyusunan dan penetapan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis satuan kerja pemerintah daerah, termasuk perencanaan pembangunan sektor unggulan seperti pariwisata dan infrastruktur pendukungnya. Disamping itu dilakukan penyempurnaan struktur organisasi tata kerja perangkat daerah sesuai dengan kewenangan urusan pemerintahan di provinsi menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2017	Merupakan pelaksanaan dari prioritas pembangunan yang sudah dirumuskan dalam RPJMD Tahun 2016-2021 yaitu peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama, adat dan budaya ditengah kehidupan masyarakat, peningkatan pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan, pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan, dan lebih difokuskan pada pembangunan infrastruktur dan upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran serta pengembangan sektor unggulan seperti pariwisata dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan yang lainnya secara proporsional.
2018	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Merupakan lanjutan dari pelaksanaan tahun sebelumnya dan lebih difokuskan pada peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan terutama sekolah kejuruan. ▪ Pelaksanaan pembangunan yang berkaitan dengan pengamalan nilai-nilai agama, adat dan budaya sebagai upaya pembangunan mental dan reformasi birokrasi pemerintahan dalam rangka peningkatan pelayanan publik tetap dilanjutkan. ▪ Pengembangan sektor ekonomi kerakyatan dan peningkatan infrastruktur akan tetap menjadi perhatian untuk meningkatkan daya saing daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
2019	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelaksanaan program pembangunan tahun-tahun sebelumnya, terutama bidang infrastruktur diharapkan sudah menampakkan hasil. ▪ Arah kebijakan pembangunan tahun 2019 difokuskan kepada peningkatan kualitas pelayanan dan mempercepat pengembangan investasi dengan tetap meningkatkan pelayanan di bidang pendidikan

TAHUN	ARAH KEBIJAKAN
	<p>dan kesehatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Merupakan waktu evaluasi pertengahan jalan RPJMD tahun 2016-2021 guna mengetahui perkembangan pelaksanaan dan target capaian RPJMD serta permasalahan. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk menetapkan langkah-langkah percepatan pencapaian target yang belum dapat direalisasikan dan melakukan penyesuaian kebijakan pembangunan daerah bila diperlukan.
2020	<p>Disamping tetap melanjutkan program/kegiatan prioritas pembangunan sebelumnya merupakan tahap pemantapan untuk memastikan tercapainya sasaran pembangunan jangka menengah daerah sesuai target yang telah ditetapkan. Arah kebijakan pembangunan tahun ini difokuskan pada prioritas pengembangan yang perlu ditingkatkan kinerjanya, berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian program pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya.</p>
2021	<p>Pelaksanaan arah kebijakan pembangunan tahun 2021 untuk menyelesaikan target program yang belum dicapai. Pada tahun ini merupakan masa transisi kepemimpinan daerah karena kepala daerah sekarang akan berakhir masa jabatannya pada bulan Februari tahun 2021. Dengan demikian arah pelaksanaan pembangunan yang sudah dipersiapkan dalam periode terakhir RPJMD 2016-2021 akan dilaksanakan oleh kepala daerah berikutnya.</p>

BAB VII

**KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN
PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

7.1. KERANGKA PENDANAAN

Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 yang tercermin pada Tabel 7.1, sebagai berikut :

Tabel 7.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2016 - 2021
(Dalam Rp.)

No	URAIAN	2016*)	2017	2018	2019	2020	2021
	KAPASITAS RIIL KEUANGAN	3.336.228.000.000	3.571.788.000.000	3.865.167.000.000	4.198.856.000.000	4.752.617.000	5.049.150.000.000
A	Belanja Tidak Langsung	2.661.076.523.300	3.917.200.553.502	3.982.900.528.225	4.264.050.664.925	4.672.954.974.025	4.834.595.188.825
1	Belanja Pegawai	741.678.407.550	2.273.447.377.952	2.196.165.662.475	2.290.927.889.975	2.391.963.722.475	2.499.943.070.475
2	Belanja Bunga	0	0	0	0	0	0
3	Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0
4	Belanja Hibah	1.087.322.800.000	819.009.200.000	899.816.000.000	1.007.005.750.000	1.231.693.800.000	1.194.371.750.000
5	Belanja Bantuan Sosial	0	0	5.955.000.000	6.312.000.000	6.691.000.000	7.093.000.000
6	Belanja Bagi Hasil	664.893.368.000	710.893.584.800	767.113.475.000	845.954.634.200	928.756.060.800	1.019.336.977.600
7	Belanja Bantuan Keuangan	150.731.947.750	108.850.390.750	108.850.390.750	108.850.390.750	108.850.390.750	108.850.390.750
8	Belanja Tidak Terduga	16.450.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
B	Belanja Langsung	2.113.127.235.391	2.308.776.400.000	2.793.927.471.775	3.154.087.335.075	3.452.351.025.975	4.068.434.811.175
1	Belanja Pegawai	14.954.450.915	23.472.960.000				
2	Belanja Barang dan Jasa	934.074.100.387	1.334.867.412.731				
3	Belanja Modal	1.164.098.684.089	950.436.027.269				
	Total Belanja	4.774.203.758.691	6.225.976.953.502	6.776.828.000.000	7.418.138.000.000	8.125.306.000.000	8.903.030.000.000

Ket : *) Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021

Sumber : Bakeuda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

Kebijakan umum menggambarkan upaya yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sesuai dengan visi dan misi yang sudah ditetapkan. Kebijakan umum pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Pemanfaatan potensi sumber daya pembangunan secara efektif dan efisien serta mengatasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
2. Peningkatan peran semua stakeholders (pemangku kepentingan) termasuk masyarakat rantau dalam pengelolaan pembangunan daerah dengan mengembangkan pengelolaan pembangunan yang bersifat partisipatif, sinergis, transparan dan akuntabel.
3. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia sehingga memiliki etos kerja, disiplin, santun dan berintegritas, serta meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
4. Peningkatan daya saing daerah dalam menghadapi perubahan tatanan ekonomi yang semakin terbuka sesuai dengan perkembangan regional, nasional dan global.

5. Pengembangan sektor-sektor unggulan dalam percepatan dan peningkatan ekonomi seperti pariwisata, pertanian dengan sistem agribisnis, industri, kemaritiman dan kelautan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
6. Pemanfaatan potensi sumber energi dan pembangunan infrastruktur untuk mendorong pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.
7. Perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja dan program prioritas (*money follow programe*).
8. Peningkatan pendapatan daerah.

7.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas pembangunan adalah kumpulan program prioritas yang bersifat lintas sektoral sebagai penjabaran operasional dari rencana pembangunan. Pembangunan Sumatera Barat tahun 2016-2021 dijabarkan ke dalam sepuluh prioritas pembangunan, sebagai berikut:

Prioritas 1: Pembangunan Mental Pengamalan Agama dan ABS-SBK Dalam Kehidupan Masyarakat.

Prioritas ini diarahkan pada pelaksanaan kebijakan nasional di bidang revolusi mental, implementasi prinsip-prinsip agama dan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Dengan pelaksanaan prinsip-prinsip revolusi mental, pengamalan ajaran agama yang baik dan penerapan adat dan budaya Minangkabau yang intensif ditengah kehidupan masyarakat diharapkan akan dicapai: 1) Masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya serta punya etos kerja tinggi dan produktif, 2) Kehidupan masyarakat yang harmonis, toleran, dan cinta damai, 3) Pengamalan nilai-nilai adat dan agama dalam kehidupan sosial ekonomi, 4) Penurunan tingkat konflik dan kekerasan dalam masyarakat, 5) Pewarisan nilai-nilai kearifan adat Minangkabau, 6) Optimalisasi peran lembaga-lembaga keagamaan dan lembaga adat, dan 7) Penurunan perbuatan maksiat.

Prioritas 2: Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan.

Prioritas ini diarahkan pada penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga profesionalitas pemerintahan dan pelayanan publik yang prima dapat dicapai. Dengan reformasi birokrasi akan dicapai : 1) Tata pemerintahan yang baik melalui pelayanan prima, 2) Pemerintahan yang bersih dan profesional, 3) Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan bebas KKN, 4) Tata pemerintahan yang aspiratif dan partisipatif, 5) Penyediaan data statistik yang handal dan berdayaguna tinggi, 6) Perencanaan yang partisipatif dan akuntabel, 7) Sinergi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, dan pembangunan lintas sektor.

Prioritas 3: Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan.

Prioritas ini diarahkan pada penuntasan wajib belajar 9 tahun, perintisan wajib belajar 12 tahun, dan peningkatan standar pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang memenuhi tuntutan persyaratan lapangan kerja dan atau dapat menciptakan lapangan kerja. Dengan prioritas tersebut diharapkan akan dicapai: 1) Penuntasan wajib belajar 9 tahun, 2) Perintisan wajib belajar 12 tahun, 3) Peningkatan angka partisipasi pendidikan, 4) Pelaksanaan pola pendidikan berkarakter dan berkualitas, 5) Lahirnya sentra pendidikan unggul di Sumatera Barat, 6) Pendidikan spesifik sesuai dengan bakat sumberdaya manusia, 7) Lembaga pendidikan penghasil sumberdaya manusia yang profesional, 8) Wirausahawan baru yang berkapasitas nasional dan global, 9) Pengembangan penelitian dan penerapan IPTEK, 10) Peningkatan partisipasi perempuan dan kesejahteraan keluarga, 11) Peningkatan kualitas pemuda dan pembangunan olah raga, 12) Sumatera Barat sebagai daerah tujuan pendidikan.

Prioritas 4: Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat.

Prioritas ini diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan berkecukupan gizi. Dengan prioritas ini diharapkan akan dicapai: 1) Penurunan angka kesakitan dan kematian 2) Peningkatan angka harapan hidup, 3) Penurunan tingkat kematian ibu melahirkan, 4) Menurunnya tingkat kematian bayi, 5) Penurunan persentase masyarakat gizi kurang, 6) Peningkatan pola hidup bersih dan sehat, 7) Peningkatan layanan rumah sakit dengan standar pelayanan yang terakreditasi paripurna.

Prioritas 5: Peningkatan Produksi Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional dan Pengembangan Agribisnis.

Prioritas ini diarahkan pada pengembangan dan peningkatan produksi pangan untuk menunjang kebijakan nasional dibidang kedaulatan pangan serta mengembangkan sistem agribisnis dalam pembangunan pertanian dalam arti luas (tanaman pangan, peternakan dan perkebunan) yang dapat memberikan nilai tambah (*added value*) tinggi, sehingga masyarakat dapat menikmati tingkat keuntungan yang tinggi dari gabungan hasil usaha pertaniannya melalui berbagai komoditi unggulan. Dengan prioritas tersebut diharapkan dapat dicapai: 1) Peningkatan ketahanan dan keragaman konsumsi pangan, 2) Pengembangan kawasan sentra produksi pertanian, 3) Pengembangan agroindustri dan agribisnis sesuai potensi daerah, 4) Sumatera Barat sebagai salah satu provinsi penghasil pangan nasional, 5) Penerapan teknologi pertanian tepat guna, 6) Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian, 7) Pola pembangunan pertanian berbasis kawasan dan berbasis komoditi unggulan.

Prioritas 6: Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Peningkatan Investasi.

Prioritas ini diarahkan untuk mengembangkan pariwisata, industri skala kecil dan menengah dan pengembangan Koperasi dan UMKM serta peningkatan investasi. Dengan pelaksanaan prioritas ini diharapkan dicapai: 1) Pengembangan objek dan kawasan wisata yang potensial, 2) Peningkatan sarana dan prasarana serta pelayanan kepariwisataan, 3) Sumatera Barat sebagai destinasi utama pariwisata berbasis agama dan budaya, 4) Pengembangan sentra industri dan peningkatan penerapan teknologi tepat guna dalam proses produksi, 5) Peningkatan daya saing produk industri dan jasa, 6) Peningkatan jenis, volume dan nilai ekspor serta ekspor produk industri, 7) Peningkatan kesempatan kerja pada sektor industri dan jasa, 8) Peningkatan peran Koperasi dan UMKM dalam perekonomian daerah, 8) Peningkatan Investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyediaan kesempatan kerja.

Prioritas 7: Peningkatan Pemanfaatan Potensi Kemaritiman dan Kelautan.

Prioritas ini diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan untuk peningkatan pembangunan daerah. Dengan pelaksanaan prioritas ini diharapkan dicapai: 1) Peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan, 2) Peningkatan produksi perikanan laut baik tangkap maupun budidaya, 3) Pengembangan wisata bahari, 4) Optimalisasi pengelolaan ruang laut dan pulau-pulau kecil, 5) Peningkatan kerjasama regional lintas pesisir wilayah laut.

Prioritas 8: Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran serta Penanganan Daerah Tertinggal.

Prioritas ini diarahkan untuk mengurangi tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan dan ketimpangan pembangunan daerah. Dengan prioritas ini diharapkan akan dicapai: 1) Penurunan jumlah penduduk yang menganggur, 2) Penurunan jumlah penduduk miskin, 3) Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin 4) Penurunan tingkat penyandang masalah kesejahteraan sosial, 5) Peningkatan aksesibilitas daerah tertinggal untuk bisa lepas dari ketertinggalan.

Prioritas 9: Pengembangan Sumber Energi Baru dan Terbarukan serta Pembangunan Infrastruktur.

Prioritas ini diarahkan untuk memenuhi kebutuhan energi dan infrastruktur dalam rangka percepatan pembangunan dan daya saing daerah. Dengan pelaksanaan prioritas ini diharapkan akan dicapai: 1) Peningkatan pemanfaatan energi baru dan terbarukan dengan mendorong investasi dibidang energi baru dan terbarukan serta pembangunan sarana dan prasarana pemanfaatan energi baru dan terbarukan untuk pembangkit listrik, 2) Peningkatan penyediaan listrik di daerah terpencil, terisolir dan perbatasan, 3) Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas wilayah, 4) Peningkatan pelayanan transportasi dan keselamatan lalu lintas, 5) Peningkatan kuantitas dan kualitas pengelolaan sumber daya air, 6) Peningkatan prasarana umum pada kawasan pemukiman

Prioritas 10: Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana.

Prioritas ini diarahkan untuk mengurangi kerusakan lingkungan dan menekan kerugian akibat bencana. Dengan pelaksanaan prioritas ini diharapkan akan dicapai: 1) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, 2) Peningkatan kesesuaian rencana pembangunan dengan tata ruang, 3) Peningkatan kualitas lahan dan fungsi ekosistem, 4) Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana, 5) Peningkatan penanganan tanggap darurat dan pemulihan wilayah atau daerah pasca bencana, 6) Peningkatan kearifan lokal dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan.

7.3. PENYELARASAN RPJMN 2015 – 2019 dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016 – 2021.

Untuk mencapai keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antara pusat dan daerah, maka dokumen RPJMN tahun 2015–2019 menjadi acuan dalam penyusunan dokumen RPJMD provinsi Sumatera Barat tahun 2016–2021. Untuk itu dalam penyusunan prioritas pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari 10 (sepuluh) prioritas, telah diselaraskan dengan prioritas pembangunan nasional berdasarkan 3 (tiga) dimensi pembangunan.

Prioritas pada dimensi pembangunan manusia dan masyarakat secara nasional, selaras dengan prioritas pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat yang terkait dengan pendidikan, kesehatan, mental dan karakter. Sedangkan untuk perumahan dan pemukiman selaras dengan prioritas pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat pada prioritas pembangunan infrastruktur.

Prioritas pada dimensi pembangunan sektor unggulan nasional, juga selaras dan menjadi prioritas pembangunan daerah karena merupakan potensi unggulan daerah yang diharapkan akan dapat meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan ekonomi yang terkait dengan kedaulatan pangan, pengembangan energi, pengembangan kemaritiman dan kelautan, serta pengembangan pariwisata industri, perdagangan, koperasi dan investasi.

Prioritas pada dimensi pemerataan dan kewilayahan yang terkait dengan pembangunan antar kelompok pendapatan dan antar wilayah secara nasional, selaras dengan upaya pemerintah provinsi Sumatera Barat dalam mengentaskan daerah tertinggal, pengentasan kemiskinan dan penurunan pengangguran. Selanjutnya keselarasan antara prioritas berdasarkan dimensi pembangunan nasional dengan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat, dapat dilihat pada Tabel 7.2

Tabel 7.2.
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat

No	Prioritas Pembangunan Nasional Berdasarkan 3 Dimensi Pembangunan	Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat
1.	Dimensi Pembangunan Manusia dan Masyarakat a. Pendidikan b. Kesehatan c. Perumahan d. Mental dan Karakter	a. Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan b. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat c. Pembangunan mental dan pengamalan agama dan ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat d. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan
2.	Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan a. Kedaulatan Pangan b. Kedaulatan Energi & Ketenagalistrikan c. Kemaritiman dan Kelautan d. Pariwisata dan Industri	a. Peningkatan produksi untuk mendukung kedaulatan pangan nasional dan pengembangan agribisnis b. Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta pembangunan infrastruktur c. Pengembangan kemaritiman dan kelautan d. Pengembangan pariwisata industri, perdagangan, koperasi dan investasi e. Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana alam
3	Dimensi pemerataan dan kewilayahan a. Antar kelompok Pendapatan b. Antar wilayah: (Desa, Pinggiran, Luar Jawa, Kawasan Timur)	Penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran, daerah tertinggal

7.4. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BERDIMENSI KEWILAYAHAN

Mempedomani arahan umum pembangunan wilayah pada RPJPD 2005-2025, dan prioritas dalam RPJMD 2016-2021, maka arah pengembangan wilayah ditujukan untuk (1) mendorong percepatan pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi sebagai penggerak utama pertumbuhan, dengan memperhatikan potensi, karakteristik dan keunggulan daerah, (2) memperhatikan aspek keberlanjutan dengan berpedoman kepada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam pengembangan dan pembangunan wilayah, (3) mendorong pengembangan dan pemerataan wilayah secara terpadu untuk mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan dan kemajuan yang adil dan merata di seluruh wilayah, (4) menciptakan keseimbangan pemanfaatan ruang antara kawasan berfungsi lindung dan budidaya serta antara wilayah darat, laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, dan (5) meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergisitas pelaksanaan pembangunan lintas sektor dan lintas wilayah dengan kebijakan nasional.

Untuk memanfaatkan potensi keragaman dan kesamaan aspek pembangunan serta memperhatikan arah pembangunan pengembangan wilayah, maka pembangunan berdimensi kewilayahan dapat dijelaskan sebagai berikut :

7.4.1. Pengembangan Sistem Perkotaan

Pengembangan wilayah perkotaan di Sumatera Barat terutama diarahkan kepada melayani kegiatan yang berskala kota yang meliputi sistem jaringan prasarana, antara lain, mencakup sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem persampahan dan sanitasi, serta sistem jaringan sumber daya air.

Rencana pengembangan pusat kegiatan di Provinsi Sumatera Barat juga mengacu pada kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang meliputi Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Menurut RTRW Provinsi Sumatera Barat 2012-2032, untuk Pusat Kegiatan Wilayah yang dipromosikan oleh provinsi di sebut PKWp. Berdasarkan kriteria dan arahan kebijakan pengembangan yang telah dijelaskan, maka rencana struktur pusat kegiatan di Provinsi Sumatera Barat sampai tahun 2032 terdiri dari 1 (satu) kota PKN, 5 (lima) kota PKW, 4 (empat) kota PKWp, dan 12 (dua belas) kota PKL seperti yang diperlihatkan pada Tabel 7.3.

Tabel 7.3
Sistem Perkotaan Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan RTRW 2012-2032

PKN	PKW	PKWp	PKL
Kota Padang	1. Kota Bukittinggi 2. Pariaman 3. Sawahlunto 4. Kota Solok 5. Muara Siberut	1. Kota Payakumbuh 2. Kota Pulau Punjung 3. Kota Tapan 4. Kota Simpang Empat	1. Kota Padang Panjang 2. Kota Lubuk Sikaping 3. Kota Sari Lamak 4. Kota Batusangkar 5. Kota Padang Aro 6. Kota Tuapejat 7. Kota Lubuk Basung 8. Kota Muaro Sijunjung 9. Kota Lubuk Alung 10. Kota Aro Suka

Sumber : PP 26 Tahun 2008, dan Hasil Analisis, 2008.

7.4.2. Kawasan Lindung

Kawasan lindung diarahkan untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan pelestarian lingkungan. Pengembangan kawasan ini bertujuan untuk mengurangi tingkat bahaya bencana alam seperti banjir, erosi, longsor, kekeringan, pendangkalan waduk dan lain sebagainya. Selain itu juga bertujuan untuk menjaga kerusakan bencana sosial akibat hilangnya asset hidup yang seharusnya diperoleh masyarakat.

Sebaran luas hutan lindung yang telah ditetapkan menurut daerah diperlihatkan pada Tabel 7.4. yang harus dijaga kelestariannya.

Tabel 7.4
Luas dan Perubahan Luas Hutan Lindung Provinsi Sumatera Barat Menurut RTRW 2012-2032 per Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Luas (Ha)	Luas Hutan Lindung		Rencana Perubahan Luas		
			Sk. 422 th 1999	Rencana th 2028	Ha	% 1)	% 2)
A	Kabupaten						
1	Agam	223.230	32.134	22.451	-9.683	-30,13	5,08
2	Dharmasraya	296.113	12.336	8.660	-3.676	-29,80	1,93
3	Kep. Mentawai	601.135	4.614	6.406	1.792	38,84	-0,94
4	Limapuluh Kota	335.430	123.003	99.022	-23.981	-19,50	12,59
5	Padang Pariaman	132.879	22.268	13.334	-8.934	-40,12	4,69

No	Kabupaten/Kota	Luas (Ha)	Luas Hutan Lindung		Rencana Perubahan Luas		
			Sk. 422 th 1999	Rencana th 2028	Ha	% 1)	% 2)
6	Pasaman	444.763	237.044	158.455	-78.589	-33,15	41,24
7	Pasaman Barat	338.777	95.461	78.264	-17.197	-18,01	9,03
8	Pesisir Selatan	579.495	41.672	23.096	-18.576	-44,58	9,75
9	Sijunjung	313.080	88.262	78.015	-10.247	-11,61	5,38
10	Solok	373.800	119.646	118.603	-1.043	-0,87	0,55
11	Solok Selatan	334.620	89.286	80.040	-9.246	-10,36	4,85
12	Tanah Datar	133.600	29.208	18.480	-10.728	-36,73	5,63
B	Kota						
13	Bukittinggi	2.524	-	-	-	-	-
14	Padang	69.496	13.778	13.433	-345	-2,50	0,18
15	Padang Panjang	2.300	36	-	-36	-100,00	0,02
16	Pariaman	7.336	-	-	-	-	-
17	Payakumbuh	8.043	148	295	147	99,32	-0,08
18	Sawahlunto	27.345	496	294	-202	-40,73	0,11
19	Solok	5.764	1.141	1.141	-	-	-
Jumlah		4.229.730	910.532	719.989	-190.544	-20,93	100,00

Sumber : Hasil rencana, 2008

Keterangan :

- 1) Terhadap luas hutan lindung per kabupaten/kota
- 2) Terhadap jumlah perubahan luas hutan lindung provinsi

Selanjutnya juga telah ditetapkan kawasan perlindungan setempat berupa sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau dan waduk, kawasan sekitar mata air dan kawasan hijau perkotaan seperti diperlihatkan pada Tabel 7.5.

Tabel 7.5
Sebaran Kawasan Perlindungan Setempat Provinsi Sumatera Barat
Dirinci Menurut Kabupaten /Kota

No	Kawasan Perlindungan Setempat	Daerah
1	Sempadan Pantai	Kabupaten Pesisir Selatan
		Kota Padang
		Kabupaten Padang Pariaman
		Kota Pariaman
		Kabupaten Agam
		Kabupaten Pasaman Barat
		Kabupaten Kepulauan Mentawai
2	Sempadan Sungai	Seluruh Kota dan Kabupaten
3	Kawasan Sekitar Danau dan Waduk	Kabupaten Agam
		Kabupaten Tanah Datar
		Kabupaten Solok
4	Kawasan Sekitar Mata Air	Seluruh Kabupaten dan Kota
5	Kawasan Terbuka Hijau perkotaan	Kota Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Kota Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Kota Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di Provinsi Sumatera Barat

Sumber : Hasil rencana, 2008

7.4.3. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Pembangunan berkembang dengan pesat, dan perlu dilakukan pengendalian agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat maupun bagi kelestarian alam. Mengingat pentingnya kelestarian alam bagi makhluk hidup, maka ditetapkan kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam meliputi :

- a. Cagar Alam berlokasi di Kabupaten Lima Puluh Kota (29.224Ha), Kabupaten Tanah Datar (99.856Ha), Kabupaten Sijunjung (99.856Ha), Kabupaten Padang Pariaman (92.125Ha), Kabupaten Pasaman (34.469Ha), Kabupaten Solok (99.998Ha), Kota Padang (80.189Ha) dan Kabupaten Agam (36.635Ha).
- b. Kawasan Suaka Marga Satwa dan Suaka Marga Satwa Laut berlokasi di Pagai Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai (24.952 Ha), pulau Penyus Kabupaten Pesisir Selatan (450 Ha), Pulau Panjang Kabupaten Padang Pariaman (1.980 Ha).
- c. Kawasan Suaka Alam dengan ekosistem khas, merupakan habitat alami yang memberi perlindungan bagi perkembangan flora, fauna yang khas dan beraneka ragam, yaitu Suaka Alam Selasih Talang (6.150) Ha di Kabupaten Solok
- d. Kawasan Pantai Berhutan Bakau, kawasan ini ditetapkan di Batang Tomak, Air Bangis, dan Simpang Empat di Kabupaten Pasaman Barat; Lunang Silaut di Kabupaten Pesisir Selatan; sebagian besar kawasan pantai Kepulauan Mentawai; Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, dan Bungus Teluk Kabung di Kota Padang.
- e. Kawasan Taman Nasional, yaitu Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) wilayah Sumatera Barat (227.130 Ha), yang berada di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok Selatan, dan Taman Nasional Siberut di Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan luas sekitar 190.500 Ha.
- f. Kawasan Taman Hutan Raya (Tahura), ditetapkan di wilayah Kota Padang yaitu Taman Hutan Raya Bung Hatta dengan luas lebih kurang 240 Ha.
- g. Kawasan Taman Wisata Alam, meliputi Taman Wisata Alam Mega Mendung (12,50 Ha) di Kabupaten Tanah Datar, Taman Wisata Alam Lembah Harau (27,50 Ha) di Kabupaten Limapuluh Kota, Taman Wisata Alam Rimbo Panti (570 Ha) di Kabupaten Pasaman, Taman Wisata Alam Bukit Batu Patah (500 Ha) di Kabupaten Tanah Datar, serta taman wisata alam di Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kota Padang Panjang, dan Kota Bukittinggi;
- h. Kawasan Taman Wisata Alam Laut di Pulau Pieh (39.000 Ha) Kabupaten Padang Pariaman dan Teluk Saibi Sarabua (21.200 Ha) Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- i. Kawasan Cagar Budaya yang tersebar pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat.

7.4.4. Kawasan Rawan Bencana

Berdasarkan PP No. 26 Tahun 2008, disebutkan bahwa yang termasuk kawasan bencana alam meliputi: rawan bencana alam tanah longsor, rawan gelombang pasang, rawan banjir, rawan letusan gunung berapi, rawan gempa bumi, rawan gerakan tanah, zona patahan aktif, rawan tsunami, dan rawan bahaya gas beracun.

Arah kebijakan pada kawasan rawan bencana adalah meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan menekan kerugian terhadap masyarakat dan pembangunan ekonomi daerah.

Kawasan rawan bencana di wilayah Provinsi Sumatera Barat dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Kawasan Rawan Tanah Longsor dan Gerakan Tanah tersebar hampir merata di seluruh Sumatera Barat terutama pada sepanjang jalur patahan samangko, pada zona ini banyak terdapat morfologi dan relief yang terjal serta banyak daerah hancuran menjadi zona rentan gerakan tanah karena terkena patahan. Selain itu pada kawasan gunung api, hal ini disebabkan oleh batuan produk gunung api kuarter merupakan batuan yang tidak solid, menempati morfologi perbukitan sehingga mudah longsor akibat curah hujan tinggi maupun akibat getaran gempa bumi. Lebih 50% dari luas provinsi Sumatera Barat merupakan daerah dengan zona kerentanan gerakan tanah tinggi dan

Zona gerakan tanah menengah. Kawasan ini tersebar mulai dari Kabupaten Pasaman, sampai pada perbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Lima

Puluh Kota, sampai wilayah perbatasan dengan Provinsi Riau, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, Kota Padang Panjang, Kota Padang, Kota Solok, Kabupaten Sawahlunto Sijunjung, Kabupaten Pesisir Selatan hingga ke perbatasan Propinsi Bengkulu.

- b. Kawasan Rawan Banjir dan Banjir Bandang di Sumatera Barat terdapat di kawasan-kawasan yang bercirikan: daerah berlereng landai, pertemuan dua sungai besar, banyak terdapat meander sungai, adanya perubahan kelerengan yang tiba-tiba, dan daerah hilir sungai yang berhulu pada kawasan berhutan gundul. Wilayah dengan ciri-ciri seperti ini terdapat di Kinali, Air Bangis, dan Sasak di Kabupaten Pasaman Barat; Painan, Air Haji, dan sekitar Lunang Silaut, di Kabupaten Pesisir Selatan; Kota Solok, Kota Padang, Kabupaten Solok dan Solok Selatan, Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Agam, sedangkan Kawasan Banjir Bandang berpotensi di seluruh Kawasan Provinsi Sumatera Barat, tetapi yang sering terjadi di daerah perbukitan seperti Kota Padang, Kota Solok, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman, dan Kabupaten 50 kota.
- c. Kawasan Potensi Tsunami terdapat di 7 (tujuh) kawasan disepanjang pantai Barat Sumatera meliputi Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- d. Kawasan Potensi Gempa Darat/Laut terdapat di sepanjang Patahan Semangka dan Sumani yang dimulai dari Kabupaten Sijunjung, Solok, Sawahlunto sampai ke Pasaman, serta di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota di pantai barat Sumatera.

Gempa Darat mempunyai 4 segmen yang terdiri atas:

- 1) Segmen Sumpur, terdapat di kawasan Rao Lubuk Sikaping Pasaman dengan panjang patahan ± 35 km, segmen ini terjadi dengan kisaran 23-24 tahun, dimana terakhir terjadi tahun 1977 dengan kekuatan 5,5 SR.
- 2) Segmen Sianok, panjang ± 90 km terletak di Ngarai Sianok Kota Bukittinggi sampai ke Danau Singkarak bagian Timur, dengan pergeseran ± 23 MM/tahun, terakhir terjadi pada tanggal 2 Maret 2007 dengan magnitude 6,4 SR.
- 3) Segmen Sumani, panjang ± 60 km terdapat di ujung Utara Danau Singkarak mengarah ke Kota Solok, Slayo, berakhir di Utara Danau Diatas, sebelah tenggara Gunung Talang, terakhir terjadi pada 9 Juni 1943 dengan 7,4 SR
- 4) Segmen Suliti, panjang ± 90 km, terdapat di Danau Diatas dan Danau Dibawah dengan kisaran pergeseran 23 MM/Tahun, patahannya menelusuri Suliti ke Arah Barat Laut Gunung Kerinci. (*Sumber : D.Hilaman Natawijaya dkk, 1995*)

7.4.5. Kawasan Lindung Geologi

Kawasan lindung geologi merupakan kawasan yang memiliki keunikan baik dari jenis bebatuan, bentang alam, proses geologi maupun kawasan imbuhan air tanah. Kebijakan kawasan lindung geologi diarahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan guna mempertahankan fungsinya sebagai kawasan lindung. Kawasan lindung geologi di Sumatera Barat tersebar di beberapa Kabupaten/Kota, diantaranya:

- a. Kawasan cagar alam geologi

Kawasan lindung Kars terdapat di Kubah Batusangkar, bukit-bukit kars di Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Sijunjung,

b. Kawasan rawan bencana alam geologi; meliputi:

- 1) Kawasan rawan gempa tektonik, dengan sumber gempa penunjaman Jawa-Sumatra yang berpusat di laut sebelah barat sepanjang pantai barat Sumatera, dengan tingkat intensitas kerusakan pada skala VI-VII MMI tingkat resiko sedang tingkat tiga, yaitu mencakup Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kawasan rawan gempa tektonik dengan sumber pada zona patahan aktif Sumatra yaitu sepanjang patahan Semangko dengan tingkat intensitas kerusakan mencapai skala VIII-IX MMI, dengan tingkat resiko besar satu yang mencakup wilayah Kabupaten Sijunjung, Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Solok, Solok Selatan, Agam. Sedangkan kawasan rawan gempa bumi dengan skala V-VII dengan tingkat resiko kecil yang disebabkan oleh guncangan akibat gempa tektonik dan vulkanik yang mencakup hampir seluruh wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Kawasan ini terjadi umumnya pada daerah yang berada di sepanjang pantai barat Sumatera: Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai daerah gempa tektonik yang berpusat di laut. Sedangkan kawasan rawan gempa tektonik yang berada zona sepanjang patahan Semangko meliputi mulai dari Kabupaten Pasaman, Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi, Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kota Solok, sampai Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan.

- 2) Kawasan Rawan Letusan Gunung Api terdapat di kawasan gunung api aktif yaitu kawasan sekitar Gunung Merapi, Gunung Tandikat, Gunung Talang dan Gunung Kerinci dengan klasifikasi: kawasan bahaya I dengan radius 3 km dari puncak gunung, kawasan bahaya II dengan radius 3-7 km dari puncak gunung, dan kawasan bahaya III dengan radius 8-14 km dari puncak gunung. Kawasan rawan letusan gunung api terdapat juga pada daerah sekitar lembah sungai yang berhulu di lereng atas gunung api memanjang hingga ke lereng bawah, sebagai akibat adanya aliran lahar, dan abu vulkanik.

Kawasan ini umumnya terjadi di Kabupaten dan Kota yang berada < 10 Km dari pusat erupsi gunung api pada Kawasan gunung api aktif yaitu Gunung Merapi, Gunung Tandikat, Gunung Talang dan Gunung Kerinci.

- 3) Kawasan Rawan Bencana Tsunami meliputi seluruh kawasan pesisir pantai Pulau Sumatera dan Kepulauan Mentawai beserta pulau-pulau kecil lainnya. Kawasan rawan tsunami di pesisir Provinsi Sumatera Barat dapat di kelompokkan dalam tiga kategori zona kerawanan tsunami yaitu
 - Zona Kerawanan tinggi, wilayah dengan jarak garis pantai 50 m, sepanjang pantai dengan ketinggian kontur kurang dari 10 m dpl.
 - Zona Kerawanan menengah yaitu daerah sepanjang pantai dengan kontur ketinggian 10 – 15 m dpl, dengan kemiringan lereng cukup terjal.
 - Zona kerawanan rendah yaitu wilayah sepanjang pantai dengan ketinggian 15 – 30m dpl, dengan morfologi curam dan relief tinggi atau berbukit, dan daerah ini dapat dimanfaatkan untuk evakuasi dan lokasi pengungsian.
- 4) Kawasan Rawan Abrasi Pantai terjadi pada daerah pantai dengan komposisi batuan sedimen lunak yang dicirikan oleh pantai landai dan berhadapan langsung dengan laut lepas. Terdapat mulai dari Kota Padang, hingga Kota Pariaman. Termasuk yang ada di Pasaman Barat dan Kabupaten Pesisir Selatan serta Kepulauan Mentawai.

- 5) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah. Kawasan ini termasuk kawasan Tuf Ngarai Sianok, danau Dibawah, dan kaldera Gunung Api Maninjau.

7.4.6. Wilayah Pengembangan Ekonomi Sumatera Barat

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi pembangunan di bidang ekonomi Sumatera Barat di kelompokkan kedalam tiga wilayah pengembangan ekonomi sebagai berikut :

a. Koridor Ekonomi Gerbang Timur

Pembangunan pada koridor Ekonomi Gerbang Timur difokuskan pada sentra pengembangan industri pariwisata alam, ternak unggas, industri pengolahan. Padang dijadikan sebagai pusat pertumbuhan utama, didukung oleh Bukittinggi, Payakumbuh, Batusangkar, dan Lubuk Sikaping sebagai pusat pengembangan.

Kegiatan yang menjadi andalan pada koridor ini adalah industri kimia bangunan, industri kerajinan, industri pariwisata alam, dan industri pangan, gambir, unggas (ayam petelur dan pedaging), timah hitam, wisata alam, (Lima Puluh Kota, Bukittinggi) untuk wisata kuliner: Padang, Payakumbuh, Bukittinggi, dan wisata Meeting Incentive Conference Exhibition (MICE) Padang

b. Koridor Ekonomi Lintas Sumatera

Pembangunan pada koridor ekonomi Lintas Sumatera difokuskan pada sentra produksi pertanian dan perkebunan, pertambangan, serta industri agro. Padang sebagai pusat pertumbuhan utama, didukung oleh Solok, Muaro Sijunjung, Sawahlunto, Pulau Punjung dan Sungai Rumbai sebagai pusat pengembangan. Kegiatan yang menjadi andalan pada koridor ini adalah perkebunan kelapa sawit, karet, padi, pertambangan emas, batu bara, biji besi.

c. Koridor Ekonomi Pantai Barat

Pembangunan pada koridor ekonomi Pantai Barat difokuskan pada sentra produksi pertanian perkebunan, industri perikanan tangkap dan budidaya. Padang sebagai pusat pertumbuhan utama, didukung oleh Mentawai, Painan, Lubuk Alung, Pariaman, Lubuk Basung, Simpang IV, Air Bangis sebagai pusat pengembangan. Kegiatan yang menjadi andalan pada koridor ini adalah industri olahan produk sawit, kakao, jagung, sapi potong, industri olahan makanan hasil laut, perikanan tangkap dan wisata pantai.

Untuk mengembangkan ketiga koridor didukung oleh program dan kegiatan peningkatan komoditi utama, peningkatan konektivitas intra dan antar koridor, peningkatan sumberdaya manusia. Pengembangan masing-masing koridor dapat dilihat pada Tabel 7.6

Tabel 7.6
Koridor Pengembangan Ekonomi Sumatera Barat

Keterangan	Koridor Ekonomi Lintas Timur	Koridor Ekonomi Lintas Sumatera	Koridor Ekonomi Pantai Barat
Pembangunan masing-masing koridor	sentra pengembangan industri, perdagangan, pariwisata alam, Unggas,	Sentra produksi pertanian dan perkebunan, Pertambangan, serta industri agro.	Sentra produksi pertanian perkebunan, industri perikanan tangkap dan budidaya, industri agro, pariwisata pantai.

Keterangan	Koridor Ekonomi Lintas Timur	Koridor Ekonomi Lintas Sumatera	Koridor Ekonomi Pantai Barat
Pengembangan	Padang sebagai pusat utama. Bukittinggi, Batusangkar, Pasaman dan Payakumbuh sebagai pusat pengembangan	Padang sebagai pusat utama, Solok, Muaro Sijunjung, dan Pulau Punjung sebagai pusat pengembangan	Padang sebagai pusat utama, Painan, Pariaman, Simpang empat, Lubuk Sikaping sebagai pusat pengembangan
Kegiatan Utama.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Industri Kimia bangunan 2. Industri kerajinan, Gambir, industri pangan, 3. Timah hitam (Lima Pulu Kota), Biji besi (Tanah Datar) 4. Wisata alam,(Lima Pulu Kota, Bukittinggi) budaya Tanah datar. 5. Kuliner: Padang, Payakumbuh, Bukittinggi, MICE: Padang 6. Ternak unggas (ayam petelur dan pedaging) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Produksi sawit (Kabupaten Dharmasraya, Solok Selatan), 2. Produksi karet (Kabupaten Sijunjung, Tanah Datar), 3. Produksi padi (Kabupaten Solok) 4. Emas (Kabupaten Solok Selatan), 5. Batu Bara Sijunjung), 6. Biji besi Kabupaten Solok Selatan 7. Industri olahan sawit, karet. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Industri Olahan Makanan hasil laut dan sawit. 2. Produksi sawit, kakao, jagung, sapi potong, Perikanan tangkap dan Perikanan Darat 3. Tambang biji besi Pasaman Barat, Pesisir Selatan. Emas pasaman. 4. Batu bara pesisir selatan. 5. Wisata Pantai Padang, Padang Pariaman dan surfing Mentawai,

7.4.7. Pengembangan Kawasan Budidaya

a. Kawasan Hutan Produksi

Kawasan hutan produksi, berdasarkan PP 26 tahun 2008 terdiri dari hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, hutan produksi yang dapat di konversi serta hutan rakyat. Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi hutan produksi yang cukup luas dan tersebar di beberapa Kabupaten/Kota. Untuk rencana pengembangan kawasan peruntukan hutan produksi sesuai RTRW Provinsi Sumatera Barat 2012-2032 adalah seluas 796.424 Ha. Pengembangan hutan produksi di arahkan di Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Tanah Datar Kabupaten Agam, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Lima Pulu Kota, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kota Solok Selatan dan Kota Sawahlunto.

b. Kawasan Sentra Produksi (KSP) Pertanian

Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pertanian diarahkan untuk mengoptimalkan sumberdaya pembangunan berdasarkan keunggulan wilayah dalam rangka meningkatkan daya saing produk hasil pertanian agar dapat memberikan kontribusi terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi.

Pengembangan Kawasan Sentra Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura di Provinsi Sumatera Barat sebagaimana diperlihatkan Tabel 7.7.

Tabel 7.7
Kawasan Pengembangan Sentra Produksi Tanaman Pangan dan Holtikultura

No	Komoditi	Lokasi Kawasan
1	Padi	Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pesisir Selatan.
2	Jagung	Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Tanah Datar, Kab.Agam, Kabupaten Solok Selatan
3	Ubi Kayu	Kabupaten Pasaman, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Agam.
4	Ubi Jalar	Kabupaten Agam, Kabupaten Solok, Kabupaten Tanah Datar
5	Jeruk	Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Agam, Kabupaten Solok Selatan.
6	Pisang	Kabupaten Pasaman, Kota Pariaman, Kabupaten Tanah Datar
7	Manggis	Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Agam, Kabupaten Pdg Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Solok Selatan
8	Sayuran	Kabupaten Agam, Kabupaten Solok, Kabupaten Tanah Datar
9	Kentang	Kabupaten Agam dan Kabupaten Solok,
10	Bawang Merah	Kabupaten Solok, Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Pesisir Selatan
11	Tomat	Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok
12	Cabe	Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Solok, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Solok Selatan
13	Tanaman Hias (Bunga)	Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang

Selanjutnya Pengembangan Kawasan Komoditi Unggulan Perkebunan di Provinsi Sumatera Barat diarahkan pada lokasi sebagaimana diperlihatkan Tabel 7.8.

Tabel 7.8
Kawasan Pengembangan Komoditi Unggulan Perkebunan

No	Komoditi Perkebunan	Lokasi Kawasan
1	Kelapa Sawit	Kabupaten Agam, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat.
2	Karet	Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Tanah Datar
3	Kelapa Dalam	Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan
4	Kakao	Kabupaten Agam, Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pasaman
5	Kopi	Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Solok, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten solok Selatan
6	Gambir	Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung
7	Tebu	Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung , Kabupaten Pasaman, Kabupaten Solok

Pengembangan Kawasan Komoditi Peternakan di Provinsi Sumatera Barat diarahkan pada lokasi sebagaimana diperlihatkan Tabel 7.9.

Tabel 7.9
Kawasan Pengembangan Komoditi Peternakan

No	Kawasan/Komoditi Peternakan	Lokasi Kawasan
1.	Kawasan Sentra Produksi	
	Sapi	Kabupaten Agam, Kabupatef Limapuluh Kota, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan
	Kerbau	Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung
	Unggas	Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, Kota Payakumbuh, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat
2.	Kawasan Integrasi Ternak Sapi dan Tanaman Perkebunan	
	Sapi, Sawit dan Kakao	Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pesisir Selatan
	Sapi dan Kakao	Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Solok

c. Kawasan Sentra Paroduksi (KSP) Perikanan

Perikanan Tangkap

Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1999 pasal 3, bahwa wilayah provinsi, sebagaimana yang dimaksud pasal 2 ayat 1, terdiri atas wilayah darat dan wilayah laut sejauh 12 mil laut yang diukur dari garis pantai ke arah lepas dan atau ke arah perairan kepulauan. Sesuai dengan undang-undang tersebut maka batas wilayah laut termasuk kawasan perikanan tangkap yang pengelolaannya menjadi wewenang propinsi adalah sejauh 12 mil.

Kawasan pengembangan perikanan tangkap di Provinsi Sumatera Barat berada di dua kota dan lima kabupaten yang mempunyai wilayah pesisir dan laut yaitu Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Perikanan Budidaya

Perikanan budidaya dikelompokkan menjadi tiga yaitu budidaya laut, budidaya tambak dan budidaya air tawar. Budidaya laut dikembangkan di Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat serta Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan komoditi budidaya rumput laut, kerang mutiara, ikan kerapu serta tambak udang.

Pengembangan perikanan darat budidaya tersebar di seluruh kabupaten dan kota dengan sentra di Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Limapuluh Kota dan Kabupaten Dharmasraya. Selanjutnya komoditi dan kawasan pengembang perikanan budidaya dapat dilihat pada Tabel 7.10

Tabel 7.10
Kawasan Pengembangan dan Komoditi Perikanan Budidaya

No	Komoditi Perikanan	Lokasi Kawasan Pengembangan Pada Kabupaten/Kota
1	Ikan Nila	Kabupaten Agam, Kabupaten Sijunjung , Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Kota Solok
2	Ikan Mas	Kabupaten Agam, Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok, Kabupaten Pasaman. Kabupaten Tanah Datar
3	Ikan Lele	Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman Barat
4	Ikan Kerapu	Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Mentawai
5	Lobster	Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Mentawai
6	Ikan Bandeng	Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan
7	Kerang Mutiara	Kabupaten Pesisir Selatan

d. Kawasan Agribisnis

Pengembangan kawasan agribisnis diarahkan untuk membangun keterkaitan dari hulu sampai hilir yang bertujuan untuk mencapai multiplier efek secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pendekatan pengembangan kawasan agribisnis dari komoditi unggulan secara terpadu mencakup sub sistem agribisnis hulu, sub sistem usaha tani/pertanian primer, sub sistem agribisnis hilir dengan mengembangkan industri-industri pengolahan dan pemasarannya serta sub sistem jasa-jasa penunjang seperti perkreditan, penyuluhan, infrastruktur, pengangkutan, teknologi tepat guna dan lain-lain.

Pengembangan kawasan agribisnis Provinsi Sumatera Barat disajikan pada Tabel 7.11.

Tabel 7.11
Kawasan Pengembangan Agribisnis

No	Komoditi/Produk	Lokasi Kawasan Pengembangan Kawasan Agribisnis
1	Daging	Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Lima Puluh kota , Kabupaten Agam, Kota Payakumbuh
2	Sayuran Dataran Tinggi	Kabupaten Agam, Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar
3	Kakao	Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Payakumbuh, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Pasaman

e. Kawasan Pertambangan

Provinsi Sumatera Barat merupakan wilayah yang kaya akan hasil tambang, terutama tambang bahan galian dan berbagai sumberdaya mineral. Hampir semua wilayah administrasi merupakan areal penambangan, karena 17 dari 19 wilayah administrasi kabupaten/ kota mengandung bahan mineral yang berpotensi untuk dieksploitasi. Kawasan pertambangan di Sumatera Barat berada di Kota Sawahlunto, Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Pesisir Selatan untuk batubara; Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Solok untuk pertambangan galena; Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok, Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk pertambangan minyak dan gas; serta Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman Barat untuk kawasan tambang pasir besi.

f. Kawasan dan Sentra Industri

Rencana pengembangan kawasan industri di Provinsi Sumatera Barat berlokasi di perbatasan Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Padang berupa Kawasan Padang Industrial Park (PIP). Pengembangan industri tidak hanya pada kawasan tersebut, tetapi lebih diarahkan pada pengembangan sentra-sentra industri seperti ditunjukkan pada Tabel 7.12.

Tabel 7.12
Pengembangan Kawasan dan Sentra Industri di Provinsi Sumatera Barat

No	Sentra Industri	Kabupaten/Kota
1.	Industri Tekstil dan Produk Tekstil	Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Solok, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, Kota Padang, Kota Pariaman, Kota Sawahlunto, Kab. Tanah Datar, Kabupaten Sijunjung, Kota Padang Panjang, Kabupaten Pasaman Barat
2.	Industri Makanan Ringan	Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, Kota Padang Panjang, Kota Solok, Kota Pariaman, Kota Sawahlunto, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Solok, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Sijunjung
3.	Industri Pengolahan Kakao	Kabupaten Padang Pariaman, Kota Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kab. Agam, Kabupaten Pasaman, Kota Sawahlunto, Kota Padang
4.	Industri Semen dan Turunannya	Kota Solok, Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Payakumbuh, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang
5.	Industri Alsintan	Kabupaten Solok, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Payakumbuh, Kota Padang, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Kepulauan Mentawai
6.	Industri Minyak Atsiri dan Turunannya	Kota Solok, Kabupaten Agam, Kabupaten Mentawai, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Solok, Kota Sawahlunto, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Dharmasraya, Kota Padang
7.	Industri Kulit dan Alas Kaki	Kota Padang Panjang, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Pariaman, Kabupaten Tanah Datar
8.	Industri Pengolahan Gambir	Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Agam
9.	Industri Pengolahan Hasil Laut dan Perikanan	Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kota Pariaman, Kota Padang, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Lima Puluh Kota
10.	Industri Maritim	Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang.

g. Kawasan Pariwisata

Rencana pengembangan kawasan pariwisata berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Barat (RIPKP) Tahun 2014-2025 dibagi atas lima wilayah pembangunan pariwisata sebagaimana Tabel 7.13.

Tabel 7.13
Wilayah Pengembangan Pariwisata

No	Wilayah Pengembangan	Kabupaten/kota
1	Wilayah I Padang dan sekitarnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan yang dikembangkan, sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. KUPP Kota Padang (Kawasan Wisata Terpadu Kota Padang) b. KSPP Kabupaten Pesisir Selatan (Kawasan Wisata Mandeh). 2. Kawasan strategis dan potensial yang akan dikembangkan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. KSPP Kabupaten Padang Pariaman (Kawasan Wisata Pantai Tiram) b. KPPP Kota Pariaman (Kawasan Pantai Gondariah, Pulau Angso Duo)
2	Wilayah II Bukittinggi dan sekitarnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan yang dikembangkan, sebagai berikut: KUPP Bukittinggi (kawasan Jam Gadang Pasar Atas, Bukittinggi sebagai Kota Pusaka dan Geopark) 2. Kawasan strategis dan potensial yang akan dikembangkan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. KSPP Kabupaten Agam, (Kawasan Maninjau) b. KSPP Kabupaten Lima Puluh Kota, (Kawasan Harau) c. KPPP Kabupaten Pasaman, (Kawasan Equator) d. KPPP Kabupaten Pasaman Barat (Kawasan Pulau Panjang) e. KPPP Kota Payakumbuh (Kawasan Ngalau Indah)
3	Wilayah III Tanah Datar dan sekitarnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan yang dikembangkan, sebagai berikut: KUPP Kabupaten Tanah Datar, (Istano Basa Pagaruyung sebagai Kawasan Wisata Budaya) 2. Kawasan strategis dan potensial yang akan dikembangkan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. KSPP Kota Padang Panjang, (Bukit Tui sebagai Kawasan Berkuda) b. KSPP Kabupaten Solok, (Wisata Danau Singkarak dan Danau Kembar) c. KPPP Kota Solok (Kawasan Wisata Pulau Belibis) d. KPPP Kabupaten Solok Selatan (Kawasan Wisata Budaya 1000 Rumah Gadang)
4	Wilayah IV Sawahlunto dan sekitarnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan yang dikembangkan : KUPP Sawahlunto (Wisata Tambang di Kawasan Wisata Kota Tua) 2. Kawasan strategis dan potensial yang akan dikembangkan berikutnya, sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. KSPP Kabupaten Sijunjung (Kawasan Silokek) b. KSPP Dharmasraya (Kawasan Wisata Sejarah Candi Padang Roco)
5	Wilayah V Kepulauan Mentawai dan sekitarnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan yang dikembangkan: KUPP Dusun Jati dan Dusun Mapadegat, 2. Kawasan strategis dan potensial yang akan dikembangkan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. KSPP Teluk Katurai, b. KSPP Katiet, c. KSPP Tua Pejat, d. KPPP Desa Silabu

Keterangan:

KUPP = Kawasan Utama Pengembangan Pariwisata
KSPP = Kawasan Strategis Pengembangan Pariwisata
KPPP = Kawasan Potensial Pengembangan Pariwisata

h. Kawasan Permukiman

Kawasan permukiman sesuai dengan RTRW Provinsi Sumatera Barat 2012-2032 seluas 61.682 ha. Kawasan tersebut terdiri dari permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan. Arah pengembangan kawasan permukiman adalah:

- a. Secara teknis aman sebagai permukiman dan jauh dari bahaya bencana alam.
- b. Sehat dan mempunyai akses untuk kesempatan berusaha.
- c. Pengaturan terhadap luas lahan terbangun dengan tak terbangun pada kawasan pengembangan permukiman.
- d. Pengelompokan kawasan permukiman untuk penyediaan sarana dan prasarana permukiman yang lebih efisien dan efektif.
- e. Penegasan batas kawasan terhadap kawasan non permukiman.
- f. Penetapan tinggi bangunan pada kawasan pengembangan permukiman.
- g. Pengembangan sarana prasarana perumahan dan permukiman berupa jalan poros, jalan lingkungan, drainase, Sistem Pelayanan Air Minum (SPAM)

7.4.8. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

Pada saat ini masih terdapat tiga kabupaten di kategorikan tertinggal di Provinsi Sumatera Barat. Daerah tertinggal tersebut adalah Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Kepulauan Mentawai, dengan jumlah nagari sebanyak 111 nagari/desa. Ketertinggalan nagari dan desa pada daerah tertinggal ini pada umumnya disebabkan oleh aksesibilitas yang masih terbatas baik berupa akses jalan ke pusat-pusat pertumbuhan, terbatasnya akses pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, terbatasnya potensi sumberdaya alam, kapasitas sumberdaya yang masih terbatas. Untuk mengatasi ketertinggalan ini arah kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal sebagai berikut:

- a. Memperkuat kelembagaan pembangunan di daerah tertinggal untuk mengatasi persoalan koordinasi pembangunan lintas sektoral dan lintas wilayah.
- b. Menyusun rencana aksi yang lebih detail tentang penguatan konektivitas di wilayah tertinggal, terutama rencana aksi untuk pembangunan infrastruktur dasar bagi kepentingan peningkatan usaha sesuai dengan potensi yang dapat dikembangkan.
- c. Merencanakan zona pengolahan komoditi unggulan untuk menciptakan terjadinya aglomerasi diantara perusahaan yang bergerak dalam perdagangan dan industri pengolahan.
- d. Meningkatkan aksesibilitas daerah tertinggal dengan daerah lainnya dan dengan pusat-pusat pertumbuhan, melalui pembangunan infrastruktur dasar.
- e. Meningkatkan arus perjalanan orang dan barang melalui pembangunan simpul pergerakan orang dan barang seperti terminal, pelabuhan, dermaga di daerah tertinggal.
- f. Meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta dalam pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal.

7.4.9. Wilayah Perbatasan dengan Provinsi Lain

Provinsi Sumatera Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara di sebelah utara, dengan Provinsi Riau dan Jambi di sebelah timur, dengan Provinsi Bengkulu sebelah Selatan, dan dengan Samudera Hindia di sebelah barat. Kondisi wilayah perbatasan relatif tertinggal dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Hal ini terjadi karena wilayah perbatasan mempunyai keterbatasan aksesibilitas, keterbatasan infrastruktur pendidikan, kesehatan,

komunikasi dan transportasi, pasar, serta energi. Persoalan selanjutnya adalah lokasi permukiman yang menyebar sehingga sulit menyediakan sarana dan prasarana secara efektif. Jumlah kabupaten dan kecamatan yang berbatasan langsung dengan provinsi tetangga dapat dilihat pada Tabel 7.14.

Tabel 7.14
Kabupaten/Kota dan Jumlah Kecamatan Yang berbatasan dengan Provinsi Tetangga

No.	Provinsi Berbatasan	Kabupaten	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kecamatan
1	Sumatera Utara	Pasaman Barat	4	Sungai Beremas, Ranah Batahan, Gunung Tuleh dan Lembah Malintang
		Pasaman	4	Duo Koto, Rao Utara, Rao, Mapat Tunggul
2	Riau	Pasaman	2	Mapat Tunggul, Mapat Tunggul Selatan
		Lima Puluh Kota	4	Kapur IX, Pangkalan Koto Baru, Harau, Lareh Sago Halaban
		Sijunjung	3	Sijunjung, Kamang Baru, Sumpur Kudus
		Dharmasraya	2	Sitiung dan Koto Baru
3	Jambi	Dharmasraya	2	Koto Baru, Sungai Rumbai
		Solok Selatan	2	Sangir Jujuhan dan Sangir
		Pesisir Selatan	3	Pancung Soal, basa IV Balai Tapan dan Lunang Silaut
4	Bengkulu	Pesisir Selatan	1	Lunang Silaut

Arah kebijakan pengembangan wilayah perbatasan sebagai berikut:

- Pengembangan infrastruktur dan fasilitas umum meliputi transportasi, pendidikan, kesehatan serta infrastruktur perekonomian.
- Pengembangan dan penyelamatan ekosistem, kesepakatan antar wilayah hulu, hilir, provinsi, dan pusat dalam rangka menjaga kelestarian alam dan antisipasi terhadap bencana.
- Pengembangan potensi ekonomi berupa sumberdaya alam, wisata dan sumber ekonomi lainnya dilakukan dengan pola meningkatkan kerjasama antar provinsi maupun antar kabupaten tetangga.
- Pengembangan sosial budaya, pertalian sosial budaya masyarakat di wilayah perbatasan biasanya mempunyai keterkaitan persaudaraan, kekerabatan karena interaksi masyarakat antar wilayah perbatasan sudah lama terjadi.
- Peningkatan sumberdaya manusia dan regulasi mendukung pengembangan daerah perbatasan.

7.5. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN LINTAS PEMERINTAH DAERAH

Pembangunan lintas satuan kerja dibutuhkan untuk program-program prioritas yang memerlukan dukungan yang bersifat holistik dan integratif dengan melibatkan beberapa perangkat daerah atau lintas bidang pembangunan.

Pelaksanaan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat dalam RPJMD tahun 2016 – 2021 yang memerlukan dukungan dari semua stakeholder terkait, baik antar lintas perangkat daerah, swasta, perguruan tinggi maupun masyarakat dilaksanakan dalam beberapa Gerakan Terpadu. Gerakan terpadu yang bersifat pemberdayaan masyarakat dengan kelompok sasaran masyarakat miskin dilakukan melalui gerakan terpadu Pemberdayaan Fakir Miskin, gerakan terpadu yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi dan pendapatan masyarakat dilakukan melalui Gerakan Terpadu Pensejahteraan Petani (GPP), Gerakan Terpadu Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (GPEMP), Gerakan Terpadu Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Dan Kecil, dan Gerakan Terpadu Pengembangan Kepariwisata. Gerakan terpadu yang bertujuan untuk penguatan dan

pembinaan mental dan kualitas hidup masyarakat dan aparatur pemerintahan dilaksanakan melalui gerakan terpadu Pengamalan Nilai-nilai Agama, Pelestarian dan Aplikasi ABS-SBK, Gerakan Terpadu Reformasi Birokrasi Pemerintahan, Gerakan Terpadu Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Sedangkan gerakan terpadu yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dilakukan melalui Gerakan Terpadu Sumbar Bersih dan Pembangunan Berkelanjutan. Seluruh gerakan terpadu menurut prioritas pembangunan dapat dilihat pada Tabel 7.15.

Tabel 7.15
Gerakan Terpadu Prioritas Pembangunan Sumatera Barat Tahun 2016-2021

No	Prioritas Pembangunan	Gerakan Terpadu
1	Pembangunan Mental dan Pengamalan Agama dan ABS-SBK Dalam Kehidupan Masyarakat	1. Gerakan Terpadu Pengamalan Nilai-nilai Agama, Pelestarian dan Aplikasi ABS-SBK
2	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan	2. Gerakan Terpadu Reformasi Birokrasi Pemerintahan
3	Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan	3. Gerakan Terpadu Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	
5	Peningkatan produksi untuk mendukung kedaulatan pangan nasional dan pengembangan agribisnis	4. Gerakan Terpadu Pensejahteraan Petani (GPP)
6	Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi dan Peningkatan Investasi	5. Gerakan Terpadu Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Dan Kecil 6. Gerakan Terpadu Pengembangan Kepariwisata 7. Gerakan Terpadu Pemberdayaan Rantau
7	Peningkatan Pemanfaatan Potensi Kemaritiman dan Kelautan	8. Gerakan Terpadu Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (GPEMP)
8	Penurunan Tingkat kemiskinan, Pengangguran, serta penanganan Daerah Tertinggal	9. Gerakan Terpadu Pemberdayaan Fakir Miskin
9	Pengembangan Sumber Energi Baru dan Terbarukan serta Pembangunan Infrastruktur	
10	Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana	10. Gerakan Terpadu Sumbar Bersih dan Pembangunan Berkelanjutan

Selanjutnya program lintas perangkat daerah dalam pelaksanaan gerakan terpadu dapat dilihat pada Tabel 7.16.

Tabel 7.16
Program Organisasi Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Gerakan Terpadu

No	Gerakan Terpadu	Program	Perangkat Daerah	Urusan
1	Gerakan Terpadu Pengamalan Nilai-nilai Agama Dan Pelestarian Serta Aplikasi ABS-SBK	Peningkatan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai agama	Biro Bintal dan Kesra	Kebudayaan
		Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Badan Kesbangpol	Trantibum dan linmas
		Pemberdayaan lembaga-lembaga adat seni dan budaya	Dinas Kebudayaan	Kebudayaan
		Pengembangan lembaga-lembaga social keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan	Dinas Kebudayaan	Kebudayaan
		Pengembangan pendidikan budaya	Dinas Pendidikan	Kebudayaan
		Pemberdayaan kelembagaan masyarakat adat	Biro Bintal dan Kesra	Kebudayaan
2	Gerakan Terpadu Reformasi Birokrasi Pemerintah	Pembinaan dan pengembangan aparatur	Badan Kepegawaian Daerah	Kepegawaian dan diklat
		Peningkatan manajemen SDM aparatur	Ro. Organisasi	Kepegawaian dan diklat

No	Gerakan Terpadu	Program	Perangkat Daerah	Urusan
		Peningkatan fungsi pengawasan dan penegakan hukum	Inspektorat	Fungsi lainnya
		Implementasi penanganan pengaduan masyarakat	Inspektorat	Fungsi lainnya
		Pengelolaan e-gov. pemerintah daerah	Biro humas	Komunikasi dan infomatika
		Peningkatan kualitas pelayanan perizinan terpadu satu pintu	Dinas Penanaman Modal dan Desa	Penanaman Modal
		Peningkatan kualitas pelayanan public	Biro humas, biro organisasi	Fungsi lainnya
		Perencanaan pembangunan daerah	Bappeda	Fungsi perencanaan
3	Gerakan Terpadu Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Peningkatan akses pemerataan dan mutu pendidikan menengah	Dinas pendidikan	Pendidikan
		Pendidikan khusus dan layanan khusus	Dinas pendidikan	Pendidikan
		Pendidikan berkarakter	Dinas pendidikan	Pendidikan
		Perbaikan gizi masyarakat	Dinas kesehatan	Kesehatan
		Pengembangan lingkungan sehat	Dinas kesehatan	Kesehatan
		Peningkatan sumberdaya kesehatan	Dinas kesehatan	Kesehatan
		Pembinaan keluarga, balita dan anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA)	PPPA (Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak)
		Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja	Disnakertrans	Ketenagakerjaan
		Pelayanan dan rehabilitasi Kesejahteraan social	Dinas Sosial	Sosial
4	Gerakan Terpadu Pensejahteraan Petani (GPP)	Peningkatan Produksi dan Produktifitas	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan perkebunan, Dinas Peternakan dan Keswan Dinas Kelautan dan Perikanan 	Pertanian
		Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Keswan Dinas Kelautan dan Perikanan 	Pertanian
		Diversifikasi Pangan	Dinas Pangan	Pangan
		Pengembangan Industri Kecil Menengah	Dinas Perindag	Perindustrian
		Peningkatan dan pengembangan Perdagangan dalam negeri	Dinas Perindag	Perdagangan
		Peningkatan dan pengembangan daya saing UMKM	Dinas Koperasi, UKM	Koperasi dan UMKM
		Peningkatan dan pengembangan daya saing koperasi	Dinas Koperasi, UKM	Koperasi dan UMKM
5	Gerakan Terpadu Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Dan Kecil	Pengembangan Industri Kecil Menengah	Dinas Perindag	Perindustrian
		Peningkatan dan pengembangan Perdagangan dalam negeri	Dinas Perindag	Perdagangan
		Peningkatan dan pengembangan daya saing UMKM	Dinas Koperasi, UKM	Koperasi dan UMKM
		Peningkatan dan pengembangan daya saing koperasi	Dinas Koperasi, UKM	Koperasi dan UMKM

No	Gerakan Terpadu	Program	Perangkat Daerah	Urusan
		Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Keswan Dinas Kelautan dan Perikanan 	Pertanian
		Pengolahan dan Pemasaran hasil	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Keswan Dinas Kelautan dan Perikanan 	Pertanian
6	Gerakan Terpadu Pengembangan Kepariwisata	Pengembangan destinasi pariwisata	Dinas Pariwisata	Pariwisata
		Pengembangan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif	Dinas Pariwisata	Pariwisata
		Pengembangan ekonomi kreatif	Dinas Pariwisata	Pariwisata
		Pembangunan jalan dan jembatan provinsi	Dinas Pariwisata	Pariwisata
		Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Dinas PU PR	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan	Dinas Perhubungan	Perhubungan
		Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Dinas Prasjal Tarkim Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
		Peningkatan dan pengembangan daya saing UMKM	Dinas Koperasi dan UKM	Koperasi dan UMKM
		Pengembangan Industri Kecil Menengah	Dinas Perindag	Perindustrian
7.	Gerakan Terpadu Pemberdayaan Rantau	Program peningkatan kapasitas dan kelembagaan SDM	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pariwisata Dinas Perindag Dinas pendidikan Koperasi dan UKM 	Pariwisata Industri Koperasi dan UMKM
		Program pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif	Dinas Pariwisata	Pariwisata
		Program Peningkatan dan pengembangan Dalam negeri	Dinas Perindag	Perdagangan
		Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	Dinas PMD	Penanaman Modal
8.	Gerakan Terpadu Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (GPEMP)	Peningkatan Produksi dan Produktifitas	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Keswan Dinas Kelautan dan Perikanan 	Pertanian
		Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Keswan Dinas Kelautan dan Perikanan 	Pertanian
		Diversifikasi pangan	Dinas Pangan	Pangan
		Pengembangan Industri Kecil Menengah	Dinas Perindag	Perindustrian
		Peningkatan dan pengembangan Perdagangan dalam negeri	Dinas Perindag	Perdagangan

No	Gerakan Terpadu	Program	Perangkat Daerah	Urusan
		Peningkatan dan pengembangan daya saing UMKM	Dinas Koperasi dan UKM	Koperasi dan UMKM
		Peningkatan dan pengembangan daya saing koperasi	Dinas Koperasi dan UKM	Koperasi dan UMKM
		Pengembangan lingkungan sehat	Dinas kesehatan	kesehatan
		Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Dinas PU PR	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
9.	Gerakan Terpadu Pemberdayaan Fakir Miskin	Pengendalian Terpadu Penanganan Kemiskinan	BPM Dinas Pendidikan, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pariwisata, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kehutanan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Peternakan dan Keswan, Dinas PU PR, Dinas Kesehatan, Dinas PSDA, Dinas Pangan, Bakeuda	
10.	Gerakan Terpadu Sumbar Bersih dan Pembangunan Berkelanjutan	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup
		Program Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota;	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	PU dan Tata Ruang
		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional;		
		Program Pengelolaan Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai lintas daerah kabupaten/kota;		
		Program Pengembangan Sistem Air minum dan Air Limbah;		
		Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman;		
		Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan		
		Program Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Dinas Perhubungan	Perhubungan
		Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Dinas Kesehatan	Kesehatan
		Program Perikanan Tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan	Perikanan

No	Gerakan Terpadu	Program	Perangkat Daerah	Urusan
		Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Dinas Perindag	Perindag
		Pengembangan destinasi wisata pada daerah potensial, strategis dan utama	Dinas Pariwisata	Pariwisata
		Peningkatan kesiapsiagaan menghadapi bencana	BPBD	Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

Indikasi rencana program prioritas merupakan upaya-upaya yang akan ditempuh dan dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur. Dalam implementasinya secara operasional, program-program tersebut dijabarkan kedalam urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Program-program tersebut selanjutnya dikelompokkan ke dalam urusan pemerintah dengan Perangkat Daerah terkait sehingga dapat dilihat dengan jelas pembagian tugas Perangkat Daerah dalam melaksanakan rencana pembangunan yang telah disusun, yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah langsung dalam pencapaian Visi, Misi Gubernur dan Wakil Gubernur.

Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah dan indikator kinerja tersebut dikelompokkan ke dalam 24 urusan wajib dan 8 urusan pilihan. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu Urusan : Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Sosial, Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, dan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Sedangkan untuk urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu urusan : tenaga kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pangan, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal, Kepemudaan dan Olah Raga, Statistik, Persandian, Kebudayaan, Perpustakaan dan Arsip. Terkait dengan urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan yaitu Urusan : Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Kehutanan, Energi dan Sumberdaya Mineral, Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi.

Untuk dapat merumuskan program secara terukur dan memudahkan pelaksanaan evaluasi, maka masing-masing program diikuti dengan indikator dan target kinerja yang akan dicapai pada setiap tahunnya. Indikator dan target kinerja ini ditetapkan dengan memperhatikan kondisi awal dan disusun bersama dengan Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan kemampuan pendanaan untuk mencapai target tersebut. Pada target kinerja diperkirakan output dan outcome yang akan dihasilkan dari masing-masing program. Penulisan outcome selain output pada indikator kinerja dimaksudkan untuk memberikan arahan kepada Perangkat Daerah dalam merumuskan kegiatan-kegiatan pada setiap program prioritas pada penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Sedangkan pada kerangka pendanaan diperkirakan besarnya dana APBD dan sumber dana lainnya yang dibutuhkan dalam rangka pencapaian target tersebut serta Perangkat Daerah penanggungjawab. Dalam rancangan RPJMD ini belum memperhitungkan indikasi pendanaan peralihan kewenangan dari kabupaten/kota ke provinsi sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Rincian program berdasarkan urusan dengan indikator dan target kinerja serta indikasi kebutuhan pendanaan secara rinci dapat dilihat pada Tabel 7.17.

TABEL 7.17
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR		SKPD PENANGGUNG JAWAB		
							2016		2017		2018		2019		2020					2021	
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)				Target	Rp. (Jt)
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG																				
	TAHUN 2016-2017 :					2.397.074	2.661.076	2.858.173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Belanja Pegawai				695.926	741.678	789.887	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Belanja Hibah				897.233	1.087.323	1.174.309	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Belanja Bantuan Sosial					5.618		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Belanja bagi hasil Kepada Kabupaten/Kota				669.371	664.893	718.084	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Pemdes				123.736	150.732	159.775	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Belanja Tidak Terduga				10.808	16.450	10.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TAHUN 2018-2021 :								3.982.901	4.264.051	4.672.955	4.834.595									
	Belanja Pegawai							2.196.166	2.290.928	2.391.964	2.499.943										
	Belanja Hibah							899.816	1.007.006	1.231.694	1.194.372										
	Belanja Bantuan Sosial							5.955	6.312	6.691	7.093										
	Belanja bagi hasil Kepada Kabupaten/Kota							767.113	845.955	928.756	1.019.337										
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Pemdes							108.850	108.850	108.850	108.850										
	Belanja Tidak Terduga							5.000	5.000	5.000	5.000										

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR		SKPD PENANGGUNG JAWAB		
	TAHUN 2016	TAHUN 2017-2021	TAHUN 2016	TAHUN 2017-2021			2016		2017		2018		2019		2020		2021			Target	Rp. (Jt)
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)			
B.	BELANJA LANGSUNG																				
	TOTAL	TAHUN 2016-2017 :					1.884.621		2.068.760			-		-		-		-		-	
	TOTAL	TAHUN 2018-2021 :									2.793.927		3.154.087		3.452.351		4.068.435				
		TAHUN 2017 :		TAHUN 2017 :																	
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN			82.093		345.250		102.132		114.086		152.071		425.398		153.816		
	URUSAN PENDIDIKAN	URUSAN PENDIDIKAN		URUSAN PENDIDIKAN			82.093		345.250		102.132		114.086		152.071		425.398		883.284		
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi dan operasional kantor	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	5.190	100	5.062	100	5.722	100	6.008	100	6.309	100	6.624	100	6.624	Dinas Dikbud
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana aparatur	Persentase berfungsi sarana dan prasarana aparatur	%	100	100	2.163	100	2.089	100	2.385	100	2.504	100	2.629	100	2.761	100	2.761	Dinas Dikbud
			Kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik (zona hijau)	zona			hijau		hijau		hijau		hijau		hijau		hijau		hijau		
	Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	%	100	100	262	100	199	100	289	100	303	100	319	100	335	100	335	Dinas Dikbud
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas SDM Aparatur	Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat	JPL/orang/ tahun		10	280	15	25	20	309	30	324	40	340	50	357	50	357	Dinas Dikbud
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya capaian kinerja keuangan dan sistem pelaporan Kinerja SKPD	Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD	%	100	100	1.112	100	1.166	100	1.226	100	1.288	100	1.352	100	1.420	100	1.420	Dinas Dikbud
			Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD	Predikat			BB		BB		BB		A		A		A		A		
			Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan	%	100	100			100		100		100		100		100		100		
			Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra SKPD	%	100	100			100		100		100		100		100		100		
			Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD	%	100	100			100		100		100		100		100		100		
		Perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dan asset							865												Dinas Dikbud
	Peningkatan Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Informal (PAUDNI)	-	Tersedia dan terjangkau layanan PAUDNI bermutu dan berkesetaraan di semua kab/kota	%	67,27 (2014)	68,15	7.827						-		-		-		-		Dinas Dikbud
	Peningkatan Akses Pendidikan Dasar	-	Tersedia dan terjangkau layanan pendidikan dasar yang bermutu, relevan dan berkesetaraan di semua kab/kota	%	100	8.997							-		-		-		-		Dinas Dikbud

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR		SKPD PENANGGUNG JAWAB		
	TAHUN 2016	TAHUN 2017-2021	TAHUN 2016	TAHUN 2017-2021			2016		2017		2018		2019		2020		2021			Target	Rp. (Jt)
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)			
	Peningkatan Akses, Perluasan dan Mutu Pendidikan Menengah	Peningkatan Akses, Pemerataan dan Mutu Sekolah Menengah Atas	Tersedia dan terjangkau layanan pendidikan menengah yang bermutu, relevan dan berkesetaraan di semua kab/kota	APK SMA/SMK/MA/ SMALB Paket C	%	96,64 (2014)	96,88	48.471	97,11	172.124	97,34	46.257	97,57	53.786	97,8	86.970	98,03	355.088	98,03	83.506	Dinas Dikbud
				APM SMA/SMK/MA/ SMALB Paket C	%	73,08 (2014)	73,35		73,60		73,85		74,10		74,35		74,6		74,6		
				Angka Putus SMA	%	0,95 (2015)	0,83		0,78		0,73		0,68		0,63		0,58		0,58		
				Angka Kelulusan SMA/MA/ SMALB Paket C	%	99,95 (2015)	97,21		97,35		97,42		97,57		98,25		99,15		99,15		
				Lulusan Sekolah Menengah yang diterima di Perguruan Tinggi	%	41,32 (2015)	42,98		45,23		46,75		48,00		50,00		52,05		52,05		
				Angka tidak melanjutkan dari SMP ke Sekolah Menengah	%	4,44 (2015)	4,02		3,60		3,18		2,76		2,74		1,92		1,92		
	-	Peningkatan Akses, Pemerataan dan Mutu Sekolah Menengah	-	Angka kelulusan SMK	%	99,74 (2015)	97,12	-	97,3	121.785	97,35	30.345	97,52	32.939	98,15	35.766	99,12	38.845	99,12	38.845	Dinas Dikbud
				Angka Putus SMK	%	0,95 (2015)	0,92		0,88		0,83		0,78		0,73		0,68		0,68		
				Lulusan SMK yang diterima di dunia usaha dan industri (DUDI)	%	25 (2015)	28		32		37		43		50		58		58		
	-	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan	-	Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG)	Skor 1-100	54,68 (2015)	59,93	-	65,18	4.400	70,43	811	75,68	880	80,93	956	86,18	1.038	86,18	1.038	Dinas Dikbud
				Kompetensi Tenaga Kependidikan (Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah, Laboran, Pustakawan dan Pegawai TU Sekolah)	Skor 1-100	0	16,67		19,17		22,05		25,35		33,53		38,56		38,56		
				Kompetensi Tenaga Pendidik (Guru SMA, SMK dan PLB)	Skor 1-100	54,68	59,93		65,18		70,43		75,68		80,93		86,18		86,18		
	Manajemen Pelayanan Pendidikan	Manajemen Pelayanan Pendidikan	Tersedia dan terjangkau layanan pendidikan	Sekolah Menengah/SLB Terakreditasi Minimal B	%	70,81 (2015)	72,23	3.063	73,67	26.948	75,14	9.074	76,65	9.850	78,18	10.695	79,74	11.616	79,74	11.616	Dinas Dikbud
				APK PAUD	%	67,27 (2014)	68,15		70,25		72,18		74,6		76,2		77,5		77,5		
				APM SD/SDLB/Paket A/MI	%	95,92 (2014)	99,58		99,59		99,6		99,61		99,62		100		100		
				APM SMP/MTs/ SMPLB/ Paket B	%	79,57 (2014)	81,2		81,25		81,3		81,35		81,5		81,55		81,55		
	Pelayanan Pendidikan Berkarakter	Pendidikan Berkarakter	Tersedia dan terjangkau layanan pendidikan karakter yang bermutu dan berkesetaraan di semua kab/kota	Indeks Integritas siswa	Skor 1-100	58 (2015)	66	1.620	68	1.327	70	293	80	318	82	345	85	375	85	375	Dinas Dikbud
				Persentase guru BK paham terkait pencegahan narkoba	%		4,3		5,38		6,72		10,5		13,12		16,4		16,4		
				Persentase Peningkatan pemahaman dan penerapan nilai-nilai budaya bagi peserta didik	% sekolah	NA	7,57		9,08		10,9		13,08		15,7		18,84		18,84		

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR		SKPD PENANGGUNG JAWAB			
							2016		2017		2018		2019		2020					2021		
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)				Target	Rp. (Jt)	
			Sekolah Menengah dengan system boarding school yang bermuansa islami	Sekolah	3	3		7		9		9		10		11		11				
			% lulusan Tahfiz	%	6,9	7,07		7,25		7,43		7,61		7,8		8,01		8,01				
			Sekolah Menengah yang bermuansa islami	Sekolah	3	3		5		8		12		15		19		19				
			% lulusan Tahfiz	%	5,67	5,81		5,95		6,1		6,25		6,41		6,57		6,57				
	Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	Tersedia dan terjangkau layanan pendidikan karakter yang bermutu dan berkesetaraan di semua kab/kota	Persentase peningkatan pelayanan pendidikan khusus dan layanan khusus	%	63,16	68,42	3.108	73,68	9.260	78,95	5.422	84,21	5.886	89,47	6.391	100	6.941	100	6.941	Dinas Dik	
	TAHUN 2018-2021 :		TAHUN 2018-2021 :																			
	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN									514.671		650.015		576.375		729.468		729.468		
	NON URUSAN		NON URUSAN									9.538		11.893		10.546		13.347		13.347		
		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	%	100				100	4.219	100	6.026	100	5.343	100	6.762	100	6.762	100	6.762	Dinas Pendidikan	
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	%	100				100	1.418	100	1.744	100	1.546	100	1.957	100	1.957	100	1.957	Dinas Pendidikan	
			Kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik (zona hijau)	zona					hijau			hijau		hijau		hijau		hijau		hijau		
		Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	%	100				100	211	100	193	100	171	100	216	100	216	100	216	Dinas Pendidikan	
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat	JPL/orang/tahun					20	25	30	20	40	18	50	23	50	23	50	23	Dinas Pendidikan	
		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD	%	100				100	3.666	100	3.910	100	3.467	100	4.388	100	4.388	100	4.388	Dinas Pendidikan	
			Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD	Predikat					BB			A		A		A		A		A		
			Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan	%	100				100			100		100		100		100		100		
			Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra SKPD	%	100				100			100		100		100		100		100		
			Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD	%	100				100			100		100		100		100		100		
	URUSAN PENDIDIKAN		URUSAN PENDIDIKAN									505.134		638.122		565.829		716.121		716.121		
		Peningkatan Akses dan Pemerataan Pendidikan Menengah	APK SMA/SMK/MA/ SMALB Paket C	%	96,64 (2014)				97,34			97,57	125.581	97,8	111.354	98,03	140.931	98	140.931	98	140.931	Dinas Pendidikan
			APM SMA/SMK/MA/ SMALB Paket C	%	73,08 (2014)				73,85			74,10		74,35		74,6		74,6		74,6		
			Angka Putus SMA	%	0,95 (2015)				0,73			0,68		0,63		0,58		0,58		0,58		
			Angka Putus SMK	%	0,95 (2015)				0,83			0,78		0,73		0,68		0,68		0,68		

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR		SKPD PENANGGUNG JAWAB		
							2016		2017		2018		2019		2020					2021	
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)				Target	Rp. (Jt)
TAHUN 2016	TAHUN 2017-2021	TAHUN 2016	TAHUN 2017-2021																		
			Lulusan Sekolah Menengah yang diterima di Perguruan Tinggi	%	41,32 (2015)					46,75		48,00		50,00		52,05		52,05			
			Angka tidak melanjutkan dari SMP ke Sekolah Menengah	%	4,44 (2015)					3,18		2,76		2,74		1,92		1,92			
	Peningkatan Akses, Perluasan dan Mutu Pendidikan SMA		APK SMA/SMK/MA/ SMALB Paket C	%	96,64 (2014)					97,34	44.915	-	-	-	-	-	-	-			
			APM SMA/SMK/MA/ SMALB Paket C	%	73,08 (2014)					73,85		-		-		-		-			
			Angka Putus SMA	%	0,95 (2015)					0,73		-		-		-		-			
			Angka Kelulusan SMA/MA/ SMALB Paket C	%	99,95 (2015)					97,42		-		-		-		-			
			Lulusan Sekolah Menengah yang diterima di Perguruan Tinggi	%	41,32 (2015)					46,75		-		-		-		-			
			Angka tidak melanjutkan dari SMP ke Sekolah Menengah	%	4,44 (2015)					3,18		-		-		-		-			
	Peningkatan Akses, Perluasan dan Mutu Pendidikan SMK		Angka kelulusan SMK	%	99,74 (2015)					97,35	3.961	-	-	-	-	-	-	-			
			Angka Putus SMK	%	0,95 (2015)					0,83		-		-		-		-			
			Lulusan SMK yang diterima di dunia usaha dan industri (DUDI)	%	25 (2015)					37		-		-		-		-			
	Peningkatan Mutu, relevansi dan daya saing Pendidikan Menengah		Angka kelulusan SMK	%	99,74 (2015)					97,35		97,52	439.363	98,15	389.588	99,12	493.067	99,12	493.067	Dinas Pendidikan	
			Lulusan SMK yang diterima di dunia usaha dan industri (DUDI)	%	25 (2015)					37		43		50		58		58			
			Angka Kelulusan SMA/MA/ SMALB Paket C							97,42		97,57		98,25		99,15					
	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan		Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG)	Skor 1-100	54,68 (2015)					70,43	5.862	75,68	10.140	80,93	8.991	86,18	11.380	86,18	11.380	Dinas Pendidikan	
			Kompetensi Tenaga Kependidikan (Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah, Laboran, Pustakawan dan Pegawai TU Sekolah)	Skor 1-100	0					22,05		25,35		33,53		38,56		38,56			
			Kompetensi Tenaga Pendidik (Guru SMA, SMK dan PLB)	Skor 1-100	54,68					70,43		75,68		80,93		86,18		86,18			
	Manajemen Pelayanan Pendidikan		Sekolah Menengah/SLB Terakreditasi Minimal B	%	70,81 (2015)					75,14	23.668	-	-	-	-	-	-	-			
			APK PAUD	%	67,27 (2014)					72,18		-		-		-		-			
			APM SD/SDLB/Paket A/MI	%	95,92 (2014)					99,6		-		-		-		-			
			APM SMP/ MTs/ SMP/ Paket B	%	79,57 (2014)					81,3		-		-		-		-			
	Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Pendidikan		Sekolah Menengah/SLB Terakreditasi Minimal B	%	70,81 (2015)					75,14		76,65	20.129	78,18	17.848	79,74	22.589	79,74	22.589	Dinas Pendidikan	

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR		SKPD PENANGGUNG JAWAB		
							2016		2017		2018		2019		2020					2021	
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)				Target	Rp. (Jt)
			APK PAUD	%	67,27 (2014)					72,18		74,6		76,2		77,5		77,5			
			APM SD/SDLB/Paket A/MI	%	95,92 (2014)					99,6		99,61		99,62		100		100			
			APM SMP/ /MTs/ SMP/ Paket B	%	79,57 (2014)					81,3		81,35		81,5		81,55		81,55			
		Pendidikan Berkarakter	Indeks Integritas siswa	Skor 1-100	58 (2015)					70	2.244	80	2.313	82	2.051	85	2.596	85	2.596	Dinas Pendidikan	
			Persentase guru BK paham terkait pencegahan narkoba	%						6,72		10,5		13,12		16,4		16,4			
			Persentase Peningkatan pemahaman dan penerapan nilai-nilai budaya bagi peserta didik	% sekolah	NA					10,9		13,08		15,7		18,84		18,84			
			Sekolah Menengah dengan system boarding school yang bernuansa islami	Sekolah	3					9		9		10		11		11			
				% lulusan Tahfiz	6,9						7,43		7,61		7,8		8,01		8,01		
			Sekolah Menengah yang bernuansa islami	Sekolah	3					8		12		15		19		19			
				% lulusan Tahfiz	5,67						6,1		6,25		6,41		6,57		6,57		
		Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	Persentase peningkatan pelayanan pendidikan khusus dan layanan khusus	%	63,16					78,95	7.933	84,21	40.596	89,47	35.997	100	45.558	100	45.558	Dinas Pendidikan	
		Pemindahan Dana BOS dari Belanja Tidak Langsung dan lain-lain *)									416.549										

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR		SKPD PENANGGUNG JAWAB		
							2016		2017		2018		2019		2020					2021	
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)				Target	Rp. (Jt)
		TAHUN 2017 :		TAHUN 2017 :																	
	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN		DINAS KESEHATAN			137.619		112.430		159.018		175.640		218.699		225.962		225.962		
	URUSAN KESEHATAN	URUSAN KESEHATAN				137.619		112.430		159.018		175.640		218.699		225.962		225.962			
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	6.774	100	5.219	100	7.469	100	9.017	100	9.919	100	10.910	100	10.910	Dinas Kesehatan
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	%	100	100	3.033	100	3.272	100	3.343	100	4.037	100	4.441	100	4.885	100	4.885	Dinas Kesehatan
				Kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik (zona hijau)	Zona			hijau		hijau		hijau		hijau		hijau		hijau			
	Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	%	100	100	243	100	289	100	268	100	323	100	356	100	391	100	391	Dinas Kesehatan
	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat	JPL/orang/tahun		10	48	15	57	20	53	30	64	40	77	50	85	50	85	Dinas Kesehatan
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD	%	100	100	573	100	558	100	632	100	809	100	978	100	1.076	100	1.076	Dinas Kesehatan
				Nilai Evaluasi SAKIP SKPD	predikat		BB		BB		BB		A		A		A		A		
				Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
				Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra SKPD	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
				Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
		Perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dan asset								9.068											Dinas Kesehatan
	Obat dan Pembekalan Kesehatan	Obat dan Pembekalan Kesehatan	Meningkatnya ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan disarana pelayanan kesehatan	Persentase Ketersediaan obat buffer stock dan vaksin di pelayanan kesehatan dasar	%	80	80	5.925	83	-	86	6.259	90	6.453	93%	6.776	100%	5.822	100%	5.822	Dinas Kesehatan
	Upaya Kesehatan Masyarakat	Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya pelayanan kesehatan yang berkualitas melalui koordinasi pelayanan kesehatan Ibu dan Anak, pelayanan rujukan dan pelayanan kesehatan lainnya	Persentase persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan	%	87	87	80.747	88	11.830	89	7.978	90	8.508	90%	8.934	90%	7.677	90%	7.677	Dinas Kesehatan
				Persentase kunjungan neonatal (KN1)	%	76	76		87		88		89		90		90%		90%		
				Jumlah Puskesmas yang terakreditasi minimal 1 per kecamatan	Puskesmas	1	1		56		96		131		156		195		195		
				Jumlah rumah sakit Pemerintah yang terakreditasi minimal 1 per Kab.kota	RS	1	2		3		4		4		4		5		5		
				Kasus narkoba yang dilayani	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
				Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL)	Jumlah	21	22		23		24		25		26		27		27		

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR		SKPD PENANGGUNG JAWAB		
	TAHUN 2016	TAHUN 2017-2021	TAHUN 2016	TAHUN 2017-2021			2016		2017		2018		2019		2020		2021			Target	Rp. (Jt)
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)			
			IPWL Kabupaten/Kota	Kab/Kota	16	17		17		18		18		19		19		19			
	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya upaya kesehatan bersumber daya masyarakat melalui penyediaan sarana promosi, pertemuan, pelatihan dan gerakan generasi muda dalam pembangunan kesehatan	Persentase Kab/Kota yang memiliki kebijakan PHBS	%	NA	40	1.727	50	1.421	60	1.763	70	1.881	75	1.975	80	1.697	80	1.697	Dinas Kesehatan
	Perbaikan Gizi Masyarakat	Perbaikan Gizi Masyarakat	Meningkatnya status gizi masyarakat yang diukur dengan prevalensi gizi seimbang Balita dan meningkatnya proporsi keluarga yang mengkonsumsi gizi seimbang	Prevalensi gizi kurang (Berat Badan/Tinggi Badan)	%	4,8	4,75	1.103	4,70	1.051	4,65	1.127	4,60	1.202	4,55	1.262	4,5	1.085	4,5	1.085	Dinas Kesehatan
	Pengembangan Lingkungan Sehat	Pengembangan Lingkungan Sehat	Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan masyarakat	Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan	%	47,25	50	530	45	490	54	542	56	578	58	607	60	521	60	521	Dinas Kesehatan
				Persentase rumah sakit Provinsi yang melakukan pengolahan limbah medis sesuai standar	%	0	25		50		70		75		100		100		100		
				Jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan tatanan kawasan sehat	Kab/Kota	17	17		18		18		19		19		19		19		
	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular/Tidak Menular	Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Menurunnya kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular melalui pembinaan, monitoring dan peningkatan SDM Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Persentase anak 0-18 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	%	74,1	91	2.579	91,5	1.887	92	2.634	92,5	2.809	93	2.949	95	2.534	95	2.534	Dinas Kesehatan
				Jumlah Kab/Kota dengan API (Annual Parasite Indeks) <1 per 1000 penduduk	Kab/Kota	17	18		18		18		19		19		19		19		
				Persentase Kab/Kota dengan Incidence Rate DBD < 49 per 100.000 penduduk	%	42	42		64		66		68		70		72		72		
				Persentase Kab/Kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB paru BTA Positif (Sukses Rate)	%	87,06	87,06		81		85		87		90		93		93		
				Persentase kasus HIV yang diobati	%	100	100		45		47		50		52		55		55		
				Persentase Puskesmas menyelenggarakan pengendalian penyakit tidak menular (PTM) terpadu	%	10	10		30		40		50		60		70		70		
				Persentase RSUD Rujukan Regional yang menyelenggarakan layanan kesehatan jiwa/Psikiatry	%	25	25		50		100		100		100		100		100		

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR		SKPD PENANGGUNG JAWAB		
	TAHUN 2016	TAHUN 2017-2021	TAHUN 2016	TAHUN 2017-2021			2016		2017		2018		2019		2020		2021			Target	Rp. (Jt)
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)			
				Persentase Kab/Kota dengan Incidence Rate DBD < 49 per 100.000 penduduk	%	42			66		68		70		72		72				
				Persentase Kab/Kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB paru BTA Positif (Sukses Rate)	%	87,06			85		87		90		93		93				
				Persentase kasus HIV yang diobati	%	100			47		50		52		55		55				
				Persentase Puskesmas menyelenggarakan pengendalian penyakit tidak menular (PTM) terpadu	%	10			40		50		60		70		70				
				Persentase RSUD Rujukan Regional yang menyelenggarakan layanan kesehatan jiwa/Psikiatry	%	25			100		100		100		100		100				
		Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / RS, Paru/ RS, Mata		Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan	%	100			60	49.792	80	57.108	100	71.109	100	88.341	100	88.341	Dinas Kesehatan		
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata		Persentase sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang berfungsi dengan baik	%	100			60	313	80	554	100	690	100	857	100	857	Dinas Kesehatan		
		Peningkatan Sumber Daya Kesehatan		Jumlah tenaga kesehatan yang mendapat sertifikat pelatihan terkreditasi	Orang	100			700	2.314	800	2.368	900	2.948	1000	3.663	1000	3.663	Dinas Kesehatan		
		Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan		Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan ketersediaan data yang lengkap dan valid	%				91	1.156	92	1.024	93	1.276	94	1.585	94	1.585	Dinas Kesehatan		
		Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin		Pembiayaan kepesertaan PBI APBN	%	29,4			34,31	65.701	40	49.003	40	61.016	40	75.803	40	75.803	Dinas Kesehatan		
				Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan	%	12,46			9,45		3,76		3,76		3,76		3,76				
				Cakupan Jaminan Kesehatan Pekerja	%	15,98			16,55		16,80		16,80		16,80		16,80				
				Cakupan Jaminan Kesehatan Mandiri	%	8,36			29,17		39,44		39,44		39,44		39,44				
				Total Coverage	%	66,20			89,48		100		100		100		100				
		Standarisasi Pelayanan Kesehatan		Akreditasi rumah sakit	Tingkat Akreditasi	NA			-		200		249		309		309		Dinas Kesehatan		
		Peningkatan Pelayanan BLUD		IKM	%				-	88,2	11.844		14.747		18.321		18.321		Dinas Kesehatan (RS Paru)		

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR		OPD PENANGGUNG JAWAB		
	TAHUN 2016	TAHUN 2017-2021	TAHUN 2016	TAHUN 2017-2021			2016		2017		2018		2019		2020		2021			Target	Rp. (Jt)
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)			
		TAHUN 2017 :		TAHUN 2017 :																	
	RSUD ACHMAD MUHTAR	RSUD ACHMAD MUHTAR		RSUD ACHMAD MUHTAR			183.804	161.500	206.246	223.149	241.489	261.493	261.493	261.493	261.493						
	URUSAN KESEHATAN	URUSAN KESEHATAN					183.804	161.500	206.246	223.149	241.489	261.493	261.493	261.493	261.493						
	Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / RS. Paru / RS. Mata	Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / RS. Paru / RS. Mata	Tercapainya pengadaan peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit	Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan	%	100	10	33.378	30	11.500	50	111.159	70	33.038	80	140.320	100	114.173	100	114.173	RS Achmad Muchtar
				Persentase pencapaian standar prasarana pelayanan kesehatan	%	100	20		40		60		60		80		100		100		
	Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Terwujudnya standarisasi RS Versi 2012	Akreditasi rumah sakit	Tingkat Akreditasi	Penuh	Paripurna	426	Paripurna	-	Paripurna	-	Paripurna	308	Paripurna	-	Paripurna	-	Paripurna	-	RS Achmad Muchtar
	Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD	Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD	Tercapainya peningkatan pelayanan BLUD RSAM Bukittinggi	AvLOS (Avarage Long of Stay) (Standar RSU)	Hari	5,62	5,30	150.000	5,10	150.000	5,00	95.086	4,90	189.803	4,80	101.170	4,60	147.320	4,60	147.320	RS Achmad Muchtar
				Respond Time IGD (≤ 5 menit)	% pasien dilayani	100	100		100		100		100		100		100		100		
				IKM	%	81,56	81		82		84		86		88		90		90		
				Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD	%	62,22	64		64		40		65		36		46		46		
		TAHUN 2018-2021 :		TAHUN 2018-2021 :																	
	RSUD ACHMAD MUHTAR	RSUD ACHMAD MUHTAR		RSUD ACHMAD MUHTAR							206.246	223.149	241.489	262.489	262.489	262.489	262.489	262.489	262.489	262.489	
	URUSAN KESEHATAN	URUSAN KESEHATAN									206.246	223.149	241.489	262.489	262.489	262.489	262.489	262.489	262.489	262.489	
	Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / RS. Paru / RS. Mata	Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / RS. Paru / RS. Mata		Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan	%	100					50	76.246	70	71.841	80	77.745	100	84.506	100	84.506	RS Achmad Muchtar
				Persentase pencapaian standar prasarana pelayanan kesehatan	%	100					60		60		80		100		100		
	Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Standarisasi Pelayanan Kesehatan		Akreditasi rumah sakit	Tingkat Akreditasi	Penuh					Paripurna	-	Paripurna	308	Paripurna	333	Paripurna	362	Paripurna	362	RS Achmad Muchtar
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Peningkatan Pelayanan BLUD		AvLOS (Avarage Long of Stay) (Standar RSU)	Hari	5,62					5,00	130.000	4,90	151.000	4,80	163.410	4,60	177.621	4,60	177.621	RS Achmad Muchtar
				Respond Time IGD (≤ 5 menit)	% pasien dilayani	100					100		100		100		100		100		
				IKM	%	81,56					84		86		88		90		90		
				Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD	%	62,22					40		65		36		46		46		

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR		OPD PENANGGUNG JAWAB			
	TAHUN 2016	TAHUN 2017-2021	TAHUN 2016	TAHUN 2017-2021			2016		2017		2018		2019		2020		2021			Target	Rp. (Jt)	
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)				
		TAHUN 2017 :		TAHUN 2017 :																		
	RSJ HB SAANIN	RSJ HB SAANIN		RSJ HB SAANIN																		
	URUSAN KESEHATAN	URUSAN KESEHATAN		URUSAN KESEHATAN																		
	Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / RS. Paru / RS. Mata	Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / RS. Paru / RS. Mata	Terlaksananya peningkatan sarana rumah sakit	Persentase pencapaian standar sarana dan prasarana pelayanan kesehatan	%	100	20	10.854	40	1.990	50	14.425	70	13.073	90	14.155	100	15.093	100	15.093	RSJ HB Saanin	
	Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Pelayanan Kesehatan Pasien Gangguan Jiwa Terlantar	Tercapainya pelayanan kesehatan untuk penduduk miskin	Persentase pasien gangguan jiwa terlantar yang terlayani	%	100	20	1.890	40	-	50	2.001	70	2.504	90	2.719	100	3.166	100	3.166	RSJ HB Saanin	
	-	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	-	Akreditasi rumah sakit	Tingkat Akreditasi	NA	NA	-	Utama	-	Utama	-	Utama	-	Paripurna	-	Paripurna	-	Paripurna	-	Paripurna	RSJ HB Saanin
	-	Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba	-	Persentase kenaikan penanganan rehabilitasi narkoba	% rawat jalan	-	-	-	20	4.500	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	20	RSJ HB Saanin
				% rawat inap					5		5		5		5		5		5		5	
	Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD	Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD	Terlaksananya Program BLUD	AvLOS (Avarage Long of Stay) (Standar RSJ < 42 Hari)	Hari	45	45	22.000	44	25.000	43	22.891	43	26.963	42	29.168	42	31.590	42	31.590	RSJ HB Saanin	
				Respond Time IGD (≤ 5 menit)	% pasien dilayani	99	100		100		100		100		100		100		100		100	
				IKM	%	86	86		87		88		89		90		91		91		91	
				Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD	%	38	38		40		42		44		46		48		48		48	
		TAHUN 2018-2021 :		TAHUN 2018-2021 :																		
	RSJ HB SAANIN	RSJ HB SAANIN		RSJ HB SAANIN																		
	URUSAN KESEHATAN	URUSAN KESEHATAN		URUSAN KESEHATAN																		
	Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / RS. Paru / RS. Mata	Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / RS. Paru / RS. Mata	Terlaksananya peningkatan sarana rumah sakit	Persentase pencapaian standar sarana dan prasarana pelayanan kesehatan	%	100					50	11.317	70	12.273	90	13.283	100	17.569	100	17.569	RSJ HB Saanin	
	Pelayanan Kesehatan Pasien Gangguan Jiwa Terlantar	Pelayanan Kesehatan Pasien Gangguan Jiwa Terlantar	Tercapainya pelayanan kesehatan untuk penduduk miskin	Persentase pasien gangguan jiwa terlantar yang terlayani	%	100					50	-	70	2.504	90	2.710	100	3.584	100	3.584	RSJ HB Saanin	
	Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Akreditasi rumah sakit	Tingkat Akreditasi	NA				Utama		Utama	300	Paripurna	325	Paripurna	429	Paripurna	429	Paripurna	429	Paripurna	RSJ HB Saanin
	Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba	Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba	Persentase kenaikan penanganan rehabilitasi narkoba	% rawat jalan	-				20	2.000	20	500	20	541	20	716	20	716	20	716	RSJ HB Saanin	
				% rawat inap					5		5		5		5		5		5		5	
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Program BLUD	AvLOS (Avarage Long of Stay) (Standar RSJ < 42 Hari)	Hari	45					43	26.000	43	26.963	42	29.183	42	38.598	42	38.598	RSJ HB Saanin	
				Respond Time IGD (≤ 5 menit)	% pasien dilayani	99					100		100		100		100		100		100	
				IKM	%	86					88		89		90		91		91		91	
				Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD	%	38					42		44		46		48		48		48	

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR		OPD PENANGGUNG JAWAB		
	TAHUN 2016	TAHUN 2017-2021	TAHUN 2016	TAHUN 2017-2021			2016		2017		2018		2019		2020		2021			Target	Rp. (Jt)
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)			
		TAHUN 2017 :		TAHUN 2017 :																	
	RSUD SOLOK	RSUD SOLOK		RSUD SOLOK																	
	URUSAN KESEHATAN	URUSAN KESEHATAN																			
	Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya standarisasi pelayanan kesehatan	Akreditasi rumah sakit	Tingkat Akreditasi	1	Madya	426	Paripurna	-	Paripurna	478	Paripurna	517	Paripurna	560	Paripurna	606	Paripurna	606	RSUD Solok
	Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / RS. Paru / RS. Mata	Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / RS. Paru / RS. Mata	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit	Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan	%	55	60	30.899	65	11.000	70	34.672	75	37.514	80	40.602	85	43.960	85	43.960	RSUD Solok
				Persentase pencapaian standar prasarana pelayanan rumah sakit	%	65	70		75		78		80		85		90		90		
	Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD	Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD	Peningkatan pelayanan BLUD	AvLOS (Avarage Long of Stay)	hari	6	6	70.000	6	85.000	6	78.547	6	84.984	6	91.980	6	99.587	6	99.587	RSUD Solok
				Respond Time IGD (≤ 5 menit)	% pasien dilayani	100	100		100		100		100		100		100		100		
				IKM	%	75	77		79		81		83		85		87		87		
				Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD	%	55	60		65		70		75		80		85		85		
		TAHUN 2018-2021 :		TAHUN 2018-2021 :																	
	RSUD SOLOK	RSUD SOLOK		RSUD SOLOK																	
	URUSAN KESEHATAN	URUSAN KESEHATAN																			
	Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Standarisasi Pelayanan Kesehatan		Akreditasi rumah sakit	Tingkat Akreditasi	1					Paripurna	-	Paripurna	-	Paripurna	-	Paripurna	-	Paripurna	-	RSUD Solok
	Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / RS. Paru / RS. Mata	Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / RS. Paru / RS. Mata		Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan	%	55					70	23.696	75	23.015	80	24.910	85	27.342	85	27.342	RSUD Solok
				Persentase pencapaian standar prasarana pelayanan rumah sakit	%	65					78		80		85		90		90		
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Peningkatan Pelayanan BLUD		AvLOS (Avarage Long of Stay)	hari	6					6	90.000	6	100.000	6	108.232	6	118.800	6	118.800	RSUD Solok
				Respond Time IGD (≤ 5 menit)	% pasien dilayani	100					100		100		100		100		100		
				IKM	%	75					81		83		85		87		87		
				Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD	%	55					70		75		80		85		85		

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR		OPD PENANGGUNG JAWAB			
	TAHUN 2016	TAHUN 2017-2021	TAHUN 2016	TAHUN 2017-2021			2016		2017		2018		2019		2020		2021			Target	Rp. (Jt)	
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)				
		TAHUN 2017 :		TAHUN 2017 :																		
	RSUD PARIAMAN	RSUD PARIAMAN		RSUD PARIAMAN			79.277		63.882		88.956		96.247		104.171		112.785		112.785			
	URUSAN KESEHATAN	URUSAN KESEHATAN					79.277		63.882		88.956		96.247		104.171		112.785		112.785			
	Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / RS. Paru / RS. Mata	Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / RS. Paru / RS. Mata	Terpenuhinya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan kesehatan RS	Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan	%	60	75	32.426	75	11.882	75	39.481	75	42.717	75	46.234	75	50.057	75	50.057	RSUD Pariaman	
				Persentase pencapaian standar prasarana pelayanan kesehatan	%	60	75		75		75		75		75		75		75			
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan *) khusus DAK	Terwujudnya standarisasi Rumah Sakit sesuai versi standar Akreditasi Rumah Sakt Versi 2012	Akreditasi rumah sakit	Tingkat Akreditasi	NA		426	madya	-	Paripurna	590	Paripurna	638	Paripurna	691	Paripurna	748	Paripurna	748	RSUD Pariaman	
	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	-	Meningkatnya pelayanan kesehatan untuk penduduk miskin	-			1.425															
	Program Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD	Program Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD	Terpenuhinya pelayanan BLUD RSUD Pariaman	AvLOS (Avarage Long of Stay)	Hari	5	6	45.000	6	52.000	6	48.885	6	52.892	6	57.246	6	61.980	6	61.980	RSUD Pariaman	
				Respond Time IGD (≤ 5 menit)	% pasien dilayani	100	100		100		100		100		100		100		100			
				IKM	%	78,46	79		79,5		79,8		80		81		82		82			
				Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD	%	46	46		46		48		49		50		51		51			
		TAHUN 2018-2021 :		TAHUN 2018-2021 :																		
	RSUD PARIAMAN	RSUD PARIAMAN		RSUD PARIAMAN							88.956		96.247		104.171		115.171		115.171			
	URUSAN KESEHATAN	URUSAN KESEHATAN									88.956		96.247		104.171		115.171		115.171			
		Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / RS. Paru / RS. Mata		Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan	%	60					75		39.771	75	40.747	75	44.102	75	48.759	75	48.759	RSUD Pariaman
				Persentase pencapaian standar prasarana pelayanan kesehatan	%	60					75		75		75		75		75			
		Standarisasi Pelayanan Kesehatan		Akreditasi rumah sakit	Tingkat Akreditasi	NA					Paripurna	300	Paripurna	500	Paripurna	541	Paripurna	598	Paripurna	598	RSUD Pariaman	
		Program Peningkatan Pelayanan BLUD		AvLOS (Avarage Long of Stay)	Hari	5					6	48.885	6	55.000	6	59.528	6	65.814	6	65.814	RSUD Pariaman	
				Respond Time IGD (≤ 5 menit)	% pasien dilayani	100					100		100		100		100		100			
				IKM	%	78,46					79,8		80		81		82		82			
				Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD	%	46					48		49		50		51		51			

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR		OPD PENANGGUNG JAWAB		
							2016		2017		2018		2019		2020					2021	
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)				Target	Rp. (Jt)
		TAHUN 2017 :		TAHUN 2017 :																	
	DINAS PRASARANA JALAN, TATA RUANG DAN PERMUKIMAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			528.150	351.714		629.353		691.257		835.397		870.367		870.367			
	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				528.150	351.714		629.353		691.257		835.397		870.367		870.367				
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	%	100	4.693,7	100	3.825	100	5.266,8	100	5.698,5	100	6.167,6	100	6.677,7	100	6.677,7	Dinas Prasjaltarkim	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	%	100	1.937,4	100	1.403	100	2.174,0	100	2.352,2	100	2.545,8	100	2.756,3	100	2.756,3	Dinas Prasjaltarkim	
	Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan Disiplin Aparatur	Terpenuhinya peningkatan disiplin aparatur	Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	%	100	309,9	100	202	100	347,7	100	376,2	100	407,1	100	440,8	100	440,8	Dinas Prasjaltarkim	
	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Terpenuhinya peningkatan Sumber Daya Aparatur	Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat	%	100	340,2	100	238	100	381,7	100	413,0	100	447,0	100	484,0	100	484,0	Dinas Prasjaltarkim	
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Meningkatnya capaian kinerja keuangan dan sistem pelaporan SKPD	Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD	%	100	1.546,3	100	705	100	1.735,1	100	1.877,3	100	2.031,9	100	2.199,9	100	2.199,9	Dinas Prasjaltarkim	
				Nilai LAKIP SKPD (minimal BB)	Skor	BB		BB	BB		BB		A		A		A				
				Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan	%	100		100		100		100		100		100		100			
				Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra SKPD	%	100		100		100		100		100		100		100			
				Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD	%	100		100		100		100		100		100		100			
		Perencanaan, pengelolaan, pengawaan dan pengendalian kegiatan dan asset							630										Dinas Prasjaltarkim		
	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah	Tingkat pengelolaan keuangan daerah pada unit SKPD	%	100	300,0	100	300	100	336,6	100	364,2	100	394,2	100	426,8	100	426,8	Dinas Prasjaltarkim	
	Pembangunan jalan dan jembatan Provinsi	Pembangunan jalan dan jembatan Provinsi	Meningkatnya kemandapan jalan provinsi	Persentase kemandapan jalan provinsi	%	91,13* / 69**	70	273.443	71	156.072	72	320.971	73	358.323	74	475.820	75	481.868	75	481.868	Dinas Prasjaltarkim
				Panjang jaringan jalan provinsi yang ditingkatkan	km	1195	55		55		55		55		55		55		1525		
				Panjang jembatan provinsi terbangun	m	350	400		400		400		400		400		400		1750		
				Jumlah dokumen perencanaan jalan dan jembatan tersusun	dokumen	15	32		50		67		86		103		122		122		
				Pengadaan lahan untuk pembangunan jalan/jembatan dan infrastruktur strategis	ha	4	7		10		13		16		19		20		20		
	Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan	Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan	Meningkatnya kemandapan jalan provinsi	Persentase kemandapan jalan provinsi	%	91,13* / 69**	70	45.535	71	39.250	72	51.095	73	55.283	74	59.834	75	64.782	75	64.782	Dinas Prasjaltarkim
				Panjang jalan provinsi yang direhab	km	1143,1	1143,66		1214,93		1214,93		1214,93		1214,93		1214,93		1214,93		

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR		OPD PENANGGUNG JAWAB		
							2016		2017		2018		2019		2020					2021	
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)				Target	Rp. (Jt)
TAHUN 2016	TAHUN 2017-2021	TAHUN 2016	TAHUN 2017-2021																		
			Panjang jembatan provinsi yang direhab	m	145	100		100		100		100		100		100		745			
			Panjang jalan TdS yang dipelihara	km	10	17		24		31		38		45		50		50			
	Peningkatan sarana dan prasarana ke Binamargaan	Peningkatan sarana dan prasarana ke Binamargaan	Jumlah alat ukur labor tersedia	Persentase peningkatan kuantitas alat ukur labor	%	4 paket	30	2.909	31	950	32	3.264	33	3.531	34	3.822	35	4.138	22 paket	4.138	Dinas Prasjaltarkim
	Peningkatan dan pengembangan jasa konstruksi	Peningkatan dan pengembangan jasa konstruksi	Jumlah pelaku jasa konstruksi yang ditingkatkan kualitasnya	Persentase peningkatan kuantitas SDM pelaku jasa konstruksi	%	1850 orang	70,27	1.480	140,54	850	210,81	1.661	281,08	1.797	351,35	1.945	421,62	2.106	9650 orang	2.106	Dinas Prasjaltarkim
		Pengembangan kinerja penyelenggaraan pusat informasi pengembangan permukiman dan bangunan								400											Dinas Prasjaltarkim
	Pengelolaan dan Pengembangan SPAM lintas daerah kab/kota	Pengelolaan dan Pengembangan SPAM lintas daerah kab/kota	SPAM regional terbangun	Meningkatnya cakupan pelayanan air minum	%	68	69	35.562	70	-	71	39.904	72	43.174	73	46.728	74	50.593	74	50.593	Dinas Prasjaltarkim
			SPAM regional terbangun	SPAM regional terbangun	kawasan	1	0		2		5		0		0		0		8		
			SPAM IKK ditingkatkan	SPAM IKK ditingkatkan	kawasan	30	19		11		9		9		9		15		102		
			Peningkatan kinerja pelayanan SPAM	Peningkatan kinerja pelayanan SPAM	%	68	69		70		71		72		73		74		74		
	Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis daerah provinsi dan lintas daerah Kabupaten/kota	Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis daerah provinsi dan lintas daerah Kabupaten/kota	Jumlah bangunan direkonstruksi	Persentase jumlah bangunan pemerintah yang direkonstruksi pasca bencana	%	12 unit	15%	87.322	30%	139.690	50%	97.984	65%	106.014	85	114.742	100%	124.230	34 unit	124.230	Dinas Prasjaltarkim
			Jumlah bangunan strategis terbangun	Persentase jumlah bangunan strategis terbangun	%	0 unit	15%	57.700	30%		50%	64.745	65%	70.051	85%	75.818	100%	82.088	4	82.088	
				Persentase jumlah rumah negara terbangun	%	9 unit	15%		30%		50%		65%		85%		100%		12		
				Persentase Tempat evakuasi sementara terbangun	%	4 unit	15%		30%		50%		65%		85%		100%		10		
	Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	Jumlah TPA regional yang didanai	Meningkatnya pengelolaan TPA Regional	%	72	72	5.772	73	-	74	6.477	75	7.008	76	7.585	77	8.212	77	8.212	Dinas Prasjaltarkim
				Jumlah TPA regional yang didanai	unit	2	2		3		3		4		4		4		4		
				Peningkatan infrastruktur TPA regional	unit	2	32		54		70		90		110		130		130		
	Pengelolaan sistem drainase kewenangan provinsi	Pengelolaan sistem drainase kewenangan provinsi	Panjang drainase terbangun	Persentase jaringan drainase yang dibangun	%	25 km	41	-	53	-	65	1.575	77	1.654	88	1.736	100	1.823	60 km	1.823	Dinas Prasjaltarkim
	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Sistem air limbah domestik regional terbangun	Meningkatnya rumah tangga bersanitasi	%	72	72	-	73	-	74	21.000	75	22.050	76	23.153	77	24.310	77	24.310	Dinas Prasjaltarkim
		Pengelolaan dan pengembangan sistem air minum dan air limbah								4.550											Dinas Prasjaltarkim
	Perencanaan penataan ruang	Perencanaan penataan ruang	Kesesuaian rencana pembangunan dan tata ruang	Kesesuaian rencana pembangunan dan tata ruang	%	79	1,2	9.100	1,35	2.550	1,41	10.211	1,48	11.048	1,56	11.957		12.946	86	12.946	Dinas Prasjaltarkim
				Tersedianya dokumen perencanaan tata ruang	dokumen	0	5		10		15		20		25		30		30		Dinas Prasjaltarkim
				Pembangunan kawasan	unit	0	1		2		3		4		5		6		6		Dinas PU PR
	Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang	Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang	Kesesuaian rencana pembangunan dan tata ruang	Kesesuaian rencana pembangunan dan tata ruang	%	79	1,2	200	1,35	100	1,41	224	1,48	243	1,56	263		285	86	285	Dinas PU PR
				Terlaksananya monitoring dan pengawasan teknis SPM bidang penataan ruang	laporan	0	19		19		19		19		19		19		19		Dinas PU PR

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR		OPD PENANGGUNG JAWAB		
							2016		2017		2018		2019		2020					2021	
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)				Target	Rp. (Jt)
TAHUN 2016		TAHUN 2017-2021		TAHUN 2016		TAHUN 2017-2021															
	TAHUN 2018-2021 :		TAHUN 2018-2021 :																		
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							623.176		683.990		827.526		860.718		860.718			
	NON URUSAN									11.710		11.326		13.703		14.253		14.253			
		Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase pelayanan administrasi perkantoran	%					100	5.264	100	5.522	100	6.681	100	6.949	100	6.949	Dinas PU PR	
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	%					100	4.110	100	3.234	100	3.912	100	4.069	100	4.069	Dinas PU PR	
		Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	%					100	348	100	330	100	399	100	415	100	415	Dinas PU PR	
		Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur		Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat	%					100	382	100	412	100	499	100	519	100	519	Dinas PU PR	
		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan		Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD	%					100	1.607	100	1.828	100	2.212	100	2.301	100	2.301	Dinas PU PR	
				Nilai LAKIP SKPD (minimal BB)	Skor						BB		BB		A		A		A		
				Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan	%						100		100		100		100		100		
				Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra SKPD	%						100		100		100		100		100		
				Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD	%						100		100		100		100		100		
	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									611.466		672.664		813.823		846.465		846.465			
		Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Tingkat pengelolaan keuangan daerah pada unit OPD	%					100	337	100	664	100	804	100	836	100	836	Dinas PU PR	
		Pembangunan jalan dan jembatan Provinsi		Persentase kemandapan jalan provinsi	%	91,13*/69				72	298.000	73	345.211	74	417.654	75	434.406	75	434.406	Dinas PU PR	
				Panjang jaringan jalan provinsi yang ditingkatkan	km	1195				39,1		39,25		56,1		60,75		1390,2			
				Panjang jembatan provinsi terbangun	m	350				271		290		285		216		1412			
				Jumlah dokumen perencanaan jalan dan jembatan tersusun	dokumen	15				18		20		19		20		139			
				Pengadaan lahan untuk pembangunan jalan/jembatan dan infrastruktur strategis	ha	4				2		2		2		2		29			
		Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan Provinsi		Persentase kemandapan jalan provinsi	%	91,13*/69				72	80.036	73	64.254	74	77.738	75	80.856	75	80.856	Dinas PU PR	
				Panjang jalan provinsi yang direhab	km	1143,1				1180,5		1180,35		1163,5		1.159		1.215			

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR		OPD PENANGGUNG JAWAB		
							2016		2017		2018		2019		2020					2021	
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)				Target	Rp. (Jt)
			Panjang jembatan provinsi yang direhab	m	145					75		75		75		75		645			
			Panjang jalan TdS yang dipelihara	km	10					2,5		2,5		2,5		3		30			
		Peningkatan sarana dan prasarana ke Binamargaan	Jumlah alat ukur labor tersedia	Unit	210					15	2.914	15	3.311	16	4.006	16	4.167	22 paket	4.167	Dinas PU PR	
		Peningkatan dan pengembangan jasa konstruksi	Jumlah pelaku jasa konstruksi yang ditingkatkan kualifikasi	orang	1850 orang					600	1.550	600	2.023	750	2.448	850	2.546	9650 orang	2.546	Dinas PU PR	
		Pengelolaan dan Pengembangan SPAM lintas daerah kab/kota	Persentase cakupan pelayanan air minum	%	68					11.850		72	11.700	73	14.155	74	14.723	74	14.723	Dinas PU PR	
			Meningkatnya cakupan pelayanan air minum	%	68						71										
			SPAM regional terbangun	kawasan	1						5								8		
			SPAM IKK ditingkatkan	kawasan	30						9								102		
				Peningkatan kinerja pelayanan SPAM	%	68					71								74		
		Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis daerah provinsi dan lintas daerah Kabupaten/kota	Persentase jumlah bangunan pemerintah yang direkonstruksi pasca bencana	%	12 unit					50%	201.879							-	-	Dinas PU PR	
			Jumlah bangunan gedung pemerintah yang terbangun	unit	12 unit								23	227.550	25	275.302	25	286.344	25	286.344	
			Persentase jumlah bangunan strategis terbangun	%	0 unit						50%								4		
			Jumlah bangunan strategis terbangun	unit	0 unit								13		13		13		13		
			Persentase jumlah rumah negara terbangun	%	9 unit					50%								12			
			Jumlah rumah negara terbangun	unit	6 unit								15		15		15		15		
			Persentase Tempat evakuasi sementara terbangun	%	4 unit					50%								10			
			Jumlah Tempat evakuasi sementara terbangun	unit	4 unit								8		9		10		10		
		Pengelolaan sistem drainase kewenangan provinsi	Persentase jaringan drainase yang dibangun	%	25 km					65	5.000									Dinas PU PR	
			Panjang drainase terbangun	km	0 km								5	6.100	5	7.380	5	7.676	20	7.676	
		Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Persentase rumah tangga bersanitasi	%	72					74	1.150	75	800	76	968	77	1.007	77	1.007	Dinas PU PR	
		Perencanaan penataan ruang	Kesesuaian rencana pembangunan dan tata ruang	%	79					1,41	7.850	83	10.150	84	12.280	86	12.773	86	12.773	Dinas PU PR	
			Tersedianya dokumen perencanaan tata ruang	dokumen	0						15		20		25		30		30		Dinas PU PR
			Pembangunan kawasan	unit	0						3								6		Dinas PU PR
		Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang	Kesesuaian rencana pembangunan dan tata ruang	%	79					82	900	83	900	84	1.089	86	1.133	86	1.133	Dinas PU PR	
			Terlaksananya monitoring dan pengawasan teknis SPM bidang penataan ruang	laporan	0						19		19		19		19		19		Dinas PU PR

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR		OPD PENANGGUNG JAWAB		
	TAHUN 2016	TAHUN 2017-2021	TAHUN 2016	TAHUN 2017-2021			2016		2017		2018		2019		2020		2021			Target	Rp. (Jt)
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)			
		TAHUN 2017 :		TAHUN 2017 :																	
	DINAS PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR	DINAS PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR		DINAS PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR			217.929		179.570		257.934		278.103		344.993		331.867		331.867		
	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					217.929		179.570		257.934		278.103		344.993		331.867		331.867		
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	%	100	1.978,5	100	2.766	100	2.220,1	100	2.402,0	100	2.599,8	100	2.814,8		2.814,8	Dinas PSDA	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	%	100	2.319,9	100	1.985	100	2.603,1	100	2.816,5	100	3.048,4	100	3.300,5		3.300,5	Dinas PSDA	
	Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan Disiplin Aparatur	Terpenuhinya peningkatan disiplin aparatur	Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	%	100	118,8	100	138	100	133,3	100	144,2	100	156,1	100	169,0		169,0	Dinas PSDA	
	Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Persentase sumberdaya aparatur yang ditingkatkan kompetensinya	Persentase sumberdaya aparatur yang ditingkatkan kompetensinya	%			10	550	10	325,0	10	350,0	10	375,0	10	400,0	50	400,0	Dinas PSDA	
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Meningkatnya capaian kinerja keuangan dan sistem pelaporan SKPD	Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD	%	100	676,6	100	710	100	759,2	100	821,4	100	889,1	100	962,6		962,6	Dinas PSDA	
				Nilai LAKIP SKPD (minimal BB)	Skor	BB	BB	-	BB		BB		A		A						
					Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan	%	100		100	-	100		100		100		100				
					Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra SKPD	%	100		100	-	100		100		100		100				
					Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD	%	100		100	-	100		100		100		100				
		Perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dan asset						600		-		-		-		-				Dinas PSDA	
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Panjang jaringan irigasi yang ditingkatkan/ direhab	Meningkatnya Indeks Kinerja Infrastruktur Irigasi Provinsi (Peningkatan/Rehabilitasi)	%	67,01	67,30	102.619	67,6	68.061	67,90	120.594	68,2	136.109	68,5	191.423	68,80	165.717	68,80	165.717	Dinas PSDA
					Terjaganya indeks kinerja infrastruktur irigasi Provinsi (Operasional & Pemeliharaan)	%	67,01		67,01	-	67,01		67,01		67,01		67,01		67,01		67,01
	Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber air lainnya	Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber air lainnya	Meningkatnya kapasitas tampungan sumber-sumber air	Persentase peningkatan kapasitas tampungan sumber-sumber air (pembangunan/peningkatan)	%	2.511.780 m3	0,40	18.226	0,80	15.150	1,20	26.451	1,60	22.127	2,00	23.949	2,40	25.930	2.571.780 m3	25.930	Dinas PSDA
					Terjaganya fungsi dan kapasitas tampung sumber air (Operasional/Pemeliharaan/	%		100		100	-	100		100		100		100			
	Penyediaan dan pengolahan air baku	Penyediaan dan pengolahan air baku	Jumlah dokumen profil neraca sumber daya air	Tersedianya data untuk pendayagunaan sumber daya air	%	30 dokumen	3,33	1.150	6,67	870	10	1.290	13,33	1.396	16,67	1.511	20	1.636	36 dokumen	1.636	Dinas PSDA

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR		OPD PENANGGUNG JAWAB		
							2016		2017		2018		2019		2020					2021	
							TAHUN 2016	TAHUN 2017-2021	TAHUN 2016	TAHUN 2017-2021	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)		Target	Rp. (Jt)
		Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber air lainnya		Persentase peningkatan kapasitas tampungan sumber-sumber air (pembangunan/peningkatan)	%	2.511.780 m3					1,20	27.501	2,80	33.927	3,60	42.087	4,40	43.871	2.571.780 m3	43.871	Dinas PSDA
				Terjaganya fungsi dan kapasitas tampung sumber air (Operasional/Pemeliharaan/Rehabilitasi)	%						100		100		100		100				Dinas PSDA
		Penyediaan dan pengolahan air baku		Tersedianya data untuk pendayagunaan sumber daya air	%	30 dokumen					10	950	13,33	1.396	16,67	1.732	20	1.805	36 dokumen	1.805	Dinas PSDA
		Pengendalian banjir dan pengamanan pantai		Persentase pengurangan luasan kawasan yang terdampak daya rusak air (pembangunan/peningkatan)	%	884 ha					14,22	98.817	18,96	104.922	23,7	130.158	28,44	135.675	1.084 ha	135.675	Dinas PSDA
				Terjaganya fungsi luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air (Operasional/Pemeliharaan/Rehabilitasi)	%						100		100		100		100				Dinas PSDA
		Peningkatan dan Pengembangan Jasa Konstruksi		Persentase Peningkatan kualitas SDM pengelola sumberdaya air	orang	562 Org					8,90	1.805	8,90	1.600	8,90	1.985	8,90	2.069	812 Org	2.069	Dinas PSDA

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR		OPD PENANGGUNG JAWAB		
	TAHUN 2016	TAHUN 2017-2021	TAHUN 2016	TAHUN 2017-2021			2016		2017		2018		2019		2020		2021				
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)			
		TAHUN 2017 :		TAHUN 2017 :																	
	DINAS PRASARANA JALAN- TATA RUANG DAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN			7.740	12.060		8.686		9.397		10.171		11.012		11.012			
	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN					7.740	12.060		8.686		9.397		10.171		11.012		11.012			
		Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase pelayanan administrasi perkantoran	%			100	344									Dinas Perkimtan			
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	%			100	209									Dinas Perkimtan			
		Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	%			100	79									Dinas Perkimtan			
		Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur		Persentase sumberdaya aparatur yang ditingkatkan kompetensinya	%			10	73									Dinas Perkimtan			
		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan		Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD	%			100	281									Dinas Perkimtan			
				Nilai LAKIP SKPD (minimal BB)	Skor				BB												
				Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan	%				100												
				Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra SKPD	%				100												
				Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD	%				100												
		Perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dan asset							242									Dinas Perkimtan			
	Pengembangan perumahan	Pengembangan perumahan	Rasio rumah layak huni	Persentase rumah layak huni	%	76,00	78,56	638	80,23	930	81,89	716	83,56	775	85,23	838	86,90	908	86,90	908	Dinas Prasjaltarkim
			Perkuatan kelembagaan bidang perumahan dan permukiman	Perkuatan kelembagaan bidang perumahan dan permukiman	paket	1	1		1		1		1		1		1		1		
			Tersedianya database perumahan dan permukiman	Tersedianya database perumahan dan permukiman	dokumen	1	1		1		1		1		1		1		1		
	Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	Jumlah TPA regional yang didanai	Meningkatnya pengelolaan TPA Regional	%	72	72	5.772	73	5.598	74	6.477	75	7.008	76	7.585	77	8.212	77	8.212	Dinas Perkimtan
			Jumlah TPA regional yang didanai	Jumlah TPA regional yang didanai	unit	2	2		3		3		4		4		4		4		
			Peningkatan infrastruktur TPA regional	Peningkatan infrastruktur TPA regional	unit	2	32		54		70		90		110		130		130		
	Pemberdayaan komunitas perumahan	Pemberdayaan komunitas perumahan	Penurunan kawasan kumuh	Penurunan luasan kawasan kumuh	%	16,5	16,5	1330	15,5	3.921	14,5	1.492	13,5	1.615	12,5	1.748	11,5	1.892	11,5	1.892	Dinas Prasjaltarkim
			Meningkatnya rumah tangga bersanitasi	Meningkatnya rumah tangga bersanitasi	%	72	72		73		74		75		76		77		77		Dinas Prasjaltarkim

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR		OPD PENANGGUNG JAWAB		
							2016		2017		2018		2019		2020					2021	
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)				Target	Rp. (Jt)
		Pengelolaan Pertanahan		Jumlah Fasilitas penyelesaian permasalahan pertanahan di Sumatera Barat					383									Dinas Perkimtan			
		TAHUN 2018-2021 :		TAHUN 2018-2021 :																	
		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN					11.855		15.449		16.910		26.218		26.218				
		NON URUSAN							5.763		2.411		2.639		4.091		4.091				
		Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase pelayanan administrasi perkantoran	%				100	1.792	100	959	100	1.049	100	1.627	100	1.627	Dinas Perkimtan		
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	%				100	2.890	100	804	100	880	100	1.365	100	1.365	Dinas Perkimtan		
		Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	%				100	200	100	79	100	87	100	135	100	135	Dinas Perkimtan		
		Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur		Persentase sumberdaya aparatur yang ditingkatkan kompetensinya	%				100	200	100	66	100	72	100	112	100	112	Dinas Perkimtan		
		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan		Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD	%				100	681	100	502	100	550	100	852	100	852	Dinas Perkimtan		
				Nilai LAKIP SKPD (minimal BB)	Skor					BB		BB		BB							
				Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan	%					100		100		100		100					
				Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra SKPD	%					100		100		100		100					
				Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD	%				100		100		100		100						
		URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN							4.064		12.202		13.356		20.708		20.708				
		Pengembangan perumahan		Persentase rumah layak huni	%	76,00			81,89	2.620	83,56	3.310	85,23	3.623	86,90	5.617	86,90	5.617	Dinas Perkimtan		
				Perkuatan kelembagaan bidang perumahan dan permukiman	paket	1			1		1		1		1		1				
				Tersedianya database perumahan dan permukiman	dokumen	1			1		1		1		1		1				
		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional		Meningkatnya pengelolaan TPA Regional	%	72			74	1.405	75	-	76	-	77	-	77	-	Dinas Perkimtan		
				Jumlah TPA regional yang didanai	unit	2			3		4		4		4		4				
				Peningkatan infrastruktur TPA regional	unit	2			70		90		110		130		130				

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR		OPD PENANGGUNG JAWAB		
							2016		2017		2018		2019		2020					2021	
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)				Target	Rp. (Jt)
		Pemberdayaan komunitas perumahan		Penurunan luasan kawasan kumuh	%	16,5					14,5	39	13,5	8.892	12,5	9.733	11,5	15.090	11,5	15.090	Dinas Perkimtan
				Meningkatnya rumah tangga bersanitasi	%	72					74		75		76		77		77		Dinas Perkimtan
		URUSAN PERTANAHAN																			
		Pengelolaan Pertanahan		Jumlah Fasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan di Sumatera Barat	%						80	2.028	87	836	90	915	90	1.419		1.419	Dinas Perkimtan

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR		OPD PENANGGUNG JAWAB		
	TAHUN 2016	TAHUN 2017-2021	TAHUN 2016	TAHUN 2017-2021			2016		2017		2018		2019		2020		2021			Target	Rp. (Jt)
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)			
		TAHUN 2017 :		TAHUN 2017 :																	
	SATPOL PP	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN		DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN			6.262	6.752	7.026	7.602	8.228	8.908	8.908								
	URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT					6.262	6.752	7.026	7.602	8.228	8.908	22.255								
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrai perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	%	100	1.735	100	1.639	100	1.913	100	2.008	100	2.109	100	2.214	100	2.214	Satpol PP	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pelayanan Pemeliharaan	Persentase berfungsi sarana dan prasarana aparatur	%	100	388	100	107	100	428	100	449	100	472	100	495	100	495	Satpol PP	
				Kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik (zona hijau)	Zona	hijau		hijau		hijau		hijau		hijau		hijau		hijau			
	Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan disiplin aparatur	Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	%	100	376	100	159	100	414	100	435	100	457	100	479	100	479	Satpol PP	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas SDM aparatur	Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat	JPL/orang/ tahun	10	72	15	114	20	79	30	83	40	87	50	92	50	92	Satpol PP	
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya tertib administrasi keuangan	Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD	%	100	310	100	153	100	342	100	359	100	377	100	396	100	396	Satpol PP	
				Nilai Evaluasi SAKIP SKPD	predikat	BB		BB		BB		A		A		A		A			
				Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan	%	100		100		100		100		100		100		100			
				Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra SKPD	%	100		100		100		100		100		100		100			
				Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD	%	100		100		100		100		100		100		100			
		Perencanaan , Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan dan Aset						184												Dinas Satpol PP dan Damkar	
	Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat	Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat	Menurunnya perbuatan maksiat	Persentase kabupaten/kota yang dapat difasilitasi untuk operasi gabungan pemberantasan maksiat	Kasus	60	207	70	194	70	215	90	238	90	266	100	292	100	292	Sat Pol PP	
			Persentase partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum		%															Sat Pol PP	
			Jumlah perda yang ditegakkan		Perda	2														Satpol PP	
	Peningkatan Perlindungan Masyarakat	Peningkatan Perlindungan Masyarakat	Meningkatnya perlindungan masyarakat	Rasio jumlah satuan linmas per RT atau sebutan lainnya	Rasio	19	0,3	279	0,35	300	0,4	290	0,45	321	0,5	358	0,55	393	0,55	393	Satpol PP

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR		OPD PENANGGUNG JAWAB		
							2016		2017		2018		2019		2020					2021	
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)				Target	Rp. (Jt)
	Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Meningkatkan ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat	Persentase kabupaten/kota yang dapat difasilitasi dalam patroli ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	%	19	60	2.665	70	3.319	70	2.767	90	3.067	90	3.420	100	3.759	100	3.759	Satpol PP
	Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah dan Pemberdayaan PPNS	Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah dan Pemberdayaan PPNS	Peningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dan Pemberdayaan PPNS	Persentase kasus pelanggaran Perda yang dapat diselesaikan	%		50	230	60	508	70	239	80	266	90	296	90	326	90	326	Satpol PP
	-	Program Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi Aparatur	-	Persentase diklat aparatur yang dapat diselenggarakan sesuai rencana					100	76	100	339	100	376	100	387	100	461	100	461	Satpol PP
		TAHUN 2018-2021 :		TAHUN 2018-2021 :																	
		DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN		DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN								7.026		7.602		8.228		13.347		13.347	
		NON URUSAN										3.239		2.705		2.927		4.748		4.748	
		Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase pelayanan administrasi perkantoran	%					100	1.927	100	1.385	100	1.499	100	2.431	100	2.431	Dinas Satpol PP dan Damkar	
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	%					100	453	100	433	100	469	100	760	100	760	Dinas Satpol PP dan Damkar	
				Kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik (zona hijau)	Zona					hijau		hijau		hijau		hijau		hijau			
		Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	%					100	493	100	292	100	316	100	513	100	513	Dinas Satpol PP dan Damkar	
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat	JPL/orang/ tahun					20	79	30	80	40	87	50	140	50	140	Dinas Satpol PP dan Damkar	
		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD	%					100	287	100	515	100	557	100	904	100	904	Dinas Satpol PP dan Damkar	
				Nilai Evaluasi SAKIP SKPD	predikat					BB		A		A		A		A			
				Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan	%					100		100		100		100		100			
				Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra SKPD	%					100		100		100		100		100			
				Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD	%					100		100		100		100		100			
		URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT										3.787		4.897		5.301		8.599		8.599	
		Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat		Persentase kabupaten/kota yang dapat difasilitasi untuk operasi gabungan pemberantasan maksiat	Kasus					70	184		-		-		-		-		Dinas Satpol PP dan Damkar

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR		OPD PENANGGUNG JAWAB		
							2016		2017		2018		2019		2020					2021	
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)				Target	Rp. (Jt)
				Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan pencegahan dan pemberantasan maksiat	Kasus							90	509	90	550	100	893	100	893		
		Peningkatan Perlindungan Masyarakat		Rasio jumlah satuan linmas per RT atau sebutan lainnya	Rasio	19			0,4	355		-		-		-				Dinas Satpol PP dan Damkar	
				Persentase kab/kota yang telah memiliki Satlinmas di desa/kelurahan/nagari.	%						0,45	351	0,5	380	0,55	617	0,55	617			
		Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat		Persentase kabupaten/kota yang dapat difasilitasi dalam patroli ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	%	19			70	2.664	90	3.021	90	3.270	100	5.304	100	5.304	Dinas Satpol PP dan Damkar		
		Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah dan Pemberdayaan PPNS		Persentase kasus pelanggaran Perda yang dapat diselesaikan	%			70	508	80	697	90	754	90	1.223	90	1.223	Dinas Satpol PP dan Damkar			
		Program Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi Aparatur		Persentase diklat aparatur yang dapat diselenggarakan sesuai rencana	%			100	76	100	235	100	254	100	412	100	412	Dinas Satpol PP dan Damkar			
		Pemetaan daerah rawan kebakaran		Persentase kab/kota yang terpetakan rawan kebakaran	%					-	70	85	75	92	80	149	80	149	Dinas Satpol PP dan Damkar		

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR		OPD PENANGGUNG JAWAB		
	TAHUN 2016	TAHUN 2017-2021	TAHUN 2016	TAHUN 2017-2021			2016		2017		2018		2019		2020		2021			Target	Rp. (Jt)
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)			
		TAHUN 2017 :		TAHUN 2017 :																	
	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL		DINAS SOSIAL			32.990		32.023		37.018		40.051		43.349		46.933		46.933		
	URUSAN SOSIAL	URUSAN SOSIAL				32.990		32.023		37.018		40.051		43.349		46.933		46.933			
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang baik	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	%	60	100	4.781	100	4.807	100	5.271	100	5.534	100	5.811	100	6.102	100	6.102	Dinas Sosial
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	%	5	100	6.939	100	3.571	100	7.651	100	8.033	100	8.435	100	8.857	100	8.857	Dinas Sosial
			Kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik (zona hijau)	zona			hijau		hijau		hijau		hijau		hijau		hijau		hijau		
	Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	%	5	100	137	100	152	100	151	100	159	100	167	100	175	100	175	Dinas Sosial
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem capaian kinerja	Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat	JPL/orang/ tahun	5	10	18	15	51	20	20	30	21	40	22	50	23	50	23	Dinas Sosial
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem capaian kinerja	Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD	%	5	100	629	100	475	100	693	100	728	100	764	100	802	100	802	Dinas Sosial
			Nilai Evaluasi SAKIP SKPD	predikat			BB		BB		BB		A		A		A		A		
			Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan	%			100		100		100		100		100		100		100		
			Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra SKPD	%			100		100		100		100		100		100		100		
			Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD	%			100		100		100		100		100		100		100		
		Perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dan asset							456												Dinas Sosial
	Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	Terwujudnya pembinaan eks penyandang penyakit sosial	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Wanita Tuna Susila, dan Penyakit Sosial Lainnya) yang mendapatkan pembinaan	orang	40	40	987	40	862	40	1.115	40	1.232	40	1.361	40	1.500	240	1.500	Dinas Sosial
	Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Terwujudnya Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang diberdayakan :	Orang	6.000 (K)	4.650	4.863	4500	5.987	4500	4.587	4500	5.102	4500	5.643	4500	6.208	4500	6.208	Dinas Sosial
			- Komunitas Adat Terpencil	Orang	30	30		30		35		40		45		50		230			Dinas Sosial
			- Anak Panti (bantuan beras)	Orang	4400	4.400		4400		4400		4400		4400		4400		26.400			Dinas Sosial

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR		OPD PENANGGUNG JAWAB		
							2016		2017		2018		2019		2020					2021	
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)				Target	Rp. (Jt)
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat	JPL/orang/ tahun	5					20	121	30	57	40	62	50	81	50	81	Dinas Sosial
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD	%	5					100	1.039	100	1.064	100	1.148	100	1.499	100	1.499	Dinas Sosial
				Nilai Evaluasi SAKIP SKPD	predikat						BB		A		A		A		A		
				Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan	%						100		100		100		100		100		
				Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra SKPD	%						100		100		100		100		100		
				Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD	%						100		100		100		100		100		
		URUSAN SOSIAL									23.552		25.140		27.125		35.414		35.414		
		Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Narapidana, Wanita Tuna Susila, dan Penyakit Sosial Lainnya)		Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Wanita Tuna Susila) yang mendapatkan pembinaan	orang	40					40	966	40	949	40	1.024	40	1.337	240	1.337	Dinas Sosial
		Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya		Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang diberdayakan :	Orang	6.000 (K)					843	4.613	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Sosial
		Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya		Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang diberdayakan :	Orang	6.000 (K)					0	-	843	1.201	843	1.296	843	1.692	4500	1.692	Dinas Sosial
				- Komunitas Adat Terpencil	Orang						35		40		45		50				
				- Wanita Rawan Sosial Ekonomi	Orang						300		300		300		300				
		Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial		Lembaga sosial yang terakreditasi	Lembaga	0					10	2.435	15	2.497	15	2.695	20	3.518	20	3.518	Dinas Sosial
				Keterampilan PSKS	%	0					10		15		20		25		25		Dinas Sosial
		Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		Pelayanan penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (Disabilitas)	%	100					100	288	100	293	100	316	100	413	100	413	Dinas Sosial
		Pembinaan Anak Terlantar		Pelayanan penyandang masalah Kesejahteraan Sosial yang mendapat keterampilan (anak terlantar)	Jumlah Panti						3	7.994	3	7.558	3	8.155	3	10.647		10.647	Dinas Sosial
				Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Anak asuh yang mendapat pendidikan)	orang						175		175		175		175				

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR		OPD PENANGGUNG JAWAB		
							2016		2017		2018		2019		2020					2021	
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)				Target	Rp. (Jt)
		Pembinaan Para Penyandang Disabilitas dan Eks Trauma		Pelayanan penyandang Disabilitas (Netra dan Grahita)	Jumlah Panti	2					2	3.294	2	3.343	2	3.607	2	4.709	2	4.709	Dinas Sosial
					Orang	150					150		150		150		150		150		
		Pembinaan Panti Asuhan / Panti Lansia		Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Lanjut Usia Terlantar)	Jumlah Panti	2					2	3.125	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Sosial
		Pembinaan Panti Lanjut Usia Terlantar		Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Lanjut Usia Terlantar)	Jumlah Panti	2					-	-	2	3.255	2	3.512	2	4.585	2	4.585	Dinas Sosial
		Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba		Penjangkauan Pengguna Narkoba	%	15,59					16,59	181	16,59	378	16,59	408	16,59	533	16,59	533	Dinas Sosial
		Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial		Persentase korban bencana provinsi yang terlayani dalam pemulihan trauma	%	75					75%	656	75	848	75	915	75	1.194	75	1.194	Dinas Sosial
				Persentase penanganan konflik sosial	%	0					40%		40		45		45		45		
		Pemberdayaan Fakir Miskin		Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Fakir Miskin yang diberdayakan :							-	-	4880	4.817	4880	5.198	4880	6.786		6.786	Dinas Sosial
				- Anak Panti (bantuan beras)	Orang	4400							4000		4000		4000				
				- Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Kelompok	0							88		88		88				

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR		OPD PENANGGUNG JAWAB		
	TAHUN 2016	TAHUN 2017-2021	TAHUN 2016	TAHUN 2017-2021			2016		2017		2018		2019		2020		2021			Target	Rp. (Jt)
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)			
		TAHUN 2017 :		TAHUN 2017 :																	
	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI			16.252		16.968		18.406		19.914		21.554		23.336		23.336		
	URUSAN TENAGA KERJA	URUSAN TENAGA KERJA				16.252		16.968		18.406		19.914		21.554		23.336		23.336			
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	%	85	100	2.554	100	2.467	100	2.816	100	2.957	100	3.104	100	3.260	100	3.260	Disnakertrans
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase berfungsi sarana dan prasarana aparatur	%	85	100	4.492	100	884	100	4.952	100	5.200	100	5.459	100	5.732	100	5.732	Disnakertrans
				Kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik (zona hijau)	zona			hijau		hijau		hijau		hijau		hijau		hijau			
	Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin dan etos kerja aparatur	Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	%	85	100	133	100	160	100	147	100	154	100	162	100	170	100	170	Disnakertrans
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Wawasan dan kemampuan / kapasitas SDM aparatur	Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat	JPL/orang/ tahun	85	10	13	15	49	20	15	30	16	40	16	50	17	50	17	Disnakertrans
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya capaian kinerja dan sistem pelaporan kinerja SKPD	Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD	%	85	100	611	100	495	100	674	100	708	100	743	100	780	100	780	Disnakertrans
				Nilai Evaluasi SAKIP SKPD	predikat			BB		BB		BB		A		A		A			
				Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan	%			100		100		100		100		100		100		100	
				Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra SKPD	%			100		100		100		100		100		100		100	
				Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD	%			100		100		100		100		100		100		100	
		Perencanaan, pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan dan aset								324											Disnakertrans
	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang berkompeten	Persentase tenaga kerja yang berkompeten	%	90,91	66,15	5.384	68,46	9.013	70,39	4.279	73,73	4.760	75,56	5.331	77,4	5.875	77,4	5.875	Disnakertrans
				Persentase Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Terakreditasi	%	-	11,36		12,00		24,00		31,00		27,00		36,00		36,00		Disnakertrans
	Peningkatan Kesempatan Kerja dan Diversifikasi Usaha	Peningkatan Kesempatan Kerja dan Diversifikasi Usaha	Persentase serapan tenaga kerja sektor formal	Persentase serapan tenaga kerja sektor Formal	Orang	8,79	17,43	1.030	19,04	1.283	19,17	1.593	19,32	1.772	19,46	1.985	19,61	2.187	19,61	2.187	Disnakertrans
				Persentase serapan tenaga kerja sektor In Formal	%	55,71	87,20		87,33		87,46		87,59		87,72		87,85		87,85		Disnakertrans
	Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Berkurangnya jumlah kasus perselisihan hubungan industrial	Persentase Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial	%	14 kasus	4,87	745	4,73	435	4,59	1.153	4,45	1.283	4,31	1.437	4,17	1.583	4,17	1.583	Disnakertrans
			Jumlah pekerja buruh yang menjadi peserta program BPJS Naker	Persentase Peningkatan Tenaga Kerja Yang Menjadi Peserta Program BPJS Ketenagakerjaan.	%	103.184 org	6,86		7,07		7,28		7,49		7,72		7,94		7,94		Disnakertrans

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR		OPD PENANGGUNG JAWAB			
							2016		2017		2018		2019		2020					2021		
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)				Target	Rp. (Jt)	
	Perlindungan Tenaga Kerja dan Sistem Pengawasan Tenaga Kerja	Perlindungan Tenaga Kerja dan Sistem Pengawasan Tenaga Kerja	Persentase perusahaan yang melakukan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003	Persentase kepatuhan perusahaan yang melakukan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan	%	25,29	48,82	152	48,92	1.103	49,11	235	49,39	262	49,59	293	49,59	323	49,59	323	Disnakertrans	
	Pengadaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Laboratorium	Pengadaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Laboratorium	Meningkatnya sarana dan prasarana laboratorium	Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana laboratorium	Unit	-	-	415	-	14	358	10	374	6	402	5	412	35	412	Disnakertrans		
				Persentase terpenuhi standarisasi sarana dan prasarana laboratorium	%																	
	Gerakan Terpadu Pensejahteraan Fakir Miskin	Gerakan Terpadu Pensejahteraan Fakir Miskin	Persentase serapan tenaga kerja sektor informal	Persentase serapan tenaga kerja sektor informal	Orang	240	240	72	240	-	250	657	260	731	275	719	285	901	1.550	901	Disnakertrans	
	-	Gerakan Terpadu Pariwisata	-	Jumlah tenaga kerja yang berkompoten	Orang	-	-	-	32	-	32	340	48	378	48	423	48	466	208	466		
	Percepatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur pada Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal	Percepatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur pada Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal	Besaran transmigrans yang akan dibina	Persentase kawasan transmigrasi yang memenuhi sarana dan prasaraa dan pengembangan masyarakat sesuai ketentuan	%	50	75	650	80	756	60	953	60	1.060	60	1.187	60	1.308	60	1.308	Disnakertrans	
	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya jumlah perusahaan yang diperiksa	Persentase retribusi perusahaan yang diperiksa	Perusahaan	40	40	152	40	-	40	234	40	261	40	292	40	322	40	322	Dinas Sosial	
		TAHUN 2018-2021 :		TAHUN 2018-2021 :																		
		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI								18.406		19.604		21.306		29.595		29.595		
		NON URUSAN										6.240		6.595		7.168		9.956		9.956		
		Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase pelayanan administrasi perkantoran	%	85				100	2.717	100	3.139	100	3.412	100	4.739	100	4.739	100	4.739	Disnakertrans
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	%	85				100	2.594	100	2.241	100	2.436	100	3.383	100	3.383	100	3.383	Disnakertrans
				Kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik (zona hijau)	zona					hijau		hijau		hijau		hijau		hijau		hijau		
		Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	%	85				100	200	100	200	100	217	100	302	100	302	100	302	Disnakertrans
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat	JPL/orang/ tahun	85				20	15	30	25	40	27	50	38	50	38	50	38	Disnakertrans
		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD	%	85				100	715	100	990	100	1.076	100	1.495	100	1.495	100	1.495	Disnakertrans
				Nilai Evaluasi SAKIP SKPD	predikat					BB		A		A		A		A		A		
				Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan	%					100		100		100		100		100		100		
				Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra SKPD	%					100		100		100		100		100		100		

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR		OPD PENANGGUNG JAWAB		
							2016		2017		2018		2019		2020					2021	
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)				Target	Rp. (Jt)
TAHUN 2016	TAHUN 2017-2021	TAHUN 2016	TAHUN 2017-2021																		
			Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD	%						100		100		100		100					
			URUSAN TENAGA KERJA																		
		Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang berkompeten	%	90,91					41,53	4.444	42,36	5.166	43,2	5.614	44,06	7.798	77,4	7.798	Disnakertrans	
			Persentase Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Terakreditasi	%	-					13,37		15,43		18,27	22,32		36,00		Disnakertrans		
		Peningkatan Kesempatan Kerja dan Diversifikasi Usaha	Persentase serapan tenaga kerja sektor Formal	%	8,79					21,46	2.605	21,37	2.678	21,54	2.910	21,71	4.042	19,61	4.042	Disnakertrans	
			Persentase serapan tenaga kerja sektor In Formal	%	55,71					3,54		6,60		7,70		8,30		87,85		Disnakertrans	
		Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial	%	14 kasus					2,86	1.233	2,94	1.412	3,03	1.535	3,12	2.132	4,17	2.132	Disnakertrans	
			Persentase Peningkatan Tenaga Kerja Yang Menjadi Peserta Program BPJS Ketenagakerjaan.	%	103.184 org					7,28		7,49		7,72		7,94		7,94		Disnakertrans	
		Perlindungan Tenaga Kerja dan Sistem Pengawasan Tenaga Kerja	Persentase kepatuhan perusahaan yang melakukan peraturan per undang-undangan ketenagakerjaan	%	25,29					48,96	1.915	49,22	1.966	49,48	2.137	49,74	2.969	49,59	2.969	Disnakertrans	
		Pengadaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Laboratorium	Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana laboratorium	Unit	-					10,94	358	11,32	297	10,7	323	12,08	449	45	449	Disnakertrans	
		Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase retribusi perusahaan yang diperiksa	Perusahaan	40					40	234	40	300	40	326	40	453	40	453	Disnakertrans	
			URUSAN TRANSMIGRASI																		
		Percepatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur pada Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal	Persentase kawasan transmigrasi yang memenuhi sarana dan prasarana dan pengembangan masyarakat sesuai ketentuan	%	50					60	1.377	60	1.190	60	1.293	60	1.796	60	1.796	Disnakertrans	
			Pengembangan kawasan terpadu	Tahapan												Pengembangan					

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR		SKPD PENANGGUNG JAWAB		
	TAHUN 2016	TAHUN 2017-2021	TAHUN 2016	TAHUN 2017-2021			2016		2017		2018		2019		2020		2021			Target	Rp. (Jt)
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)			
		TAHUN 2017 :		TAHUN 2017 :																	
	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB	TAHUN 2017 : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		TAHUN 2017 : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			3.638		4.695		3.737		4.032		4.360		4.698		4.698		
	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			3.638		4.695		3.737		4.032		4.360		4.698		4.698		
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrai perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	%	100	654	100	833	100	721	100	757	100	794	100	834	100	834	BPPR dan KB	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya peningkatan sarana prasarana aparatur	Persentase berfungsi sarana dan prasarana aparatur	%	100	176	100	122	100	194	100	204	100	214	100	224	100	224	BPPR dan KB	
				Kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik (zona hijau)	zona	hijau		hijau		hijau		hijau		hijau		hijau		hijau			
	Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	%	100	25	100	32	100	28	100	29	100	31	100	32	100	32	BPPR dan KB	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas SDM aparatur	Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat	JPL/orang/ tahun	10	29	15	23	20	32	30	34	40	35	50	37	50	37	BPPR dan KB	
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terlaksananya pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD	%	100	204	100	217	100	225	100	236	100	248	100	261	100	261	BPPR dan KB	
				Nilai Evaluasi SAKIP SKPD	predikat	BB		BB		BB		A		A		A		A			
				Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan	%	100		100		100		100		100		100		100			
				Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra SKPD	%	100		100		100		100		100		100		100			
				Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD	%	100		100		100		100		100		100		100			
		Perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dan aset							42											BPPR dan PA	
	Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak	-	Persentase Lembaga Layanan Terhadap Perempuan dan Anak Yang Aktif	-	%	70	72	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Persentase penurunan kasus korban kekerasan terhadap perempuan	-	%	1,30	1,26														
	-	Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	-	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	94,04		-	94,44	1.023	94,64	244	94,84	267	95,04	290	95,24	319	95,24	319	BPPR dan KB
				Indeks Pemberdayaann Gender	%	61,86			62,02		62,10	207	62,18	226	62,26	245	62,34	270	62,34	270	
				Persentase organisasi perempuan yang aktif	%	91,14			94,93		96,20	169	97,46	185	98,73	200	100	221	100	221	

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR		SKPD PENANGGUNG JAWAB		
							2016		2017		2018		2019		2020					2021	
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)				Target	Rp. (Jt)
			Persentase SKPD yang menerapkan anggaran berbasis gender	%	87,79			91,83		93,87	131	95,91	144	97,95	156	100	172	100	172		
	Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	-	Persentase SKPD yang menerapkan anggaran berbasis gender	%	71,43	89,79	1.057	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BPPR dan KB
			Indeks perberdayaan gender	%	61,86	61,94															
			Persentase organisasi perempuan yang aktif	%	91,14	92,40															
	-	Peningkatan perlindungan perempuan	Rasio Perempuan Korban Kekerasan per 100.000 penduduk perempuan usia 18 tahun keatas ditingkat provinsi	Ratio	50			48	1.220	47	432	46	472	45	512	44	564	44	564		BPPR dan KB
	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	-	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	94,04	94,24	802														BPPR dan KB
			Persentase SKPD yang memiliki data terpilah	%	79,59	89,79															
			Persentase kelembagaan anak yang aktif	%	65	75															
	-	Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Penyediaan Layanan bagi keluarga mewujudkan KG dan Hak Anak	%	50			60	202	70	207	80	226	90	245	100	270	100	270		BPPR dan KB
	Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	-	Rasio Perempuan Korban Kekerasan Per 100.000 Penduduk Perempuan usia 18 Tahun ke atas di tingkat Provinsi	Ratio	50	50	90														BPPR dan KB
	-	Peningkatan Sistem data Gender dan Anak	Persentase SKPD yang memiliki data terpilah	%	50			91,83	283	93,87	206	95,91	226	97,95	245	100	270	100	270		
	Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	Rasio Anak yang memerlukan perlindungan khusus per 100.000 anak di Tingkat Provinsi	Ratio	394	392	300	390	-	388		386		384		382		382			BPPR dan KB
			Persentase penurunan kasus korban kekerasan terhadap anak	%	1,20	1,15															
			Persentase Kabutapan dan Kota Layak Anak	Kab Kota	6	7		8		9		10		11		12		12			
			Persentase Anak yang memiliki Akte Kelahiran	%	70,00	75,50															
	-	Peningkatan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak	Persentase Kabupaten dan Kota Layak Anak	%	31,57			42,1	276	47,36	470	52,63	513	57,89	587	63,15	613	63,15	613		BPPR dan KB
	-	Peningkatan Perlindungan Khusus Anak	Rasio Anak yang memerlukan perlindungan khusus per 100.000 anak di tingkat Provinsi	Ratio	394			390	423	388	470	386	513	384	557	382	613	382	613		BPPR dan KB

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR		SKPD PENANGGUNG JAWAB		
							2016		2017		2018		2019		2020					2021	
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)				Target	Rp. (Jt)
		TAHUN 2018-2021 :		TAHUN 2018-2021 :																	
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						3.737		4.032		4.361		8.475		8.475			
		NON URUSAN								1.299		1.355		1.466		2.849		2.849			
		Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase pelayanan administrasi perkantoran	%					100	770	100	735	100	795	100	1.546	100	1.546	BPPR dan PA	
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	%					100	213	100	212	100	230	100	446	100	446	BPPR dan PA	
				Kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik (zona hijau)	zona					hijau		hijau		hijau		hijau		hijau			
		Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	%					100	39	100	38	100	41	100	79	100	79	BPPR dan PA	
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat	JPL/orang/ tahun					20	30	30	30	40	33	50	64	50	64	BPPR dan PA	
		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD	%					100	247	100	340	100	368	100	714	100	714	BPPR dan PA	
				Nilai Evaluasi SAKIP SKPD	predikat					BB		A		A		A		A			
				Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan	%					100		100		100		100		100			
				Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra SKPD	%					100		100		100		100		100			
				Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD	%					100		100		100		100		100			
		URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								2.438		2.677		2.895		5.626		5.626			
		Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	94,04				94,64	595					95,24		-		BPPR dan PA	
				Partisipasi angkatan kerja perempuan	%							52,65	740	53,65	800	54,35	1.555	54,35	1.555		
				Indeks Pemberdayaann Gender	%	61,86				62,10		62,18		62,26		62,34		62,34			
				Persentase keterwakilan perempuan dilembaga parlemen	%							10,77		10,77		10,77		10,77			
				Persentase organisasi perempuan yang aktif	%	91,14				96,20		97,46		98,73		100		100			
				Persentase OPD yang menerapkan anggaran berbasis gender	%	87,79				93,87		95,91		97,95		100		100			
		Peningkatan perlindungan perempuan		Rasio Perempuan Korban Kekerasan per 100.000 penduduk perempuan usia 18 tahun keatas ditingkat provinsi	Ratio	50				47	528	46	503	45	544	44	1.058	44	1.058	BPPR dan PA	

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR		SKPD PENANGGUNG JAWAB		
							2016		2017		2018		2019		2020					2021	
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)				Target	Rp. (Jt)
TAHUN 2016	TAHUN 2017-2021	TAHUN 2016	TAHUN 2017-2021																		
			Prevalensi kekerasan terhadap perempuan							19,74		19,36		18,97		18,60		18,6		BPPR dan PA	
	Peningkatan Kualitas Keluarga		Persentase Penyediaan Layanan bagi keluarga mewujudkan KG dan Hak Anak	%	50					70	180	80	246	90	266	100	517	100	517	BPPR dan PA	
	Peningkatan Sistem data Gender dan Anak		Persentase OPD yang memiliki data terpilah	%	50					93,87	256	95,91	216	97,95	234	100	454	100	454		
	Peningkatan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak		Persentase Kabupaten dan Kota Layak Anak	%	31,57					47,00	557	52,00	443	57,00	480	63,00	932	63,15	932	BPPR dan PA	
	Peningkatan Perlindungan Khusus Anak		Ratio Anak yang memerlukan perlindungan khusus per 100.000 anak di tingkat Provinsi	Ratio	394					388	323		-					-	-	BPPR dan PA	
			Prevalensi kekerasan terhadap anak									15,86	528	15,36	571	14,86	1.110	14,86	1.110	BPPR dan PA	

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR		OPD PENANGGUNG JAWAB			
	TAHUN 2016	TAHUN 2017-2021	TAHUN 2016	TAHUN 2017-2021			2016		2017		2018		2019		2020		2021			Target	Rp. (Jt)	
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)				
		TAHUN 2017 :		TAHUN 2017 :																		
	BADAN KETAHANAN PANGAN	DINAS PANGAN		DINAS PANGAN			10.046		9.287		11.272		12.196		13.200		14.292		14.292			
	URUSAN PANGAN	URUSAN PANGAN				10.046		9.287		11.272		12.196		13.200		14.292		14.292				
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrai perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	1.300	100	1.303	100	1.349	100	1.359	100	1.359	100	1.359	100	1.359	Badan Ketahanan Pangan	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pelayanan Pemeliharaan	persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	%	100	100	1.549	100	925	100	511	100	501	100	511	100	516	100	516	Badan Ketahanan Pangan	
	Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan disiplin aparatur	Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	%	100	100	55	100	55	100	55	100	55	100	55	100	55	100	55	Badan Ketahanan Pangan	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas SDM aparatur	Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat	JPL/orang/ tahun		27		14		27		30		30		30		30	Badan Ketahanan Pangan		
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya tertib administrasi keuangan	Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD	%	100	100	379	100	250	100	385	100	400	100	400	100	430	100	430	Badan Ketahanan Pangan	
		Perencanaan, pengelolaa, pengawasan dan pengendalian kegiatan dan aset							105												Dinas Pangan	
	Peningkatan ketahanan pangan	Peningkatan ketahanan pangan	Ketersediaan Pangan	Ketersediaan Pangan	(Kg/kapita/ tahun)	275,96	284,25	5.931	292,79	5.635	301,58	7.105	310,64	7.951	319,97	8.920	329,58	9.860	329,58	9.860	Badan Ketahanan Pangan	
	Diversifikasi pangan	Diversifikasi pangan	Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan Masyarakat Sumatera Barat	Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan Masyarakat Sumatera Barat	%	83,7	84	805	84,6	1.000	85,20	1.840	85,8	1.900	86,4	1.925	87	2.042	87	2.042	Badan Ketahanan Pangan	
		TAHUN 2018-2021 :		TAHUN 2018-2021 :																		
		DINAS PANGAN		DINAS PANGAN							11.272		12.196		13.200		19.599		19.599			
		NON URUSAN									4.167		6.094		6.595		9.793		9.793			
		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran		%	100				100	1.637	100	2.877	100	3.113	100	4.623	100	4.623	100	4.623	Dinas Pangan
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur		%	100				100	2.102	100	2.561	100	2.772	100	4.116	100	4.116	100	4.116	Dinas Pangan
		Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas		%	100				100	78	100	82	100	88	100	131	100	131	100	131	Dinas Pangan
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat		JPL/orang/ tahun						20		34		36		54		54		54	Dinas Pangan
		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD		%	100				100	330	100	541	100	585	100	869	100	869	100	869	Dinas Pangan

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR		OPD PENANGGUNG JAWAB		
							2016		2017		2018		2019		2020					2021	
							TAHUN 2016	TAHUN 2017-2021	TAHUN 2016	TAHUN 2017-2021	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)		Target	Rp. (Jt)
		URUSAN PANGAN									7.105		6.102		6.605		9.806		9.806		
		Peningkatan ketahanan pangan		Ketersediaan Pangan Utama (beras)	(Kg/kapita/ tahun)	275,96					284,31	6.405	284,31	5.357	284,31	5.798	284,31	8.609	329,58	8.609	Dinas Pangan
		Diversifikasi pangan		Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan Masyarakat Sumatera Barat	%	83,7					85,20	700	85,8	745	86,4	806	87	1.197	87	1.197	Dinas Pangan

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR		OPD PENANGGUNG JAWAB		
	TAHUN 2016	TAHUN 2017-2021	TAHUN 2016	TAHUN 2017-2021			2016		2017		2018		2019		2020		2021			Target	Rp. (Jt)
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)			
		TAHUN 2017 :		TAHUN 2017 :																	
	BAPEDALDA	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		DINAS LINGKUNGAN HIDUP			8.157	7.339	9.107	9.854	10.665	11.547	11.547								
	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP					8.157	7.339	9.107	9.854	10.665	11.547	31.247								
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	1.154	100	1.373	100	1.670	100	1.879	100	2.007	100	2.091	2.091	2.091	Bapedalda
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	%	100	100	1.915	100	1.411	100	740	100	1.104	100	834	100	1.356	1.356	1.356	Bapedalda
	Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	%	100	100	38	100	38	100	40	100	46	100	51	100	60	60	60	Bapedalda
	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Terpenuhinya peningkatan sumber daya aparatur	Terpenuhinya peningkatan sumber daya aparatur	%	100	100	100	100	130	100	110	100	121	100	128	100	150	150	150	Bapedalda
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD	Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD	%	100	100	179	100	180	100	190	100	219	100	245	100	275	275	275	Bapedalda
			Nilai LAKIP SKPD (minimal BB)	Nilai LAKIP SKPD (minimal BB)	Skor		BB		BB		BB		BB		BB		BB				
			Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan	Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan	%	100	100		100		100		100		100		100				
			Persentase kesesuaian usulan renja dengan renstra SKPD	Persentase kesesuaian usulan renja dengan renstra SKPD	%	100	100		100		100		100		100		100				
			Persentase kesesuaian usulan renja dengan RPJMD	Persentase kesesuaian usulan renja dengan RPJMD	%	100	100		100		100		100		100		100				
		Perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dan asset							81											Badan LH	
	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	IKLH	IKLH	-	70,56	70,88	3.424	70,99	2.680	71,13	4.155	71,36	4.540	71,54	5.150	71,66	5.120	71,66	5.120	Bapedalda
	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	IKLH	IKLH	-	70,56	70,88	355	70,99	295	71,13	592	71,36	585	71,54	635	71,66	775	71,66	775	Bapedalda
	Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase pengembangan sistem dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	Persentase pengembangan sistem dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	%	-	20	542	40	470	60	585	80	630	100	655	100	670	100	670	Bapedalda
	Tata Lingkungan dan Penaatan Hukum Lingkungan	Tata Lingkungan dan Penaatan Hukum Lingkungan	Persentase usaha dan atau kegiatan yang mentaati peraturan perundang-undangan	Persentase usaha dan atau kegiatan yang mentaati peraturan perundang-undangan	%	55	55	450	60	680	70	1.025	75	730	80	960	80	1.050	80	1.050	Bapedalda

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR		OPD PENANGGUNG JAWAB			
							2016		2017		2018		2019		2020					2021		
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)				Target	Rp. (Jt)	Target
		TAHUN 2018-2021 :		TAHUN 2018-2021 :																		
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP		DINAS LINGKUNGAN HIDUP						9.107		11.484		12.360		19.700		19.700				
		NON URUSAN								-		-		2.771		3.939		4.239		6.757		6.757
		Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase pelayanan administrasi perkantoran	%	100				100	1.566	100	1.681	100	1.809	100	2.883	100	2.883	Dinas LH		
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase berfungsi sarana dan prasarana aparatur	%	100				100	845	100	1.662	100	1.789	100	2.851	100	2.851	Dinas LH		
		Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	%	100				100	50	100	62	100	66	100	105	100	105	Dinas LH		
		Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur		Terpenuhinya peningkatan sumber daya aparatur	%	100				100	110	100	135	100	145	100	232	100	232	Dinas LH		
		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan		Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD	%	100				100	201	100	400	100	430	100	686	100	686	Dinas LH		
				Nilai LAKIP SKPD (minimal BB)	Skor					BB		BB		BB		BB						
				Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan	%	100				100		100		100		100						
				Persentase kesesuaian usulan renja dengan renstra SKPD	%	100				100		100		100		100						
				Persentase kesesuaian usulan renja dengan RPJMD	%	100				100		100		100		100						
		URUSAN LINGKUNGAN HIDUP								-		-		6.336		7.545		8.121		12.943		12.943
		Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.		IKLH	indeks	70,56				71,13	3.825	71,36	2.856	71,54	3.074	71,66	4.899	71,66	4.899	Dinas LH		
		Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam		IKLH	indeks	70,56				71,13	310	-	-	-	-	-	-	-	-		Dinas LH	
		Tata Lingkungan, Perlindungan dan Konservasi Sumber daya Alam		IKLH	indeks	70,56				-	-	71,36	1.905	71,54	2.050	71,66	3.268	71,66	3.268	Dinas LH		
		Peningkatan kualitas dan akses Informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup		Persentase pengembangan sistem dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	%	-				60	1.131	80	1.080	100	1.162	100	1.853	100	1.853	Dinas LH		
		Tata Lingkungan dan Penaatan Hukum Lingkungan		Persentase usaha dan atau kegiatan yang mentaati peraturan perundang-undangan	%	55				70	1.070	-	-	-	-	-	-	-	-		Dinas LH	
		Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan		Persentase usaha dan atau kegiatan yang mentaati peraturan perundang-undangan	%	55				-	-	75	924	80	995	80	1.585	80	1.585	Dinas LH		
		Pengembangan Kinerja Pengolahan Persampahan		Persentase penurunan volume sampah melalui implementasi 3R (reduce, reuse, recycle)	%							2	680	2	732	2	1.167		1.167	Dinas LH		

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR		OPD PENANGGUNG JAWAB		
							2016		2017		2018		2019		2020					2021	
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)				Target	Rp. (Jt)
TAHUN 2016	TAHUN 2017-2021	TAHUN 2016	TAHUN 2017-2021																		
		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional		Meningkatnya pengelolaan TPA Regional	%	72					74		75	100	76	108	77	172	77	172	Dinas LH
				Jumlah TPA regional yang didanai	unit	2				3		4		4		4		4			
				Peningkatan infrastruktur TPA regional	unit	2				70		90		110		130		130			

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR		OPD PENANGGUNG JAWAB		
							2016		2017		2018		2019		2020					2021	
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)				Target	Rp. (Jt)
		TAHUN 2017 :		TAHUN 2017 :																	
	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			19.874		8.486		22.085		23.895		25.839		28.015		28.015		
	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					19.874		8.486		22.085		23.895		25.839		28.015		28.015		
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	1.619	100	1.246	100	1.785	100	1.874	100	1.968	100	2.067	100	2.067	BPM
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai	Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	%	100	100	1.568	100	90	100	1.729	100	1.816	100	1.906	100	2.002	100	2.002	BPM
				Kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik (zona hijau)	Zona		hijau		hijau		hijau		hijau		hijau		hijau		hijau		
	Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	%	100	100	31	100	31	100	34	100	36	100	37	100	39	100	39	BPM
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kemampuan dan SDM aparatur BPM	Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat	JPL/orang/ tahun		10	45	15	22	20	50	30	52	40	55	50	57	50	57	BPM
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya pelaksanaan penatausahaan Keuangan SKPD	Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD	%	100	100	279	100	207	100	308	100	323	100	339	100	356	100	356	BPM
				Nilai Evaluasi SAKIP SKPD	Predikat		BB		BB		BB		A		A		A		A		
				Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
				Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra SKPD	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
				Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
		Perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dan asset							50												
	Pengendalian Terpadu Penanganan Kemiskinan	Penanggulangan Kemiskinan	Tercapainya efektifitas dan efisiensi penanggulangan kemiskinan di Sumatera	Tingkat Kemiskinan di Sumatea Barat	%	6,71	6,43	1.797	6,15	739	5,87	2.025	5,59	2.206	5,31	2.404	5,69	2.620	5,69	2.620	BPM
	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan / Nagari	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan / Nagari	Meningkatnya peran masyarakat dalam berbagai program/kegiatan pembangunan	Jumlah Desa mandiri	Kab	7	13	4.659	25	2.081	37	5.249	49	5.719	61	6.232	73	6.792	85	6.792	BPM
	Peningkatan Kesempatan Kerja dan Diversifikasi Usaha	Peningkatan Kesempatan Kerja dan Diversifikasi Usaha	Tercapainya kesejahteraan serta berkurangnya jumlah Kepala Keluarga Miskin secara bertahap	Persentase Usaha Mikro dan Kecil Aktif.	%	35	40	265	45	38	50	299	55	326	60	355	65	387	65	387	BPM
				Badan Usaha Milik Desa/ Nagari yang terbentuk di Sumatera Barat. (Kumulatif)	Unit	166	308		450		592		734		876		880		880		

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR		OPD PENANGGUNG JAWAB		
							2016		2017		2018		2019		2020					2021	
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)				Target	Rp. (Jt)
			Kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik (zona hijau)	Zona						hijau		hijau		hijau		hijau					
		Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	%	100					100	39	100	45	100	49	100	67	100	67	Dinas PMD	
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat	JPL/orang/ tahun						20	46	30	46	40	50	50	69	50	69	Dinas PMD	
		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD	%	100					100	557	100	594	100	642	100	889	100	889	Dinas PMD	
			Nilai Evaluasi SAKIP SKPD	Predikat						BB		A		A		A		A	-		
			Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan	%	100					100		100		100		100		100			
			Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra SKPD	%	100					100		100		100		100		100			
			Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD	%	100					100		100		100		100		100			
		URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									16.864		19.220		20.771		28.776		28.776		
		Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan di Sumatea Barat	%	6,71					5,87	2.967	5,59	964	5,31	1.042	5,69	1.443	5,69	1.443	Dinas PMD	
		Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan / Nagari	Jumlah Desa mandiri	Kab	7					12	6.868	24	10.107	36	10.922	48	15.132	60	15.132	Dinas PMD	
		Peningkatan Kesempatan Kerja dan Diversifikasi Usaha	Persentase Usaha Mikro dan Kecil Aktif.	%	35					50	337	55	705	60	762	65	1.056	65	1.056	Dinas PMD	
			Badan Usaha Milik Desa/ Nagari yang terbentuk di Sumatera Barat. (Kumulatif)	%	166							88		90		92		92			
		Pengembangan Teknologi Tepat Guna	Jenis Inovasi Teknologi Tepat Guna yang di Adopsi dan dimanfaatkan Masyarakat.	Jenis	5					70	980	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PMD	
			Persentase inovasi TTG yang dimanfaatkan masyarakat	%								75	500	80	540	85	749	85	749		
			Persentase Posyantek di Sumatera Barat	Unit	31					45		60		75		90		90			
				%						20		25		30		35					
		Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Persentase LPM yang Kelembagaannya kuat.	%	NA					86	2.742	88	3.634	90	3.927	92	5.441	92	5.441	Dinas PMD	
			Persentase Partisipasi masyarakat dalam bulan bhakti Gotong royong masyarakat di Perdesaan	%	NA					80		85		90		95		95			
		Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Nagari	SOTK Pem. Nagari/Desa sesuai Permendagri 84 Tahun 2015	Nagari/Desa	NA					80	1.335	120	1.760	140	1.902	160	2.635	160	2.635	Dinas PMD	

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR		OPD PENANGGUNG JAWAB	
							2016		2017		2018		2019		2020					2021
							TAHUN 2016	TAHUN 2017-2021	TAHUN 2016	TAHUN 2017-2021	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)		Target
			Produk Hukum Nagari sesuai Permendagri 111 Tahun 2015	Nagari/Desa	NA					80		120		140		160		160		
			Nagari/Desa Definitif	Nagari/Desa	880					948		998		1.068		1.122		1.122		
			Pem Nagari/Desa Tertib Aset sesuai Permendagri 1 tahun 2016	Nagari/Desa	NA					80		120		140		160		160		
		Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Nagari	Persentase Kepuasan Wali Nagari/Kepala Desa terhadap kinerja perangkat	%	NA					70	1.635	75	1.150	80	1.243	85	1.722	85	1.722	Dinas PMD
			Persentase pemahaman aparatur terhadap Tupokis masing-masing Lembaga Nagari/Desa	%	NA					70		75		80		85		85		
			Kompetensi Wali Nagari/Kepala Desa dan Lurah sesuai Pergub 13 tahun 2016	Nagari/Desa/ Kelurahan	19					76		95		114		133		133		
		Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan perdesaan yang terbentuk	kawasan						-	-	2	400	2	432	2	599	6	599	Dinas PMD
		Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Adat	Lembaga adat dan agama yang melaksanakan peran dan fungsinya : KAN	Jumlah (Kumulatif)	90					-	-	244	-	272		299				Dinas PMD

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR		SKPD PENANGGUNG JAWAB		
							2016		2017		2018		2019		2020					2021	
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)				Target	Rp. (Jt)
		TAHUN 2017 :		TAHUN 2017 :																	
	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			660		3.936		1.086		1.186		1.287		1.416		1.416		
	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					660		3.936		1.086		1.186		1.287		1.416		1.416		
		Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase pelayanan administrasi perkantoran	%			100	662										BPPR dan KB		
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	%			100	154										BPPR dan KB		
				Kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik (zona hijau)	zona				hijau												
		Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	%			100	32										BPPR dan KB		
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat	JPL/orang/ tahun			15	23										BPPR dan KB		
		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD	%			100	197										BPPR dan KB		
				Nilai Evaluasi SAKIP SKPD	predikat				BB												
				Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan	%				100												
				Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra SKPD	%				100												
				Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD	%				100												
		Perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dan asset							41										BPPR dan KB		
		Upaya Kesehatan Masyarakat							43										BPPR dan KB		
		Pelayanan Administrasi Kependudukan							1.826										BPPR dan KB		
		Penyusunan Profil Kependudukan							442										BPPR dan KB		
	Keluarga Berencana	-	Laju Pertumbuhan Penduduk	-	%	1,25	1,22	76											BPPR dan KB		
			Jumlah akseptor KB		PUS	151.693	151.713														
	Kesehatan Reproduksi Remaja	Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi	Persentase PIK Remaja yang dilatih	Persentase PIK Remaja yang dilatih	%	60	70	281	77	239	82	120	90	131	95	142	100	157	100	157	BPPR dan KB

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN												KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR		SKPD PENANGGUNG JAWAB
							2016		2017		2018		2019		2020		2021				
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)			
			ASFR (Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur) 15-19 tahun	Ratio	23,40	21,00		18,90		18,90	64	17,00	70	13,60	76	11,90	84	11,90	84		
			Kehamilan yang tidak diinginkan	%	13,9	12,4		11,00		11,00	86	9,70	94	7,30	101	6,10	112	6,10	112		
	Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak	Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak	Persentase Ibu, Bayi dan Anak yang Terlayani	%	60	70	229	77	59	82	98	90	107	95	116	100	128	100	128	BPPR dan KB	
	Peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS		Meningkatnya pemahaman atas penanggulangan narkoba dan PMS termasuk HIV/AIDS	Kali	1	2	74													BPPR dan KB	
		Pelayanan Kontrasepsi	Jumlah Akseptor KB	PUS	151.693			151733	60	151.753	75	151773	82	151793	89	151813	98	151.813	98	BPPR dan KB	
			CPR (Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi)	%	51,30	52,5		53,90		53,90	86	55,40	94	58,60	101	60,20	112	60,20	112		
			Umnet Need (Kebutuhan berKB)	%	9,10	8,3		7,60		7,60	64	7,00	70	6,20	76	5,80	84	5,80	84		
		Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Persentase tersedianya tenaga pendamping kelompok bina keluarga	%	50			70	87	80	75	90	82	95	89	100	98	100	98	BPPR dan KB	
	-	Peningkatan Pengendalian Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	1,25			1,18	70	1,14	319	1,10	349	1,06	379	1,02	417	1,02	417	BPPR dan KB	
			Total Fertility Rate (TFR)	%	2,70	2,61		2,53		2,53	98	2,42	108	2,36	117	2,33	128	2,33	128		
		TAHUN 2018-2021 :	TAHUN 2018-2021 :																		
		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								1.381		3.690		4.584		10.533		10.533		
		NON URUSAN									1.381		3.485		4.329		9.948		9.948		
		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	%	100			100		100	813	100	1.050	100	1.304	100	2.997	100	2.997	BPPKBK dan PS	
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	%	100			100		100	301	100	1.743	100	2.165	100	4.975	100	4.975	BPPKBK dan PS	
			Kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik (zona hijau)	zona				hijau		hijau		hijau		hijau		hijau		hijau			
		Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	%	100			100		100	59	100	39	100	48	100	111	100	111	BPPKBK dan PS	
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat	JPL/orang/ tahun				20		-	30	35	40	43	50	98	50	98	98	BPPKBK dan PS	
		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD	%	100			100		208	100	619	100	769	100	1.767	100	1.767	100	BPPKBK dan PS	
			Nilai Evaluasi SAKIP SKPD	predikat				BB		A		A		A		A		A			
			Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan	%	100			100		100		100		100		100		100			

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR		SKPD PENANGGUNG JAWAB		
							2016		2017		2018		2019		2020					2021	
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)				Target	Rp. (Jt)
			Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra SKPD	%	100					100		100		100		100		100			
			Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD	%	100					100		100		100		100		100			
			URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										101		126		290		290		
			Penataan Administrasi Kependudukan	Kab/Kota	19					-		19	101	19	126	19	290	19	290	BPPKBK dan PS	
												85		88		90					
			URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																		
			Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi Remaja	%	60					-		90	0,5	95	1	100	1	100	1	BPPKBK dan PS	
				Ratio	23,40							17,00		13,60		11,90		11,90		-	
				%	13,9							9,70		7,30		6,10		6,10		-	
			Keluarga Berencana	%	60					-		90	98	95	122	100	280	100	280	BPPKBK dan PS	
				PUS	151.693							151773		151793		151813		151.813		-	
				%	51,30							55,40		58,60		60,20		60,20		-	
				%	9,10							7,00		6,20		5,80		5,80		-	
			Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	%	50					-		90	1,5	95	2	100	4	100	4	BPPKBK dan PS	
			Peningkatan Pengendalian Penduduk	%	1,25							1,10	3,5	1,06	4	1,02	10	1,02	10	BPPKBK dan PS	
				%	2,70							2,42		2,36		2,33		2,33		-	

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR		OPD PENANGGUNG JAWAB		
	TAHUN 2016	TAHUN 2017-2021	TAHUN 2016	TAHUN 2017-2021			2016		2017		2018		2019		2020		2021				
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)			
		TAHUN 2017 :		TAHUN 2017 :																	
	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS PERHUBUNGAN		DINAS PERHUBUNGAN			20.488		12.884		22.990		24.874		26.922		29.148		29.148		
	URUSAN PERHUBUNGAN	URUSAN PERHUBUNGAN				20.488		12.884		22.990		24.874		26.922		29.148		29.148			
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	%	100	2.190,0	100	3.652	100	2.457,4	100	2.658,8	100	2.877,7	100	3.115,7		3.115,7	Dishub Kominfo	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	%	100	962,4	100	1.110	100	1.079,9	100	1.168,4	100	1.264,6	100	1.369,2		1.369,2	Dishub Kominfo	
	Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan Disiplin Aparatur	Terpenuhinya peningkatan disiplin aparatur	Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	%	100	147,0	100	148	100	164,9	100	178,5	100	193,2	100	209,1		209,1	Dishub Kominfo	
	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Terpenuhinya peningkatan Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya peningkatan Sumber Daya Aparatur	%	100	100,0	100	300	100	112,2	100	121,4	100	131,4	100	142,3		142,3	Dishub Kominfo	
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Meningkatnya capaian kinerja keuangan dan sistem pelaporan SKPD	Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD	%	100	415,0	100	278	100	465,7	100	503,8	100	545,3	100	590,4		590,4	Dishub Kominfo	
				Nilai LAKIP SKPD (minimal BB)	Skor	BB		BB		BB		BB		A		A					
				Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan	%	100		100		100		100		100		100					
				Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra SKPD	%	100		100		100		100		100		100					
				Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD	%	100		100		100		100		100		100					
		Perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dan asset							234										Dinas Perhubungan		
		Peningkatan pelayanan kedinasan							450										Dinas Perhubungan		
	Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Meningkatnya jumlah penumpang angkutan seluruh moda	Persentase peningkatan jumlah penumpang angkutan umum seluruh moda	%	11.271 ribu orang	5,58	210,0	11,26	450	16,94	235,6	22,62	255,0	28,29	275,9	34,03	298,8	15.106 ribu orang	298,8	Dishub Kominfo
			Pengadaan sarana dan prasarana jembatan timbang	Pengadaan sarana dan prasarana jembatan timbang	unit	9		9		9		9		9		9					
			Workshop/sosialisasi/ pelatihan	Workshop/sosialisasi/ pelatihan	Orang	75		75		75		75		75		75					
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Meningkatnya jumlah penumpang angkutan moda darat	Persentase peningkatan jumlah penumpang angkutan umum moda darat	%	7.136 ribu orang	7,12	359,0	13,29	225	18,69	4.764,3	23,46	5.154,8	27,7	5.579,2	31,5	6.040,5	10.183 ribu orang	6.040,5	Dishub Kominfo
			rehabilitasi dan pemeliharaan gedung dan JTO	rehabilitasi dan pemeliharaan gedung dan JTO	buah	2 gedung, 9 JTO		2 gedung, 9 JTO		2 gedung, 9 JTO		2 gedung, 9 JTO		2 gedung, 9 JTO		2 gedung, 9 JTO					
			Rehabilitasi/ pemeliharaan terminal	Rehabilitasi/ pemeliharaan terminal	unit	-		8		8		8		8		8,0					

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR		OPD PENANGGUNG JAWAB				
							2016		2017		2018		2019		2020					2021			
	TAHUN 2016	TAHUN 2017-2021	TAHUN 2016	TAHUN 2017-2021			Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)		Target	Rp. (Jt)		
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut	Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut	Meningkatnya jumlah penumpang angkutan moda laut	Peningkatan jumlah penumpang angkutan umum moda laut	%	60 ribu orang	2,33	480,0	4,89	1.612	7,30	538,6	9,60	582,7	11,78	630,7	13,27	682,9	69 ribu orang	682,9	Dishub Kominfo		
			dokumen perencanaan tersusun	dokumen perencanaan tersusun			2		2		2		2		2		2,0						
			worshop/sosialisasi/pelatihan	worshop/sosialisasi/pelatihan	orang		30		30		30		30		30		30						
	Peningkatan Pelayanan Angkutan	Peningkatan Pelayanan Angkutan	Meningkatnya jumlah penumpang angkutan seluruh moda	Persentase peningkatan jumlah penumpang angkutan umum seluruh moda	%	11.271 ribu orang	5,58	2.938,1	11,26	970	16,94	3.296,9	22,62	3.567,1	28,29	3.860,7	34,03	4.180,0	15.106 ribu orang	4.180,0	Dishub Kominfo		
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkeretaapian	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkeretaapian	Meningkatnya jumlah penumpang angkutan moda kereta api	Persentase peningkatan jumlah penumpang angkutan umum moda kereta api	%	976 ribu orang	5,71	5.300,0	10,8	300	15,37	1.585,7	19,49	1.715,7	23,23	1.856,9	26,64	2.010,5	1.366 ribu orang	2.010,5	Dishub Kominfo		
			Manajemen rekayasa lalu lintas perlintasan sebidang	Manajemen rekayasa lalu lintas perlintasan sebidang	paket		1		1		1		1		1		1						
			Workshop/sosialisasi/pelatihan	Workshop/sosialisasi/pelatihan	orang		30		30		30		30		30		30						
	Peningkatan dan Pengamanan Lalulintas	Peningkatan dan Pengamanan Lalulintas	Menurunnya rasio angka kecelakaan lalu lintas	Persentase penurunan rasio angka kecelakaan lalu lintas	%	2,71 per 10.000 registrasi kendaraan	0,25	7.386,9	0,5	3.155	0,74	8.288,7	0,98	8.968,1	1,23	9.706,4	1,48	10.509,1	2,67 per 10.000 registrasi kendaraan	10.509,1	Dishub Kominfo		
			pengadaan dan pemasangan sarana dan prasarana perlengkapan jalan	pengadaan dan pemasangan sarana dan prasarana perlengkapan jalan	kab/kota		8		8		8		8		8		8,0						
			pemeliharaan sarana dan prasarana perlengkapan jalan	pemeliharaan sarana dan prasarana perlengkapan jalan	paket		7		7		7		7		7		7,0						

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR		OPD PENANGGUNG JAWAB		
	TAHUN 2016	TAHUN 2017-2021	TAHUN 2016	TAHUN 2017-2021			2016		2017		2018		2019		2020		2021			Target	Rp. (Jt)
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)			
		TAHUN 2018-2021 :		TAHUN 2018-2021 :																	
		DINAS PERHUBUNGAN		DINAS PERHUBUNGAN																	
		NON URUSAN																			
		Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase pelayanan administrasi perkantoran	%					100	3.635	100	4.081	100	3.468	100	4.323	100	4.323	Dinas Perhubungan	
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	%					100	3.742	100	2.458	100	1.524	100	1.900	100	1.900	Dinas Perhubungan	
		Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	%					100	202	100	132	100	233	100	290	100	290	Dinas Perhubungan	
		Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur		Terpenuhinya peningkatan Sumber Daya Aparatur	%					100	350	100	400	100	158	100	197	100	197	Dinas Perhubungan	
		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan		Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD	%					100	478	100	577	100	657	100	819	100	819	Dinas Perhubungan	
				Nilai LAKIP SKPD (minimal BB)	Skor					BB		BB		A		A					
				Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan	%					100		100		100		100					
				Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra SKPD	%					100		100		100		100					
				Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD	%					100		100		100		100					
		URUSAN PERHUBUNGAN																			
		Peningkatan pelayanan kedinasan																		Dinas Perhubungan	
		Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan		Persentase peningkatan jumlah penumpang angkutan umum seluruh moda	%	11.271 ribu orang				16,94	5.007	22,62	5.075	28,29	333	34,03	415	34,03	415	Dinas Perhubungan	
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ		Persentase peningkatan jumlah penumpang angkutan umum moda darat	%	7.136 ribu orang				18,69	1.350	23,46	1.218	27,7	6.723	31,5	8.381	31,49	8.381	Dinas Perhubungan	
		Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut		Peningkatan jumlah penumpang angkutan umum moda laut	%	60 ribu orang				9,20	210	11,30	1.522	13,40	760	15,50	948	15,50	948	Dinas Perhubungan	
		Peningkatan Pelayanan Angkutan		Persentase peningkatan jumlah penumpang angkutan umum seluruh moda	%	11.271 ribu orang				14,52	6.180	20,93	6.405	27,34	4.653	34,02	5.800	34,02	5.800	Dinas Perhubungan	
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkeretaapian		Persentase peningkatan jumlah penumpang angkutan umum moda kereta api	%	976 ribu orang				22,41	1.285	27,25	3.275	32,09	2.238	40,00	2.790	40,00	2.790	Dinas Perhubungan	
		Peningkatan dan Pengamanan Lalulintas		Persentase penurunan rasio angka kecelakaan lalu lintas	%	2,71 per 10.000 registrasi kendaraan				0,74	551	0,98	426	1,23	11.697	1,48	14.581	1,48	14.581	Dinas Perhubungan	

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR		OPD PENANGGUNG JAWAB		
	TAHUN 2016	TAHUN 2017-2021	TAHUN 2016	TAHUN 2017-2021			2016		2017		2018		2019		2020		2021			Target	Rp. (Jt)
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)			
		TAHUN 2017 :		TAHUN 2017 :																	
	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			7.234	5.606	10.488	11.392	12.377	13.451	13.451	13.451							
	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				7.234	5.606	10.488	11.392	12.377	13.451	13.451	13.451								
		Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase pelayanan administrasi perkantoran	%			2.293											Dinas Kom & Info		
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	%			215											Dinas Kom & Info		
				persentase kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik (zona hijau)	Zona																
		Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	%			48											Dinas Kom & Info		
		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan		Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat	JPL/orang/ tahun			131											Dinas Kom & Info		
		Perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dan aset		Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD	%			52											Dinas Kom & Info		
				Nilai Evaluasi SAKIP SKPD	Skor																
				Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan	%																
				Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra SKPD	%																
				Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD	%																
		Komunikasi Publik		Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Indeks			657											Dinas Kom & Info		
	Pengembangan Komunikasi dan Informasi dan Media Massa	Pengembangan Komunikasi dan Informasi dan Media Massa	Meningkatnya pengembangan penyelenggaraan komunikasi	Persentase penyelenggaraan komunikasi dan informasi media massa	%	0	20	825	40	-	60	926	80	1.002	90	1.084	100	1.174	100	1.174	Dishubkomin fo
	Kerjasama Informasi dan Media Massa	Kerjasama Informasi dan Media Massa	Meningkatnya diseminasi informasi	Persentase penyelenggaraan diseminasi informasi	%	0	20	350	40	-	60	393	80	425	90	460	100	498	100	498	Dishubkomin fo
	Informasi dan Komunikasi Publik	Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase pelayanan permintaan informasi yang terlayani dan persentase data informasi yang terhimpun dalam sistem Informasi PPIID	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Indeks	46,97	55	821	60	492	65	925	70	1.007	75	1.098	80	1.196	80	1.196	Setda (Biro Humas)
	Keterbukaan Informasi	Keterbukaan Informasi	Penyelenggaraan operasional Komisi Informasi Provinsi	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	%	46	50	1.900	56	-	62	2.132	68	2.307	74	2.497	80	2.703	80	2.703	Dishubkomin fo
			Penyelenggaraan operasional Komisi Informasi Provinsi	Penyelenggaraan operasional Komisi Informasi Provinsi	paket	1	1		1		1		1		1		1		1		

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR		OPD PENANGGUNG JAWAB			
							2016		2017		2018		2019		2020					2021		
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)				Target	Rp. (Jt)	Target
		Keterbukaan Informasi		Indeks Keterbukaan Informasi Publik	%	46					-	-	68	1.230	74	1.346	80	2.524	80	2.524	Dinas Kom & Info	
				Penyelenggaraan operasional Komisi Informasi Provinsi	paket	1					-		1		1		1		1			
		Pengelolaan E-Government Pemerintah Daerah		Indeks e-Government Indonesia	Indeks	2,01					2,6	600	2,8	2.837	2,9	3.106	3	5.823	3	5.823	Dinas Kom & Info	
		Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi		Persentase peningkatan kapasitas SDM bidang komunikasi dan informasi	%	0					-	-	80	249	90	273	100	511	100	511	Dinas Kom & Info	
				Meningkatnya kapasitas SDM bidang komunikasi dan informasi	orang	1750					-		1750		1750		1.750		1.750		Dinas Kom & Info	
		URUSAN STATISTIK																				
		Peningkatan penyediaan data statistik sektoral		Persentase terpenuhinya data statistik sektoral	%								-	80	400	90	438	100	821	100	821	Dinas Kom & Info
		URUSAN PERSANDIAN																				
		Pengamanan Informasi Pemerintah dan persandian		Persentase perangkat persandian untuk pengamanan informasi pemerintah	%								-	80	355	90	388	100	728	100	728	Dinas Kom & Info

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR		OPD PENANGGUNG JAWAB		
	TAHUN 2016	TAHUN 2017-2021	TAHUN 2016	TAHUN 2017-2021			2016		2017		2018		2019		2020		2021			Target	Rp. (Jt)
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)			
		TAHUN 2017 :		TAHUN 2017 :																	
	DINAS KOPERASI DAN UMKM	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			13.553		16.322		15.207		16.454		17.808		19.281		20.687		
	URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH					13.553		16.322		15.207		16.454		17.808		19.281		20.687		
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrai perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrai perkantoran	%	100	100	1.876	100	2.094	100	1.837	100	1.996	100	2.165	100	2.339	100	2.339	Dinas Koperasi dan UMKM
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana aparatur	Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	%	100	100	2.656	100	2.309	100	1.350	100	1.468	100	1.588	100	1.720	100	1.863	Dinas Koperasi dan UMKM
	Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	orang	84	84	45	84	71	84	60	84	73	84	79	84	86	84	93	Dinas Koperasi dan UMKM
	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya kapasitas SDM aparatur	Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat	JPL/orang/ tahun	5	5	50	5	113	5	200	5	216	5	234	5	253	60	274	Dinas Koperasi dan UMKM
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Meningkatnya tertib administrasi keuangan	Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD	%	100	100	518	100	366	100	705	100	761	100	824	100	892	100	966	Dinas Koperasi dan UMKM
		Perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dan asset								365											Dinas Koperasi Usaha Kecil & Menengah
		Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Pertumbuhan koperasi berkualitas	Pertumbuhan koperasi berkualitas	%	2	2	720	4	1.943	6	1.884	8	2.035	10	2.202	12	2.384	12	2.582	Dinas Koperasi dan UMKM
			Persentase koperasi aktif	Persentase koperasi aktif	%	70,4	71,00	600	72	-	73	832	73	899	74	972	75	1.053	75,00	1.140	
			Pertumbuhan jumlah anggota koperasi	Pertumbuhan jumlah anggota koperasi	%	5,75	6,00	155	6	-	7	684	7	739	7	799	7	866	7,25	937	
	Peningkatan dan pengembangan daya saing koperasi	Peningkatan dan pengembangan daya saing koperasi	Pertumbuhan volume usaha koperasi sektor ril	Pertumbuhan volume usaha koperasi sektor ril	%	1,50	1,50	1.250	3	4.077	5	2.492	6	2.691	8	2.912	9	3.154	9,00	3.416	Dinas Koperasi dan UMKM
			Pertumbuhan volume usaha simpan pinjam koperasi	Pertumbuhan volume usaha simpan pinjam koperasi	%	1,20	1,20	579	2	-	4	1.033	5	1.116	6	1.207	7	1.307	7,20	1.416	
			Pertumbuhan permodalan usaha simpan pinjam koperasi	Pertumbuhan permodalan usaha simpan pinjam koperasi	%	1,30	1,30	379	3	-	4	709	5	766	7	829	8	897	7,80	972	
	Peningkatan dan pengembangan daya saing UMKM	Peningkatan dan pengembangan daya saing UMKM	Peningkatan usaha mikro menjadi usaha kecil	Peningkatan usaha mikro menjadi usaha kecil	%	1,50	1,50	3.236	3	4.983	5	944	6	1.020	8	1.103	9	1.195	9,00	1.294	Dinas Koperasi dan UMKM
			Peningkatan usaha kecil menjadi usaha menengah	Peningkatan usaha kecil menjadi usaha menengah	%	0,5	0,50	1.343	1	-	2	1.872	2	2.022	3	2.188	3	2.369	3,00	2.566	
			Jumlah produk UMKM yang terstandarisasi	Jumlah produk UMKM yang terstandarisasi	UMKM	40	40	146	140	-	240	605	340	653	440	707	540	766	540	829	

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR		OPD PENANGGUNG JAWAB		
							2016		2017		2018		2019		2020					2021	
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)				Target	Rp. (Jt)
		TAHUN 2018-2021 :		TAHUN 2018-2021 :																	
		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH						15.207		20.368		21.714		33.033		33.033			
		NON URUSAN								5.266		5.249		5.596		8.513		8.513			
		Pelayanan Administrasi Perkantoran		Meningkatnya pelayanan administrai perkantoran	%	100				100	2.888	100	3.380	100	3.603	100	5.482	100	5.482	Dinas Koperasi Usaha Kecil & Menengah	
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	%	100				100	1.228	100	1.100	100	1.173	100	1.785	100	1.785	Dinas Koperasi Usaha Kecil & Menengah	
		Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	orang	84				84	79	84	88	84	94	84	143	84	143	Dinas Koperasi Usaha Kecil & Menengah	
		Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur		Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat	JPL/orang/ tahun	5				5	94	5	83	5	89	5	135	60	135	Dinas Koperasi Usaha Kecil & Menengah	
		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan		Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD	%	100				100	978	100	597	100	637	100	968	100	968	Dinas Koperasi Usaha Kecil & Menengah	
		URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH								9.941		15.119		16.118		24.520		24.520			
		Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi		Pertumbuhan koperasi berkualitas	%	2				6	4.094	8	4.379	10	4.668	12	7.101	12	7.101	Dinas Koperasi Usaha Kecil & Menengah	
				Persentase koperasi aktif	%	70,4				73		73		74		75		75		-	
				Pertumbuhan jumlah anggota koperasi	%	5,75				7		7		7		7,25		7,25		-	
		Peningkatan dan pengembangan daya saing koperasi		Pertumbuhan volume usaha koperasi sektor riil	%	1,50				5	1.977	6	3.823	8	4.075	9	6.200	9,00	6.200	Dinas Koperasi Usaha Kecil & Menengah	
				Pertumbuhan volume usaha simpan pinjam koperasi	%	1,20				4		5		6		7		7,20		-	
				Pertumbuhan permodalan usaha simpan pinjam koperasi	%	1,30				4		5		7		8		7,80		-	
		Peningkatan dan pengembangan daya saing		Peningkatan usaha mikro menjadi usaha kecil	%	1,50				5	3.870	-	-							Dinas Koperasi Usaha Kecil & Menengah	
				Peningkatan kemitraan usaha UKM	Sentra	NA						10	6.917	10	7.374	10	11.219	10	11.219		
				Peningkatan keunggulan kompetitif UKM terstandarisasi	Kemitraan/ MoU	NA						12		16		20					
						standarisasi produk						340		440		540					
				Peningkatan usaha kecil menjadi usaha menengah	%	0,5				2		2		3		3		3		-	
				Jumlah produk UMKM yang terstandarisasi	UMKM	40				240		-	-				540		-		

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR		OPD PENANGGUNG JAWAB		
							2016		2017		2018		2019		2020					2021	
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)				Target	Rp. (Jt)
		TAHUN 2017 :		TAHUN 2017 :																	
	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			4.235		6.322		4.751		5.141		5.564		6.024		6.024		
	URUSAN PENANAMAN MODAL	URUSAN PENANAMAN MODAL					4.235		6.322		4.751		5.141		5.564		6.024		6.024		
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrai perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrai perkantoran	%	100	100	683	100	964	100	766	100	827	100	897	100	972	100	972	BKPM dan PPT
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pelayanan Pemeliharaan	Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	%	100	100	754	100	87	100	834	100	894	100	964	100	1.039	100	1.039	BKPM dan PPT
	Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan disiplin aparatur	Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	orang	54	55	31	60	31	60	50	60	79	70	82	70	92	70	92	BKPM dan PPT
	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya kapasitas SDM aparatur	Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat	JPL/orang/ tahun	21	25	80	25	360	29	160	29	220	30	290	30	365	30	365	BKPM dan PPT
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Meningkatnya tertib administrasi keuangan	Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD	%	100	100	272	100	314	100	351	100	412	100	482	100	557	100	557	BKPM dan PPT
		Perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dan asset								137											Dinas PM dan PTSP
	Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Realisasi investasi	Realisasi investasi			1.743		3.553		1.838		1.898		1.968		2.043		2.043		BKPM dan PPT
		PMDN	PMDN		Juta	3.185.076	3.280.628		3.379.047		3.480.418		3.584.831		3.692.376		3.803.147		3.803.147		
		PMA	PMA		US \$ (ribu)	39.754	43.729		48.103		52.913		58.204		64.025		70.427		70.427		
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	ratio	3,16	3,2	670	3,3	875	3,4	750	3,5	810	3,6	880	3,7	955	3,7	955	BKPM dan PPT
			Persentase Perizinan yang Tepat Waktu	Persentase Perizinan yang Tepat Waktu	%	80	80		80		90		90		100		100				
		TAHUN 2018-2021 :		TAHUN 2018-2021 :																	
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							4.751		5.141		5.564		9.997		9.997		
		NON URUSAN									2.162		2.359		2.553		4.587		4.587		
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrai perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrai perkantoran	%	100					100	767	100	1.028	100	1.113	100	2.000	100	2.000	Dinas PM dan PTSP
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	%	100					100	834	100	590	100	639	100	1.148	100	1.148	Dinas PM dan PTSP
	Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	orang	54					60	50	60	56	70	61	70	109	70	109	Dinas PM dan PTSP
	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat	Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat	JPL/orang/ tahun	21					29	160	29	201	30	217	30	391	30	391	Dinas PM dan PTSP
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD	Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD	%	100					100	351	100	483	100	523	100	940	100	940	Dinas PM dan PTSP

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR		OPD PENANGGUNG JAWAB		
							2016		2017		2018		2019		2020					2021	
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)				Target	Rp. (Jt)
TAHUN 2016	TAHUN 2017-2021	TAHUN 2016	TAHUN 2017-2021																		
		URUSAN PENANAMAN MODAL									2.589		2.782		3.011		5.410		5.410		
		Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi		Realisasi investasi :							1.839		1.991		2.155		3.872		3.872	Dinas PM dan PTSP	
				PMDN	Juta	3.185.076				3.480.418		3.584.831		3.692.376		3.803.147		3.803.147			
				PMA	US \$ (ribu)	39.754				52.913		58.204		64.025		70.427		70.427			
		Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu		Indeks Kepuasan Masyarakat	ratio	3,16				3,4	751	3,5	791	3,6	856	3,7	1.538	3,7	1.538	Dinas PM dan PTSP	
				Persentase Perizinan yang Tepat Waktu	%	80				90		90		100		100					

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR		OPD PENANGGUNG JAWAB		
	TAHUN 2016	TAHUN 2017-2021	TAHUN 2016	TAHUN 2017-2021			2016		2017		2018		2019		2020		2021			Target	Rp. (Jt)
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)			
		TAHUN 2017 :		TAHUN 2017 :																	
	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA		DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA			19.317		11.503		21.585		23.452		25.383		27.482		27.482		
	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA					19.317		11.503		21.585		23.452		25.383		27.482		27.482		
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi dan operasional kantor	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	2.195	100	2.187	100	2.420	100	2.541	100	2.668	100	2.801	100	2.801	Dispora
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase berfungsi sarana dan prasarana aparatur	%	100	100	880	100	600	100	970	100	1.019	100	1.070	100	1.123	100	1.123	Dispora
				Kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik (zona hijau)	Zona		hijau		hijau		hijau		hijau		hijau		hijau		hijau		
	Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	%	100	100	76	100	82	100	84	100	88	100	92	100	97	100	97	Dispora
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas SDM Aparatur	Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat	JPL/orang/ tahun	-	-	-	6	-	8	84	10	88	12	93	14	97	14	97	Dispora
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya peningkatan capaian kinerja keuangan dan sistem pelaporan kinerja SKPD	Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD	%	100	100	452	100	327	100	498	100	523	100	549	100	577	100	577	Dispora
				Nilai Evaluasi SAKIP SKPD	Predikat		BB		BB		BB		A		A		A		A		
				Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
				Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra SKPD	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
				Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
		Perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dan asset							91												Dispora
	Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Meningkatnya budaya olahraga, kesehatan jasmani, mental, rohani masyarakat serta potensi olahraga Sumatera Barat	Persentase Peningkatan budaya masyarakat melaksanakan olahraga	%	100	20	7.891	40	5.559	60	10.808	80	9.682	90	11.645	100	12.502	100	12.502	Dispora
			Meningkatnya pemsarakatan, pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga Sumatera Barat	Persentase jumlah atlet dan pelatih yang berprestasi	%	76	76		79,45		81,66		83,73		84,27		90		90		
				Persentase peningkatan klub olahraga	%		-		38		40		42		42		42		42		
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana olahraga	Persentase sarana olahraga pada PPLP yang lengkap (15 cabor)	%	30	30	3.044	-	-	40	1.783	50	2.124	60	2.192	70	2.505	70	2.505	Dispora
				Persentase prasarana olahraga pada PPLP (15 cabor)	%	80	80		80		86		93		93		100		100		

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR		OPD PENANGGUNG JAWAB		
							2016		2017		2018		2019		2020					2021	
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)				Target	Rp. (Jt)
			Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra SKPD	%	100					100		100		100		100					
			Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD	%	100					100		100		100		100					
			URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA																		
		Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Persentase Peningkatan budaya masyarakat melaksanakan olahraga	%	100					60	8.860	80	10.093	90	11.645	100	16.020	100	16.020	Dispora	
			Persentase jumlah atlet dan pelatih yang berprestasi	%	76					81,66		83,73		84,27		90		90			
			Persentase peningkatan klub olahraga	%	-					40		42		42		42		42			
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Persentase sarana olahraga pada PPLP yang lengkap (15 cabor)	%	30					40	-	50	-	60	2.192	70	3.016	70	3.016	Dispora	
			Persentase prasarana olahraga pada PPLP (15 cabor)	%	80					86		93		93		100		100			
			Persentase sarana olahraga untuk persiapan PON Tahun 2024 (36 cabor)	%	n/a					20		40		50		60		60			
			Persentase prasarana olahraga untuk persiapan PON Tahun 2024 (36 cabor)	%	n/a					20		40		50		60		60			
		Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Persentase jumlah pemuda yang berprestasi	%	100					60	5.314	80	2.722	90	2.629	100	3.617	100	3.617	Dispora	
			Organisasi kepemudaan yang aktif	%	10					16		18		20		22		22			
			Wirasaha muda	Orang	-					45		50		55		60		60			
		Peningkatan Wawasan dan Kreatifitas Seni Budaya Pemuda	Persentase Pemuda Sumatera Barat yang memiliki Wawasan dan Kreatifitas Seni Budaya	%	100					-	-	80	156	90	94	100	130	100	130	Dispora	
		Peningkatan Penyadaran Kepemudaan	Peningkatan jumlah pemuda yang mandiri dan berkapasitas	orang	550					855	1.439	895	739	1.045	502	1.045	690	1.045	690	Dispora	
		Pengembangan Organisasi Pemuda dan Manajemen Olahraga	Peningkatan jumlah pemuda yang berkapasitas dalam organisasi kepemudaan dan keolahragaan	Orang	380					560	644	890	2.039	1.310	3.596	1.480	4.947	1.480	4.947	Dispora	
			Peningkatan pembinaan jumlah olahragawan disabilitas.	Keg/Org/ Lemb	250					300		450		400		450		450	Dispora		
		Manajemen Layanan Teknis Lainnya	Peningkatan pembinaan jumlah olahragawan disabilitas.	19 Kab/Kota						19	659	19	-	19	252	19	347	19	347	Dispora	

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR		OPD PENANGGUNG JAWAB		
							2016		2017		2018		2019		2020					2021	
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)				Target	Rp. (Jt)
		TAHUN 2017 :		TAHUN 2017 :																	
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS KEBUDAYAAN		DINAS KEBUDAYAAN			6.478		9.939		1.860		2.019		2.192		2.381		2.381		
	URUSAN KEBUDAYAAN	URUSAN KEBUDAYAAN				6.478		9.939		1.860		2.019		2.192		2.381		2.381			
		Pelayanan Adminstrasi Perkantoran		Persentase pelayanan administrasi perkantoran	%			100	1.763											Dinas Kebudayaan	
		Peningkatan Sarana dan Prasaranan Aparatur		Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	%			100	708											Dinas Kebudayaan	
				Kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik (zona hijau)	Zona			hijau													
		Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	%			100	70											Dinas Kebudayaan	
		Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD	%			100	300											Dinas Kebudayaan	
				Nilai Evaluasi SAKIP SKPD	predikat			BB													
				Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan	%			100													
				Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra SKPD	%			100													
				Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD	%			100													
	Pemberdayaan Lembaga-Lembaga Adat Seni dan Budaya	Pemberdayaan dan Penguatan Eksistensi Lembaga-Lembaga Adat Seni dan Budaya	Berkembangnya kapasitas kelembagaan adat, seni dan budaya	Berkembangnya Kapasitas Kelembagaan Adat, Seni dan Budaya	%	3	20%	1.057	40%	692	60%	303	80%	329	100%	358	100%	388	100%	388	Dinas Dikbud
				Meingkatnya kualitas lembaga dan kompetensi pemangku adat	Nagari	18	18	54	72		108		138		138		138		138		
	Pengembangan Pendidikan Budaya	Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Budaya	Meningkatnya apresiasi terhadap seni dan budaya	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan pendidikan budaya	%	30	20%	2.747	40%	1.641	60%	789	80%	856	100%	930	100%	1.010	100%	1.010	Dinas Dikbud
				Meningkatnya pelaksanaan pendidikan Muatan Lokal ABS SBK	Sekolah	NN	5	19	38		150		356		356		356		356		
	Pengelolaan Kekayaan Budaya	Pengelolaan Kekayaan Budaya	Meningkatnya jumlah pengelola kekayaan budaya yang difasilitasi	Tersedianya pengelolaan kekayaan Budaya	Kali	7	20%	2.024	40%	2.133	60%	581	80%	631	100%	685	100%	744	100%	744	Dinas Dikbud
				Jumlah Warisan Budaya Tak Benda (intangible) yang ditetapkan oleh Pemerintah	jenis	5	10	15	20		25		30		30		30		30		

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR		OPD PENANGGUNG JAWAB		
							2016		2017		2018		2019		2020					2021	
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)				Target	Rp. (Jt)
		URUSAN KEBUDAYAAN																			
		Pemberdayaan dan Penguatan Eksistensi Lembaga-Lembaga Adat Seni dan Budaya		Berkembangnya Kapasitas Kelembagaan Adat, Seni dan Budaya	%	3				60%	300	80%	320	100%	398	100	630	100	630	Dinas Kebudayaan	
				Meingkatnya kualitas lembaga dan kompetensi pemangku adat	Nagari	18			72		108		138		138		138				
		Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Budaya		Meningkatnya pembinaan dan pengembangan pendidikan budaya	%	30			60%	200	80%	270	100%	335	100	532	100	532	Dinas Kebudayaan		
				Meningkatnya pelaksanaan pendidikan Muatan Lokal ABS SBK	Sekolah	NN			38		150		356		356		356				
		Pengelolaan Kekayaan Budaya		Tersedianya pengelolaan kekayaan Budaya	Kali	7			60%	1.200	80%	930	100%	1.155	100	1.831	100	1.831	Dinas Kebudayaan		
				Jumlah Warisan Budaya Tak Benda (intangible) yang ditetapkan oleh Pemerintah	jenis	5			20		25		30		30		30				
				Meningkatnya jumlah warisan budaya benda (tangible) yang ditetapkan pemerintah	jenis	NN			15		20		25		25		25				
		Pengembangan dan Penguatan Nilai Budaya		Tersedianya Data Pengembangan Nilai-Nilai Budaya	%	NN			60%	160	80%	715	100%	889	100	1.409	100	1.409	Dinas Kebudayaan		
				Meningkatnya kompetensi, keterampilan dan pengamalan nilai-nilai budaya	orang	NN			300		450		600		600		1950				
		Peningkatan Diplomasi Seni dan Budaya		Tersedianya peningkatan diplomasi seni dan Budaya	%	NN			60%	600	80%	1.354	100%	1.682	100	2.665	100	2.665	Dinas Kebudayaan		
		Pengembangan Nilai-nilai Budaya								600	-	-								Dinas Kebudayaan	

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR		OPD PENANGGUNG JAWAB			
	TAHUN 2016	TAHUN 2017-2021	TAHUN 2016	TAHUN 2017-2021			2016		2017		2018		2019		2020		2021			Target	Rp. (Jt)	
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)				
		TAHUN 2017 :		TAHUN 2017 :																		
	BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN		DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN			9.609		11.100		10.782		11.666		12.626		13.670		3.444			
	URUSAN PERPUSTAKAAN	URUSAN PERPUSTAKAAN					2.509		4.640		2.688		2.963		3.205		3.444		3.444			
	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya minat dan budaya gemar membaca	Jumlah koleksi perpustakaan	Eksemplar	13.000	13.000	2.509	13.000	4.640	13.000	2.688	13.000	2.963	13.000	3.205	13.000	3.444	78.000	3.444	Badan Pustaka & Arsip	
				Kenaikan Kunjungan perpustakaan	Rata-rata kenaikan/orang	1.000	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000			
		URUSAN KEARSIPAN		URUSAN KEARSIPAN			7.100		6.460		8.095		8.703		9.422		10.227		10.227			
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	%	100	2.856	100	2.813	100	3.149	100	3.306	100	3.472	100	3.645	100	3.645	100	3.645	Badan Pustaka dan Arsip
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana Aparatur	Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	%	100	2.359	100	2.622	100	2.601	100	2.731	100	2.867	100	3.010	100	3.010	100	3.010	Badan Pustaka dan Arsip
				Kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik (zona hijau)	Zona		hijau		hijau		hijau		hijau		hijau		hijau		hijau			
	Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin dan etos kerja aparatur	Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	%	100	68	100	-	100	74	100	78	100	82	100	86	100	86	100	86	Badan Pustaka dan Arsip
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terciptanya peningkatan SDM Aparatur	Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat	JPL/orang/tahun	10	231	15	102	20	254	30	267	40	280	50	294	50	294	50	294	Badan Pustaka dan Arsip
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan pengembangan sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya tertib administrasi keuangan	Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD	%	100	650	100	197	100	717	100	752	100	790	100	830	100	830	100	830	Badan Pustaka dan Arsip
				Nilai Evaluasi SAKIP SKPD	Predikat		BB		BB		BB		A		A		A		A			
				Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan	%	100		100		100		100		100		100		100		100		
				Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra SKPD	%	100		100		100		100		100		100		100		100		
				Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD	%	100		100		100		100		100		100		100		100		
		Perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan Pengendalian kegiatan dan asset							148													Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan	Peningkatan Pelayanan Kualitas Sistem Informasi Kearsipan	Peningkatan kualitas dan kuantitas khasanah kearsipan	SKPD	42		577		159		800		966		1.189		1.454		1.454		Badan Pustaka dan Arsip
		Pelindungan dan Penyelamatan Arsip		Meningkatnya jumlah khasanah (daftar inventaris) arsip	dokumen	20	4		4		4		4		4		4		44		44	Badan Pustaka dan Arsip

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR		OPD PENANGGUNG JAWAB			
							2016		2017		2018		2019		2020					2021		
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)				Target	Rp. (Jt)	Target
	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengelolaan Sistem Kearsipan	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengelolaan Sistem Kearsipan	Terbina dan meningkatnya kapasitas SDM dalam pengelolaan Sistem Kearsipan	Tertib arsip	Jumlah SKPD (Kumulatif)	8	2	360	2	419	2	499	2	603	2	742	2	907	20	907	Badan Pustaka dan Arsip	
		TAHUN 2018-2021 :		TAHUN 2018-2021 :																		
		DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN		DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN								8.095		11.666		12.626		18.876		18.876		
		NON URUSAN										6.796		6.866		7.431		11.109		11.109		
		Pelayanan Adminstrasi Perkantoran		Persentase pelayanan administrasi perkantoran	%							100	3.149	100	3.401	100	3.681	100	5.503	100	5.503	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	%							100	2.601	100	2.203	100	2.384	100	3.565	100	3.565	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
				Kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik (zona hijau)	Zona							hijau		hijau		hijau		hijau		hijau		
		Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	%							100	74	100	78	100	84	100	126	100	126	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat	JPL/orang/ tahun							20	254	30	281	40	304	50	455	50	455	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		Peningkatan pengembangan sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD	%							100	718	100	903	100	977	100	1.461	100	1.461	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
				Nilai Evaluasi SAKIP SKPD	Predikat							BB		A		A		A		A		
				Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan	%							100		100		100		100		100		
				Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra SKPD	%							100		100		100		100		100		
				Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD	%							100		100		100		100		100		
		URUSAN PERPUSTAKAAN												2.959		3.202		4.788		4.788		
		Pengembangan Budaya Baca dan Promosi Perpustakaan		Jumlah koleksi perpustakaan	Eksemplar	13.000						13.000	2.688	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Kenaikan Kunjungan	Rata-rata	1.000						1.000										
		Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan		Jumlah koleksi perpustakaan	Eksemplar	13.000						-	-	13.000	2.959	13.000	3.202	13.000	4.788	39.000	4.788	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
				Kenaikan Kunjungan perpustakaan	Rata-rata kenaikan/ orang	1.000								1.000		1.000		1.000		1.000		

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR		OPD PENANGGUNG JAWAB		
							2016		2017		2018		2019		2020					2021	
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)				Target	Rp. (Jt)
			URUSAN KEARSIPAN																		
			Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan	Peningkatan kualitas dan kuantitas khasanah kearsipan	SKPD	42					3	800	3	921	3	997	3	1.490		1.490	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
				Meningkatnya jumlah khasanah (daftar inventaris) arsip	dokumen	20					4		4		4		4		36		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
			Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengelolaan Sistem Kearsipan	Tertib arsip	Jumlah SKPD (Kumulatif)	8	13				2	499	2	920	2	996	50	1.489	77	1.489	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR		OPD PENANGGUNG JAWAB				
							2016		2017		2018		2019		2020					2021			
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)				Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)
		TAHUN 2017 :		TAHUN 2017 :																			
	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			52.495		46.613		58.904		63.732		68.978		74.683		81.447				
	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN					52.495		46.613		58.904		63.732		68.978		74.683		81.447				
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrai perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	3.265,8	12	4.190,4	12	3.600	12	3.780,5	12	3.969,5	12	4.168,0	12	4.376,4	DKP		
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	%	100	100	1.280,8	12	2.029,0	12	1.412	12	1.482,6	12	1.627,8	12	1.709,1	12	1.794,6	DKP		
	Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan disiplin aparatur	Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	%	100	210	113,4	210	136,1	210	125	210	131,3	210	137,8	215	144,7	215	152,0	DKP		
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas SDM aparatur	Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat	JPL/orang/ tahun			150	12	150,0	12	165	12	173,6	12	182,3	12	191,4	12	201,0	DKP		
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya tertib administrasi keuangan	Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD	%	100	100	1.084,9	12	843,0	12	1.196	12	1.255,9	12	1.318,6	12	1.384,6	12	1.453,8	DKP		
		Perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dan asset							850,0												DKP		
	Pengembangan Ekonomi Maritim	Pengembangan Ekonomi Maritim	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan	jenis	0	2	1.500	2	7.859	2	5.154	2	5.669	2	6.236	2	6.859	2	7.545	DKP		
			Meningkatnya Sarana dan Prasarana UPTD Pelabuhan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana UPTD Pelabuhan	unit	2	2	7.354,3	2	-	2	9.594	2	10.554	2	11.613	2	12.727	2	13.953	DKP		
			Meningkatnya pelayanan perizinan usaha perikanan	Meningkatnya pelayanan perizinan usaha perikanan	dokumen	110	150	140	190	-	190	263	190	289	190	303	190	318	190	334	DKP		
			Meningkatnya Produksi perikanan tangkap	Meningkatnya Produksi perikanan tangkap	ton	217.027,9	217.950	3.995	220.586	-	223.256	3.975	225.957	4.094	228.691	4.299	231.459	4.514	231.459	4.739	DKP		
			Meningkatnya Produksi Budidaya Laut	Meningkatnya Produksi Budidaya Laut	ton	215,5	218,99	350	231,80	-	248,72	1.050	268,57	1.155	291,9	1.328	317,29	1.527	317,29	1.757	DKP		
	Rehabilitasi, konservasi pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan	Rehabilitasi, konservasi pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan	Meningkatnya pengawasan kelautan dan kemaritiman	Meningkatnya pengawasan kelautan dan kemaritiman	kali	50	50	1.695	480	7.912	480	4.950	480	5.445	480	5.717	480	6.003	480	6.303	DKP		
Meningkatnya penataan tata ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil			Meningkatnya penataan tata ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	dokumen	0	1	400,0	1	-	1	315	1	347	1	381	0	-	1	-	1	-	DKP	
Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi laut			Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi laut	Kawasan	7	-	320	7	-	7	4.785	7	5.264	7	5.790	7	6.658	7	7.657	7	7.657	DKP	
Meningkatnya pemanfaatan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan			Meningkatnya pemanfaatan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan	pulau	13	-	1.265,5	17	-	19	2.645	21	2.909	23	3.200	25	3.520	25	3.872	25	3.872	DKP	
Peningkatan Produksi dan Produktifitas	Peningkatan Produksi dan Produktifitas	Peningkatan Produksi dan Produktifitas	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	%	10,28	11	1.850	11,6	5.848	11,38	3.073	11,50	3.269	11,74	3.923	12,10	4.707	12,10	5.649	DKP		
			Meningkatnya pemanfaatan teknologi tepat guna	Meningkatnya pemanfaatan teknologi tepat guna	Jenis	6	6	350	6	-	6	315	6	331	6	364	6	400	6	440	6	440	DKP
			Penerapan pengendalian hama dan penyakit ikan	Penerapan pengendalian hama dan penyakit ikan	kasus	14	14	152,5	12	-	10	179	8	187	6	206	4	227	4	249	4	249	DKP
Peningkatan Sarana dan Prasarana	Peningkatan Sarana dan Prasarana	Meningkatnya sarana dan prasarana UPTD Perikanan Budidaya	Meningkatnya sarana dan prasarana UPTD Perikanan Budidaya	unit		77	18.797,3	62	9.831,0	62	6.404	71	6.725	14	6.859	10	7.202	10	7.562	DKP			

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR		OPD PENANGGUNG JAWAB		
							2016		2017		2018		2019		2020					2021	
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)				Target	Rp. (Jt)
		URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN									49.414		65.965		72.059		80.728		80.728		
		Pengembangan Ekonomi Maritim		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan	jenis	0				2	13.929	2	18.311	2	20.002	2	22.408	2	22.408,4	DKP	
				Meningkatnya Sarana dan Prasarana UPTD Pelabuhan	unit	2				2		2		2		2		2		DKP	
				Meningkatnya pelayanan perizinan usaha perikanan	dokumen	110				190		190		190		190		190		DKP	
				Meningkatnya Produksi perikanan tangkap	ton	217.027,9				223.256		225.957		228.691		231.459		231.459		DKP	
				Meningkatnya Produksi Budidaya Laut	ton	215,5				248,72		268,57		291,9		317,29		317,29		DKP	
		Rehabilitasi, konservasi pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan		Meningkatnya pengawasan kelautan dan kemaritiman	kali	50				480	10.871	480	9.992	480	10.915	480	12.228	480	12.228,2	DKP	
				Meningkatnya penataan tata ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	dokumen	0				1		1		1		0		1		DKP	
				Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi laut	Kawasan	7				7		7		7		7		7		DKP	
				Meningkatnya pemanfaatan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan	pulau	13				19		21		23		25		25		DKP	
		Peningkatan Produksi dan Produktifitas		Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	%	10,28				11,38	7.235	11,50	4.845	11,74	5.293	12,10	5.929	12,10	5.929,3	DKP	
				Meningkatnya pemanfaatan teknologi tepat guna	Jenis	6				6		6		6		6		6		DKP	
				Penerapan pengendalian hama dan penyakit ikan	kasus	14				10		8		6		4		4		DKP	
		Peningkatan Sarana dan Prasarana		Meningkatnya sarana dan prasarana UPTD Perikanan Budidaya	unit					62	4.900	71	18.400	14	20.100	10	22.518	10	22.517,9	DKP	
				Meningkatnya sarana penggunaan alsintan dan sarana prasarana kelautan dan perikanan	Jenis	3				3		3		3		3		3		DKP	
		Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis		Berkembangnya kawasan Sentra Produksi Perikanan	Kawasan	15				15	1.900	15	1.165	15	1.273	15	1.426	15	1.425,7	DKP	
				Berkembangnya kawasan Minapolitan	Kawasan	5				7		7		8		8		8		DKP	
				Meningkatnya Daerah sumber benih ikan	daerah	1				7		7		8		8		8		DKP	
				Meningkatnya penerapan standarisasi dan sertifikasi perikanan budidaya	unit	58				200		250		300		350		350		DKP	
				Meningkatnya usaha dan investasi kelautan dan perikanan	milyar	189				195		196		198		200		200		DKP	
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM		Meningkatnya SDM Aparatur dan pelaku usaha kelautan dan perikanan	orang					952	7.119	1.002	8.791	1.032	9.604	1.062	10.759	1.062	10.758,9	DKP	
				Meningkatnya kapasitas kelompok dan kelembagaan perikanan	kelompok	10				20		25	-	30	-	35	-	35	-	DKP	

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR		OPD PENANGGUNG JAWAB		
							2016		2017		2018		2019		2020					2021	
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)				Target	Rp. (Jt)
		Pengolahan dan Pemasaran Hasil		Meningkatnya produksi olahan hasil perikanan	ton	17.585					20.087	3.460	20.890	4.461	21.726	4.873	22.595	5.459	22.595	5.459,2	DKP
				Meningkatnya nilai ekspor produk hasil perikanan	milyar	100					16.130		16.473		17.783		18.673		18.673	-	DKP
				Meningkatnya pengendalian dan pengawasan mutu pengolahan hasil perikanan	sampel	630					590		620		650		680		680	-	DKP

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR		OPD PENANGGUNG JAWAB		
	TAHUN 2016	TAHUN 2017-2021	TAHUN 2016	TAHUN 2017-2021			2016		2017		2018		2019		2020		2021			Target	Rp. (Jt)
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)			
		TAHUN 2017 :		TAHUN 2017 :																	
	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	DINAS PARIWISATA		DINAS PARIWISATA			27.929		49.503		31.339		33.909		36.770		39.735		39.735		
	URUSAN PARIWISATA	URUSAN PARIWISATA					27.929		49.503		31.339		33.909		36.770		39.735		39.735		
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrai perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrai perkantoran	%	100	100	4.044	100	2.476	100	4.459	100	4.681	100	4.916	100	5.161	100	5.161	Dinas Pariwisata
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pelayanan Pemeliharaan	Persentase berfungsi sarana dan prasarana aparatur	%	100	100	4.261	100	694	100	4.698	100	4.933	100	5.426	100	5.968	100	5.968	Dinas Pariwisata
	Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan disiplin aparatur	Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	stel	98	98	53	98	55	98	58	98	61	98	67	98	74	98	74	Dinas Pariwisata
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas SDM aparatur	Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat	%	100	100	133	100	82	100	147	100	154	100	169	100	186	100	186	Dinas Pariwisata
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya tertib administrasi keuangan	Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD	%	100	100	445	100	360	100	491	100	515	100	567	100	623	100	623	Dinas Pariwisata
		Perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dan asset								225											Dinas Pariwisata
	Program pengembangan destinasi dan daya tarik pariwisata	Program pengembangan destinasi dan daya tarik pariwisata	Jumlah destinasi wisata yang berkembang	Jumlah destinasi wisata yang berkembang	destinasi	3	3	6.957	4	34.488	4	7.903	4	8.693	5	9.476	5	10.329	5	10.329	Dinas Pariwisata
	Program pengembangan Kelembagaan, SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Program pengembangan Kelembagaan, SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Peningkatan tenaga kerja pariwisata yang memiliki sertifikat profesi	Peningkatan tenaga kerja pariwisata yang memiliki sertifikat profesi	orang	185	235	2.178	285	966	335	2.470	385	2.717	435	2.961	485	3.198	485	3.198	Dinas Pariwisata
					%		27,03		54,05		81,08		108,11		135,14		162,16		162,16		Dinas Pariwisata
			Peningkatan SDM ekraf berbasis Seni dan Budaya yang meningkat kompetensinya	Peningkatan SDM ekraf berbasis Seni dan Budaya yang meningkat kompetensinya	orang	10	30		50		70		90		110		130		130		Dinas Pariwisata
					%		200		400		600		800		1.000		1.200		1200		Dinas Pariwisata
			Peningkatan SDM ekraf berbasis Media, Desain dan Ipek yang meningkat kompetensinya	Peningkatan SDM ekraf berbasis Media, Desain dan Ipek yang meningkat kompetensinya	orang	20	40		60		80		100		120		140		140		Dinas Pariwisata
					%		100		200		300		400		500		600		600		Dinas Pariwisata
	Program pengembangan ekonomi kreatif	Program pengembangan ekonomi kreatif	Peningkatan pemberdayaan (omset/modal/tenaga kerja) pelaku ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya	Peningkatan pemberdayaan (omset/modal/tenaga kerja) pelaku ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya	pelaku	36	66	4.458	96	4.467	126	4.991	156	5.440	186	5.875	216	6.297	216	6.297	Dinas Pariwisata
					%		83,33		166,67		222,22		333,33		416,67		500,00		500,00		Dinas Pariwisata
			Peningkatan pemberdayaan (omset/modal/tenaga kerja) pelaku ekonomi kreatif berbasis media, desain dan	Peningkatan pemberdayaan (omset/modal/tenaga kerja) pelaku ekonomi kreatif berbasis media, desain dan	pelaku	17	37		57		77		97		117		137		137		Dinas Pariwisata
					%		117,65		235,29		352,94		470,59		588,24		705,88		705,88		Dinas Pariwisata
	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara	Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara	%	78,274	10,25	5.400	15,25	5.691	20,25	6.124	25,25	6.714	30,25	7.313	35,25	7.898	35,25	7.898	Dinas Pariwisata
			Peningkatan kunjungan wisatawan nusantara	Peningkatan kunjungan wisatawan nusantara	%	6.973.678	6,02		9,02		12,02		15,02		18,02		21,02		21,02		Dinas Pariwisata

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR		OPD PENANGGUNG JAWAB		
							2016		2017		2018		2019		2020					2021	
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)				Target	Rp. (Jt)
		TAHUN 2018-2021 :		TAHUN 2018-2021 :																	
		DINAS PARIWISATA		DINAS PARIWISATA							31.339		33.909		36.770		49.261		49.261		
		NON URUSAN									10.104		6.848		7.426		9.949		9.949		
		Pelayanan Administrasi Perkantoran		Meningkatnya pelayanan administrai perkantoran	%	100				100	4.537	100	2.854	100	3.095	100	4.146	100	4.146	Dinas Pariwisata	
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase berfungsi sarana dan prasarana aparatur	%	100				100	4.762	100	3.010	100	3.264	100	4.373	100	4.373	Dinas Pariwisata	
		Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	stel	98				98	57	98	60	98	65	98	87	98	87	Dinas Pariwisata	
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat	%	100				100	147	100	170	100	184	100	247	100	247	Dinas Pariwisata	
		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD	%	100				100	600	100	754	100	818	100	1.096	100	1.096	Dinas Pariwisata	
		URUSAN PARIWISATA									21.235		27.061		29.344		39.312		39.312		
		Pengembangan destinasi dan daya tarik pariwisata		Jumlah destinasi wisata yang berkembang	destinasi	3				4	6.720	4	7.734	5	8.387	5	11.236	5	11.236	Dinas Pariwisata	
		Pengembangan Kelembagaan, SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		Persentase peningkatan tenaga kerja	orang	185				335	2.471	385	2.658	435	2.882	485	3.861	485	3.861	Dinas Pariwisata	
					%					81,08		108,11		135,14		162,16		162,16	Dinas Pariwisata		
				Peningkatan SDM ekraf berbasis Seni dan Budaya yang meningkat kompetensinya	orang	10				70		90		110		130		130		Dinas Pariwisata	
				Peningkatan SDM ekraf berbasis Media, Desain dan Ipek yang meningkat kompetensinya	orang	20				80		100		120		140		140		Dinas Pariwisata	
		Pengembangan ekonomi kreatif		Peningkatan pemberdayaan (omset/modal/tenaga kerja) pelaku ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya	pelaku	36				126	4.991	156	5.440	186	5.899	216	7.903	216	7.903	Dinas Pariwisata	
				Peningkatan pemberdayaan (omset/modal/tenaga kerja) pelaku ekonomi kreatif berbasis media, desain dan	pelaku	17				77		97		117		137		137		Dinas Pariwisata	
		Pengembangan pemasaran pariwisata		Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara	%	78.274				20,25	7.054	25,25	11.229	30,25	12.176	35,25	16.312	35,25	16.312	Dinas Pariwisata	
				Peningkatan kunjungan wisatawan nusantara	%	6.973.678				12,02		15,02		18,02		21,02		21,02		Dinas Pariwisata	

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR		OPD PENANGGUNG JAWAB
	TAHUN 2016	TAHUN 2017-2021	TAHUN 2016	TAHUN 2017-2021		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp. (Jt)	
						Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)			
		TAHUN 2017 :		TAHUN 2017 :														
	DINAS PERTANIAN	DINAS TANAMAN PANGAN,HORTIKULTURADAN PERKEBUNAN		DINAS TANAMAN PANGAN,HORTIKULTURADAN PERKEBUNAN			59.445		83.042			89.715			97.255		105.404	110.634
	URUSAN PENDIDIKAN	URUSAN PENDIDIKAN					2.525		6.184			6.691			7.242		7.840	7.840
	Peningkatan SDM Pertanian	Program Peningkatan SDM Pertanian	Persentase Peningkatan SDM Pertanian	Persentase Peningkatan SDM Pertanian	%	25,00	1.425	35,00	1.206	45,00	1.305	55,00	1.413	65	1.529	65	1.529	Pertanian
	Peningkatan sarana dan Prasarana Pendidikan Pertanian	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Pertanian	Tersedianya sarana dan Prasarana Pendidikan Pertanian	Tersedianya sarana dan Prasarana Pendidikan Pertanian	%	0,50	1.100	0,40	4.978	0,30	5.386	0,20	5.829	0,10	6.311	0,10	6.311	Pertanian
	URUSAN PERTANIAN	URUSAN PERTANIAN					56.596		53.621			58.016			62.792		67.985	73.215
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrai perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	%	100	5.583	100	3.770	100	4.079	100	4.417	100	4.778	100	4.778	Pertanian
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pelayanan Pemeliharaan	Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	%	100	2.081	100	2.581	100	2.792	100	3.022	100	3.272	100	3.543	Pertanian
	Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan disiplin aparatur	Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	%	100	429	100	337	100	364	100	394	100	427	100	462	Pertanian
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas SDM aparatur	Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat	JPL/orang/ tahun		68		-		-		-		-		-	Pertanian
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya tertib administrasi keuangan	Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD	%	100	835	100	1.013	100	1.096	100	1.187	100	1.285	100	1.391	Pertanian
		Perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dan aset					850											Dinas TP, Hortikultura & Perkebunn
1	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis	Persentase Peningkatan kawasan sentra produksi	Persentase Peningkatan kawasan sentra produksi	%	1,45	7.701	2,13	724	2,84	783	3,51	848	4,16	918	4	994	Pertanian
2	Peningkatan Produksi dan produktifitas	Peningkatan Produksi dan produktifitas	Persentase Peningkatan Produksi pertanian	Persentase Peningkatan Produksi pertanian	%	9,4	14.890	13,2	4.803	17,1	5.196	21,6	5.624	25	6.089	25	6.593	Pertanian
3	Peningkatan Sarana dan Prasarana	Peningkatan Sarana dan Prasarana	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana	%	10	9.551	15	36.517	20	39.509	25	42.761	30	46.299	30	50.131	Pertanian
4	Pengolahan dan Pemasaran Hasil	Pengolahan dan Pemasaran Hasil	Persentase Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran	Persentase Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran	%	4	6.287	5	2.155	6	2.332	7	2.524	8	2.733	8	2.959	Pertanian
5	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM	Persentase Peningkatan SDM Aparatur dan Pelaku Usaha Pertanian	Persentase Peningkatan SDM Aparatur dan Pelaku Usaha Pertanian	%	30	8.321	45	1.722	60	1.864	75	2.017	90	2.184	90	2.365	Pertanian
	URUSAN PERTANIAN	URUSAN PERTANIAN					-		17.088			18.355			20.020		21.783	21.783
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrai perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	%	100	-	100	1.800	100	1.910	100	1.957	100	1.995	100	1.995	Perkebunan
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pelayanan Pemeliharaan	persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	%	100	-	100	2.725	100	2.735	100	2.983	100	3.113	100	3.113	Perkebunan
	Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan disiplin aparatur	Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	%	100	-	100	0,080	100	0,080	100	0,085	100	0,085	100	0,085	Perkebunan
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas SDM aparatur	Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat	JPL/orang/ tahun	3	-	3	0,120	4	0,140	4	0,150	4	0,150	4	0,150	Perkebunan

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR		OPD PENANGGUNG JAWAB
						2017		2018		2019		2020		2021				
						TAHUN 2016	TAHUN 2017-2021	TAHUN 2016	TAHUN 2017-2021	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya tertib administrasi keuangan	Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD	%	100	-	100	0.862	100	0,962	100	0,993	100	0,993	100	0,993	Perkebunan
1	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis	Persentase Peningkatan kawasan sentra produksi	Persentase Peningkatan kawasan sentra produksi	Kawasan	34	-	36	2.600	38	2.778	40	2.987	40,00	3.147	40	3.147	Perkebunan
2	Peningkatan Produksi dan produktifitas	Peningkatan Produksi dan produktifitas	Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan	Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan	%	72	-	73	3.700	74	3.987	75	4.229	76	4.689	76	4.689	Perkebunan
3	Peningkatan Sarana dan Prasarana	Peningkatan Sarana dan Prasarana	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana	UPTD	2	-	2	1.968	2	2.115	2	2.456	2	2.731	2	2.731	Perkebunan
4	Pengolahan dan Pemasaran Hasil	Pengolahan dan Pemasaran Hasil	Persentase Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran	Persentase Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran	UPH	5	-	6	2.500	7	2.975	8	3.370	9	3.703	9	3.703	Perkebunan
5	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM	Persentase Peningkatan SDM Petani dan Pelaku Usaha Perkebunan	Persentase Peningkatan SDM Petani dan Pelaku Usaha Perkebunan	Petani	300	-	450	1.795	600	1.855	750	2.038	900	2.405	900	2.405	Perkebunan
					Pelaku Usaha	14	-	16		18		20		22		22		
	URUSAN PERTANIAN	URUSAN PERTANIAN							324		6.149		6.653		7.201		7.796	7.796
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrai perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	%	100	-	100	845	100	845	100	845	100	845	100	845	Bakorluh
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pelayanan Pemeliharaan	persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	%	100	-	100	256	100	252	100	253	100	283	100	283	Bakorluh
	Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan disiplin aparatur	Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	%	100	-	100	28	100	30	100	30	100	30	100	30	Bakorluh
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas SDM aparatur	Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat	JPL/orang/ tahun	1	-	1	9	1	14	1	28	1	28	1	28	Bakorluh
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya tertib administrasi keuangan	Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD	%	100	-	100	401	100	500	100	500	100	500	100	500	Bakorluh
	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM	Persentase Peningkatan SDM Aparatur dan Pelaku Usaha Pertanian dan Perikanan	Persentase Peningkatan SDM Aparatur dan Pelaku Usaha Pertanian dan Perikanan	%	20	-	25	4.131	30	4.471	35	4.855	40	5.420	40	5.420	Bakorluh
	Pemberdayaan penyuluhan	Pemberdayaan penyuluhan	Persentase kawasan terintegrasi dalam melaksanakan optimalisasi penyuluhan	Persentase kawasan terintegrasi dalam melaksanakan optimalisasi penyuluhan	%	15	324	15	479	15	541	15	690	15	690	15	690	Bakorluh
		TAHUN 2018-2021 :		TAHUN 2018-2021 :														
		DINAS TANAMAN PANGAN,HORTIKULTURADAN PERKEBUNAN		DINAS TANAMAN PANGAN,HORTIKULTURADAN PERKEBUNAN					59.805		68.543		75.490		85.490		85.490	
		NON URUSAN							11.918		13.810		15.210		17.225		17.225	
		Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase pelayanan administrasi perkantoran	%			100	6.237	100	7.310	100	8.051	100	9.118	100	9.118	Dinas TP, Hortikultura & Perkebunn
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	%			100	3.289	100	3.891	100	4.285	100	4.853	100	4.853	Dinas TP, Hortikultura & Perkebunn

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR		OPD PENANGGUNG JAWAB
						2017		2018		2019		2020		2021				
						TAHUN 2016	TAHUN 2017-2021	TAHUN 2016	TAHUN 2017-2021	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	
		Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase disiplin aparaturnya dalam berpakaian dinas	%			100	451	100	451	100	496	100	562	100	562	Dinas TP, Hortikultura & Perkebunan
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat	JPL/orang/tahun			100	75	100	150	100	165	100	187		187	Dinas TP, Hortikultura & Perkebunan
		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD	%			100	1.866	100	2.008	100	2.212	100	2.505	100	2.505	Dinas TP, Hortikultura & Perkebunan
		URUSAN PENDIDIKAN							1.977		1.952		2.150		2.435		2.435	
		Peningkatan SDM Pertanian		Persentase Peningkatan SDM Pertanian	%			35,00	524	45,00	902	55,00	994	65,00	1.125	100	1.125	Dinas TP, Hortikultura & Perkebunan
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Pertanian		Tersedianya sarana dan Prasarana Pendidikan Pertanian	%			0,40	1.453	0,30	1.050	0,20	1.156	0,10	1.310	0,10	1.310	Dinas TP, Hortikultura & Perkebunan
		URUSAN PERTANIAN							45.911		52.780		58.130		65.830		65.830	
		Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis						90,00	7.440	94,00	8.046	96,00	8.862	99,00	10.036	99,00	10.036	Dinas TP, Hortikultura & Perkebunan
				Persentase peningkatan kawasan sentra produksi TPH	%			60,00		62,00		63,00		65,00				
				Persentase peningkatan kawasan sentra produksi Perkebunan	%			30,00		32,00		33,00		34,00				
		Peningkatan Produksi dan produktifitas						49,82	19.471	55,50	20.511	46,73	22.590	63,41	25.582	63,41	25.582	Dinas TP, Hortikultura & Perkebunan
				Persentase peningkatan produksi Tanaman Pangan Hortikultura	%			15,65		15,17		14,77		19,96				
				- Padi				1,96		1,92		1,89		1,85				
				- Jagung				6,67		6,25		5,88		11,11				
				- Manggis				3,02		3,00		3,00		3,00				
				- Cabe				2,00		2,00		2,00		2,00				
				- Bawang Merah				2,00		2,00		2,00		2,00				
				Persentase peningkatan produksi Perkebunan	%			34,17		40,33		31,96		43,45				
				- Kakao				22,40		19,00		16,60		14,75				
				- Karet				0,69		5,26		0,68		5,05				
				- Kelapa Sawit				8,08		13,07		11,68		20,65				
			- Kopi				2,00		2,00		2,00		2,00					
			- Lain - lain				1,00		1,00		1,00		1,00					
		Peningkatan Sarana dan Prasarana						17,00	3.609	22,00	4.390	27,00	4.835	32,00	5.475	32,00	5.475	Dinas TP, Hortikultura & Perkebunan
				Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana TPH	%			15,00		20,00		25,00		30,00				
				Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkebunan	%			2,00		2,00		2,00		2,00				

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR		OPD PENANGGUNG JAWAB
						2017		2018		2019		2020		2021				
						TAHUN 2016	TAHUN 2017-2021	TAHUN 2016	TAHUN 2017-2021	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	
		Pengolahan dan Pemasaran Hasil						11,00	4.736	12,00	7.602	15,00	8.373	17,00	9.482	17,00	9.482	Dinas TP, Hortikultura & Perkebunn
				Persentase Pengolahan dan Pemasaran Hasil TPH	%			5,00		5,00		7,00		8,00				
				Persentase Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	%			6,00		7,00		8,00		9,00				
		Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM						58,00	10.115	79,00	11.666	100,00	12.848	121,00	14.551	121,00	14.551	Dinas TP, Hortikultura & Perkebunn
				Persentase peningkatan SDM Aparatur dan Pelaku Usaha TPH	%			30,00		45,00		60,00		75,00				
				Persentase peningkatan SDM Aparatur dan Pelaku Usaha Perkebunan	%			3,00		4,00		5,00		6,00				
				Persentase peningkatan SDM Aparatur dan Penyuluhan	%			25,00		30,00		35,00		40,00				
		Pemberdayaan penyuluhan						15,00	538	15,00	565	15,00	622	15,00	704	15,00	704	Dinas TP, Hortikultura & Perkebunn
				Persentase kawasan terintegrasi dalam melaksanakan optimalisasi penyuluhan	%													

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR		OPD PENANGGUNG JAWAB		
	TAHUN 2016	TAHUN 2017-2021	TAHUN 2016	TAHUN 2017-2021			2016		2017		2018		2019		2020		2021			Target	Rp. (Jt)
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)			
		TAHUN 2017 :		TAHUN 2017 :																	
	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN			49.104	26.495		54.958		59.462		64.357		69.679		69.679			
	URUSAN PERTANIAN	URUSAN PERTANIAN					49.104	26.495		54.958		59.462		64.357		69.679		46.974			
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrai perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	2.783	100	3.223	100	3.969	100	4.369	100	4.757	100	5.093	100	5.093	Peternakan & Keswan
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pelayanan Pemeliharaan	persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	%	100	100	2.489	100	788	100	1.470	100	2.095	100	1.565	100	2.275	100	2.275	Peternakan & Keswan
	Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan disiplin aparatur	Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	%	100	156	78	160	84	160	95	160	100	160	105	160	110	160	110	Peternakan & Keswan
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas SDM aparatur	Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat	JPL/orang/ tahun	8	8	126	8	-	8	126	8	126	8	126	8	126	8	126	Peternakan & Keswan
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya tertib administrasi keuangan	Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD	%	100	10	762	10	553	10	1.219	10	1.309	10	1.402	10	1.503	10	1.503	Peternakan & Keswan
		Perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dan asset								571											Peternakan & Keswan
	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis	Persentase Peningkatan kawasan sentra produksi	Persentase Peningkatan kawasan sentra produksi	Kawasan	14 Kawasan	14	252	16	335	18	585	20	646	22	710	24	779	24	779	Peternakan & Keswan
			Persentase Peningkatan kawasan agribisnis	Persentase Peningkatan kawasan agribisnis	Kawasan	-			1		1		1		1		1		1		
	Peningkatan Produksi dan produktifitas	Peningkatan Produksi dan produktifitas	Persentase Peningkatan Produksi Daging	Persentase Peningkatan Produksi Daging	%	3,13	1,22	4.531	1,49	14.444	1,61	20.268	1,74	22.323	1,86	25.969	2,11	28.886	2,11	28.886	Peternakan & Keswan
			Persentase Peningkatan Produksi Telur	Persentase Peningkatan Produksi Telur	%		0,69		0,96		1,13		1,34		1,62		2,04		2,04		
	Peningkatan Sarana dan Prasarana	Peningkatan Sarana dan Prasarana	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana	UPTD	4	4	16.068	4	1.223	4	7.471	4	7.852	4	7.928	4	8.202	4	8.202	Peternakan & Keswan
	Pengolahan dan Pemasaran Hasil	Pengolahan dan Pemasaran Hasil	Persentase Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran	Persentase Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran	kelompok	10	11	14.142	13	1.355	14	6.974	15	7.054	16	7.134	17	7.249	17	7.249	Peternakan & Keswan
	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM	Persentase Peningkatan SDM Aparatur dan Pelaku Usaha Peternakan	Persentase Peningkatan SDM Aparatur dan Pelaku Usaha Peternakan	Orang	150 kelompok	200	2.947	200	1.580	200	6.577	200	7.081	200	7.829	200	8.282		8.282	Peternakan
			Persentase Peningkatan Kelembagaan Peternakan	Persentase Peningkatan Kelembagaan Peternakan	Pelaku Usaha	5 pelaku usaha	7		9		11		13		15		17				
	Pengamanan sumber daya hewani	Pengamanan sumber daya hewani	Meningkatnya Pengamanan sumber daya hewani	Meningkatnya Pengamanan sumber daya hewani	%	0,6	0,6	4.926	0,5	2.340	0,4	6.204	0,3	6.507	0,2	6.833	0,1	7.174	0,1	7.174	Peternakan & Keswan
		TAHUN 2018-2021 :		TAHUN 2018-2021 :																	
	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN							54.958		59.462		64.357		72.357		72.357		
	NON URUSAN	NON URUSAN									9.527		9.176		9.931		11.165		11.165		
		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	%	100					100	4.152	100	4.853	100	5.252	100	5.905	100	5.905	Peternakan & Keswan
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	%	100					100	3.949	100	2.525	100	2.733	100	3.073	100	3.073	Peternakan & Keswan

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR		OPD PENANGGUNG JAWAB		
							2016		2017		2018		2019		2020					2021	
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)				Target	Rp. (Jt)
		Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	%	100					160	95	160	120	160	130	160	146	160	146	Peternakan & Keswan
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat	JPL/orang/ tahun	8					8	126	8	126	8	136	8	153	8	153	Peternakan & Keswan
		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD	%	100					10	1.205	10	1.552	10	1.680	10	1.889	10	1.889	Peternakan & Keswan
		URUSAN PERTANIAN									45.431	50.287		54.426	61.192	61.192					
		Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis		Persentase Peningkatan kawasan sentra produksi	%	14 Kawasan					18	675	20	775	22	839	24	943	24	943	Peternakan & Keswan
				Peningkatan kawasan agribisnis	Kawasan	-					1		1	1		1		1		1	
		Peningkatan Produksi dan produktifitas		Persentase Peningkatan Produksi Daging	%	3,13					1,44	25.694	1,55	26.274	1,66	28.437	1,75	31.972	1,75	31.972	Peternakan & Keswan
		Peningkatan Sarana dan Prasarana		Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana	%	4					4	4.676	4	7.195	4	7.787	4	8.755	4	8.755	Peternakan & Keswan
		Pengolahan dan Pemasaran Hasil		Persentase Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran	%	10					14	2.690	15	2.742	16	2.968	17	3.337	17	3.337	Peternakan & Keswan
		Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM		Peningkatan SDM Aparatur dan Pelaku Usaha Peternakan	kelompok	150 kelompok					200	4.808	200	5.248	200	5.680	200	6.386	200	6.386	Peternakan
				Peningkatan Kelembagaan Peternakan	Pelaku Usaha	5 pelaku usaha					11		13	15		17					
		Pengamanan sumber daya hewani		Meningkatnya Pengamanan sumber daya hewani	%	0,6					0,4	6.888	0,3	8.053	0,2	8.716	0,1	9.799	0,1	9.799	Peternakan & Keswan

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR		OPD PENANGGUNG JAWAB		
	TAHUN 2016	TAHUN 2017-2021	TAHUN 2016	TAHUN 2017-2021			2016		2017		2018		2019		2020		2021			Target	Rp. (Jt)
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)			
		TAHUN 2017 :		TAHUN 2017 :																	
	DINAS KEHUTANAN	DINAS KEHUTANAN		DINAS KEHUTANAN			16.144	23.021	17.849	19.325	20.920	22.649	8.948								
	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP					6.157	9.037	5.566	6.014	6.857	8.429	100.995									
	Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam	Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam IKLH	Persentase jumlah kasus illegal logging yang tertangani	Persentase jumlah kasus illegal logging yang tertangani	%	100	100	998	100	5.316	100	2.288	100	2.471	100	2.669	100	2.882	100	2.882	Dishut
	Peningkatan Kualitas dan Akses informasi sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Peningkatan Kualitas dan Akses informasi sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase Kabupaten/Kota yang menyampaikan data kehutanan secara akurat dan tepat waktu	Kabupaten/Kota yang menyampaikan data kehutanan secara akurat dan tepat waktu	%	58	68,00	278	74	500	79	719	84	777	100	839	100	906	100	906	Dishut
	Pengendalian Kebakaran Hutan	Pengendalian Kebakaran Hutan	Persentase penurunan jumlah titik panas (hot spot) dari angka rerata periode tahun sebelumnya	Persentase penurunan jumlah titik panas (hot spot) dari angka rerata periode tahun sebelumnya	%	5	253	10	403	1.426	435	20	470	25	508	30	549	30	100	549	Dishut
					titik api	424	403		383		364		346		328		312		312		
	Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Indeks tutupan lahan	Indeks tutupan lahan	%	63,97	63,55	4.872	63,11	1.795	62,69	2.538	62,27	2.741	61,84	3.319	61,41	4.611	61	4.611	Dishut
			Penurunan Lahan Kritis	Penurunan Lahan Kritis	Ha	630.695	0,32		0,63		0,95		1,27		1,59		1,9		1,90		Dishut
	URUSAN KEHUTANAN						9.987	13.984	12.283	13.310	14.063	14.219	14.219								
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	1.761	100	3.181	100	3.520	100	3.520	100	3.797	100	4.097	100	4.097	Dishut
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	%	100	100	5.273	100	1.100	100	1.921	100	2.497	100	2.380	100	1.606	100	1.606	Dishut
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat	%	100	100	106	100	155	100	200	100	200	100	216	100	233	100	233	Dishut
	Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase disiplin aparatur	%	100	100	106	100	309	100	200	100	200	100	216	100	233	100	233	Dishut
	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD	%	100	100	316	100	699	100	507	100	508	100	552	100	596	100	596	Dishut
		Perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dan asset							1.384												Dishut
	Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Optimalisasi PNPB sektor kehutanan	Optimalisasi PNPB sektor kehutanan	%	76	80	1.050	81	2.135	82	2.016	83	2.151	84	2.328	85	2.515	85	2.515	Dishut
	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Meningkatnya ketersediaan jumlah bibit yang berkualitas	Persentase penurunan luas lahan kritis	%	193.800	0,18	513	0,42	1.885	0,68	702	1,07	758	1,52	819	1,71	884	1,71	884	Dishut
					Batang	200.490		213.180		222.870		232.560		242.250		251.940		1.366.290			
	Perencanaan dan Pengembangan Hutan	Perencanaan dan Pengembangan Hutan	Peningkatan luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat/kemitraan dari tahun sebelumnya	Peningkatan luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat/kemitraan dari tahun sebelumnya	%	100.000	5,32	463	8,50	1.998	11,68	2.025	14,86	2.187	18,03	2.362	21,21	2.551	21,21	2.551	Dishut
			Pemantauan	Pemantauan	Ha	50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		400.000			
	Perencanaan Makro dan Pemantapan Kawasan Hutan	Perencanaan Makro dan Pemantapan Kawasan Hutan	Persentase unit penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan perizinan	Persentase pemantauan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukan	%	100,00	100,00	399	100,00	1.138	100,00	1.193	100,00	1.289	100	1.392	100	1.503	100	1.503	Dishut

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR		OPD PENANGGUNG JAWAB		
	TAHUN 2016	TAHUN 2017-2021	TAHUN 2016	TAHUN 2017-2021			2016		2017		2018		2019		2020		2021			Target	Rp. (Jt)
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)			
		TAHUN 2018-2021 :		TAHUN 2018-2021 :																	
		DINAS KEHUTANAN									17.849		24.220		27.724		39.873		39.873		
		NON URUSAN									5.757		6.338		7.494		10.778		10.778		
		Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase pelayanan administrasi perkantoran	%	100			100	2.677	100	3.223	100	3.602	100	5.180	100	5.180	Dishut		
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	%	100		100	1.750	100	1.365	100	2.179	100	3.133	100	3.133	Dishut			
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat	%	100		100	200	100	220	100	242	100	348	100	348	Dishut			
		Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase disiplin aparatur	%	100		100	310	100	450	100	500	100	719	100	719	Dishut			
		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD	%	100		100	821	100	1.080	100	971	100	1.397	100	1.397	Dishut			
		URUSAN LINGKUNGAN HIDUP								5.921		-		-		-		-			
		Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam		Persentase jumlah kasus illegal logging yang tertangani	%	100		100	2.288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dishut		
				Persentase penurunan laju kerusakan hutan	%	100															
		Peningkatan Kualitas dan Akses informasi sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup		Persentase Pengembangan Sistem dan Akses Informasi Sumberdaya alam dan lingkungan hidup	%	58		100	1.075	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dishut		
		Pengendalian Kebakaran Hutan		Persentase penurunan jumlah titik panas (hot spot) dari angka rerata periode tahun sebelumnya	%	5		15	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dishut		
		Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam		Indeks tutupan hutan	%	63,55		62,69	2.538	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dishut		
				Penurunan Lahan Kritis	Ha	630.695		1,09											Dishut		
		URUSAN KEHUTANAN									6.171		17.882		20.230		29.095		29.095		
		Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam		Persentase penurunan laju kerusakan hutan	Ha	65.062						6,15	4.642	7,15	5.161	8,15	7.422	8,15	7.422	Dishut	
		Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup		Persentase pengembangan sistem dan akses informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup	%	58						100	1.326	100	1.453	100	2.089	100	2.089	Dishut	
		Pengendalian Kebakaran Hutan		Persentase penurunan jumlah titik panas (Hot Spot) dari angka rerata periode tahun sebelumnya (2011-2015)	%	5						20	1.426	25	1.674	30	2.407	30	2.407	Dishut	
		Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam		Indeks tutup hutan	%	63,55						62,27	3.400	61,84	3.675	61,41	5.286	61	5.286	Dishut	

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR		OPD PENANGGUNG JAWAB		
							2016		2017		2018		2019		2020					2021	
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)				Target	Rp. (Jt)
			Persentase penurunan luas lahan kritis	Ha	630.695	-	-	-	-	1,09	-	2,00	-	2,21	-	2,26	-	-	Dishut		
		Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Optimalisasi PNPB sektor kehutanan dari HHK dan HHBK	%	76	-	-	-	-	82	2.016	83	350	84	385	85	554	85	554	Dishut	
			Persentase Pencapaian Target Produksi HHK dan HHBK	%	76	-	-	-	-	-	-	83	2.956	84	3.385	85	4.868	85	4.868		
		Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Persentase penurunan luas lahan kritis	%	193.800	-	-	-	-	1,09	702	-	-	-	-	-	-	-	-	Dishut	
		Perencanaan dan Pengembangan Hutan	Peningkatan luas kawasan hutan yang dikelola oleh msyarakat/kemitraan dari tahun sebelumnya	%	100.000	-	-	-	-	11,68	2.260	-	-	-	-	-	-	-	-	Dishut	
		Perhutanan Sosial dan Kemitraan	Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	%	100.000	-	-	-	-	-	-	14,86	2.585	18,03	3.164	21,21	4.551	21,21	4.551	Dishut	
		Perencanaan Makro dan Pemantapan Kawasan Hutan	Persentase pemantauan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukan	%	100,00	-	-	-	-	100	1.193	-	-	-	-	-	-	-	-	Dishut	
		Pemantapan Kawasan Hutan	Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya	%	100,00	-	-	-	-	-	-	100	1.198	100	1.334	100	1.919	100	1.919	Dishut	

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR		OPD PENANGGUNG JAWAB			
	TAHUN 2016	TAHUN 2017-2021	TAHUN 2016	TAHUN 2017-2021			2016		2017		2018		2019		2020		2021			Target	Rp. (Jt)	
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)				
		TAHUN 2017 :		TAHUN 2017 :																		
	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			8.351	23.069		9.368		10.139		10.973		11.881		11.881				
	URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					8.351	23.069		9.368		10.139		10.973		11.881		11.881				
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	%	100	2.242	100	1.903	100	2.438	100	2.733	100	3.036	100	3.186		3.186	Dinas ESDM		
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	%	100	702	100	627	100	577	100	635	100	698	100	768		768	Dinas ESDM		
	Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan Disiplin Aparatur	Terpenuhinya peningkatan disiplin aparatur	Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	%	100	52	100	91	100	66	100	72	100	79	100	87		87	Dinas ESDM		
	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Terpenuhinya peningkatan Sumber Daya Aparatur	Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat	%	100	215	100	200	100	330	100	363	100	399	100	439		439	Dinas ESDM		
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya capaian kinerja keuangan dan sistem pelaporan SKPD	Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD	%	100	225	100	285	100	280	100	308	100	339	100	373		373	Dinas ESDM		
Nilai LAKIP SKPD (minimal BB)				Skor	BB		BB		BB		BB		A		A							
Tingkat akurasi, kecep-atan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan				%	100		100		100		100		100		100		100		100			
Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra SKPD				%	100		100		100		100		100		100		100		100			
Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD				%	100		100		100		100		100		100		100		100			
		Perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dan asset							275		-		-		-		-			Dinas ESDM		
	Pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan	Pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan	Meningkatnya rasio elektrifikasi	Meningkatnya rasio elektrifikasi	%	83,38%	85	1.945	88,57	16.898	92,16	2.730	95,01	2.822	96,26	2.937	97,00	3.203	100%	3.203	Dinas ESDM	
	Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Energi	Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Energi	Tersedianya kebutuhan bahan bakar bagi masyarakat	Terwujudnya pelaksanaan konservasi energi	%	20	260	4,8	335	7,1	525	9,5	555	14,3	582	19,04	675	19,04	675	Dinas ESDM		
	Pembinaan dan pengawasan pertambangan	Pengelolaan Mineral dan Batubara	Jumlah IUP yang beroperasi sesuai dengan peraturan dan perundangan pertambangan mineral dan batubara	Meningkatnya persentase IUP yang dikelola secara baik dan benar	%	15	1.200	15	1.400	15	1.212	15	1.320	15	1.440	15	1.540	90	1.540	Dinas ESDM		
	Perencanaan dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Perencanaan dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Peningkatan kualitas perencanaan energi dan sumber daya mineral	Peningkatan kualitas perencanaan energi dan sumber daya mineral	%	100	610	100	150	100	330	100	363	100	399	100	439	100	439	Dinas ESDM		
	Pengelolaan, Pengembangan dan Konservasi Air Tanah	Pengelolaan, Pengembangan dan Konservasi Air Tanah	Jumlah izin pemanfaatan air tanah yang sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku	Persentase peningkatan jumlah perizinan air tanah sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku	%	58,71	63,3	900	68,8	905	75,22	880	82,56	968	90,82	1.064	100,00	1.171	100	1.171	Dinas ESDM	

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR		OPD PENANGGUNG JAWAB		
							2016		2017		2018		2019		2020					2021	
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)				Target	Rp. (Jt)
		TAHUN 2018-2021 :		TAHUN 2018-2021 :																	
		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL						9.076		15.461		17.698		29.628		29.628			
		NON URUSAN								3.493		4.682		5.359		8.972		8.972			
		Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase pelayanan administrasi perkantoran	%					100	2.294	100	2.242	100	2.566	100	4.296	100	4.296	Dinas ESDM	
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	%					100	738	100	1.640	100	1.877	100	3.143	100	3.143	Dinas ESDM	
		Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	%					100	66	100	80	100	92	100	153	100	153	Dinas ESDM	
		Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur		Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat	%					100	115	100	200	100	229	100	383	100	383	Dinas ESDM	
		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD	%					100	281	100	520	100	595	100	996	100	996	Dinas ESDM	
				Nilai LAKIP SKPD (minimal BB)	Skor					BB		BB		A		A		A			
				Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan	%					100		100		100		100		100			
				Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra SKPD	%					100		100		100		100		100			
				Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD	%					100		100		100		100		100			
		URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL								5.583		10.779		12.339		20.656		20.656			
		Pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan		Meningkatnya rasio elektrifikasi	%	83,38%				93,83	2.775	99,17	6.230	99,30	7.131	99,75	11.939	100	11.939	Dinas ESDM	
		Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Energi		Terwujudnya pelaksanaan konservasi energi	%					2	565	2	565	2	647	3	1.083	19,04	1.083	Dinas ESDM	
		Pengelolaan Mineral dan Batubara		Meningkatnya persentase IUP yang dikelola secara baik dan benar	%					15	1.333	15	2.321	15	2.657	15	4.448	90	4.448	Dinas ESDM	
		Pengelolaan, Pengembangan dan Konservasi Air Tanah		Persentase peningkatan izin penggunaan air tanah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku	%	58,71				50	858	68	1.120	89	1.282	100,00	2.146	100	2.146	Dinas ESDM	
		Perencanaan dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral		Peningkatan kualitas perencanaan energi dan sumber daya mineral	%					100	53	100	543	100	622	100	1.041	100	1.041	Dinas ESDM	

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR		OPD PENANGGUNG JAWAB		
	TAHUN 2016	TAHUN 2017-2021	TAHUN 2016	TAHUN 2017-2021			2016		2017		2018		2019		2020		2021			Target	Rp. (Jt)
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)			
		TAHUN 2017 :		TAHUN 2017 :																	
	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			21.376		15.254		23.986		25.952		28.088		30.411		10.322		
	URUSAN PERDAGANGAN	URUSAN PERDAGANGAN					5.969		7.873		6.670		9.118		9.378		10.322		10.322		
	Peningkatan Perlindungan Konsumen	Peningkatan Perlindungan Konsumen	Persentase produk dan jasa yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan (SNI wajib)	Persentase produk dan jasa yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan (SNI wajib)	%	7,48	3,57	1.323,40	8,33	3.697,98	8,33	1.401,10	8,33	1.635,00	8,33	1.635,00	8,33	1.635,00	8,33	1.635,00	Disperindag
	Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Peningkatan omzet pasar rakyat	Peningkatan omzet pasar rakyat	%	3,0	5,5	3.643,30	6,0	3.158,03	6,3	3.627,00	6,30	5.572,00	6,3	5.831,30	6,3	6.531,90	6,3	6.531,90	Disperindag
	Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri	Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri	Peningkatan Nilai Ekspor	Peningkatan Nilai Ekspor	%	(17,0)	1,5	1.002,30	2	1.016,50	2	1.642,20	3	1.911,20	3	1.911,20	3	2.155,40	3	2.155,40	Disperindag
	URUSAN PERINDUSTRIAN	URUSAN PERINDUSTRIAN					15.407		7.382		17.316		16.834		18.711		20.089		20.089		
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya proses administrasi perkantoran	Meningkatnya proses administrasi perkantoran	%	100	100	2.414,50	100	2.513,91	100	2.812,00	100	2.989,60	100	3.148,70	100	3.148,70	100	3.148,70	Disperindag
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana kantor	Persentase fungsinya sarana dan prasarana aparatur	%	100	100	7.893,50	100	407,19	100	6.115,50	100	4.349,00	100	3.912,80	100	4.895,00	100	4.895,00	Disperindag
	Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	orang	177	185	99,90	190	102,60	192	110,00	195	148,20	200	195,00	200	195,00	200	195,00	Disperindag
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat	orang	45	40	293,40	48	152,75	50	418,00	50	425,60	50	500,00	50	588,20	50	588,20	Disperindag
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan SKPD	Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD	laporan	5	5	457,80	5	361,63	5	682,50	5	720,50	5	792,80	5	820,50	5	820,50	Disperindag
		Perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dan asset								215,66											
	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Retribusi daerah	Retribusi daerah	Rp. Juta	475	475	373,70	25	-	27	60,30	27	60,30	27	60,30	28	64,00	28	64,00	Disperindag
		Peningkatan Pendapatan Daerah								60,20											
	Pengembangan Wilayah Industri	Pengembangan Wilayah Industri	- Peningkatan sentra industri unggulan yang dibina	- Peningkatan sentra industri unggulan yang dibina	sentra	5	5	900,20	8	1.118,17	8	1.694,40	10	2.329,30	10	3.129,30	10	3.400,80	10	3.400,80	Disperindag
			- Peningkatan klaster industri yang dibina	- Peningkatan klaster industri yang dibina	klaster	3	-	-	-	-	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-	Disperindag
	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitasi sertifikasi dan standarisasi produk industri.	Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitasi sertifikasi dan standarisasi produk industri.	unit usaha	70	85	2.973,90	85	2.449,49	90	5.422,80	95	5.811,00	95	6.971,80	98	6.976,40	98	6.976,40	Disperindag

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR		OPD PENANGGUNG JAWAB		
							2016		2017		2018		2019		2020					2021	
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)				Target	Rp. (Jt)
		Pengembangan Industri Kecil dan Menengah		Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitasi sertifikasi dan standarisasi produk industri.	unit usaha	70					90	2.895							98		Disperindag
				Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan dan pembinaan	unit usaha	648				675									675		Disperindag
				Jumlah sentra industri yang dikembangkan	sentra	4						8	6.169	10	6.679	15	9.103	15	9.103		Disperindag
				Peningkatan volume produksi melalui penggunaan teknologi tepat guna dan hilirisasi produk industri	%	3						4,0		5,0		6,25		6,25			Disperindag

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR		OPD PENANGGUNG JAWAB		
							2016		2017		2018		2019		2020					2021	
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)				Target	Rp. (Jt)
	Implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	Implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Pengaduan masyarakat yang dapat ditangani	Pengaduan masyarakat yang dapat ditangani	%	100	100	200	100	200	100	226	100	247	100	269	100	294	100	294	Inspektorat Provinsi
		TAHUN 2018-2021 :		TAHUN 2018-2021 :																	
		INSPEKTORAT PROVINSI		INSPEKTORAT PROVINSI								9.211		9.966		10.787		16.565		16.565	
		NON URUSAN										2.430		2.711		2.934		4.506		4.506	
		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran		%	100				100	1.852	100	2.003	100	2.168	100	3.329	100	3.329	Inspektorat Provinsi	
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur		%	100				100	242	100	364	100	394	100	605	100	605	Inspektorat Provinsi	
			Kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik (zona hijau)	Zona						hijau		hijau		hijau		hijau		hijau			
		Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas		%	100				100	75	100	68	100	73	100	112	100	112	Inspektorat Provinsi	
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat	JPL/orang/ tahun	100					20	94	30	94	40	102	50	156	50	156	Inspektorat Provinsi	
			Tingkat Kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah)	Level 1-5	1					2		3		3		3		3			
		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD		%	100				100	167	100	183	100	198	100	304	100	304	Inspektorat Provinsi	
			Nilai Evaluasi SAKIP SKPD	Predikat						BB		A		A		A		A			
			Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan	%	100					100		100		100		100		100			
			Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra SKPD	%	100					100		100		100		100		100			
			Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD	%	100					100		100		100		100		100			
		PENUNJANG URUSAN : PENGAWASAN										6.781		7.255		7.853		12.059		12.059	
		Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum	Penurunan nilai kerugian daerah		%	9,8				8	6.581	7,8	7.114	7,5	7.700	7	11.825	7	11.825	Inspektorat Provinsi	
			Rekomendasi atas LHP yang ditindaklanjuti	%						70		75		75		75		75			
			Tingkat Kematangan Implementasi SPIP (Sistem Pengawasan Intern Pemerintah)	Level 1-5	1					2		3		3		3		3			
			Perangkat Daerah Provinsi menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	Perangkat Daerah	2					4		6		8		10		10			
		Implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	Pengaduan masyarakat yang dapat ditangani		%	100				100	200	100	141	100	153	100	234	100	234	Inspektorat Provinsi	

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR		OPD PENANGGUNG JAWAB		
	TAHUN 2016	TAHUN 2017-2021	TAHUN 2016	TAHUN 2017-2021			2016		2017		2018		2019		2020		2021			Target	Rp. (Jt)
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)			
		TAHUN 2017 :		TAHUN 2017 :																	
	BAPPEDA	BAPPEDA		BAPPEDA				14.890	15.016		16.700		18.055		19.527		21.126		69.378		
	PERENCANAAN PEMBANGUNAN						14.890	15.016		16.700		18.055		19.527		21.126		69.378			
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	3.028	100	2.217	100	3.338	100	3.505	100	3.681	100	3.865	100	3.865	BAPPEDA
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kualitas gedung perkantoran dan operasional Bappeda dan UPTB LPSE	Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	%	100	100	689	100	518	100	759	100	797	100	837	100	879	100	879	BAPPEDA
				Kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik (zona hijau)	zona		hijau		hijau		hijau		hijau		hijau		hijau		hijau		
	Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur	Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	%	100	100	68	100	68	100	74	100	78	100	82	100	86	100	86	BAPPEDA
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kualitas SDM aparatur Bappeda	Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat	JPL/orang/ tahun	100	10	116	15	116	20	128	30	134	40	141	50	148	50	148	BAPPEDA
				Fungsional Perencana Pertama pada Bappeda Provinsi	orang	1	1		3		5		7		8		9		9		
				Fungsional Perencana Muda pada Bappeda Provinsi	orang	1	1		2		3		4		5		6		6		
				Fungsional Perencana Madya pada Bappeda Provinsi	orang	1	1		1		2		2		2		3		3		
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya tertib administrasi keuangan	Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD	%	100	100	521	100	478	100	575	100	603	100	634	100	665	100	665	BAPPEDA
				Nilai Evaluasi SAKIP SKPD	Predikat		BB		BB		BB		A		A		A		A		
				Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
				Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra SKPD	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
				Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
		Perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dan asset							71												BAPPEDA
	Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase kesesuaian sasaran dan insikator sasaran antara RPJMD Provinsi dengan Renstra SKPD Provinsi, Renstra SKPD Provinsi dengan Renja SKPD Provinsi dan RPJMD Provinsi dengan RPKD Provinsi	%	24	100%	4.067	100%	3.009	100%	4.595	100%	5.026	100%	5.499	100%	6.016	100%	6.016	BAPPEDA

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR		OPD PENANGGUNG JAWAB		
							2016		2017		2018		2019		2020					2021	
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)				Target	Rp. (Jt)
		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD	%	100					100	756	100	671	100	726	100	897	100	897	BAPPEDA
				Nilai Evaluasi SAKIP SKPD	Predikat					BB			A		A		A		A		
				Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan	%	100				100			100		100		100		100		
				Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra SKPD	%	100				100			100		100		100		100		
				Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD	%	100				100			100		100		100		100		
		PENUNJANG URUSAN : PERENCANAAN										14.579		12.095		13.081		16.162		16.162	
		Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD Provinsi dengan Renstra SKPD Provinsi, Renstra SKPD Provinsi dengan Renja SKPD Provinsi dan RPJMD Provinsi dengan RKPDP Provinsi	%	24				100	2.707	100	2.464	100	2.665	100	3.293	100	3.293	BAPPEDA	
				Persentase kesesuaian prioritas pembangunan pada RKPDP kabupaten/kota dengan RKPDP Provinsi	%	NA				90		90		90		100		100			
		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase Pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	%	NA				90	9.035	90	8.971	90	9.702	100	11.987	100	11.987	BAPPEDA	
		Pengembangan Data dan Informasi Pembangunan		Persentase Kelengkapan Data Pendukung untuk Pengukuran Kinerja Sasaran Pembangunan yang tercapai pada RPJMD Provinsi	%	NA				70	703	75	660	80	714	90	882	100	882	BAPPEDA	
				Persentase kualitas kesesuaian antara rencana (RKPDP Provinsi) dengan hasil pelaksanaan pembangunan (SIPKD dan EKPD)	%	70				85		90		95		100		100			
		Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor					>83	2.135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BAPPEDA

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR		OPD PENANGGUNG JAWAB		
	TAHUN 2016	TAHUN 2017-2021	TAHUN 2016	TAHUN 2017-2021			2016		2017		2018		2019		2020		2021			Target	Rp. (Jt)
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)			
		TAHUN 2017 :		TAHUN 2017 :																	
	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BADAN KEUANGAN DAERAH		BADAN KEUANGAN DAERAH			36.932		29.896		41.444		44.800		48.531		52.545		52.545		
	OTONOMI DAERAH, PEM. UMUM, ADM. KEU. DA, PERANGKAT DAERAH, KEPEG DAN PERSANDIAN					36.932		29.896		41.444		44.800		48.531		52.545		108.076			
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrai perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrai perkantoran	%	0	20	9.034	40	8.647	60	9.960	80	10.458	100	10.981	100	11.530	100	11.530	DPKD
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	%	0	20	9.566	40	4.105	60	11.213	80	12.392	100	14.443	100	16.734	100	16.734	DPKD
	Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Motivasi Semangat Kerja dan Disiplin Kerja Aparatur	Meningkatnya Motivasi Semangat Kerja dan Disiplin Kerja Aparatur	%	0	20	174	40	174	60	192	80	202	100	212	100	223	100	223	DPKD
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	0	20	52	40	62	60	58	80	61	100	64	100	67	100	67	DPKD
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan	%	0	20	1.220	40	1.595	60	1.703	80	1.788	100	1.896	100	2.009	100	2.009	DPKD
		Perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dan asset							497												Bakeuda
	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah		Tepat Waktu dan WTP	Tepat Waktu dan WTP	4.594	4.310	Tepat Waktu dan WTP	4.944	Tepat Waktu dan WTP	5.397	Tepat Waktu dan WTP	5.666	Tepat Waktu dan WTP	5.950	Tepat Waktu dan WTP	5.950	5.950	DPKD
	Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan APBD Kab/Kota Sesuai Dengan Ketentuan	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan APBD Kab/Kota Sesuai Dengan Ketentuan		19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	802	642	19 Kab/Kota	815	19 Kab/Kota	901	19 Kab/Kota	946	19 Kab/Kota	993	19 Kab/Kota	993	993	DPKD
	Peningkatan Pendapatan Daerah	Peningkatan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Meningkatnya Pendapatan Daerah	%		2.95	11.490	11.52	9.864	11.09	9.091	25,10	10.000	32.88	10.500	32.88	11.025	32.88	11.025	DPKD
	Peningkatan Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik	Persentase kepatuhan pelaksanaan undang-undang pelayanan publik (zona hijau)	Persentase kepatuhan pelaksanaan undang-undang pelayanan publik (zona hijau)	%		2.95	-	100	-	-	3.468	-	3.601	32.88	3.823	-	4.014	4.014	4.014	DPKD
		TAHUN 2018-2021:		TAHUN 2018-2021:																	
		BADAN KEUANGAN DAERAH		BADAN KEUANGAN DAERAH							41.444		44.800		48.531		55.531		55.531		
		NON URUSAN									22.351		27.673		29.978		34.302		34.302		
		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrai perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrai perkantoran	%	0					60	9.790	80	11.172	100	12.102	100	13.848	100	13.848	Bakeuda
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	%	0					60	11.582	80	14.021	100	15.188	100	17.379	100	17.379	Bakeuda
		Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Motivasi Semangat Kerja dan Disiplin Kerja Aparatur	Meningkatnya Motivasi Semangat Kerja dan Disiplin Kerja Aparatur	%	0					60	192	80	227	100	245	100	281	100	281	Bakeuda
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	0					60	58	80	62	100	67	100	77	100	77	Bakeuda

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR		OPD PENANGGUNG JAWAB					
							2016		2017		2018		2019		2020					2021				
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)				Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	
		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Meningkatnya Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan	%	0					60	729	80	2.192	100	2.374	100	2.717	100	2.717	Bakeuda			
		PENUNJANG URUSAN : KEUANGAN									19.093		17.127		18.553		21.229		21.229					
		Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah		Tepat Waktu dan WTP					Tepat Waktu dan WTP	4.860		Tepat Waktu dan WTP	4.946		Tepat Waktu dan WTP	5.358		Tepat Waktu dan WTP	6.131	Tepat Waktu dan WTP	6.131	Bakeuda
		Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan APBD Kab/Kota Sesuai Dengan Ketentuan		19 Kab/Kota					19 Kab/Kota	647		19 Kab/Kota	850		19 Kab/Kota	921		19 Kab/Kota	1.054	19 Kab/Kota	1.054	Bakeuda
		Peningkatan Pendapatan Daerah		Meningkatnya Pendapatan Daerah	%						11,09	10.249	25,10	9.894	32,88	10.718	32,88	12.264	32,88	12.264	32,88	12.264	Bakeuda	
		Peningkatan Pelayanan Publik		Persentase kepatuhan pelaksanaan undang-undang pelayanan publik (zona hijau)	%						-	3.337		-	1.437	32,88	1.556		-	1.781	4,014	1.781	Bakeuda	

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR		OPD PENANGGUNG JAWAB			
	TAHUN 2016	TAHUN 2017-2021	TAHUN 2016	TAHUN 2017-2021			2016		2017		2018		2019		2020		2021			Target	Rp. (Jt)	
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)				
		TAHUN 2017 :		TAHUN 2017 :																		
	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH			8.791	7.556	9.864		10.672		11.551		12.506		10.718					
	FUNGSI KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						7.534	7.306	8.453		9.146		9.899		10.718		27.954					
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang prima	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	%		100	2.697	100	2.074	100	2.973	100	3.122	100	3.278	100	3.442	100	3.442	BKD	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana aparatur	Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	%		100	999	100	305	100	1.102	100	1.157	100	1.214	100	1.275	100	1.275	BKD	
				Kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik (zona hijau)	Zona		hijau		hijau		hijau		hijau		hijau		hijau		hijau			
	Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	%		100	46	100	65	100	51	100	53	100	56	100	59	100	59	BKD	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas SDM aparatur	Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat	JPL/orang/ tahun		10	25	15	73	20	27	30	29	40	30	50	32	50	32	BKD	
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja keuangan dan kegiatan	Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD	%		100	268	100	370	100	296	100	310	100	326	100	342	100	342	BKD	
				Nilai Evaluasi SAKIP SKPD	Predikat		BB		BB		BB		A		A		A		A			
				Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan	%		100		100		100		100		100		100		100			
				Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra SKPD	%		100		100		100		100		100		100		100			
				Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD	%		100		100		100		100		100		100		100			
		Perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dan asset							100												BKD	
	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Peningkatan Manajemen SDM Aparatur	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan aparatur	Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat	JPL/orang/ tahun		3.499	15	4.318	20	4.005	30	4.475	40	4.995	50	5.568	50	5.568	50	5.568	BKD
				Persentase SKPD yang ketersediaan pegawainya sesuai formasi minimal 70%	%			85		88		91		93		95		95		95		
	OTONOMI DAERAH, PEM. UMUM, ADM. KEU. DA, PERANGKAT DAERAH, KEPEG DAN PERSANDIAN	OTONOMI DAERAH, PEM. UMUM, ADM. KEU. DA, PERANGKAT DAERAH, KEPEG DAN PERSANDIAN					1.257	250	1.410		1.526		1.652		1.788		27.954					
	Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tersedianya administrasi perkantoran Set DP Korpri	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	%		100	534	100	-	100	589	100	618	100	649	100	682	100	682	KORPRI	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Meningkatnya sarana dan prasarana Sekretariat DP KORPRI	Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	%	100	100	289	100	-	100	319	100	335	100	351	100	369	100	369	KORPRI	

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR		OPD PENANGGUNG JAWAB		
							2016		2017		2018		2019		2020					2021	
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)				Target	Rp. (Jt)
				Nilai Evaluasi SAKIP SKPD	Predikat					BB		A		A		A					
				Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan	%					100		100		100		100					
				Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra SKPD	%					100		100		100		100					
				Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD	%					100		100		100		100					
				PENUNJANG URUSAN : KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							4.746		5.623		6.086		9.497		9.497		
				Peningkatan Manajemen SDM Aparatur						95	4.746	96	5.623	97	6.086	98	9.497		9.497	BKD	
				Persentase administrasi layanan kepegawaian yang tepat waktu	%					85		88		90		92					
				Persentase PNS yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi	%					85		86		90		95					
				Persentase kesesuaian formasi dengan ketersediaan PNS	%																

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR		OPD PENANGGUNG JAWAB		
							2016		2017		2018		2019		2020		2021			Target	Rp. (Jt)
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)			
TAHUN 2016	TAHUN 2017-2021	TAHUN 2016	TAHUN 2017-2021	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)				
			TAHUN 2017 :																		
	BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA				13.676		8.061		15.346		16.604		17.971		19.457		19.457		
	FUNGSI KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						13.676		8.061		15.346		16.604		17.971		19.457		45.055		
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	3.998	100	2.826	100	4.407	100	4.628	100	4.859	100	5.102	100	5.102	Badan Diklat	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana prasarana aparatur	%	100	100	2.547	100	343	100	2.808	100	2.948	100	3.095	100	3.250	100	3.250	Badan Diklat	
			Kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik (zona hijau)	Zona		hijau		hijau		hijau		hijau		hijau		hijau		hijau			
	Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Berpakaian Dinas bagi Aparatur	%	100	100	55	100	55	100	60	100	63	100	66	100	70	100	70	Badan Diklat	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas Sumberdaya aparatur	JPL/orang/ tahun	100	10	37	15	149	20	40	30	42	40	44	50	47	50	47	Badan Diklat	
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Menijgkatnya capaian kinerja keuangan dan sistem pelaporan kinerja SKPD	%	100	100	249	100	257	100	274	100	288	100	302	100	317	100	317	Badan Diklat	
			Nilai Evaluasi SAKIP SKPD	Predikat		BB		BB		BB		A		A		A		A			
			Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan	%		100		100		100		100		100		100		100			
			Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra SKPD	%		100		100		100		100		100		100		100			
			Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD	%		100		100		100		100		100		100		100			
		Perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dan asset							87											BPSDM	
	Pendidikan Kedinasan	Pendidikan Kedinasan	Meningkatnya Sumberdaya dan Kinerja Aparatur Melalui Diklat Prajabatan, Diklat Kepemimpinan, Diklat Teknis dan Diklat Fungsional	%	90	90	5.977	90	3.182	90	4.559	90	5.076	90	5.645	90	6.273	90	6.273	Badan Diklat	
			Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat	JPL/orang/ tahun	100	10	-	15	-	20	2.507	30	2.790	40	3.104	50	3.449	50	3.449		
	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Meningkatnya Kinerja Aparatur, kualitas, dan kapabilitas sumberdaya aparatur daerah	Nilai	B	B	815	BB	1.162	BB	621	BB	692	A	769	A	855	A	855	Badan Diklat	
			Sertifikasi SMM ISO	Standar	SMM ISO	SMM ISO		SMM ISO	-	SMM ISO	69	SMM ISO	77	SMM ISO	85	SMM ISO	95	SMM ISO	95		

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR		OPD PENANGGUNG JAWAB		
							2016		2017		2018		2019		2020					2021	
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)				Target	Rp. (Jt)
		TAHUN 2018-2021 :		TAHUN 2018-2021 :																	
		BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA		BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA						15.346		16.604		17.971		25.598		25.598			
		NON URUSAN								9.447		6.855		7.419		10.567		10.567			
		Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase pelayanan administrasi perkantoran	%	100				100	4.622	100	3.663	100	3.965	100	5.648	100	5.648	BPSDM	
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase berfungsi sarana dan prasarana aparatur	%	100				100	4.187	100	2.571	100	2.783	100	3.964	100	3.964	BPSDM	
				Kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik (zona hijau)	Zona					hijau		hijau		hijau		hijau		hijau			
		Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	%	100				100	107	100	107	100	116	100	165	100	165	BPSDM	
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat	JPL/orang/ tahun	100				20	145	30	124	40	135	50	192	50	192	BPSDM	
		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD	%	100				100	386	100	389	100	421	100	599	100	599	BPSDM	
				Nilai Evaluasi SAKIP SKPD	Predikat					BB		A		A		A		A			
				Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan	%					100		100		100		100		100			
				Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra SKPD	%					100		100		100		100		100			
				Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD	%					100		100		100		100		100			
		PENUNJANG URUSAN : KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								5.899		9.749		10.552		15.031		15.031			
		Pendidikan Kedinasan		Aparatur mengikuti diklat sesuai tupoksi dan persyaratan jabatan	%	90				90	4.179	90	7.855	90	8.502	90	12.110	90	12.110	BPSDM	
				Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat	JPL/orang/ tahun	100				20		30		40		50		50			
		Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		Akreditasi Lembaga Penyelenggaraan Diklat	Nilai	B				BB	1.720	BB	1.894	A	2.050	A	2.920	A	2.920	BPSDM	
				Sertifikasi SMM ISO	Standar	SMM ISO				SMM ISO		SMM ISO		SMM ISO		SMM ISO		SMM ISO			

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR		OPD PENANGGUNG JAWAB		
	TAHUN 2016	TAHUN 2017-2021	TAHUN 2016	TAHUN 2017-2021			2016		2017		2018		2019		2020		2021			Target	Rp. (Jt)
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)			
		TAHUN 2017 :		TAHUN 2017 :																	
	BAPPEDA	BALITBANG		BALITBANG				1.000	3.758		1.200	1.236		1.352		1.479					
	PERENCANAAN PEMBANGUNAN							1.000	3.758		1.200	1.236		1.352		1.479			1.479		
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi dan operasional kantor	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	%	100		100	338	100	-	100	-	100	-	100	-	100		Balitbang	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana aparatur	Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	%	100		100	627	100	-	100	-	100	-	100	-	100		Balitbang	
				Kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik (zona hijau)	zona			hijau		hijau		hijau		hijau		hijau		hijau			
	Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	%	100		100	21	100	-	100	-	100	-	100	-	100		Balitbang	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas SDM Aparatur	Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat	JPL/orang/ tahun			15	70	20	-	30	-	40	-	50	-	50		Balitbang	
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya capaian kinerja keuangan dan sistem pelaporan Kinerja SKPD	Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD	%	100		100	99	100	-	100	-	100	-	100	-	100		Balitbang	
				Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD	Predikat			BB		BB		A		A		A		A			
				Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan	%	100		100		100		100		100		100		100			
				Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra SKPD	%	100		100		100		100		100		100		100			
				Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD	%	100		100		100		100		100		100		100			
	Penelitian dan Pengembangan IPTEK untuk Menunjang Pemerintahan dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan IPTEK untuk Menunjang Pemerintahan dan Pembangunan	Jumlah penelitian dan pengembangan terapan	Persentase Pemanfaatan Hasil Riset dan Pengembangan dalam Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah	Judul	34	65%	1.000	65%	1.342	70%	1.200	75%	1.236	80%	1.352	80%	1.479	80%	1.479	Balitbang
		Program Penerapan IPTEK								1.262										Balitbang	
		TAHUN 2018-2021 :		TAHUN 2018-2021 :																	
		BALITBANG										3.330	4.395		5.460		11.850		11.850		
		NON URUSAN										1.498	1.955		2.429		5.271		5.271		
	Pelayanan Administrasi Perkantoran			Persentase pelayanan administrasi perkantoran	%	100				100	438	100	832	100	1.033	100	2.242	100	2.242	Balitbang	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	%					100	814	100	606	100	753	100	1.634	100	1.634	Balitbang	
				Kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik (zona hijau)	zona					hijau		hijau		hijau		hijau		hijau			

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR		OPD PENANGGUNG JAWAB		
							2016		2017		2018		2019		2020					2021	
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)				Target	Rp. (Jt)
		Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	%	100					100	27	100	27	100	34	100	73	100	73	Balitbang
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat	JPL/orang/ tahun					20	90	30	130	40	162	50	352	50	352	Balitbang	
		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD	%	100				100	128	100	360	100	447	100	970	100	970	Balitbang	
				Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD	Predikat					BB		A		A		A		A			
				Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan	%	100				100		100		100		100		100			
				Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra SKPD	%	100				100		100		100		100		100			
				Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD	%	100				100		100		100		100		100			
		PENUNJANG URUSAN : PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									1.832		2.440		3.031		6.579		6.579		
		Penelitian dan Pengembangan IPTEK untuk Menunjang Pemerintahan dan Pembangunan		Persentase Pemanfaatan Hasil Riset dan Pengembangan dalam Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah	%	34				70%	1.832	75%	1.670	80%	2.075	80%	4.503	80%	4.503	Balitbang	
		Penguatan Inovasi Daerah		Peningkatan pemanfaatan inovasi penyelenggaraan pemerintah daerah	%					-	-	65	770	80	957	95	2.076	95	2.076	Balitbang	
				Peningkatan pemanfaatan inovasi produk dan teknologi	%							60		80		95					

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR		OPD PENANGGUNG JAWAB		
	TAHUN 2016	TAHUN 2017-2021	TAHUN 2016	TAHUN 2017-2021			2016		2017		2018		2019		2020		2021			Target	Rp. (Jt)
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)			
		TAHUN 2017 :		TAHUN 2017 :																	
	KANTOR PENGHUBUNG	BADAN PENGHUBUNG		BADAN PENGHUBUNG			5.269	3.272	5.912	6.397	6.924	7.496	7.496								
	OTONOMI DAERAH, PEM. UMUM, ADM. KEU. DA, PERANGKAT DAERAH, KEPEG DAN PERSANDIAN						5.269	3.272	5.912	6.397	6.924	7.496	30.436								
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrai perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	%	100	1.411	100	1.606	100	1.556	100	1.634	100	1.715	100	1.801	1.801	Kantor Penghubung		
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pelayanan Pemeliharaan aparatur	Persentase berfungsi sarana dan prasarana aparatur	%	100	1.300	100	272	100	1.434	100	1.505	100	1.581	100	1.660	1.660	Kantor Penghubung		
				persentase kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik (zona hijau)	Zona	hijau		hijau		hijau		hijau		hijau		hijau					
	Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan disiplin aparatur	Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	%	100	36	100	43	100	39	100	41	100	43	100	45	45	Kantor Penghubung		
	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya kapasitas SDM aparatur	Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat	JPL/orang/ tahun		98		46		108		113		119		125	125	Kantor Penghubung		
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Meningkatnya tertib administrasi keuangan	Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD	%	100	145	100	102	100	160	100	168	100	177	100	186	186	Kantor Penghubung		
				Nilai Evaluasi SAKIP SKPD	Skor	BB		BB		BB		BB		A		A					
				Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan	%	100		100		100		100		100		100					
				Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra SKPD	%	100		100		100		100		100		100					
				Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD	%	100		100		100		100		100		100					
		Perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dan asset							37										Badan Penghubung		
	Peningkatan Pelayanan Kedinasan	Peningkatan Pelayanan Kedinasan					650		429		746		838		939		1.050	1.050			
	Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah	Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah					1.109		547		1.273		1.428		1.600		1.791	1.791	Kantor Penghubung		
	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur					41		-		47		53		60		67	67	Kantor Penghubung		
	Pengembangan Data dan Informasi	Pengembangan Data dan Informasi					45		-		51		57		64		72	72	Kantor Penghubung		
	Peningkatan Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik					434		190		498		558		626		700	700	Kantor Penghubung		
	-	Pengembangan Nilai-Nilai Budaya	-															Kantor Penghubung		
	-	Parttisipasiatau Kerjasama Pembangunan	-																		

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR		OPD PENANGGUNG JAWAB		
							2016		2017		2018		2019		2020					2021	
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)				Target	Rp. (Jt)
		TAHUN 2018-2021 :		TAHUN 2018-2021 :																	
		BADAN PENGHUBUNG		BADAN PENGHUBUNG						5.912		6.286		6.800		11.470		11.470			
		NON URUSAN								3.399		3.824		4.137		6.978		6.978			
		Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase pelayanan administrasi perkantoran	%					100	2.794	100	1.861	100	2.013	100	3.396	100	3.396	Badan Penghubung	
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	%					100	327	100	1.673	100	1.810	100	3.053	100	3.053	Badan Penghubung	
				persentase kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik (zona hijau)	Zona					hijau		hijau		hijau		hijau		hijau			
		Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	%					100	36	100	36	100	39	100	66	100	66	Badan Penghubung	
		Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur		Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat	JPL/orang/tahun						98		64		70		117		117	Badan Penghubung	
		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan		Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD	%					100	144	100	189	100	205	100	346	100	346	Badan Penghubung	
				Nilai Evaluasi SAKIP SKPD	Skor					BB		BB		A		A		A			
				Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan	%					100		100		100		100		100			
				Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra SKPD	%					100		100		100		100		100			
				Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD	%					100		100		100		100		100			
		PENUNJANG URUSAN : KOORDINASI PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PEMB. DENGAN PEMERINTAH PUSAT								2.512		2.462		2.663		4.492		4.492			
		Peningkatan Pelayanan Kedinasan		Persentase meningkatnya pelayanan kedinasan	%					100	670	100	727	100	786	100	1.326		1.326		
		Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah		Persentase peningkatan kinerja perangkat daerah dan ketatalaksanaan Pemerintah Daerah	%					100	1.360	100	1.042	100	1.127	100	1.901		1.901	Badan Penghubung	
		Peningkatan Pelayanan Publik		Persentase meningkatnya pelayanan publik	%					100	323	100	628	100	679	100	1.145		1.145	Badan Penghubung	
		Pengembangan Data dan Informasi		Meningkatnya Informasi dan data Pembangunan di Sumbar							159		65		70		119		119	Badan Penghubung	

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR		OPD PENANGGUNG JAWAB		
	TAHUN 2016	TAHUN 2017-2021	TAHUN 2016	TAHUN 2017-2021			2016		2017		2018		2019		2020		2021			Target	Rp. (Jt)
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)			
		TAHUN 2017 :		TAHUN 2017 :																	
	BIRO PEMERINTAHAN	SETDA (BIRO PEMERINTAHAN)		SETDA (BIRO PEMERINTAHAN)			7.663	4.657,04	8.599	9.303	10.069	10.902	2.095								
	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					1.655	847,61	1.641	1.776	1.898	2.095	30.652								
	Penataan Keuangan dan Aset Pemerintahan nagari	Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Nagari	Peningkatan peran dan kualitas kelembagaan pada Pemneg.	SOTK Pem. Nagari/Desa sesuai Permendagri 84 Tahun 2015	Nagari/Desa	NA	NA	425	40	585,00	80	421	120	456	140	487	160	538	160	538	Setda (Biro Pemerintahan)
				Produk Hukum Nagari sesuai Permendagri 111 Tahun 2015	Nagari/Desa	NA	NA		40		80		120		140		160		160		
				Nagari/Desa Definitif	Nagari/Desa	880	880		928		948		998		1.068		1.122		1.122		
				Pem Nagari/Desa Tertib Aset sesuai Permendagri 1 tahun 2016	Nagari/Desa	NA	NA		40		80		120		140		160		160		
	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Nagari	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Nagari	Peningkatan peran dan kualitas kelembagaan pada Pemneg.	Persentase Kepuasan Wali Nagari/Kepala Desa terhadap kinerja perangkat	%	NA	NA	1.230	65	262,61	70	1.220	75	1.320	80	1.411	85	1.557	85	1.557	Setda (Biro Pemerintahan)
				Persentase pemahaman aparaturnya terhadap Tupokis masing-masing Lembaga Nagari/Desa	%	NA	NA		65		70		75		80		85		85		
				Kompetensi Wali Nagari/Kepala Desa dan Lurah sesuai Pergub 13 tahun 2016	Nagari/Desa/ Kelurahan	19	38		57		76		95		114		133		133		
	OTONOMI DAERAH, PEM. UMUM, ADM. KEU. DA, PERANGKAT DAERAH, KEPEG DAN PERSANDIAN	OTONOMI DAERAH, PEM. UMUM, ADM. KEU. DA, PERANGKAT DAERAH, KEPEG DAN PERSANDIAN						6.008	3.809,42	6.958	7.528	8.171	8.807	28.557							
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi dan operasional kantor	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	%	12	100	489	100	765,92	100	539	100	566	100	594	100	624	100	624	Setda (Biro Pemerintahan)
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana aparaturnya	Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparaturnya	%	100	112	100	93,50	100	123	100	129	100	136	100	142	100	142	Setda (Biro Pemerintahan)	
				Kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik (zona hijau)	Zona		hijau		hijau		hijau		hijau		hijau		hijau		hijau		
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas SDM Aparatur	Persentase disiplin aparaturnya dalam berpakaian dinas	JPL/orang/ tahun		10	46	15	48,00	20	51	30	53	40	56	50	59	50	59	Setda (Biro Pemerintahan)
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya capaian kinerja keuangan dan sistem pelaporan Kinerja SKPD	Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD	%	100	90	100	82,50	100	99	100	104	100	109	100	114	100	114	Setda (Biro Pemerintahan)	
				Nilai Evaluasi SAKIP SKPD	Predikat		BB		BB		BB		A		A		A		A		

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR		OPD PENANGGUNG JAWAB		
							2016		2017		2018		2019		2020					2021	
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)				Target	Rp. (Jt)
				Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan	%		100		100		100		100		100		100		100		
				Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra SKPD	%		100		100		100		100		100		100		100		
				Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD	%		100		100		100		100		100		100		100		
		Perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dan asset							34,50												Setda (Biro Pemerintahan)
	Administrasi Kewilayahan Pemerintahan Daerah	Administrasi Kewilayahan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kepastian hukum pada wilayah administrasi pemerintahan khususnya pada daerah perbatasan Prov. Sumbar dan Provinsi tetangga	Segmen Batas Daerah yang diusulkan penegasannya	Segmen	6	6	684	6	577	6	678	6	733	6	784	4	865	34	865	Setda (Biro Pemerintahan)
				Nama Rupa Bumi yang diusulkan pembakuannya	buku	1	1		1		1		1		1		1		6		
	Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik	Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Pelaksanaan Pelayanan Publik sesuai SOP	%	NA	70	50	75	211,50	78	50	80	54	83	57	85	63	85	63	Setda (Biro Pemerintahan)
	Kerjasama Pembangunan	Kerjasama Pembangunan	Meningkatnya kinerja perangkat daerah dan menyempurnakan ketatalaksanaan pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien	MoU/perjanjian kerjasama pembangunan antar lembaga pemerintahan, swasta dan organisasi berbadan hukum	Kerjasama	20	25	140	25	-	30	139	30	150	30	161	30	177	170	177	Setda (Biro Pemerintahan)
	Pengelolaan Otonomi Daerah	Pengelolaan Otonomi Daerah	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah menerapkan prinsip pemerintahan yang baik dalam koridor rechtmatigheid dan doelmatigheid	Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD)	Skor 0-4	2,46	2,46	1.722	2,6	1.596,50	2,7	1.707	2,8	1.847	2,9	1.974	3	2.179	3	2.179	Setda (Biro Pemerintahan)
	Koordinasi Pemerintahan	Koordinasi Pemerintahan	Terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien	Kebijakan Pemerintah dan Program Pembangunan antar Pemerintah dan Pemerintah daerah serta Intansi Vertikal yang sinergis	%	75	78	579	80	400,00	83	574	85	621	88	664	90	733	90	733	Setda (Biro Pemerintahan)
	Penyusunan Profil Kependudukan	Penataan Administrasi Kependudukan	Tersedianya sistem informasi dan administrasi kependudukan yang akurat	Database kependudukan yang akurat	Kab/Kota	19	-	661	19	-	19	1.574	19	1.728	19	1.988	19	2.030	19	2.030	Setda (Biro Pemerintahan)
				Kepemilikan Akte pencatatan sipil (Usia 0 - 18 tahun)	%	75	78		80		83		85		88		90		90		
	Pengelolaan Pertanahan	Pengelolaan Pertanahan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan tanah yang difasilitasi	%	80	80	1.180	80	-	80	1.170	80	1.266	80	1.353	80	1.494	80	1.494	Setda (Biro Pemerintahan)

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR		OPD PENANGGUNG JAWAB		
							2016		2017		2018		2019		2020					2021	
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)				Target	Rp. (Jt)
	Koordinasi Ketentraman dan Keterlibatan	Koordinasi Ketentraman dan Keterlibatan	Meningkatnya efektifitas capaian sasaran pembangunan bidang kesejahteraan sosial melalui peningkatan koordinasi antar unit kerja terkait	Angka kriminalitas	% Rata-rata kenaikan	4	6,77	258	6,77	-	6,77	255	6,77	276	6,77	295	< 6,77	326		326	Setda (Biro Pemerintahan)
				Penanganan trantib, rabies, penyakit menular yang sesuai standar, terkoordinir dan terpadu di Sumatera Barat	%	50	80		80		80		85		90		95		95		
		TAHUN 2018-2021 :		TAHUN 2018-2021 :																	
		SETDA (BIRO PEMERINTAHAN)		SETDA (BIRO PEMERINTAHAN)								8.599		5.883		6.272		9.875		9.875	
		NON URUSAN										1.812		1.278		1.362		2.144		2.144	
		Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase pelayanan administrasi perkantoran	%	12					100	804	100	936	100	998	100	1.572	100	1.572	Setda (Biro Pemerintahan)
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	%						100	794	100	161	100	172	100	271	100	271	Setda (Biro Pemerintahan)
				Kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik (zona hijau)	Zona						hijau		hijau		hijau		hijau		hijau		
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	JPL/orang/ tahun						20	107	30	50	40	53	50	84	50	84	Setda (Biro Pemerintahan)
		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD	%						100	108	100	130	100	138	100	218	100	218	Setda (Biro Pemerintahan)
				Nilai Evaluasi SAKIP SKPD	Predikat						BB		A		A		A		A		
				Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan	%						100		100		100		100		100		
				Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra SKPD	%						100		100		100		100		100		
				Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD	%						100		100		100		100		100		
		PENUNJANG URUSAN : SEKRETARIAT DAERAH										6.787		4.606		4.910		7.731		7.731	
		Administrasi Kewilayahan Pemerintahan Daerah		Segmen Batas Daerah yang diusulkan penegasannya	Segmen	6					6	950	6	650	6	693	4	1.091	22	1.091	Setda (Biro Pemerintahan)
				Nama Rupa Bumi yang diusulkan pembakuannya	buku	1					1		1		1		1		4		
		Pengelolaan Otonomi Daerah		Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD)	Skor 0-4	2,46					2,7	5.837	2,8	3.956	2,9	4.217	3	6.640	3	6.640	Setda (Biro Pemerintahan)

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR		OPD PENANGGUNG JAWAB			
	TAHUN 2016	TAHUN 2017-2021	TAHUN 2016	TAHUN 2017-2021			2016		2017		2018		2019		2020		2021			Target	Rp. (Jt)	
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)				
		TAHUN 2017 :		TAHUN 2017 :																		
	BIRO HUMAS	SETDA (BIRO HUMAS)		SETDA (BIRO HUMAS)			9.142		4.461		10.258		11.099		12.013		13.006		10.793			
	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					7.408		3.289		8.347		9.092		9.905		10.793		17.722			
	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Penyebarluasan Informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Penyebaran Informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui pemberitaan	Peringkat produktifitas pemberitaan Provinsi Sumatera Barat	Ranking	60 (k)		2.033	15	3.289	13	2.291	11	2.495	9	2.718	7	2.962	7	2.962	Setda (Biro Humas)	
			Persentase liputan kegiatan pemerintah daerah				100%		900		1050		1200		1350		1500					
			Jumlah publikasi kegiatan Pemprov Sumbar di media cetak				125		0,03		0,02		0,018		0,015		0,012					
			Jumlah publikasi kegiatan Pemprov Sumbar di media elektronik				38		80-20		80-20		80-20		80-20		80-20					
			Tersedianya buku informasi visualisasi pembangunan daerah tahun 2016				100															
			Tersedianya film potensi daerah Provinsi Sumatera Barat				4															
			Tersebarnya informasi pembangunan pemerintah melalui media luar ruang				14															
	Informasi dan Komunikasi Publik	Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase pelayanan permintaan informasi yang terlayani dan persentase data informasi yang terhimpun dalam sistem Informasi PPID	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Indeks	46,97	55	821	60	-	65	925	70	1.007	75	1.098	80	1.196	80	1.196	Setda (Biro Humas)	
	Pengembangan Komunikasi dan Informatika	-	Tersebaranya informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk diakses masyarakat	-	orang	NA	-	2.091	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Setda (Biro Humas)	
	Pengelolaan e-Government Pemerintah Daerah	Pengelolaan e-Government Provinsi Sumatera Barat	Persentase peningkatan implementasi e-Government di lingkungan Pemprov	Indeks e-Government Indonesia	Indeks	2,01	2,2	2.463	2,4	-	2,6	5.131	2,8	5.589	2,9	6.089	3	6.635	3	6.635	Setda (Biro Humas)	
	OTONOMI DAERAH, PEM. UMUM, ADM. KEU. DA, PERANGKAT DAERAH, KEPEG DAN PERSANDIAN	OTONOMI DAERAH, PEM. UMUM, ADM. KEU. DA, PERANGKAT DAERAH, KEPEG DAN PERSANDIAN					1.734		1.172		1.912		2.007		2.107		2.213		19.935			
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrai perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	%	100	1.306	100	888	100	1.440	100	1.512	100	1.588	100	1.667	100	1.667	100	1.667	Setda (Biro Humas)
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pelayanan Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	%	100	251	100	121	100	277	100	291	100	305	100	320	100	320	100	320	Setda (Biro Humas)
			Kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik (zona hijau)	Zona		hijau		hijau		hijau		hijau		hijau		hijau		hijau		hijau		

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR		OPD PENANGGUNG JAWAB		
							2016		2017		2018		2019		2020					2021	
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)				Target	Rp. (Jt)
		PENUNJANG URUSAN : SEKRETARIAT DAERAH									2.306		3.059		3.280		6.128		6.128		
		Penyebarluasan Informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Peringkat produktifitas pemberitaan Provinsi Sumatera Barat	Ranking	60 (k)					13	2.306		3.059		3.280		6.128	7	6.128	Setda (Biro Humas)
				Peringkat sebaran kegiatan pemerintah Provinsi Sumatera Barat di media massa	Ranking							8		7		5					
				Rasio pemberitaan	perbandingan							16:40:20		16:40:20		16:40:20					
				Persentase liputan kegiatan pemerintah daerah	%					1050		1200		1350		1500					
				Jumlah publikasi kegiatan Pemprov Sumbar di media cetak	publikasi					0,02		0,018		0,015		0,012					
				Jumlah publikasi kegiatan Pemprov Sumbar di media elektronik	%					20		20		20		20					

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR		OPD PENANGGUNG JAWAB		
	TAHUN 2016	TAHUN 2017-2021	TAHUN 2016	TAHUN 2017-2021			2016		2017		2018		2019		2020		2021			Target	Rp. (Jt)
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)			
		TAHUN 2017 :		TAHUN 2017 :																	
	SETDA (BIRO HUKUM)	SETDA (BIRO HUKUM)		SETDA (BIRO HUKUM)			3.021	2.595,54	3.389	3.667	3.969	4.297	4.297								
	OTONOMI DAERAH, PEM. UMUM, ADM. KEU. DA, PERANGKAT DAERAH, KEPEG DAN PERSANDIAN	OTONOMI DAERAH, PEM. UMUM, ADM. KEU. DA, PERANGKAT DAERAH, KEPEG DAN PERSANDIAN				3.021	2.595,54	3.389	3.667	3.969	4.297	20.279									
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi dan operasional kantor	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	%	100	253	100	255,33	100	279	100	293	100	308	100	323	100	323	Setda (Biro Hukum)	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana aparatur	Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	%	100	53	100	21,90	100	58	100	61	100	64	100	67	100	67	Setda (Biro Hukum)	
				Kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik (zona hijau)	Zona	hijau		hijau		hijau		hijau		hijau		hijau		hijau			
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas SDM Aparatur	Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat	JPL/orang/ tahun	10	56	15	51,48	20	62	30	65	40	68	50	71	50	71	Setda (Biro Hukum)	
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya capaian kinerja keuangan dan sistem pelaporan Kinerja SKPD	Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD	%	100	111	100	103,45	100	123	100	129	100	135	100	142	100	142	Setda (Biro Hukum)	
				Nilai Evaluasi SAKIP SKPD	predikat	BB		BB		BB		A		A		A		A			
				Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan	%	100		100		100		100		100		100		100			
				Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra SKPD	%	100		100		100		100		100		100		100			
				Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD	%	100		100		100		100		100		100		100			
		Perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dan asset						24,30												Setda (Biro Hukum)	
	Pembangunan Materi Hukum	Pembangunan Materi Hukum	Terwujudnya pembanguan materi hukum	Persentase produk hukum provinsi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum	Jml Perda	21	15	1.080	15	1.051,03	17	1.181	17	1.296	15	1.725	15	1.564	15	1.564	Setda (Biro Hukum)
	Peningkatan Budaya Hukum	Peningkatan Budaya Hukum	Meningkatnya budaya hukum	Persentase peningkatan budaya sadar dan taat hukum di masyarakat	%	95	50	48	50	-	50	42	50	43	50	53	50	48	50	48	Setda (Biro Hukum)
	Peningkatan Supremasi Hukum dan Perlindungan HAM	Peningkatan Supremasi Hukum dan Perlindungan HAM-Hukum	Terwujudnya Peningkatan Supremasi Hukum dan Perlindungan HAM	Jumlah perkara sengketa hukum pemerintah provinsi yang dapat ditangani	Jumlah	95	3	505	3	395,01	3	597	3	610	3	75	3	684	18	684	Setda (Biro Hukum)
	Sarana dan Informasi Hukum	Sarana dan Informasi Hukum	Terwujudnya sarana dan informasi hukum	Persentase dokumentasi dan informasi hukum yang dapat diakses pada perpustakaan dan portal website JDIH	%	45	100	226	100	132,40	100	307	100	345	100	427	100	387	100	387	Setda (Biro Hukum)

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR		OPD PENANGGUNG JAWAB		
							2016		2017		2018		2019		2020					2021	
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)				Target	Rp. (Jt)
	Peningkatan Penataan Perundang-undangan	Peningkatan Penataan Peraturan Perundang-undangan	Terwujudnya Peningkatan Penataan Perundang-undangan	Persentase rekomendasi kajian materi/substansi Perda Kab/Kota yang ditindaklanjuti oleh Kab/Kota	%	75	80	688	80	560,64	85	740	85	825	90	1.114	90	1.010	90	1.010	Setda (Biro Hukum)
	TAHUN 2018-2021 :		TAHUN 2018-2021 :																		
	SETDA (BIRO HUKUM)		SETDA (BIRO HUKUM)																		
	NON URUSAN																				
		Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase pelayanan administrasi perkantoran	%						100	295	100	341	100	369	100	744	100	744	Setda (Biro Hukum)
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	%						100	104	100	108	100	117	100	235	100	235	Setda (Biro Hukum)
				Kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik (zona hijau)	Zona						hijau		hijau		hijau		hijau		hijau		
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat	JPL/orang/ tahun						20	51	30	150	40	162	50	327	50	327	Setda (Biro Hukum)
		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD	%						100	126	100	141	100	152	100	307	100	307	Setda (Biro Hukum)
				Nilai Evaluasi SAKIP SKPD	predikat						BB		A		A		A		A		
				Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan	%						100		100		100		100		100		
				Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra SKPD	%						100		100		100		100		100		
				Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD	%						100		100		100		100		100		
	PENUNJANG URUSAN : SEKRETARIAT DAERAH																				
		Pembangunan Materi Hukum		Produk hukum provinsi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum	Jml Perda	21					17	1.138	17	1.156	15	1.251	15	2.519	15	2.519	Setda (Biro Hukum)
		Peningkatan Budaya Hukum		Persentase peningkatan budaya sadar dan taat hukum di masyarakat	%	95					50	57	-	-	-	-	-	-	50		Setda (Biro Hukum)
		Peningkatan Supremasi Hukum dan Perlindungan Hukum		Jumlah perkara sengketa hukum pemerintah provinsi yang dapat ditangani	Jumlah	95					3	487	3	461	3	499	3	1.005	12	1.005	Setda (Biro Hukum)
		Sarana dan Informasi Hukum		Persentase dokumentasi dan informasi hukum yang dapat diakses pada perpustakaan dan portal website JDIH	%	45					100	255	100	220	100	238	100	479	100	479	Setda (Biro Hukum)
		Peningkatan Penataan Peraturan Perundang-undangan		Persentase rekomendasi kajian materi/substansi Perda Kab/Kota yang ditindaklanjuti oleh Kab/Kota	%	75					85	876	85	1.090	90	1.180	90	2.375	90	2.375	Setda (Biro Hukum)

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN												KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR		OPD PENANGGUNG JAWAB
							2016		2017		2018		2019		2020		2021				
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)			
		TAHUN 2017 :		TAHUN 2017 :																	
	SETDA (BIRO PEREKONOMIAN)	SETDA (BIRO PEREKONOMIAN)		SETDA (BIRO PEREKONOMIAN)			2.744	2.302,40		3.080		3.331		3.606		3.904		3.904			
	OTONOMI DAERAH, PEM. UMUM, ADM. KEU. DA, PERANGKAT DAERAH, KEPEG DAN PERSANDIAN	OTONOMI DAERAH, PEM. UMUM, ADM. KEU. DA, PERANGKAT DAERAH, KEPEG DAN PERSANDIAN					2.744	2.302,40		3.080		3.331		3.606		3.904		11.438			
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrai perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	182	100	277,76	100	197	100	217	100	224	100	231	100	231	Setda (Biro Perekonomian)
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pelayanan Pemeliharaan	Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	%	100	100	58	100	100,37	100	79	100	110	100	131	100	179	100	179	Setda (Biro Perekonomian)
	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Peningkatan disiplin aparatur	Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	%	100	100	-	100	-	100	-	100	101	100	125	100	131	100	131	Setda (Biro Perekonomian)
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas SDM aparatur	Rata-rata lama diklat di SKPD	JPL/orang/ tahun	2	2	12	2	49,49	3	14	3	14	3	14	3	14	3	14	Setda (Biro Perekonomian)
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya tertib administrasi keuangan	Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD	%	100	100	91	100	97,62	100	111	100	124	100	132	100	161	100	161	Setda (Biro Perekonomian)
				Nilai LAKIP SKPD (minimal BB)	Skor	BB	BB		BB		BB	BB		A		A		A			
				Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan	%		100		100		100		100		100		100		100		
				Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra SKPD	%		100		100		100		100		100		100		100		
				Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD	%		100		100		100		100		100		100		100		
		Perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dan asset								11,89											Setda (Biro Perekonomian)
	Program Penerapan Pemerintahan Yang Baik	Penerapan Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya keterpaduan penyelenggaraan kegiatan pengembangan ekonomi daerah	Persentase kesepakatan rapat yang ditindaklanjuti SKPD terkait di provinsi daerah	%	75	80	684	80	1.765,26	80	749	85	761	85	833	90	920	90	920	Setda (Biro Perekonomian)
				Persentase kesepakatan rapat yang ditindaklanjuti kabupaten/kota terkait	%	70	75	583	75		80	621	80	635	80	653	80	698	80	698	
				Persentase peningkatan serapan modal kerja melalui KUR, KUPS, KPEN-RP, KKPE	%	10	10	-	10		15	100	15	125	20	160	20	170	20	170	
				Persentase peningkatan serapan modal kerja melalui PKBL	%	15	15	235	15		15	235	20	260	20	280	20	290	20	290	
				Persentase peningkatan LKM yang berbadan hukum dan aktif	%	12	10	205	10		15	235	15	235	20	265	20	285	20	285	

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN												KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR		OPD PENANGGUNG JAWAB
							2016		2017		2018		2019		2020		2021				
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)			
TAHUN 2016	TAHUN 2017-2021	TAHUN 2016	TAHUN 2017-2021																		
			Persentase peningkatan nilai transaksi UMK peserta pameran	%	10					15		15		20		20		20			
			Persentase peningkatan kontak dagang UMK peserta pameran	%	25					25		25		25		25		25			
			Persentase Peningkatan Kontribusi BUMD terhadap PAD	%								6.25		6.5		7.5					

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR		OPD PENANGGUNG JAWAB		
	TAHUN 2016	TAHUN 2017-2021	TAHUN 2016	TAHUN 2017-2021			2016		2017		2018		2019		2020		2021			Target	Rp. (Jt)
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)			
		TAHUN 2017 :		TAHUN 2017 :																	
	SETDA (BIRO BINA SOSIAL)	SETDA (BIRO BINTAL DAN KESRA)		SETDA (BIRO BINTAL DAN KESRA)			47.086		25.157		52.835		57.165		61.871		66.988		51.397		
	URUSAN PENDIDIKAN	URUSAN PENDIDIKAN					175		-		37.858		41.965		46.368		51.397		51.397		
	Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Pendidikan	Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Pendidikan	Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi pendidikan	Jumlah guru SMA/SMK yang telah diberi pembinaan pendidikan Agama dan Adat	Jumlah Guru	75	110	175	115	-	117	37.858	120	41.965	125	46.368	125	51.397	125	51.397	Setda (Biro Binsos)
	URUSAN SOSIAL	URUSAN SOSIAL					740		628		483		529		570		610		610		
	Koordinasi Bidang Kesejahteraan Sosial	Koordinasi Bidang Kesejahteraan Sosial	-	Rumusan kebijakan penanganan masalah sosial, kesejahteraan sosial sdan rehabilitasi sosial dan penanggulangan bencana	Rumusan Kebijakan	2	2	740	2	628	2	483	2	529	2	570	2	610	12	610	Setda (Biro Binsos)
			Sinkronisasi program Pembangunan kesejahteraan sosial		Kali	6															
			Terlaksananya program rehabilitasi social pasca bencana alam		Kab/ Kota	11															
			Terlaksananya koordinasi pembinaan penanggulangan gizi masyarakat		Kali	43															
			Meningkatnya pemahaman dan penerapan pola hidup bersih dan sehat terhadap pelaksana dan peserta didik		Penghargaan pemenang LSS 4 jenjang pendidikan di Kab/Kota	17	18														
			meningkatnya Koordinasi pembinaan dan pengembangan UKS melalui rapat koordinasi daerah tim pembina UKS tingkat Provinsi Sumatera Barat		Kali	0	1														
			meningkatnya koordinasi penanganan masalah Sosial		%	100	100														
			meningkatnya pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan dan pencegahan dan penanggulangan AIDS di daerah		%	100	100														
			meningkatnya koordinasi di bidang kesejahteraan masyarakat		%	100	100														
			Meningkatnya Koordinasi tentang pencegahan dan penanggulangan penyakit menulah di Provinsi Sumatera Barat		%	0	100														

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR		OPD PENANGGUNG JAWAB		
	TAHUN 2016	TAHUN 2017-2021	TAHUN 2016	TAHUN 2017-2021			2016		2017		2018		2019		2020		2021			Target	Rp. (Jt)
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)			
	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA						350		-		130		144		159		176		176	
	Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	Meningkatnya derajat kesehatan PNS di lingkungan pemerintah provinsi Sumatera Barat untuk mendukung etos kerja yg tinggi	Persentase Jumlah PNS Pemrov yang mengikuti senam pagi	%		44	225	44	-	44	83	44	93	44	102	44	113	44	113	Setda (Biro Binsos)
	Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Meningkatnya keahlian pemuda dalam berwirausaha serta sinkronisasi dan sinergitas program kepemudaan di sumatera barat	Jumlah Pemuda yang telah dilakukan pembinaan dalam bidang Kewirausahaan	Jumlah Pemuda		90	125	100	-	110	46	115	51	150	57	155	63	155	63	Setda (Biro Binsos)
	URUSAN KEBUDAYAAN	URUSAN KEBUDAYAAN						7.241		23.918		13.725		13.856		14.070		14.065		14.065	
	Pengembangan Nilai-Nilai Budaya	Pengembangan Nilai-Nilai Budaya	Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pengembangan nilai-nilai budaya di Sumatera Barat	Jumlah Pemangku Adat, pengurus kerapatan Adat Nagari (KAN)	Jumlah Pemangku Adat	330	330	220	330	-	330	41	330	45	185	50	330	55	1.835	55	Setda (Biro Binsos)
				Kompetensi dan kualifikasi pemangku adat (Ketua KAN/Penghulu)	orang	NA	108		108		108		108		108		108		648		
	Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Adat	Pemberdayaan Lembaga Adat	Meningkatkan hubungan internasional antara pemuka masyarakat provinsi dengan tokoh adat, tokoh agama Kab/Kota	Jumlah Lembaga Adat yang Telah di Bina	Jumlah Lembaga Adat	18	18	380	18	-	18	34	18	37	18	41	18	53	108	53	Setda (Biro Binsos)
	Peningkatan Layanan Kehidupan Beragama	Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama	Koprdinasi Pelayanan terhadap pemberangkatan dan pemulangan Haji di Padang	Tingkat Kepuasan Terhadap Pemberangkatan dan Pemulangan Haji	%	100	100	1.800	100	21.503	100	668	100	740	100	818	100	795	100	795	Setda (Biro Binsos)
				Senra keagamaan yang representatif	%	40	45	-	50		55	12.031	60	12.276	65	12.190	70	12.379	70	12.379	
	Peningkatan Pemahaman penghayatan, Pengamatan, dan Pengembangan Nilai-Nilai Agama	Peningkatan Pemahaman penghayatan, Pengamatan, dan Pengembangan Nilai-Nilai Agama	Meningkatnya upaya pembinaan terhadap lembaga didikan Subuh se Sumatera Barat oleh Setda Prov Sumbar	Jumlah Lembaga didikan subuh yang terbina	Jumlah LDS	19	19	4.501	19	2.164	19	97	19	107	19	118	19	131	114	131	Setda (Biro Binsos)
				Peringkat Sumatera Barat pada Penyelenggaraan MTQ Nasional	peringkat sumbar pada MTQ Nasional	5	5	-	-	-	5	822	-	-	3	813	-	-	3	-	
				Peringkat Sumatera Barat pada Penyelenggaraan STQ Nasional	peringkat sumbar pada STQ Nasional	-	-	-	10		-	-	8	614	-	-	6	632	6	632	
	Pengembangan lembaga-lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan	Pengembangan lembaga-lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan	Meningkatnya sinkronisasi dan integrasi keagamaan kab/kota se sumbar	Jumlah Peserta Pelatihan Pengelolaan Barang atau Uang pada Rumah Ibadah	orang		60	340	60	252	76	34	76	37	76	41	76	20	424	20	Setda (Biro Binsos)
				Peningkatan kapasitas pengelola manajemen pondok pesantren/al-qur'an dan sekolah agama	%	NA	NA		19,71		19,71		20,18		20,18		20,18		20,18		
				Pondok al-qur'an yang memiliki seluruh cabang ilmu	Pondok Al-Qur'an	-	4		8		12		16		19		20		20		

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR		OPD PENANGGUNG JAWAB		
							2016		2017		2018		2019		2020					2021	
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)				Target	Rp. (Jt)
			Tenaga pengajar cabang ilmu Qur'an yang berkualitas (Tilawah, Tartil, qiraat, hafidzh 1 dan 5 juz, hafidzh 10 juz, 20 juz, 30 juz, tafsir bahasa inggris, tafsir bahasa arab, tafsir bahasa indonesia, syahril qur'an, fahmil qur'an)	orang	NA	80		160		240		320		400		480		480			
							38.580		611		639		671		704		740		740		
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	%	100	406	100	434	100	448	100	470	100	494	100	518	100	518	Setda (Biro Binsos)	
	Peningkatan Sarana dan sarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan sarana Aparatur	Terpenuhinya kebutuhan dan service mobil dinas Biro	persentase berfungsi sarana dan prasarana aparatur	%	100	100	100	41	100	110	100	115	100	121	100	127	100	127	Setda (Biro Binsos)	
			Kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik (zona hijau)	Zona		hijau		hijau		hijau		hijau		hijau		hijau		hijau			
	Peningkatan Disiplin Aparatur			Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	%	100		100	-	100		100		100		100		100		Setda (Biro Binsos)	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat	JPL/orang/ tahun	10		15	36	20		30		40		50		50		Setda (Biro Binsos)	
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terlaksananya penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan	Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD	%	100	74	100	74	100	81	100	85	100	90	100	94	100	94	Setda (Biro Binsos)	
			Nilai Evaluasi SAKIP SKPD	Predikat		BB		BB		BB		A		A		A		A			
			Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan	%		100		100		100		100		100		100		100			
			Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra SKPD	%		100		100		100		100		100		100		100			
			Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD	%		100		100		100		100		100		100		100			
		Perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dan asset							26											Setda (Biro Binsos)	
	Peningkatan Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik	Terseleenggaranya lanjutan kegiatan pembangunan masjid raya Sumatera barat			1	38.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Setda (Biro Binsos)	

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR		OPD PENANGGUNG JAWAB		
	TAHUN 2016	TAHUN 2017-2021	TAHUN 2016	TAHUN 2017-2021			2016		2017		2018		2019		2020		2021			Target	Rp. (Jt)
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)			
		TAHUN 2018-2021 :		TAHUN 2018-2021 :																	
		SETDA (BIRO BINTAL DAN KESRA)		SETDA (BIRO BINTAL DAN KESRA)						26.321		14.645		14.883		17.897		17.897			
		NON URUSAN								776		1.018		1.035		1.244		1.244			
		Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase pelayanan administrasi perkantoran	%				100	546	100	565	100	574	100	691	100	691	Setda (Biro Bintal & Kesra)		
		Peningkatan Sarana dan sarana Aparatur		persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	%				100	68	100	87	100	88	100	106	100	106	Setda (Biro Bintal & Kesra)		
				Kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik (zona hijau)	Zona				hijau		hijau		hijau		hijau		hijau				
				Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	%				100		100		100		100		100		Setda (Biro Bintal & Kesra)		
				Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat	JPL/orang/ tahun				20		30		40		50		50		Setda (Biro Bintal & Kesra)		
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat	JPL/orang/ tahun				20	85	30	107	40	108	50	130		130			
		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD	%				100	78	100	260	100	264	100	317	100	317	Setda (Biro Bintal & Kesra)		
				Nilai Evaluasi SAKIP SKPD	Predikat				BB		A		A		A		A				
				Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan	%				100		100		100		100		100				
				Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra SKPD	%				100		100		100		100		100				
				Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD	%				100		100		100		100		100				
		URUSAN PENDIDIKAN								150		98		100		120		120			
		Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Pendidikan		Jumlah guru SMA/SMK yang telah diberi pembinaan pendidikan Agama dan Adat	Jumlah Guru	75			117	150		-							Setda (Biro Bintal & Kesra)		
				Rumusan Kebijakan Pemerintah Daerah Bidang Pendidikan	Rumusan Kebijakan (SK/Pergub)						1	98	1	100	1	120	1	120			
		URUSAN SOSIAL								1.575		1.772		1.801		2.165		2.165			
		Koordinasi Bidang Kesejahteraan Sosial		Rumusan kebijakan penanganan masalah sosial, kesejahteraan sosial sdn rehabilitasi sosial dan penanggulangan bencana	Rumusan Kebijakan	2			2	1.575		-							Setda (Biro Bintal & Kesra)		
				Rumusan Kebijakan Pemerintah Daerah Bidang Kesejahteraan Sosial	Rumusan Kebijakan (SK/Pergub)						2	1.772	2	1.801	2	2.165	2	2.165			

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN												KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR		OPD PENANGGUNG JAWAB		
							2016		2017		2018		2019		2020		2021						
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)					
		TAHUN 2017 :		TAHUN 2017 :																			
	SETDA (BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN KERJASAMA RANTAU)	SETDA (BIRO KERJASAMA RANTAU)		SETDA (BIRO KERJASAMA RANTAU)			2.624		1.661		2.749		3.186		3.448		3.733		3.733				
	OTONOMI DAERAH, PEM. UMUM, ADM. KEU. DA, PERANGKAT DAERAH, KEPEG DAN PERSANDIAN					2.624		1.661		2.749		3.186		3.448		3.733		11.222					
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan Pemerintah Daerah	100	%	100%	414	100%	321	100%	535	100%	589	100%	689	100%	724	100%	724	Setda (Ro. Adm. Pemb. & Kerjasm Rantau)		
	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kualitas Pembangunan Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan Aparatur Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan Pemerintah Daerah	100	%		61		51		61		61		61		61		61	Setda (Ro. Adm. Pemb. & Kerjasm Rantau)		
	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kualitas dan Pengendalian Pembangunan	Meningkatnya kualitas pelayanan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan Pemerintah Daerah	100	%	100%	25	12 bulan	25	12 bulan	25	12 bulan	25	12 bulan	25	12 bulan	25	12 bulan	25	12 bulan	25	Setda (Ro. Adm. Pemb. & Kerjasm Rantau)
	Peningkatan Pengembangan Sitem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Meningkatnya kualitas Pelaporan dan Pengendalian Pembangunan	Meningkatnya kualitas Pelaporan dan Pengendalian Pembangunan	Meningkatnya kualitas Pelaporan dan Pengendalian Pembangunan	100	%	100%	91	100%	80	100%	91	100%	91	100%	91	100%	91	100%	91	100%	91	Setda (Ro. Adm. Pemb. & Kerjasm Rantau)
		Perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dan asset							48													Setda (Ro. Kerjasama Rantau)	
	Peningkatan Manajemen Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas Monev dan Pengendalian Pembangunan	Meningkatnya kualitas pelayanan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan Pemerintah Daerah	100	%	100%	1.359		-		1.363		1.746		1.908		2.158		2.158	Setda (Ro. Adm. Pemb. & Kerjasm Rantau)		
	Kerjasama Pembangunan	Meningkatnya hubungan dengan para perantau	Meningkatnya kerjasama antar Pemerintah dan Perantau	Meningkatnya kerjasama antar Pemerintah dan Perantau	100	%	100%	312		1.061		312		312		312		312		312	Setda (Ro. Adm. Pemb. & Kerjasm Rantau)		
	Pengembangan Data Dan Informasi	Meningkatnya kualitas Informasi Simbangda dan Informasi lainnya	Meningkatnya Informasi dan data Pembangunan di Sumbar	Meningkatnya Informasi dan data Pembangunan di Sumbar	100	%	100%	362		75		362		362		362		362		362	Setda (Ro. Adm. Pemb. & Kerjasm Rantau)		
		TAHUN 2018-2021 :		TAHUN 2018-2021 :																			
		SETDA (BIRO KERJASAMA RANTAU)		SETDA (BIRO KERJASAMA RANTAU)							2.749		3.186		3.448		7.489		7.489				
		NON URUSAN									1.460		948		1.026		2.228		2.228				
		Pelayanan Administrasi Perkantoran		Meningkatnya kualitas pelayanan Pemerintah Daerah	%	100				100	1.204	100	422	100	457	100	993	100	993		993	Setda (Biro Kerjasama dan Rantau)	
		Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur		Meningkatnya kualitas pelayanan Pemerintah Daerah	%	100					94		358		387		841		841		841	Setda (Biro Kerjasama dan Rantau)	

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR		OPD PENANGGUNG JAWAB		
							2016		2017		2018		2019		2020					2021	
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)				Target	Rp. (Jt)
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Meningkatnya kualitas pelayanan Pemerintah Daerah	%	100					12 bulan	62	12 bulan	41	12 bulan	44	12 bulan	96	12 bulan	96	Setda (Biro Kerjasama dan Rantau)
		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan		Meningkatnya kualitas Pelaporan dan Pengendalian Pembangunan	%	100					100	100	100	127	100%	137	100	298	100	298	Setda (Biro Kerjasama dan Rantau)
		PENUNJANG URUSAN : SEKRETARIAT DAERAH										1.289		2.238		2.422		5.261		5.261	
		Peningkatan Manajemen Pemerintah Daerah		Meningkatnya kualitas pelayanan Pemerintah Daerah	%	100					100	60	100	476	100	515	100	1.118	100	1.118	Setda (Biro Kerjasama dan Rantau)
		Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Meningkatnya sinergitas pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah	%	100					80		-		-		-			-	Setda (Biro Kerjasama dan Rantau)
		Kerjasama Pembangunan		Meningkatnya kerjasama antar Pemerintah dan Perantau	%	100					100	1.020	100	1.596	100	1.728	100	3.752	100	3.752	Setda (Biro Kerjasama dan Rantau)
		Pengembangan Data dan Informasi		Meningkatnya Informasi dan data Pembangunan di Sumbar	%	100					100	129	100	166	100	180	100	390	100	390	Setda (Biro Kerjasama dan Rantau)

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR		OPD PENANGGUNG JAWAB		
	TAHUN 2016	TAHUN 2017-2021	TAHUN 2016	TAHUN 2017-2021			2016		2017		2018		2019		2020		2021			Target	Rp. (Jt)
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)			
		TAHUN 2017 :		TAHUN 2017 :																	
	SETDA (BIRO ORGANISASI)	SETDA (BIRO ORGANISASI)		SETDA (BIRO ORGANISASI)			3.824		2.847,80		4.291		4.642		5.025		5.440		5.440		
	OTONOMI DAERAH, PEM. UMUM, ADM. KEU. DA, PERANGKAT DAERAH, KEPEG DAN PERSANDIAN	OTONOMI DAERAH, PEM. UMUM, ADM. KEU. DA, PERANGKAT DAERAH, KEPEG DAN PERSANDIAN					3.824		2.847,80		4.291		4.642		5.025		5.440		14.759		
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi dan operasional kantor	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	%		100	225	100	427,47	100	248	100	260	100	273	100	287	100	287	Setda (Biro Organisasi)
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase inventaris kantor dalam kondisi siap pakai	Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	%		100	97	100	66,55	100	106	100	112	100	117	100	123	100	123	Setda (Biro Organisasi)
				persentase kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik (zona hijau)	Zona		hijau		hijau		hijau		hijau		hijau		hijau		hijau		
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase PNS yang mengikuti Bintek	Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat	JPL/orang/ tahun		10	15	15	65,25	20	17	30	18	40	18	50	19	50	19	Setda (Biro Organisasi)
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase kewajiban pelaporan biro terpenuhi	Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD	%		100	149	100	176,72	100	164	100	172	100	181	100	190	100	190	Setda (Biro Organisasi)
				Nilai Evaluasi SAKIP SKPD	predikat		B		B		B		B		B		BB		BB		
				Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan	%		100		100		100		100		100		100		100		
				Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra SKPD	%		100		100		100		100		100		100		100		
				Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD	%		100		100		100		100		100		100		100		
		Program Perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dan asset							19,42		-		-		-		-		-		Setda (Biro Organisasi)
	Peningkatan Manajemen SDM Aparatur	Peningkatan Manajemen SDM Aparatur	Persentase PNS sekretariat daerah Provinsi Sumatera Barat	Persentase kesesuaian akurasi data PNS Setda dan Pemerintah Prov. Sumbar	%		50	594	60	231,01	70	669	80	745	90	837	95	930	95	930	Setda (Biro Organisasi)
				Persentase PNS yang dikembangkan karirnya di lingkungan Pemprov. Sumbar	%		40		50		60		70		80		90		90		
	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Provinsi dan SKPD Provinsi Sumatera Barat	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Provinsi dan SKPD Provinsi Sumatera Barat	Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Instansi Pemerintah yang Akuntabel (Skor hasil evaluasi AKIP)	Predikat		BB	485	BB	336,08	BB	546	BB	609	A	684	A	760	A	760	Setda (Biro Organisasi)

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR		OPD PENANGGUNG JAWAB		
							2016		2017		2018		2019		2020					2021	
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)				Target	Rp. (Jt)
				Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan	%					100		100		100		100		100			
				Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra SKPD	%					100		100		100		100		100			
				Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD	%					100		100		100		100		100			
		PENUNJANG URUSAN : SEKRETARIAT DAERAH																			
		Peningkatan Manajemen SDM Aparatur		Persentase kesesuaian akurasi data PNS Setda dan Pemerintah Prov. Sumbar	%					70	421	80	476	90	516	95	956	95	956	Setda (Biro Organisasi)	
				Persentase PNS yang dikembangkan karirnya di lingkungan Pemrov. Sumbar	%					60		70		80		90		90			
		Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Provinsi dan SKPD Provinsi Sumatera Barat		Instansi Pemerintah yang Akuntabel (Skor hasil evaluasi AKIP)	Predikat					BB	425	BB	432	A	468	A	867	A	867	Setda (Biro Organisasi)	
				Persentase SKPD yang telah mendapatkan nilai hasil evaluasi AKIP >=70	%					75		75		80		80		80		Setda (Biro Organisasi)	
		Manajemen Perubahan		Indeks Reformasi Birokrasi	Skor 1-100					60-70	100	65-75	358	65-75	388	75-80	720	75-80	720	Setda (Biro Organisasi)	
		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		Rata-rata Indeks kepuasan masyarakat (74 Unit kerja pelayanan publik)	%	70				75	387	75	394	75	427	80	791	80	791	Setda (Biro Organisasi)	
				Persentase Kepatuhan seluruh SKPD Provinsi terhadap Pelaksanaan UU Pelayanan Publik (Zona Hijau)	%	100				100		100		100		100		100			
		Penataan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah		Persentase SKPD yang menerapkan SOP secara baik	%					12	521	12	627	15	678	15	1.258	15	1.258	Setda (Biro Organisasi)	
		Penataan Kelembagaan Daerah Pemerintah Daerah		Persentase pembentukan perangkat daerah sesuai urusan	%					70	1.346	80	1.373	90	1.486	100	2.756	100	2.756	Setda (Biro Organisasi)	
				Persentase penurunan rincian tupoksi yang tumpang tindih	%					20		15		5		0		0			
				Persentase kab/kota yang besaran OPD-nya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku	%					20		15		5		0		0			

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR		OPD PENANGGUNG JAWAB		
	TAHUN 2016	TAHUN 2017-2021	TAHUN 2016	TAHUN 2017-2021			2016		2017		2018		2019		2020		2021			Target	Rp. (Jt)
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)			
		TAHUN 2017 :		TAHUN 2017 :																	
	SETDA (BIRO UMUM)	SETDA (BIRO UMUM)		SETDA (BIRO UMUM)			43.939	54.911,0	49.303	53.344	57.736	62.510	62.510								
	OTONOMI DAERAH, PEM. UMUM, ADM. KEU. DA, PERANGKAT DAERAH, KEPEG DAN PERSANDIAN	OTONOMI DAERAH, PEM. UMUM, ADM. KEU. DA, PERANGKAT DAERAH, KEPEG DAN PERSANDIAN					43.939	54.911,0	49.303	53.344	57.736	62.510	128.246								
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrai perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	%		100	12.895	100	16.626,1	100	14.470	100	15.656	100	16.944	100	18.346	18.346	Setda (Biro Umum)	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pelayanan Pemeliharaan	Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	%		100	23.248	100	29.654,3	100	26.087	100	28.225	100	30.549	100	33.075	33.075	Setda (Biro Umum)	
	Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan disiplin aparatur	Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	%		100	582	100	716	100	653	100	706	100	764	100	827	827	Setda (Biro Umum)	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya peningkatan Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya peningkatan Sumber Daya Aparatur	%		100	125	100	147,5	100	140	100	152	100	164	100	178	178	Setda (Biro Umum)	
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya tertib administrasi keuangan	Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD	%		100	394	100	357,6	100	442	100	478	100	517	100	560	560	Setda (Biro Umum)	
Nilai LAKIP SKPD (minimal BB)			Skor	Minimal BB	Minimal BB	Minimal BB	Minimal BB	A	A											Setda (Biro Umum)	
Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan			%	100	100	100	100	100	100												Setda (Biro Umum)
Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra SKPD			%	100	100	100	100	100	100												Setda (Biro Umum)
			Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD	%		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Setda (Biro Umum)
		Perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dan asset								194,8										Setda (Biro Umum)	
	Peningkatan Pelayanan Kedinasan	Peningkatan Pelayanan Kedinasan	Terpenuhinya penyediaan jasa pelayanan tamu pemerintah daerah	Terpenuhinya penyediaan jasa pelayanan tamu pemerintah daerah	%		100	5.737	100	5.008,1	100	6.438	100	6.965	100	7.539	100	8.162	8.162	Setda (Biro Umum)	
Terlaksananya peringatan hari-hari besar nasional				%	100	100	100	100	100	100											
	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah	Tingkat pengelolaan keuangan daerah pada unit SKPD	%		100	191	100	1.450,8	100	215	100	232	100	251	100	272	272	Setda (Biro Umum)	
Terpenuhinya intensifikasi penerimaan retribusi pengelolaan Istana Bung Hatta				%	100	100	100	100	100	100											
	Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik	Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Tingkat pelayanan keprotokolan	%		100	766	100	755,5	100	860	100	930	100	1.007	100	1.090	1.090	Setda (Biro Umum)	

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR		OPD PENANGGUNG JAWAB		
							2016		2017		2018		2019		2020					2021	
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)				Target	Rp. (Jt)
		TAHUN 2018-2021 :		TAHUN 2018-2021 :																	
		SETDA (BIRO UMUM)		SETDA (BIRO UMUM)							49.303	53.344		57.736		65.736		65.736			
		NON URUSAN									40.295	41.446		44.858		51.074		65.736			
		Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase pelayanan administrasi perkantoran	%					100	21.946	100	26.307	100	28.473	100	32.418	100	32.418	Setda (Biro Umum)	
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	%					100	16.577	100	13.325	100	14.422	100	16.421	100	16.421	Setda (Biro Umum)	
		Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	%					100	928	100	977	100	1.057	100	1.203	100	1.203	Setda (Biro Umum)	
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Terpenuhinya peningkatan Sumber Daya Aparatur	%					100	299	100	161	100	174	100	199	100	199	Setda (Biro Umum)	
		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD	%					100	545	100	676	100	732	100	833	100	833	Setda (Biro Umum)	
				Nilai LAKIP SKPD (minimal BB)	Skor					Minimal BB		Minimal BB		A		A		A		Setda (Biro Umum)	
				Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan	%					100			100		100		100		100		Setda (Biro Umum)
				Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra SKPD	%					100			100		100		100		100		Setda (Biro Umum)
				Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD	%					100			100		100		100		100		Setda (Biro Umum)
		PENUNJANG URUSAN : SEKRETARIAT DAERAH									9.008	11.898		12.878		14.662		14.662			
		Peningkatan Pelayanan Kedinasan		Terpenuhinya penyediaan jasa pelayanan tamu pemerintah daerah	%					100	5.699	100	8.669	100	9.383	100	10.683	100	10.683	Setda (Biro Umum)	
				Terlaksananya peringatan hari-hari besar nasional	%					100			100		100		100		100		Setda (Biro Umum)
		Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Tingkat pengelolaan keuangan daerah pada unit SKPD	%					100	2.430	100	2.322	100	2.513	100	2.861	100	2.861	Setda (Biro Umum)	
				Terpenuhinya intensifikasi penerimaan retribusi pengelolaan Istana Bung Hatta	%					100			100		100		100		100		Setda (Biro Umum)
		Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik		Tingkat pelayanan keprotokolalan	%					100	879	100	907	100	982	100	1.118	100	1.118	Setda (Biro Umum)	

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR		OPD PENANGGUNG JAWAB			
							2016		2017		2018		2019		2020					2021		
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)				Target	Rp. (Jt)	
		TAHUN 2017 :		TAHUN 2017 :																		
	SETDA (BIRO PENGELOLAAN ASET DAERAH)	SETDA (BIRO ADM.PEMBANGUNAN,PEN GADAAN DAN PENGELOLAAN ASET DAERAH)		SETDA (BIRO ADM.PEMBANGUNAN,PEN GADAAN DAN PENGELOLAAN ASET DAERAH)			6.112		4.875		6.858		7.420		8.031		8.695		8.695			
	OTONOMI DAERAH, PEM. UMUM, ADM. KEU. DA, PERANGKAT DAERAH, KEPEG DAN PERSANDIAN						6.112		4.875		6.858		7.420		8.031		8.695		21.794			
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrai perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	906	100	678	100	726	100	1.196	100	1.420	100	1.872	100	1.872	Setda (Biro Pengelolaan Aset Daerah)	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pelayanan Pemeliharaan	Tersedianya peralatan dan mesin penunjang operasional kantor beserta pemeliharannya	%		100	566	100	217	100	449	100	739	100	878	100	1.157	100	1.157	Setda (Biro Pengelolaan Aset Daerah)	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas SDM aparatur	Jumlah Pegawai yang ditingkatkan kompetensinya	orang/ tahun		100	51	100	50	100	53	100	87	100	103	100	136	100	136	Setda (Biro Pengelolaan Aset Daerah)	
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya tertib administrasi keuangan	Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD	%		100	126	100	122	100	92	100	152	100	181	100	238	100	238	Setda (Biro Pengelolaan Aset Daerah)	
				Nilai LAKIP SKPD (minimal BB)	Skor		C	BB		BB		BB		BB		A		A		A		
				Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan	%		100	100		100		100		100		100		100		100		
				Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra SKPD	%		80	100		100		100		100		100		100		100		
				Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD	%		80	100		100		100		100		100		100		100		
		Perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dan asset								162											Setda (Biro Adm.Pembanguna n, Pengadaan & Pengelolaan Aset Daerah)	
	Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik	Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik	Jumlah paket pengadaan yang selesai tepat waktu	Persentase penyelesaian proses pengadaan barang dan jasa tepat waktu	%		100	100	185	100	250	100	195	100	200	100	220	100	250	100	250	Setda (Biro Pengelolaan Aset Daerah)
			Jumlah anggota Pokja ULP yang ditingkatkan kompetensinya		Org/kali		200 orang, 1 kali	100 org, 2 kali	160													
	Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan kualitas proses administrasi Barang Milik Daerah	Persentase peningkatan kualitas proses administrasi Barang Milik Daerah	%		100	100	2.309	100	2.090	100	3.005	100	2.585	100	2.475	100	2.165	100	2.165	Setda (Biro Pengelolaan Aset Daerah)

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR		OPD PENANGGUNG JAWAB			
							2016		2017		2018		2019		2020					2021		
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)				Target	Rp. (Jt)	Target
	Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah	Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan tertib pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase peningkatan tertib pengelolaan Barang Milik Daerah	%	85	100	1.809	100	1.306	100	2.338	100	2.461	100	2.754	100	2.877	100	2.877	Setda (Biro Pengelolaan Aset Daerah)	
		TAHUN 2018-2021 :		TAHUN 2018-2021 :																		
		SETDA (BIRO ADM.PEMBANGUNAN, PENGADAAN DAN PENGELOLAAN ASET DAERAH)		SETDA (BIRO ADM.PEMBANGUNAN, PENGADAAN DAN PENGELOLAAN ASET DAERAH)								6.858		7.420		8.031		13.099		13.099		
		NON URUSAN										1.725		1.830		1.981		3.231		3.231		
		Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase pelayanan administrasi perkantoran	%	100						100	782	100	818	100	885	100	1.444	100	1.444	Setda (Biro Adm.Pembangunan, Pengadaan & Pengelolaan Aset Daerah)
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Tersedianya peralatan dan mesin penunjang operasional kantor beserta pemeliharannya	%							100	693	100	624	100	675	100	1.101	100	1.101	Setda (Biro Adm.Pembangunan, Pengadaan & Pengelolaan Aset Daerah)
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Jumlah Pegawai yang ditingkatkan kompetensinya	orang/ tahun							100	100	100	80	100	87	100	141	100	141	Setda (Biro Adm.Pembangunan, Pengadaan & Pengelolaan Aset Daerah)
		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD	%							100	150	100	309	100	334	100	545	100	545	Setda (Biro Adm.Pembangunan, Pengadaan & Pengelolaan Aset Daerah)
				Nilai LAKIP SKPD (minimal BB)	Skor	C						BB		BB		A		A		A		
				Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan	%	100						100		100		100		100		100		
				Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra SKPD	%	80						100		100		100		100		100		
				Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD	%	80						100		100		100		100		100		
		PENUNJANG URUSAN : SEKRETARIAT DAERAH										5.133		5.590		6.050		9.868		9.868		
		Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik		Persentase penyelesaian proses pengadaan barang dan jasa tepat waktu	%	100						100	195	100	1.445	100	1.564	100	2.551	100	2.551	Setda (Biro Adm.Pembangunan, Pengadaan & Pengelolaan Aset Daerah)
				Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor									>83								

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR		OPD PENANGGUNG JAWAB		
							2016		2017		2018		2019		2020					2021	
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)				Target	Rp. (Jt)
		Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Persentase peningkatan kualitas proses administrasi Barang Milik Daerah	%	100					100	2.905	100	2.095	100	2.268	100	3.698	100	3.698	Setda (Biro Adm.Pembangunan, Pengadaan & Pengelolaan Aset Daerah)
		Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah		Persentase peningkatan tertib pengelolaan Barang Milik Daerah	%	85					100	2.033	100	2.050	100	2.219	100	3.619	100	3.619	Setda (Biro Adm.Pembangunan, Pengadaan & Pengelolaan Aset Daerah)

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR		OPD PENANGGUNG JAWAB			
	TAHUN 2016	TAHUN 2017-2021	TAHUN 2016	TAHUN 2017-2021			2016		2017		2018		2019		2020		2021			Target	Rp. (Jt)	
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)				
		TAHUN 2017 :		TAHUN 2017 :																		
	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD		SEKRETARIAT DPRD			87.181		87.304		97.825		105.843		114.557		124.030		124.030			
	OTONOMI DAERAH, PEM. UMUM, ADM. KEU. DA, PERANGKAT DAERAH, KEPEG DAN PERSANDIAN						87.181		87.304		97.825		105.843		114.557		124.030		251.060			
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	%	92,90	100	14.293	100	11.231	100	15.758	100	16.546	100	17.373	100	18.241	18.241	Sekretariat DPRD		
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur untuk mendukung Kelancaran Tugas	Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	%	89,75	100	27.882	100	23.017	100	30.740	100	32.277	100	33.891	100	35.585	100	35.585	Sekretariat DPRD	
				Kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik (zona hijau)	Zona			hijau		hijau		hijau		hijau		hijau		100				
	Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatkan disiplin dan etos kerja Aparatur	Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	%	98,53	100	763	100	763	100	841	100	884	100	928	100	974	hijau	974	Sekretariat DPRD	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatkan kemampuan dan kualitas Sumber Daya Aparatur	Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat	JPL/orang/ tahun	63,67	10	724	15	164	20	798	30	838	40	880	50	924	100	924	Sekretariat DPRD	
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terlaksananya Tertib Administrasi Capaian Kinerja Keuangan	Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD	%	82,31	100	434	100	607	100	478	100	502	100	527	100	553	50	553	Sekretariat DPRD	
				Nilai Evaluasi SAKIP SKPD	Predikat			BB		BB		BB		A		A		A		100		
				Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan	%		100		100		100		100		100		100		100		A	
				Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra SKPD	%		100		100		100		100		100		100		100		100	
				Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD	%		100		100		100		100		100		100		100		100	
		Perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dan asset								539												
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Meningkatkan pemahaman Anggota DPRD terhadap tugas pokok dan fungsinya	Terlaksananya Pemahaman dan Penetapan rancangan APBD tepat waktu	Kali	20	20	43.085	20	49.609	20	49.210	20	54.797	20	60.958	20	67.751	120	67.751	Sekretariat DPRD	
				Jumlah Perda yang disetujui	Perda	13	19		19		19		19		19		19		114			
				Jumlah Rekomendasi yang diberikan DPRD untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Rekomendasi	2	3		3		3		3		3		3		18			
		Peningkatan pelayanan kedinasan								1.086												
		Pembinaan dan Pengembangan Aparatur								287												

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR		OPD PENANGGUNG JAWAB		
							2016		2017		2018		2019		2020					2021	
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)				Target	Rp. (Jt)
		TAHUN 2018-2021 :		TAHUN 2018-2021 :																	
		SEKRETARIAT DPRD		SEKRETARIAT DPRD							97.825		105.843		114.557		127.030		127.030		
		NON URUSAN									43.531		45.829		49.602		55.003		55.003		
		Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase pelayanan administrasi perkantoran	%	92,90				100	16.196	100	19.660	100	21.279	100	23.596		23.596	Sekretariat DPRD	
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	%	89,75				100	24.923	100	21.884	100	23.686	100	26.265	100	26.265	Sekretariat DPRD	
				Kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik (zona hijau)	Zona					hijau		hijau		hijau		hijau		100			
		Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	%	98,53				100	840	100	1.817	100	1.967	100	2.181	hijau	2.181	Sekretariat DPRD	
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat	JPL/orang/ tahun	63,67				20	649	30	838	40	907	50	1.006	100	1.006	Sekretariat DPRD	
		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD	%	82,31				100	923	100	1.629	100	1.764	100	1.956	50	1.956	Sekretariat DPRD	
				Nilai Evaluasi SAKIP SKPD	Predikat					BB		A		A		A		100			
				Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan	%					100		100		100		100		A			
				Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra SKPD	%					100		100		100		100		100			
				Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD	%					100		100		100		100		100			
		PENUNJANG URUSAN : SEKRETARIAT DEWAN									54.294		60.014		64.955		72.027		72.027		
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah		Terlaksananya Pemahaman dan Penetapan rancangan APBD tepat waktu	Kali	20				20	54.294	20	60.014	20	64.955	20	72.027	80	72.027	Sekretariat DPRD	
				Jumlah Perda yang disetujui	Perda	13				19		19		19		19		76			
				Jumlah Rekomendasi yang diberikan DPRD untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Rekomendasi	2				3		3		3		3		12			

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR		OPD PENANGGUNG JAWAB		
							2016		2017		2018		2019		2020					2021	
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)				Target	Rp. (Jt)
		TAHUN 2017 :		TAHUN 2017 :																	
	BADAN KESBANG POL	BADAN KESBANGPOL		BADAN KESBANGPOL			4.506		4.590		5.056		5.471		5.921		6.411		6.411		
	URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT					4.506		4.590		5.056		5.471		5.921		6.411		16.857		
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi dan operasional kantor	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	909	100	964	100	1.002	100	1.052	100	1.104	100	1.160	100	1.160	Badan Kesbangpol
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana aparatur	Persentase berfungsi sarana dan prasarana aparatur	%	100	100	132	100	83	100	145	100	153	100	160	100	168	100	168	Badan Kesbangpol
				Kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik (zona hijau)	Zona		hijau		hijau	-	hijau	-	hijau	-	hijau	-	hijau	-	hijau	-	
	Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	%	100	100	30	100	27	100	33	100	34	100	36	100	38	100	38	Badan Kesbangpol
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas SDM Aparatur	Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat	JPL/orang/ tahun		10	30	15	50	20	33	30	35	40	36	50	38	50	38	Badan Kesbangpol
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya capaian kinerja keuangan dan sistem pelaporan Kinerja SKPD	Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD	%	100	100	161	100	170	100	177	100	186	100	195	100	205	100	205	Badan Kesbangpol
				Nilai Evaluasi SAKIP SKPD	predikat		BB		BB		BB		A		A		A		A		
				Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
				Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra SKPD	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
				Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
		Perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dan asset							426												Badan Kesbangpol
	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Konflik Sosial	kasus	23	23	910	23	1.770	23	995	23	1.091	23	1.195	23	1.308	23	1.308	Badan Kesbangpol
	Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	Konflik SARA	konflik	0	0	787	0	525	0,0	860	0	943	0	1.034	0	1.132	0	1.132	Badan Kesbangpol
				Koordinasi antar pemuka dan tokoh umat beragama	Rakor/Pertemuan per tahun	2	2		2		2		2		2		2		2		
	Pendidikan Politik Masyarakat	Pendidikan Politik Masyarakat	Terwujudnya sistem dan budaya politik yang demokratis serta mantapnya hubungan supra dan infrastruktur politik	Peningkatan capaian indikator demokrasi Indonesia (IDI)	%	64,61	65,22	1.348	65,84	315	66,46	1.474	67,07	1.615	67,69	1.771	68,31	1.938	68,31	1.938	Badan Kesbangpol

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR		OPD PENANGGUNG JAWAB		
							2016		2017		2018		2019		2020					2021	
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)				Target	Rp. (Jt)
	Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)		Menurunnya kasus penyakit masyarakat	%	-	50	200	50	60	50	219	60	240	70	263	70	288	70	288	Badan Kesbangpol
				Pemahaman aparatur dan pihak terkait terhadap perbuatan maksiat																	
		Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba		Pemahaman aparatur dan pihak terkait terhadap bahaya narkoba	%	-	-	-	50	200	50	118	50	122	70	125	70	136	70	136	Badan Kesbangpol
		TAHUN 2018-2021 :		TAHUN 2018-2021 :																	
		BADAN KESBANGPOL		BADAN KESBANGPOL								5.056	5.471	5.921	10.446	10.446	10.446	10.446	10.446	10.446	
		NON URUSAN		NON URUSAN								1.390	1.940	2.100	3.704	3.704	3.704	3.704	3.704	3.704	
		Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase pelayanan administrasi perkantoran	%	100					100	1.002	100	1.052	100	1.139	100	2.009	100	2.009	Badan Kesbangpol
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase berfungsi sarana dan prasarana aparatur	%	100					100	145	100	133	100	144	100	254	100	254	Badan Kesbangpol
				Kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik (zona hijau)	Zona						hijau		hijau		hijau		hijau		hijau		
		Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	%	100					100	33	100	34	100	37	100	65	100	65	Badan Kesbangpol
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat	JPL/orang/ tahun						20	33	30	35	40	38	50	67	50	67	Badan Kesbangpol
		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD	%	100					100	177	100	686	100	742	100	1.310	100	1.310	Badan Kesbangpol
				Nilai Evaluasi SAKIP SKPD	predikat						BB		A		A		A		A		
				Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan	%	100					100		100		100		100		100		
				Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra SKPD	%	100					100		100		100		100		100		
				Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD	%	100					100		100		100		100		100		
												3.666	3.531	3.821	6.742	6.742	6.742	6.742	6.742	6.742	
		Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan		Konflik Sosial	kasus	23					23	995	23	1.091	23	1.181	23	2.083	23	2.083	Badan Kesbangpol
		Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan		Konflik SARA	konflik	0					0,0	860	0	943	0	1.021	0	1.801	0	1.801	Badan Kesbangpol
				Koordinasi antar pemuka dan tokoh umat beragama	Rakor/Pertemuan per tahun	2					2		2		2		2		2		

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR		OPD PENANGGUNG JAWAB			
							2016		2017		2018		2019		2020					2021		
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)				Target	Rp. (Jt)	Target
		Pendidikan Politik Masyarakat		Peningkatan capaian indikator demokrasi indonesia (IDI)	%	64,61					66,46	1.474	67,07	1.135	67,69	1.228	68,31	2.167	68,31	2.167	Badan Kesbangpol	
		Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)		Menurunnya kasus penyakit masyarakat	%	-				50	219	60	240	70	260	70	458	70	458	70	458	Badan Kesbangpol
				Pemahaman aparatur dan pihak terkait terhadap perbuatan maksiat	%					50		50		50		50		50		50		
		Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba		Pemahaman aparatur dan pihak terkait terhadap bahaya narkoba	%	-				50	118	50	122	70	132	70	233	70	233	70	233	Badan Kesbangpol

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR		OPD PENANGGUNG JAWAB				
	TAHUN 2016	TAHUN 2017-2021	TAHUN 2016	TAHUN 2017-2021			2016		2017		2018		2019		2020		2021			Target	Rp. (Jt)		
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)					
		TAHUN 2017 :		TAHUN 2017 :																			
	BPBD	BPBD		BPBD			13.049		6.261		14.642		15.842		17.147		18.564		18.564				
	URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT					13.049		6.261		14.642		15.842		17.147		18.564		43.127				
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	1.608	100	1.478	100	1.804	100	1.952	100	2.113	100	2.287	100	2.287	BPBD		
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya pelayanan pemeliharaan	Berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	%	100	100	1.428	100	541	100	1.602	100	1.733	100	1.876	100	1.850	100	1.850	BPBD		
	Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	%	100	100	45	100	32	100	50	100	55	100	59	100	64	100	64	BPBD		
	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumberdaya manusia aparatur	Terpenuhinya peningkatan sumber daya aparatur	%	100	100	80	100	52	100	90	100	97	100	105	100	114	100	114	BPBD		
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Meningkatnya tertib administrasi keuangan	Meningkatnya capaian kinerja keuangan dan sistem pelaporan SKPD	%	100	100	216	100	212	100	242	100	262	100	284	100	307	100	307	BPBD		
				Nilai LAKIP SKPD (minimal BB)		Skor	CC	BB		BB		BB		BB		A		A					
					Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan		%	100	100		100		100		100		100		100				
					Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra SKPD		%	100	100		100		100		100		100		100				
					Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD		%	100	100		100		100		100		100		100				
		Perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dan asset								52											BPBD		
	Peningkatan Mitigasi Bencana	Peningkatan Mitigasi Bencana	Meningkatnya mitigasi bencana (struktur dan non struktur)	Meningkatnya mitigasi bencana (struktur dan non struktur)	%	50	51	1.760	52	681	53	1.856	54	2.008	55	2.466	55	2.720	55	2.720	BPBD		
	Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	Meningkatnya kesiapsiagaan menghadapi bencana	Meningkatnya kesiapsiagaan menghadapi bencana	%	50	51	4.405	52	2.200	53	5.401	54	5.843	55	6.719	55	7.340	55	7.340	BPBD		
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebencanaan	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebencanaan	Meningkatnya sarana dan prasarana kebencanaan	Meningkatnya sarana dan prasarana kebencanaan	%	50	51	1.937	52	214	53	1.835	54	1.986	55	1.462	55	1.649	55	1.649	BPBD		
	Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Meningkatnya penanganan tanggap darurat bencana	Meningkatnya penanganan tanggap darurat bencana	%	70	71	800	72	-	73	898	74	971	75	1.051	75	1.138	75	1.138	BPBD		
	Pemulihan Daerah Pasca Bencana	Pemulihan Daerah Pasca Bencana	Meningkatnya pemulihan daerah pasca bencana	Meningkatnya pemulihan daerah pasca bencana	%	70	71	770	72	350	73	864	74	935	75	1.012	75	1.095	75	1.095	BPBD		
		Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam								450											BPBD		

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR		OPD PENANGGUNG JAWAB		
							2016		2017		2018		2019		2020					2021	
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)				Target	Rp. (Jt)
		TAHUN 2018-2021 :		TAHUN 2018-2021 :																	
		BPBD		BPBD							14.642		15.842		17.147		24.563		24.563		
		NON URUSAN									3.788		4.099		4.437		6.355		6.355		
		Pelayanan Administrasi Perkantoran		Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	%	100				100	1.804	100	1.952	100	2.113	100	3.027	100	3.027	BPBD	
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	%	100				100	1.602	100	1.684	100	1.823	100	2.611	100	2.611	BPBD	
		Peningkatan Disiplin Aparatur		Meningkatnya disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	%	100				100	50	100	55	100	60	100	85	100	85	BPBD	
		Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur		Terpenuhinya peningkatan sumber daya aparatur	%	100				100	90	100	97	100	105	100	150	100	150	BPBD	
		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Meningkatnya capaian kinerja keuangan dan sistem pelaporan SKPD	%	100				100	242	100	311	100	337	100	482	100	482	BPBD	
				Nilai LAKIP SKPD (minimal BB)	Skor	CC				BB		BB		A		A					
				Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan	%	100				100		100		100		100					
				Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra SKPD	%	100				100		100		100		100					
				Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD	%	100				100		100		100		100					
		URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT									10.854		11.743		12.710		18.208		18.208		
		Peningkatan Mitigasi Bencana		Meningkatnya mitigasi bencana (struktur dan non struktur)	%	50				53	1.856	54	2.007	55	2.172	55	3.112	55	3.112	BPBD	
		Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana		Meningkatnya kesiapsiagaan menghadapi bencana	%	50				53	5.401	54	5.844	55	6.325	55	9.061	55	9.061	BPBD	
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebencanaan		Meningkatnya sarana dan prasarana kebencanaan	%	50				53	1.835	54	1.986	55	2.150	55	3.079	55	3.079	BPBD	
		Penanganan Tanggap Darurat Bencana		Meningkatnya penanganan tanggap darurat bencana	%	70				73	898	74	971	75	1.051	75	1.506	75	1.506	BPBD	
		Pemulihan Daerah Pasca Bencana		Meningkatnya pemulihan daerah pasca bencana	%	70				73	864	74	935	75	1.012	75	1.450	75	1.450	BPBD	
		C. PENGELUARAN PEMBIAYAAN																			
		TOTAL	TAHUN 2016-2017 :			-	50.000	70.000	-	-	-	-	-	-	-	-	90.000				
		Penyertaan Modal					50.000	70.000									90.000				
		TOTAL	TAHUN 2018-2021 :			-	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000				
		Penyertaan Modal						20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000				

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR		OPD PENANGGUN G JAWAB		
							2016		2017		2018		2019		2020					2021	
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)				Target	Rp. (Jt)
	TAHUN 2016	TAHUN 2017-2021	TAHUN 2016	TAHUN 2017-2021																	
	TOTAL (A+B+C)																				
		TAHUN 2016-2017 :				-	4.824.203		6.245.977		-		-		-		7.075.093	-	7.075.093		
		TAHUN 2018-2021 :				-	-		-		6.796.828		7.438.138		8.145.306		8.923.030		8.923.030		

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Dalam penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berpedoman kepada indikator kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan nasional, antara lain RPJMN Tahun 2015-2019 yang ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015, Rencana Strategis Kementerian/Lembaga terkait, Standar Pelayanan Minimal (SPM).

8.1. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pengukuran keberhasilan rencana pembangunan jangka menengah daerah dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah periode 2016-2021 tercermin dari capaian indikator kinerja utama yang ditetapkan. Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan maka di pilih Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target capaian selama lima tahun ke depan menurut tujuan dan sasaran pada setiap misi yang disajikan dalam Tabel 8.1:

Tabel 8.1
Indikator Kinerja Utama Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021

No	INDIKATOR	TARGET					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Misi 1: Meningkatkan Tata Kehidupan Yang Harmonis, Agamais, Beradat, Dan Berbudaya Berdasarkan Falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah							
1.	Kenaikan zakat yang dikelola badan amil zakat (%)	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22
2.	Peningkatan pengumpulan nilai zakat, infak dan sadaqah (%)	10	10	10	10	10	10
3.	Peningkatan penduduk yang mendaftar dan mendapat porsi keberangkatan ibadah haji (%)	6	6	6	6	6	6
4.	Konflik dalam kelompok masyarakat benuansa Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) (jumlah kasus)	0	0	0	0	0	0
5.	Angka kriminalitas (%)	6,77	6,77	6,77	6,77	<6,77	< 6,77
6.	Lembaga adat dan agama yang melaksanakan peran dan fungsinya						
	- MUI (jumlah)	NA	4	4	4	4	4
	- KAN (jumlah)	163	190	217	244	272	299
Misi 2 : Meningkatkan Tata Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Profesional							
1.	Perangkat Daerah Provinsi menuju Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	2	4	6	6	6	6
2.	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3.	Instansi Pemerintah yang Akuntabel (Skor hasil evaluasi SAKIP)	BB	BB	BB	A	A	A
4.	Indeks e-Government Provinsi	2,2	2,4	2,6	2,8	2,9	3
5.	Keterbukaan Informasi Publik (skor)	55	60	65	70	75	80
6.	Keselarasn prioritas pembangunan provinsi dengan Nasional dan kabupaten/kota sesuai dengan potensi daerah (%)	80	82	84	86	88	90
7.	Pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi (%)	80	82	84	86	88	90
8.	Rata-rata Indeks kepuasan masyarakat (74 Unit kerja pelayanan publik)(%)	70	70	70	75	75	80
Misi 3: Meningkatkan Sumberdaya Manusia Yang Cerdas, Sehat, Beriman, Berkarakter Dan Berkualitas Tinggi							
1.	Indeks pembangunan manusia (indeks)	70,73	70,84	71,27	71,70	72,13	72,56
2.	Harapan lama sekolah (tahun)	13,94	14,17	14,40	14,63	14,86	15,09
3.	Rata-rata lama sekolah (tahun)	8,59	8,66	8,72	8,79	8,85	8,92

No	INDIKATOR	TARGET					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
4.	APM SMA/SMK/MA/ SMALB/ Paket C (%)	73,15	73,20	73,25	73,25	73,30	73,35
5.	Angka Putus SMA (%)	0,83	0,78	0,73	0,68	0,63	0,58
6.	Angka Putus SMK (%)	0,92	0,88	0,83	0,78	0,73	0,68
7.	Angka kelulusan SMA (%)	99,05	97,35	97,42	97,57	98,25	99,15
8.	Angka kelulusan SMK (%)	98,70	97,30	97,35	97,52	98,15	99,12
9.	Angka harapan hidup (tahun)	68,73	68,89	69,06	69,22	69,38	69,54
10.	LPP (Laju Pertumbuhan Penduduk) (%)	1,22	1,18	1,14	1,10	1,06	1,02
11.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94,68	94,76	94,84	94,92	95,00	95,08
12.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	62,02	62,10	62,18	62,26	62,34	62,42
Misi 4: Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kerakyatan yang tangguh, produktif, dan Berdaya Saing Regional dan Global, dengan Mengoptimalkan Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Pembangunan Daerah							
1.	Pertumbuhan ekonomi (%)	5,26	5,73	5,78	5,83	5,88	5,92
2.	PDRB (ADHB) per kapita (juta rupiah)	37,21	39,95	42,70	45,44	48,19	50,93
3.	Indeks Gini (indeks)	0,331	0,330	0,329	0,328	0,328	0,327
4.	Skor pola pangan harapan (%)	84	84,6	85,20	85,8	86,4	87
5.	Nilai Tukar Petani (%)	106,51	107,34	107,86	108,31	109,00	109,65
6.	Persentase Peningkatan Kawasan Sentra Produksi (Kawasan)						
	- KSP	97	97	97	100	101	104
	- Kawasan Agribisnis	8	8	8	8	9	10
7.	Kunjungan Wisatawan (% akumulasi peningkatan):						
	a. Nusantara	5,00	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00
	b. Mancanegara	7,50	15,00	22,50	30,00	37,00	44,50
8.	Penduduk Miskin (%)	7,14	6,81	6,48	6,15	5,83	5,50
9.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,09	6,46	6,25	6,03	5,82	5,60
10.	Kabupaten Tertinggal	3	3	3	2	1	1
Misi 5: Meningkatkan Infrastruktur dan Pembangunan Yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan							
1.	Kemantapan jalan provinsi (%)	69	70	71	72	73	74
2.	Rasio Angka Kecelakaan Lalulintas (Kematian per 10.000 registrasi kendaraan)	2,71	2,70	2,69	2,68	2,67	2,67
3.	Rata-rata Indeks kinerja infrastruktur irigasi provinsi	67,30	67,60	67,90	68,20	68,50	68,80
4.	Rasio elektrifikasi (%)	85	88	93,63	99,17	99,30	99,75
5.	Indeks kualitas lingkungan hidup	70,18	69,75	69,63	69,51	69,45	69,43
6.	Kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana (%)	71	72	73	74	75	75
7.	Rasio debit Minimum/debit Maksimum Air Sungai	0,12	0,13	0,14	0,15	0,16	0,17

8.2. INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah khususnya dalam pemenuhan kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan umum dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcome) atau kompositnya (impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2016-2021 yang telah direncanakan. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan publik dalam rangka perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Selanjutnya, indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi sosial. Aspek Pelayanan Umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur dasar baik secara fisik maupun sosial. Aspek Daya Saing Daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Indikator Kinerja Daerah Provinsi Sumatera Barat tersebut secara rinci disajikan pada tabel 8.2 :

TABEL 8.2
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sumber Data	Kondisi kinerja awal RPJMD (2015)	TARGET KINERJA					Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD (2021)
				2016	2017	2018	2019	2020	
A.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	BPS	5,52	5,26	5,73	5,78	5,83	5,88	5,92
2.	Inflasi (%)	BPS	0,85	5,02	5-6	5-6	5-6	5-6	5-6
3.	PDRB (ADHB) per kapita (Rp. Juta)	BPS	34,53	37,21	39,95	42,70	45,44	48,19	50,93
4.	Indeks Gini (Ratio)	BPS	0,319	0,331	0,330	0,329	0,328	0,328	0,327
6.	Penduduk Miskin (%)	BPS	6,71	7,14	6,81	6,48	6,15	5,83	5,50
7.	Tingkat pengangguran terbuka (%)	BPS	6,89	5,09	6,46	6,25	6,03	5,82	5,60
8.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	BPS	69,98	70,73	70,84	71,27	71,70	72,13	72,56
a.	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	BPS	8,42	8,59	8,66	8,72	8,79	8,85	8,92
b.	Angka Harapan Hidup (Tahun)	BPS	68,66	68,73	68,89	69,06	69,22	69,38	69,54
c.	Pengeluaran per Kapita (Ribu/Kapita/Tahun)	BPS	9 804	10.126	10.238	10.351	10.463	10.576	10.576
9.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Kemen.PPPA	94,74	94,68	94,76	94,84	94,92	95,00	95,08
10.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Kemen.PPPA	62,42	62,02	62,10	62,18	62,26	62,34	62,42
B.	ASPEK PELAYANAN UMUM								
I.	LAYANAN URUSAN WAJIB								
1.	Urusan Pendidikan (berdasarkan data pokok pendidikan)								
a.	APK PAUD/TK (%)	Kemen.Dikbud	69,50	68,15	70,25	72,18	74,60	76,20	77,50
b.	APM SD/SDLB/MI/ Paket A (%)	Kemen.Dikbud	95,72	99,58	99,59	99,60	99,61	99,62	100
c.	APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B (%)	Kemen.Dikbud	79,74	81,20	81,25	81,30	81,35	81,50	81,55
d.	APM SMA/SMALB/MA/Paket C (%)	Kemen.Dikbud	66,74	73,15	73,20	73,25	73,25	73,30	73,35
e.	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA/SMK (%)	Kemen.Dikbud	0,72	0,81	0,78	0,73	0,68	0,63	0,58
f.	Angka Kelulusan SMA(%)	Kemen.Dikbud	98,99	99,05	97,35	97,42	97,57	98,25	99,15
g.	Angka Kelulusan SMK (%)	Kemen.Dikbud	97,53	98,70	97,30	97,35	97,52	98,15	99,12
h.	SMA/SMALB/SMK yang terakreditasi (%)	Kemen.Dikbud	70,81	72,23	73,67	75,14	76,65	78,18	79,74
i.	Kompetensi tenaga pendidik (Guru SMA, SMK, PLB)(%)	Kemen.Dikbud	54,68	59,93	65,18	70,43	75,68	80,93	86,18
j.	Kompetensi tenaga kependidikan (Kepala sekolah dan pengawas sekolah, laboran, pustakawan dan pegawai TU Sekolah)(%)	Kemen.Dikbud	N.A	16,67	19,17	22,05	25,35	33,53	38,56
2.	Urusan Kesehatan								
a.	Rumah sakit provinsi terakreditasi (rumah sakit)		N.A	1 RSAM	4 RSAM, RSUD Solok, Pariaman RSJ HB Saanin,	4 RSAM, RSUD Solok, Pariaman RSJ HB Saanin	4 RSAM, RSUD Solok, Pariaman RSJ HB Saanin	4 RSAM, RSUD Solok, Pariaman RSJ HB Saanin	4 RSAM, RSUD Solok, Pariaman, RSJ HB Saanin

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sumber Data	Kondisi kinerja awal RPJMD (2015)	TARGET KINERJA					Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD (2021)
				2016	2017	2018	2019	2020	
	b. Kepesertaan sistem jaminan sosial nasional BPJS Kesehatan (%)	Dinkes	66,20	73,96	81,72	89,48	100	100	100
	c. Persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan (%)		87	87	88	89	90	90	90
	d. Kunjungan neonatal (KN1) (%)		76	76	87	88	89	90	90
	e. Prevalensi gizi kurang (berat badan/tinggi badan)		4,8	4,8	4,7	4,65	4,6	4,55	4,5
	f. Sarana air minum yang dilakukan pengawasan (%)		47,25	50	54	54	56	58	60
	g. Anak 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap (%)		74,1	91	91,5	92	92,5	93	94,5
	h. Jumlah Kabupaten/Kota dengan API (Annual Parasiet Indeks)		17	18	18	18	19	19	19
	i. Kabupaten/kota dengan inciden rate DBD < 49 per 100.000 penduduk (%)		42	42	64	66	68	70	72
	j. Jumlah puskesmas yang terakreditasi minimal1 per kecamatan		1	1	56	96	131	156	195
	k. Jumlah rumah sakit pemerintah yang terakreditasi minimal 1 per kabupaten/kota		1	2	3	4	4	4	5
3.	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
	a. Kemantapan jalan provinsi (%)	Dinas PU PR SK 2015 = 68	91,13	91,13*	71	72	73	74	75
	b. Rata-rata infrastruktur Indeks kinerja irigasi	Dinas PSDA	67,01	67,3	67,6	67,9	68,2	68,5	68,8
	c. Rumah tangga bersanitasi(%)	Dinas PU PR	72	72	73	75	78	79	80
	d. Rasio TPS per satuan penduduk		75,7	75,8	76,1	76,6	77,0	77,5	77,9
	e. Kesesuaian rencana pembangunan dengan rencana tata ruang (%)	Dinas PU PR	78	79	80,5	82	83	84	86
	f. Cakupan air minum (%)	Dinas PU PR	68	69	70	75	80	83	86
4.	Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman								
	a. Rasio rumah layak huni	Dinas Perkimtan	0,45	0,45*	0,47	0,49	0,50	0,51	0,52
	b. Rumah tangga pengguna listrik (PLN+non PLN) (%)	Dinas ESDM	83,20	84,54	96,6	97,1	98,0	98,8	99,5
	c. Rasio permukiman layak huni	Dinas Perkimtan	31,15	31,15*	33,80	34,70	35,50	36,60	37,70
	d. Penurunan kawasan kumuh (% akumulasi)	Dinas Perkimtan	16,5	15,5	15	14,5	13,5	12,5	11,5
5.	Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat								
	a. Indeks demokrasi Indonesia (IDI) di Sumatera Barat	BPS	67,46	65,22	65,84	66,46	67,07	67,69	68,31
	b. Lokasi rawan bencana yang siap menghadapi bencana (%)		50	51	52	53	54	55	56
	c. Kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana (%)		70	71	72	73	74	75	76
6.	Urusan Sosial								
	Peningkatan pelayanan PMKS (%)		16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99
7.	Urusan Ketenagakerjaan								
	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	BPS	64,56	67,08	64,80	64,92	65,04	65,16	65,28

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sumber Data	Kondisi kinerja awal RPJMD (2015) (Agustus)	TARGET KINERJA					Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD (2021)
				2016	2017	2018	2019	2020	
8.	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
a.	Jumlah kabupaten/kota layak anak	Kemen PPPA	6	7	8	9	10	11	12
b.	Keterwakilan politik perempuan di lembaga parlemen(%)	Dinas PPPA	10,77	10,77	10,77	10,77	10,77	10,77	10,77
c.	Rasio perempuan korban kekerasan per 100,000 penduduk (usia 18 tahun keatas)	Dinas PPPA	50	49	48	47	46	45	44
d.	Rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus per 100,000 anak (usia kandungan – 18 tahun)		394	392	390	388	386	384	382
9.	Urusan Pangan	Dinas Pangan							
a.	Ketersediaan pangan utama (ton beras)		1.433.975	1.495.356	1.512.953	1.530.178	1.546.987	1.563.350	1.578.984
b.	Penguatan cadangan pangan (ton)		50	22	100	100	100	100	675,58
c.	Penanganan daerah rawan pangan (%)		32 (nagari/desa)	0	20	40	60	80	100
d.	Ketersediaan Pangan (Kkal/kapita/th)		275,96	284,25	284,31	284,31	284,31	284,31	284,31
e.	Skor Pola Pangan Harapan(%)		83,80	84,30	84,6	85,20	85,8	86,4	87
10.	Urusan Lingkungan Hidup								
a.	Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Dinas LH	73,49	70,18	69,75	69,63	69,51	69,45	69,43
b.	Indek Kualitas Air (IKA)	Dinas LH	73,18	65,4	65,46	65,63	65,65	65,85	65,98
c.	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Dinas LH	88,5	82,90	82,90	82,9	83,05	83,20	83,58
d.	Indek Tutupan Hutan (ITH)	Dinas Kehutanan	63,55	63,65	63,11	62,69	62,27	61,84	61,41
11.	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
a.	Contraceptive prevalence rate CPR (Prevalensi pemakaian alat kontrasepsi) (%)		51,3	52,5	53,9	55,4	57	58,6	60,2
b.	Unmet need (Kebutuhan ber KB) (%)		9,1	8,3	7,6	7,0	6,6	6,2	5,8
c.	LPP (Laju Pertumbuhan Penduduk) (%)		1,26	1,22	1,18	1,14	1,10	1,06	1,02
12.	Urusan Perhubungan	Dinas Perhubungan							
a.	Jumlah arus penumpang angkutan umum (moda darat)		7.136.490	7.163.490	7.190.865	8.285.865	9.380.865	9.782.365	10.183.865
b.	Rasio angka kecelakaan lalulintas (jumlah kematian per 10.000 registrasi)			2,71	2,70	2,69	2,68	2,67	2,66
13.	Urusan Komunikasi dan Informatika								
a.	Perangkat daerah yang mengembangkan teknologi informasi (%)			100	100	100	100	100	100
b.	Tingkat pemanfaatan teknologi informasi pada perangkat daerah (%)			50	70	80	90	95	100

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sumber Data	Kondisi kinerja awal RPJMD (2015)	TARGET KINERJA					Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD (2021)
				2016	2017	2018	2019	2020	
14.	Usuran Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi							
	a. Pertumbuhan volume usaha koperasi sektor riil (%)	Dinas Koperasi	1,5	1,5	3	4,5	6	7,5	9
	b. Jumlah produk UMKM yang terstandarisasi (unit)	Dinas Koperasi	40	40	140	240	340	440	540
	c. Peningkatan usaha kecil binaan menjadi usaha menengah	Dinas Koperasi	1,5	1,5	3	5	6	8	9
	d. Pertumbuhan volume usaha simpan pinjam koperasi	Dinas Koperasi	1,2	1,2	2	4	5	6	7
	e. Pertumbuhan permodalan simpan pinjam koperasi	Dinas Koperasi	1,3	1,3	3	4	5	7	8
15.	Usuran Penanaman Modal	DPMPSTP							
	a. Jumlah nilai investasi (PMA) (US\$ ribu)		39.754,32	79.268,10	48.102,73	52.913,00	58.204,30	64.024,73	70.427,20
	b. Jumlah nilai investasi (PMDN) (Rp juta)		3.185.075,82	3.795.575,50	3.379.046,94	3.480.418,35	3.584.830,90	3.692.375,82	3.803.147,10
	c. Indeks kepuasan masyarakat (rasio)		3,16	3,18	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7
	d. Perizinan tepat waktu (%)	%	50	76,29	80	90	90	100	100
16.	Usuran Kepemudaan dan Olah Raga								
	a. Jumlah wirausaha muda baru		NA	38	40	45	50	55	60
	b. Organisasi kepemudaan yang aktif (%)		10	12	14	16	18	20	23
17.	Usuran Kebudayaan								
	a. Peningkatan jumlah warisan budaya tak benda (intangible) yang ditetapkan oleh pemerintah (%)		5	10	15	20	25	30	30
	b. Peningkatan jumlah warisan budaya benda (tangible) yang ditetapkan pemerintah (%)		NA	NA	10	15	20	25	25
18.	Usuran Perpustakaan	Dinas Perpustakaan & Kearsipan							
	a. Peningkatan jumlah kunjungan perpustakaan (rata-rata)		56.000	57.000	58.000	59.000	60.000	61.000	62.000
	b. Peningkatan jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan provinsi (eksemplar)		N/A	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
19.	Usuran Kearsipan								
	Tertib arsip (jumlah perangkat daerah)	SKPD	2	13	7	7	7	8	8
II.	Layanan Urusan Pilihan	DKP							
1.	Usuran Kelautan dan Perikanan								
	a. Produksi perikanan tangkap (ton)		217.027,90	217.950,10	220.586,80	223.256,40	225.957,10	228.691,40	231.458,60
	b. Produksi perikanan budidaya (ton)		286.711,58	318.249,85	354.084,79	398.444,21	444.265,29	496.422,04	556.489,11
	c. Peningkatan Produksi budidaya laut (ton)		218,30	220,00	224,00	228,00	233,00	238,00	242,00
	d. Tingkat konsumsi ikan (kg/kapita)		34,16	35,16	35,58	36,00	36,43	36,86	37,35

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sumber Data	Kondisi kinerja awal RPJMD (2015)	TARGET KINERJA					Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD (2021)
				2016	2017	2018	2019	2020	
2.	Urusan Pariwisata	Dinas Pariwisata							
	Jumlah kunjungan wisata:								
	a. Peningkatan Wisatawan Nusantara (% akumulasi)		6.973.678	5,00	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00
	b. Peningkatan Kunjungan Wisatawan Mancanegara (% akumulasi)		78.274	7,50	15,00	22,50	30,00	37,00	44,50
3.	Urusan Pertanian	Dinas Tnm Pangan Hortibun							
	a. Produksi Padi (Ton)		2.550.609	2.606.640	2.700.000	2.769.779	2.832.653	2.897.521	2.964.164
	b. Produksi Jagung (ton)		602.549	650.000	700.000	826.024	902.431	995.201	1.105.768
	c. Produksi Cabe (ton)		63.401,7	65.322	66.630	67.970	69.330	70.715	70.715
	d. Produksi Manggis (ton)		13.000	13.450	15.910	16.391	16.883	17.389	17.389
	e. Produksi Kakao (ton)		85.095	85.095	86.797	87.648	88.499	89.350	89.350
	f. Produksi Karet (ton)		152.526	154.05126	155.5765	157.10178	158.627	160.152	160.152
	g. Produksi Kopi (ton)		18.452	18.525	18.599	18.673	18.747	18.821	100
	h. Produksi Kelapa Sawit (Ton)		1.152.000	1.163.000	1.164.000	1.164.000	1.164.000	1.167.000	1.167.000
	i. Produksi daging (ton)	Disnak Keswan	63.565	64.341	65.301	66.354	67.509	68.766	70.223
	j. Produksi Telur (ton)	Disnak Keswan	78.023	78.563	79.320	80.220	81.298	82.612	84.297
	k. Produksi perikanan (ton)	DKP	504.002,51	536.199,95	574.671,59	617.352,27	665.374,55	719.696,46	781.875,27
	l. Kawasan Sentra Produksi (Unit)		119	121	125	128	138	147	154
	1. Pertanian (Tanaman Pangan dan Hortikultura)	DinasTnm Pangan Hortibun	60	60	60	60	65	70	75
	2. Perkebunan	DinasTnm Pangan Hortibun	30	32	34	36	38	40	40
	3. Peternakan	Disnak Keswan	14	14	16	18	20	22	24
	4. Perikanan	DKP	15	15	15	15	15	15	15
	m. Kawasan Agribisnis (Unit)		6	6	12	14	14	16	16
	1. Pertanian (Tanaman Pangan dan Hortikultura)		0	0	3	3	3	3	3
	2. Perkebunan		1	1	2	3	3	4	4
	3. Peternakan		0	0	1	1	1	1	1
	4. Perikanan/Minapolitan		5	5	6	7	7	8	8
	n. Jumlah Nagari Benih/bibit (Nagari)		61	66	73	79	83	88	92
	1. Pertanian (Tanaman Pangan dan Hortikultura)		60	64	68	72	76	80	84
	2. Perikanan		1	2	5	7	7	8	8
	o. Nilai sektor pertanian dalam PDRB		24,84	23,54	23,25	22,95	22,65	22,35	22,04
	Peningkatan kelas kelompok tani/pelaku utama (kelompok lanjut)		3.051	3.151	3.251	3.351	3.451	3.551	3.651
4.	Urusan Kehutanan	Dishut							
	a. Penurunan luas lahan kritis (Ha/Th) (%)		23,44	0,18	0,43	1,09	2,00	2,21	2,26

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sumber Data	Kondisi kinerja awal RPJMD (2015)	TARGET KINERJA					Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD (2021)
				2016	2017	2018	2019	2020	
	b. Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	BPS	1,35	1,28	1,25	1,22	1,19	1,15	1,11
	c. Penurunan Laju Kerusakan hutan (%)	Dishut	0,4	4,21	4,15	4,08	4,02	3,95	3,89
	d. Penurunan jumlah titik panas (hotspot) dari rerata angka periode tahun sebelumnya (%)	Dishut		5	10	15	20	25	30
5.	Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral	Dinas ESDM							
	a. Pertambangan tanpa izin (%)		5	4,88	4,18	3,47	2,85	2,47	1,86
	b. Rasio elektrifikasi		83,38	85	88	93,63	99,17	99,30	99,75
	c. Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB		4,86	4,92	5,07	5,20	5,29	5,37	5,50
	d. Pemanfaatan EBT terhadap potensi EBT (%)			12,33	12,84	14,46	16,88	20,10	23,32
6.	Urusan Perdagangan								
	a. Nilai sektor perdagangan dalam PDRB (Rp.triliun)	BPS	14,68	15,53	15,90	16,29	16,85	17,42	18,35
	b. Peningkatan nilai ekspor		(17,0)	1,5	1	2	2	2	2,5
	c. Nilai impor (US\$ jt)	BPS	632,79	642,80	655,65	668,76	674,13	687,61	701,36
	d. Persentase produk dan jasa yang diawasi sesuai dengan ketentuan		7,4	4,57	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
	e. - Peningkatan omset pasar rakyat		3	5,5	6,0	6,3	-	-	-
	- Peningkatan omset perdagangan		-	-	-	-	6,5	7,0	7,0
	f. Jumlah kasus sengketa konsumen yang diselesaikan (kasus)			275	275	275	275	275	275
7.	Urusan Perindustrian								
	a. Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB (%)	BPS	10,97	11,19	11,42	11,65	11,87	12,10	12,33
	b. - Jumlah IKM yang di fasilitasi sertifikasi standarisasi produk industri	Dinas Perindag	70	85	85	90	-	-	-
	- Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitasi sertifikasi, standarisasi dan peningkatan kualitas kemasan produk industri	Dinas Perindag	-	-	-	-	10	10	125
	c. - Jumlah IKM yang mendapat pelatihan dan pembinaan		648	652	672	675	-	-	-
	- Jumlah sentra industri yang dikembangkan			-	-	-	8	10	15
	- Peningkatan volume produksi melalui penggunaan teknologi tepat guna dan hilirisasi produk industri			-	-	-	4	5	6,25
III.	Fungsi Penunjang								
1.	Perencanaan								
	a. Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan tepat waktu		100	100	100	100	100	100	100
	b. Evaluasi dokumen perencanaan daerah (%)		100	100	100	100	100	100	100
2.	Penelitiandan Pengembangan	Balitbang							
	Penguatan sistem inovasi daerah (%)		50	65	75	80	85	90	95

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sumber Data	Kondisi kinerja awal RPJMD (2015)	TARGET KINERJA					Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD (2021)
				2016	2017	2018	2019	2020	
3.	Keuangan	Bakeuda							
	Pendapatan Asli Daerah (Rp. Juta)		1.754.687	1.894.690	2.039.474	2.199.120	2.376.894	2.569.768	2.779.096
4.	Fungsi Lainnya								
	a. Asset yang dikelola dengan baik (%)		75	80	85	85	90	90	95
	b. Tingkat kematangan implementasi SPIP (Sistem Pengawasan Intern Pemerintah) (level 1-5)		1	2	2	2	3	3	3
	c. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
C.	ASPEK DAYA SAING DAERAH								
	a. Produktifitas total daerah (Rp, Jt)		74,84	80,54	85,12	89,97	95,08	100,50	106,23
	b. Nilai Tukar Petani (NTP)	BPS	100,61	106,51	107,34	107,86	108,31	109,00	109,65
	c. Lama perijinan investasi (hari)		5	5	5	5	4	4	4

BAB IX

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, merupakan dokumen yang strategis sebagai acuan pembangunan Provinsi Sumatera Barat. Penyusunan RPJMD berpedoman kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005–2025, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032. Disamping itu juga memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, serta dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi Sumatera Barat, dan masukan dari beberapa kali konsultasi publik dan *Focus Group Discussion (FGD)*.

RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 disusun berdasarkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang memuat tujuan, sasaran, strategi pembangunan dan arah kebijakan umum, prioritas pembangunan dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah serta lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah.

9.1 PEDOMAN TRANSISI

Pada saat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2026 belum tersusun dan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD 2016 - 2021 berakhir, maka RPJMD 2016 - 2021 menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama dibawah kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) periode berikutnya dengan tetap berpedoman pada RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 dan RPJMN Tahun 2020-2025.

9.2 KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 merupakan panduan bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan dan merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dan Kota dalam menyusun RPJMD Kabupaten/Kota. Oleh karena itu konsistensi, kerjasama, transparansi dan inovasi serta rasa tanggung jawab yang tinggi diperlukan guna pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Gubernur Sumatera Barat berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 kepada masyarakat.
2. RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dilaksanakan dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah yang sepenuhnya dijalankan secara bersama dan diarahkan oleh Gubernur dalam kewajiban menyelenggarakan pemerintahan daerah;
3. Seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat dan seluruh pemangku kepentingan agar mendukung pencapaian target-target sebagaimana yang telah ditetapkan RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021;
4. Seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, seluruh pemangku kepentingan agar melaksanakan program-program yang tercantum di dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dengan sebaik-baiknya;

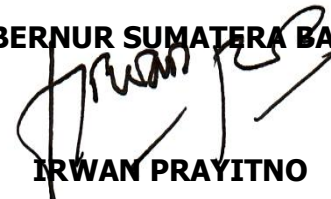
5. Seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi agar segera menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 pasca penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 ini;
6. Seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat dalam menyusun RPJMD Kabupaten/Kota harus mempedomani RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;
7. Penetapan target indikator kinerja daerah dalam RPJMD 2016-2021 dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan antara pemerintah daerah dengan DPRD;
8. RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun mulai Tahun 2016-2021.
9. Dalam hubungannya dengan keuangan daerah, keberadaan RKPD Provinsi Sumatera Barat merupakan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran berikutnya, yang sebelumnya dirumuskan kedalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
10. Program-Program yang dituangkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dilaksanakan secara operasional oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang didukung oleh instansi vertikal yang ada di Wilayah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta masyarakat termasuk dunia usaha.
11. Program-program dalam RPJMD adalah program yang harus diikuti dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

9.3 PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021, dipandang perlu melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021. Gubernur melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD dan indikator kinerja program pada setiap tahunnya dan lima tahunan atau akhir periode RPJMD.

Apabila dalam periode pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021 dihadapkan pada hal-hal di luar kendali Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, maka konsepsi strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali dan hasilnya harus dikonsultasikan kepada DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya.

GUBERNUR SUMATERA BARAT



IRWAN PRAYITNO